

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii

BAB I PENDAHULUAN	I-1
--------------------------------	-----

1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-5
1.3. Hubungan RKPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-6
1. RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Sumatera Selatan	I-7
2. RTRWN dengan RTRWP	I-8
3. RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018 dan RPJM Nasional 2015-2019	I-9
4. Rencana RKPD dan Kerja Pemerintah (RKP)	I-10
5. RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan RKPD 2016.....	I-11
6. RKPD dan Dokumen Renja SKPD	I-13
1.4 Maksud dan Tujuan	I-13
1.5 Sistematika RKPD	I-14

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	II-1
---	------

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1. Keadaan Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah.....	II-1
2.1.1.2 Kondisi Topografi	II-3
2.1.1.3 Kondisi Klimatologi.....	II-5
2.1.1.4 Kondisi Geologi	II-7
2.1.1.5 Kondisi Hidrologi	II-9
2.1.1.6 Penggunaan Lahan	II-11
2.1.1.7 Kondisi Geografi Lainnya	II-13
2.1.1.8 Kondisi Demografi	II-14
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-19
2.1.2.1. Pertumbuhan PDRB.....	II-19
2.1.2.2. Laju Inflasi	II-21

2.1.2.3. PDRB per Kapita	II-24
2.1.2.4. Rasio Gini	II-24
2.1.2.5. Indeks Ketimpangan Williamson.....	II-26
2.1.2.6. Kemiskinan.....	II-26
2.1.2.7. Millenium Development Goals (MDGs)	II-30
2.1.2.8. Pendidikan.....	II-38
2.1.2.8.1. Angka Melek Huruf	II-38
2.1.2.8.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	II-38
2.1.2.8.3. Angka Partisipasi Kasar	II-40
2.1.2.8.4. Angka Partisipasi Murni.....	II-41
2.1.2.8.5. Angka Pendidikan yang Ditamatkan.....	II-42
2.1.2.9. Kesehatan	II-43
2.1.2.9.1. Angka Harapan Hidup.....	II-43
2.1.2.9.2. Angka Kematian Ibu	II-44
2.1.2.9.3. Persentase Balita Gizi Buruk.....	II-48
2.1.2.10. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-49
2.1.2.11. Ketenagakerjaan	II-50
2.1.2.12. Seni Budaya dan Olahraga.....	II-51
 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum.....	II-53
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib	II-53
2.1.3.1.1. Pendidikan	II-53
2.1.3.1.1.1 Ketersediaan Sekolah.....	II-53
2.1.3.1.1.2 Rasio Guru-Murid.....	II-53
2.1.3.1.1.3 Angka Partisipasi Sekolah.....	II-55
2.1.3.1.1.4 Angka Kelulusan.....	II-56
2.1.3.1.2. Kesehatan.....	II-56
2.1.3.1.2.1 Rasio Puskesmas Per 30.000 Penduduk.....	II-58
2.1.3.2.1.2 Rasio Dokter per 100.000 penduduk	II-57
2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum.....	II-59
2.1.3.1.4 Perumahan	II-60
2.1.3.1.5 Penataan Ruang	II-61
2.1.3.1.6 Perencanaan Pembangunan	II-63
2.1.3.1.7 Perhubungan	II-64
2.1.3.1.7.1 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus.....	II-64
2.1.3.1.7.1.1 Terminal Bus	II-64

2.1.3.1.7.2 Perkeretaapian	II-65
2.1.3.1.7.3 Transportasi Sungai	II-67
2.1.3.1.7.4 Transportasi Udara	II-72
2.1.3.1.8 Lingkungan Hidup	II-73
2.1.3.1.9 Kependudukan dan Catatan Sipil	II-75
2.1.3.1.10 Sosial	II-76
2.1.3.1.11 Ketenagakerjaan	II-76
2.1.3.1.12 Penanaman Modal	II-77
2.1.3.1.13 Penanggulangan Bencana	II-80
2.1.3.1.14 Ketahanan Pangan	II-80
2.1.3.1.15 Komunikasi dan Informatika	II-80
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	II-82
2.1.3.2.1. Pertanian	II-82
2.1.3.2.2. Kehutanan	II-82
2.1.3.2.3. Energi dan Sumber Daya Mineral.....	II-83
2.1.3.2.4. Pariwisata	II-85
2.1.3.2.5. Kelautan dan Perikanan	II-85
2.1.3.2.6. Perdagangan.....	II-86
2.1.3.2.7. Perindustrian.....	II-87
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-90
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-90
2.1.4.1.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah.....	II-90
2.1.4.1.1.1 Pendapatan per Kapita	II-90
2.1.4.1.1.2 Pengeluaran Konsumsi per Kapita	II-90
2.1.4.1.2. Pertanian	II-91
2.1.4.1.2.1 Nilai Tukar Petani	II-91
2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-92
2.1.4.2.1. Perhubungan	II-92
2.1.4.2.1.1 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan.....	II-92
2.1.4.2.1.2 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	II-93
2.1.4.2.1.3 Jumlah Barang/Orang Melalui Dermaga/ Bandara/Terminal per Tahun	II-95
2.1.4.2.2. Penataan Ruang	II-98

2.1.4.2.2.1 Ketaatan terhadap RTRW	II-98
2.1.4.2.2.2 Luas Wilayah Produktif.....	II-99
2.1.4.2.2.3 Luas Kawasan Industri.....	II-100
2.1.4.2.3. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah.....	II-100
2.1.4.2.3.1 Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran	II-100
2.1.4.2.3.2 Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel	II-101
2.1.4.2.4. Lingkungan Hidup	II-102
2.1.4.2.4.1. Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih	II-102
2.1.4.2.5. Energi dan Sumber Daya Mineral.....	II-103
2.1.4.2.5.1 Rasio Ketersediaan Daya Listrik	II-103
2.1.4.2.5.2 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik.....	II-105
2.1.4.2.5.3 Persentase Penduduk yang Menggunakan Telepon Seluler.....	II-106
2.1.4.3. Fokus Iklim Investasi.....	II-107
2.1.4.3.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah	II-107
2.1.4.3.1.1 Angka Kriminalitas	II-107
2.1.4.3.1.2 Lama Proses Perijinan.....	II-108
2.1.4.3.1.3 Perkembangan Jumlah Izin Usaha	II-109
2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia	II-110
2.1.4.4.1. Ketenagakerjaan	II-110
2.1.4.4.1.1 Rasio Ketergantungan.....	II-110
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-111
2.2.1. Evaluasi Kondisi Makro Provinsi Sumatera Selatan	II-111
2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2014 sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-113
2.2.3. Evaluasi hasil Pelaksanaan Peencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan.....	II-117

2.3. Permasalahan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan	II-139
2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-139
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	II-148

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016	III-1
3.1.1. Analisis Perekonomian Global dan Nasional	III-1
3.1.2. Kondisi Ekonomi Daerah	III-12
3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah.....	III-26
3.1.4. Kekuatan, Masalah dan Tantangan Provinsi Sumatera Selatan.....	III-29
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-41
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-41
3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-43
3.2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	III-43
3.2.2.2 Dana Perimbangan	III-45
3.2.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	III-46
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-46
3.2.3.1 Belanja Tidak Langsung	III-47
3.2.3.2 Belanja Langsung	III-54
3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-59

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH IV-1

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
4.1.1. Tema dan Sub Tema Pembangunan.....	IV-5
4.2. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Sumatera Selatan.....	IV-30
4.2.1. Tahapan Pembangunan Sumatera Selatan	IV-30
4.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah 2016	IV-31
4.2.2.1. Prioritas 1: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	IV-40
4.2.2.2. Prioritas 2: Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya ...	IV-43
4.2.2.3. Prioritas 3: Penanggulangan Kemiskinan	IV-46
4.2.2.4. Prioritas 4: Pembangunan Pertanian	IV-47

4.2.2.5. Prioritas 5: Infrastruktur dan Energi	IV-48
4.2.2.6. Prioritas 6: Investasi dan Pengembangan Usaha	IV-50
4.2.2.7. Prioritas 7: Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Bencana	IV-51
4.2.2.8. Prioritas 8: Pengembangan Wilayah	IV-53
4.3. Sinkronisasi RKPD dengan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 .	IV-54
4.4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2016	IV-60
4.4.1. Prioritas 1: Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	IV-60
4.4.2. Prioritas 2: Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya	IV-67
4.4.3. Prioritas 3: Penanggulangan Kemiskinan	IV-74
4.4.4. Prioritas 4: Pembangunan Pertanian	IV-77
4.4.5. Prioritas 5: Infrastruktur dan Energi.....	IV-80
4.4.6. Prioritas 6: Investasi dan Pengembangan Usaha.....	IV-83
4.4.7. Prioritas 7: Pengelolaan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana.....	IV-84
4.4.8. Prioritas 8: Pengembangan Wilayah	IV-89

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016 V-1

5.1. Program dan Kegiatan Pendanaan Tahun 2016	V-3
5.1.1. Pendanaan APBD	V-12
5.1.2. Pendanaan APBN	V-12
5.1.3. Pendanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	V-64
5.1.4. Pendanaan Swasta.....	V-70
5.1.5. Kerjasama Pemerintah Swasta.....	V-71
5.2. Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2017 (Prakiraan Maju)	V-73
5.3. Rencana Program dan Kegiatan Per SKPD	V-84
1. Dinas Pendidikan	
2. Dinas Kesehatan	
3. RS. Dr. Ernaldi Bahar	
4. Dinas PU. Bina Marga	
5. Dinas PU. Pengairan	
6. Dinas PU. Cipta Karya	
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	

9. Badan Lingkungan Hidup
10. Dinas Sosial
11. Badan Penanggulangan Bencana daerah
12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
14. Badan Promosi dan Perijinan Penanaman Modal Daerah
15. Dinas Pemudaan dan Olahraga
16. Badan Kesbangpolinmas
17. Satuan Polisi Pamong Praja
18. Biro Pemerintahan
19. Biro Otonomi dan Kerjasama
20. Biro Hukum dan HAM
21. Biro Perekonomian
22. Biro Administrasi Pembangunan
23. Biro Kesejahteraan Rakyat
24. Biro Penghubung
25. Biro Organisasi dan Tata Laksana
26. Biro Humas dan Protokol
27. Biro Umum dan Perlengkapan
28. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
29. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
30. Dinas Pendapatan Daerah
31. Sekretariat DPRD
32. Inspektorat
33. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi daerah
34. Badan Pendidikan dan Pelatihan
35. Badan Kepegawaian Daerah
36. Sekretariat DP KORPRI
37. Badan Ketahanan Pangan
38. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
39. Badan Arsip Daerah
40. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)
41. Badan Perpustakaan Daerah
42. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura
43. Dinas Perkebunan
44. Dinas Peternakan

- 45. Badan Koordinasi Penyuluhan
- 46. Dinas Kehutanan
- 47. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 48. Dinas Pertambangan dan Energi
- 49. Dinas Kelautan dan Perikanan
- 50. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 51. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

BAB VI RENCANA PEMBANGUNAN BERDIMENSI KEWILAYAHAN VI-1

6.1.	Gambaran Kekuatan dan Potensi Wilayah	VI-1
6.2.	Konsentrasi dan Sebaran Spasial Sektor Unggulan Wilayah	VI-11
6.2.1.	Produksi Padi	VI-13
6.2.2.	Produksi Palawija	VI-14
6.2.3.	Produksi Holtikultura Sayuran.....	VI-15
6.2.4.	Produksi Holtikultura Buah-Buahan	VI-16
6.2.5.	Produksi Sapi dan Kerbau	VI-17
6.2.6.	Produksi Perikanan Budidaya	VI-18
6.2.7.	Produksi Karet	VI-19
6.2.8.	Produksi Kopi	VI-20
6.2.9.	Kelapa Sawit	VI-22
6.2.10.	Manufaktur	VI-23
6.2.11.	Pertambangan	VI-24
6.2.12.	Perdagangan	VI-25
6.2.13.	Angkutan dan Telekomunikasi	VI-26
6.2.14.	Keuangan	VI-27
6.3.	Peta Permasalahan Utama Pembangunan Berbasis Wilayah	VI-28
6.3.1.	Kesenjangan Ekonomi antar Wilayah	VI-28
6.3.2.	Kesenjangan Wilayah (Williamson Index)	VI-30
6.3.3.	Kesenjangan Pendapatan (Gini Ratio)	VI-32
6.3.4.	Kesenjangan Sosial	VI-33
6.3.5.	Kesenjangan Infrastruktur	VI-36
6.3.5.1.	Kesenjangan Infrastruktur Jalan	VI-37
6.3.5.2.	Kesenjangan Infrasktruktur Listrik	VI-38
6.3.5.3.	Kesenjangan Infrasktruktur Dasar	VI-38

6.4. Arah Kebijakan, Strategi dan Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota	VI-42
6.4.1. Konektivitas antar Wilayah Kabupaten/Kota	VI-43
6.4.1.1. Konektivitas Dengan Wilayah Sekitarnya	VI-44
6.4.1.2. Konektivitas antar Wilayah Kabupaten/Kota	VI-45
6.4.2. Pengembangan Kawasan Strategis	VI-49
6.4.3. Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan	VI-50
a. Pembangunan Perkotaan	VI-50
b. Pembangunan Perdesaan	VI-51
6.4.4. Pengembangan Daerah Perbatasan	VI-51
6.4.5. Pengembangan Tata Ruang Wilayah Provinsi	VI-52
 6.5. Arah Pengembangan 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota	VI-53
6.5.1. Kabupaten Ogan Komering Ulu.....	VI-56
6.5.2. Kabupaten Ogan Komering Ilir	VI-58
6.5.3. Kabupaten Muara Enim.....	VI-62
6.5.4. Kabupaten Lahat	VI-67
6.5.5. Kabupaten Musi Rawas	VI-70
6.5.6. Kabupaten Musi Banyuasin.....	VI-76
6.5.7. Kabupaten Banyuasin	VI-80
6.5.8. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.....	VI-87
6.5.9. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	VI-90
6.5.10. Kabupaten Ogan Ilir	VI-92
6.5.11. Kabupaten Empat Lawang.....	VI-97
6.5.12. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.....	VI-99
6.5.13. Kabupaten Musi Rawas Utara	VI-103
6.5.14. Kota Palembang	VI-108
6.5.15. Kota Prabumulih.....	VI-114
6.5.16. Kota Pagaralam	VI-119
6.5.17. Kota Lubuk Linggau	VI-121
 BAB VII PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Skenario Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016	I-4
Tabel 1.2. Sinkronisasi RPJPN dengan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan.....	I-7
Tabel 1.3. Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN	I-10
Tabel 1.4. Sinkronisasi RKP dengan RKPD	I-10
Tabel 1.5. Sinkronisasi RPJMD dengan Arah Kebijakan Provinsi Sumatera Selatan	I-11
Tabel 2.1. Luas Kabupaten dan Jumlah Kecamatan di Provinsi Sumsel 2015	II-2
Tabel 2.2. Sungai-Sungai Utama di Sumatera Selatan Tahun 2014	II-4
Tabel 2.3. Luas Daerah Rawa Pasang Surut di Sumatera Selatan Tahun 2013	II-5
Tabel 2.4. Jenis Batu Akik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015	II-9
Tabel 2.5. Pemanfaatan Lahan di Sumatera Selatan Tahun 2013	II-12
Tabel 2.6. Jumlah Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010-2013	II-15
Tabel 2.7. Luas Daerah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk (dalam ribu) Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013	II-18
Tabel 2.8. Jumlah Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Selatan, 2008-2013	II-19
Tabel 2.9. Andil Penyumbang Inflasi Sektor Transportasi Tahun 2014 di Provinsi Sumatera Selatan	II-23
Tabel 2.10. Indeks Williamson Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Selatan Tahun 2007-2011	II-26
Tabel 2.11. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014	II-29

Tabel 2.12.	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014	II-30
Tabel 2.13.	Rekap Capaian MDGs	II-31
	Rekapitulasi Score Card Capaian MDGs Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2014	II-32
Tabel 2.14.	Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013 (dalam tahun)	II-39
Tabel 2.15.	Angka Partisipasi Murni Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2012-2013	II-42
Tabel 2.16.	Jumlah Murid Yang Tamat Pendidikan Tingkat SD, SLTP, SMA dan SMK Tahun Ajaran 2007-2013	II-43
Tabel 2.17.	Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (tahun) Tahun 2008-2013	II-44
Tabel 2.18.	Angka Kurang Gizi Pada Balita di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2013	II-49
Tabel 2.19.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2008-2013	II-50
Tabel 2.20.	Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013	II-51
Tabel 2.21.	Angka Pengangguran di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013	II-51
Tabel 2.22.	Distribusi Guru Tingkat Pendidikan SD, SLTP, dan SLTA Negeri Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012/2013	II-54
Tabel 2.23.	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Tingkat Usia di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013	II-55
Tabel 2.24.	Angka Kelulusan Untuk Setiap Jenjang Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2013	II-56
Tabel 2.25.	Rasio Puskesmas Per 30.000 Penduduk Tahun 2008-2012 ...	II-58
Tabel 2.26.	Rasio Dokter Per 100.000 Penduduk Tahun 2008-2013	II-58

Tabel 2.27.	Percentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2008-2013	II-60
Tabel 2.28.	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan	II-63
Tabel 2.29.	Data Terminal di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013	II-64
Tabel 2.30.	Rute dan Panjang Rel PT. KA Divre III di Wilayah Sumbagsel	II-66
Tabel 2.31.	Jumlah Wilayah di Sekitar Sungai Di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2013	II-67
Tabel 2.32.	Daftar Dermaga Sungai dan Danau di Sumatera Selatan	II-69
Tabel 2.33.	Kondisi Bandar Udara di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2013	II-72
Tabel 2.34.	Penurunan Emisi GRK dari 6 Sektor di Sumatera Selatan Tahun 2013-2014	II-74
Tabel 2.35.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2011-2013 di Provinsi Sumatera Selatan	II-75
Tabel 2.36.	Jumlah Panti Asuhan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013	II-76
Tabel 2.37.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2008-2013	II-76
Tabel 2.38.	Jumlah Investor PMDN dan PMA di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013	II-77
Tabel 2.39.	Rekapitulasi Jumlah Perizinan dan Non Perizinan PTSP-BP3MD Prov. Sumatera Selatan Tahun 2009-2014	II-77
Tabel 2.40.	Penilaian Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumsel Tahun 2010-2013	II-78
Tabel 2.41.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009-2013	II-79
Tabel 2.42.	PeGI Tingkat Provinsi pada Tahun 2014	II-81
Tabel 2.43.	PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Tahun 2010-2014	II-84

Tabel 2.44.	Distribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku...	II-84
Tabel 2.45.	Data Kunjungan Wisatawan ke Provinsi Sumatera Selatan ...	II-85
Tabel 2.46.	Produksi Ikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2014 .	II-86
Tabel 2.47.	Konsumsi Ikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2014	II-86
Tabel 2.48.	Nilai Ekspor dan Impor Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2014 (US\$ miliar)	II-87
Tabel 2.49.	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Sumatera Selatan Tahun 2010-2014 Atas Dasar Harga Berlaku	II-87
Tabel 2.50.	Distribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Sumatera Selatan Tahun 2010-2014 Atas Dasar Harga Berlaku	II-89
Tabel 2.51.	Pendapatan Perkapita Provinsi Sumatera Selatan ADHB Dengan Migas dan Tanpa Migas Tahun 2009-2013	II-90
Tabel 2.52.	Distribusi Persentase Pengeluaran Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2012	II-91
Tabel 2.53.	Nilai Tukar Petani Tahun 2010-2014	II-91
Tabel 2.54.	Rasio Panjang Jalan/Jumlah Kendaraan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2012	II-93
Tabel 2.55.	Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2012	II-94
Tabel 2.56.	Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2012	II-95
Tabel 2.57.	Bongkar Orang dan Barang Melalui Pelabuhan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2012	II-96
Tabel 2.58.	Lalu Lintas Angkutan Udara Internasional Bandar Udara SMB II Tahun 2008-2012	II-97
Tabel 2.59.	Lalu Lintas Angkutan Udara Domestik Bandar Udara SMB II Tahun 2008-2012	II-97
Tabel 2.60.	Ketaatan Terhadap Perda RTRW	II-98

Tabel 2.61.	Banyaknya Rumah Makan/Restoran, Meja dan Kursi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013	II-101
Tabel 2.62.	Jumlah Hotel Berbintang dan Kamar di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013	II-102
Tabel 2.63.	Persentase Akses Air Bersih di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2013	II-103
Tabel 2.64.	Jumlah Unit dan Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik di Sumatera Selatan Tahun 2012	II-104
Tabel 2.65.	Capaian Kinerja Pembangunan Prioritas Energi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2012	II-105
Tabel 2.66.	Jumlah Kapasitas Daya Listrik yang Tersambung pada Rumah Tangga Tahun 2009-2013	II-106
Tabel 2.67.	Pengeluaran Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Akses Terhadap Teknologi Informasi /Komunikasi 2009-2013	II-107
Tabel 2.68.	Jumlah Tindakan Kejahatan pada Kejaksaan Tinggi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kejahatan Tahun 2012 dan Series 2008-2012	II-108
Tabel 2.69.	Rata-Rata Lama Waktu Pelayanan Perizinan Usaha di Provinsi Sumatera Selatan	II-109
Tabel 2.70.	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2010-2014	II-109
Tabel 2.71.	Angka Beban Tanggungan Provinsi Sumatera Selatan	II-110
Tabel 2.72.	Pencapaian Target Program Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018	II-118
Tabel 2.73.	Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional, Provinsi dan Lingkungan Eksternal Lainnya	II-164
Tabel 3.1.	Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2014	III-2
Tabel 3.2.	Sasaran Nasional RKP 2016	III-7
Tabel 3.3.	<i>Global Competitiveness Index Indonesia</i>	III-9

Tabel 3.4.	Peran Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional 1978-2013	III-10
Tabel 3.5.	Perkembangan Ekonomi Makro Sumatera Selatan Tahun 2013-2014	III-12
Tabel 3.6.	Capaian Sektor PDRB Provinsi Sumatera Selatan Menurut Lapangan Usaha	III-14
Tabel 3.7.	Pertumbuhan PDRB Sektoral Tahun 2015 Triwulan I	III-16
Tabel 3.8.	Perkembangan Nilai Eksport Komoditas Utama Provinsi Sumatera Selatan (Juta USD)	III-17
Tabel 3.9.	Perkembangan Nilai Impor Komoditas Utama Provinsi Sumatera Selatan (Juta USD)	III-18
Tabel 3.10.	Perkembangan Inflasi Triwulan I Tahun 2015	III-19
Tabel 3.11.	Indonesia Rasio Gini Provinsi Sumatera Selatan terhadap Nasional Tahun 2008-2013	III-20
Tabel 3.12.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	III-20
Tabel 3.13.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota ...	III-22
Tabel 3.14.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota	III-23
Tabel 3.15.	Elastisitas Kemiskinan/PDRB dan Elastisitas Pengangguran Terbuka/PDRB	III-25
Tabel 3.16.	Prediksi Ekonomi Makro di Provinsi Sumatera Selatan	III-26
Tabel 3.17.	Proporsi Eksport Sumatera Selatan, Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara Tujuan Eksport Tahun 2014-2015 (%)	III-27
Tabel 3.18.	Prediksi Pertumbuhan PDRB Sektoral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2016	III-28
Tabel 3.19.	Peringkat Indeks Daya Saing Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2015	III-30
Tabel 3.20.	Cadangan Batubara per Provinsi	III-31

Tabel 3.21.	Produksi Komoditas Perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan	III-32
Tabel 3.22.	Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara ke Provinsi Sumatera Selatan	III-33
Tabel 3.23.	Jumlah Objek Wisata di Provinsi Sumatera Selatan	III-34
Tabel 3.24	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Februari 2012-Februari 2015	III-35
Tabel 3.25.	Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Februari 2012-Februari 2015	III-36
Tabel 3.26.	Kerangka Pendanaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2017	III-42
Tabel 3.27.	Kerangka Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017	III-59
Tabel 3.28.	Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2016	III-60
Tabel 3.29.	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016	III-61
Tabel 4.1.	Sinkronisasi Agenda Nawa cita dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan	IV-3
Tabel 4.2.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan	IV-16
Tabel 4.2.	VIsi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018	IV-17
Tabel 4.3.	Keterkaitan antara Isu Penting dan Masalah Mendesak dengan Arah Kebijakan Pembangunan 2016	IV-34
Tabel 4.4.	Tabel Prioritas PRJM dan Prioritas RKPD 2016	IV-38
Tabel 4.5.	Sinkronisasi RKP dengan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016	IV-55

Tabel 4.6.	Sasaran, Indikator dan Target Tahun 2016 Prioritas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	IV-60
Tabel 4.7.	Sasaran, Indikator dan Target Tahun 2016 Prioritas Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya	IV-67
Tabel 4.8.	Sasaran, Indikator dan Target Tahun 2016 Penanggulangan Kemiskinan	IV-74
Tabel 4.9.	Sasaran, Indikator dan Target Tahun 2016 Pembangunan Pertanian	IV-77
Tabel 4.10.	Sasaran, Indikator dan Target Tahun 2016 Infrastruktur dan Energi	IV-80
Tabel 4.11.	Sasaran, Indikator dan Target Tahun 2016 Investasi dan Pengembangan Usaha	IV-83
Tabel 4.12.	Sasaran, Indikator dan Target Tahun 2016 Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Bencana	IV-84
Tabel 4.13.	Sasaran, Indikator dan Target Tahun 2016 Pengembangan Wilayah	IV-89
Tabel 5.1.1.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Untuk Misi Kesatu (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi) RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018	V-3
Tabel 5.1.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Untuk Misi Kedua (Meningkatkan Stabilitas Daerah) RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018	V-6
Tabel 5.1.3.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Untuk Misi Ketiga (Meningkatkan Pemerataan yang Berkeadilan) RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018	V-8
Tabel 5.1.4.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Untuk Misi Keempat (Pengelolaan Lingkungan yang Lestari dan Penanggulangan Bencana) RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018	V-11
Tabel 5.1.5.	Prioritas, Arah Kebijakan, Urusan dan Program Prioritas	V-12

Tabel 5.1.6	Prioritas Pada Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.....	V-39
Tabel 5.2.	Pagu SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju 2017.....	V-84
Tabel 5.3.	Rencana Program dan Kegiatan Per SKPD.....	V-86
Tabel 6.1.	Sebaran dan Luas Kawasan Gambut Menurut Kedalaman di Provinsi Sumatera Selatan	VI-2
Tabel 6.2.	Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi/Status di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014	VI-3
Tabel 6.3.	Cadangan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan	VI-6
Tabel 6.4.	Potensi Panas Bumi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009	VI-7
Tabel 6.5.	Sebaran Potensi Sumberdaya Air (Mini/Mikrohidro) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	VI-8
Tabel 6.6.	Sebaran PLTMH dan Daya Terpasangnya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 ..	VI-8
Tabel 6.7.	Arahan Pengembangan Wilayah Berdasarkan Karakteristik dan Unggulan Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	VI-9
Tabel 6.8.	Konsentrasi dan Sebaran Spasial Sektor Unggulan	VI-12
Tabel 6.9.	Zona Bangkitkan dan Tarikan Pergerakan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	VI-46
Tabel 6.10.	PDRB Sumsel Per Kab/Kota Berdasarkan ADHB dan ADHK Tahun 2013	VI-29
Tabel 6.11.	Indeks Williamson Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2007-2011	VI-30
Tabel 6.12.	Panjang Jalan, Luas Wilayah dan Kerapatan Jalan	VI-37
Tabel 6.13.	Prosentase Rumah Tangga Miskin Memiliki Sumber Listrik ...	VI-38
Tabel 6.14.	Prosentase Rumah Tangga Miskin Memiliki Akses Air Bersih .	VI-39
Tabel 6.15.	Prosentase Rumah Tangga Miskin dengan Akses Sanitasi Layak	VI-41
Tabel 6.16.	Alokasi Kegiatan Kabupaten Ogan Komering Ulu.....	VI-57

Tabel 6.17.	Alokasi Kegiatan Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	VI-65
Tabel 6.18.	Alokasi Kegiatan Kabupaten Muara Enim	VI-76
Tabel 6.19.	Alokasi Kegiatan Kabupaten Lahat	VI-84
Tabel 6.20.	Alokasi Kegiatan Kabupaten Musi Rawas	VI-95
Tabel 6.21.	Alokasi Kegiatan Kabupaten Musi Banyuasin	VI-105
Tabel 6.22.	Alokasi Kegiatan Kabupaten Banyuasin	VI-116
Tabel 6.23.	Alokasi Kegiatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	VI-130
Tabel 6.24.	Alokasi Kegiatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	VI-135
Tabel 6.25.	Alokasi Kegiatan Kabupaten Ogan Ilir	VI-146
Tabel 6.26.	Alokasi Kegiatan Kabupaten Empat Lawang	VI-154
Tabel 6.27.	Alokasi Kegiatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	VI-160
Tabel 6.28.	Alokasi Kegiatan Kabupaten Musi Rawas Utara	VI-165
Tabel 6.29.	Alokasi Kegiatan Kota Palembang	VI-171
Tabel 6.30.	Alokasi Kegiatan Kota Prabumulih	VI-225
Tabel 6.31.	Alokasi Kegiatan Kota Pagaralam	VI-229
Tabel 6.32.	Alokasi Kegiatan Kota Lubuk Linggau	VI-236

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Peta Administrasi Sumatera Selatan Tahun 2014.....	II-3
Gambar 2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Selatan 1980-2013	II-14
Gambar 2.3. Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Selatan dibandingkan Dengan Laju Pertumbuhan Nasional Tahun 2010-2013	II-16
Gambar 2.4. Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Provinsi Sumatera Selatan	II-17
Gambar 2.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi 2009-2014	II-20
Gambar 2.6. Perkembangan Inflasi Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional (%) Tahun 2009-2014	II-22
Gambar 2.7. Perkembangan PDRB per Kapita Sumatera Selatan dan Nasional (Rp.Juta) Tahun 2009-2014	II-24
Gambar 2.8. Perkembangan Rasio Gini Sumatera Selatan dan Nasional (%) Tahun 2008-2013	II-25
Gambar 2.9. Persentase Penduduk Miskin Sumatera Selatan dan Nasional (%) Tahun 2009-2014	II-27
Gambar 2.10. Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013	II-28
Gambar 2.11. Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013	II-29
Gambar 2.12. Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SD, SLTP dan SLTA	II-41
Gambar 2.13. Angka Kematian Ibu Tahun 2014 di Provinsi Sumatera Selatan	II-45
Gambar 2.14. Grafik Jumlah Kasus Kematian Ibu Tahun 2010-2014 di Provinsi Sumatera Selatan	II-46
Gambar 2.15. Grafik Target & Realisasi RPJMD Jumlah Kematian Ibu Tahun 2014-2018 di Provinsi Sumatera Selatan	II-46

Gambar 2.16.	Persentase Kelahiran yang ditolong Tenaga Kesehatan Tahun 2009-2013 di Provinsi Sumatera Selatan	II-57
Gambar 2.17.	Persentase Rumah Sakit yang dimanfaatkan Masyarakat Tahun 2010-2014 di Provinsi Sumatera Selatan	II-57
Gambar 2.18.	Jalur Kereta Api dan Stasiun di Sumatera Bagian Selatan ...	II-66
Gambar 4.2.	Pola Pikir Perencanaan Pembangunan Tahun 2016	IV-33
Gambar 6.1.	Sebaran Produksi Padi Kabupaten/Kota Tahun 2013	VI-14
Gambar 6.2.	Sebaran Produksi Palawija di Kabupaten/Kota Tahun 2013	VI-15
Gambar 6.3.	Sebaran Produksi Hortikultura Kabupaten/Kota Tahun 2013	VI-16
Gambar 6.4.	Sebaran Produksi Hortikultura Buah-buahan Kabupaten/Kota Tahun 2013	VI-17
Gambar 6.5.	Sebaran Populasi Ternak Sapi dan Kerbau di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013	VI-18
Gambar 6.6.	Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten/Kota Tahun 2013	VI-19
Gambar 6.7.	Sebaran Penghasil Karet di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013	VI-20
Gambar 6.8.	Sebaran Penghasil Kopi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013	VI-21
Gambar 6.9.	Sebaran Penghasil Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013.....	VI-23
Gambar 6.10.	Sebaran Industri di Kabupaten/Kota Tahun 2013	VI-24
Gambar 6.11.	Produksi Batubara di Sumatera Selatan Tahun 2014	VI-25
Gambar 6.12.	Jumlah Sarana Perdagangan Kabupaten/Kota	VI-26
Gambar 6.13.	Jumlah Mobil Penumpang Umum Kabupaten/Kota Tahun 2013	VI-27
Gambar 6.14.	Jumlah Koperasi di Kabupaten/Kota Tahun 2013	VI-28
Gambar 6.15.	Indeks Williamson Provinsi di Indonesia Tahun 2012	VI-31
Gambar 6.16.	Sketsa Hirarki Pusat-Pusat Pertumbuhan dan Hinterland	VI-44

Gambar 6.17.	Konsep Gerbang Pelabuhan dan Bandar Udara Internasional di Masa Depan	VI-45
Gambar 6.18.	Orientasi Pergerakan di Provinsi Sumatera Selatan	VI-48
Gambar 6.19.	Hirarki Fungsi Jalan di Provinsi Sumatera Selatan	VI-49
Gambar 6.20.	Arah Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu	VI-56
Gambar 6.21.	Arah Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ilir	VI-64
Gambar 6.22.	Arah Pengembangan Kabupaten Muara Enim	VI-75
Gambar 6.23.	Arah Pengembangan Kabupaten Lahat	VI-83
Gambar 6.24.	Arah Pengembangan Kabupaten Musi Rawas	VI-94
Gambar 6.25.	Arah Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin	VI-104
Gambar 6.26.	Arah Pengembangan Kabupaten Banyuasin	VI-115
Gambar 6.27.	Arah Pengembangan Kabupaten OKU Selatan	VI-129
Gambar 6.28.	Arah Pengembangan Kabupaten OKU Timur	VI-134
Gambar 6.29.	Arah Pengembangan Kabupaten Ogan Ilir	VI-145
Gambar 6.30.	Arah Pengembangan Kabupaten Empat Lawang	VI-153
Gambar 6.31.	Arah Pengembangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	VI-159
Gambar 6.32.	Arah Pengembangan Kabupaten Musi Rawas Utara	VI-164
Gambar 6.33.	Arah Pengembangan Kota Palembang	VI-170
Gambar 6.34.	Arah Pengembangan Kota Prabumulih	VI-224
Gambar 6.35.	Arah Pengembangan Kota Pagar Alam	VI-228
Gambar 6.36.	Arah Pengembangan Kota Lubuklinggau	VI-235

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1. Perkembangan Harga Minyak Brent Tahun 2014	III-3
Grafik 3.2. Tren Harga CPO 2011-2015	III-4
Grafik 3.3. Tren Harga Batubara 2011-2015	III-5
Grafik 3.4. Tren Harga Karet 2011-2015	III-6
Grafik 6.1. Perkembangan Gini Rasio Sumatera Selatan Hingga Tahun 2013	VI-33
Grafik 6.2. Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013	VI-34
Grafik 6.3. Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan (%) Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013	VI-34
Grafik 6.4. Tingkat IPM Kabupaten/Kota Tahun 2013	VI-35
Grafik 6.5. Tingkat Kemiskinan (%) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Selatan 2013	VI-36
Grafik 6.6. Tingkat Kemiskinan (%) Terhadap Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Sumatera Selatan 2013	VI-40
Grafik 6.7. Tingkat Kemiskinan (%) Terhadap Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Sumatera Selatan 2013	VI-42

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan setiap tahun menyusun RKPD sebagai acuan pembangunan daerah secara terencana dan berkesinambungan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 serta dokumen-dokumen perencanaan di tingkat pusat. Berbagai sumber daya dimobilisasi untuk pembangunan tersebut, dengan tetap berpegang kepada azas prioritas. Perencanaan dilaksanakan secara spesifik, terukur, didukung ketersediaan sumber daya, tepat waktu penyelesaiannya dan menyeimbangkan asas button up dan top down. Perencanaan tahun 2016 dibangun melalui proses antara lain: *e-Planning*, *Focus Group Discussion* (FGD), Forum SKPD, Musrenbang dan lain-lain.

Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) tahun 2014 menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator makro yang belum memenuhi target, yaitu pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi dari target RPJMD sebesar 6,0%, baru tercapai 4,68% di tahun 2014. Namun demikian Angka Gini Rasio masih relatif baik yaitu sebesar 0,38 dibandingkan angka Nasional sebesar 0,41. Sementara itu, angka kemiskinan masih 13,62% sedangkan target RPJMD adalah 13,37 %. Angka ini masih di atas angka nasional yang sudah dititik 10,96%. Kinerja penurunan angka pengangguran sudah cukup baik, dimana capaian tahun

2014 sudah mendekati target RPJMD yaitu sebesar 4,96% (target 4,86) dan dibawah angka nasional (5,70%).

Kondisi tersebut diatas antara lain dipengaruhi oleh kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Selatan yang sangat dipengaruhi kinerja ekspor dimana masih didominasi oleh ekspor bahan mentah sumber daya alam (bahan tambang, karet dan kelapa sawit). Turunnya harga komoditas ekspor unggulan Sumatera Selatan ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Keadaan ini diperberat oleh pertumbuhan ekonomi global yang masih belum stabil, dimana pemulihan ekonomi global lebih lambat dari perkiraan awal dan berlangsung tidak merata.

Di sisi lain, pencapaian IPM Provinsi Sumatera Selatan terus naik yaitu 74,36 pada tahun 2013, angka ini sudah diatas target RPJMD tahun 2013 yakni 73,99 dan sudah di atas capaian nasional sebesar 73,81. Hal tersebut antara lain didukung oleh dampak Program Sekolah Gratis dan Berobat Gratis di Sumsel sejak tahun 2008.

Dari hasil evaluasi pembangunan tahun 2014 dan memperhatikan kondisi tahun 2015 serta melihat perkembangan global maka, dapat diidentifikasi beberapa tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016, diantaranya adalah peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antar wilayah, pusat pertanian, pertambangan, pusat perdagangan dan objek wisata; penanggulangan kemiskinan; pembangunan industri hilir berbasis pertanian dan pertambangan sebagai antisipasi ketergantungan terhadap fluktuasi harga komoditas unggulan; pengelolaan lingkungan dan penanggulangan bencana akibat cuaca yang ekstrim. Selain itu isu-isu yang terkait masalah

pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan tetap menjadi prioritas tahun 2016.

Hal tersebut menjadi tantangan Sumsel untuk dapat menyusun RKPD tahun 2016 yang tajam dan efektif untuk mengatasi permasalahan, memanfaatkan potensi dan menangkap peluang yang ada. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 berada pada tahap penguatan dan percepatan dengan menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur strategis.

Dalam penyusunan RKPD, Provinsi Sumatera Selatan juga memperhatikan dan merespon permasalahan yang terjadi secara nasional. Hasil evaluasi kinerja pembangunan nasional tahun 2014 menunjukkan ada beberapa indikator yang belum tercapai yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, angka harapan hidup dan angka kematian bayi.

Permasalahan Nasional tersebut tidak terlepas dari masalah global yaitu masih rendahnya pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2014 yang hanya mencapai ± 3,3% (world bank). Merujuk berbagai permasalahan nasional dan daerah maka, peningkatan/pemulihan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan menjadi prioritas dengan menggerakan sektor-sektor strategis serta terobosan-terobosan untuk menurunkan angka pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan dalam RPJMD ditarget sebesar 6,25%. Pencapaian target ini didukung oleh mulai dilaksanakannya pembangunan infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api, pengaruh rencana penyelenggaraan Asian Games

yang akan meningkatkan investasi serta berfungsinya sebagian irigasi tersier di beberapa kabupaten/kota, yang akan meningkatkan produksi pertanian. Selain itu diharapkan membaiknya harga komoditas dunia, seperti batubara, minyak bumi, karet dan kelapa sawit, diharapkan dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi yang sudah ditetapkan. Skenario pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016, seperti digambarkan pada tabel berikut :

Tabel. 1.1. Skenario pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera
Selatan tahun 2016

Indikator	Satuan	Capaian				Proyeksi	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Pertumbuhan Ekonomi	%	6,36	6,75	5,47	4,68	6,13	6,25
ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	%	4,06	4,67	4,79	4,05	4,40	4,40
PDRB ADHK (Dengan Migas)	Juta Rupiah	206.361.083,56	220.295.092,79	232.353.628,70	243.228.567,09	258.131.617,83	274.264.363,01
Indeks Implisit	%	1,10	1,15	1,21	1,27	1,35	1,43
Nilai Investasi dengan migas (ADHK)	Juta Rupiah	50.133.328,58	65.071.823,13	57.760.387,01	44.043.500,47	65.543.617,15	70.951.813,30

Pendekatan pembangunan wilayah, yakni dengan memperhatikan keunggulan dan/atau kekhasan tiap-tiap daerah, juga menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan RKPD Provinsi Sumsel Tahun 2016. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman bahwa majunya daerah kabupaten/kota secara agregat merupakan kemajuan Provinsi, sebagaimana juga kemajuan daerah Provinsi secara agregat merupakan kemajuan Nasional.

Selain itu, dalam kerangka penyusunan RKPD Tahun 2016 juga memperhatikan kondisi khusus yaitu dalam tahun 2015 berlangsung Pilkada di 7 (tujuh) Kabupaten (Musi Rawas, Ogan Komering Ulu, OKU Selatan, OKU Timur, Ogan Ilir, Musi Rawas Utara, Penukal Abab Lematang Ilir). Oleh karenanya tahun 2016 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD ketujuh Kabupaten tersebut, sehingga penyusunan RKPD tahun

2016 yang dimulai prosesnya pada tahun 2015 ini tentu juga memperhatikan kesinambungan pembangunan pemerintahan yang baru di kabupaten tersebut.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9);

1.3. Hubungan RKPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa RKPD tidak dapat berdiri sendiri, namun harus terintegrasi dan bersinergi dengan dokumen perencanaan yang lain di daerah dan tingkat nasional. Hubungan RKPD

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Nasional. Mengacu kepada periodisasi pembangunan jangka panjang Nasional, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan. Sinkronisasi Misi RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan seperti tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel. 1.2. Sinkronisasi RPJPN dengan RPJPD Prov. Sumsel

RPJP NASIONAL	RPJP DAERAH PROVINSI SUMSEL
- Mewujudkan masyarakat berakhhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila	Mewujudkan kehidupan Masyarakat yang berkualitas
- Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing	
- Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan	
- Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum	Meningkatkan kapasitas manajemen kepemerintahan
- Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu	
- Mewujudkan Indonesia asri dan lestari	Meningkatkan pemanfaatan potensi Sumber daya alam guna penyediaan sumber energi dan pangan yang berkelanjutan
- Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional	Menjadikan Sumatera Selatan sebagai Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Regional
- Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.	

2. RTRWN dengan RTRWP

Keterkaitan dokumen perencanaan sebagai wujud sinkronisasi dan sinergi dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan di wilayah Sumatera Selatan dapat lebih terarah serta mampu mendorong percepatan pembangunan wilayah. Selain itu sinkronisasi dan sinergi antara dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang nasional juga diarahkan (1) mewujudkan ruang wilayah provinsi Sumatera Selatan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat; (2) memberikan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang; (3) meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; (4) meningkatkan keterpaduan perencanaan tata ruang kabupaten/kota dengan wilayah nasional dan provinsi; (5) mewujudkan keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi; (6) mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; serta (7) menjaga keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah serta keserasian kegiatan antarsektor dan antar SKPD; (8) mengurangi kesenjangan atau disparitas wilayah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (9) Meningkatkan Akses, pemerataan, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat; (10) Meningkatkan prasarana: jalan, energi listrik, telekomunikasi dan Sarana: pengairan irigasi, perumahan dan permukiman, dan sarana air bersih.

Dalam menyusun RKPD, selain berpedoman pada RTRWN dan RTWP, juga memperhatikan RTRW daerah/provinsi lain yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini adalah Provinsi:

Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung. Telaah terhadap RTRW provinsi yang berbatasan tersebut diarahkan untuk: (1) tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antarprovinsi; (2) keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan provinsi dan kabupaten/kota; (3) dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

3. RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018 dan RPJM Nasional 2015-2019

Pencapaian target RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018 harus memperhatikan capaian yang telah ditetapkan Dalam RPJM Nasional 2015-2019. Pencapaian target RPJMD secara langsung akan berpengaruh terhadap pencapaian target RPJM Nasional, karena itu sinkronisasi kedua dokumen ini menjadi penting untuk memastikan rencana pembangunan daerah tetap dalam koridor dan sinergis dengan rencana pembangunan Nasional, demikian sebaliknya arah kebijakan Nasional dapat memperkuat rencana pembangunan di daerah. Secara umum Keterkaitan antara RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada keterkaitan misi yang hendak dicapai, seperti digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel. 1.3. Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN

RPJMD PROV. SUMSEL 2013-2018	RPJMN 2015-2019
- Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (Prioritas pada : pertanian, infrastruktur dan energy, investasi dan pengembangan usaha)	- Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan yang Lestari dan Penanggulangan Bencana (Prioritas pada : pengelolaan lingkungan dan pengendalian bencana, pengembangan wilayah)	
- Memantapkan Stabilitas Daerah (Prioritas pada : tatakelola pemerintahan)	- Mewujudkan masyarakat maju, berkeséimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- Meningkatkan Pemerataan yang Berkeadilan (Prioritas pada : pendidikan, kesehatan, sosbud; penanggulangan kemiskinan)	<ul style="list-style-type: none"> - Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. - Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. - Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. - Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. - Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4. RKPD dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Dokumen RKP merupakan masukan bagi penyusunan prioritas RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 terutama menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan, serta kerangka pendanaan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Keterkaitan RKPD Tahun 2016 dan RKP Tahun 2016 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendukung Trisakti dan Nawa Cita. Keterkaitan antara RKP dan RKPD Provinsi Sumatera Selatan terlihat dari tabel berikut ini :

Tabel. 1.4. Sinkronisasi RKPD dengan RKP

RKPD 2016	RKP 2016
Tema : Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis	Tema : Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakan Pondasi Pembangunan yang Berkualitas
Prioritas Pembangunan :	Nawa Cita :
<ul style="list-style-type: none"> - Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kamtibmas 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman - Tata Kelola Pemerintahan - Reformasi sistem dan penegakan hukum
<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Wilayah - Pengelolaan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana - Pembangunan Pertanian - Infrastruktur dan Energi 	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun Indonesia dari Pinggiran Mewujudkan Kemandirian ekonomi
<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya - Penanggulaan Kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas hidup manusia dan masyarakat - Revolusi karakter bangsa - Memperteguh Kebhinnekaan dan - Memperkuat restorasi sosial
<ul style="list-style-type: none"> - Investasi dan Pengembangan Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Produktivitas rakyat dan daya saing

5. RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan RKPD 2016

Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang dalam RKPD tahun 2016 telah mengakomodir RPJMD tahun 2013-2018, dan sekaligus juga tetap memperhatikan dan mempedomani Kebijakan Daerah, Nasional maupun Internasional. Kebijakan Daerah, meliputi: 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025; 2) Hasil evaluasi pembangunan 2014-2015; serta 3) Asumsi capaian tahun 2015 yang sedang berjalan pada saat disusunnya RKPD tahun 2016.

Tabel. 1.5. Sinkronisasi Arah Kebijakan Prov. Sumsel dengan RPJMD

No	PRIORITAS RPJMD	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kamtibmas	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kamtibmas : a. Reformasi Birokrasi b. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat c. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah d. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
2	Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya	Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya : a. Meningkatnya Mutu dan distribusi Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kesehatan b. Meningkatkan akses pendidikan c. Meningkatkan akses kesehatan
3	Penanggulangan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan : a. Efisiensi dan Efektifitas Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan b. Pemerataan peningkatan pendapatan masyarakat
4	Pembangunan Pertanian	Pembangunan Pertanian : a. Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tukar Petani. b. Ekstensifikasi pertanian dan diversifikasi
5	Infrastruktur dan Energi	Infrastruktur dan Energi : a. Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi, sumber air bersih, sanitasi lingkungan b. Pembangunan jalur KA c. Pembangunan Pelabuhan d. Pengembangan Bandara e. Pembangunan infrastruktur pendukung KEK TAA f. Pembangunan pembangkit listrik
6	Investasi dan Pengembangan Usaha	Investasi dan Pengembangan Usaha : a. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah (hilirisasi) dan Pendapatan Industri Pengolah Hasil Pertanian dan Pertambangan serta Pariwisata b. Pengembangan UMKMK Terutama Dari Meningkatnya Akses Permodalan, Manajemen Usaha, Teknologi Produksi, Informasi dan Pemasaran c. Kerjasama riset unggulan dan optimalisasi pusat inovasi
7	Pengelolaan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Pengelolaan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana : a. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan b. Peningkatan daya dukung DAS dan pengelolaan DAS Terpadu c. Menurunkan emisi karbon
8	Pengembangan Wilayah	Pengembangan Wilayah : a. Peningkatan kerjasama antar wilayah perbatasan b. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan : KEK, Pusat Pengembangan kerbau rawa, Agrotechno Park, Science Techno Park Kebun Raya Sriwijaya, Palembang Metropolitan

6. RKPD dan dokumen RENJA SKPD

RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD yang memuat kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SKPD. Selanjutnya, RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 akan menjadi dasar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2016 dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 adalah memberikan pedoman dan arahan pembangunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018. RKPD juga akan menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2016, Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) Tahun 2016 dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 hingga ke Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2016. Kemudian dalam implementasinya RKPD tidak hanya akan didanai oleh keuangan daerah, namun juga akan didukung program pembangunan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun investasi swasta dan partisipasi masyarakat.

Tujuan disusunnya RKPD Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan bagi DPRD Provinsi Sumatera Selatan, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota di

Provinsi Sumatera Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2016 yang akan dibiayai dari APBD Provinsi, APBN dan Kementerian/Lembaga;

2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016;
3. Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antarSKPD, antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat;
4. Menyediakan tolak ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja tahunan setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
5. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, transparan, responsif, akuntabel dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
6. Menjadi acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, swasta dan masyarakat.

1.5 Sistematika RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 disusun mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang: (1) Latar Belakang, (2) Dasar Hukum Penyusunan, (3) Hubungan Antar Dokumen Perencanaan lainnya, (4) Maksud dan Tujuan, dan (5) Sistematika Dokumen RKPD.

II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Bab ini memuat tentang: (1) Gambaran Umum Kondisi Daerah; (2) Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD; (3) Evaluasi Sinkronisasi RKPD dengan RKP Tahun 2014; dan (4) Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memaparkan:(1) Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2016, Perkiraan dan Tantangan Pembangunan Ekonomi Daerah Tahun 2015; dan (2) Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

Bab ini menguraikan: (1) Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2016; (2) Tahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016; dan (3) Sinkronisasi RKPD dengan RKP Tahun 2016, (4) Prioritas dan Sasaran Pembangunan tahun 2016.

V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

(1) Program Prioritas tahun 2016. Bab ini memuat rincian program dan kegiatan pokok SKPD tahun rencana dengan indikator kinerja yaitu capaian program, keluaran kegiatan, hasil kegiatan disertai

pagu indikatifnya.Termauk program dan kegiatan pendanaan APBN dan CSR serta swasta. (2) Program Prioritas tahun 2017 (Perkiraan Maju).

VI. RENCANA PEMBANGUNAN BERDIMENSI KEWILAYAHAN

Bab ini memuat gambaran kekuatan dan potensi wilayah kabupaten/kota, konsentrasi dan sebaran spasial sektor unggulan wilayah kabupaten/kota, konektivitas antar wilayah kabupaten/kota, peta permasalahan utama pembangunan berbasis wilayah, serta arah kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan kabupaten/kota.

VII. PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Keadaan Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai posisi geografis terletak antara $1^{\circ} 37' 27''$ sampai $4^{\circ} 55' 17''$ Lintang Selatan dan antara $102^{\circ} 3' 54''$ dan $106^{\circ} 13' 26''$ Bujur Timur, yang berbatasan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, di sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung, di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung dan di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.

Dengan luas wilayah yang mencapai $91.806,36\text{ Km}^2$, Sumatera Selatan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 secara administratif dibagi menjadi 11 (sebelas) kabupaten dan 4 (empat) kota, serta 228 kecamatan. Namun kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013, Sumatera Selatan ditambah lagi dengan pembentukan masing-masing menjadi Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dan Pembentukan Musi Rawas Utara, sehingga Provinsi Sumatera Selatan secara administrasi menjadi 13 (tiga belas) Kabupaten dan 4 (empat) Kota dengan jumlah desa sebanyak 2.823 desa, 363 kelurahan dan 231 kecamatan.

Tabel 2.1.
Luas Kabupaten dan Jumlah Kecamatan di Provinsi Sumsel 2015

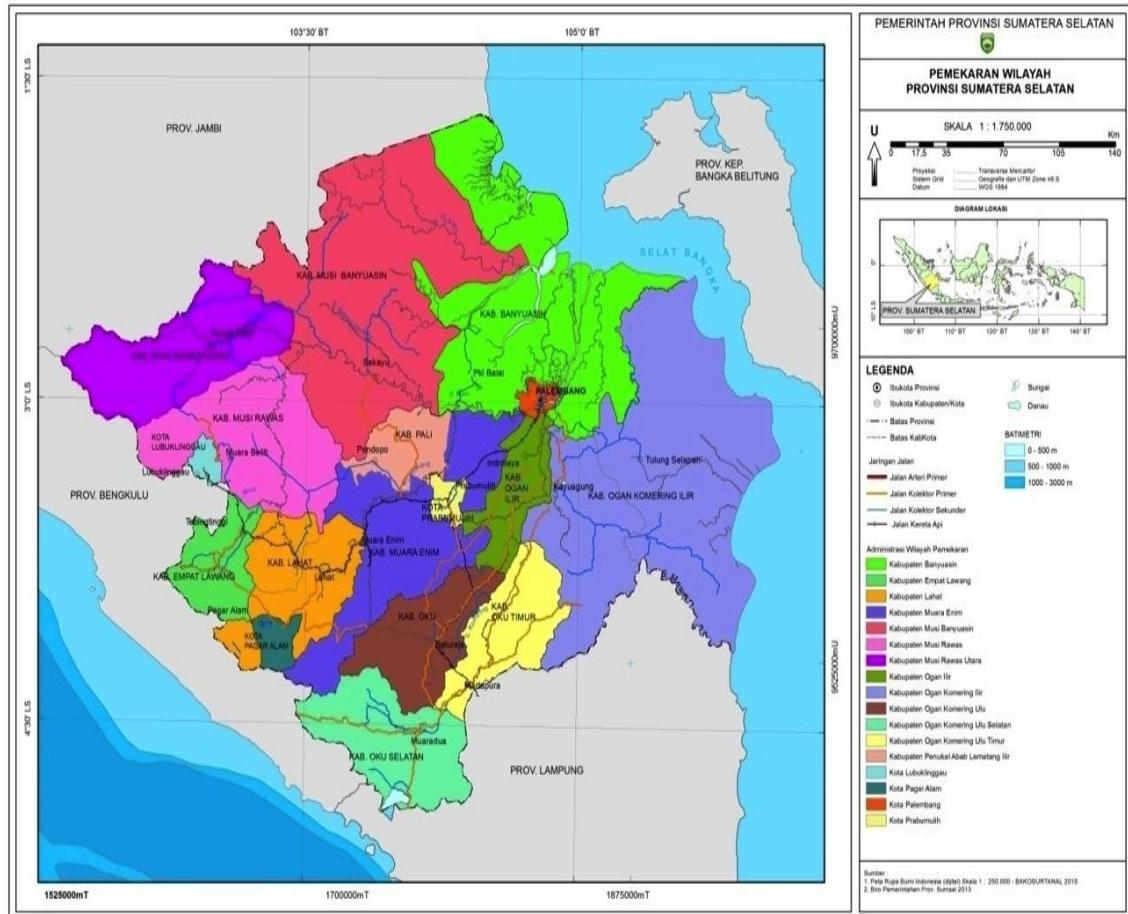
No	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Luas (Km2)
1	Banyuasin	19	11.832,99
2	Empat Lawang	10	2.256,44
3	Lahat	22	5.311,74
4	Lubuk Linggau	8	401,50
5	Muara Enim	20	7.383,90
6	Pali*	5	1.840,00
7	Musi Banyuasin	14	14.266,26
8	Musi Rawas	14	6.350,00
9	Musi Rawas Utara**	7	6.008,65
10	Ogan Ilir	16	2.666,07
11	Ogan Komering Ilir	18	18.359,04
11	Ogan Komering Ulu	12	4.797,06
13	OKU Selatan	19	5.493,94
14	OKU Timur	20	3.370,00
15	Pagar Alam	5	633,66
16	Palembang	16	400,61
17	Prabumulih	6	434,50
	TOTAL	231	91.806,36

Sumber : Luas berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2013

* Pemekaran dari Kabupaten Muara Enim

** Pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Sumatera Selatan Tahun 2014



Sumber : UPTB Penataan Ruang Bappeda Prov. Sumsel 2014

2.1.1.2. Kondisi Topografi

Provinsi Sumatera Selatan dilihat secara topografi berada pada wilayah yang bervariasi mulai pegunungan di bagian Barat dengan ketinggian rata-rata antara 900-1200 mdpl yang merupakan pegunungan Bukit Barisan. Pegunungan Bukit Barisan ini memiliki puncak-puncak dengan ketinggian tertinggi berada di Gunung Dempo dengan ketinggian 3.159 mdpl, kemudian Gunung Bungkuk dengan ketinggian 2.125 mdpl, Gunung Seminung dengan ketinggian 1.964 mdpl, dan Gunung Patah dengan ketinggian 1.107 mdpl. Sedangkan di bagian tengah merupakan

wilayah landai atau dataran rendah yang luas. Bagian Timur merupakan daerah pantai dan wilayah pesisir yang terdiri dari rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Panjang Kawasan Pesisir di Provinsi Sumsel ± 450 Km dari Sungai Benu (batas Provinsi Jambi) sampai Sungai Mesuji (batas Provinsi Lampung). Begitu juga kawasan pegunungan menjadi sumber air yang potensial bagi Sumatera Selatan. Air tersebut mengalir ke sembilan anak sungai yang dikenal dengan Batanghari Sembilan.

Tabel 2.2.

Sungai-sungai Utama di Sumatera Selatan Tahun 2014

No	Sungai	Panjang (Km)	Lebar (m)	Kedalaman (m)
1	Musi	8.887	50-200	5-6,5
2	Lematang	300	75	4-5
3	Ogan	350	50	1,5-5
4	Komering	360	-	4-5
5	Lakitan	150	55-60	3
6	Kelingi	80	50	2-3
7	Rawas	230	50	3-4,5
8	Batang Hari	250	40	8,5-10
9	Lalan	260	8,5-10	8,5

Sumber : Bidang Sarana Prasarana Bappeda Prov. Sumsel

Kebanyakan sungai-sungai di atas bermata air dari Bukit Barisan. Sungai yang bermata air dari Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Bangka adalah Sungai Musi beserta anak sungainya, seperti Sungai Ogan, Sungai Komering, Sungai Lematang, Sungai Kelingi, Sungai Lakitan, Sungai Rupit dan Sungai Rawas. Sungai Musi sendiri mengalir sampai ke Palembang dan membelah Kota Palembang menjadi dua kawasan yaitu Seberang Ilir di Utara dan Seberang Ulu di Selatan.

Wilayah Sungai yang ada di Sumatera Selatan yang ditetapkan berdasarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai (WS), terdiri dari : 1) WS Musi-Sugihan-Banyuasin dan Lemau, yang meliputi wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu dan Lampung; 2) WS Mesuji-Tulang Bawang yang meliputi wilayah Provinsi

Sumatera Selatan dan Lampung; 3) WS Dasal-Padang Guci meliputi wilayah Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung.

Sementara untuk wilayah rawa tersebar di 7 wilayah, yaitu di Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten OKI, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten OKU Timur dan Kota Palembang. Luas rawa mencapai 613.795 Ha berupa rawa pasang surut dan rawa lebak, dengan luasan rawa pasang surut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3.

Luas Daerah Rawa Pasang Surut di Sumatera Selatan Tahun 2013

No	Kabupaten/Kota	Jumlah (Ha)		
		Baku	Potensial	Fungsi
1	Musi Banyuasin	68.864	68.864	26.175
2	Banyuasin	337.883	298.561	112.033
3	OKI	83.088	81.643	32.789
4	Ogan Ilir	66.291	61.760	36.426
5	OKU Timur	10.800	9.800	2.443
6	Muara Enim	17.390	17.390	5.600
7	Palembang	640	640	400
Jumlah		566.926	520.628	209.866

Sumber : Data Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Prov. Sumsel

2.1.1.3. Kondisi Klimatologi

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai iklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan per hari 61,0/17-634,4/22 mm sepanjang tahun. Setiap bulan hujan cenderung turun dan bulan November merupakan bulan dengan curah hujan paling banyak. Provinsi Sumatera Selatan memiliki suhu yang cenderung panas berkisar antara 26,4°C hingga 27,8°C dengan rata-rata suhu udara sekitar 26,8°C. Suhu terendah/minimum terjadi pada bulan Agustus, sedangkan suhu tertinggi/maksimum terjadi pada bulan Juni, dimana merupakan salah satu pemicu timbulnya *hotspot* (titik api) yang menjadi faktor penyebab

terjadinya kebakaran hutan. Sedangkan kelembapannya bervariasi antara 81 sampai dengan 88 persen.

Perubahan iklim juga akan berperngaruh terhadap meningkatnya risiko penurunan produktivitas tanaman pangan. Kabupaten Banyuasin dan OKI memiliki risiko yang sangat tinggi dari penurunan luas sawah padi tada hujan, Muara Enim memiliki risiko yang sangat tinggi dari penurunan lahan kering, Musi Banyuasin dan Banyuasin memiliki risiko yang sangat tinggi dari penurunan luas pertanian jagung, dan OKU Timur dan Lahat memiliki risiko yang sangat tinggi dari penurunan luas pertanian kedelai. Selain itu, Musi Banyuasin, OKI, Muara Enim, Banyuasin, Lahat, dan OKU Timur memiliki risiko serius dari penurunan luas panen padi, jagung, dan kedelai.

Risiko perubahan iklim terhadap penurunan produktivitas padi sawah bervariasi dari rendah ke tingkat tinggi, kecuali untuk OKU Timur. Daerah ini memiliki potensi risiko yang tinggi penurunan produktivitas padi sawah, sedangkan Lubuk Linggau dan Pagar Alam memiliki tingkat risiko yang sangat rendah. Adapun untuk produktivitas jagung, Sumatera Selatan sangat rendah dengan tingkat resiko yang tinggi, kecuali untuk OKI yang memiliki potensi tingkat risiko sangat tinggi. Untuk produktivitas kedelai, Sumatera Selatan akan mengalami tingkat moderat dan resiko yang tinggi, kecuali untuk OKU Selatan, Lubuk Linggau, Pagar Alam, dan Palembang, tanpa risiko tingkat yang sangat tinggi.

Risiko dari perubahan iklim terhadap penurunan luas panen irigasi menunjukkan bahwa Sumatera Selatan memiliki potensi risiko penurunan luas panen padi irigasi pada tingkat rendah dan sangat rendah. Hanya beberapa kabupaten yang mengalami risiko penurunan luas sawah pada tingkat sedang dan tinggi, seperti OKU Timur (tingkat sedang), OKI (tingkat sedang), dan Banyuasin (tingkat tinggi).

2.1.1.4. Kondisi Geologi

Kondisi Geologi Provinsi Sumatera Selatan memberikan keuntungan dari potensi sumber daya alam. Hal ini dapat dilihat pada tatanan tektoniknya, wilayah Provinsi Sumatera Selatan menempati cekungan belakang busur Paleogen yang dikenal sebagai Cekungan Sumatera Selatan di bagian timur, dan mendala busur vulkanik yang membentang secara regional di sepanjang Bukit Barisan bagian barat. Kedua mendala tektonik ini terbentuk akibat adanya interaksi menyerong antara Lempeng Samudera Hindia di barat daya dan Lempeng Benua Eurasia di timur laut pada tersier. Pertemuan kedua lempeng bumi tersebut terletak di sepanjang Parit Sunda yang berada di lepas Pantai Barat Sumatera, dimana lempeng samudera menyusup dengan penunjaman miring -30° di bawah kontinen yang dikenal sebagai Paparan Sunda.

Jenis struktur yang umum dijumpai dicekungan Sumatera Selatan terdiri dari lipatan, sesar dan kekar. Struktur lipatan memperlihatkan orientasi barat laut-tenggara, melibatkan sikuen batuan berumur *Oligosen-Plistosen*. Sedangkan sesar yang ada merupakan sesar normal dan sesar naik. Sesar normal dengan pola kelurusan barat laut-tenggara tampak berkembang pada runtutan batuan berumur *Oligosen-Moisen*, sedangkan struktur dengan arah umum timur laut-barat daya, utara-selatan, dan barat-timur terdapat pada sikuen batuan berumur *Plio-Plistosen*. Sesar naik biasanya berarah barat laut-tenggara, timur laut-barat daya dan barat-timur, dijumpai pada batuan berumur *Plio-Plistosen* dan kemungkinan merupakan hasil peremajaan struktur tua yang berupa sesar tarikan.

Struktur rekahan yang berkembang memperlihatkan arah umum timur laut-barat daya, relatif tegak lurus dengan struktur regional atau sejajar dengan arah pergerakan tektonik di Sumatera. Pembentukan struktur lipatan, sesar dan kekar di cekungan Sumatera Selatan memberikan implikasi yang signifikan terhadap akumulasi sumber daya

minyak bumi, gas alam, batubara dan panas bumi. Kumpulan struktur lipatan yang membentuk *antiklinorium* telah banyak dijumpai berperan sebagai perangkap hidrokarbon. Selain struktur geologi, jenis litologi penyusun stratigrafi cekungan Sumatera Selatan telah pula mengontrol penyebaran sumberdaya energi fosil non fosil di wilayah ini.

Batuan yang mendasari Cekungan Sumatera Selatan merupakan kompleks batuan berumur pra-tersier, yang terdiri dari batu gamping, andesit, granodiorit, pilit, kuarsit dan granit. Jenis batuan yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan adalah (1) formasi Lahat terdiri dari endapan tufa, aglomerat, breksi tufan, andesit, serpih, batu lanau, batu pasir dan batubara; (2) formasi Talang Akar terdiri dari batu pasir berukuran butir kasar-sangat kasar, serpih, batu lanau dan batubara; (3) formasi Baturaja terdiri dari batu gamping terumbu, serpih gampingan dan napal atau batu lempung gampingan; (4) formasi Baturaja terdiri dari serpih gampingan dan serpih lempungan; (5) formasi Air Benakat dengan penyusun utama batu pasir; (6) formasi Muara Enim terdiri dari batu pasir, batu lanau, batu lempung dan batubara; dan (7) formasi Kasai terdiri dari batu pasir tufaan dan tufa.

Jenis bebatuan berdasarkan formasi tersebut, juga sangat berpengaruh terhadap kandungan batu akik yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dari 17 Kabupaten/Kota ada 8 Kabupaten/Kota yang memiliki batu akik khas masing-masing daerah yang sering digunakan sebagai souvenir bagi wisatawan lokal maupun asing dan akan menjadi souvenir di kegiatan Asian Games 2018 mendatang. Adapun jenis batu akik di 8 Kabupaten/Kota dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.4.
Jenis Batu Akik di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015

No	Kabupaten	Jenis Batu Akik
1	Lahat	1. Kecubung Wulung
2	Empat Lawang	1. Cabe-cabean 2. Lumut Merah 3. Lumut Biru 4. Pancawarna 5. Giok Empat Lawang
3	Musi Rawas	1. Teratai 2. Sakura 3. Lumut
4	Musi Rawas Utara	1. Red Muratara 2. Lavender Muratara 3. Giok Muratara
5	Ogan Komering Ulu	1. Blue Sky 2. Lavender 3. Sunkist 4. Biru Tinta
6	OKU Timur	1. Dewi Sri 2. Kecubung Ulung 3. Akar Asem 4. Pusar Bumi
7	Pagar Alam	1. Raje Mendare 2. Kuning Dempo 3. Lapis Dempo 4. Bulan-bulan Dempo
8	Lubuklinggau	1. Kecubung Air 2. Limau Manis

Sumber : South Sumatera Gemstone Festival 2015

2.1.1.5. Kondisi Hidrologi

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah kaya sumberdaya air dengan sumber air utama dari Sungai Musi, Sungai Ogan, Sungai Komering dan Sungai Lematang. Persediaan air di wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada dasarnya sangat tergantung dari sungai-sungai utama, yakni Sungai Musi dan anak-anak sungainya. Sebagian besar

sungai-sungai bermata air dari Bukit Barisan, kecuali Sungai Mesuji, Sungai Lalan dan Sungai Banyuasin. Sungai yang bermata air dari Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Bangka adalah Sungai Musi beserta anak sungainya, seperti Sungai Ogan, Sungai Komering, Sungai Lematang, Sungai Kelingi, Sungai Lakitan, Sungai Rupit dan Sungai Rawas.

Air sungai di Sumatera Selatan pada umumnya berwarna keruh dan membawa endapan lempung (*suspended materials*). Hal ini disebabkan salah satunya oleh kegiatan penebangan pohon-pohon (hutan) yang tidak terkendali sehingga terjadi erosi di daerah hulu dan sedimentasi di sepanjang aliran sungai. Kondisi ini selanjutnya berakibat pada pendangkalan aliran sungai dan pergeseran pola aliran sungai.

Air permukaan merupakan sumber daya air yang paling strategis karena dapat dimanfaatkan langsung untuk berbagai keperluan makhluk hidup. Air permukaan dapat langsung digunakan sebagai sumber bahan baku keperluan manusia, hewan, industri, dan kebutuhan lainnya. Keberadaan air permukaan sangat dipengaruhi oleh dimensi ruang dan waktu.

Keberadaan air permukaan di wilayah WS Musi juga dipengaruhi keberadaan lebak, embung dan rawa. Sebagian besar wilayah merupakan dataran aluvial sehingga ketinggian tanahnya relatif seragam. Kondisi yang datar demikian menyebabkan pengaturan air kurang lancar sehingga timbul daerah genangan pada wilayah yang ketinggiannya hampir sejajar sungai. Lebak yang berada di wilayah ini fluktuasi luasannya sangat tinggi bila dibandingkan antara musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan yang mencapai puncaknya genangan lebak sampai 500.000 Ha, sedang pada musim kemarau yang panjang genangan lebak tinggal 5.000 Ha.

Ketergantungan masyarakat yang tinggal di sepanjang pinggiran sungai terhadap keberadaan sungai tersebut masih sangat besar terutama dalam memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari. Malahan masih banyak penduduk yang memanfaatkan air sungai sebagai sumber air

bersih. Mereka mengambil air dari sungai kemudian diendapkan atau ditambahkan kaporit, kemudian langsung digunakan sebagai air untuk dimasak atau pada saat musim hujan mereka menampung air hujan untuk dijadikan air minum. Kebiasaan ini sudah terjadi secara turun menurun sejak dahulu. Hanya saja dulu air sungai masih belum terlalu tercemar. Saat ini penggunaan air sungai tanpa pengolahan khusus akan sangat berbahaya bagi kesehatan, karena pencemaran sungai sudah sangat tinggi.

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Sumatera Selatan merupakan bagian dari usaha mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan untuk menunjang kehidupan manusia; menjaga keragaman habitat biologi; menyediaan sumber bahan mentah, energi dan mineral; mengatur perubahan iklim; mendorong pengendalian sampah dan polusi; menyediakan ruang kehidupan; menjadi penghubung spasial bagi mobilitas orang dan barang; dan menyimpan dan melindungi berbagai warisan sejarah. Penggunaan lahan di Sumatera Selatan sangat menentukan dan saling mempengaruhi dengan pola kegiatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Penetapan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan terkait dengan ketersediaan potensi sumber daya lahan yang cukup variatif, mulai dari lahan sawah irigasi, tada hujan, rawa pasang surut, lebak dan lahan kering. Selain juga memiliki komoditas unggulan lain seperti jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, komoditas sayuran dan buah-buahan. Berbagai upaya dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya lahan yang tersedia secara keseluruhan melalui upaya peningkatan pelayanan jaringan irigasi dan rawa, penggunaan bahan baku, peningkatan keterampilan petani dan kemampuan petani

mengakses modal perbankan, dan pengembangan penggunaan alat mesin pertanian.

Penetapan Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung energi akan mendorong optimalisasi pengelolaan lahan untuk memanfaatkan potensi sumber daya energi Sumatera Selatan seperti minyak bumi, gas bumi, batubara dan panas bumi untuk penyediaan energi bahan bakar, rumah tangga dan industri. Selain itu, pembangunan koridor ekonomi dan kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-api juga memerlukan lahan yang luas sehingga mengubah penggunaan lahan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan lumbung pangan, lumbung energi, koridor ekonomi dan kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-api antara lain adalah meningkatnya lahan kritis, meningkatnya alih fungsi lahan, maraknya penimbunan rawa, rusaknya daerah hutan mangrove dan pesisir, banyaknya tambang galian C liar dan pembalakan hutan, meningkatnya konflik kepemilikan lahan, serta meningkatnya spekulasi lahan yang menyebabkan harga lahan tinggi.

Tabel 2.5.
Pemanfaatan Lahan di Sumatera Selatan Tahun 2013

No	Jenis Lahan	2011	2012	2013	% 2013
1.	Lahan Sawah	818.766 Ha	800.615 Ha	781.595 Ha	8%
2.	Lahan Bukan Sawah (Perkebunan, Hutan Rakyat, dll)	4.923.374 Ha	6.103.004 Ha	6.211.905 Ha	67%
3.	Lahan Bukan Pertanian (Bangunan, Hutan Negara, Rawa, dll)	3.438.496 Ha	2.277.017 Ha	2.187.136 Ha	24%
	Jumlah	9.180.636	9.180.636	9.180.636	100%

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 (data diolah)

Pemanfaatan lahan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013 di dominasi oleh lahan perkebunan dan hutan rakyat dengan total

persentase sebesar 67% dari total lahan yang dapat dimanfaatkan di Provinsi Sumatera Selatan.

Tantangan dalam lima tahun mendatang adalah mendorong pengelolaan dan peruntukan lahan secara baik, transparan, akuntabel dan berbasis hukum sehingga penggunaan lahan akan menjamin pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemajuan dan pemerataan pembangunan. Untuk itu Pemerintah Sumatera Selatan telah menetapkan Perda No. 21 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk mencegah tindakan alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan lahan lainnya.

2.1.1.7. Kondisi Geografi lainnya

Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Panjang wilayah pesisir di Provinsi Sumatera Selatan sekitar 450 km dari Sungai Benu (batas Provinsi Jambi) sampai Sungai Mesuji (batas Provinsi Lampung). Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kawasan pesisir pantai timur terdapat kawasan strategis provinsi yaitu di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Sedangkan Luas rawa di provinsi Sumatera Selatan sekitar 1.483.662 Ha atau 17,11% dari luas wilayah daratan yang terbagi menjadi RPS (rawa pasang surut), RL (rawa lebak). Rawa tersebut terdapat di Kabupaten Banyuasin dengan jumlah RPS 19 dan RL 1, di Kabupaten Muara Enim dengan jumlah RPS 7 dan RL 1, di Kabupaten Musi Banyuasin dengan jumlah RPS 3 dan RL 63, di Kabupaten Ogan Komering Ilir RPS 4 dan RL 14, sedangkan untuk Kabupaten Ogan Ilir dan OKU Timur hanya terdapat RL yaitu Kabupaten Ogan Ilir dengan jumlah 53 dan OKU Timur dengan jumlah 5. Sementara, Kota Palembang hanya terdapat 1 RPS.

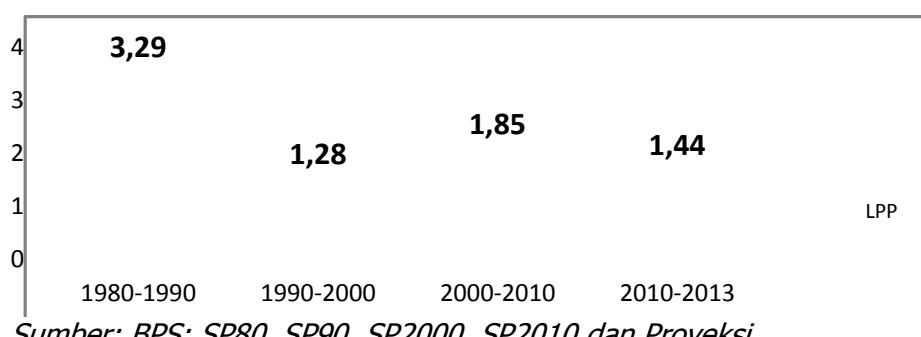
2.1.1.8. Kondisi Demografi

Pada tahun 2009 jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan mencapai 7.222.635 jiwa sehingga tercatat sebagai peringkat kesembilan dari seluruh provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Sedangkan jumlah penduduk tahun 2010 adalah 7.450.394 jiwa atau meningkat 3,15 persen dari tahun 2009. Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan terus meningkat 2,93 juta jiwa pada tahun 1971 menjadi 3,97 juta jiwa pada tahun 1980, 5,49 juta jiwa pada tahun 1990, 6,27 juta jiwa pada tahun 2000, serta 7,22 juta jiwa pada tahun 2009.

Selama periode 1971-1980 laju pertumbuhan penduduk Sumatera Selatan mencapai 3,45 persen per tahun turun menjadi 3,29 per tahun pada periode 1980-1990, pada tahun 1990-2000 pertumbuhan penduduk menjadi 1,28 persen per tahun. Namun, laju pertumbuhan penduduk selama 2000-2010 terlihat mengalami kenaikan menjadi 1,85 persen per tahun. Dan, laju pertumbuhan penduduk selama 2010-2013 mengalami penurunan menjadi 1,44 persen per tahun.

Gambar 2.2.

Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Selatan 1980-2013



Sumber: BPS; SP80, SP90, SP2000, SP2010 dan Proyeksi

Tabel 2.6.

Jumlah Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010-2013

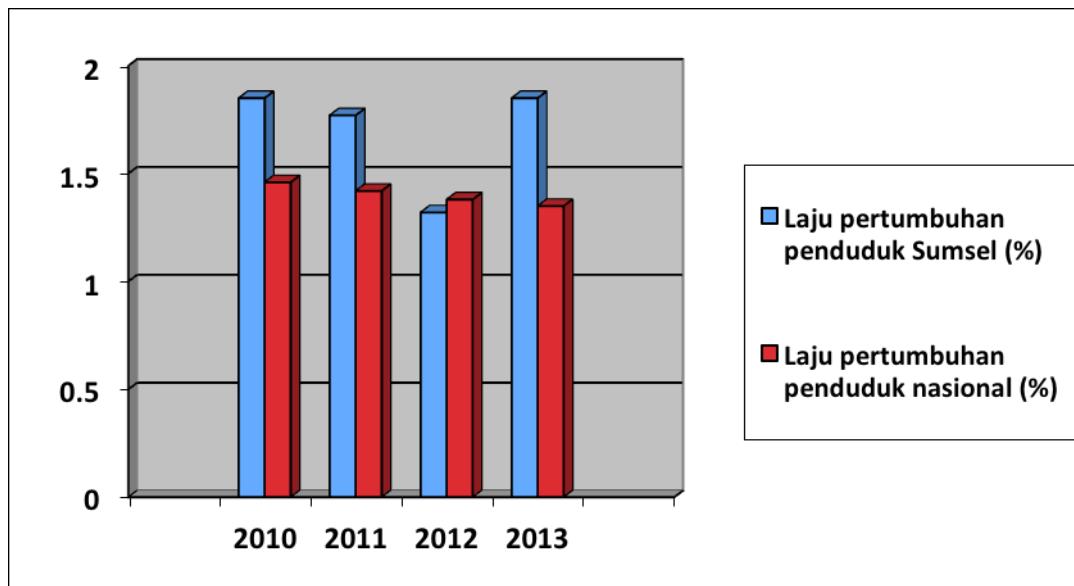
Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ogan Komering Ulu	264.743	267.022	324.045	334.295	338.369	340.000
Ogan Komering Ilir	696.505	707.627	727.376	742.374	752.906	764.900
Muara Enim	660.906	668.341	716.676	731.410	741.795	581.600
Lahat	340.556	341.055	369.974	374.505	380.398	384.600
Musi Rawas	499.238	505.940	525.508	535.614	543.349	551.500
Musi Banyuasin	510.387	523.025	561.458	580.489	587.325	592.400
Banyuasin	798.360	818.280	750.110	762.482	773.878	788.300
OKU Selatan	329.071	331.879	318.428	320.290	324.836	334.700
OKU Timur	576.699	581.665	609.982	619.460	628.827	634.700
Ogan Ilir	378.570	384.663	380.904	387.205	392.989	398.300
Empat Lawang	213.559	213.872	221.176	222.735	225.737	231.700
Palembang	1.417.047	1.438.938	1.455.284	1.481.814	1.503.485	1.535.900
Prabumulih	136.253	137.786	161.984	166.960	169.022	171.800
Pagar Alam	116.316	116.486	126.181	127.706	129.719	131.100
Lubuk Linggau	183.580	186.056	201.308	206.086	208.893	213.000
Sumatera Selatan	7.121.790	7.222.635	7.450.394	7.593.425	7.701.528	7.828.700

Sumber: BPS; SP80, SP90, SP2000, SP2010 dan Proyeksi

Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, Provinsi Sumatera Selatan menghadapi masalah kependudukan yang sangat serius terutama dalam penyediaan pelayanan dasar, perumahan dan permukiman, penyediaan prasarana dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Gambar 2.3.

Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Selatan dibandingkan
Dengan Laju Pertumbuhan Nasional Tahun 2010-2013



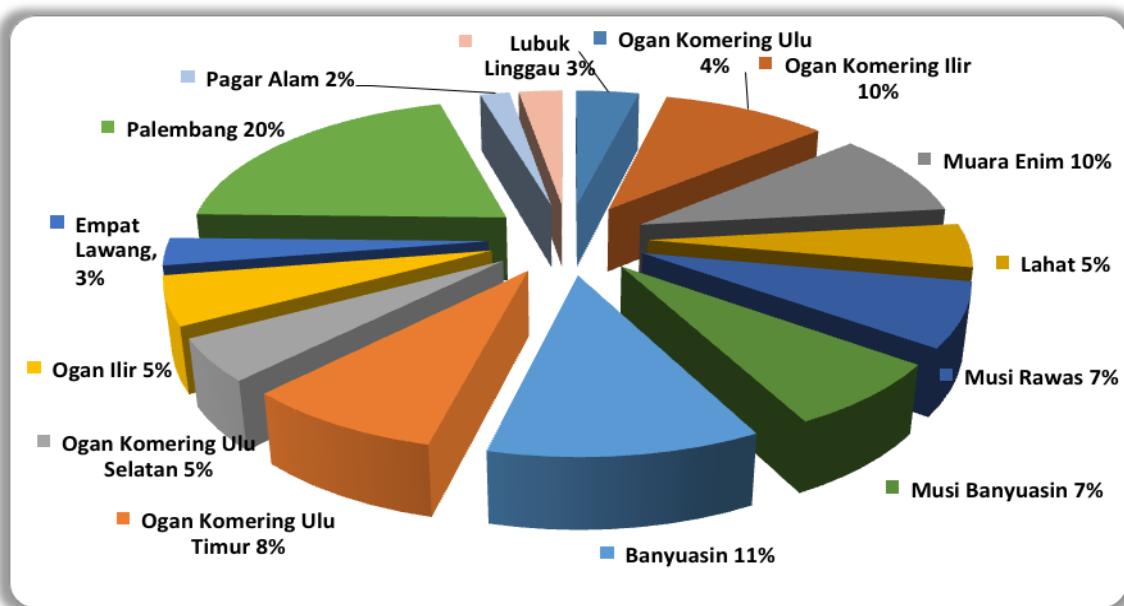
Sumber: Lakip Dinas Kesehatan Tahun 2014

Berdasarkan data di atas, jika dibandingkan antara capaian indikator laju pertumbuhan penduduk dengan capaian nasional, maka capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian nasional. Hal ini disebabkan masih tingginya tingkat kelahiran. Angka kelahiran kasar (*Crude Birth Rate*) di Sumatera Selatan tahun 2010 mencapai 27,93 per 1000 penduduk, terjadi penurunan meskipun tidak terlalu besar menjadi 25,71 pada tahun 2011 dan tahun 2012 menjadi 29,31 per seribu penduduk. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional, sedangkan untuk angka *Total Fertility Rate* (TFR) pada tahun 2010 sebesar 2,57 di tahun 2011 turun menjadi 2,27 dan menjadi 2,42 pada tahun 2012.

Tantangan yang harus dihadapi adalah pengendalian pertumbuhan penduduk disertai dengan peningkatan kesejahteraan penduduk secara berkesinambungan melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan. Pengendalian pertumbuhan penduduk dimaksud

mengindikasikan meningkatnya kembali angka kelahiran, sehingga hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah diantaranya dengan kembali menggalakkan Program KB untuk pengaturan kelahiran.

Gambar 2.4.
Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013
di Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013

Penyebaran penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013 menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbesar berada di Kota Palembang dengan penduduk sebanyak 1.535 juta jiwa. Kabupaten/Kota yang lain umumnya jauh lebih kecil berkisar antara 131,1 ribu jiwa yang terkecil di Kota Pagaralam sampai dengan yang terbesar di Kabupaten Banyuasin dengan jumlah 788,3 ribu jiwa.

Tabel 2.7.

Luas Daerah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk (dalam ribu)
Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Luas Daerah / <i>Total Area (km²)</i> [*]	Jumlah Penduduk / <i>Number of Population</i> ^{**}	Kepadatan Penduduk / <i>Population Density (per km²)</i> ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Ogan Komering Ulu	2 772.56	340.00	122.63
02. Ogan Komering Ilir	17 058.32	764.90	44.84
03. Muara Enim	8 587.94	581.60	67.72
04. Lahat	4 076.06	384.60	94.36
05. Musi Rawas	12 134.57	373.70	30.80
06. Musi Banyuasin	14 477.00	592.40	40.92
07. Banyuasin	12 142.73	788.30	64.92
08. OKU Selatan	5 493.94	334.70	60.92
09. OKU Timur	3 410.15	634.70	186.12
10. Ogan Ilir	2 513.09	398.30	158.49
11. Empat Lawang	2 556.44	231.70	90.63
12. Pali	a)	174.20	-
13. Musi Rawas Utara	b)	177.80	-
14. Palembang	374.03	1 535.90	4 106.36
15. Prabumulih	421.62	171.80	407.48
16. Pagar Alam	579.16	131.10	226.36
17. Lubuk Linggau	419.80	213.00	507.38
Jumlah / Total	87 017.41	7 828.70	6 209.93

Sumber: *Sumatera Selatan Dalam Angka Tahun 2013*

Distribusi penduduk di Provinsi Sumatera Selatan terbesar berada di Kota Palembang sebesar 20%, sedangkan distribusi terkecil berada di Kota Pagaralam sebesar 2%.

Kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Selatan selama setahun terakhir menunjukkan kondisi yang terjadi secara umum, dimana peningkatan jumlah penduduk menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk usia kerja. Pada 6. terlihat bahwa jumlah penduduk

usia kerja pada tahun 2013 dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 meningkat sebanyak 85.775 orang dengan laju pertumbuhan sebesar 1,62 persen. Jumlah angkatan kerja selama setahun terakhir mengalami penurunan sebanyak 24.300 orang dengan laju penurunan sebesar 0,64 persen.

Tabel 2.8.

Jumlah Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja
di Provinsi Sumatera Selatan, 2008-2013

Jenis Kelamin	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Penduduk Usia Kerja						
Laki-laki	2.500.401	2.544.865	2.644.220	2.686.171	2.730.223	2 780 218
Perempuan	2.474.818	2.520.877	2.574.380	2.613.786	2.655.509	2 704 033
Total	4.975.219	5.065.742	5.218.600	5.299.957	5.385.732	5 484 251
Angkatan Kerja						
Laki-laki	2.134.134	2.152.515	2.238.638	2.313.769	2.350.312	2 289 673
Perempuan	1.337.878	1.307.850	1.426.406	1.456.904	1.396.061	1 357 323
Total	3.472.012	3.460.365	3.665.044	3.770.673	3.746.373	3 646 996

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan 2013

Jumlah angkatan kerja di Sumatera Selatan pada Tahun 2013 mencapai 3.646.996 orang, berkurang sekitar 99.377 orang dibandingkan Tahun 2012 sebesar 3.746.373 orang. Jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2013 mencapai 5.484.251 orang, berkurang sekitar 98.519 orang dibandingkan keadaan pada Tahun 2012 yang sebesar 5.385.732 orang.

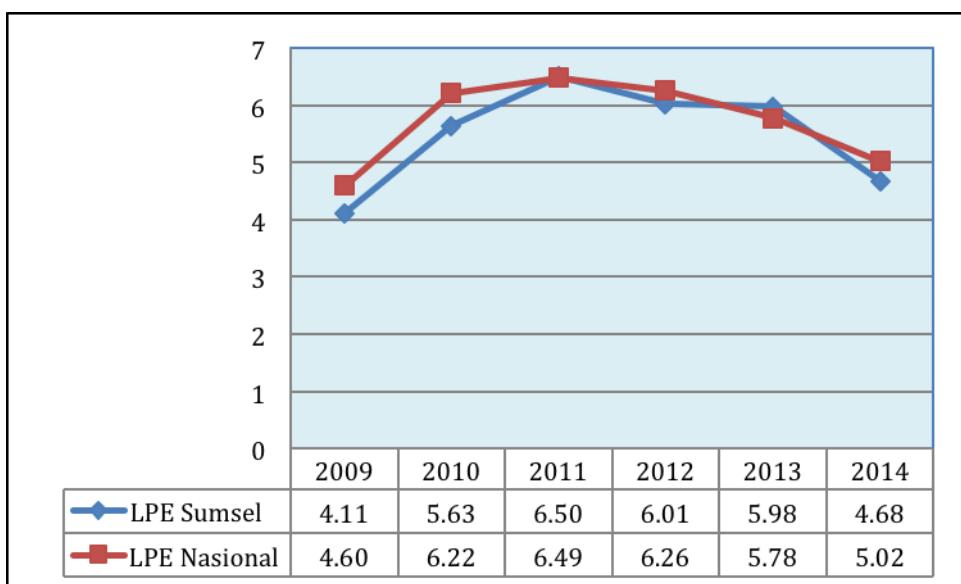
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Pertumbuhan PDRB

Perkembangan perekonomian di Sumatera Selatan tidak terlepas dari perkembangan ekonomi nasional dan internasional, tercatat laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan cenderung meningkat dari tahun 2009-2011 dan mengalami perlambatan selama tahun 2012-

2014. Selama periode 2009-2014 pertumbuhan ekonomi tanpa migas rata-rata sebesar 6,57 persen per tahun, sementara pertumbuhan ekonomi rata-rata dengan migas hanya sebesar 5,48 persen. Pola pertumbuhan ini memperlihatkan bahwa sektor non migas menjadi penggerak utama bagi perekonomian Provinsi Sumatera Selatan.

Gambar 2.5.
Laju Pertumbuhan Ekonomi 2009-2014



Sumber : BPS, 2015

Pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsumsi, ekspor, dan investasi. Khusus untuk konsumsi, selain dari konsumsi rumah tangga, pertumbuhan juga disumbangkan oleh lembaga non profit rumah tangga yang tumbuh hingga 13,54% (yoY) seiring dengan pelaksanaan Pemilu 2014. Dari sisi sektoral, seluruh lapangan usaha tumbuh positif dengan kontribusi terbesar diberikan oleh 3 (tiga) lapangan usaha utama yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertanian, dan sektor pertambangan.

Berdasarkan pertumbuhannya, terdapat dua sektor ekonomi yang tumbuh signifikan hingga di atas 10% yaitu Sektor Pengadaan Listrik dan Gas dan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan

Sosial Wajib. Meski tumbuh sangat signifikan namun sumbangannya kedua sektor tersebut terhadap pertumbuhan relatif rendah.

Tingginya pertumbuhan tahunan sektor pertambangan memberikan andil yang besar bagi perekonomian Sumatera Selatan. Kinerja sektor pertambangan memberikan kontribusi sebesar 1,93% bagi pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan. Sementara sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan masing-masing memberikan andil sebesar 0,93% dan 0,82%.

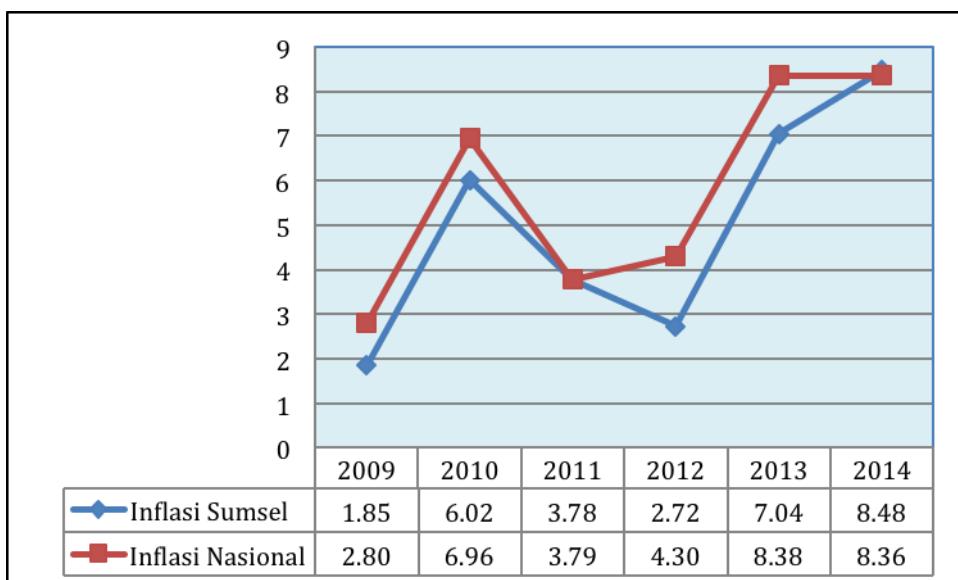
Sektor pertanian tumbuh melambat sejalan dengan melambatnya sub sektor perkebunan tahunan yaitu karet dan kelapa sawit. Meskipun tumbuh melambat, sebesar 1,8% (yoY) namun sektor pertanian memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2014 sebesar 0,32%. Untuk kinerja sektor pertanian khususnya kelapa sawit, penyerapan produksi CPO oleh pasar domestik masih cukup tinggi, sehingga tidak terlalu terpengaruh oleh penurunan permintaan dari luar negeri. Sementara itu, sub sektor tanaman pangan justru menunjukkan kinerja berlawanan dengan perkebunan tahunan. Hal tersebut diakibatkan oleh kondisi curah hujan yang tidak sebaik periode yang sama tahun sebelumnya. Angka Ramalan (ARAM II) BPS yang rilis pada bulan November 2014 meramalkan produksi padi pada tahun 2014 turun sebesar 4,9% dibandingkan produksi tahun 2013 yang mencapai 3,7 Juta Ton. Penurunan tersebut bersumber dari turunnya luas lahan yang juga diikuti oleh turunnya produktivitas.

2.1.2.2. Laju Inflasi

Selama tahun 2006-2008, inflasi di Sumatera Selatan cenderung lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional, tetapi pada 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2009-2013 kondisi tersebut berbalik dimana inflasi Sumatera Selatan menjadi lebih rendah dibandingkan inflasi nasional.

Namun, di tahun 2014 inflasi Sumatera Selatan yaitu 8,48% sedikit diatas Nasional yaitu 8,36%.

Gambar 2.6.
Perkembangan Inflasi Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional (%)
Tahun 2009-2014



Sumber : BPS Tahun 2015

Inflasi tahunan tertinggi pada tahun 2014 bersumber pada kelompok transportasi yang berpengaruh pada kenaikan harga di kelompok lain. Selain itu, peningkatan tekanan inflasi juga disebabkan oleh meningkatnya konsumsi pada perayaan keagamaan Natal yang sebelumnya didahului oleh kenaikan harga akibat kenaikan kelompok *administered prices* sehingga hal tersebut menjadi salah satu pemicu kenaikan harga di tahun 2014 lebih tinggi dari tahun 2013.

Menurut komoditasnya, penyumbang inflasi tertinggi pada tahun 2014 adalah komoditas solar, angkutan dalam kota, dan bensin. Kenaikan bensin dan solar akibat kebijakan Pemerintah dalam menaikkan harga BBM bersubsidi selanjutnya juga diikuti dengan kenaikan tarif angkutan dalam kota. Sementara itu, kenaikan tarif listrik secara berkala juga dilakukan pada bulan November 2014.

Tabel 2.9.

Andil Penyumbang Inflasi Sektor Transportasi Tahun 2014
di Provinsi Sumatera Selatan

Tekanan Inflasi	Bobot	Keterangan	2014	
			Andil	Arah Inflasi
BBM	4.1	Naik dari Rp6,500 menjadi Rp8,500	1.26	
TTL	3.3	Kenaikan secara bertahap sepanjang triwulan 2014	0.71	
Angk. Dlm Kota	3.2	Kenaikan tarif dari Rp2,800 menjadi Rp4,000	1.37	

Sumber : Bank Indonesia Tahun 2015

Sementara itu, kelompok bahan makanan seperti daging ayam ras, tomat sayur, bawang merah dan bawang putih mengalami koreksi sehingga menjadi penyumbang deflasi. Berdasarkan hasil Survei Pemantauan Harga, penurunan harga komoditas tersebut disebabkan oleh penurunan harga oleh distributor, yang mengindikasikan pasokan yang cukup.

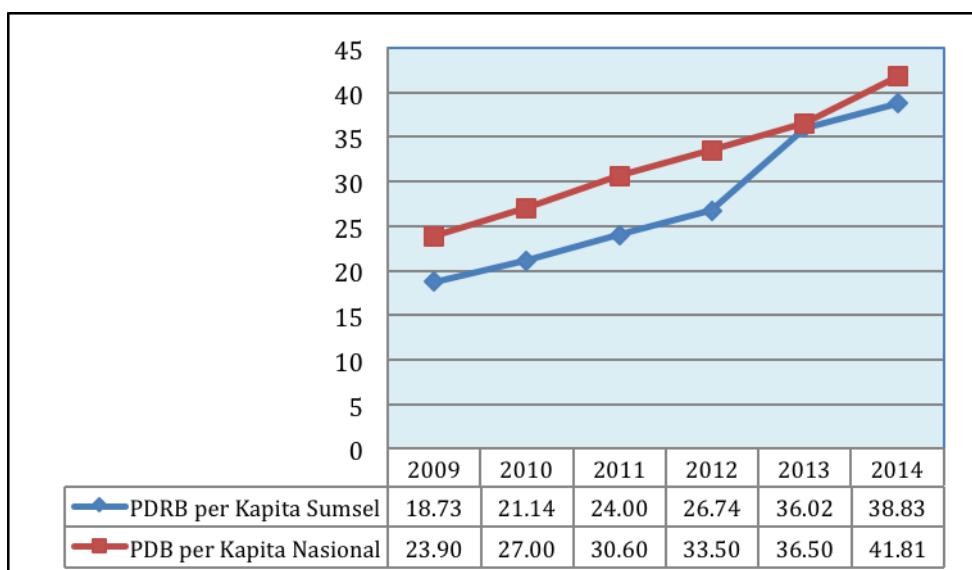
Kondisi curah hujan secara umum pada tahun 2014 cenderung terus meningkat. Walaupun menjadi penghambat distribusi pasokan namun hal ini masih dapat diatasi sehingga distribusi pasokan tetap terjaga. Ketersediaan pasokan juga didukung oleh stok beras Bulog yang masih berada pada level aman walaupun terjadi perlambatan dibandingkan periode sebelumnya. Di akhir tahun 2014, stok beras Bulog mencapai 74,71 juta ton. Pasokan tersebut diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat Sumsel.

2.1.2.3. PDRB per Kapita

Perkembangan PDRB Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan, dari tahun 2009 sebesar Rp.18,73 juta meningkat pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp.38,83 juta. Data tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan oleh faktor membaiknya perekonomian, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Sumsel yang terjadi peningkatan setiap tahunnya.

Gambar 2.7.

Perkembangan PDRB per Kapita Sumatera Selatan dan Nasional (Rp.Juta)
Tahun 2009-2014



Sumber : BPS 2015

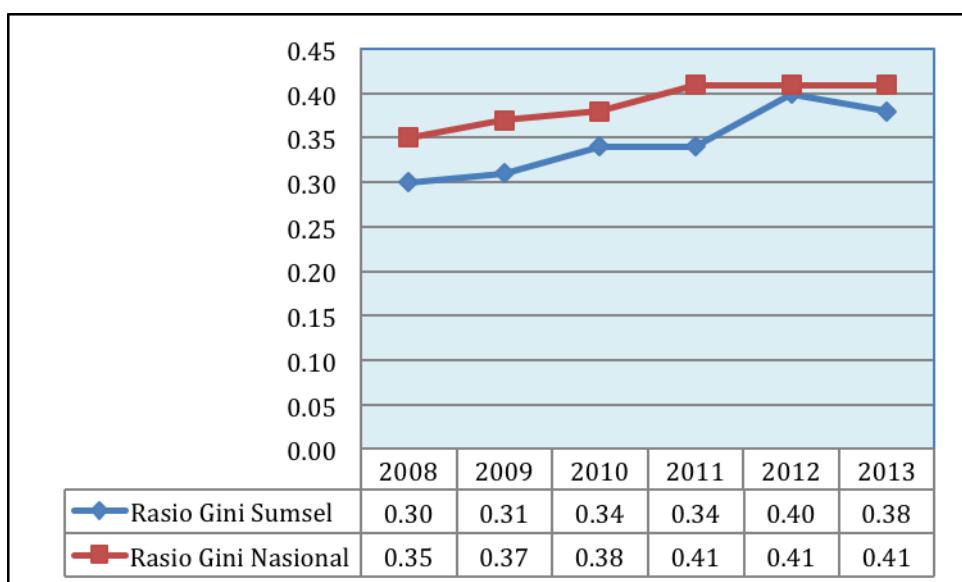
2.1.2.4. Rasio Gini

Rasio Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Peningkatan distribusi pengeluaran penduduk secara umum lebih diakibatkan oleh distribusi pengeluaran penduduk kaya di perkotaan yang semakin meningkat dibandingkan dengan di pedesaan. Meskipun distribusi pengeluaran penduduk miskin juga mengalami kenaikan

Perkembangan Rasio Gini Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan dari 0,30 pada tahun 2008 menjadi 0,38 pada tahun 2013. Data tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh faktor peningkatan daya beli masyarakat yang juga diikuti dengan peningkatan ketimpangan pengeluaran.

Gambar 2.8.

Perkembangan Rasio Gini Sumatera Selatan dan Nasional (%)
Tahun 2008-2013



Sumber: BPS, 2015

Peningkatan angka Gini Rasio mengindikasikan adanya ketimpangan pengeluaran penduduk, meskipun relatif sama dengan angka nasional, kenaikan angka gini rasio Sumatera Selatan disebabkan adanya peningkatan eksplorasi batubara di daerah dan pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Faktor yang mempengaruhi ketimpangan pengeluaran ini adalah pengaruh krisis global, fluktuatifnya harga komoditi perkebunan, seperti komoditi karet dan kelapa sawit. Oleh karena sebagian besar penduduk Sumatera Selatan menggantungkan hidup dari hasil pertanian dan

perkebunan. Fluktuatifnya harga komoditi pertanian dan perkebunan akan mempengaruhi pengeluaran penduduk.

2.1.2.5. Indeks Ketimpangan Williamson

Ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota untuk masing-masing provinsi di Wilayah Sumatera dari tahun 2007-2011 yang ditunjukan pada Tabel 2.9. menunjukan bahwa Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan memiliki tingkat ketimpangan pembangunan tinggi atau pembangunan antar kabupaten/kota di wilayah tersebut belum merata. Ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Riau tergolong ketimpangan pembangunan sedang, sementara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ketimpangan pembangunan yang terjadi sangat rendah atau ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota cukup merata.

Tabel 2.10.

Indeks Williamson Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera
Tahun 2007-2011

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010*	2011**
Aceh	0,84	0,81	0,72	0,68	0,65
Sumatera Utara	0,66	0,68	0,71	0,78	0,72
Sumatera Barat	0,38	0,38	0,35	0,35	0,34
Riau	0,68	0,69	0,57	0,60	0,66
Jambi	0,40	0,46	0,48	0,48	0,47
Sumatera Selatan	0,80	0,81	0,77	0,78	0,74
Bengkulu	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40
Lampung	0,30	0,35	0,37	0,35	0,43
Kep. Bangka Belitung	0,27	0,29	0,29	0,28	0,28
Kepulauan Riau	0,52	0,41	0,43	0,38	0,38

Sumber:, Data BPS tahun 2012, Diolah Bappenas 2012

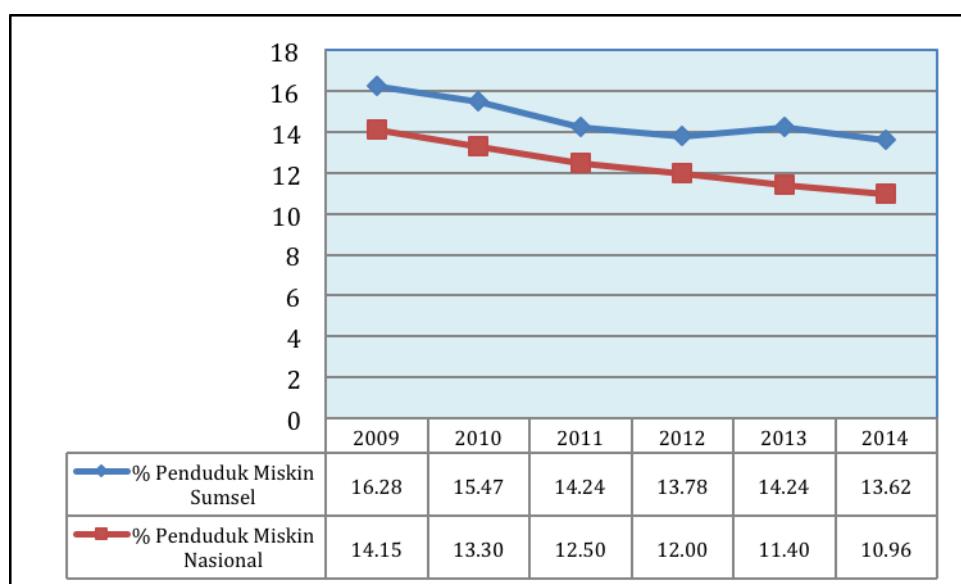
2.1.2.6 Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu kewajiban penting pemerintah yang mesti dijalankan agar tujuan mencapai masyarakat yang sejahtera dapat tercapai, targetnya adalah bukan hanya

dari sisi persentase penduduk miskin yang ingin dikurangi, melainkan juga jumlah mutlak penduduk miskin semestinya berkurang. Selain itu diharapkan juga ketimpangan pendapatan antar penduduk tidak semakin jauh, melainkan harus semakin mendekat meskipun tidak mungkin akan sama rata pendapatan semua masyarakat. Perkembangan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan hasil yang relatif baik.

Gambar 2.9.

Persentase Penduduk Miskin Sumatera Selatan dan Nasional (%)
Tahun 2009-2014



Sumber : BPS, 2015

Persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari tahun 2009 yang sebesar 16,28 persen menjadi sebesar 13,62 persen pada tahun 2014 walaupun masih lebih tinggi dibandingkan nasional yang sebesar 10,96 persen. Data tersebut menunjukkan keberhasilan program-program penanggulangan kemiskinan, seperti PNPM Mandiri Perkotaan maupun Pedesaan, kebijakan Raskin, Jamkesmas dan program-program lainnya, meskipun belum signifikan. Belum signifikannya penurunan persentase penduduk miskin disebabkan karena program-program penanggulangan kemiskinan cenderung bersifat karitatif dan kedermawanan pemerintah.

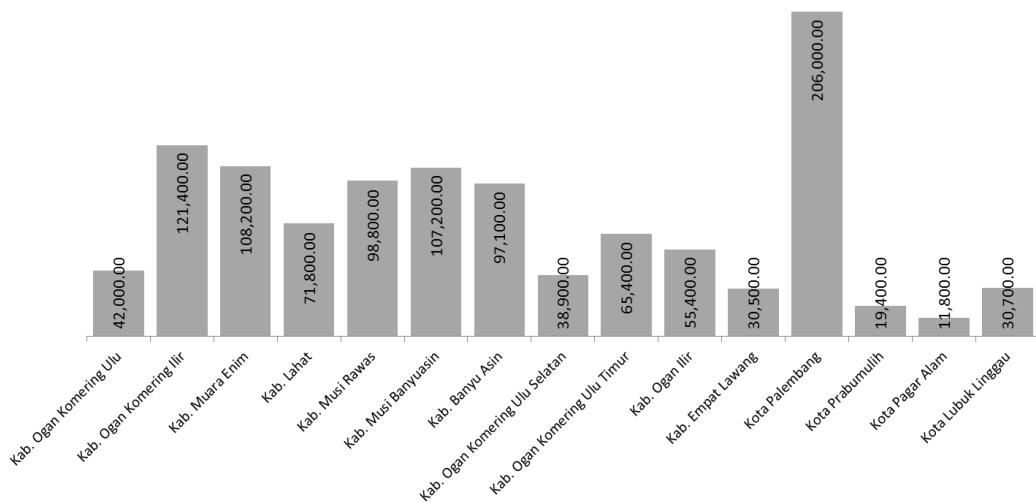
Program-program penanggulangan kemiskinan belum berorientasi pada pembangunan kapasitas masyarakat dan pengembangan modal sosial pada masyarakat miskin.

Gambar 2.10.

Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)

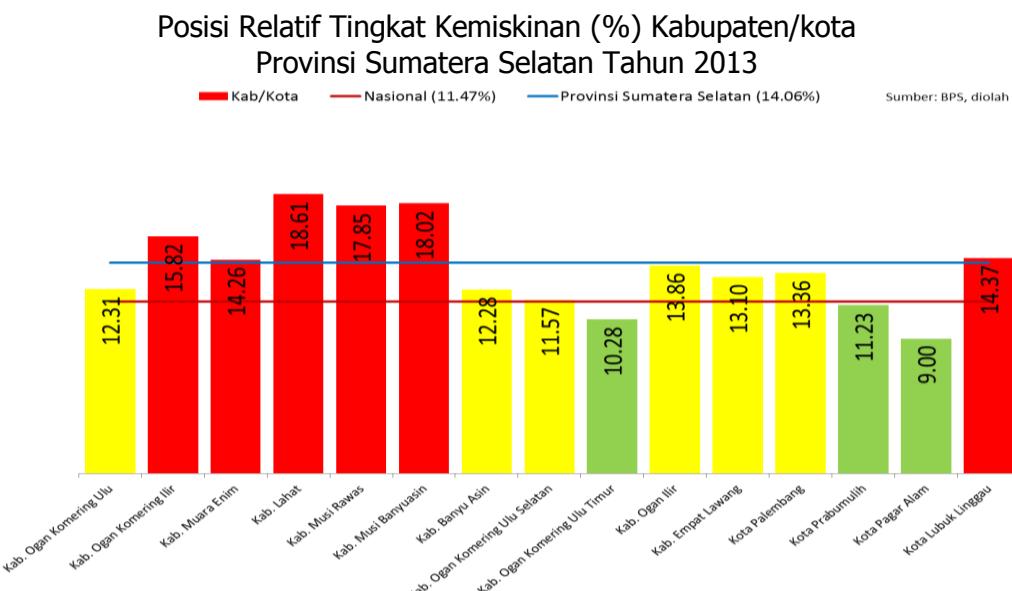
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013

Sumber: BPS, diolah



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan 2013

Gambar 2.11.



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan 2013

Jika dilihat dari lokasi angka kemiskinan pedesaan (14,46%) pada tahun 2014 lebih tinggi dibandingkan perkotaan (12,93%). Sedangkan, kesenjangan angka kemiskinan per wilayah tahun 2013 masih tinggi, secara persentase terendah di Kota Pagar Alam sebesar 9,00% dan tertinggi di Kabupaten Lahat sebesar 18,61%, secara jumlah penduduk miskin terendah di Kota Pagar Alam sebanyak 11.800 jiwa dan tertinggi di Kota Palembang sebanyak 206.000 jiwa.

Tabel 2.11.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014

Jumlah/Persentase Penduduk Miskin	Maret 2014	September 2014	Perubahan
<u>Jumlah Penduduk Miskin</u>			
Perkotaan	367.121	370.857	3.736
Pedesaan	733.708	714.938	-18.770
Perkotaan+Pedesaan	1.100.829	1.085.795	-15.034
<u>Persentase Penduduk Miskin</u>			
Perkotaan	12,93	12,96	0,03
Pedesaan	14,46	13,99	-0,46
Perkotaan+Pedesaan	13,91	13,62	-0,29

Sumber: Diolah dari data Susenas Maret dan September 2014

Indeks kedalaman dan Keparahan kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 masih tinggi yaitu sebesar 2,408% dan 0,622%. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Pedesaan sebesar 2,444% lebih tinggi dibandingkan di Perkotaan yang sebesar 2,343%. Indeks Keparahan Kemiskinan di Pedesaan Tahun 2014 sebesar 0,624% lebih besar dibandingkan di Perkotaan sebesar 0,616%.

Tabel 2.12.

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014

Indeks Kedalaman Kemiskinan/Indeks Keparahan Kemiskinan	Maret 2014	September 2014	Perubahan
<u>Indeks Kedalaman Kemiskinan</u>			
Perkotaan	2,113	2,343	0,231
Pedesaan	2,326	2,444	0,118
Perkotaan+Pedesaan	2,250	2,408	0,158
<u>Indeks Keparahan Kemiskinan</u>			
Perkotaan	0,552	0,616	0,065
Pedesaan	0,609	0,624	0,016
Perkotaan+Pedesaan	0,588	0,622	0,034

Sumber: Diolah dari data Susenas Maret dan September 2014

2.1.2.7. Millenium Development Goals (MDGs)

Dalam hal pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs), Sumatera Selatan Memiliki banyak indikator yang telah memenuhi target MDGs (Indikator telah tercapai, warna hijau), banyak yang akan mencapai target dalam waktu dekat (Indikator *On Track*, warna kuning), tetapi banyak pula yang masih jauh memnuhi target atau termasuk indikator yang sulit dicapai dan memerlukan terobosan dan upaya yang keras untuk mencapainya (indikator *Off Track*, diberi warna merah) seperti Tingkat Kemiskinan baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Angka Kematian Bayi

dan Balita, Kasus Kematian Ibu, Sanitasi Dasar dan Sumber Daya Air Layak Minum (Data capaian MDGs terlampir).

Tabel 2.13.
Rekap Capaian MDGs

GOAL	JUMLAH INDIKATOR	INDIKATOR YANG ADA DATA	TINGKAT PENCAPAIAN MDGs (%)		
			Merah	Kuning	Hijau
Goal 1 Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan	13	12	50,00	16,67	33,33
Goal 2 Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua	17	13	23,08	38,46	38,46
Goal 3 Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	10	9	33,33	44,44	22,22
Goal 4 Menurunkan Angka Kematian Anak	7	7	28,57	42,86	28,57
Goal 5 Meningkatkan Kesehatan Ibu	10	8	37,50	37,50	25,00
Goal 6 Memerangi HIV & AIDS, Malaria dan Penyakit Menular lainnya	18	18	33,33	11,11	55,56
Goal 7 Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup	14	6	50,00	50,00	0,00

Sumber: Bidang Sosial Budaya Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Secara detil pencapaian MDGs dapat dilihat pada tabel berikut:

2.1.2.8. Pendidikan

2.1.2.8.1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf usia 15 tahun ke atas memperlihatkan angka yang stabil, yaitu 97,04 persen pada tahun 2008, 97,21 persen pada tahun 2009, 97,36 persen pada tahun 2010, 96,65 persen pada tahun 2011, 96,20 persen pada tahun 2012 dan 97,32 persen pada tahun 2013. Dilihat dari jenis kelamin laki-laki memiliki angka melek huruf lebih tinggi daripada perempuan. Pada tahun 2013 angka melek huruf laki-laki sebesar 98,48 persen, perempuan 96,13 persen. Hal ini menunjukkan perempuan masih sedikit tertinggal dibanding laki-laki dalam membaca dan menulis. Kondisi ini terjadi hampir di seluruh kab/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.1.2.8.2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013 baru mencapai 8,27 tahun, berarti rata-rata baru sampai taraf pendidikan SMP pada kelas dua. Untuk tingkat kabupaten/kota rata-rata lama sekolah tertinggi tercatat di Kota Palembang yang mencapai 9,96 tahun, dengan penduduk laki-laki rata-rata 10,24 tahun dan perempuan rata-rata 9,68 tahun. Ini berarti penduduk laki-laki rata-rata sudah mengenyam pendidikan sampai SLTA kelas dua, sedangkan penduduk perempuan secara rata-rata baru menamatkan tingkat SLTA kelas satu.

Tabel 2.14.

Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2008-2013 (dalam tahun)

No.	Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Ogan Komering Ulu	7,57	7,71	8,38	8,40	8,51	8.41
2	Ogan Komering Ilir	6,70	6,73	6,74	6,75	6,76	7.08
3	Muara Enim	7,30	7,35	7,49	7,52	7,53	8.00
4	Lahat	7,59	7,72	8,28	8,31	8,37	8.33
5	Musi Rawas	7,00	7,05	7,09	7,11	7,14	6.91
6	Musi Banyuasin	7,00	7,05	7,51	7,61	7,63	7.86
7	Banyuasin	7,00	7,01	7,02	7,06	7,08	7.39
8	OKU Selatan	7,10	7,15	7,45	7,47	7,48	7.85
9	OKU Timur	6,80	6,87	6,91	7,29	7,30	7.68
10	Ogan Ilir	7,46	7,52	7,53	7,56	7,57	7.70
11	Empat Lawang	6,88	6,94	7,23	7,40	7,69	7.76
12	Kota Palembang	9,90	9,95	9,96	9,98	10,30	10.19
13	Kota Prabumulih	8,88	9,00	9,16	9,25	9,29	8.97
14	Kota Pagar Alam	8,42	8,54	8,95	8,97	9,01	8.83
15	Kota Lubuk Linggau	8,98	9,11	9,24	9,36	9,37	9.45
	Sumatera Selatan	7,60	7,66	7,82	7,84	8,00	8,27

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan 2013

Angka rata-rata lama sekolah pada Provinsi Sumatera selatan pada Tahun 2013 sebesar 8,27 meningkat dari Tahun sebelumnya 2012 sebesar 8,00. Apabila dibandingkan dengan Nasional, pada Tahun 2012 Provinsi Sumatera Selatan berada di bawah angka rata-rata Nasional yaitu 8,03 namun pada Tahun 2013 berada di atas angka rata-rata Nasional yaitu 8,10. Hal ini dapat terjadi karena masih **terdapatnya penduduk usia 15 tahun ke atas di Sumatera Selatan yang belum mengenyam pendidikan** terutama pendudukan yang berusia lanjut dan peserta didik yang putus sekolah. Upaya yang perlu dilakukan yaitu dengan meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah, meningkatkan akses dan daya saing pendidikan tinggi, serta meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan dan layanan sekolah. Progam sekolah gratis baru baru dilaksanakan mulai tahun 2008 yang baru dapat dinikmati oleh generasi umur di bawah 15 tahun.

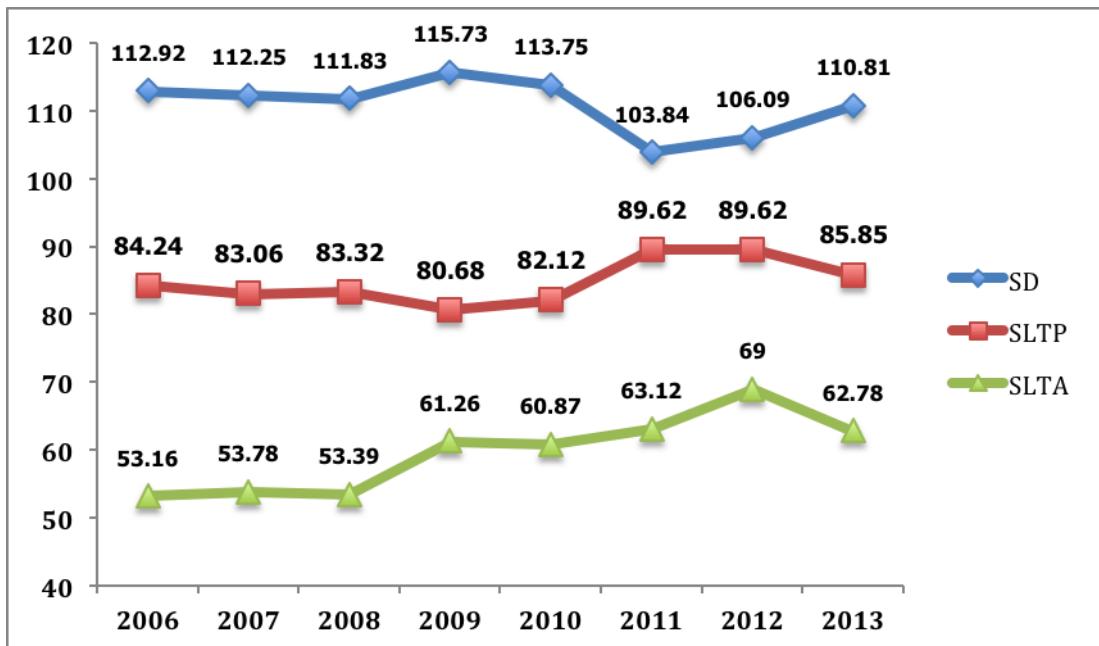
Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, rata-rata lama sekolah terpendek terdapat di Kabupaten Musi Rawas yaitu baru 6,91 tahun atau setara tamat Sekolah Dasar. Demikian juga di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Banyuasin, rata-rata lama sekolah setara kelas 1 SLTP. Oleh sebab itu, tantangan dalam lima tahun mendatang adalah meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk di daerah perdesaan khususnya di Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Banyuasin.

2.1.2.8.3. Angka Partisipasi Kasar

APK bermanfaat untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Dilihat dari gambaran grafik dibawah, Angka Partisipasi Kasar (APK) di semua jenjang pendidikan di Sumatera Selatan bergerak fluktuatif, namun telah menuju ke arah yang lebih baik. APK SD/MI di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2008 menunjukkan persentase 111,83%, meningkat menjadi 115,73% pada tahun 2009 dan menurun menjadi 113,75% pada tahun 2010 dan menurun kembali pada tahun 2011 menjadi 103,84, meningkat menjadi 106,09 pada tahun 2012 dan meningkat kembali tahun 2013 menjadi 110,81%.

Artinya penduduk di Sumatera Selatan yang bersekolah di SD dari tahun 2008-2013 pada umumnya masih terdapat siswa yang sekolah di SD yang usianya di atas usia sekolah SD (di atas 7-12). Untuk APK tingkat SMP selama periode 2009-2013 pada umumnya menunjukkan *trend* meningkat, hanya pada tahun 2009 dan 2012 yang mengalami penurunan. Artinya pada tingkat SMP masih banyak anak usia sekolah SMP tapi tidak sekolah atau tidak melanjutkan sekolah ke SMP. Sementara untuk tingkat SMA menunjukkan trend meningkat selama periode 2008-2013, kecuali pada tahun 2010 dan 2013 mengalami sedikit penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa anak usia SMA banyak yang tidak melanjutkan sekolah ke SMA.

Gambar 2.12.
Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SD, SLTP dan SLTA



Sumber: INKESRA Provinsi Sumatera Selatan 2013

Apabila dibandingkan dengan APK Nasional Tahun 2013, APK Provinsi Sumatera Selatan sebesar 110,81 persen lebih rendah daripada APK Nasional sebesar 115,88 persen. Untuk pendidikan SLTP APK Provinsi Sumatera Selatan sebesar 85,85 persen lebih rendah daripada APK Nasional sebesar 100,16 persen. Dan juga untuk jenjang pendidikan SLTA APK Provinsi Sumatera Selatan sebesar 62,78 persen juga berada di bawah APK Nasional sebesar 78,19 persen. Hal ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor di antaranya masalah geografis, ekonomi, sosial, dan faktor adat atau tradisi. Merujuk hasil penelitian Nyayu Khodijah, dkk (2013) pada kabupaten yang merupakan APK rendah diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi adalah Budaya, Geografis, Daya Tampung Sekolah Negeri, Kemampuan Anak, Status Sosial Ekonomi, Lingkungan Sosial.

2.1.2.8.4. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni digunakan untuk mengukur proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Tabel 2.15.

Angka Partisipasi Murni Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional

Tahun 2012-2013

NO	NASIONAL			SUMATERA SELATAN	
	SEKOLAH	2012	2013	2012	2013
1	SD/MI	92,54	95,59	92,79	95,12
2	SMP/MTS	70,93	73,88	67,94	72,06
3	SMA/SMK/MA	51,88	54,25	49,34	51,67

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat 2014

Apabila dibandingkan dengan Nasional, Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Sumatera Selatan masih di bawah APM Nasional, kecuali pada Tahun 2012 APM Provinsi Sumatera Selatan pada tingkat SD/MI berada di atas APM Nasional. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya pemerataan kesempatan pendidikan di masing-masing jenjang pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat Sekolah Dasar.

2.1.2.8.5. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Pendidikan yang ditamatkan untuk pendidikan tingkat SD, SLTP, SLTA maupun SMK secara garis besar mengalami peningkatan pada tahun 2013 untuk tamatan tingkat pendidikan SD pada tahun ajaran 2012/2013 ialah 137.411 murid mengalami penurunan dibandingkan pada tahun ajaran 2011/2012 sebanyak 138.525 murid. Untuk tingkat pendidikan SLTP pada tahun ajaran 2012/2013 berjumlah 95.898 murid dan tingkat pendidikan SLTA dan SMK dimana untuk tahun ajaran 2012/2013, SLTA jumlah tamatan sebanyak 57.720 dan SMK berjumlah 70.256 mengalami

peningkatan pada tahun ajaran 2011/2012 untuk SLTA tamatan berjumlah 55.857 murid dan SMK berjumlah 20.916 murid.

Tabel 2.16.

Jumlah Murid Yang Tamat Pendidikan Tingkat SD, SLTP, SMA dan SMK
Tahun Ajaran 2007-2013

Tingkat Pendidikan	2007/ 2008	2008/ 2009	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013
SD	128.792	156.781	136.462	125.054	138.525	137.411
SLTP	83.742	94.367	74.493	100.012	97.983	95.898
SLTA	47.874	57.507	46.492	52.772	55.857	57.720
SMK	13.649	17.909	15.596	18.548	20.916	70.256

Sumber : BPS Sumsel 2013 (data diolah)

2.1.2.9. Kesehatan

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya meningkatkan Angka Harapan Hidup, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang.

2.1.2.9.1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan diperlukan

akselerasi peningkatan program pembangunan kesehatan dan program social lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan lain sebagainya.

Tabel 2.17.
Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)
Tahun 2008-2013

No	Wilayah Kab/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Ogan Komering Ulu	69,20	69,30	69,40	69,50	69,61	69,70
2	Ogan Komering Ilir	67,56	67,79	68,02	68,25	68,48	68,52
3	Muara Enim	67,28	67,47	67,66	67,85	68,03	68,11
4	Lahat	67,56	67,90	68,23	68,57	68,90	68,99
5	Musi Rawas	64,29	64,44	64,80	64,95	65,10	65,56
6	Musi Banyuasin	69,33	69,59	69,86	70,12	70,39	70,44
7	Banyuasin	67,05	67,23	67,41	67,59	67,77	67,84
8	OKU Selatan	69,24	69,30	69,37	69,44	69,51	69,59
9	OKU Timur	68,23	68,29	68,36	68,42	68,48	68,56
10	Ogan Ilir	65,68	65,98	66,27	66,57	66,86	66,90
11	Empat Lawang	65,28	65,42	65,50	65,64	65,78	65,78
12	Kota Palembang	70,66	70,90	71,13	71,37	71,60	71,67
13	Kota Prabumulih	71,10	71,51	71,91	72,32	72,73	72,80
14	Kota Pagar Alam	69,74	69,95	70,17	70,39	70,61	70,70
15	Kota Lubuk Linggau	65,39	65,54	65,69	65,84	65,99	66,05
Sumatera Selatan		69,20	69,40	69,60	69,80	70,05	70,10

Sumber: BPS-Susenas 2013 (data diolah)

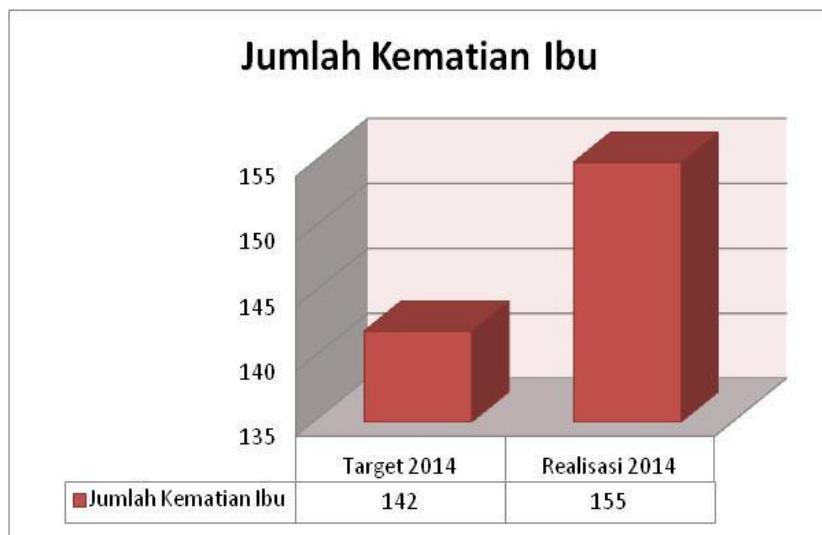
Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki angka usia harapan hidup dibawah rata-rata Provinsi yakni 70,10 di Tahun 2013 sedangkan angka usia harapan hidup yang diatas rata-rata Provinsi adalah Kabupaten Musi Banyuasin 70,44 Tahun, Kota Palembang 71,67 Tahun, Kota Prabumulih 72,80 Tahun, dan kota Pagaralam 70,70 Tahun.

2.1.2.9.2. Angka Kematian Ibu

Angka kematian Ibu untuk Propinsi Sumatera Selatan tahun 2014 ditargetkan 142 orang dan terealisasi 155 orang atau sebesar 91,61 persen. Jika dibandingkan tiga tahun terakhir jumlah kematian ibu mengalami peningkatan dari 124 kasus kematian pada tahun 2012

menjadi 141 kasus pada tahun 2013 dan meningkat lagi menjadi 155 kasus kematian pada tahun 2014.

Gambar 2.13.
Angka Kematian Ibu Tahun 2014
di Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : LAKIP Dinas Kesehatan 2014; BPS Provinsi Sumsel 2014

Jumlah kematian ibu tertinggi pada tahun 2014 terdapat pada kabupaten Empat Lawang dan OKU Timur masing-masing sebanyak 16 kasus, sedangkan untuk jumlah kematian ibu terendah pada kabupaten PALI sebanyak 3 kasus dan kota Prabumulih sebanyak 2 kasus.

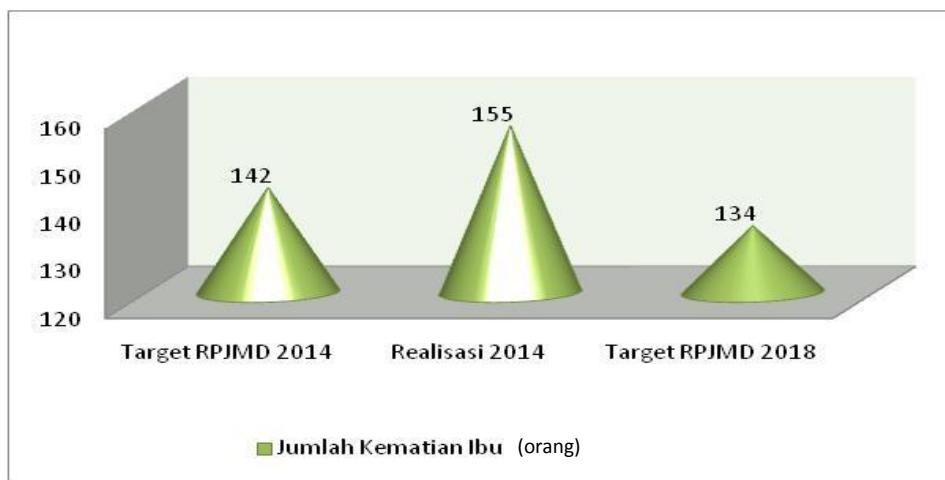
Gambar 2.14.
Grafik Jumlah Kasus Kematian Ibu Tahun 2010-2014
di Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : LAKIP Dinas Kesehatan 2014; BPS Provinsi Sumsel 2014

Jumlah kematian ibu melahirkan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 sebanyak 155 orang jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2014 sebesar 142 orang maka capaian tahun 2014 belum memenuhi target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 91,61 persen masih ada selisih kurang sebesar 8,39 persen.

Gambar 2.15.
Grafik Target & Realisasi RPJMD Jumlah Kematian Ibu
Tahun 2014-2018 di Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : LAKIP Dinas Kesehatan 2014; BPS Provinsi Sumsel 2014

Capaian tahun 2014 jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2018 sebesar 134 orang masih memiliki gap yang cukup jauh yaitu 21 orang. Selisih 21 orang tersebut harus dicapai dalam waktu 4 tahun kedepan, maka kalau dibagi dalam 4 tahun maka setiap tahun harus menurunkan jumlah kematian ibu melahirkan sebanyak 5 orang. Hal ini merupakan tugas yang sangat berat untuk mengingat trend jumlah kematian ibu melahirkan dalam 3 tahun terakhir adalah meningkat.

Belum tercapainya indikator ini disebabkan karena adanya disparitas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten dan kualitas pelayanan kesehatan antara di daerah perkotaan dan pedesaan, masih rendahnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, di beberapa daerah masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur serta faktor sosiologi dan adat-istiadat di masyarakat yang masih melakukan persalinan dengan dukun.

Dengan kerjasama lintas sektor dan dukungan dari segenap lapisan masyarakat, maka penurunan jumlah kematian ibu melahirkan masih optimis bisa dicapai pada tahun 2018. Berbagai upaya kedepan yang dilakukan untuk menurunkan jumlah kematian ibu melahirkan antara lain adalah :

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, khususnya untuk ibu hamil terutama melalui pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel);
2. Pelaksanaan program P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Penanganan Komplikasi);
3. Kunjungan antenatal pertama (K1) sedapat mungkin dilakukan pada trimester pertama, guna mendorong peningkatan cakupan kunjungan antenatal empat kali (K4);

4. Bidan di Desa sedapat mungkin tinggal di desa, guna memberikan kontribusi positif untuk pertolongan persalinan serta pencegahan dan penanganan komplikasi maternal;
5. Pelayanan KB harus ditingkatkan guna mengurangi faktor risiko 4 terlalu (terlalu muda, terlalu sering, terlalu rapat dan terlalu tua);
6. Pelaksanaan *Ante Natal Care* (ANC) yang terintegrasi untuk ibu hamil, termasuk pemeriksaan HIV/AIDS, Malaria, Cacingan dan penyakit infeksi menular lainnya secara terintegrasi dan pelaksanaan kelas ibu hamil dengan melibatkan keluarga dan masyarakat;
7. Pelaksanaan *Audit Maternal Perinatal* (AMP) di tingkat kabupaten/kota;
8. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam kesehatan reproduksi responsive gender harus ditingkatkan untuk meningkatkan *Health Care Seeking Behaviour*.

2.1.2.9.3. Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk merupakan status kondisi seseorang yang kekurangan nutrisi, atau nutrisinya di bawah standar. Gizi buruk masih menjadi masalah yang belum terselesaikan sampai saat ini. Gizi buruk banyak dialami oleh bayi di bawah lima tahun (balita). Gizi buruk dapat pula disebabkan oleh pola penyakit dominan yang dikeluhkan oleh warga masyarakat adalah penyakit khas daerah tropis yaitu penyakit infeksi. Meskipun besaran dan pola penyakit untuk setiap daerah bervariasi, tergantung dari lingkungan dan perilaku kebiasaan warga masyarakat dalam hidup sehat. Salah satu penyebab anak kurang gizi adalah penyakit infeksi, sedangkan penyebab tidak langsung adalah rendahnya daya beli dan keterbatasan pengetahuan tentang pangan yang bergizi.

Tabel 2.18.

Angka Kurang Gizi pada Balita di Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2009-2013

Indikator Outcome	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013
Angka kurang gizi (gizi kurang dan Buruk) pada Balita	%	1,1	1,36	1,36	1,23	1,32

Sumber: EKPD 2014

2.1.2.10. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Aspek Kesejahteraan Masyarakat, secara umum dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana IPM mengukur capaian pembangunan manusia dengan menggunakan tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, pengetahuan/tingkat pendidikan yang diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga), serta suatu standar hidup yang layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (PPP Rupiah).

IPM Provinsi Sumatera Selatan meningkat selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nilai IPM Provinsi Sumatera Selatan selalu lebih tinggi di atas nilai IPM nasional. Pada tahun 2013 mencapai 74,36 lebih tinggi dari nilai IPM nasional 73,81. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Sumatera Selatan secara rata-rata nasional lebih baik. Dengan membandingkan nilai IPM provinsi lainnya nilai IPM Sumatera Selatan berada pada posisi menengah. Nilai IPM lebih tinggi dari rata-rata nasional, tetapi belum termasuk peringkat tinggi.

Tabel 2.19.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2008-2013

No	Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	OKU	71,92	72,36	73,14	73,59	74,01	74,42
2	OKI	69,64	70,06	70,61	71,07	71,45	71,82
3	Muara Enim	69,91	70,38	70,81	71,26	71,65	72,06
4	Lahat	69,99	70,53	71,30	71,83	72,29	72,68
5	Musi Rawas	66,77	67,33	67,89	68,38	69,01	69,57
6	Musi Banyuasin	70,54	71,13	71,81	72,44	73,15	73,67
7	Banyuasin	69,08	69,45	69,78	70,28	70,70	71,08
8	OKU Selatan	70,66	71,02	71,42	71,82	72,29	72,67
9	OKU Timur	68,88	69,39	69,68	70,34	70,72	71,19
10	Ogan Ilir	68,67	69,17	69,51	70,09	70,52	70,89
11	Empat Lawang	67,68	68,15	68,61	69,08	69,69	70,02
12	Kota Palembang	75,49	75,83	76,23	76,69	77,38	77,74
13	Kota Prabumulih	73,20	73,69	74,27	74,94	75,45	75,83
14	Kota Pagar Alam	72,16	72,48	73,19	73,70	74,15	74,47
15	Kota Lubuk Linggau	69,69	70,18	70,56	71,10	71,46	71,83
	Sumatera Selatan	72,05	72,61	72,95	73,42	73,99	74,36
	Nasional	71,17	71,76	72,27	72,77	73,29	73,81
	Sumsel Secara Nasional	12	10	10	10	10	12

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan 2013

2.1.2.11. Ketenagakerjaan

Angkatan kerja merupakan bagian dari aspek demografi penduduk yang mempunyai kecenderungan bertambah atau menurun sejalan dengan perubahan yang dialami oleh penduduk itu sendiri. Jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2008-2013 secara garis besar mengalami peningkatan baik dari angkatan kerja laki-laki maupun perempuan.

Tabel 2.20.

Jumlah Angkatan Kerja Menurut jenis Kelamin
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013

Jenis Kelamin	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Laki-Laki	2.134.134	2.152.515	2.238.638	2.313.769	2.350.312	2.289.673
Perempuan	1.337.878	1.307.850	1.426.406	1.456.904	1.396.061	1.357.323
Total	3.472.012	3.460.365	3.665.044	3.770.673	3.746.373	3.646.996

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan 2014

Sedangkan angka pengangguran di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.20. di bawah ini.

Tabel 2.21.

Angka Pengangguran di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah	280.657	263.471	243.851	217.569	213.441	182.376
Persentase	8,08	7,61	6,65	5,77	5,70	5,00

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan 2014

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Selatan menurun setiap tahunnya, hal ini dapat disebabkan oleh bertambahnya lapangan kerja. Jika dilihat dari tingkat pendidikan nya Angkatan Kerja SD ke bawah sebesar 50,19%, SMP sebesar 17,04%, SMA sebesar 22,99%, Diploma sebesar 2,54% dan Perguruan Tinggi sebesar 7,24%. Hal ini menunjukkan bahwa kurang optimalnya peningkatan SDM yang berkualitas berbasis kompetensi.

2.1.2.12. Seni Budaya dan Olahraga

Berbagai kegiatan seni budaya dan kejuaraan olah raga baik skala nasional maupun internasional seperti PON, SEA Games maupun Islamic Solidarity Games (ISG) telah dilaksanakan di Sumatera Selatan. Keberhasilan berbagai kegiatan seni dan budaya, serta kejuaraan olah

raga mendorong berkembangnya kegiatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Berbagai prasarana dan sarana seni budaya, dan olah raga akan dimanfaatkan secara optimal. Kawasan Jakabaring sebagai pusat kegiatan olahraga berstandar internasional dapat dikembangkan sebagai wisata olah raga selain dimanfaatkan sebagai pusat pendidikan keolahragaan bagi siswa.

Tantangan dalam beberapa tahun mendatang adalah mengembangkan pusat-pusat seni dan budaya, menggalakkan festival seni dan budaya berskala nasional dan internasional, serta mengembangkan manajemen olahraga yang menggabungkan kegiatan promosi, ekonomi dan prestasi olahraga.

Provinsi Sumatera Selatan direncanakan sebagai tuan rumah untuk perhelatan akbar olah raga se-Asia pada tahun 2018 (Asian Games 2018) dengan 18 cabang olah raga yang akan dilaksanakan di Jakabaring Sport City.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.1.3.1.1. Pendidikan

2.1.3.1.1.1. Ketersedian Sekolah

Kondisi pendidikan ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, dan tenaga pengajar. Sejalan dengan peningkatan angka partisipasi sekolah, perluasan daya tampung ruang kelas dan penyediaan fasilitas belajar siswa menjadi persyaratan keberhasilan pelaksanaan program wajib belajar. Perluasan daya tampung kelas dilakukan dengan pembangunan gedung kelas baru, rehabilitasi gedung SD dan SLTP yang rusak berat dan penempatan guru kontrak di sekolah yang kekurangan guru.

Perkembangan fasilitas pendidikan di Sumatera Selatan dalam empat tahun terakhir terus meningkat untuk mengimbangi jumlah siswa yang juga cenderung meningkat baik jenjang SD, SLTP maupun SLTA.

Pada tahun ajaran 2012/2013, Sumatera Selatan memiliki gedung sekolah sebanyak 7.654 sekolah yang terdiri atas 1.380 Taman Kanak-Kanak (TK), 4.588 Sekolah Dasar (SD), 1.189 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan 769 Sekolah Menengah Umum (SMU), termasuk kejuruan. Gedung-gedung sekolah tersebut dipakai oleh murid-murid sekolah negeri dan swasta.

2.1.3.1.1.2. Rasio Guru Murid

Jumlah guru yang mengajar di masing-masing sekolah baik sekolah negeri maupun swasta pada tahun 2012/2013 ini terdiri atas 4.578 guru taman kanak-kanak, 62.428 orang guru Sekolah Dasar, 23.788 orang guru SLTP, serta guru SMU, termasuk SMU kejuruan sebanyak 21.383 orang.

Perbandingan jumlah guru yang mengajar di sekolah-sekolah dengan murid-murid ditunjukkan dengan rasio guru-murid. Rasio guru-murid TK di Sumatera Selatan tahun 2012/2013 sebesar 16,88, untuk SD sebesar

16,09, SLTP sebesar 17,06 dan SMU sebesar 11,59. Jika dibandingkan dengan periode 2011/2012, rasio guru-murid TK hingga SLTP menunjukkan peningkatan.

Distribusi guru di antara sekolah dinilai masih tidak merata. Pada umumnya sekolah-sekolah di pedesaan dan daerah terpencil kekurangan guru, sementara sekolah-sekolah di perkotaan memiliki jumlah guru yang lebih banyak.

Tabel 2.22.

Distribusi Guru Tingkat Pendidikan SD, SLTP dan SLTA Negeri
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012/2013

No	Kabupaten/Kota	SD	SLTP	SLTP	Total
1	OKU	5.174	969	529	12.815
2	OKI	2.879	1.332	597	9.019
3	Muara Enim	5.565	1.678	775	15.261
4	Lahat	4.857	1.258	746	12.976
5	Musi Rawas	4.330	1.301	554	11.816
6	Musi Banyuasin	4.812	1.351	632	12.958
7	Banyuasin	5.925	1.573	698	15.694
8	OKU Selatan	3.439	809	401	8.897
9	OKU Timur	4.280	1.187	495	11.429
10	Ogan Ilir	3.674	1.042	552	9.984
11	Empat Lawang	2.626	558	323	6.691
12	Kota Palembang	7.794	4.121	2.695	26.525
13	Kota Prabumulih	1.280	654	438	4.306
14	Kota Pagar Alam	1.148	460	360	3.576
15	Kota Lubuklinggau	1.393	671	522	4.650
	JUMLAH	59.176	18.964	10.317	166.597

Sumber : Sumatera Selatan Dalam Angka Tahun 2014

Jumlah guru terbanyak berada di Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Muara Enim.

2.1.3.1.1.3. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan rasio anak yang sekolah pada kelompok umur tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama.

Tabel 2.23.

Angka Partisipasi Sekolah Menurut Tingkat Usia
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013

Angka Partisipasi Sekolah	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Angka Partisipasi Sekolah 7-12	97,79	97,8	98	97,91	98,04	98,52
Angka Partisipasi Sekolah 13-15	83,21	84,65	85,41	85,32	85,52	89,17
Angka Partisipasi Sekolah 16-18	52,12	54,12	54,79	55,93	58,31	60,08

Sumber : Inkesra Sumsel 2013

Dari tabel data Angka Partisipasi Sekolah (APS) setiap tingkatan umur di atas terlihat bahwa semakin tinggi umur, angka partisipasi sekolah semakin mengecil. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak penduduk Sumatera Selatan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada tahun 2013 angka Partisipasi Sekolah anak usia 7-12 tahun (usia SD) mencapai 98,52%, pada kelompok umur 13-15 tahun (usia SMP) APS turun menjadi 89,17% dan pada kelompok usia 16-18 tahun (usia SMA) menjadi 60,08%. Hal ini menunjukkan ada 1,96 % anak usia 7-12 tahun tidak melanjutkan ke SMP. Sebanyak 11,48% anak usia 13-15 tahun tidak melanjutkan ke SMA, dan ada 41,79% remaja usia 16-18 tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi (kuliah), dikarenakan faktor ekonomi.

2.1.3.1.1.4. Angka Kelulusan

Tahun 2013 kelulusan tingkat SD sederajat mencapai 99,36 sedangkan untuk tingkat SMP sederajat dan SMA sederajat termasuk kelulusan Paket B dan C hampir mendekati 100 persen yaitu 99,97 untuk tingkat SMP sederajat dan 99,94 untuk tingkat SMA sederajat.

Tabel 2.24.

Angka Kelulusan Untuk Setiap Jenjang Pendidikan

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2013

Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013
SD/MI	93,43	93,73	94,87	96,83	99,36
SMP/MTs	89,21	89,73	99,95	99,89	99,97
SMA/SMK/MA	98,56	97,90	99,89	99,96	99,94

Sumber : EKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014

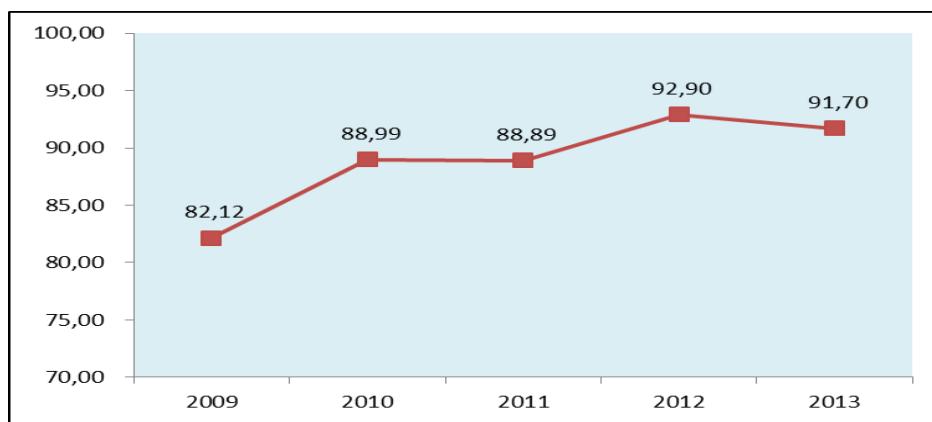
2.1.3.1.2. Kesehatan

Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu adalah sebagian dari variabel-variabel yang dapat menunjukkan pencapaian pembangunan kesehatan di wilayah Sumatera Selatan. Pada tahun 2013, jumlah rumah sakit sebanyak 58 buah terdiri atas rumah sakit pemerintah maupun swasta yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Fasilitas kesehatan lainnya seperti puskesmas dan posyandu masing-masing berjumlah 319 dan 6.518.

Persentase kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih sebesar 91,72% belum mencapai target yang diharapkan yaitu sebesar 94,00%. Adapun persentase kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan dari tahun 2009 sampai dengan 2013.

Gambar 2.16.

Persentase Kelahiran yang ditolong Tenaga Kesehatan
Tahun 2009-2013 di Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : LAKIP Dinas Kesehatan 2014; BPS Provinsi Sumsel 2014

Persentase masyarakat yang sakit memanfaatkan Rumah Sakit tahun 2013 masih rendah yaitu sebesar 26%, walaupun terdapat peningkatan dari tahun ketahun.

Gambar 2.17.

Persentase Rumah Sakit yang dimanfaatkan Masyarakat
Tahun 2010-2014 di Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : LAKIP Dinas Kesehatan 2014; BPS Provinsi Sumsel 2014

Jumlah Rumah Sakit yang menerapkan pelayanan keperawatan dan kebidanan sesuai standar dan pedoman ada 16 RSUD dari 21 RSUD. Persentase Rumah Sakit yang memenuhi standar masih sebesar 76,19% dari target untuk tahun 2014 sebesar 87%, sementara target akhir RPJMD yaitu sebesar 95%.

2.1.3.1.2.1. Rasio Puskesmas Per 30.000 Penduduk

Rasio puskesmas dengan penduduk di Sumatera Selatan pada tahun 2011 sebesar 1:24.978, menjadi 1: 24.978 pada 2012. Angka ini menunjukkan jumlah puskesmas di Sumatera Selatan sudah mencapai target provinsi sebesar (1:30.000).

Tabel 2.25.

Rasio Puskesmas Per 30.000 Penduduk Tahun 2008-2012

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	NA	NA	NA	1:24.355	1:24.978	1:24.545

Sumber : LAKIP Dinas Kesehatan 2013; BPS Provinsi Sumsel

2.1.3.1.2.2. Rasio Dokter per 100.000 penduduk

Selama 4 tahun terakhir (2008-2012) tidak terjadi peningkatan Rasio dokter per 100.000 penduduk, yaitu 10,00. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dokter per 100.000 penduduk di Sumatera Selatan masih kurang memadai, target renstra sebesar 40 dokter per 100.000 penduduk pada tahun 2013. Jika dilihat dari hasil capaian selama 5 tahun maka rasio dokter per 100.000 penduduk menunjukkan trend yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2009 rasio dokter per 100.000 penduduk sebesar 9,48 naik menjadi 10 per 100.000 penduduk pada tahun 2010 sampai dengan 2012 dan menjadi 27,60 pada tahun 2013.

Tabel 2.26.

Rasio Dokter Per 100.000 Penduduk Tahun 2008-2013

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rasio dokter per 100.000 penduduk	NA	9,48	10,00	10,00	10,00	27,60

Sumber : LAKIP Dinas Kesehatan 2013

2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum

Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan tentu saja menyebabkan meningkatnya pergerakan orang maupun barang. Infrastruktur utamanya infrastruktur jalan dituntut agar mampu memfasilitasi semakin meningkatnya pergerakan orang dan barang tersebut. Keberadaan infrastruktur jalan menjadi sangat vital karena fungsinya adalah untuk mendukung pencapaian tujuan sosial dan ekonomi masyarakat serta menjamin aksesibilitas antar wilayah.

Jaringan jalan berstatus di Provinsi Sumatera Selatan sendiri hingga pada tahun 2013 mencapai 17.248,65 km, yang terdiri atas jalan dengan status jalan nasional sebesar 8,37% atau sepanjang 1.444,26 km, jalan provinsi sebesar 8,48% atau sepanjang 1.462,87 km dan jalan kabupaten/kota sebesar 83,15% atau sepanjang 14.341,52 km yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Dari total keseluruhan panjang jalan tersebut, tentu saja tidak semua dalam kondisi baik/mantap. Berdasarkan data tahun 2013, secara keseluruhan kondisi jalan mantap baru mencapai 64,84% dari total seluruh jaringan jalan. Apabila diuraikan berdasarkan status jalan, kondisi jalan mantap kewenangan nasional sebesar 96,20%, jalan mantap kewenangan provinsi sebesar 81,59% dan jalan mantap kewenangan kab/kota rata-rata sebesar 59,98%. Selain belum mantapnya beberapa kondisi jaringan jalan, beberapa ruas jalan utama di Sumsel juga masih sering terjadi kemacetan akibat kapasitas jalan yang ada tidak mampu menampung volume kendaraan yang lewat. Pada kurun waktu terakhir laju kerusakan ruas jalan melebihi dari upaya peningkatan/rehabilitasi jalan yang ada sebagai akibat dari tingginya lalu lintas kendaraan dengan tonase tinggi (MST 10 ton – 16 ton) sedangkan kemampuan daya dukung jalan di Sumatera Selatan rata-rata 10 ton.

2.1.3.1.4. Perumahan

Kebutuhan akan perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap orang. Rumah digunakan sebagai tempat berlindung terhadap gangguan dari luar dan sebagai tempat tinggal sehari-hari penghuninya yaitu sebagai tempat untuk tumbuh, hidup, berinteraksi dan fungsi lainnya. Oleh karena itu rumah diharapkan mampu memberikan rasa nyaman bagi penghuninya dan harus memenuhi syarat-syarat kesehatan.

Akses rumah tangga terhadap fasilitas sanitasi yang layak juga terus meningkat. Data Susenas menunjukkan bahwa akses sanitasi yang layak pada tahun 2008 menjadi 54,18 persen pada tahun 2013. Laju pertumbuhan penduduk menjadi tantangan utama yang dihadapi dalam meningkatkan cakupan sanitasi yang layak. Dengan memperhatikan kecenderungan capaian akses sanitasi layak selama ini, Pemerintah Sumatera Selatan harus memberikan perhatian khusus, termasuk peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi, guna mencapai target MDGs pada tahun 2015 sebesar 62,41 persen.

Tabel 2.27.

Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak
Tahun 2008 – 2013

No	Wilayah	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Ogan Komering Ulu	55.95	52.06	47.89	59.57	56.37	64.50
2	Ogan Komering Ilir	19.14	20.09	21.11	28.1	30.65	35.64
3	Muara Enim	38.83	42.94	50.22	59.3	53.7	65.69
4	Lahat	32.56	34.90	33.29	28.59	40.63	45.98
5	Musi Rawas	21.38	26.87	28.07	31.1	33.95	37.70
6	Musi Banyuasin	27.55	27.09	44.33	43.24	56.93	44.28
7	Banyuasin	38.79	38.40	33.54	40.49	41.34	42.55
8	OKU Selatan	23.23	21.27	35.35	26.99	22.37	28.98
9	OKU Timur	21.56	26.18	38.52	44.25	53.17	58.31
10	Ogan Ilir	42.72	44.39	37.84	46.27	43.49	50.94
11	Empat Lawang	11.40	15.87	24.85	32.81	40.31	37.93
12	Kota Palembang	74.11	75.13	76.83	77.49	76.08	78.19
13	Kota Prabumulih	61.80	69.09	64.50	70.36	75.21	68.01

No	Wilayah	2008	2009	2010	2011	2012	2013
14	Kota Pagar Alam	13.91	10.05	43.88	48.7	55.21	47.77
15	Kota Lubuk Linggau	60.83	75.62	78.79	69.96	66.73	84.39
	Sumatera Selatan	39.03	41.4	45.32	49.48	50.87	54,18

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan 2013

2.1.3.1.5. Penataan Ruang

Peraturan daerah mengenai penataan ruang yang masih berlaku sampai saat ini adalah Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sumatera Selatan, sedangkan revisi Perda RTRW Provinsi Sumatera Selatan sampai saat ini belum ditetapkan menjadi Perda karena masih menunggu tindaklanjut peninjauan kembali Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.822/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan.

Selain RTRW Provinsi, kabupaten yang belum menetapkan Perda RTRW adalah Musi Banyuasin, Musi Rawas Utara dan Penukal Abab Lematang Ilir, untuk Musi Banyuasin disebabkan karena Evaluasi Raperda RTRW Kabupaten Musi Banyuasin belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu peninjauan kembali Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.822/Menhut-II/2013 tentang perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir belum dilakukan mengingat kabupaten tersebut baru ditetapkan secara definitif sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) pada tahun 2013, dan kedua kabupaten tersebut telah menyusun Draft RTRW kabupaten dan dilanjutkan menjadi dokumen RTRW serta dilakukan penetapan pada tahun 2015.

Dalam mendukung kebijakan penataan ruang yang baik, beberapa kendala yang dihadapai antara lain yaitu lambatnya penyusunan RDTR Kabupaten/Kota disebabkan karena belum tersedianya peta skala 1: 5.000

dan terbatasnya anggaran yang disediakan dalam penyusunan RDTR Kabupaten/kota, Masih terbatasnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang dan sumber daya aparatur bidang penataan ruang dan Sistem Informasi Geografis, belum beroperasinya Jaringan Informasi Geospasial Daerah (IGD), belum terbangunnya “*One Map* Sumatera Selatan” sebagai tindak lanjut dari Kebijakan Nasional tentang *One Map Policy*, Lemahnya koordinasi antar sektoral dan instansi terkait lainnya dalam proses perencanaan tata ruang.

Upaya yang diharapkan dapat meningkatkan kebijakan penataan ruang tersebut antara lain yaitu dengan cara meningkatkan koordinasi dan peran BKPRD Provinsi dalam mendorong kabupaten/kota dalam penyediaan anggaran untuk pengadaan peta dan percepatan penyusunan RDTR, perlu didorong percepatan penyusunan perencanaan tata ruang Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali), melakukan koordinasi dan Konsultasi kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendorong percepatan proses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penyelesaian perubahan fungsi kawasan khususnya di kawasan Dangku Kab. Muba, dalam rangka mendukung *one map policy* di Provinsi Sumsel akan dibentuk kelembagaan Informasi Geospasial Daerah (IGD) sesuai dengan Perpres 27/2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional melalui Pertaruan Gubernur Sumatera Selatan, selanjutkan akan disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Informasi Geospasial Daerah (IGD), koordinasi secara intensif dengan peningkatan kapasitas, peran dan fungsi antara stakeholder terkait, peningkatan kapasitas dan jumlah PPNS melalui pelatihan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Penataan Ruang, penambahan SDM planologi dan tenaga GIS dalam bidang penataan ruang dan peningkatan koordinasi dengan sektor terkait dan meningkatkan peran dan fungsi BKPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi sangat penting fungsinya dalam ekosistem kota. RTH merupakan salah satu indikator sebagai indeks untuk menuju “Kota Hijau” (Green City). Untuk itu, dalam kurun waktu 2009-2012 kota Palembang yang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan telah berhasil meningkatkan persentase RTH dalam kota sesuai amanat perundangan bahwa setiap kota minimal harus menyediakan 30% RTH.

2.1.3.1.6. Perencanaan Pembangunan

Sesuai dengan UU 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan pembangunan nasional menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan. Ketiga amanat ini, sudah dipenuhi dan dijabarkan oleh Provinsi Sumatera Selatan melalui penyusunan RPJP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025, RPJM Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah kurun waktu 2008-2013.

Tabel 2.28.

Ketersediaan Dokumen Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan

No	Dokumen	Status	Keterangan
1	RPJPD 2005-2025	Ada	Perda Prov. Sumsel No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025.
2	RPJMD 2013-2018	Ada	Perda Prov. Sumsel No.09 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018.
3	RKPD :		
	-Tahun 2013	Ada	Pergub Sumsel No. 21 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013
	-Tahun 2014	Ada	Pergub Sumsel No. 17 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014

Secara umum seluruh program yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013, telah dijabarkan dalam RKPD Provinsi Sumatera Selatan mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 atau dengan kata lain Program RPJMD, 100% telah dijabarkan dalam RKPD Provinsi Sumatera Selatan setiap tahun berkenaan.

2.1.3.1.7. Perhubungan

2.1.3.1.7.1. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus

2.1.3.1.7.1.1. Terminal Bus

Untuk prasarana pendukung, saat ini di Sumatera Selatan memiliki 36 terminal angkutan umum yang terdiri atas terminal tipe B sebanyak 18 terminal (50%), tipe C sebanyak 11 terminal (30,56%) dan sisanya sebanyak 7 terminal (19,44%) termasuk terminal tipe A yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota. Semakin banyaknya angkutan antar kabupaten/kota dalam provinsi dan angkutan antar provinsi yang berplat hitam (travel) berdampak terhadap semakin berkurang angkutan umum (berplat kuning) pada jurusan yang sama yang pada akhirnya juga berdampak semakin berkurangnya angkutan umum yang masuk ke terminal.

Tabel 2.29.

Data Terminal di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013

No	Kabupaten/Kota	Nama Terminal	Tipe Terminal		
1	Palembang	1. Karya Jaya 2. Alang-Alang Lebar 3. Plaju 4. Jakabaring 5. Tangga Buntung 6. Lemabang 7. Sako	A A	B B	C C C
2	Prabumulih	1. Prabumulih 2. Kota Prabumulih		B	C
3	Pagaralam	1. Nendagung 2. Pagar Gading		B	C
4	Lubuk Linggau	1. Simpang Perintis		B	

No	Kabupaten/Kota	Nama Terminal	Tipe Terminal		
		2. Muara 3. Kalimantan 4. Watas 5. Satelit			C C C C
5	Banyuasin	1. Betung	A		
6	Musi Banyuasin	1. Randik		B	
7	Empat Lawang	-	-	-	-
8	Ogan Ilir	1. Km 32 Indralaya		B	
9	Ogan Komering Ilir	1. Kayu Agung 2. Tanjung Raja 3. Tulung Selapan		B B B	
10	Ogan Komering Ulu	1. Baturaja	A		
11	OKU Timur	1. Kota Baru 2. Lubuk Harjo		B B	
12	OKU Selatan	1. Muara Dua			C
13	Muara Enim	1. Muara Enim 2. Simpang Kodim 3. Bantingan 4. Talang Ubi	A	B B B	
14	Musi Rawas	1. Simpang Periuk 2. Lakitan 3. Trawas	A	B B	
15	Lahat	1. Batay 2. Muara Siban 3. Lembayung	A	B	C
Jumlah			7	18	11

Sumber : Statistik Dishubkominfo Sumsel 2013

2.1.3.1.7.2. Perkeretaapian

Untuk pengangkutan barang dalam volume besar dan dengan jarak yang cukup jauh memang akan lebih efektif jika diangkut dengan menggunakan kereta api atau kapal. Akan tetapi angkutan kereta api di Sumatera Selatan masih terbatas pada kawasan tertentu (Palembang-Lampung dan Palembang-Lubuk Linggau), belum ada jalur yang menuju outlet pengiriman barang di Sumsel dan masih menggunakan single track dan dengan kondisi rel yang sudah cukup tua sehingga kapasitasnya terbatas. dari 675 km jalan kereta api yang ada di Sumatera Bagian Selatan sebagian besar (89%) merupakan single track dan sisanya

sepanjang 75 km merupakan jalur double track. Dari sisi kemampuan beban gandar sebagian besar jalan kereta api di Sumatera Selatan mempunyai kemampuan maksimal 13 ton dan baru sebagian kecil (32%) yang mempunyai beban gandar mencapai 18 ton.

Tabel 2.30.

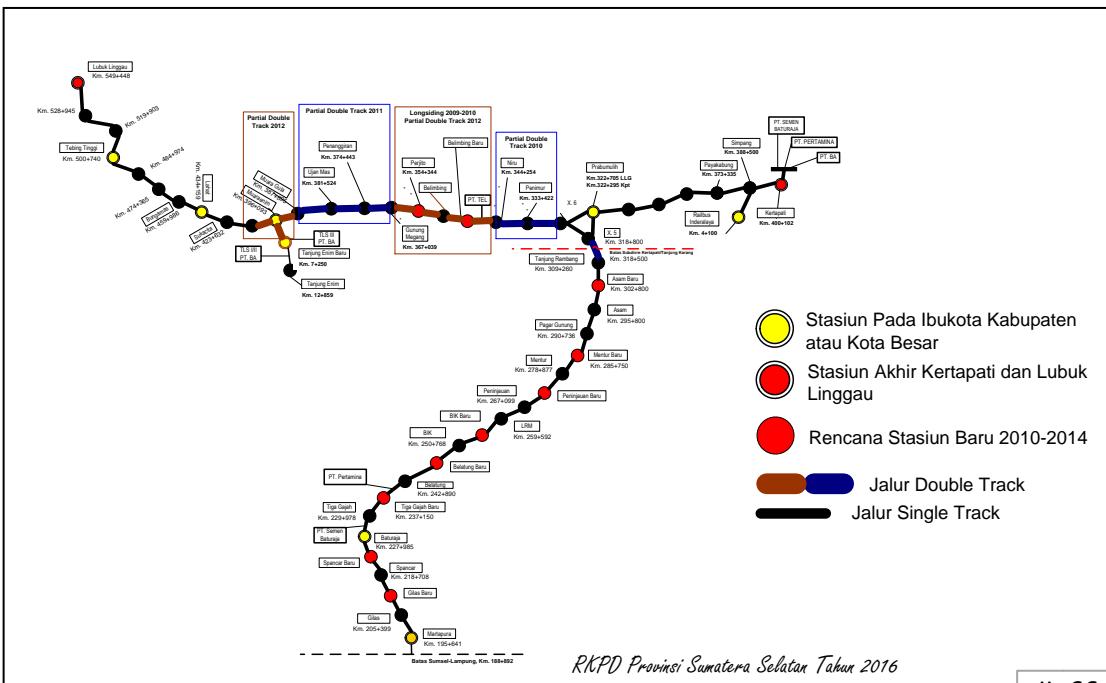
Rute dan Panjang Rel PT. KA Divre III di Wilayah Sumbagsel

No	Lintasan	Panjang (km)	Beban Gandar (Ton)
1	Kertapati-Prabumulih	77,8	13
2	Prabumulih-Baturaja	96	13
3	Baturaja-Martapura	32	18
4	Martapura-Kota Bumi	98	18
5	Kota Bumi-Tanjung Karang	86	18
6	Prabumulih-Muara Enim	74	13
7	Muara Enim-Lahat	38,3	13
8	Lahat-Tebing Tinggi	66	13
9	Tebing Tinggi-Lubuk Linggau	49	13
10	Lintasan Lainnya	58,85	13
	Total	675,95	

Sumber : Dishubkominfo Sumatera Selatan

Gambar 2.18.

Jalur Kereta Api dan Stasiun di Sumatera Bagian Selatan



2.1.3.1.7.3. Transportasi Sungai

Daerah yang memiliki akses baik ke Alur Sungai terdapat 8 kabupaten, 62 kecamatan dan 356 desa/kelurahan atau 11,59 % dari 3.079 desa di Sumatera Selatan

**Tabel 2.31. Jumlah Wilayah di Sekitar Sungai
Di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2013**

No.	Sungai	Wilayah dengan Akses ke Sungai Baik			
		Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
1	Banyuasin	Banyuasin	Tanjung Lago	1	4
2	Batanghari	Musi	Batanghari Leko	1	10
3	Calik	Banyuasin	Pulau Rimau	1	10
4	Kelingi	Musi Rawas	Bulan Tengah Suku Ulu, Muara Kelingi, Muara Lakitan	3	5
5	Komering	OKI	Kota Kayu Agung, Sirah Pulau Padang, Jejawi, Lempuing	4	29
		OKU Timur	Buay Pemuka Bangsa Raja, Buay Pemuka Peliung, Cempaka, Madang, Suku II, Semendawai Barat	5	11
6	Lalan	Musi	Bayung Lencir,	2	16
7	Lematang	Muara Enim	Abab, Rambang Dangku, Sungai Rotan, Tanah Abang, Muara Belida	5	23
8	Lilin	Banyuasin Musi	Tungkal Ilir Sungai Lilin	1 1	2 1
9	Lumpur	OKI	Cengal, Pampangan, Tulung Selapan	3	23
10	Mesuji	OKI	Pedamaran	3	9

No.	Sungai	Wilayah dengan Akses ke Sungai Baik			
		Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
			Timur, Sungai Menang, Cengal		
11	Musi	Banyuasin	Banyuasin I,	2	24
		Muara Enim	Penukal Utara	1	1
		Musi	Sanga Desa	1	3
		Palembang	Gandus, Ilir Timur II,	4	10
12	Ogan	Ogan Ilir	Lubuk keliat, Muara Kuang, Rantau Alai, Indralaya Utara, Kandis, Pemulutan, Pemulutan Barat, Pemulutan Selatan, Tanjung Batu, Tanjung Raja	12	65
13	Rawas	Musi Rawas	Karang Dapo, Rawas Ilir,	5	34
14	Saleh	Banyuasin	Air Saleh, Rambutan, Muara Sugihan	3	30
15	Sugihan	Banyuasin	Muara Sugihan	1	18
16	Telang	Banyuasin	Banyuasin II, Makarti Jaya, Muara Telang	3	27
	Total			62	355

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2013

Jumlah Dermaga Sungai di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 89 unit yang tersebar di 10 Kabupaten di Sumatera Selatan. Sebagian besar (87%) dermaga-dermaga Sungai tersebut dalam kondisi baik, 3% dalam kondisi rusak dan sisanya (10%) tidak diketahui kondisinya.

Tabel 2.32.
Daftar Dermaga Sungai dan Danau di Sumatera Selatan

No	Dermaga	Lokasi	Jenis Dermaga	Kondisi	Tahun Pembuatan
1	Gandus	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2006-2008
2	Tangga Buntung (35 Ilir)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	1992/1993
3	Sekanak	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2006
4	Benteng Kuto Besak (BKB)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2007
5	Bawah Ampera (7 ulu)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	-
6	16 Ilir	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2002
7	16 Ilir (Bawah Ampera)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2004
8	Kertapati	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	-
9	Kertapati (Samping Stasiun KA)	S. Ogan, Palembang	Beton	Baik	2011
10	10 Ulu	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	-
11	Rumah Buruk	-	-	Baik	-
12	Pasar Kuto	-	-	Baik	-
13	1 Ilir	-	-	Baik	-
14	Tangga Takat	-	-	Baik	-
15	13 Ulu	-	-	Baik	-
16	Padatuan	-	-	Baik	-
17	Padatuan 7 Ulu (a)	-	-	Baik	2009
18	Padatuan 7 Ulu (b)	-	-	Baik	2011
19	5 Ulu	-	-	Baik	-
20	4 Ulu	-	-	Baik	-
21	Sei Buaya	-	-	Baik	-
22	Pegayut	-	-	Baik	-
23	Ki Merogan	-	-	Baik	2008
24	Tangga Batu	S. Musi, Palembang	Ponton	Rusak	-
25	Pasar Induk Jakabaring	S. Ogan, Palembang	Ponton	Baik	2003/2005
26	Sei Lais	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	-
27	Bek Ang DAM (TNI)	S. Musi, Palembang	-	Baik	2010
28	Kampung Kapiten	S. Musi, Palembang	-	Baik	2008
29	Lawang Kidul	S. Musi, Palembang	-	Baik	2008
30	3/4 Ulu	S. Musi, Palembang	-	Baik	2010
31	Masjid Jamik	S. Musi,	-	Baik	2010

No	Dermaga	Lokasi	Jenis Dermaga	Kondisi	Tahun Pembuatan
		Palembang			
32	Solok Betutu	S. Musi, Palembang	-	Baik	2009
33	Pemulutan(Pos Peng)	S. Ogan, Ogan Ilir	Ponton	Baik	1990
34	Tanjung Raja	S. Ogan, Ogan Ilir	Ponton	Baik	1994
35	Muara Kuang	S. Ogan, Ogan Ilir	-	-	-
36	Kuala Sugihan	S. Sugihan, OKI	Ponton	Baik	1990
37	Lebong Hitam	S. Lebong Hitam, OKI	Ponton	Baik	1990
38	Pelabuhan Laut Sungai Lumpur	S. Lumpur, OKI	Kayu	Baik	1990
39	Sungai Batang	S. Batang, OKI	Ponton	Baik	1990
40	Tulung Selapan	S. Tulung Selapan, OKI	Beton	Baik	2000
41	Sugihan Kanan	Jalur 27, OKI	Kayu	Baik	2003
42	Kuala XII	S. Kuala, OKI	Ponton	Baik	1990
43	Cengal	Cengal, OKI	Beton	Baik	2007
44	Pulau Padang	S. Lumpur, OKI	-	Baik	-
45	Pampangan	S. Lumpur, OKI	-	Baik	-
46	Sukodarmo (Jejawi)	S. Komering, OKI	Beton	Baik	2007
47	Muara Kumbang	S. Musi, Banyuasin	Kayu	Baik	2003
48	Upang	S. Sugihan, Banyuasin	Kayu	Baik	2003
49	Makarti Jaya	S. Sebalik Jalur 9 (P9), Banyuasin	Ponton	Rusak	1983
50	Sungsang	S. Lilin, Banyuasin	Ponton	Baik	2004/2006
51	Sugihan (Ma. Padang)	Jalur 20, Banyuasin	Ponton	Baik	1998
52	Sugihan Kiri (cendana)	Jalur 14, Banyuasin	Kayu	Baik	2003
53	Sugihan Kiri (Timbul Jaya)	Jalur 13, Banyuasin	Kayu	Baik	2003
54	Gasing	Gasing	Beton, Ponton	Baik	2003/2004
55	Muara Telang	Jalur 8, Banyuasin	Ponton	Baik	2003
56	Telang Jaya	Jalur 8, Banyuasin	Besi/Kayu	Baik	1992
57	Simpang PU	S. Telang, Banyuasin	Ponton	Baik	1997
58	Muara Telang	Jalur 4, 5 Telang, Banyuasin	Ponton	Baik	2005
59	Sembilang	S. Sembilang,	Ponton	Baik	2003/2004

No	Dermaga	Lokasi	Jenis Dermaga	Kondisi	Tahun Pembuatan
		Banyuasin			
60	Pengumbuk	S. Musi Banyuasin	Besi/Kayu	Baik	2001
61	Teluk Betung	P. Rimau, Banyuasin	Ponton	Baik	-
62	Muara Padang	S. Sebalik, Banyuasin	Beton	Baik	-
63	Penuguan	S. Lilin, Banyuasin	-	-	-
64	Karang Agung	S. Lalan, Muba	Beton	Baik	1985
65	Sungai Lilin	S. Lilin, Muba	Ponton	Baik	2004
66	Sekayu	S. Musi, Muba	Beton	Baik	1993
67	Muara Lematang	S. Lematang, Muba	Ponton	Baik	1990
68	Bayung Lincir	S. Lalan, Muba	Ponton	Baik	2009
69	Babat	S. Musi, Muba	-	-	-
70	Telang	S. Lalan, Muba	-	-	-
71	Pangkalan Bulian	S. Batang Hari Leko, Muba	-	-	-
72	Muara Rawas	S. Kelingi, Muba	-	-	-
73	Teluk Kijing	S. Batang Hari Leko, Muba	-	-	-
74	Muara Teladan	S. Batang Hari Leko, Muba	-	-	-
75	Simpang	S. Komering, OKU	-	-	-
76	Banding Agung	Danau Ranau, OKU Selatan	Baja	Baik	1993
77	Kota Batu	Danau Ranau, OKU Selatan	Baja,Lantai Kayu	Rusak	1994
78	Talang Pangeran (Pemulutan)	S. Ogan, Ogan Ilir	Ponton	Baik	2006
79	Muara Rupit	S. Rawas, Musi Rawas	Beton	Baik	-
80	Muara Kelinci	S. Kelinci, Musi Rawas	-	Baik	-
81	Muara Lakitan	S. Kelinci, Musi Rawas	-	Baik	-
82	Beringin Teluk	S. Rawas, Musi Rawas	-	Baik	-
83	Pauh	S. Rawas, Musi Rawas	-	Baik	-
84	Padang Tepung	S. Kelinci, Lahat	-	Baik	-
85	Kota Agung	S. Lematang, Lahat	-	Baik	-
86	Muara Enim	S. Lematang, Muara Enim	-	Baik	-
87	Beringin	S. Ogan, Muara Enim	-	Baik	-
88	Gunung Megang	S. Lematang,	-	Baik	-

No	Dermaga	Lokasi	Jenis Dermaga	Kondisi	Tahun Pembuatan
		Muara Enim			
89	Muara Lematang	S. Musi, Muara Enim	-	Baik	-

Sumber : Statistik Dishubkominfo 2013

Angkutan Sungai (Kapal) mengalami penurunan jumlah yang beroperasi antara lain dipengaruhi oleh pembukaan jalan baru dan pendangkalan pada alur pelayaran sungai sebagai dampak dari sedimentasi. Selain itu Pelabuhan Boom Baru Palembang yang saat ini sebagai outlet utama untuk pengangkutan barang melalui kapal juga memiliki beberapa kendala antara lain : sulit untuk dikembangkan karena berada ditengah pemukiman, kedalaman alur pelayaran relatif dangkal, sehingga pelayaran sangat tergantung dengan pasang surut sekitar 6 jam/hari dan panjang alur pelayaran sungai Musi ke ambang luar relatif jauh ± 108 km (60 mil) yang menyebabkan tingginya biaya operasional kapal yang akan berlabuh.

2.1.3.1.7.4. Transportasi Udara

Angkutan udara di Sumatera Selatan juga belum seimbang, dari 8 bandar udara yang ada, hanya 3 yang beroperasi (SMB II Palembang dan Silampari Lubuk Linggau dan Atung Bungsu Pagaralam), sedangkan 5 bandara lainnya (bandara perintis) saat ini belum beroperasional sehingga pilihan perjalanan orang dan barang di Sumsel sebagian besar tertumpu pada fasilitas Jalan Raya.

Tabel 2.33.

Kondisi Bandar Udara di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2013

No	Kab/Kota	Nama Bandara	Run Way	Jenis Pesawat	Keterangan Keterangan
1	Palembang	SMB II	3000 x 45 m	Boeing 737/ Air Bus 330	Operasional Bandara Internasional

2	Muara Enim	Pendopo	1300 x 20 m	-	<i>Vacuum</i>
3	Muara Enim	Tanjung Enim	900 x 23 m	Cassa 212	<i>Vacuum</i>
4	Muara Enim	Serdang Gelumbang	1000 x 18 m	DHC-6	<i>Vacuum</i>
5	Lubuk Linggau	Silampari	2050 x 30 m	Fokker 50	Operasional dengan rute Lubuk Linggau-Palembang dan Lubuk Linggau
6	Oku Selatan	Banding Agung	900 x 23 m	Cassa 212	<i>Vacuum</i>
7	Pagaralam	Atung Bungsu	1400 x 30 m	Fokker 50	Mualai Operasional Tahun 2014
8	Muba	Sekayu	900 x 23 m	Cassa 212	<i>Vacuum</i>

Sumber : Dishubkominfo, 2013

Dari gambaran kondisi infrastruktur tersebut ada beberapa fokus yang harus dihadapi ke depannya, antara lain Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang mendukung pembangunan sektor unggulan masih perlu ditingkatkan terutama untuk mengangkut barang (produk dalam skala besar yaitu Batubara, CPO, Karet, Kayu, Pulp, Semen, dll), pembangunan infrastruktur juga harus mampu menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah sekaligus untuk pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur kedepannya juga harus mampu untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, untuk itulah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersinergis dengan Pemerintah untuk segera mewujutkan beberapa pembangunan infrastruktur strategis (Jalan bebas hambatan, Jembatan Musi, KA Doble Track, Monorail)

2.1.3.1.8. Lingkungan Hidup

Sumatera Selatan memiliki sumber daya air yang relatif besar dan tersebar namun laju pertambahan penduduk dan banyaknya aktifitas

ekonomi menyebabkan kebutuhan air semakin meningkat dan penurunan kualitas air. Pencemaran dan kekurangan air secara fisik dapat disebabkan oleh limbah domestik, limbah industri karena belum seluruh industri memiliki IPAL, limbah pestisida, kerusakan lahan yang menyebabkan lumpur, rumput liar, kegiatan transportasi sungai, dan pemakaian air tanah yang tidak terkontrol.

Kondisi Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan data yang ada pada Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.34.

Penurunan Emisi GRK dari 6 Sektor di Sumatera Selatan Tahun 2013-2014

No	Sektor	Tahun			
		2013		2014	
		BAU Baseline (tCO2eq)*	Penurunan Emisi (tCO2eq)**	BAU Baseline (tCO2eq)*	Penurunan Emisi (tCO2eq)**
1	Pertanian	1.139.476,17	N/A	1.245.053,33	N/A
2	Kehutanan dan Lahan Gambut	93.796.644,99	498.063.958,00	108.778.693,54	407.284.661,00
3	Energi	2.438.236.646,19	1.309,12	2.547.957.295,27	1.859,53
4	Transportasi	2.342.034,55	24.422,68	2.693.339,73	33.542,24
5	Industri	2.556.420,39	N/A	2.684.241,41	N/A
6	Sampah/Limbah	1.056.370	N/A	1.124.324,00	N/A
Jumlah		2.539.127.592,29	498.089.689,80	2.664.482.947,28	407.320.062,77

Sumber :

* Dokumen RAD GRK Tahun 2012

** Pelaporan Tahun 2015

Selama ini untuk mengukur kualitas lingkungan umumnya dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu air, udara, dan lahan sehingga sulit untuk menilai apakah kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah bertambah baik atau sebaliknya. Salah satu cara untuk mereduksi banyak data dan informasi adalah dengan menggunakan indeks.

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 2007 telah mengembangkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) untuk 30 ibukota provinsi. Selain itu pada tahun 2009 Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bekerja sama dengan Dannish International Development

Agency (DANIDA) juga mulai mengembangkan indeks lingkungan berbasis provinsi yang pada dasarnya merupakan modifikasi dari EPI.

Indeks kualitas lingkungan dapat dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan program-program pengelolaan lingkungan. Selain sebagai sarana untuk mengevaluasi efektifitas program-program pengelolaan lingkungan, indeks kualitas lingkungan mempunyai peranan dalam hal: membantu perumusan kebijakan, membantu dalam mendisain program lingkungan, dan mempermudah komunikasi dengan publik sehubungan dengan kondisi lingkungan.

Tabel 2.35.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2011-2013

di Provinsi Sumatera Selatan

Indikator	Tahun			Laju Penurunan 2012-2013
	2011	2012	2013	
Laju penurunan Indeks kualitas air	60,8	55	51,11	3,89
Laju penurunan Indeks kualitas udara	89,34	84,06	74,87	9,19
Laju penurunan Indeks tutupan lahan	34,52	34,68	59,03	-
IKLH	58,85	55,59	61,41	

Sumber : Laporan SLHD 2013

2.1.3.1.9. Kependudukan dan Catatan Sipil

Seluruh Kabupaten Provinsi di Selatan sudah mengimplementasikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik (E-KTP).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Apabila nilai IPG sama dengan IPM maka dapat dikatakan tidak terjadi kesenjangan gender. Semakin tinggi rasio antara IPM dan IPG, semakin rendah kesenjangan gender, sebaliknya semakin rendah rasio semakin tinggi gap kesenjangan gender.

2.1.3.1.10. Sosial

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, anak-anak terlantar menjadi tanggungjawab pemerintah untuk merawatnya. Jumlah panti asuhan di Provinsi Sumatera Selatan sepanjang periode 2008-2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.36.

Jumlah Panti Asuhan di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2008-2013

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Panti Asuhan	200	200	200	113	168	162

Sumber : BPS 2013

Terjadi pernurunan jumlah panti asuhan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013 menjadi 162 yang sebelumnya pada tahun 2012 sebanyak 168 panti asuhan.

2.1.3.1.11. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami penurunan dalam pertengahan tahun 2010 dan 2011 meskipun capaian pada tahun 2008 dimana angka 69,06 persen mengalami kenaikan pada tahun 2012 yakni 69,56. Terjadi penurunan angka partisipasi angkatan kerja dari tahun 2011 yakni 71,5 persen menjadi 69,56 persen ditahun 2012 dan menurun kembali menjadi 66,50 persen di tahun 2013, agar ditingkatkan dalam program ketenagakerjaan maupun dapat menyesuaikan dengan kebutuhan menurut struktur ketenagakerjaan.

Tabel 2.37.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2008-2013

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,06	68,31	70,23	71,5	69,56	66,50

Sumber : BPS Sumsel 2013

2.1.3.1.12. Penanaman Modal

Tabel 2.38.

Jumlah Investor PMDN dan PMA di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2008-2013

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Investor PMDN	14	16	38	42	34	42
Jumlah Investor PMA	35	45	53	73	73	78

Sumber : BPMPD Provinsi Sumatera Selatan/ BPS SS 2013

Terjadi peningkatan setiap tahunnya kecuali di Tahun 2012, terjadi penurunan jumlah investor dalam negeri dari 42 (Tahun 2011) menjadi 34 (Tahun 2012). Lalu kembali meningkat pada Tahun 2013.

Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sampai dengan triwulan IV Tahun 2014 sebanyak 100 izin/non izin. Pada tahun 2014, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah meraih penghargaan sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal Provinsi Terbaik Kedua Tahun 2014. Selain itu BP3MD juga mendapat penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia berupa Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Tabel 2.39.

Rekapitulasi Jumlah Perizinan dan Non Perizinan PTSP-BP3MD

Prov. Sumatera Selatan Tahun 2009-2014

Tahun	TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	Jumlah
2009	-	-	-	43	43
2010	32	40	28	39	139
2011	51	28	34	30	143
2012	33	31	31	58	153

2013	55	30	34	53	172
2014	36	26	19	19	100
TOTAL					750

Sumber: BPMPD Provinsi Sumatera Selatan

Investasi sangat penting sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi daerah. Tantangan bagi pemirntah daerah adalah peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif di daerah. Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu diperhatikan adalah kelembagaan yang ramah dunia usaha. Salah satu indikatornya adalah kemudahan pelayanan perijinan. Dalam hal ini meski semua kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), namun masih perlu dipastikan bahwa implemenatai PTSP tersebut dapat meningkatkan efisiensi proses perijinan, baik dalam hal biaya maupun waktu yang dibutuhkan.

Penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan setiap tahun. Predikat CC pada tahun 2010 meningkat menjadi Predikat B pada tahun 2013. Pada tahun 2014, ditargetkan tercapai Predikat A atau nilai 76,00.

Tabel 2.40.
Penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Sumsel Tahun 2010-2013

No	Tahun	Nilai	Predikat
1.	2010	50,56	CC
2.	2011	58,95	CC
3.	2012	65,18	B
4.	2013	68,20	B

Sumber: Biro Ortala Setda Provinsi Sumatera Selatan

Perkembangan persentase kabupaten/kota yang memiliki pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) semakin meningkat. Pada tahun 2009 baru sebesar 6,67% dan meningkat tahun 2013 sebesar 47.06% dan tahun 2014 diproyeksikan akan bertambah menjadi sebesar 53,33%.

Peningkatan ini sebagian karena penempatan pejabat kompeten dari BPKP, peningkatan kualitas SDM dan intensitas konsultasi dengan BPK/BPKP. Informasi dari BPKP wilayah Sumsel, pegawai BPKP yang dipekerjakan untuk pengelolaan keuangan daerah sebanyak 12 orang, yaitu di Pemprov Sumsel 2 orang, Pemkab OKU 1 orang, Pemkab OKU Timur 1 orang, Pemkab Muara Enim 1 orang, Pemkab Musi Rawas 1 orang, Pemkab Banyuasin 2 orang, Pemkot 1 orang, Pemkot Prabumulih 2 orang, dan Pemkab Pagar Alam 1 orang. Selain itu ada 9 orang lagi yang dipekerjakan sebagai inspektur/pegawai inspektorat. Seluruh Pemda di Sumatera Selatan aktif berkonsultasi dengan BPP terutama dalam perbaikan kelemahan sistem pengendalian internal pemda menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK, pendampingan penyusunan laporan kuang pemerintah daerah, dan audit untuk menghindari *fraud*.

Tabel 2.41.
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun 2009-2013

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Opini				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Provinsi Sumatera Selatan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
2	Kabupaten Banyuasin	TW	WDP	WTP DPP	WTP	WTP
3	Kabupaten Empat Lawang	TW	WDP	WDP	TMP	WDP
4	Kabupaten Lahat	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
5	Kabupaten Muara Enim	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP DPP
6	Kabupaten Musi Banyuasin	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP DPP
7	Kabupaten Musi Rawas	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
8	Kabupaten Ogan Ilir	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
9	Kabupaten Ogan Komering Ilir	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
10	Kabupaten Ogan Komering Ulu	TW	WDP	WDP	WDP	WDP
11	Kabupaten OKU Selatan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
12	Kabupaten OKU Timur	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
13	Kota Lubuklinggau	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
14	Kota Pagar Alam	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
15	Kota Palembang	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP DPP
16	Kota Prabumulih	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP DPP

Sumber: Biro Ortala Setda Provinsi Sumatera Selatan

2.1.3.1.13. Penanggulangan Bencana

Dari 17 (Tujuh belas) Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan baru 14 (empat belas) Kabupaten/Kota yang telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dalam hal ini dapat menyebabkan lambatnya informasi kejadian bencana yang diterima, menyebabkan lambatnya penanganan penanggulangan bencana.

Melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota yang belum membentuk BPBD agar dapat membentuk BPBD. Adapun Kabupaten/Kota yang belum membentuk BPBD adalah kota Prabumulih, kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Muratara.

2.1.3.1.13. Ketahanan Pangan

Untuk mendukung pelaksanaan program-program yang terkait dengan ketahanan pangan Provinsi Sumatera Selatan sudah didukung dengan regulasi yang terkait dengan ketahanan pangan. Selain peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda), yaitu Perda No. 06 Tahun 2006 tentang Arah Kebijakan Sumatera Selatan Lumbung Pangan 2006-2025. Selain itu, Pemerintah Sumatera Selatan juga mengeluarkan enam Peraturan Gubernur.

2.1.3.1.14. Komunikasi dan Informatika

Akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu indikator meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap informasi dan juga merupakan salah satu penanda terhadap tingkat kesejahteraan rumahtangga. Dari data yang ada kepemilikan telefon rumah masih kecil dan terus mengalami penurunan, hal ini disebabkan kebutuhan komunikasi rumahtangga mulai tergantikan dengan keberadaan telefon

genggam (seluler). Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya kepemilikan telepon seluler.

Di sisi lain, walaupun tren kepemilikan selalu meningkat, namun persentasenya masih belum terlalu tinggi, hal ini disebabkan harga komputer yang cukup tinggi. Hal yang cukup menarik adalah perbedaan antara akses internet di dalam dan luar rumah, dimana akses Rumah Tangga di dalam rumah lebih rendah dibandingkan di luar rumah. Hal ini disebabkan karena akses internet di luar rumah biasanya dilakukan melalui telefon seluler, warnet, kantor dan sekolah. Selain itu program *Sumsel free wifi*, yang mulai dilaksanakan tahun 2011, cukup membantu masyarakat untuk mengakses internet. Namun, secara nasional Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai rangking 14 dalam Peringkat e-Government Indonesia tahun 2014, salah satu penyebabnya adalah hanya 12 Web SKPD yang aktif dan 2 SKPD yang menggunakan e-Office dari total 50 SKPD.

Tabel 2.42.

NO	PROVINSI	DIMENSI					NILAI RATA-RATA	KATEGORI
		KEBIJAKAN	KELEMBAGAAN	INFRASTRUKTUR	APLIKASI	PERENCANAAN		
1	DKI Jakarta	3.04	3.13	3.14	3.30	2.80	3.08	Baik
2	Jawa Barat	2.88	3.20	2.95	3.13	2.87	3.01	Baik
3	Jawa Timur	3.08	3.13	2.90	2.73	2.60	2.89	Baik
4	D.I. Yogyakarta	2.79	2.93	2.95	2.80	2.93	2.88	Baik
5	Jawa Tengah	2.67	2.87	2.76	2.87	2.67	2.73	Baik
6	Gorontalo	2.67	2.80	2.62	2.57	2.60	2.65	Baik
7	Bali	2.63	2.53	2.52	2.80	2.73	2.64	Baik
8	Sumatera Utara	2.67	2.67	2.38	2.53	2.80	2.61	Baik
9	Aceh	2.33	2.67	2.67	2.60	2.53	2.56	Baik
10	Kalimantan Timur	2.71	2.53	2.10	1.93	1.93	2.24	Kurang
11	Bangka Belitung	2.13	2.80	2.05	2.57	1.80	2.23	Kurang
12	Riau	2.21	2.53	2.14	2.17	1.93	2.20	Kurang
13	Nusa Tenggara Barat	1.96	2.20	2.24	2.30	2.00	2.14	Kurang
14	Sumatera Selatan	1.71	2.13	2.19	2.43	1.80	2.05	Kurang
15	Kalimantan Barat	1.50	2.20	2.14	2.60	1.80	2.05	Kurang
16	Sumatera Barat	2.04	2.13	1.90	2.30	1.67	2.01	Kurang
17	Kalimantan Tengah	2.42	1.93	1.62	2.20	1.67	1.97	Kurang
18	Lampung	1.92	2.00	1.95	1.97	1.60	1.89	Kurang
19	Sulawesi Barat	1.54	1.93	1.71	2.00	1.53	1.74	Kurang
20	Sulawesi Tengah	2.08	1.80	1.52	1.60	1.53	1.71	Kurang
21	Papua	1.63	1.73	1.67	1.90	1.53	1.69	Kurang
22	Nusa Tenggara Timur	1.42	1.93	1.29	2.00	1.33	1.59	Kurang
RATA-RATA		2.27	2.43	2.25	2.42	2.12	2.30	Kurang

Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.2.1. Pertanian

Ketersediaan benih tanaman pangan, kurangnya luas penerapan teknologi spesifik lokasi dan belum optimalnya sumber daya manusia pertanian yang melakukan pembinaan dan penerapan spesifik lokasi merupakan faktor utama produktivitas tanaman pangan. Sisi perlindungan tanaman, kurangnya antisipasi Dampak Perubahan Iklim (banjir dan kekeringan) dan tingginya serangan OPT yang berdampak pada penurunan luas panen dan tingkat produktivitas.

Sisi luas tanam, rendahnya intensitas pertanaman dan berkurangnya ketersediaan lahan sebagai akibat meningkatnya alih fungsi lahan mengakibatkan berkurangnya luas tanam tanaman pangan. Arah kebijakan yang akan dilakukan adalah peningkatan sistem perbenihan, peningkatan luas teknologi spesifik lokasi, peningkatan sumber daya manusia dalam penerapan teknologi spesifik lokasi, optimalisasi pemanfaatan lahan dan pencegahan alih fungsi lahan.

2.1.3.2.2. Kehutanan

Kawasan hutan yang terdeforestasi dan terdegradasi bila tidak dimanfaatkan untuk kegiatan hutan tanaman atau dialihfungsikan menjadi usaha perkebunan atau pertanian lainnya akan berpotensi menjadi semak belukar dan belukar rawa atau dapat berpotensi menjadi lahan kritis.

Kerusakan hutan mempunyai efek negatif terhadap lingkungan fisik, ekonomi dan sosial. Kerusakan atau berkurangnya penutupan hutan di hulu pada daerah tangkapan air dapat menyebabkan erosi, tanah longsor, banjir, endapan lumpur, dan pendangkalan sungai dan muara sungai. Demikian halnya bila deforestasi terjadi di kawasan hilir atau pada lahan basah dapat menghilangkan sumber daya gambut, tumbuhan sekat hijau atau *green belt* yang dapat menimbulkan abrasi, bahaya banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan gambut, angin puting beliung. Lahan

yang mengalami kebakaran dan terdegradasi mengalami perubahan struktur dan kimiawi tanah menjadi marjinal yang membutuhkan teknologi dan biaya dalam pemanfaaat untuk kegiatan perkebunan dan pertanian yang dikelola oleh rakyat.

Efek lainnya dari deforestasi dan degradasi hutan yakni kelangkaan bahkan kepunahan keanekaragaman sumberdaya hayati dan hasil hutan bukan kayu. Deforestasi mempunyai implikasi terhadap perubahan iklim global yakni pemanasan global (global warming). Kelangkaan sumberdaya hutan berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat terutama bagi masyarakat pedesaan yang sumber nafkahnya. Hilangnya penutupan hutan pada kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi menyebabkan terganggunya fungsi hutan sebagai penyedia jasa lingkungan terutama sumberdaya air.

2.1.3.2.3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Kontribusi PDRB Provinsi Sumatera Selatan dari Sektor Pertambangan dan Penggalian Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku terus mengalami peningkatan sebesar Rp. 28.590.801,2 atau 38,80%. Dalam Sektor Pertambangan dan Penggalian yang paling besar kontribusinya adalah Sub Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yaitu sebesar Rp. 38.426.106,8 (52%), Sub Sektor Pertambangan Batubara dan Lignit sebesar Rp. 18.940.383,0 (26%) dan Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya sebesar Rp. 16.567.160,4 (22%).

Tabel 2.43.

PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Tahun 2010-2014

TAHUN URAIAN \	2010	2011	2012	2013	2014
Pertambangan dan Penggalian	45.242.849,0	58.245.867,0	65.144.435,0	71.554.976,0	73.933.650,2
1 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	27.000.774,0	33.791.473,0	35.643.205,0	37.360.442,0	38.426.106,8
2 Pertambangan Batubara dan Lignit	8.631.031,0	13.634.710,0	16.955.283,0	20.151.936,0	18.940.383,0
3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	9.611.044,0	10.819.684,0	12.545.947,0	14.042.598,0	16.567.160,4

Sumber : BPS Provinsi Sumsel Tahun 2014

Tabel 2.44.

Distribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku

TAHUN URAIAN \	2010	2011	2012	2013	2014
Pertambangan dan Penggalian	23,32%	25,70%	25,72%	25,37%	23,37%
1 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	13,92%	14,91%	14,07%	13,25%	12,46%
2 Pertambangan Batubara dan Lignit	4,45%	6,02%	6,69%	7,15%	6,14%
3 Pertambangan Bijih Logam	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	4,95%	4,77%	4,95%	4,98%	5,37%

Sumber : BPS Provinsi Sumsel Tahun 2014 (Data diolah)

Dari data di atas, terlihat bahwa dari tahun 2010 sampai tahun 2012 distribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB mengalami peningkatan, namun pada tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan persentase sektor ini sangat dipengaruhi oleh harga minyak dunia.

2.1.3.2.4. Pariwisata

Sepanjang tahun 2010-2014, jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara mengalami peningkatan yang baik. Peningkatan secara signifikan terjadi pada tahun 2013 dari sebelumnya berjumlah 3.255.378 orang melonjak mencapai 14.737.182 orang. Lonjakan tersebut diperkirakan karena faktor penyelenggaraan berbagai event berskala nasional dan internasional di Provinsi Sumatera Selatan seperti 3rdISG 2013, Festival Sriwijaya, Musi Triboatton, Ziarah Qubro, Festival Marching Band, dan juga berbagai event lainnya.

Tabel 2.45.

Data Kunjungan Wisatawan ke Provinsi Sumatera Selatan

No.	Tahun Kunjungan	Wisman (Wisatawan Mancanegara)	Wisnus (Wisatawan Nusantara)	Jumlah
1	2010	30.003	2.078.630	2.108.633
2	2011	42.953	3.162.169	3.205.122
3	2012	30.117	3.225.261	3.255.378
4	2013	31.408	14.705.774	14.737.182
5	2014	32.365	3.406.385	3.438.750

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel Tahun 2015

2.1.3.2.5. Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan pada tahun 2014 sebesar 584.848,52 ton atau naik 10,02 % dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 531.585,20 ton, dengan persentase pencapaian sasaran sebesar 126,11 % di mana target tahun 2014 sebesar 463.771,12 ton. Peningkatan dan pencapaian sasaran produksi perikanan didukung oleh peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya. Peningkatan produksi tersebut dipengaruhi oleh banyaknya bantuan, pembinaan dan pelatihan yang diterima oleh pelaku usaha baik nelayan, pembudidaya ikan dan Unit Pemberian Rakyat

(UPR) selama tahun 2014. Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung operasional produksi.

Tabel 2.46.

Produksi Ikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2014

Produksi	2010	2011	2012	2013	2014
Ikan (Ton)	310.210,30	386.209,90	500.450,50	531.585,20	584.848,52

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel Tahun 2014

Sedangkan konsumsi ikan masyarakat pada tahun 2014 sebesar 39,89 kg/kapita/ tahun atau naik 5,52 % dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 37,89 kg/kapita/tahun. Peningkatan konsumsi ikan masyarakat didukung oleh meningkatnya produksi perikanan, serta didukung oleh promosi dan Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota.

Tabel 2.47.

Konsumsi Ikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2014

Konsumsi Ikan (kg/kapita/th)	2010	2011	2012	2013	2014
	32,66	34,72	36,12	37,89	39,89

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel Tahun 2014

2.1.3.2.6. Perdagangan

Nilai ekspor Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2014 meningkat dari tahun 2010 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,66%, sedangkan nilai impor meningkat rata-rata 47,26%. Selama kurun waktu dari tahun 2010 sampai dengan 2014 mengalami surplus dimana nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, namun pada tahun 2014 surplus ini mengalami hambatan sebesar -52,32%. Hal ini disebabkan komoditas utama Sumatera Selatan seperti Karet, Sawit, Minyak Bumi dan Batubara mengalami penurunan harga ditingkat internasional.

Tabel 2.48.

Nilai Ekspor dan Impor Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2010-2014 (US\$ miliar)

Tahun	Nilai Ekspor	Pertumbuhan	Nilai Impor	Pertumbuhan	Surplus	Pertumbuhan
2010	2,818	31,07%	0,107	-48,70%	2,711	39,63%
2011	5,057	79,45%	0,553	416,8%	4,504	66,13%
2012	4,371	-13,55%	0,506	-8,38%	3,865	-14,19%
2013	3,854	-11,82%	0,530	4,74%	3,324	-13,99%
2014	1,855*	-51,87	0,270*	-49,06%	1,585	-52,32%
Rata-rata	3,591	6,66%	0,246	47,26%	3,345	5,05%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Sumsel Tahun 2014 (Data diolah)

* Data per Juli 2014

2.1.3.2.7. Perindustrian

Sektor Industri Pengolahan memiliki jumlah pertumbuhan pada tahun 2014 sebesar 4,57% dan merupakan sektor penyumbang PDRB (ADHB) tertinggi ketiga yaitu sebesar Rp. 53,87 T setelah pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 73,39 T dan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp. 54,93 T.

Kontribusi tertinggi pada Sektor Industri Pengolahan adalah subsektor Industri Makanan dan Minuman sebesar Rp. 18,73 T dan subsektor Industri Batubara dan Pengolahan Migas sebesar Rp. 14,61 T.

Tabel 2.49.

Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Sumatera Selatan

Tahun 2010-2014 Atas Dasar Harga Berlaku

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014
Industri Pengolahan	36.600.125,0	39.718.987,0	41.907.540,0	48.141.799,7	53.872.861,3
Industri Migas	12.435.099,0	12.069.968,0	10.651.370,0	13.757.519,0	14.615.224,3
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	12.435.099,0	12.069.968,0	10.651.370,0	13.757.519,0	14.615.224,3

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014
Industri Tanpa Migas	24.165.026,0	27.649.019,0	31.256.170,0	34.384.280,7	39.257.637,0
1 Industri Makanan dan Minuman	9.735.795,0	11.841.797,0	13.493.522,1	15.516.939,7	18.732.342,5
2 Pengolahan Tembakau	2.026,0	2.087,0	2.169,0	2.168,0	2.185,2
3 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	60.134,0	66.245,0	73.241,0	94.568,0	107.879,2
4 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1.068,0	1.080,0	1.127,0	1.215,0	1.313,0
5 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	497.348,0	528.989,0	560.502,0	599.056,0	658.820,7
6 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	2.944.995,0	3.177.404,0	3.297.554,8	3.545.200,0	4.249.230,2
7 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	2.853.928,0	3.298.522,0	3.959.109,0	4.406.354,0	4.765.342,2
8 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	6.589.693,0	7.061.698,0	8.005.250,0	8.107.711,0	8.341.077,3
9 Industri Barang Galian bukan Logam	647.105,0	758.013,0	894.063,0	1.006.031,0	1.219.550,7
10 Industri Logam Dasar	47.518,0	51.369,0	49.927,0	53.752,0	57.534,4
11 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	427.803,0	482.380,0	515.542,0	625.001,0	663.349,9
12 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	11.635,0	12.674,0	12.585,0	13.775,0	14.683,8
13 Industri Alat Angkutan	63.978,0	67.104,0	73.739,0	81.153,0	91.386,0
14 Industri Furnitur	101.620,0	108.796,0	107.347,0	111.820,0	118.640,6
15 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	180.380,0	190.861,0	210.492,0	219.537,0	234.301,3

Sumber : BPS Provinsi Sumsel Tahun 2014

Dari sisi distribusinya di tahun 2014, Subsektor Industri Pengolahan Tanpa Migas sebesar 12,729% merupakan penyumbang tertinggi dibandingkan Dengan Migas sebesar 4,739%. Tantangan kedepan adalah memperluas industri pengolahan dengan migas karena Sumatera Selatan merupakan salah satu penghasil migas terbesar di Indonesia dan masih banyak lahan yang belum dimanfaatkan. Penyumbang tertinggi di subsektor tanpa migas adalah industri makanan dan minuman yaitu sebesar 6,074%.

Penyumbang kedua adalah industri karet, barang dari karet dan plastik sebesar 2,705% dan penyumbang ketiga adalah industri kimia, farmasi dan obat tradisional sebesar 1,545%. Hal ini menunjukkan bahwa

potensi karet di Sumatera Selatan masih belum dimanfaatkan dalam bentuk barang jadi atau setengah jadi.

Tabel 2.50.
Distribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Sumatera Selatan
Tahun 2010-2014 Atas Dasar Harga Berlaku

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014
Industri Pengolahan	18,865%	17,523%	16,547%	17,072%	17,468%
Migas	6,409%	5,325%	4,206%	4,879%	4,739%
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	6,409%	5,325%	4,206%	4,879%	4,739%
Tanpa Migas	12,455%	12,198%	12,341%	12,193%	12,729%
1 Industri Makanan dan Minuman	5,018%	5,224%	5,328%	5,503%	6,074%
2 Pengolahan Tembakau	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%
3 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,031%	0,029%	0,029%	0,034%	0,035%
4 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,001%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
5 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0,256%	0,233%	0,221%	0,212%	0,214%
6 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	1,518%	1,402%	1,302%	1,257%	1,378%
7 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	1,471%	1,455%	1,563%	1,563%	1,545%
8 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	3,397%	3,115%	3,161%	2,875%	2,705%
9 Industri Barang Galian bukan Logam	0,334%	0,334%	0,353%	0,357%	0,395%
10 Industri Logam Dasar	0,024%	0,023%	0,020%	0,019%	0,019%
11 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	0,221%	0,213%	0,204%	0,222%	0,215%
12 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,006%	0,006%	0,005%	0,005%	0,005%
13 Industri Alat Angkutan	0,033%	0,030%	0,029%	0,029%	0,030%
14 Industri Furnitur	0,052%	0,048%	0,042%	0,040%	0,038%
15 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	0,093%	0,084%	0,083%	0,078%	0,076%

Sumber : BPS Provinsi Sumsel Tahun 2014 (data diolah)

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.4.1.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah

2.1.4.1.1.1. Pendapatan per Kapita

Pendapatan perkapita Sumatera Selatan pada tahun 2013 atas harga berlaku dengan migas adalah sebesar Rp. 25,13 juta lebih tinggi dibanding tahun 2012 sebesar Rp. 22,70 juta. Sedangkan pendapatan perkapita tanpa migas tahun 2013 sebesar Rp. 19,49 juta, juga lebih tinggi dibanding tahun 2012 sebesar Rp. 17,25 juta.

Tabel 2.51.

Pendapatan Perkapita Provinsi Sumatera Selatan
ADHB Dengan Migas dan Tanpa Migas Tahun 2009-2013

Pendapatan per Kapita	2009 (000 Rp)	2010 (000 Rp)	2011 (000 Rp)	2012 (000 Rp)	2013 (000 Rp)
Dengan Migas	15.909,2	17.954,2	20.381,8	22.707,3	25.128,8
Tanpa Migas	11.414,1	13.079,3	15.022,7	17.247,4	19.495,0

Sumber: BPS Provinsi Sumsel Tahun 2014

2.1.4.1.1.2 Pengeluaran Konsumsi per Kapita

Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau di tabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Semakin tinggi proporsi pengeluaran untuk kebutuhan non makanan semakin sejahtera penduduk di wilayah tersebut.

Tabel 2.52.

Distribusi Persentase Pengeluaran Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2008-2012

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
Makanan	54,80	56,46	56,97	53,95	53,26
Non makanan	45,20	43,54	43,03	46,05	46,74
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sumsel Tahun 2013 (data diolah)

2.1.4.1.2 Pertanian

2.1.4.1.2.1 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan indikator pengukur kemampuan tukar produk pertanian dengan barang dan jasa yang diperlukan petani untuk konsumsi rumah tangganya dan untuk keperluan dalam memproduksi produk pertanian. NTP Sumsel dapat berada di atas angka dasar NTP yaitu 100 jika biaya produksi yang dikeluarkan petani untuk usaha taninya cenderung sama besar dengan penerimaan yang didapatnya (impas).

Dari tahun 2010-2013 perkembangan NTP Sumsel menunjukkan peningkatan, namun pada tahun 2014 NTP Sumsel tidak memenuhi angka minimal yaitu 100 dan hanya sebesar 97,50. Secara umum menunjukkan bahwa daya beli petani pada bulan Desember 2014 mengalami penurunan dibandingkan tahun dasar 2012 yang disebabkan karena adanya kenaikan indeks harga yang diterima petani lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan indeks harga yang dibayar petani secara umum.

Tabel 2.53.

Nilai Tukar Petani Tahun 2010-2014

Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
Nilai Tukar Petani	Indeks	104,89	109,87	109,15	110,88	97,50

Sumber : BPS Provinsi Sumsel Tahun 2014

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan untuk mewujudkan pemerataan, meningkatkan kualitas hidup dan konektivitas antar daerah yang pada akhirnya akan membuka lapangan pekerjaan, memfasilitasi pertumbuhan sektor industri dan usaha kecil menengah, pertanian dan pertambangan yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

2.1.4.2.1. Perhubungan

2.1.4.2.1.1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Infrastruktur jalan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013 mencapai 17.248,65 Km yang meliputi jalan kewenangan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jalan Nasional di Sumsel dengan kondisi mantap sepanjang 1.389,44 Km (96,20%), jalan mantap kewenangan Provinsi sepanjang 1.193,59 Km (81,59%) dan jalan mantap kewenangan Kabupaten/Kota sepanjang 8.601,49 Km (59,98%). Hal ini menunjukkan bahwa untuk infrastruktur jalan masih ada sepanjang 6.064 Km jalan di Sumsel yang belum dalam kondisi baik, selain itu beberapa ruas jalan utama di Sumsel juga sering terjadi kemacetan akibat kapasitas jalan yang ada tidak mampu menampung volume kendaraan yang lewat. Pada kurun waktu satu tahun terakhir ini juga laju kerusakan ruas jalan melebihi dari upaya peningkatan/rehabilitasi jalan yang ada sebagai akibat dari tingginya lalu lintas kendaraan dengan tonase tinggi (MST 10 ton – 16 ton) sedangkan kemampuan daya dukung jalan di Sumatera Selatan rata-rata 10 ton.

Kemacetan jalan juga diperparah dengan tidak optimalnya pengaturan Ruang Milik Jalan (RUMIJA) dengan banyaknya bangunan yang berdiri melanggar batas, pasar tumpah, pedagang kaki lima, perguruan tinggi dan sekolah serta tingginya pertumbuhan kendaraan dalam lima tahun terakhir ini terutama kendaraan pribadi. Rata-rata

terjadi peningkatan mencapai 10% setiap tahun. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan juga belum berimbang dan masih jauh dari kondisi idal. untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selalu memprioritaskan peningkatan jalan dan jembatan dan pembangunan jalan dan jembatan baru menuju daerah-daerah yang strategis, serta terus berupaya meningkatkan kualitas jalan yang ada.

Tabel 2.54.
Rasio Panjang Jalan/Jumlah Kendaraan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2012

Kab/Kota	2009			2010			2011			2012		
	Panjang	Jumlah Kdr	Rasio									
Ogan Komering Ulu	573,680	44.853	0,013	719,240	49.837	0,014	788,332	55.375	0,014	788,332	61.527	0,013
Ogan Komering Ilir	1.932,730	39.433	0,049	2.045,160	43.815	0,047	1.725,956	48.683	0,035	1.727,566	54.092	0,032
Muara enim	1.668,490	63.061	0,026	1.765,420	70.068	0,025	1.740,343	77.853	0,022	1.816,653	86.504	0,021
Lahat	1.851,670	42.235	0,044	1.346,470	46.928	0,029	1.500,458	52.142	0,029	1.500,448	57.936	0,026
Musi Rawas	2.035,410	26.564	0,077	1.488,630	29.515	0,050	1.491,722	32.795	0,045	1.906,662	36.439	0,052
Musi Banyuasin	1.824,030	59.927	0,030	1.466,770	66.585	0,022	1.483,395	73.984	0,020	1.435,295	82.204	0,017
Palembang	855,130	823.428	0,001	974,885	914.920	0,001	963,588	1.016.577	0,001	963,588	1.129.530	0,001
Prabumulih	495,320	59.899	0,008	447,700	66.555	0,007	447,849	73.950	0,006	447,849	82.167	0,005
Pagaralam	524,330	6.739	0,078	561,570	7.488	0,075	592,200	8.319	0,071	592,200	9.244	0,064
OKU Selatan	229,760	7.889	0,029	662,079	8.765	0,076	698,349	9.739	0,072	698,349	10.821	0,065
OKU Timur	943,250	37.412	0,025	894,370	41.569	0,022	884,347	46.188	0,019	1.145,577	51.320	0,022
Ogan Ilir	946,060	14.561	0,065	991,150	16.179	0,061	1.027,977	17.977	0,057	1.027,977	19.974	0,051
Empat Lawang	427,330	8.447	0,051	508,170	9.386	0,054	605,293	10.428	0,058	605,793	11.587	0,052
Lubuk Linggau	428,360	24.042	0,018	531,010	26.713	0,020	520,464	29.681	0,018	532,134	32.979	0,016
Banyuasin	1.375,000	38.319	0,036	1.116,500	42.577	0,026	1.117,647	47.308	0,024	1.144,867	52.564	0,022
Provinsi Sumsel	16.110,550	1.296.809	0,012	15.519,124	1.440.899	0,011	15.587,920	1.600.999	0,010	16.333,290	1.778.888	0,009

Sumber : Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Tahun 2013 (Data diolah)

Dari gambaran kondisi jalan dan jembatan di Sumsel saat ini terlihat bahwa jika tidak dilakukan antisipasi ke depannya akan berdampak kepada lamanya waktu tempuh kendaraan yang akan berakibat kepada "ekonomi biaya tinggi" yang pada akhirnya akan membuat tingginya biaya pengangkutan barang sehingga dapat melambungkan harga barang yang tentu saja akan mempengaruhi sektor perekonomian. Selain itu juga lamanya waktu tempuh akan berpengaruh kepada kualitas produk-produk hasil pertanian yang diangkut melalui transportasi darat.

2.1.4.2.1.2. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

Angkutan umum memang masih menjadi pilihan masyarakat, selain biaya yang dikeluarkan masih terjangku, juga karena lebih aman dan banyak pilihan. Dari data yang angkutan darat masih menjadi pilihan

utama, walaupun memang terjadi penurunan tahun 2009. Di sisi lain penggunaan angkutan udara terjadi kenaikan dari tahun ke tahun. Harga tiket yang sangat kompetitif diperkirakan menjadi pemicu utama masyarakat beralih ke jenis angkutan ini dibandingkan dengan menggunakan angkutan darat (bis), sementara walaupun masih perlu analisis lagi, namun banyaknya masyarakat yang menggunakan pesawat untuk berpergian bisa menjadi indikasi awal adanya perbaikan perekonomian masyarakat.

Tabel 2.55.

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2012

Jumlah Produksi Angkutan penumpang (org)	2008	2009	2010	2011	2012
Angkutan Udara	n.a	1.810.766	2.106.905	2.484.519	2.408.923
Angkutan sungai, danau & penyeberangan	n.a	635.668	46.644	119.615	115.298
Angkutan Laut	n.a	462.436	65.907	552.205	510.857
Angkutan Darat	n.a	23.263.694	10.701.200	4.528.694	10.636.128
Angkutan Kereta Api	n.a	1.053.640	1.961.312	2.010.984	1.425.500

Sumber : Dishubkominfo Provinsi Sumsel Tahun 2013

Sementara itu, untuk angkutan barang, angkutan laut dan kereta api menjadi pilihan utama. Angkutan laut memang menjadi pintu masuk perdangan domestic dan luar negeri Provinsi Sumatera Selatan. Jika dihubungkan dengan aktivitas bongkar-muat dan eksport-impor memang sebagian besar melalui jalur laut. Sementara angkutan kereta api dimungkinkan dengan aktivitas angkutan barang-barang hasil pertambangan dan pertanian.

Tabel 2.56.

Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2012

Jumlah Produksi Angkutan Barang (Ton)	2008	2009	2010	2011	2012
Angkutan Udara	n.a	n.a	9.797,24	12.460	n.a.
Angkutan sungai, danau & penyeberangan	n.a	1.182,00	127	176.650	n.a.
Angkutan Laut	n.a	6.053.530	460.848.512	15.387.691	17.755.873
Angkutan Darat	n.a	n.a	11.412.231	9.135.250	n.a.
Angkutan Kereta Api	n.a	11.861.228	11.412.231	12.972.904	14.070.108

Sumber : Dishubkominfo Provinsi Sumsel Tahun 2013

2.1.4.2.1.3. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal per Tahun

Jumlah Orang dan Barang Melalui Pelabuhan di Sumatera Selatan

Jumlah orang dan barang yang melalui Pelabuhan merupakan indikasi pergerakan ekonomi di suatu wilayah. Angkutan perairan, khususnya di Indonesia memang menjadi salah satu moda transportsi yang terjangkau (murah) dan mempunyai kemampuan angkut yang besar. Sumatera Selatan yang memang dikenal memiliki wilayah perairan yang cukup luas menjangkau hingga ke wilayah pelosok, juga memanfaatkan transportasi perairan ini. Hal ini dapat terlihat dari aktivitas orang dan barang yang terjadi di pelabuhan-pelabuhan di provinsi ini. Data pada tabel di bawah ini memberikan gambaran bahwa proses perdagangan dalam dan luar negeri dipelabuhan di Sumatera Selatan berjalan dinamis dan cukup fluktuatif dari tahun ke tahun.

Tabel 2.57.
Bongkar Orang dan Barang Melalui Pelabuhan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2012

No	URAIAN	SATUAN	2008	2009	2010	2011	2012
1	PERDAGANGAN LUAR NEGERI						
	Import	Ton/M3	311.919	295.198	508.918	615.343	577.685
	Eksport	Ton/M3	2.648.976	1.349.632	1.618.691	1.507.455	5.528.055
	Sub Jumlah 1	Ton/M3	2.960.895	164.483	2.127.609	2.122.798	610.574
2	PERDAGANGAN DALAM NEGERI						
	Bongkar	Ton/M3	3.181.979	1.192.466	1.083.594	1.779.173	2.483.534
	Muat	Ton/M3	4.821.939	3.051.679	3.552.502	3.968.691	7.004.429
	Sub Jumlah 1	Ton/M3	8.003.918	4.244.145	4.636.096	5.747.864	9.487.963
	JUMLAH I + II	Ton/M3	10.964.813	4.408.628	6.763.705	7.870.662	10.098.537
3	PENUMPANG						
	Naik	Org	147.986	132.540	141.724	183.280	126.902
	Turun	Org	165.677	135.329	145.576	204.501	174.593
	JUMLAH III	Ton/M3	313.663	313.663	287.300	387.781	301.495

Sumber : Dishubkominfo Provinsi Sumsel Tahun 2013

Bongkar Orang dan Barang Melalui Bandara di Sumatera Selatan

Angkutan udara di Sumatera Selatan kini mulai menunjukkan peningkatan aktivitas, terutama di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, merupakan Bandara Internasional yang dapat didarati oleh pesawat jenis Boeing 737 dan Airbus 330. Banyaknya event bertaraf internasional di Kota Palembang sejak tahun 2011 memberikan lonjakan arus penumpang dan barang yang cukup signifikan. Misalnya, pada tahun 2008 aktivitas kedatangan dan keberangkatan penerbangan internasional baru sekitar 469 kali, meningkat menjadi 634 kali di tahun 2014.

Tabel 2.58.

Lalu Lintas Angkutan Udara Internasional Bandar Udara SMB II

Tahun 2008-2012

No	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
1	PESAWAT DATANG BERANGKAT	469 469	544 544	245 245	351 351	634 634
2	PENUMPANG DATANG BERANGKAT	49.543 44.679	47.174 46.405	19.180 19.473	31.291 30.089	56.143 54.905
3	BAGASI BONGKAR MUAT	522.870 415.373	476.497 627.365	271.507 218.697	363.802 324.802	550.223 432.901
4	KARGO BONGKAR MUAT	25.846 107.815	145.596 139.019	19.640 83.073	104.652 67.376	419.771 64.684

Sumber : Dishubkominfo Provinsi Sumsel Tahun 2013

Sementara lalu lintas penerbangan mencapai 11.098 kali ditahun 2012, dimana pada tahun 2008 baru 7.432 kali atau meningkat meningkat 149%. Begitu juga dari jumlah penumpang yang menggunakan alat transportasi udara meningkat 179,7% dari tahun 2008. Hal ini dikarenakan semakin terjangkaunya harga tiket pesawat udara.

Tabel 2.59.

Lalu Lintas Angkutan Udara Domestik Bandar Udara SMB II

Tahun 2008-2012

No	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
1	PESAWAT DATANG BERANGKAT	7.432 7.432	7.121 7.121	8.080 8.080	10.637 10.638	11.098 11.098
2	PENUMPANG DATANG BERANGKAT	763.285 761.945	854.846 862.009	1.072.033 1.042.727	1.279.417 1.169.836	1.371.719 1.402.971
3	BAGASI BONGKAR	7.641.061	5.790.499	8.430.299	9.883.866	10.260.145

No	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
	MUAT	7.658.074	5.699.989	8.746.185	7.839.765	10.240.114
4	KARGO					
	BONGKAR	6.812.868	3.411.714	7.525.909	6.663.451	950.212
	MUAT	1.792.674	183.821	2.180.228	3.334.327	4.050.758
5	POS					
	BONGKAR	441.179	183.821	452.362	479.133	327.985
	MUAT	170.189	113.953	199.603	150.781	172.519

Sumber : Dishubkominfo Provinsi Sumsel Tahun 2013

2.1.4.2.2. Penataan Ruang

2.1.4.2.2.1. Ketaatan terhadap RTRW

Aspek pelayanan umum pada urusan penataan ruang dapat diindikasikan dengan masih berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2019 yang dijabarkan dalam kawasan andalan provinsi guna perencanaan pemanfaatan ruang termasuk pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.

Proses revisi RTRW Provinsi Sumatera Selatan telah diajukan ke DPRD Provinsi Sumatera Selatan guna mendapatkan persetujuan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Terkait ketaatan kabupaten/kota dalam mempedomani Undang-Undang Penataan Ruang, sebanyak 13 kabupaten/kota yang telah menerbitkan perda tentang RTRW Kabupaten/Kota, sedangkan 4 kabupaten/kota lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.60.

Ketaatan Terhadap Perda RTRW

No	Wilayah	No. Perda RTRW	Tgl Perda RTRW
1	Provinsi Sumatera Selatan	No. 14 Tahun 2006	18-Des-2006
		Perda Revisi untuk tahun 2013-2033 sedang dalam proses.	
2	Kab. Banyuasin	No. 28 Tahun 2012	28-Des-12
3	Kab. Empat Lawang	No. 9 Tahun 2012	27-Jul-12
4	Kab. Lahat	No. 11 Tahun 2012	28-Des-12

No	Wilayah	No. Perda RTRW	Tgl Perda RTRW
5	Kab. Muara Enim	No. 13 Tahun 2012	28-Des-12
6	Kab. Musi Banyuasin	Menunggu Perda Prov. Sumsel	
7	Kab. Musi Rawas	No. 02 Tahun 2013	21-Okt-13
8	Kab. Musi Rawas Utara (MURATARA)	Bergabung dengan Musi Rawas	
9	Kab. Ogan Ilir	No. 10 Tahun 2012	17-Sep-12
10	Kab. Ogan Komering Ilir	No. 9 Tahun 2013	09-Jul-13
11	Kab. Ogan Komering Ulu	No. 22 Tahun 2012	27-Des-12
12	Kab. OKU Selatan	No. 13 Tahun 2012	28-Des-12
13	Kab. OKU Timur	No. 13 Tahun 2012	19-Okt-12
14	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)	Bergabung dengan Muara Enim	
15	Kota Lubuklinggau	No. 1 Tahun 2012	31-Agu-12
16	Kota Pagar Alam	No. 07 Tahun 2012	19-Nop-12
17	Kota Palembang	No. 15 Tahun 2012	27-Des-12
18	Kota Prabumulih	No. 1 Tahun 2014	02-Apr-14

Sumber : UPTB Penataan Ruang Bappeda Provinsi Sumsel Tahun 2014

Catatan : Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Kabupaten Musi Rawas Utara baru terbentuk tahun 2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013.

2.1.4.2.2.2. Luas Wilayah Produktif

Berdasarkan hasil Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.822/Menhut-II/2013 tanggal 19 Nopember 2013, bahwa luas kawasan budidaya di Provinsi Sumatera Selatan seluas ± 7.312.933 hektar dengan rincian kawasan hutan seluas ± 2.098.658 hektar dan non kawasan hutan seluas ± 5.214.275 hektar, dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.866/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, bahwa Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan seluas ± 3.466.901 hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut :

- a. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) seluas ± 790.625 hektar terdiri dari :
 - Daratan, seluas ± 741.918 hektar
 - Perairan, seluas ± 48.707 hektar

- b. Kawasan Hutan Lindung (HL), seluas ± 577.327 hektar
- c. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas ± 208.724 hektar
- d. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), seluas ± 1.713.581 hektar
- e. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK), seluas ± 176.694 hektar.

2.1.4.2.2.3. Luas kawasan industri

Sesuai data RTRW kabupaten/kota, luas kawasan industri di Provinsi Sumatera Selatan seluas ± 37.000 hektar dengan berbagai fokus pengembangan jenis industri, antara lain industri besar, industri kecil dan UMKM. Industri besar diarahkan di Kabupaten Banyuasin, Muara Enim, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, OKU Timur, Kota Palembang. Namun sampai saat ini belum disusun Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah (RIPID) komoditas karet, kelapa sawit dan kopi serta belum ditetapkannya Kawasan Industri (KI) Muara Enim, Banyuasin, Palembang, dan Lubuklinggau sebagai klaster industri karet, kelapa sawit dan kopi.

2.1.4.2.3. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah

2.1.4.2.3.1. Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

Jumlah Restoran di Provinsi Kabupaten kota terutama di Perkotaan dan daerah transit mengalami peningkatan maupun pengembangan dalam hotel tertentu yang dapat dilihat dari jumlah rumah makan dan peningkatan jumlah meja kursi.

Tabel 2.61.

Banyaknya Rumah Makan/Restoran, Meja dan Kursi Menurut
Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013

No	Wilayah	Rumah Makan	Meja	Kursi
1	Ogan Komering Ulu	n.a	n.a	n.a
2	Ogan Komering Ilir	6	72	316
3	Muara Enim	n.a	n.a	n.a
4	Lahat	66	n.a	n.a
5	Musi Rawas	41	322	1325
6	Musi Banyuasin	10	87	353
7	Banyuasin	33	163	1310
8	OKU Selatan	13	71	167
9	OKU Timur	n.a	n.a	n.a
10	Ogan Ilir	10	n.a	n.a
11	Empat Lawang	37	199	0
12	Kota Palembang	418	n.a	n.a
13	Kota Prabumulih	n.a	n.a	n.a
14	Kota Pagar Alam	n.a	n.a	n.a
15	Kota Lubuk Linggau	n.a	n.a	n.a

Sumber : Sumatera Selatan Dalam Angka Tahun 2014

2.1.4.2.3.2. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Peningkatan hotel di Provinsi Sumatera Selatan terutama di Perkotaan terjadi peningkatan yang signifikan seiring dengan pelaksanaan pesta olah raga dan pariwisata sehingga membuat perkembangan hotel menjadi maju, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini dimana kota Palembang telah membangun beberapa hotel baru seiring pelaksanaan kegiatan nasional dan internasional yang menjadi daya tarik pengunjung untuk masuk ke kota tersebut.

Tabel 2.62.

Jumlah Hotel Berbintang dan Kamar di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013

Kabupaten/Kota	Hotel Berbintang	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar
Palembang	Bintang Lima	2	314
	Bintang Empat	3	539
	Bintang Tiga	6	599
	Bintang Dua	5	372
	Bintang Satu	4	430
Ogan Komering Ilir	Bintang Dua	2	50
Ogan Ilir	Bintang Dua	1	36
Lubuk Linggau	Bintang Empat	1	80
	Bintang Tiga	2	116
	Bintang Dua	2	57
Muara Enim	Penginapan	1	28

Sumber : *Sumatera Selatan Dalam Angka, 2014 (data diolah)*

2.1.4.2.4. Lingkungan Hidup

2.1.4.2.4.1. Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih

Capaian persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih untuk 5 tahun terakhir tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Namun jika dilihat dari rata-rata nilai Provinsi beberapa Kabupaten/Kota telah berada diatas rata-rata Provinsi namun masih ada Kabupaten/Kota yang harus menjadi prioritas dalam program untuk mendukung akses air bersih yakni Kota Pagaralam, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten OKU Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir. Persentase terendah untuk akses air bersih ialah Kota Pagaralam sedangkan persentase tertinggi adalah Kota Palembang.

Tabel 2.63.

Persentase Akses Air Bersih di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2009-2013

No	Kab/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1	Ogan Komering Ulu	62,78	53,45	67,16	62,52	67,51
2	Ogan Komering Ilir	39,84	46,06	49,02	46,81	39,62
3	Muara Enim	46,16	46,68	59,56	61,09	58,74
4	Lahat	38,31	37,42	39,56	42,19	42,75
5	Musi Rawas	40,62	43,05	41,86	60,48	55,32
6	Musi Banyuasin	43,17	42,84	46,75	47,66	43,22
7	Banyuasin	31,10	37,16	43,02	43,19	45,58
8	OKU Selatan	29,17	30,39	27,34	29,91	39,46
9	OKU Timur	58,46	57,06	63,21	62,20	69,16
10	Ogan Ilir	40,11	46,13	46,18	43,00	57,76
11	Empat Lawang	15,86	15,12	22,23	20,80	37,22
12	Kota Palembang	94,40	90,32	95,08	94,23	96,07
13	Kota Prabumulih	48,47	58,80	74,49	69,65	68,47
14	Kota Pagar Alam	42,88	38,25	37,34	44,29	35,75
15	Kota Lubuk Linggau	59,91	58,36	62,12	54,41	68,26
Sumatera Selatan		51,83	52,50	57,37	58,13	59,77

Sumber : BPS Provinsi Sumsel Tahun 2014

2.1.4.2.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

2.1.4.2.5.1 Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Tingkat elektrifikasi di Sumsel baru mencapai 56,2 %, dan saat ini pembangkit tenaga listrik khususnya di pedesaan masih dominan menggunakan bahan bakar solar. Oleh karena itu dengan ketersediaan batubara, maka di daerah ini telah ada rencana dan upaya untuk membangun pembangkit listrik memakai batubara sebagai bahan bakar, yaitu :

- PLTU Sp-Belimbing, 2x113.5 MW (PT Guo Hua Energi Musi Makmur, 2011),
- PLTU Banjarsari, 2x100 MW (PT Bukit Pembangkit Inovatif, 2013),
- PLTU Sumsel-2 (Keban Agung) 2x112.5 MW (PT Primanaya Power Energi, 2013)

- PLTU Baturaja, 2x10 MW (IPP, 2013), PLTU Sumsel-5, 2x150 MW (IPP, 2015),
- PLTU Sumsel-6, 2x300 MW (IPP, 2014/2015), PLTU Sumsel-7, 2x150 MW (IPP, 2015/2016), dan
- PLTU Sumatera Mulut Tambang, 5x600 MW (IPP, 2016/2018).

Sampai dengan akhir tahun 2012, terdapat total 1.306,12MW pembangkit tenaga listrik yang terdiri dari PLN Pembangkit dengan kapasitas 805,29 MW dan Pembangkit Swasta dengan kapasitas 500,83 MW.

Tabel 2.64.

Jumlah Unit dan Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik

Di Sumatera Selatan Tahun 2012

No	Pembangkit Tenaga Listrik	Kapasitas MW	Status
1	PLTU (Batubara)	260,00	PLN Pembangkit
2	PLTU (gas)	25,00	
3	PLTG (Gas turbin)	449,85	
4	PLTGU	40,00	
5	PLTD	25,20	
6	PLTD Isolated	5,24	
7	PLTGU (IPP/Borang)	150,00	Pembangkit Swasta
8	PLTG Gunung megang	80,00	
9	PLTG Prabumulih	12,00	
10	PLTG Sako	12,00	
11	PLTG/U Musi-2	19,83	
12	PLTU Sim.Belimbing	227,00	
Jumlah		1.306,12	

Sumber : PLN Wilayah S2JB Tahun 2013

Capaian Kinerja di bidang Energi sampai tahun 2012 mengalami peningkatan baik dilihat dari indikator *output*, indikator *income* dan indikator *impact*.

Tabel 2.65.
 Capaian Kinerja Pembangunan Prioritas Energi
 di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2012

A	Indikator Output	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013
1	Pelanggan PLN	RTx1.000	890.395	943.476	1.106.410	1.250.761	1.381.543
2	Daya tersambung	VA	398.356.555	1.259.514.015	1.512.094.775	1.737.464.630	1.950.104.000
B	Indikator Outcome	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah desa mandiri energi	Desa	-	-	1	1	n.a
2	Jumlah tenaga listrik yang disalurkan: - Rumah tangga - Industri - Sosial - Bisnis - Lainnya	Kwh	1.288.310.567 458.131.849 63.468.203 322.682.807 295.498.328	1.474.165.991 516.767.626 73.415.132 411.127.340 264.472.729	1.661.467.225 536.081.912 84.129.287 460.412.053 215.933.044	1.956.541.506 644.043.114 94.550.437 481.454.077 271.943.843	2.352.578.940 691.076.766 118.733.148 583.333.742 290.947.160
C	Indikator Impact	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013
1	Rasio elektifikasi	%	81,24	60,57	60,73	66,77	71,55
2	Rasio Desa Berlistrik	%	73,9	83,28	81,50	82,60	88,20

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumsel Tahun 2013

2.1.4.2.5.2 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

Untuk rumah tangga yang telah dialiri listrik, terlihat adanya peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2009 sebanyak 1.605.703 unit dan ditahun 2012 meningkat menjadi 1.605.703 unit. Ada kenaikan rata rata setiap tahun 10%. Adapun target persentase capaian indikator kinerja dan capaian kinerja pembangunan sumatera selatan pada tahun 2012 mencapai 92% rumah tangga teraliri listrik, pada kenyataannya persentase rumah tangga yang teraliri listrik naik dari target capaian dengan rata rata kenaikan setiap tahun 5 %, secara keseluruhan setiap tahun terjadi peningkatan baik target dari pemerintahan maupun realisasi hasil evaluasi.

Rumah yang teraliri listrik mengalami peningkatan setiap tahun dengan rata rata peningkatan sebesar 10%. Peningkatan ini terjadi juga

akibat pembangunan perumahan dan penambahan kapasitas listrik yang di alokasikan untuk Sumatera Selatan.

Persentase Rumah Tangga (RT) yang memiliki sumber listrik rata-rata telah mencapai persentase rata-rata Provinsi Sumatera Selatan dimana untuk tahun 2012 terjadi peningkatan dari tahun 2008 yakni dari persentase 82,1 persen menjadi 94,02 persen. Kabupaten OKU Selatan memiliki persentase dibawah rata-rata Provinsi dan terjadi penurunan persentase dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.66.

Jumlah Kapasitas Daya Listrik yang tersambung pada Rumah Tangga

Tahun 2009 - 2013

Tahun	KVA
2009	696.088
2010	755.274
2011	928.796
2012	1.073.934
2013	1.205.749

Sumber : BPS Provinsi Sumsel Tahun 2014

2.1.4.2.5.3 Persentase Penduduk Yang Menggunakan Telepon Seluler

Angka Kepemilikan telepon seluler jauh lebih besar dibandingkan kepemilikan telepon rumah. Pada tahun 2012 persentase rumah tangga yang memiliki minimal 1 telepon seluler mencapai 86,38 persen. Dibandingkan tahun 2008, angka kepemilikan telepon seluler juga meningkat cukup besar, seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi yang meningkat cukup besar, seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi yang meningkat pesat akhir-akhir ini.

Tabel 2.67.

Pengeluaran Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Akses Terhadap Teknologi Informasi/Komunikasi 2009-2013

Percentase Rumah Tangga	2009	2010	2011	2012	2013
Memiliki Telepon Rumah	8,36	8,64	7,05	5,11	4,55
Ada ART Memiliki Telepon Seluler	58,91	75,03	81,00	86,38	88,93
Memiliki Komputer	9,08	9,45	9,95	12,04	12,82
Akses Internet*)	na	9,20	9,25	10,87	11,97
Akses Internet di Rumah*)	1,76	2,49	2,42	2,86	2,56
Ada ART Akses Internet di Luar Rumah*)	9,18	8,56	8,67	10,21	16,50

*) Angka 2010-2012 adalah persentase penduduk 5 tahun ke atas yang memiliki akses internet dalam 3 bulan terakhir

Sumber : BPS Provinsi Sumsel Tahun 2013

2.1.4.3. Fokus Iklim Investasi

2.1.4.3.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah

2.1.4.3.1.1. Angka Kriminalitas

Tindak kejahatan yang dilaporkan kepada Kejaksaan Tinggi secara garis besar terjadi peningkatan selama lima tahun terakhir, angka jenis kejahatan yang signifikan terjadi peningkatan ialah pencurian/perampokan, penganiayaan, penipuan, kesusilaan dan pelanggaran-pelanggaran. Perlu menjadi perhatian dalam menangani keamanan di Provinsi Sumatera Selatan untuk menekan angka kriminalitas dan mengurangi rasa khawatir dan rasa aman terhadap masyarakat.

Tabel 2.68.

Jumlah Tindak Kejahatan Pada Kejaksaan Tinggi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kejahatan Tahun 2012 dan Series 2008-2012

No	Kabupaten/ Kota	Ketertiban Umum	Pencurian/ Perampokan	Penganiaya- an	Pembu- nuhan	Peni- puan	Kesusi- laan	Pelang- garan
1	Palembang	168	90	125	40	175	15	16.680
2	Lubuk Linggau	18	470	45	47	74	42	1.878
3	Kayu Agung	33	42	15	7	4	20	2.265
4	Muara Enim	32	87	15	18	37	28	2.877
5	Baturaja	6	86	17	22	46	29	8.455
6	Lahat	18	90	32	8	23	16	11.642
7	Sekayu	64	356	48	37	45	14	8.645
8	Prabumulih	16	172	12	3	18	7	1.085
9	Pagaralam	7	18	9	3	8	19	1.324
10	Pangkalan Balai	44	58	39	16	18	7	1.436
Tahun								
	2012	406	1469	357	201	448	197	56.287
	2011	330	1348	276	147	366	117	52.430
	2010	510	2490	312	13	178	42	44.316
	2009	660	1548	504	120	120	72	42.510
	2008	190	578	103	61	177	86	42.286

Sumber : BPS Sumsel 2012

2.1.4.3.1.2. Lama Proses Perijinan

Layanan perizinan di Sumatera Selatan sedang mengalami proses transformasi dari layanan yang lambat menuju layanan yang cepat. Hal ini telah dibentuknya kantor layanan terpadu di seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Selatan, tetapi prosedur layanan seringkali belum efisien. Rata-rata lama waktu layanan perizinan masih lebih lambat dari target yang dinyatakan dalam dokumen rencana pembangunan daerah, terutama terkait perbaikan birokrasi perizinan lambat berkembang. Namun demikian, sejak PTSP berdiri terdapat perubahan signifikan terhadap masa atau waktu pengurusan perizinan di bidang investasi dan non perizinan. Pada tahun 2010 rata-rata lama penyelesaian perizinan bisa mencapai waktu kurang dari 1 bulan. Bahkan di tahun 2014, pengurusan perizinan bisa diselesaikan dalam waktu berkisar 3-7 hari, meskipun reratanya masih selama 7 hari.

Tabel 2.69.

Rata-Rata Lama waktu Pelayanan Perizinan Usaha
di Provinsi Sumatera Selatan

Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
Rata-rata lama waktu pelayanan perijinan usaha di Provinsi	Hari	21	21	15	14	7

Sumber : Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Provinsi Sumsel Tahun 2014

2.1.4.3.1.3. Perkembangan jumlah izin usaha

Perkembangan jumlah izin usaha dari tahun 2010 sampai tahun 2014 semakin berkembang dengan baik, Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sampai dengan triwulan IV Tahun 2014 sebanyak 100 izin/non izin. Pada tahun 2014, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah meraih penghargaan sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal Provinsi Terbaik Kedua Tahun 2014 dan mendapat penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia berupa Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Tabel 2.70.

Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2010-2014

Tahun	TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	Jumlah
2010	32	40	28	39	139
2011	51	28	34	30	143
2012	33	31	31	58	153
2013	55	30	34	53	172
2014	36	26	19	19	100
TOTAL					750

Sumber : Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Provinsi Sumsel Tahun 2014

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.1. Ketenagakerjaan

2.1.4.4.1.1. Rasio Ketergantungan

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan dapat dilihat salah satunya pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 tahun atau lebih) yang berarti semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Semakin kecil angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Selama periode 2000-2013 angka beban tanggungan setiap tahun cenderung mengalami penurunan, Pada tahun 2000 rata-rata dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 61 penduduk tidak produktif. Pada tahun 2010 angka beban tanggungan penduduk Sumatera Selatan turun menjadi 52,57 persen kembali turun menjadi 50,90 persen pada tahun 2012, sedangkan pada tahun 2013, angka beban tanggungan penduduk menjadi 50,14 persen.

Tabel 2.71.

Angka Beban Tanggungan Provinsi Sumatera Selatan

Tahun	Kelompok Umur			Angka Beban Tanggungan
	0-14	15-64	65+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1980	44,10	53,29	2,61	87,67
1990	41,68	55,53	2,78	80,07
2000	34,94	61,95	3,11	61,42
2005	31,47	64,97	3,55	53,91
2010	30,26	65,67	4,07	52,27
2012	27,11	66,46	6,42	50,46
2013	26,82	66,60	6,58	50,14

Sumber: BPS Provinsi Sumsel Tahun 2013

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1. Evaluasi Kondisi Makro Provinsi Sumatera Selatan

Pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 mengalami perlambatan sebesar 4,68% lebih rendah dari rata-rata nasional yaitu 5,1% perlambatan tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor harga komoditi perkebunan yang menjadi produk andalan Sumatera Selatan seperti karet dimana harga dunia yang merosot mempengaruhi ekspor karet Sumatera Selatan, sedangkan di akhir triwulan I tahun 2015 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,77%. Akhir tahun 2014 PDRB Sumatera Selatan ADHB dengan migas sebesar Rp. 308,41 triliun sedangkan ADHK dengan migas sebesar Rp. 243,23 triliun, pencapaian pada triwulan I tahun 2015 mencapai Rp. 80,17 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 61,44 triliun. Berdasarkan data BPS Sumsel pada bulan Mei 2015 Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan I tahun 2015 terhadap triwulan I di tahun 2014 tumbuh 4,77 (*y-on-y*) meningkat dibanding periode yang sama pada tahun 2014 sebesar 3,80 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 26,05%. Dari sisi Pengeluaran oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 15,35%. Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan triwulan I-2015 terhadap triwulan sebelumnya naik menjadi 0,56% (*q-to-q*). Dari sisi produksi, pertumbuhan ini disebabkan oleh Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh 6,11%. Sedangkan dari sisi Pengeluaran lebih disebabkan oleh Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh 1,02%.

Situasi ketenagakerjaan di Sumatera Selatan selama setahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik, dimana peningkatan jumlah penduduk diikuti oleh meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja (tenaga kerja). Jumlah tenaga kerja pada tahun 2013 dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 meningkat sebanyak 98.519

orang dengan laju pertumbuhan sebesar 1,83 persen. Adapun jumlah angkatan kerja selama setahun terakhir berkurang sebanyak 99.377 orang dengan laju pertumbuhan sebesar -2,64 persen. Selama periode Tahun 2012-2013, peningkatan laju pertumbuhan tenaga kerja sebesar 1,83 % kontribusi sejalan antara peningkatan laju pertumbuhan angkatan kerja laki-laki dan perempuan sama yaitu sebesar 1,83 %. Tingkat Pengangguran Terbuka provinsi Suaamteria Selatan tahun 2014 sebesar 4,96% dibawah angka nasional 5,95% sedangkan pada triwulan I tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 5,03% yang masih dibawah angka nasional yaitu 5,81%. Peningkatan pengangguran berhubungan erat dengan kondisi pergerakan roda ekonomi yang mengalami perlambatan. Ketidakstabilan kondisi perekonomian menyebabkan ketidakpastian dari keberlangsungan ketenagakerjaan.

Selama periode 2008-2012 perkembangan tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan menunjukkan trend menurun dari 17,67% pada tahun 2008 menjadi 13,48 pada tahun 2012. Tahun 2013 dari jumlah penduduk Sumatera Selatan Tahun 2013 sejumlah 7.828.700 jiwa dengan komposisi 3.978.700 jiwa laki-laki dan 3.850.000 jiwa perempuan, dari total penduduk tersebut posisi relatif tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan berada diatas rata-rata nasional sebesar 11,47% sedangkan angka Provinsi Sumatera Selatan sebesar 14,06%. Tahun 2014 tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan berada pada 13,62% sedangkan rata-rata nasional 10,96%. Tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan selalu selaras dan relevan dengan nasional, kondisi ini mengindikasikan faktor yang dominan dari penyebab tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan sama dengan kondisi nasional seperti kenaikan BBM, kenaikan tarif listrik dan inflasi dari kenaikan harga komoditas pokok.

Trend Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan peningkatan dari periode 2006 – 2013 namun nilai IPM Sumatera Selatan masih jauh dari nilai maksimum 100 yaitu

pada tahun 2013 baru mencapai 74,36 tetapi nilai tersebut lebih tinggi dari angka IPM nasional yaitu 73,81. Pencapaian angka IPM tergantung dari pencapaian angka dari beberapa komponen yaitu dari aspek kesehatan Angka Harapan Hidup yang terus meningkat dari tahun 2006 mencapai 68,8 tahun menjadi 70,10 tahun di tahun 2013, aspek pendidikan yaitu Angka Melek Huruf dari tahun 2006 mencapai 96,59 meningkat di tahun 2013 menjadi 97,55, demikian pula dengan rata-rata lama sekolah dari tahun 2006 mencapai 7,60 tahun meningkat di tahun 2013 menjadi 8,04 tahun dan terakhir dari aspek ekonomi yaitu komponen *Purchasing Power Parity* atau daya beli di tahun 2006 sebesar Rp. 625,30 meningkat Rp. 641,35.

2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2014 sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2014 provinsi Sumatera Selatan telah memberikan perbaikan dan peningkatan kinerja pembangunan provinsi Sumatera Selatan, terlihat dari tingkat realisasi RKPD yang telah mencapai target bahkan ada yang melampaui target yang ditetapkan di dalam Rencana Strategi SKPD dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, meskipun masih ada target yang belum tercapai di beberapa program dengan penyebab yang sulit dikendalikan seperti halnya kondisi iklim yang sangat mempengaruhi proses dari kegiatan pertanian maupun pembangunan infrastruktur.

Pencapaian target kinerja RPJMD pada misi kesatu pada tahun 2014 rata-rata memiliki tingkat realisasi lebih dari atau sama dengan 76% ke atas dengan ditandai warna hijau mendominasi terutama prioritas pembangunan pertanian, hanya pada program peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura untuk produksi komoditas buah jeruk hanya tercapai 19%, rendahnya pencapaian target produksi tersebut terkait dengan kondisi musim panas yang kurang mendukung dan serangan

hama tanaman selain itu banyaknya impor buah jeruk yang menjadi saingan produk lokal dan hambatan lainnya yaitu berdasarkan data BPS tahun 2013 bahwa luas panen komoditas jeruk sangat terbatas hanya 1,02% dibandingkan keseluruhan luas panen tanaman buah-buahan menurut komoditas di Provinsi Sumatera Selatan. Meskipun Sumatera Selatan bukan daerah sentra bawang merah, beberapa daerah terutama pegunungan banyak yang membudidayakan bawang merah dengan produksi yang menjanjikan, tetapi pada tahun 2014 pencapaian target produksi sebesar 772 ton hanya tercapai 193 ton dikarenakan musim panas yang berkepanjangan dan ketergantungan petani pada program/kegiatan dari pemerintah sehingga berpengaruh pada pencapaian produksi tanaman, selain itu luas panen yang relatif kecil yaitu 30 ha dibandingkan luas panen tanaman sayuran di Provinsi Sumatera Selatan 245.602 ha. Untuk tahun 2015 upaya dalam mendukung program peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura yaitu dengan memperluas kawasan hortikultura berkelanjutan dengan pengelolaan budidaya yang tepat dan spesifik lokasi.

Capaian kinerja prioritas pembangunan pertanian lainnya yang belum mencapai target terdapat pada program pengelolaan sistem penyediaan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura untuk jumlah produksi benih komoditas padi yaitu dari target tahun 2014 sebesar 1.134 ton hanya tercapai sebesar 348 ton atau 31%, adapun penyebabnya antara lain di beberapa daerah yang merupakan lokasi penangkaran benih bersertifikat seperti Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dengan permasalahan yang dihadapi yaitu kurangnya ketersediaan benih unggul untuk ditangkarkan contohnya varietas unggul Ciherang dan IR42 selain itu ketersediaannya tidak tepat waktu atau selalu terlambat sehingga lewat dari jadwal tanam dan lagi petani masih menggunakan benih lokal, seperti Seputih, Tiga Dara dan Sawah Kanyut. Awal tahun intensitas hujan yang turun sangat tinggi menyebabkan beberapa daerah penghasil benih padi

terendam. Selain target jumlah produksi benih untuk padi yang tidak tercapai ada juga jumlah produksi bibit untuk buah-buahan yang belum tercapai yaitu dari target 27.887 batang di tahun 2014 baru tercapai 8.000 batang atau sebesar 29%, hal ini dikarenakan jumlah batang indukan sudah banyak yang tua dan rusak sehingga produksi bibit batang tidak optimal menghasilkan bibit unggul. Tahun 2015 telah ditargetkan jumlah produksi benih buah-buahan sebanyak 7.500 batang, untuk triwulan I belum ada realisasi.

Capaian target RKPD tahun 2014 pada prioritas investasi dan Usaha, program peningkatan promosi dan kerjasama investasi pada indikator peningkatan kerjasama investasi mencapai realisasi investasi PMDN sampai dengan triwulan IV Tahun 2014 berjumlah Rp. 3,61 Trilyun dengan jumlah perusahaan yang ada sebanyak 47 unit, dan tenaga kerja yang ada berjumlah 26.728 orang, sedangkan target tahun 2014 dalam RPJMD sebesar Rp. 7,59 Trilyun dan PMA mencapai Rp. 7,65 Trilyun dari target Rp. 9,95 Trilyun dengan jumlah perusahaan yang ada sebanyak 78 unit, dan tenaga kerja yang ada berjumlah 23.844 orang. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor Investor cenderung *wait and see* menanamkan modalnya karena di tahun 2014 merupakan tahun politik yaitu adanya Pemilihan Presiden sehingga pertumbuhan ekonomi secara nasional melambat sehingga berpengaruh juga terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan, begitu juga dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang diiringi dengan turunnya harga karet di Pasar Internasional sehingga mempengaruhi perekonomian Sumatera Selatan karena karet merupakan salah satu produk unggulan Provinsi Sumatera Selatan. Untuk indikator kinerja yaitu meningkatnya realisasi investasi baru tercapai sebanyak 100 izin dan non izin. Pada tahun 2014, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah meraih penghargaan sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang

Penanaman Modal Provinsi Terbaik Kedua Tahun 2014. Selain itu BP3MD juga mendapat penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia berupa Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Seiring dengan perbaikan dalam pencapaian target indikator kinerja di 2015 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah merealisasikan jangka waktu perizinan dan non perizinan pada unit PTSP yang selesai SOP dari target 6 hari menjadi 3 hari atau 50% sudah mengalami kemajuan.

Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 pada Misi kedua RPJMD dapat dikatakan berhasil dilihat dari tingkat realisasi pencapaian target yang rata-rata 100%, walaupun ada yang masih dibawah target seperti pada prioritas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kamtibmas dimana indikator kinerja persentase pelayanan informasi data kepegawaian berbasis web pada program pembinaan dan pengembangan aparatur baru tercapai 23% dari target 70% di tahun 2014. Kondisi tersebut dikarenakan oleh data kepegawaian berbasis web terdiri dari 2 komponen yang harus terpenuhi, yaitu data dan aplikasi; dengan persentase validasi data tahun 2014 adalah sebesar 46%; sedangkan peningkatan kapasitas aplikasi pada tahun 2014 kondisinya masih 0 (sesuai target); sehingga realisasi kinerja = (% Validitas data + % kapasitas aplikasi) : 2 = (46 + 0) : 2 = 23%. Untuk pembinaan dan pengembangan aparatur didukung juga dari pendidikan dan pelatihan aparatur melalui diklat penjenjangan/struktural, teknis, fungsional dan pemerintahan dan politik, begitu juga halnya dengan kompetensi dan profesionalisme sumberdaya widyaiswara, dimana pada triwulan I tahun 2015 kegiatan kediklatan tersebut masih dalam tahap pengadministrasian dan proses rekruitmen widyaiswara.

Indikator kinerja lainnya pada misi kedua RPJMD yang belum mencapai target terdapat pada program pengawasan isi siaran dengan indikator jumlah lembaga penyiaran yang dimonitoring, tahun 2014 baru tercapai 48 lembaga penyiaran dari target 95 lembaga penyiaran.

Kendala yang dihadapi oleh Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah keterbatasan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia yang handal dalam mendukung tugas-tugas terutama dalam monitoring Lembaga Penyiaran. Untuk itu kedepan perlu penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan. Untuk tahun berjalan monitoring terhadap isi siaran pada lembaga penyiaran terus dilakukan dan telah mencapai target pelaksanaan sebesar 55%.

Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut merupakan indikator kinerja pada misi ketiga RPJMD yang belum mencapai target pada pelaksanaan RKPD tahun 2014 yaitu dari target 55% baru tercapai 31,51%, salah satu alasan pencapaian tersebut yaitu oleh jumlah Puskesmas santun usia lanjut tahun 2014 ada 88 Puskesmas sedangkan target pada tahun 2014 sebanyak 150 Puskesmas.

2.2.3. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2014 terhadap target RPJMD adalah:

- a. Indikator yang mencapai kriteria tinggi ($76\% \leq 100\%$) 186 program atau 86,92%;
- b. Indikator yang mencapai kriteria tinggi ($66\% \leq 75\%$) 10 program atau 4,67%;
- c. Indikator yang mencapai kriteria tinggi ($0\% \leq 65\%$) 18 program atau 8,41%;

Secara lebih detil hasil pelaksanaan perencanaan daerah Tahun 2014 sampai dengan tahun berjalan terlihat dalam tabel sebagai berikut :

2.3. Permasalahan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan

2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil Evaluasi Gambaran Umum Kondisi Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah antara lain sebagai berikut :

1. Prioritas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat :
 - a. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah belum optimal
 - Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 masih sebesar 70,66 (B) belum mencapai target yang diharapkan yaitu Sangat Baik >75-85 (A).
 - Opini BPK Audit Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sedangkan target yang ditetapkan adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
 - Pelayanan Perizinan melalui PTSP baru berjumlah 100 (seratus) jenis perizinan dari target total perizinan 189 (seratus delapan puluh sembilan).
 - b. Pelaksanaan pemerintahan berbasis ICT masih terbatas
 - Penilaian Hasil Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) tingkat provinsi pada Tahun 2014, Provinsi Sumatera Selatan masih menduduki ranking 14 (empat belas) nasional dengan nilai rata-rata 2,05 atau dalam kategori kurang dan dibawah rata-rata nasional yang sebesar 2,30.
 - Web SKPD yang aktif hanya 12 SKPD (24%) dari total 50 SKPD.
 - *e-Office* baru diterapkan oleh 2 SKPD (4%) dari total 50 SKPD.

2. Prioritas Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya :

a. Laju pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi

- Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan survei penduduk tahun 2010 sebesar 1,85% berada diatas rata-rata nasional yang sebesar 1,49%.
- *Total Fertility Rate* (TFR) Provinsi Sumatera Selatan sebesar 2,8%, lebih tinggi diatas angka nasional yang sebesar 2,6%.

b. Masih kurang optimalnya peningkatan SDM yang berkualitas berbasis kompetensi

- Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja SD ke bawah sebesar 50,19%.
- Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja SMP sebesar 17,04%.
- Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja SMA sebesar 22,99%.
- Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja Diploma sebesar 2,54%.
- Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja Perguruan Tinggi sebesar 7,24%.

c. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan masih kurang

- Jumlah ruang kelas PAUD yang rusak sebanyak 13.988 kelas atau 30,34%.
- Jumlah ruang kelas SD/MI tahun 2010 yang rusak sebanyak 10.172 kelas atau 33,55%.
- Jumlah ruang kelas SMP/MTs tahun 2010 yang rusak sebanyak 2.455 kelas atau 23,84%.
- Jumlah ruang kelas SMA/MA tahun 2010 yang rusak sebanyak 847 kelas atau 16,04%.

d. Belum meratanya distribusi tenaga pendidik di daerah

- Jumlah guru TK di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 4.037 guru, terbanyak di Kota Palembang sebanyak 1.101 guru

(27,27%), sedangkan yang paling sedikit di Kabupaten OKU Selatan sebanyak 79 guru (1,95%).

- Jumlah guru SD Negeri di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 59.176 guru, terbanyak di Kota Palembang sebanyak 7.794 guru (13,17%), sedangkan yang paling sedikit di Kota Pagar Alam sebanyak 1.148 guru (1,94%).
 - Jumlah guru SMP Negeri di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 18.964 guru, terbanyak di Kota Palembang sebanyak 4.121 guru (21,73%), sedangkan yang paling sedikit di Kota Pagar Alam sebanyak 460 guru (2,42%).
 - Jumlah guru SMA Negeri di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 10.317 guru, terbanyak di Kota Palembang sebanyak 2.695 guru (26,12%), sedangkan yang paling sedikit di Kota Pagar Alam sebanyak 323 guru (3,13%).
- e. Masih terbatasnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dari tingkat SMP sampai Perguruan Tinggi terutama di daerah terpencil dan perairan
- APK SMP menurun dari tahun 2012 sebesar 86,62% menjadi 85,85% di tahun 2013.
 - APK SMA tahun 2013 yang sebesar 62,78% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 69,00% dan masih dibawah angka nasional yang sebesar 66,61%.
- f. Terbatasnya akses layanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu
- Persentase Rumah Sakit yang memenuhi standar masih sebesar 76,19% dari target untuk tahun 2014 sebesar 87%, sementara target akhir RPJMD yaitu sebesar 95%.
 - Persentase masyarakat yang sakit memanfaatkan Rumah Sakit tahun 2013 masih rendah yaitu sebesar 26%.

- Persentase kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih sebesar 91,72% belum mencapai target yang diharapkan yaitu sebesar 94,00%.

g. Tingginya Angka Kematian Ibu

- Jumlah kematian ibu di Sumatera Selatan masih relatif tinggi sebesar 155 kasus pada tahun 2014 dibandingkan dengan target pada RPJMD yaitu 142 kasus.

h. Ketersediaan dan Kualitas tenaga kesehatan masih terbatas

- Persentase penolong persalinan yang telah mempunyai sertifikat Asuhan Persalinan Normal masih 40% dibandingkan target 70%.
- Ketersediaan dokter spesialis kandungan dibandingkan dengan jumlah baru mencapai 47%.

3. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan :

a. Masih Tingginya Angka Kemiskinan

- Angka kemiskinan Sumatera Selatan tahun 2014 sebesar 13,62% masih lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 10,96%.
- Angka kemiskinan pedesaan (14,50%) pada tahun 2013 lebih tinggi dibandingkan perkotaan (13,28%).
- Kesenjangan angka kemiskinan per wilayah tahun 2013 masih tinggi, secara persentase terendah di Kota Pagar Alam sebesar 9,00% dan tertinggi di Kabupaten Lahat sebesar 18,61%, secara jumlah penduduk miskin terendah di Kota Pagar Alam sebanyak 11.800 jiwa dan tertinggi di Kota Palembang sebanyak 206.000 jiwa.
- Indeks kedalaman kemiskinan tahun 2013 masih tinggi (2,49%)
- Indeks keparahan kemiskinan tahun 2013 masih tinggi (0,73%)

b. Belum terpadunya program-program penanggulangan kemiskinan sehingga sering terjadi bias sasaran, target dan lokasi.

c. Kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang akar permasalahan penyebab kemiskinan.

4. Prioritas Pembangunan Pertanian :

a. Belum optimalnya pengelolaan lahan tidur, lahan gambut dan daerah pasang surut untuk pertanian

- Proporsi tanah yang terindikasi terlantarkan berdasarkan sumber BPN Sumatera Selatan seluas 992.098 ha yang terdiri dari hak guna usaha seluas 102.677 ha dan izin lokasi seluas 859.420 ha.

b. Dukungan tenaga penyuluhan pertanian belum optimal

- Produktivitas padi tahun 2014 sebesar 45,29 kg/ha, masih lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 51,35 kg/ha
- Rasio penyuluhan pertanian dengan jumlah desa sebesar (1:3) masih berada dibawah target yang sebesar (1:1)

c. Belum adanya lembaga khusus permodalan petani

d. Masih tingginya kegiatan alih fungsi lahan sawah ke non tanaman pangan

- Lahan sawah tahun 2012 seluas 800.615 ha turun menjadi seluas 781.595 ha pada tahun 2013.

e. Hilirisasi produk pertanian belum optimal sehingga daya saing masih rendah

- Menurut data sensus pertanian, jumlah rumah tangga usaha pertanian yang melakukan pengolahan hasil pertanian pada tahun 2013 belum terlalu banyak yaitu baru sebanyak 43.207 rumah tangga.

f. Produktivitas tanam padi masih rendah

- Lahan sawah di Sumatera Selatan tahun 2013 seluas 781.595 ha dengan rincian lahan sawah dengan satu kali tanam seluas 430.164 ha (55,03%), dua kali tanam seluas 162.243 ha (20,75%), dan tiga kali tanam seluas 20.017 ha (2,56%)

5. Prioritas Infrastruktur dan Energi :
 - a. Regulasi dan kelembagaan yang belum kondusif terhadap percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api
 - Belum terbitnya PP insentif dan disinsentif untuk Kawasan Ekonomi Khusus.
 - Belum terbentuknya Administrator dan Badan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api.
 - b. Masih banyaknya jaringan irigasi yang belum diperbaiki
 - Saluran Irigasi di Provinsi Sumatera Selatan 210.775 m, dengan rincian 57,32% dalam kondisi baik, 14,45% rusak ringan, 24,08% dalam kondisi rusak sedang dan 4,15% dalam kondisi rusak berat.
 - c. Belum optimalnya pengembangan transportasi air, sungai, danau dan penyeberangan.
 - Standar keamanan moda transportasi air belum cukup baik
 - Tingkat kecelakaan lalu lintas angkutan air cukup tinggi
 - Menyusutnya peran dermaga sungai sebagai fasilitas angkutan sungai, jumlah dermaga di Sumatera Selatan sebanyak 89 unit dengan kondisi baik sebesar 87% sebaran terbanyak terdapat di Palembang (38 unit), Banyuasin (17 unit), Ogan Komering Ilir (9 unit), Musi Banyuasin (9 unit).
 - d. Implementasi Sumsel sebagai Lumbung Energi Nasional belum optimal
 - Rasio Elektrifikasi tahun 2014 sebesar 73,54%, masih dibawah capaian nasional yang sebesar 81,51%.
 - Rasio Desa Berlistrik tahun 2014 sebesar 91,60%, belum mencapai target RPJMD yang sebesar 92,30%.
 - Pemanfaatan energi baru dan terbarukan belum optimal
 - Pelaksanaan kewenangan Energi dan SDM pusat, provinsi, kabupaten/kota yang belum optimal.

- e. Belum optimalnya pengembangan infrastruktur dasar permukiman
- Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih di Sumsel tahun 2013 baru mencapai 59,77%, masih jauh dari target MDGs tahun 2015 yang sebesar 68,87%.
 - Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Sumsel tahun 2013 baru mencapai 54,20%, masih jauh dari target MDGs tahun 2015 yang sebesar 62,41%.
 - Rata-rata Indeks Pengelolaan Persampahan di Sumsel masih dalam kategori buruk yaitu 1,59, belum mencapai target kategori baik pada indeks 2,00-2,49 atau sangat baik pada indeks 2,50-3,00.
 - Rata-rata Indeks Pengelolaan Air Limbah Domestik di Sumsel masih dalam kategori buruk yaitu 1,29, belum mencapai target kategori baik pada indeks 2,00-2,49 atau sangat baik pada indeks 2,50-3,00.
 - Rata-rata Indeks Pengelolaan Drainase Lingkungan di Sumsel masih dalam kategori buruk yaitu 0,27, jauh dari target kategori baik pada indeks 2,00-2,49 atau sangat baik pada indeks 2,50-3,00.
- f. Belum optimalnya operasional beberapa bandara perintis yang ada
- Aksesibilitas jaringan jalan yang baik pada daerah Pendopo, Sekayu dan Muara Enim sehingga lebih rasional menggunakan jalur darat;
 - Status aset yang tidak jelas pada Bandara Banding Agung – OKUS
- g. Belum terwujudnya angkutan massal perkeretaapian dalam kota
- h. Belum terwujudnya pembangunan Jembatan Musi IV dan Musi VI.

6. Prioritas Investasi dan Pengembangan Usaha :

- a. Produktivitas dan daya saing UMKMK khususnya industri rumah tangga belum optimal, pada tahun 2014 volume usaha sebesar Rp.24,96 trilyun dari target RPJMD Rp.24,97 trilyun, nilai modal Rp.9,44 trilyun dari target Rp.9,46 trilyun, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.978.457 orang.

- b. Hilirisasi produk pertanian dan pertambangan belum optimal.
 - c. Belum adanya Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah (RIPID) komoditas karet, kelapa sawit dan kopi.
 - d. Belum ditetapkannya Kawasan Industri (KI) Muara Enim, Banyuasin, Palembang, dan Lubuklinggau sebagai klaster industri karet, kelapa sawit dan kopi.
 - e. Masih rendahnya kunjungan wisatawan mancanegara (900 orang pada tahun 2014)
 - Masih sulitnya akses menuju beberapa lokasi objek wisata.
 - Palembang belum masuk dalam penetapan 18 pintu masuk pariwisata terbesar Indonesia.
7. Prioritas Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Bencana :
- a. Penurunan kualitas air, rata-rata kualitas air sungai di DAS Musi (28 Sungai) sudah mengalami cemar ringan, bahkan beberapa titik lokasi telah tercemar berat.
 - b. Masih tingginya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
 - Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 sebesar 2.418,56 juta ton CO₂Eq.
 - c. Masih rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 sebesar 58,57, masih dalam klasifikasi Kurang dan menurun dibandingkan Tahun 2011 yang sebesar 58,85.
 - d. Kurangnya kapasitas dan kualitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup
 - Jumlah SDM pengelola lingkungan hidup dari lulusan S2 sebanyak 23 orang, lulusan S1 sebanyak 28 orang, lulusan D3 sebanyak 1 orang, lulusan SMA sebanyak 6 orang dan 1 orang lulusan SMP.

e. Belum optimalnya kemampuan penanggulangan bencana dan penjaminan fungsi sistem peringatan dini belum optimal

- Jumlah Desa Tangguh baru sebanyak 2 (dua) desa di Kabupaten Ogan Ilir, Desa Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) dan Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Rantau Bayur, Desa Lebung.
- Jumlah Kabupaten/Kota yang mempunyai BPBD baru 14 kabupaten/kota (82,35 %) dari target 17 kabupaten/kota (100%), daerah yang belum mempunyai BPBD yaitu Kota Prabumulih, Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas Utara.

f. Masih tingginya lahan kritis

- Lahan kritis seluas 1,64 juta ha atau 20,39% dari total 8.08 juta ha, dengan rincian 1,45 juta ha atau 17,98% lahan agak kritis, 182,16 ribu ha atau 2,25% lahan kritis dan 12,81 ha atau 0,16% lahan sangat kritis.

g. Masih tingginya kasus illegal logging dan perambahan hutan.

- Kerusakan hutan di Provinsi Sumatera Selatan seluas 316.700 ha (25,50%), dengan rincian 304.740 ha disebabkan oleh kebakaran hutan, 60.000 ha disebabkan ladang berpindah, 59.000 ha disebabkan oleh penebangan liar, dan 11.840 ha disebabkan oleh perambahan hutan.

8. Prioritas Pengembangan Wilayah :

a. Masih belum meratanya pembangunan antarwilayah

- Masih tingginya gini ratio tahun 2013 yang sebesar 0,4 dibandingkan target sebesar 0,3 atau berada pada ranking 18 nasional.
- Masih tingginya kesenjangan wilayah indeks Williamson Tahun 2013 sebesar 0,49 dari target sebesar 0,34.
- Masih tingginya kesenjangan kerapatan jalan antara 0,1 sampai 2,41

- b. Pengembangan kawasan strategis provinsi di daerah belum optimal
 - 4 (empat) Kawasan Strategis Provinsi belum diperdakan
 - Raperda RTRW Provinsi Tahun 2013-2033 belum diperdakan
 - Belum operasionalnya KEK Tanjung Api-Api
- c. Belum optimalnya kerjasama antarwilayah dalam pengembangan wilayah perbatasan

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, permasalahan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

1. Pendidikan
 - a. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan masih kurang
 - Jumlah ruang kelas PAUD yang rusak sebanyak 13.988 kelas atau 30,34%
 - Jumlah ruang kelas SD/MI tahun 2010 yang rusak sebanyak 10.172 kelas atau 33,55%.
 - Jumlah ruang kelas SMP/MTs tahun 2010 yang rusak sebanyak 2.455 kelas atau 23,84%.
 - Jumlah ruang kelas SMA/MA tahun 2010 yang rusak sebanyak 847 kelas atau 16,04%.
 - b. Belum meratanya distribusi tenaga pendidik di daerah
 - Jumlah guru TK di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 4.037 guru, terbanyak di Kota Palembang sebanyak 1.101 guru (27,27%), sedangkan yang paling sedikit di Kabupaten OKU Selatan sebanyak 79 guru (1,95%).
 - Jumlah guru SD Negeri di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 59.176 guru, terbanyak di Kota Palembang sebanyak 7.794

guru (13,17%), sedangkan yang paling sedikit di Kota Pagar Alam sebanyak 1.148 guru (1,94%).

- Jumlah guru SMP Negeri di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 18.964 guru, terbanyak di Kota Palembang sebanyak 4.121 guru (21,73%), sedangkan yang paling sedikit di Kota Pagar Alam sebanyak 460 guru (2,42%).
 - Jumlah guru SMA Negeri di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 10.317 guru, terbanyak di Kota Palembang sebanyak 2.695 guru (26,12%), sedangkan yang paling sedikit di Kota Pagar Alam sebanyak 323 guru (3,13%).
- c. Masih terbatasnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dari tingkat SMP sampai Perguruan Tinggi terutama di daerah terpencil dan perairan
- APK SMP menurun dari tahun 2012 sebesar 86,62% menjadi 85,85% di tahun 2013.
 - APK SMA tahun 2013 yang sebesar 62,78% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 69,00% dan masih dibawah angka nasional yang sebesar 66,61%.

2. Kesehatan

- a. Terbatasnya akses layanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu
- Persentase Rumah Sakit yang memenuhi standar masih sebesar 76,19% dari target untuk tahun 2014 sebesar 87%, sementara target akhir RPJMD yaitu sebesar 95%.
 - Persentase masyarakat yang sakit memanfaatkan Rumah Sakit tahun 2013 masih rendah yaitu sebesar 26%.
 - Persentase kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih sebesar 91,72% belum mencapai target yang diharapkan yaitu sebesar 94,00%.

b. Tingginya Angka Kematian Ibu

- Jumlah kematian ibu di Sumatera Selatan masih relatif tinggi sebesar 155 kasus pada tahun 2014 dibandingkan dengan target pada RPJMD yaitu 142 kasus.

c. Ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan masih terbatas

- Persentase penolong persalinan yang telah mempunyai sertifikat Asuhan Persalinan Normal masih 40% dibandingkan target 70%
- Ketersediaan dokter spesialis kandungan dibandingkan dengan jumlah baru mencapai 47%.

3. Lingkungan Hidup

a. Penurunan kualitas air, rata-rata kualitas air sungai di DAS Musi (28 Sungai) sudah mengalami cemar ringan, bahkan beberapa titik lokasi telah tercemar berat.

b. Masih tingginya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

- Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 sebesar 2.418,56 juta ton CO₂Eq

c. Masih rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 sebesar 58,57, masih dalam klasifikasi Kurang dan menurun dibandingkan Tahun 2011 yang sebesar 58,85

d. Kurangnya kapasitas dan kualitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup

- Jumlah SDM pengelola lingkungan hidup dari lulusan S2 sebanyak 23 orang, lulusan S1 sebanyak 28 orang, lulusan D3 sebanyak 1 orang, lulusan SMA sebanyak 6 orang dan 1 orang lulusan SMP

e. Belum optimalnya kemampuan penanggulangan bencana dan penjaminan fungsi sistem peringatan dini belum optimal

- Jumlah Desa Tangguh baru sebanyak 2 (dua) desa di Kabupaten Ogan Ilir, Desa Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) dan Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Rantau Bayur, Desa Lebung.
- Jumlah Kabupaten/Kota yang mempunyai BPBD baru 14 kabupaten/kota (82,35 %) dari target 17 kabupaten/kota (100%), daerah yang belum mempunyai BPBD yaitu Kota Prabumulih, Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas Utara.

4. Pekerjaan Umum

- a. Belum optimalnya pengembangan infrastruktur dasar permukiman
 - Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih di Sumsel tahun 2013 baru mencapai 59,77%, masih jauh dari target MDGs tahun 2015 yang sebesar 68,87%
 - Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Sumsel tahun 2013 baru mencapai 54,20%, masih jauh dari target MDGs tahun 2015 yang sebesar 62,41%
 - Rata-rata Indeks Pengelolaan Persampahan di Sumsel masih dalam kategori buruk yaitu 1,59, belum mencapai target kategori baik pada indeks 2,00-2,49 atau sangat baik pada indeks 2,50-3,00
 - Rata-rata Indeks Pengelolaan Air Limbah Domestik di Sumsel masih dalam kategori buruk yaitu 1,29, belum mencapai target kategori baik pada indeks 2,00-2,49 atau sangat baik pada indeks 2,50-3,00
 - Rata-rata Indeks Pengelolaan Drainase Lingkungan di Sumsel masih dalam kategori buruk yaitu 0,27, jauh dari target kategori baik pada indeks 2,00-2,49 atau sangat baik pada indeks 2,50-3,00
- b. Belum terwujudnya pembangunan jembatan Musi IV dan Musi VI.
- c. Masih banyaknya jaringan irigasi yang belum diperbaiki
 - Saluran Irigasi di Provinsi Sumatera Selatan 210.775 m, dengan rincian 57,32% dalam kondisi baik, 14,45% dalam kondisi rusak

ringan, 24,08% dalam kondisi rusak sedang dan 4,15% dalam kondisi rusak berat.

5. Penataan Ruang

- a. Masih belum meratanya pembangunan antar wilayah
 - Masih tingginya gini ratio tahun 2013 yang sebesar 0,4 dibandingkan target sebesar 0,3 atau berada pada ranking 18 nasional
 - Masih tingginya kesenjangan wilayah indeks williamson Tahun 2013 sebesar 0,49 dari target sebesar 0,34
 - Masih tingginya kesenjangan kerapatan jalan antara 0,1 sampai 2,41
- b. Pengembangan kawasan strategis provinsi di daerah belum optimal
 - 4 (empat) Kawasan Strategis Provinsi belum diperdakan
 - Raperda RTRW Provinsi Tahun 2013-2033 belum diperdakan
 - Belum operasionalnya KEK Tanjung Api-Api
- c. Belum optimalnya kerjasama antar wilayah dalam pengembangan wilayah perbatasan
- d. Perda RTRW Provinsi Sumatera Selatan belum ditetapkan menjadi perda karena masih menunggu tindaklanjut peninjauan kembali Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.822/Menhut-II/2013 tentang perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan Provinsi Sumatera.
- e. Evaluasi Raperda RTRW Kabupaten Musi Banyuasin sampai akhir tahun 2014 belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu peninjauan kembali Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.822/Menhut-II/2013 tentang perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan Provinsi Sumatera Selatan.
- f. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten MURATARA dan Kabupaten PALI belum dilakukan mengingat kabupaten tersebut baru ditetapkan secara definitif sebagai Daerah Otonom

Baru (DOB) pada tahun 2013, dan kedua kabupaten tersebut telah menyusun Draft RTRW kabupaten dan dilanjutkan menjadi dokumen RTRW serta dilakukan penetapan pada tahun 2015.

- g. Terbatasnya sumber daya aparatur bidang penataan ruang, Sistem Informasi Geografis dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang.
- h. Lambatnya penyusunan RDTR kabupaten/kota, belum beroperasinya Jaringan Informasi Geospasial Daerah (IGD) dan belum terbangunnya *One Map Sumatera Selatan*.

6. Perencanaan Pembangunan

- Belum optimalnya koordinasi perencanaan dengan pemangku kepentingan terkait (SKPD, Instansi Vertikal, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Masyarakat).
- Belum optimalnya masukan hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai input perencanaan kedepan.
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring serta evaluasi perencanaan pembangunan berbasis sistem informasi (IT).
- Belum optimalnya Standar Operasional Prosedur penyusunan rencana pembangunan dan pengendalian evaluasi pembangunan.

7. Perumahan

- Masih banyak terdapat Rumah Tidak Layak Huni terutama di Perkotaan.
- Masih diperlukan pembangunan perumahan yang layak untuk masyarakat menengah kebawah.
- Masih terbatasnya daya beli masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah yang layak.
- Terkendalanya pembebasan lahan, terutama dalam pembangunan rumah murah bagi MBR dan TPA Regional.

- Keterbatasan kerjasama dengan perbankan, terutama dalam penyediaan pinjaman untuk penyediaan rumah murah bagi MBR.

8. Kepemudaan dan Olahraga

- Belum optimalnya pembangunan industri olahraga
- Pemanfaatan IPTEK keolahragaan masih terbatas
- Kurangnya partisipasi pemuda dalam kegiatan peningkatan kemampuan pemuda
- Belum berkembangnya jiwa kewirausahaan pemuda
- Dampak globalisasi mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku pemuda, banyak pemuda yang terlibat penyalahgunaan narkoba dan lebih tertarik budaya populer yang bersifat instan.

9. Penanaman Modal

- Investor cenderung *wait and see* menanamkan modalnya karena pertumbuhan ekonomi secara nasional melambat sehingga berpengaruh juga terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan
- Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang diiringi dengan turunnya harga karet di pasar internasional sehingga mempengaruhi perekonomian Sumatera Selatan karena karet merupakan salah satu produk unggulan Provinsi Sumatera Selatan.
- Rendahnya kesadaran investor baik dalam memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan data realisasi serta informasi yang disampaikan sering kali kurang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari proyek yang bersangkutan.

10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- a. Produktivitas dan daya saing UMKMK khususnya industri rumah tangga belum optimal
 - Pada tahun 2014 volume usaha sebesar Rp.24,96 trilyun dari target RPJMD Rp.24,97 trilyun, nilai modal Rp.9,44 trilyun dari

target Rp.9,46 trilyun, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.978.457 orang.

11. Ketenagakerjaan

- a. Masih kurang optimalnya peningkatan SDM yang berkualitas berbasis kompetensi
 - Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja SD ke bawah sebesar 50,19%
 - Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja SMP sebesar 17,04%
 - Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja SMA sebesar 22,99%
 - Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja Diploma sebesar 2,54%
 - Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja Perguruan Tinggi sebesar 7,24%
- b. Terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan (dicerminkan dari tingginya pengangguran lulusan SMA ke atas dan tingginya persentase pekerja di sektor informal).
- c. Ketidakseimbangan antara persediaan dan kebutuhan tenaga kerja.
- d. Belum terjaminnya hak pekerja dan belum terlindunginya tenaga kerja dari ancaman PHK.
- e. Data-data ketenagakerjaan yang digunakan untuk membuat suatu perencanaan dalam rangka penyusunan program belum akurat.

12. Ketahanan Pangan

- a. Belum meratanya ketersediaan dan distribusi pangan antar waktu dan antar wilayah.
- b. Belum optimalnya Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
- c. Belum beragamnya pola konsumsi pangan bergizi dan berimbang sesuai dengan Pola Pangan Harapan (PPH).
- d. Pemberian bantuan untuk balita Kurang Energi Protein (KEP) hanya mencukupi waktu tertentu sehingga sulit untuk dapat mengetahui perkembangan yang signifikan dalam penanganan

masalah balita gizi buruk/kurang serta pemberdayaan dalam penanganan daerah rawan pangan kronis.

13. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Lemahnya koordinasi antar sektor terkait pada semua tingkatan serta mekanisme kerja yang belum memadai, kelembagaan yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak sangat bervariasi di kabupaten/kota, sehingga menjadi kendala dalam berkoordinasi.
- b. Tingkat kesadaran dan tanggung jawab perempuan atas kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi masih sangat terbatas.
- c. Nilai-nilai sosial budaya di masyarakat yang belum dapat secara optimal mendukung kemajuan perempuan, masih adanya bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
- d. Masih tingginya angka buta aksara perempuan.
- e. Belum semua instansi membuat data terpisah berdasarkan gender.
- f. Masih adanya perlakuan tindak kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan dan anak

14. Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. Laju pertumbuhan jumlah penduduk masih cukup tinggi
 - Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan survei penduduk tahun 2010 sebesar 1,85% berada diatas rata-rata nasional yang sebesar 1,49%.
 - Total Fertility Rate (TFR) Provinsi Sumatera Selatan sebesar 2,8%, lebih tinggi diatas angka nasional yang sebesar 2,6%.

15. Perhubungan

- a. Belum optimalnya pengembangan transportasi air, sungai, danau dan penyeberangan.
 - Standar keamanan moda transportasi air belum cukup baik

- Tingkat kecelakaan lalu lintas angkutan air cukup tinggi
 - Menyusutnya peran dermaga sungai sebagai fasilitas angkutan sungai, jumlah dermaga di Sumatera Selatan sebanyak 85 unit terbanyak terdapat di Palembang (38 unit), Banyuasin (17 unit), Ogan Komering Ilir (9 unit), Musi Banyuasin (9 unit).
- b. Belum optimalnya operasional beberapa bandara perintis yang ada
- Aksesibilitas jaringan jalan yang baik pada daerah pendopo, sekayu dan muara enim sehingga lebih rasional menggunakan jalur darat;
 - Status aset yang tidak jelas pada Bandara Banding Agung – OKUS
- c. Belum terwujudnya angkutan massal perkeretaapian dalam kota

16. Komunikasi dan Informatika

- a. Pelaksanaan pemerintahan berbasis ICT masih terbatas
- Penilaian Hasil Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) tingkat provinsi pada Tahun 2014, Provinsi Sumatera Selatan masih menduduki ranking 14 (empat belas) nasional dengan nilai rata-rata 2,05 atau dalam kategori kurang dan dibawah rata-rata nasional yang sebesar 2,30.
 - Web SKPD yang aktif hanya 12 SKPD (24%) dari total 50 SKPD
 - *e-Office* baru diterapkan oleh 2 SKPD (4%) dari total 50 SKPD

17. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- a. Masih adanya konflik perbatasan, umat beragama, ras/suku
- b. Hilangnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat
- c. Meningkatnya demo-demo anarkis serta ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah
- d. Rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan kebijakan publik
- e. Tingginya angka golput dalam pemilu akibat kejemuhan dan apatisme masyarakat

18. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;

- a. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah belum optimal
- Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 masih sebesar 70,66 (B) belum mencapai target yang diharapkan yaitu Sangat Baik >75-85 (A).
 - Opini BPK Audit Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sedangkan target yang diharapkan yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
 - Pelayanan Perizinan melalui PTSP baru berjumlah 100 (seratus) jenis perizinan dari target total perizinan 189 (seratus delapan puluh sembilan).

19. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Belum optimalnya kemampuan aparatur pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat
- b. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, pengelolaan sarana prasarana dan pemanfaatan teknologi tepat guna
- c. Masih rendahnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan perumahan berbasis masyarakat
- d. Masih rendahnya kemandirian masyarakat dalam pengelolaan usaha ekonomi produktif
- e. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa.

20.Sosial

- a. Kurang optimalnya perhatian pemerintah kabupaten/kota dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti belum tersedia data base PMKS secara valid dan objektif.
- b. Penanganan masalah kesejahteraan sosial masih berorientasi pada jumlah anggaran yang ada (*Budget Oriented*) dan belum berorientasi kepada program atau kondisi objektif permasalahan yang ada di masyarakat (*Program Oriented*).

- c. Masih terbatasnya sumber daya manusia ditingkat teknis operasional pelayanan, terutama petugas pelaksana di tingkat Kabupaten/Kota yang belum ditopang dengan pengetahuan Pekerjaan Sosial.
- d. Masih minimnya informasi, publikasi dan koordinasi tentang masalah/usaha kesejahteraan sosial (PMKS dan PSKS) di kalangan birokrat maupun publik, sehingga masih rendahnya kepedulian dan kepekaan masyarakat dalam usaha penanggulangan masalah kesejahteraan sosial.

21. Kebudayaan

- a. Kurang optimalnya upaya pembinaan dan pengembangan budaya
- b. Belum tersedianya ruang kreatif aktivitas seni budaya (Taman Budaya)
- c. Belum optimalnya pengembangan kearifan lokal yang mendukung pembangunan berbasis lokal.
- d. Semakin lunturnya nilai-nilai budaya daerah dalam masyarakat
- e. Perlindungan terhadap Hak atas kekayaan Intelektual (HAKI) budaya daerah belum optimal.

22. Statistik

- a. Belum optimalnya penyediaan data terbaru, valid dan berkualitas
- b. Belum adanya mekanisme yang jelas dalam penyampaian data dan informasi kepada publik
- c. Belum terpusatnya data dasar yang digunakan sebagai dasar perencanaan

23. Kearsipan

- a. Arsiparis aktif yang ada di Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan hanya berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- b. Kondisi prasarana yang ada sudah tidak memadai lagi terutama lemari roll o'pack untuk penyimpanan arsip akibat penyerahan

dokumen dan arsip dari dinas/instansi terkait kepada Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi pengelolaan arsip
- d. Rendahnya partisipasi dari dinas/instansi terkait terhadap arsip dan kurangnya kesadaran akan pentingnya arsip sebagai sumber data maupun sumber informasi yang penting, sehingga belum optimalnya upaya penyelamatan arsip yang telah dilakukan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat

24. Perpustakaan

- a. Minimnya tenaga pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan khususnya yang berlatar belakang pendidikan perpustakaan. Kondisi ini juga dialami oleh perpustakaan umum yang ada di 17 kabupaten/kota yang hingga saat ini hanya memiliki 4 (empat) orang pustakawan.
- b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan berbasis teknologi informasi komunikasi (ICT) dan tenaga teknis di bidang perpustakaan dan jaringan
- c. Belum terkoneksi Sistem Sumsel *One Access* Informasi bibliografi koleksi antar Perpustakaan Provinsi dengan Perpustakaan Kabupaten/Kota
- d. Terbatasnya jumlah proposal usulan masyarakat untuk masyarakat untuk mendapatkan bantuan bahan bacaan

25. Kelautan dan Perikanan

- a. Masih rendahnya kesejahteraan nelayan yang diukur melalui Nilai Tukar Nelayan
- b. Produksi perikanan budidaya dan tangkap belum optimal
- c. Industrialisasi perikanan belum terlaksana
- d. Masih tingginya *illegal fishing* dan kerusakan sumberdaya perikanan

26. Pertanian

- a. Belum optimalnya pengelolaan lahan tidur, lahan gambut dan daerah pasang surut untuk pertanian
 - Proporsi tanah yang terindikasi terlantarkan berdasarkan sumber BPN Sumatera Selatan seluas 992.098 ha yang terdiri dari hak guna usaha seluas 102.677 ha dan izin lokasi seluas 859.420 ha.
- b. Dukungan tenaga penyuluh pertanian belum optimal
 - Produktivitas padi tahun 2014 sebesar 45,29 kg/ha, masih lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 51,35 kg/ha
 - Rasio penyuluh pertanian dengan jumlah desa sebesar (1:3) masih berada dibawah target yang sebesar (1:1)
- c. Belum adanya lembaga khusus permodalan petani
- d. Masih tingginya kegiatan alih fungsi lahan sawah ke non tanaman pangan
 - Lahan sawah tahun 2012 seluas 800.615 ha turun menjadi seluas 781.695 ha pada tahun 2013
- e. Produktivitas tanam padi masih rendah
 - Lahan sawah di Sumatera Selatan tahun 2013 seluas 781.595 ha dengan rincian lahan sawah dengan satu kali tanam seluas 430.164 ha (55,03%), dua kali tanam seluas 162.243 ha (20,75%), dan tiga kali tanam seluas 20.017 ha (2,56%)

27. Kehutanan

- a. Semakin menurunnya kualitas fungsi hutan dan luas kawasan hutan serta meluasnya Kerusakan Ekosistem Lahan Gambut.
- b. Penegakan Hukum dan Peran Aparat Hukum Dalam Perlindungan Hutan masih lemah.
- c. Perizinan Penggunaan dan Pengusahaan Lahan belum optimal.
- d. Kurang adilnya Distribusi Akses bagi Masyarakat dan Pengusaha Kehutanan Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lahan

- e. Belum efektifnya Pengelolaan Ekosistem dan DAS Secara Terpadu, serta Rehabilitasi Hutan dan Lahan Terdegradasi Secara Partisipatif
- f. Masih tingginya Kebakaran Hutan dan Lahan Penyebab Utama Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut
- g. Lambatnya Proses Pembentukan dan Operasionalisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan oleh KPH.

28. Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Implementasi Sumsel sebagai Lumbung Energi Nasional belum optimal
 - Rasio Elektrifikasi tahun 2014 sebesar 73,54%, masih dibawah capaian nasional yang sebesar 81,51%
 - Rasio Desa Berlistrik tahun 2014 sebesar 91,60%, belum mencapai target RPJMD yang sebesar 92,30%
 - Belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan energi baru dan terbarukan
 - Pelaksanaan kewenangan Energi dan SDM pusat, provinsi, kabupaten/kota yang belum optimal
 - Bertambahnya jumlah penduduk dan pemekaran desa berbanding lurus terhadap kebutuhan listrik.

29. Pariwisata

- a. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata.
 - Masih sulitnya akses menuju beberapa lokasi wisata
 - Masih minimnya rambu-rambu petunjuk lokasi wisata
 - Minimnya sarana air bersih dan sanitasi di lokasi objek wisata
 - Minimnya penginapan di dekat objek wisata
 - Minimnya fasilitas Meeting Incentive Conference Exhibition (MICE)
- b. Belum optimalnya penyediaan fasilitas *city tour* pada daerah tujuan wisata
- c. Masih kurang sinkronnya pembangunan pariwisata yang terpadu.

- d. Kurangnya dukungan masyarakat dalam pengembangan bidang pariwisata.
- e. Belum optimalnya pelaksanaan promosi pariwisata daerah.

30. Industri

- a. Belum operasionalnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api
 - Regulasi yang belum kondusif terhadap percepatan pembangunan KEK Tanjung Api-Api, belum terbitnya PP insentif dan disincentif untuk Kawasan Ekonomi Khusus
 - Belum terbentuknya Administrator dan Badan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api
- b. Hilirisasi produk pertanian belum optimal sehingga daya saing masih rendah
 - Menurut data sensus pertanian, jumlah rumah tangga usaha pertanian yang melakukan pengolahan hasil pertanian pada tahun 2013 belum terlalu banyak yaitu baru sebanyak 43.207 rumah tangga.
- c. Lemahnya daya saing dan pemasaran produk lokal
- d. Lemahnya penyerapan tenaga kerja dari sektor industri
- e. Sumber bahan baku lokal sering menghadapi kendala ketersediannya baik jumlah, kualitas, teknologi dan keterampilan tenaga kerja.
- f. Belum optimalnya pemanfaatan skema permodalan (KUR, CSR, Produk perbankan) dalam Industri
- g. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam industri

31. Perdagangan

- a. Kondisi pasar tradisional yang ada sebagian besar masih merupakan pasar desa dengan kondisi bangunan, sarana usaha dan fasilitas umum yang kurang representatif.

- b. Belum optimalnya laboratorium dan peralatan standar kmetrologian dan laboratorium pengujian mutu barang dan standarisasi produk.
- c. Komoditi ekspor Sumatera Selatan pada umumnya masih berupa produk primer sehingga nilai tambah tidak diperoleh secara optimal.
- d. Umumnya ekspor Sumatera Selatan berdasarkan sistem kontrak sehingga sangat dipengaruhi oleh naik turunnya kurs valuta asing.
- e. Belum optimalnya sektor riil dalam menyerap KUR dan Kredit perbankan

32. Ketransmigrasian

- a. Tidak sebandingnya potensi calon lokal transmigrasi dengan ketersediaan lahan.
- b. Terisolirnya daerah transmigrasi dikarenakan sarana infrastruktur yang kurang memadai.
- c. Cadangan lahan transmigrasi kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Berbagai permasalahan berdasarkan prioritas pembangunan, sasaran pembangunan dan urusan pemerintahan daerah di formulasikan menjadi Isu Penting dan Masalah Mendesak Tingkat Nasional, Provinsi Sumatera Selatan dan Lingkungan Eksternal lainnya yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.73
Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional, Provinsi dan Lingkungan Eksternal Lainnya

No.	Isu Penting dan Masalah Mendesak			
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Lingkungan Eksternal Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketimpangan antara kondisi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketimpangan kondisi jalan mantap dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya lalu lintas kendaraan 	

No.	Isu Penting dan Masalah Mendesak			
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Lingkungan Eksternal Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	
	<p>jalan nasional dengan daerah yang berkontribusi pada kondisi waktu dan biaya logistik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angka Kekurangan Rumah (<i>Housing Backlog</i>) masih tinggi 	<p>infrastruktur lainnya yang menghubungkan antar wilayah, pusat pertanian, pusat pertambangan, pusat perdagangan dan objek wisata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya akses air bersih dan sanitasi • Belum terpenuhinya infrastruktur strategis di KEK 	dengan tonase tinggi pengangkut batubara dan kayu industri	
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Gini Rasio. • Masih tingginya jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa 	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan tingkat kemiskinan melambat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Turunnya harga komoditas pertanian unggulan di tingkat dunia (karet, kopi, kelapa sawit) 	
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi tidak menyerap tenaga kerja sesuai yang dibutuhkan. • Rendahnya kualitas pekerja menyebabkan produktivitas tenaga kerja rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi melambat • Belum tumbuhnya industri hilir berbasis hasil pertanian • Belum berkembangnya pusat-pusat inovasi produk hilirisasi • Belum berkembangnya kerjasama riset unggulan untuk hilirisasi • Belum beroperasinya 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan harga komoditas unggulan terhadap fluktuasi, pasar internasional. • Faktor globalisasi (Masyakat Ekonomi Asean, CAFTA) 	

No.	Isu Penting dan Masalah Mendesak			
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Lingkungan Eksternal Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	
	KEK Tanjung Api-Api			
4.	<ul style="list-style-type: none"> Kesenjangan Partisipasi Pendidikan. Kualitas Guru Rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya APK SMP dan SMA Belum meratanya distribusi guru di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Tantangan global di era MEA menuntut SDM berkualitas tinggi agar dapat bersaing 	
5.	<ul style="list-style-type: none"> AKI dan AKB masih tinggi. Balita <i>stunting</i> hampir terjadi diseluruh wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> AKI dan AKB masih tinggi Balita <i>stunting</i> hampir terjadi di seluruh wilayah Ketersediaan dan Kualitas tenaga kesehatan masih terbatas Distribusi SDM Kesehatan belum merata Masih rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan terutama bagi daerah terpencil dan perairan 	<ul style="list-style-type: none"> Faktor cuaca ekstrim berakibat pada penyakit musiman Meningkatnya polusi lingkungan 	
6.	<ul style="list-style-type: none"> Penyusutan lahan sawah mengancam produksi pangan. Jaringan irigasi dan waduk masih banyak yang perlu direhabilitasi 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pengelolaan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan Masih tingginya konversi lahan pertanian Jaringan irigasi masih 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan pertanian kurang memberikan nilai keekonomian dibandingkan dengan sektor lain Adanya impor bahan pangan menyebabkan 	

No.	Isu Penting dan Masalah Mendesak			
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Lingkungan Eksternal Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	
		banyak yang rusak	produk lokal kalah bersaing sehingga tidak memberikan ekonomi yang signifikan terhadap petani	
7.	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pengelolaan lingkungan dan penanggulangan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan DAS belum optimal, Tingginya kasus kebakaran hutan dan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> Cuaca ekstrem 	
8.	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas tata kelola pemerintahan belum memberikan kontribusi yang optimal dalam mendukung pembangunan dan peningkatan daya saing nasional 	<ul style="list-style-type: none"> Opini BPK masih WDP Masih rendahnya jumlah SKPD dengan status laporan kinerja baik Bertambahnya kewenangan provinsi sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya tuntutan penerapan <i>good and clean government</i> 	
9.	<ul style="list-style-type: none"> Masih tingginya ketimpangan wilayah. Ketimpangan persebaran penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> Konektivitas antar wilayah belum terintegrasi secara optimal Ketimpangan persebaran penduduk Perizinan usaha terkait 	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi geografis Pusat-pusat pertumbuhan belum merata 	

No.	Isu Penting dan Masalah Mendesak			
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Lingkungan Eksternal Lainnya	
	(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>daerah yang berbatasan kurang terkoordinasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama pembangunan daerah di wilayah perbatasan belum optimal • Pengendalian dan pemanfaatan ruang belum optimal 		
10.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketimpangan rasio elektrifikasi wilayah, Konsumsi dan Produksi listrik masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi Sumsel sebagai Lumbung Energi Nasional belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Harga minerales yang tergantung harga internasional yang sangat fluktuatif 	

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016

3.1.1. Analisis Perekonomian Global dan Nasional

Proses *rebalancing* ekonomi dunia mewarnai dinamika perkembangan ekonomi negara maju dan *emerging markets* (EM) pada tahun 2014. Divergensi respons kebijakan yang ditempuh oleh negara maju dan EM berdampak pada pemulihan ekonomi global yang tidak merata dan berlangsung lebih lambat dari perkiraan semula. Negara maju menempuh kebijakan yang lebih akomodatif guna mendorong pemulihan ekonominya, sedangkan kebijakan negara EM cenderung lebih beragam dalam rangka memperkuat fundamental ekonominya. Respons kebijakan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2014 yang relatif stabil dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 3,3 persen, namun lebih rendah dibandingkan perkiraan IMF sekitar 3,7 persen.

Didukung oleh kebijakan yang lebih longgar, pemulihan ekonomi negara maju semakin kuat, meskipun dampaknya tidak seragam bagi semua negara. Secara keseluruhan, perkembangan ini mendorong pertumbuhan ekonomi negara maju yang lebih tinggi menjadi 1,8 persen pada tahun 2014 dari 1,4 persen pada tahun 2013. Kebijakan akomodatif, baik moneter maupun fiskal, yang ditempuh oleh Amerika Serikat (AS) mampu mendorong perbaikan ekonomi AS, bahkan menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi global. Pemulihan ekonomi Amerika Serikat semakin solid dengan capaian pertumbuhan sebesar 2,4 persen sementara pemulihan Eropa masih melambat dengan nilai pertumbuhan 0,8 persen tahun 2014.

Disisi lain, ekonomi Jepang masih dalam resesi dengan nilai pertumbuhan 0,1 persen. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia, Jepang kini dalam fase resesi akibat krisis utang yang hampir mencapai 200 persen produk domestik bruto (PDB). Berikut data capaian pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2014:

Tabel 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2014

Negara	2013	2014	Prediksi	
			2015	2016
Dunia	3,3	3,3	3,5	3,7
Negara Maju	1,4	1,8	2,4	2,4
Amerika Serikat	2,2	2,4	3,6	3,3
Wilayah Eropa	-0,4	0,8	1,2	1,4
Jepang	1,6	0,1	0,6	0,8
Inggris	1,7	2,6	2,7	2,4
Negara Berkembang	4,7	4,4	4,3	4,7
China	7,7	7,4	6,8	6,3
India	5,0	5,8	6,3	6,5
Indonesia	5,8	5,1	5,2	5,5

Sumber : *World Bank*

Dibalik perbaikan ekonomi dunia yang berlangsung secara perlahan, ada beberapa tren berbeda yang memiliki berbagai implikasi terhadap pertumbuhan global. Aktivitas di Amerika Serikat dan Inggris mulai meraih momentum bersamaan dengan pasar tenaga kerja yang mulai membaik dan kebijakan moneter yang masih sangat akomodatif. Tapi belum ada perbaikan yang cukup berarti di Eropa dan Jepang, karena kerusakan akibat krisis ekonomi yang lalu. Di sisi lain, Cina kini sangat berhati-hati mengawal pelemahan pertumbuhan ekonominya, yakni sebesar 7,4 persen pada 2014, 6,8 persen dan 6,3 persen pada 2016.

Pemulihan ekonomi global yang masih terbatas tersebut berdampak pada perkembangan harga komoditas global yang masih terus menurun, meskipun dengan laju yang semakin melambat. Harga minyak dunia pada tahun 2014 turun 10,5 persen dibandingkan dengan tahun 2013. Penurunan ini antara lain tercermin pada pergerakan harga minyak Brent sebagai acuan minyak dunia.

Grafik 3.1. Perkembangan Harga Minyak Brent Tahun 2014



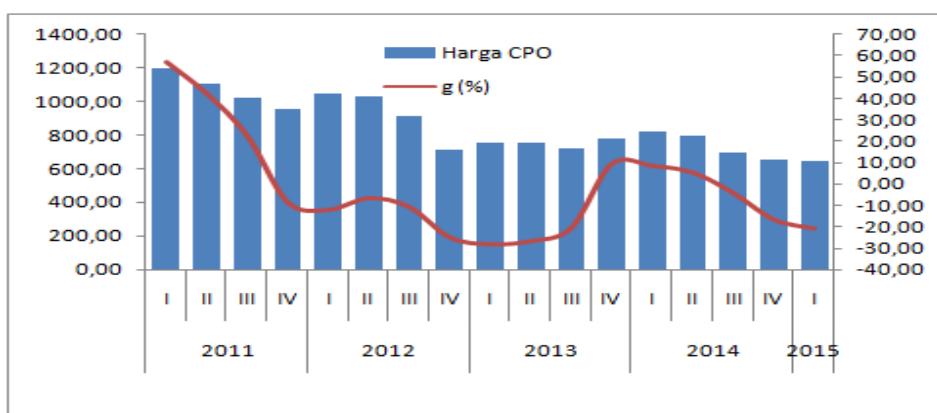
Sumber : Bloomberg

Realisasi harga minyak minas turun menjadi 99 dolar AS per barel dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 108,4 dolar AS per barel. Pada semester I 2014, harga minyak dunia masih berada dalam tren yang meningkat dipengaruhi oleh kenaikan permintaan akibat cuaca dingin ekstrim yang melanda AS dan pasokan yang menurun akibat tensi geopolitik di Rusia dan Ukraina serta Timur Tengah yang meningkat. Sejak awal semester II tahun 2014, harga minyak dunia mulai menurun dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Pertama, permintaan terhadap minyak dunia menurun terutama akibat perlambatan ekonomi Tiongkok dan Jepang, serta pemulihan ekonomi kawasan Eropa yang berjalan lambat. Kedua, pasokan minyak dunia meningkat dipengaruhi oleh produksi *shale oil* di AS yang meningkat dan kebijakan pelonggaran peraturan ekspor minyak oleh otoritas AS serta menurunnya tensi ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Penurunan harga minyak dunia semakin tajam setelah Organisasi Negara-Negara Eksportir Minyak (*Organization of the Petroleum Exporting Countries* /OPEC) pada bulan November 2014 memutuskan untuk mempertahankan level produksinya dalam rangka menjaga pangsa pasar sebagai produsen minyak dunia.

Pertumbuhan yang lemah ini disebabkan oleh rendahnya permintaan dan berkurangnya sensitivitas perdagangan dunia dalam merespon perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktivitas global. Perubahan dalam rantai nilai global (*global value chains*) dan perubahan komposisi permintaan impor bisa jadi telah berkontribusi pada rendahnya pertumbuhan perdagangan global. Jatuhnya harga minyak yang di luar kebiasaan pada paruh kedua tahun 2014 bisa mengurangi tekanan inflasi secara signifikan dan memperbaiki transaksi berjalan dan perimbangan fiskal di negara-negara berkembang pengimpor minyak. Pergerakan harga minyak dan perlambatan ekonomi global terus mendorong penurunan harga komoditas non migas. Berikut tren penurunan harga komoditas non migas :

Grafik 3.2. Tren Harga CPO 2011-2015

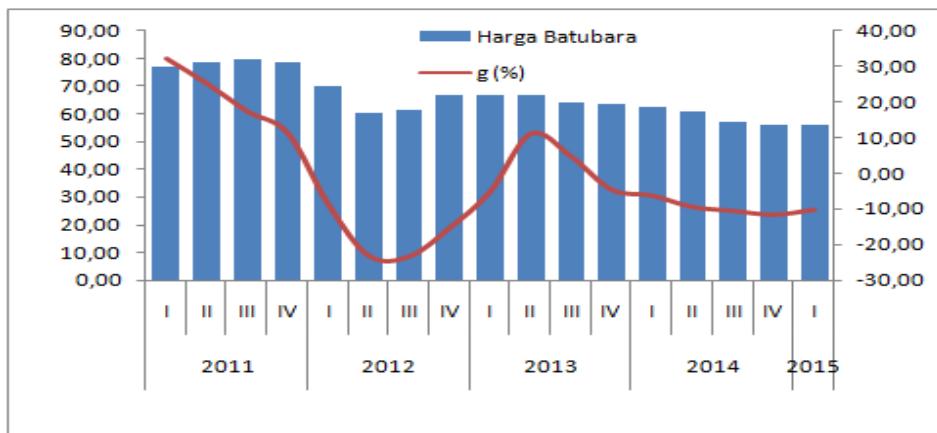


Sumber : Bloomberg

Tren harga CPO dunia mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2011 kisaran US \$ 1.200 per metrik ton dan menurun drastis hingga triwulan IV tahun 2012 menjadi kisaran US \$ 700 per metrik ton. Terus merangkak naik secara fluktuatif pada volatilitas yang cukup tinggi hingga tahun 2014 pada triwulan I sebesar US \$ 800 per metrik ton dan kembali mengalami penurunan hingga triwulan I tahun 2015 pada kisaran US \$ 700 per metrik ton.

Demikian pula pada tren harga batubara dunia mengalami penurunan dapat terlihat pada grafik berikut :

Grafik 3.3. Tren Harga Batubara 2011-2015

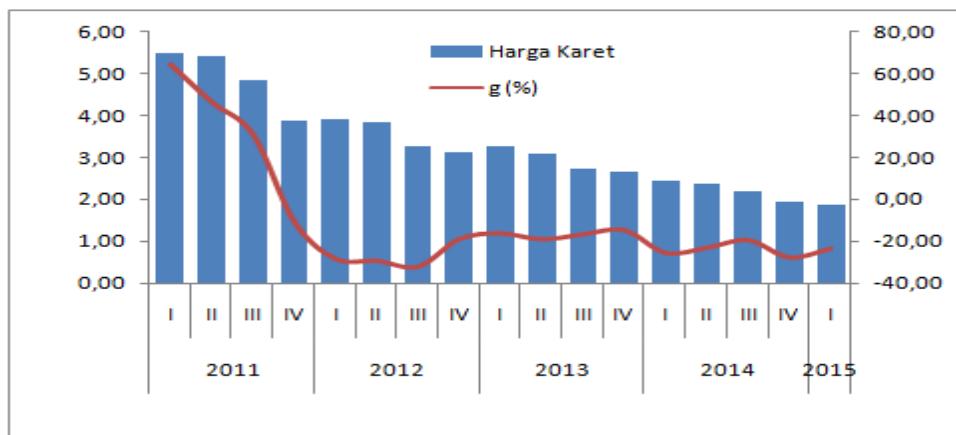


Sumber : Bloomberg

Tren harga batubara juga mengalami penurunan. Harga batubara tergelincir mengiringi penurunan permintaan dari China. Kondisi ekonomi Eropa yang belum menentu turut memperburuk kinerja batubara di pasar komoditas dunia. Sejak awal tahun 2011 harga batubara pada kisaran US \$ 70 – 85 per ton. Harga batubara bisa sedikit terangkat pada triwulan berikutnya oleh kabar Spanyol meminta dana talangan alias bailout senilai 100 miliar euro, dari Uni Eropa untuk mengamankan perbankannya. Tapi ternyata, hal itu masih tidak cukup meredakan kekhawatiran pasar.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara pengimpor terbesar batubara di Asia, seperti China, India dan Jepang, juga menggerus permintaan batubara. Permintaan batubara dari China melemah setelah berbagai industri mengurangi produksinya. Harga batubara jatuh pada triwulan II tahun 2012 hingga kisaran US\$ 60 per ton dan mulai merangkak naik pada tahun 2013 pada kisaran US \$ 70 – 75 per ton hingga awal tahun 2015.

Grafik. 3.4. Tren Harga Karet 2011-2015



Sumber : Bloomberg

Harga karet dunia juga terpengaruh oleh krisis ekonomi di Uni Eropa dan Amerika Serikat, hal ini tergambar dari tren penurunan harga karet dunia yang cukup signifikan. Harga karet dunia diawali kisaran US \$ 5 - 5,5 per kilogram pada triwulan I tahun 2011 berada di level tertinggi dan mulai merangkak menurun pada triwulan III pada kisaran US \$ 4,5 - 5 per kilogram. Pada tahun 2012 hingga tahun 2013 tren harga karet pada kisaran US \$ 2,5 - 3,5 per kilogram dan terus mengalami fluktuasi penurunan hingga triwulan I 2015 pada kisaran US\$ 1,5 - 2 per metrik ton.

Ada beberapa faktor yang dapat menjadi pendorong kenaikan harga. Antara lain suplai dan permintaan karet dunia, kenaikan harga minyak mentah, kebijakan pemerintah Thailand yang membeli harga karet petani di atas harga pasar, dan stok karet dunia yang menipis. Stok karet dunia saat ini turun menjadi 20 ribu ton dari 60 ribu ton. Pulihnya industri otomotif di Amerika Serikat juga mendorong kenaikan harga. Industri otomotif di Amerika Serikat mulai pulih meski permintaan karet dari Uni Eropa masih dalam tekanan resesi. Uni Eropa dan Amerika Serikat adalah konsumen utama karet dunia sehingga pelemahan ekonomi di wilayah itu akan mempengaruhi penurunan permintaan dan harga karet dunia.

Berdasarkan kondisi ekonomi dunia, risiko-risiko yang ada membuat proyeksi ke depan masih cenderung menurun, akibat empat faktor. Pertama adalah perdagangan global yang masih lemah. Kedua, kemungkinan guncangan pada pasar finansial seiring dengan naiknya suku bunga pada beberapa negara maju di waktu yang berbeda-beda. Ketiga adalah seberapa jauh harga minyak yang rendah menggoyang keseimbangan finansial negara-negara produsen minyak. Keempat, risiko dari periode stagnan atau deflasi di wilayah Eropa atau Jepang yang berlangsung lama.

World Bank memprediksikan pertumbuhan perekonomian dunia pada tahun 2016 sebesar 3,7 persen, hal ini juga senada dengan prediksi IMF masih menyatakan prospek buruk di Tiongkok, Rusia, kawasan Euro dan Jepang akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia hanya tumbuh sebesar 3,7 persen. Kondisi perekonomian global sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat pada kondisi ekonomi Nasional sepanjang tahun 2014 sebagaimana ditunjukkan melalui indikator makro ekonomi sebagai berikut :

Tabel 3.2. Sasaran Nasional RKP 2016

Indikator	Satuan	Capaian	Proyeksi Jangka Menengah					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pertumbuhan Ekonomi	%	5,1	5,7	6,6	7,1	7,5	8	
PDB Per Kapita tahun dasar 2010	Rp Ribu	43.403	47.804	52.686	58.489	64.721	72.217	
Inflasi	%	8,4	5,0	4,0	4,0	3,5	3,5	
Nilai Tukar Nominal	Rp/US\$	11.900	12.200	12.150	12.100	12.050	12.000	
Pertumbuhan Ekspor Non Migas	%	-1,0	8,0	9,9	11,9	13,7	14,3	
Pertumbuhan Impor Non Migas	%	-1,0	6,1	7,1	10,2	11,7	12,3	
Tingkat Pengangguran	%	5,9	5,6	5,2-5,5	5,0-5,3	4,6-5,1	4,0-5,0	
Tingkat Kemiskinan	%	10,96	10,3	9,0-10,0	8,5-9,5	7,5-8,5	7,0-8,0	

Sumber : RKP 2016

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 tercatat sebesar 5,1 persen, sedikit lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 yang sebesar 5,5 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 berada pada peringkat 39 dunia dari 144 negara. Kondisi ini tentunya terkait dengan kondisi global dan kondisi Nasional sendiri di mana besarnya defisit transaksi berjalan membuat baik kebijakan moneter dan fiskal sifatnya kebijakan yang ketat. Dengan kebijakan yang ketat, maka otomatis memang pertumbuhan akan terkendala, sehingga tidak mencapai apa yang diharapkan. Selain itu, tingkat inflasi tahun 2014 tercatat sebesar 8,4 persen, lebih tinggi dari asumsi APBN-P 2014 yang sebesar 5,3 persen. Hal ini terjadi karena APBN-P 2014 belum mengasumsikan adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

Sementara itu, realisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tercatat rata-rata sebesar Rp. 11.900/dolar AS, lebih tinggi dari angka yang ditetapkan dalam APBN-P 2014, sebesar Rp. 11.600/dolar AS. Harga minyak mentah Indonesia tercatat sebesar 97 dolar AS per barel, lebih rendah dari asumsi dalam APBN-P 2014, sebesar 105 dolar AS per barel. Untuk rata-rata *lifting* minyak mentah Indonesia, realisasinya mencapai 794 ribu barel per hari, lebih rendah dari target dalam APBN-P 2014 yang sebesar 818 ribu barel per hari. Sementara itu realisasi *lifting* gas mencapai target yang ditentukan dalam APBN-P yaitu 1.224 ribu barel setara minyak per hari.

Jika melihat kondisi pertumbuhan ekonomi dunia Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh berkisar antara 5,5 persen per tahun. Dengan pertimbangan tersebut, Pemerintah mentargetkan pertumbuhan ekonomi Nasional tahun 2016 menjadi antara kisaran 6,6 persen dikarenakan perlambatan ekonomi dunia yang diperkirakan masih akan berlanjut. Pencapaian pertumbuhan ekonomi tahun 2016 akan bertumpu pada aktivitas investasi khususnya pembangunan infrastruktur.

Sementara itu dari sisi daya saing berdasarkan data dari *The Global Competitiveness Report* dalam *World Economic Forum* (WEF) tahun 2014-2015 posisi Indonesia menempati peringkat 34 dari 144 negara, atau naik empat tingkat dari posisi sebelumnya 38 (tahun 2013-2014), dan posisi ke-50 pada 2012-2013. Kenaikan ranking indeks daya saing Indonesia pada periode ini karena perbaikan di beberapa kriteria seperti infrastruktur dan konektifitas, kualitas tata kelola sektor swasta dan publik, efisiensi pemerintahan, dan pemberantasan korupsi. WEF mengelompokkan Indonesia sebagai lima besar ekonomi ASEAN bersama Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam yang terus memperbaiki peringkat daya saing mereka sejak 2009.

The Global Competitiveness Report's didasarkan pada *Global Competitiveness Index* (GCI), mendefinisikan daya saing sebagai seperangkat institusi, kebijakan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat produktivitas suatu negara. Skor GCI dihitung berdasarkan 12 kategori yakni institusi atau lembaga, infrastruktur, makro ekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar, efisiensi tenaga kerja, pengembangan pasar keuangan, kesiapan teknologi, ukuran pasar, kecanggihan bisnis, dan inovasi. Dari dua belas kategori tersebut, total skor yang diraih Indonesia adalah 4,57, mengungguli sejumlah negara di Eropa seperti Spanyol (35), Portugal (36), dan Italia (49); negara-negara Timur Tengah seperti Kuwait (40), Bahrain (44), atau Oman (46); juga negara-negara Asia seperti Filipina (52), Vietnam (68), dan India (71). Berikut data Indeks Daya Saing Indonesia dari tahun 2008 hingga tahun 2014 :

Tabel 3.3. *Global Competitiveness Index Indonesia*

Tahun	GCI Overal Index	Skor
	Ranking/Jumlah Negara	
2008-2009	55/143	4,25
2009-2010	54/133	4,26
2010-2011	44/139	4,43
2011-2012	45/142	4,38
2012-2013	50/144	4,40
2013-2014	38/148	4,53

Sumber : *The Global Competitiveness Report*

Berdasarkan data dari *Global Competitiveness Report* menyatakan bahwa infrastruktur yang kurang memadai akan membebani biaya logistik bagi perusahaan. Sehingga pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan Nasional. Hal ini sudah sesuai dengan **arah kebijakan RKP Nasional tahun 2016 adalah mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meletakkan fondasi pembangunan yang berkualitas.**

Salah satu permasalahan utama yang menghambat percepatan realisasi investasi saat ini adalah keterbatasan infrastruktur termasuk pasokan listrik. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas. Pembangunan berkualitas adalah membangun untuk manusia dan masyarakat yang inklusif dan berbasis luas, dan tidak boleh memperlebar ketimpangan antar golongan dan antar wilayah. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Menghasilkan pertumbuhan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Infrastruktur diperlukan untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang memperhatikan pemerataan.

Jika ditinjau dari peran wilayah/pulau dalam pembentukan PDB Nasional maka dapat terlihat wilayah mana yang dapat mengungkit pertumbuhan PDB Nasional, sebagai berikut :

Tabel 3.4. Peran Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional 1978-2013

Pulau	1978	1983	1988	1993	1998	2003	2008	2013
Sumatera	27,6	28,7	24,9	22,8	22,0	22,4	22,9	23,8
Jawa	50,6	53,8	57,4	58,6	58,0	60,0	57,9	58,0
Kalimantan	10,2	8,7	8,9	9,2	9,9	8,9	10,4	8,7
Sulawesi	5,5	4,2	4,1	4,1	4,6	4,0	4,3	4,8
Bali dan Nusa Tenggara	3,1	2,8	3,0	3,3	2,9	2,8	2,5	2,5
Maluku dan Papua	2,9	1,8	1,7	2,0	2,5	1,8	2,0	2,2
Total	100,0							

Sumber : BPS

Berdasarkan data tren 35 tahun terakhir, wilayah Jawa masih menjadi kontributor pertama penyumbang PDB Nasional dan diiringi oleh wilayah Sumatera sebagai kontributor kedua sebesar 23,8 persen pada tahun 2013. Wilayah-wilayah lain seperti Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua memberikan kontribusi dibawah 10 persen. Pergeseran peran wilayah dalam pembentukan PDB Nasional masih relatif kecil atau bahkan tidak ada perubahan (stagnant).

Sehingga sesuai dengan sasaran pokok RPJMN 2015-2019 dalam sasaran dimensi kewilayahan dan antar wilayah diantaranya yang menjadi prioritas adalah pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa yaitu :

1. Percepatan industrialisasi/hilirisasi pengolahan Sumber Daya Alam : menciptakan nilai tambah, menciptakan kesempatan baru terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim dan pariwisata;
2. Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur;
3. Pengembangan SDM dan Iptek;
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
5. Pemberian insentif fiskal dan non fiskal.

Selain itu sasaran pembangunan dalam dimensi industri secara spesifik adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Perwilayahinan Industri di luar Pulau Jawa
2. Penumbuhan Populasi Industri dengan menambah paling tidak sekitar 9000 usaha
3. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai Ekspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja)

3.1.2. Kondisi Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 berdasarkan tahun dasar 2010 (*System National Accounts* 2008) tumbuh sebesar 4,68 persen (yoY). Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tahun 2014 berada pada peringkat ke 28 di Indonesia. Kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel 3.5. Perkembangan Ekonomi Makro Sumatera Selatan Tahun 2013-2014

Indikator	Satuan	RPJMD Tahun 2013		RPJMD Tahun 2014		Target RPJMD Tahun 2015	Capaian 2015 TW I	Target RPJMD Tahun 2016
		Target	Realisasi	Target	Realisasi			
Pertumbuhan Ekonomi	%	6	5,47	6	4,68	6	4,77	6,25
Inflasi	%	4	6	4	8,48	4	6,26	4
ICOR	%	3,50	4,79	3,50	4,05	3,50	Na	3,25
PDRB (ADHB)	Rp Triliun (Migas)	232,30	281,99	257,40	308,41	na	Na	na
PDRB (ADHK)	Rp Triliun (Migas)	77.994	226,93	82.674	243,23	87.634	Na	93.111
PDRB Per Kapita (ADHB)	Rp Juta	na	36,02	na	38,83	na	Na	na
Ekspor Non Migas	Juta US \$	2.722,10	3838,96	2.790,15	2.496,52	2.858,20	542,61	2.926,25
Impor Non Migas	Juta US \$	493,98	565,99	579,31	750,18	na	284,23	na
Nilai Investasi PMA	Rp M	9.050	14.824	9.955	7.650	10.950	Na	12.050
Nilai Investasi PMDN	Rp M	6.900	3.129	7.590	3.610	8.349	Na	9.184

Sumber : BPS Prov. Sumatera Selatan Tahun 2014, data Pertumbuhan sesuai dengan SNA 2008 (*System of National Accounts*)

Jika ditinjau dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan masih ditopang oleh konsumsi, eksport, dan investasi. Khusus untuk konsumsi, selain dari konsumsi rumah tangga, pertumbuhan juga disumbangkan oleh lembaga non profit rumah tangga yang tumbuh hingga 13,54 persen (yoY) seiring dengan pelaksanaan Pemilu 2014.

Namun seiring dengan masih rendahnya harga komoditas utama, berdampak pada penurunan pencapaian ekspor. Kondisi ini turut memberikan pengaruh negatif pada konsumsi Rumah Tangga.

Dari sisi penawaran, kinerja ekspor batu bara masih tumbuh positif dibandingkan tahun sebelumnya. Industri pengolahan sebagai salah satu kontributor utama perekonomian Sumatera Selatan tahun 2014 masih tumbuh cukup tinggi terutama ditopang dari industri makanan dan minuman yang tumbuh sejalan dengan meningkatnya subsektor akomodasi dan makan minum. Namun demikian kinerja pertanian di tahun 2014 yang mengalami penurunan akibat perlambatan kinerja subsektor perkebunan. Kualitas dan tata niaga karet belum membaik membuat beban di sektor ini cukup besar. Kondisi Inflasi Sumatera Selatan tahun 2014 sebesar 8,48 persen, dimana sumber gejolak inflasi diakibatkan oleh kurangnya pasokan beberapa komoditas pangan akibat anomali cuaca dan terganggunya distribusi dari sentra produksi, struktur pasar yang oligopolistik dan informasi harga yang belum optimal, kenaikan LPG, BBM bersubsidi, Tarif Dasar Listrik dan Penyesuaian Tarif Angkutan serta tekanan iniasi dari *imported inflation* akibat melemahnya nilai tukar rupiah.

Sementara kinerja ekspor Sumsel sebesar US \$ 3086,38 dimana komoditi karet masih menjadi kontributor terbesar ekspor Sumsel dengan nilai US \$. 1,83 Milyar atau setara dengan Rp. 22,8 Triliun (kurs th 2014 Rp. 12.667). Sedangkan komoditi batubara masih menduduki peringkat kedua dengan total niali US \$ 268,42 juta. Diikuti dengan komoditi kelapa sawit dengan total nilai eksport sebesar US \$ 122,96 juta. Disisi lain, nilai impor meningkat cukup signifikan dari tahun 2013 sebesar US \$ 565,99 menjadi US \$ 750,18. Peningkatan impor tersebut terutama didominasi oleh barang modal berupa mesin mekanis dan boiler untuk industri yang ada di Sumatera Selatan.

Nilai ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 sebesar 4,05 persen hal ini menunjukkan bahwa penambahan PDRB Rp 1,- membutuhkan investasi sebesar Rp. 4,05,-. Investasi ini akan mendorong permintaan barang modal dan penyerapan tenaga kerja baru untuk mengaktifkan peningkatan kapasitas pendapatan

dan selanjutnya akan meningkatkan permintaan sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yakni sektor minyak dan gas (migas), perkebunan dan industri pengolahan. Provinsi Sumatera Selatan memiliki keunggulan yang lebih dibanding provinsi lain, seperti letak yang strategis, potensi alam yang besar, dan gejolak buruh yang tidak terlalu besar, serta tingkat keamanan yang terkendali sarana dan prasarana pendukung. Berikut capaian kinerja sektoral penyumbang PDRB Provinsi Sumatera Selatan menurut lapangan usaha :

**Tabel 3.6. Capaian Sektor PDRB Provinsi Sumatera Selatan
Menurut Lapangan Usaha**

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku (Rp T)		Atas Dasar Harga Konstan (Rp T)		2014		
	2013	2014	2013	2014	Laju Pertumbuhan	Distribusi	Sumber Pertumbuhan
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	52,18	54,93	44,79	46,61	4,06	17,81	0,78
B. Pertambangan dan Penggalian	71,55	73,93	51,67	53,18	2,93	23,97	0,65
C. Industri Pengolahan	48,14	53,87	42,71	44,66	4,57	17,47	0,84
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,19	0,22	0,2	0,21	8,86	0,07	0,01
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,26	0,31	0,26	0,28	6,73	0,1	0,01
F. Konstruksi	35,54	41,06	27,21	28,37	4,29	13,32	0,5
G. Perdag. Besar&Eceran, Reparasi Mobil&Spd.Motor	25,21	27,8	22,67	23,68	4,45	9,01	0,43
H. Transportasi dan Pergudangan	4,99	5,81	4,09	4,38	7,18	1,88	0,13
I. Akomodasi dan Makan Minum	3,31	3,85	2,61	2,75	5,63	1,25	0,06
J. Informasi dan Komunikasi	6,71	7,41	6,82	7,38	8,16	2,4	0,24
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	7,25	7,89	6,16	6,4	3,96	2,56	0,1
L. Real Estate	6,76	7,95	6,41	6,87	7,26	2,58	0,2
M,N. Jasa Perusahaan	0,29	0,33	0,24	0,25	6,2	0,11	0,01
O. Adm. Pemerintahan,Pertahanan,Jaminan Sosial	9,05	10,81	7,24	7,73	6,7	3,5	0,21
P. Jasa Pendidikan	6,86	8,09	5,89	6,86	16,54	2,62	0,42
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1,62	1,86	1,5	1,64	9,48	0,6	0,06
R,S,T,U. Jasa Lainnya	2,08	2,26	1,9	1,96	3,1	0,73	0,03
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)	282	308,41	232,35	243,23	4,68	100	4,68

Sumber : BPS Prov. Sumatera Selatan Tahun 2014 sesuai dengan SNA 2008 (*System of National Accounts*)

Dilihat secara keseluruhan, ke tujuh belas sektor menurut lapangan usaha mengalami peningkatan pertumbuhan positif dari tahun 2013 ke tahun 2014. Tiga sektor utama penyumbang PDRB (AHB) Sumsel tertinggi, yang pertama yaitu sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 73,39 T dengan kontribusi subsektor pertambangan minyak dan gas bumi sebesar Rp. 38,42 T dan kontribusi subsektor pertambangan batubara dan lignit sebesar Rp. 18,94 T. Namun meskipun sektor ini meningkat namun laju pertumbuhannya tidak terlalu signifikan yaitu sebesar 2,93 persen. Sektor kedua penyumbang PDRB (ADHB) tertinggi tahun 2014 yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp. 54,93 T dengan laju pertumbuhan sebesar 4,06 persen. Kontribusi pada sektor ini ada pada subsektor Perkebunan Tahunan sebesar Rp 22,15 T dan subsektor Perikanan sebesar Rp. 10,33 T. Sektor ketiga penyumbang PDRB (ADHB) tertinggi yaitu Industri Pengolahan sebesar Rp. 53,87 T dengan kontribusi tertinggi pada subsektor Industri Makanan dan Minuman sebesar Rp. 18,73 T dan subsektor Industri Batubara dan Pengolahan Migas sebesar Rp. 14,61 T. Laju pertumbuhan Industri Pengolahan pada tahun 2014 sebesar 4,57 persen.

Adapun jika ditinjau dari pertumbuhannya, sektor Jasa Pendidikan dan sektor Pengadaan Listrik dan Gas menjadi sektor yang tumbuh cukup signifikan dimana sektor Jasa Pendidikan dengan laju 16,54 persen dan sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,86 persen. Sehingga program-program pembangunan juga selayaknya diarahkan pada sektor dengan laju pertumbuhan yang tinggi untuk membantu menopang pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan.

Untuk perkembangan ekonomi makro hingga Triwulan I tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan sebesar 4,77 persen lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi tahun 2014. Secara triwulanan, PDRB Sumatera Selatan pada Triwulan I tahun 2015 meningkat sebesar 0,56 persen yang didorong oleh peningkatan ekspor yang diiringi oleh turunnya impor (net ekspor).

Dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi masih ditopang oleh pertumbuhan tiga sektor utama yaitu sektor pertambangan, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Dengan sumbangan andil sebesar 1,46 persen sektor pertambangan memberikan andil terbesar pada pertumbuhan ekonomi. Sedangkan tiga sektor utama lainnya yang memberikan sumbangan terbesar berturut-turut adalah sektor industri pengolahan sebesar 0,70 persen, sektor pertanian sebesar 0,58 persen, dan sektor perdagangan sebesar 0,56 persen. Secara agregat andil yang diberikan oleh empat sektor utama tersebut sebesar 3,29 persen.

Adapun jika ditinjau dari pertumbuhan sektor Pengadaan Listrik dan Gas dan sektor Jasa Pendidikan menjadi sektor yang tumbuh di atas 20 persen. Dua sektor selanjutnya mengalami peningkatan diantaranya sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 15,3 persen, serta sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,1 persen. Secara agregat, keempat sektor tersebut memberikan andil sebear 0,90 persen. Berikut perkembangan pertumbuhan PDRB sektoral tahun 2015 triwulan I :

Tabel 3.7. Pertumbuhan PDRB Sektoral Tahun 2015 Triwulan I

Indikator	Pertumbuhan PDRB Sektoral Tahun 2015 Triwulan I	Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral Tahun 2105 Triwulan I
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,28	1,95
Pertambangan dan Penggalian	6,42	2,11
Industri Pengolahan	3,74	0,86
Pengadaan Listrik, Gas	26,05	2,63
Pengadaan Air	6,44	4,31
Konstruksi	-3,36	-5,96
Perdagangan Besar, Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,81	-1,24
Transportasi dan Pergudangan	11,09	1,49
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,31	1,97
Informasi dan Komunikasi	8,40	1,83
Jasa Keuangan	4,39	0,74
Real Estate	6,17	2,91
Jasa Perusahaan	4,12	1,12
Jaminan Sosial Wajib	8,28	2,13
Jasa Pendidikan	20,68	2,11
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15,25	6,11
Jasa Lainnya	9,06	1,42
PDRB Sektoral	4,77	0,56

Sumber : BPS

Sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 6,42 persen, subsektor batubara tumbuh positif yang menyumbang pertumbuhan pada sektor ini. Produksi batubara Sumatera Selatan pada Triwulan I tahun 2015 mencapai 4,5 juta ton atau meningkat sebesar 49,06 persen. Sementara itu sektor pertanian tumbuh sebesar 3,28 persen yang didorong oleh pertumbuhan kinerja subsektor perkebunan tahunan yaitu komoditas kelapa sawit. Kinerja sektor industri pengolahan sebesar 3,74 didorong oleh kinerja industri makanan dan minuman serta industri kimia, khususnya pupuk.

Hampir seluruh sektor perekonomian mengalami pertumbuhan positif kecuali sektor Konstruksi dan Sektor Perdagangan yang tumbuh negatif masing-masing sebesar -5,96 persen dan -1,24 persen. Pelemahan sektor konstruksi dipicu oleh belum dimulainya siklus belanja infrastruktur Pemerintah pada Triwulan I tahun 2015. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,11 persen.

Tabel 3.8. Perkembangan Nilai Ekspor Komoditas Utama Provinsi Sumatera Selatan (Juta USD)

Komoditas	2013				2014				2015
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Batubara	39,76	40,84	62,88	58,09	66,39	71,22	67,04	65,44	76,87
Karet	663,54	709,53	604,01	612,18	570,68	477,51	426,74	354,84	336,12
CPO	80,46	34,67	17,64	72,46	15,03	16,73	26,06	81,31	68,36
Kopi	1,06	2,75	4,08	1,61	1,39	1,30	3,46	1,50	0,97
Lain-lain	59,15	55,93	35,77	62,57	49,55	56,97	60,84	80,02	60,29
Total Ekspor	843,97	843,73	724,39	806,91	703,04	623,73	584,14	583,11	542,61

Sumber : Bank Indonesia

Dari sisi volume, ekspor Sumsel mengalami peningkatan dari 20,53 persen menjadi 25,98 persen yang terutama didominasi oleh komoditas batubara yang porsinya mencapai 75 persen atau sebesar 1.550 juta ton. Selain itu ekspor komoditas karet terus mengalami peningkatan sebesar US\$ 336,12 juta.

Sementara itu, nilai impor nonmigas naik secara tahunan. Nilai impor nonmigas pada triwulan IV 2014 tercatat sebesar USD 284,45 juta, naik signifikan 95,5 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD 145,49 juta. Secara triwulanan, nilai impor melambat sebesar 17,9 persen dari sebesar USD 241,28 juta. Peningkatan nilai impor banyak dikontribusikan oleh peningkatan pembelian mesin industri.

Tabel 3.9. Perkembangan Nilai Impor Komoditas Utama Provinsi Sumatera Selatan (Juta USD)

Komoditas	2013				2014				2015
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Peralatan Elektrik	6,93	11,47	18,52	5,31	5,13	2,96	13,77	18,56	8,72
Besi dan Baja	2,66	2,69	3,75	3,66	3,25	14,29	8,97	6,09	8,49
Peralatan Industri	30,67	19,58	33,16	11,28	13,25	28,69	83,15	94,77	98,76
Pupuk	15,65	14,67	16,17	9,73	10,46	12,83	24,26	19,20	18,99
Gandum	1,40	1,26	0,12	1,58	0,25	1,62	1,37	7,32	1,22
Peralatan Khusus Industri	9,56	6,98	6,58	21,60	10,96	5,94	11,57	10,83	17,30
Lainnya	76,95	75,19	66,85	92,32	42,41	72,3	98,19	127,67	130,76
Total	134,82	131,83	145,15	145,49	85,71	138,64	241,28	284,45	284,23

Sumber : Bank Indonesia

Sementara itu volume impor pada triwulan I 2015 tercatat 338,94 juta ton atau naik signifikan sebesar 143,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, volume impor tercatat mengalami penurunan sebesar -2,04 persen. Peningkatan signifikan ini terjadi akibat meningkatnya impor gandum dan peralatan elektrik yang masing-masing tumbuh sebesar 326,91 persen dan 267,86 persen.

Selain itu jika dilihat dari perkembangan laju inflasi triwulan I tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 3.10. Perkembangan Inflasi Triwulan I Tahun 2015

Indikator	Inflasi Tahun 2014	Inflasi Trwiulan I Tahun 2015
Bahan Makanan	10,50	3,38
Makanan Jadi	7,36	9,54
Perumahan	7,00	7,92
Sandang	4,28	5,05
Kesehatan	5,84	7,08
Pendidikan	2,19	2,03
Transportasi	13,50	7,14
Total Inflasi	8,48	6,26

Sumber : BPS

Sementara itu dari sisi tingkat inflasi di Triwulan I tahun 2015, turunnya harga BBM sebesar 22 persen diawal tahun 2015 berdampak besar pada tingkat inflasi Sumatera Selatan dengan kinerja sebesar 6,26 persen jauh menurun jika dibandingkan tahun 2014 sebesar 8,48 persen. Capaian inflasi Sumsel dibawah Nasional sebesar 6,38 persen. Inflasi sumsel berada pada peringkat keenam dari Provinsi di Sumatera dengan capaian inflasi terendah. Inflasi kelompok *administered prices* dan *volatiled food* turun pada triwulan I tahun 2015, akibat dari penurunan harga BBM dan turunnya tarif angkutan yang berdampak pada penurunan harga bahan pangan.

Sementara itu perkembangan indeks rasio gini Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2008 hingga tahun 2013 dikisaran 0,30 – 0,40, dan selalu berada di bawah indeks rasio gini Nasional. Seperti pada tahun 2013 indeks rasio gini Nasional sebesar 0,41 sementara indeks rasio gini Provinsi Sumatera Selatan 0,38. Penerapan indeks rasio gini ini untuk mengidentifikasi distribusi pendapatan di suatu wilayah, Provinsi Sumsel berada di kisaran indeks < 0,40 masih dalam kategori *middle* dimana masih ada beberapa ketidakmerataan dalam pendapatan masyarakat, namun tidak cukup besar, karena angka tertinggi adalah > 0,40. Posisi peringkat indeks rasio gini Provinsi Sumatera Selatan adalah peringkat 18 Nasional dari 33 Provinsi di Indonesia. Namun demikian perlu perhatian

khusus untuk meningkatkan investasi yang bersifat *Labor Intensive* (Padat Karya) dan membuat rencana kependudukan.

Tabel 3.11. Indeks Rasio Gini Provinsi Sumatera Selatan terhadap Nasional Tahun 2008-2013

Tahun	Indeks Rasio Gini Nasional	Indeks Rasio Gini Provinsi Sumatera Selatan
2008	0,35	0,30
2009	0,37	0,31
2010	0,38	0,34
2011	0,41	0,34
2012	0,41	0,40
2013	0,41	0,38

Sumber : BPS

Jika ditinjau dari kontribusi pada pertumbuhan ekonomi dari masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, dapat tergambar dari data berikut :

Tabel 3.12. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi				
	2009	2010	2011	2012	2013
OKU	4,22	5,10	6,17	7,32	6,28
OKI	5,08	5,96	6,90	4,87	4,98
Muara Enim	4,73	5,20	5,31	5,42	4,98
Lahat	5,40	5,99	6,47	6,01	5,58
Musi Rawas	4,85	5,30	6,00	5,54	5,89
Musi Banyuasin	2,80	3,01	3,28	3,62	4,21
Banyuasin	5,47	6,10	6,13	6,19	6,18
OKU Selatan	6,06	6,09	6,79	6,51	5,99
OKU Timur	5,26	5,87	6,48	7,08	6,82
Ogan Ilir	5,29	5,98	6,68	6,91	5,24
Empat Lawang	5,34	5,76	6,07	6,03	5,81
Palembang	5,60	6,64	9,71	8,86	8,14
Prabumulih	4,24	5,47	5,39	5,60	5,41
Pagar Alam	4,17	4,95	5,32	6,17	5,87
Lubuk Linggau	6,27	6,37	6,40	6,52	6,41
Pali	Na	Na	Na	Na	Na
Muratara	Na	Na	Na	Na	Na
Sumsel	4,11	5,53	6,36	6,75	5,47
Nasional	4,63	6,38	6,17	6,03	5,58

Sumber : BPS (Data tersedia masih dalam angka tahun dasar 2000)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota masih menggunakan data dengan standar angka tahun dasar 2000, dimana pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kota Palembang sebesar 8,14 persen tahun 2013, diiringi Kabupaten OKU Timur sebesar 6,82 persen, Kota Lubuk Linggau sebesar 6,41 persen, Kabupaten OKU sebesar 6,28 persen, Kabupaten Banyuasin sebesar 6,18 persen, Kabupaten OKU Selatan sebesar 5,99 persen, Kabupaten Musi Rawas sebesar 5,89 persen, Kota Pagar Alam sebesar 5,87 persen, Kabupaten Empat Lawang sebesar 5,81 persen, Kabupaten Lahat sebesar 5,58 persen, Kabupaten Ogan Ilir sebesar 5,42 persen, Kota Prabumulih sebesar 5,41 persen. Selanjutnya Kabupaten/Kota lainnya berada dibawah angka 4 persen, dan dua Kabupaten/Kota yang masih belum memiliki angka pertumbuhan sendiri yaitu Kabupaten Pali dan Muaratara karena merupakan pecahan dari Kabupaten Lahat dan Kabupaten Musi Rawas.

Tabel 3.13. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(01) Ogan Komering Ulu	38,6 (14,64)	35,1 (13,17)	39,9 (12,28)	38,3 (11,58)	37,6 (11,19)	42,0 (12,31)
(02) Ogan Komering Ilir	122,7 (17,67)	114,2 (16,17)	116,5 (15,98)	111,9 (15,06)	109,9 (14,54)	121,4 (15,82)
(03) Muara Enim	118,4 (17,98)	106,4 (15,96)	104,4 (14,51)	100,4 (13,71)	98,6 (13,21)	108,2 (14,26)
(04) Lahat	78,7 (23,21)	71,3 (20,98)	70,5 (19,02)	67,7 (17,92)	66,6 (17,46)	71,8 (18,61)
(05) Musi Rawas	120,7 (24,27)	108 (21,40)	102,0 (19,38)	98,0 (18,25)	96,4 (17,67)	98,8 (17,85)
(06) Musi Banyuasin	129,5 (25,45)	118,9 (22,76)	113,4 (20,06)	108,9 (18,99)	107,0 (18,29)	107,2 (18,02)
(07) Banyuasin	122,4 (15,38)	112,1 (13,72)	93,0 (12,39)	89,3 (11,66)	87,9 (11,27)	97,1 (12,28)
(08) OKU Selatan	47,7 (14,56)	42,1 (12,73)	36,7 (11,53)	35,3 (10,84)	34,7 (10,49)	38,9 (11,57)
(09) OKU Timur	69,6 (12,12)	57,7 (9,95)	59,9 (9,81)	57,5 (9,23)	56,5 (8,98)	65,4 (10,28)
(10) Ogan Ilir	67,1 (17,78)	60,1 (15,65)	53,3 (13,97)	51,3 (13,18)	50,4 (13,37)	55,4 (13,86)
(11) Empat Lawang	39,1 (18,37)	33,7 (15,80)	32,5 (14,74)	31,3 (13,82)	30,6 (13,37)	30,5 (13,10)
(12) Palembang	235,3 (16,66)	211,8 (14,75)	218,5 (15,00)	210,0 (12,19)	206,5 (13,59)	206,0 (13,36)
(13) Prabumulih	20,9 (15,39)	19,1 (13,93)	21,0 (12,93)	20,2 (12,19)	19,9 (11,71)	19,4 (11,23)
(14) Pagaralam	11,8 (10,23)	11,2 (9,66)	12,4 (9,81)	11,9 (9,24)	11,7 (9,00)	11,8 (9,00)
(15) Lubuklinggau	31,8 (17,36)	28,1 (15,12)	30,9 (15,30)	29,7 (14,43)	29,2 (13,89)	30,7 (14,37)
Sumatera Selatan	1.254,3 (17,67)	1.130,0 (15,68)	1.105,0 (14,80)	1.061,9 (13,95)	1.043,6 (13,48)	1.104,6 (14,06)

Catatan :

- 1) Jumlah Penduduk Miskin dalam ribu jiwa
- 2) Angka dalam Kurung menunjukkan persentase

Sumber : BPS

Berdasarkan data, pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin adalah sebanyak 1.254.300 jiwa. Dalam dua tahun berikutnya angka kemiskinan memiliki trend yang menurun di mana pada tahun 2010 angka kemiskinan menjadi 1.105.430 jiwa atau sebesar 14,80 persen. Pada tahun 2011 penduduk miskin di Sumatera Selatan berjumlah 1.061.870 jiwa atau sebesar 13,95 persen. Pada tahun 2012 tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan mengalami penurunan yaitu menjadi

1.043.600 jiwa atau sekitar 13,48 persen. Tingkat kemiskinan tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2013 yaitu menjadi 1.104.600 jiwa atau sekitar 14,06 persen.

Memperbandingkan angka kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, akan terlihat bahwa persentase penduduk miskin tertinggi tahun 2013 diperlihatkan di Kabupaten Lahat mencapai 18,61 persen, Kabupaten Musi Banyuasin (18,02 persen) dan Kabupaten Musi Rawas (17,85 persen). Sedangkan persentase penduduk miskin terendah dijumpai di Kota Pagaralam (9,00 persen), Kabupaten OKU Timur (10,28 persen) dan Kota Prabumulih (11,23 persen). Namun demikian secara absolut jumlah penduduk miskin terbanyak di Sumatera Selatan berada di Kota Palembang (206,0 ribu jiwa), disusul oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir (121,4 ribu jiwa), Kabupaten Muara Enim (108,2 ribu jiwa), Kabupaten Musi Banyuasin (107,2 ribu jiwa) dan Kabupaten Musi Rawas (98,8 ribu jiwa).

Tabel 3.14. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka				
	2009	2010	2011	2012	2013
	Agustus	Agustus	Agustus		
OKU	7,29	5,46	4,96	5,40	3,79
OKI	7,04	7,46	4,68	10,95	4,58
Muara Enim	5,40	5,61	5,22	4,59	4,23
Lahat	4,44	2,50	4,67	4,46	3,76
Musi Rawas	2,64	2,40	3,87	1,78	0,92
Musi Banyuasin	6,79	5,99	4,46	3,47	3,19
Banyuasin	5,11	4,16	5,57	5,17	6,49
OKU Selatan	3,56	3,99	3,31	2,81	2,33
OKU Timur	5,51	3,68	4,05	2,62	4,09
Ogan Ilir	2,87	3,03	5,15	3,09	3,47
Empat Lawang	7,32	5,36	3,99	2,54	4,53
Palembang	15,78	13,97	10,05	10,06	9,15
Prabumulih	11,47	9,81	7,41	8,83	5,36
Pagar Alam	11,37	9,76	6,02	3,91	7,04
Lubuk Linggau	11,24	9,38	7,4	6,85	7,17
Pali	na	Na	na	na	Na
Muratara	na	Na	na	na	Na
Sumsel	7,61	6,65	5,77	5,70	5,00
Nasional	8,14	7,41	6,80	6,32	5,92

Sumber : BPS

Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumatera Selatan mempunyai ciri bahwa TPT di daerah pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Diduga, didaerah pedesaan karena didominasi oleh sektor pertanian, penyerapan tenaga kerja relatif tinggi. Penduduk usia kerja mudah dapat bekerja di sektor pertanian meskipun sebagai pekerja keluarga atau pekerja bebas (buruh tani). Sebaliknya di daerah perkotaan, lapangan pekerjaan formal lebih selektif dalam menerima tenaga kerja khususnya dengan tingkat pendidikan yang dipersyaratkan. TPT Sumsel sebesar 5,00 persen masih lebih rendah dari TPT Nasional sebesar 5,92 persen. Sementara itu jika dirinci TPT Kabupaten/Kota, terlihat bahwa TPT tertinggi di perkotaan seperti Kota Palembang sebesar 9,15 tahun 2013 diiringi Kota Lubuk Linggau sebesar 7,17 persen dan Kota Pagar Alam sebesar 7,04 persen. Sementara TPT terendah berada di Kabupaten Musi Rawas sebesar 0,92 persen.

Dari data Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kota maka dapat dihitung sensitivitas antara PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan dan antara PDRB terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka dengan cara menghitung elastisitas antara PDRB dengan Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2009 dengan rumus elastisitas sederhana (Tri Wibowo, Analisis pertumbuhan, Penyerapan Tenaga Kerja dan Kemiskinan Provinsi Sumsel, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan) sebagai berikut :

$$E_{\text{kemiskinan/PDRB}} = \frac{\Delta \text{Kemiskinan}/\text{Kemiskinan Tahun (n)}}{\Delta \text{PDRB}/\text{PDRB Tahun (n)}}$$

$$E_{\text{Pengangguran Terbuka/PDRB}} = \frac{\Delta \text{TPT}/\text{TPT Tahun (n)}}{\Delta \text{PDRB}/\text{PDRB Tahun (n)}}$$

Setelah pengolahan data maka didapatkan hasil sebagai berikut :

"Dengan peningkatan PDRB sebesar 1 persen maka akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,1 persen dan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,018 persen".

Tabel 3.15. Elastisitas Kemiskinan/PDRB dan Elastisitas Pengangguran Terbuka/PDRB

Kabupaten/Kota	Elastisitas kemiskinan/PDRB	Elastisitas Pengangguran Terbuka/PDRB
OKU	-0,008	-0,1
OKI	0,019	0,3
Muara Enim	-0,090	-0,2
Lahat	-0,116	-0,2
Musi Rawas	-0,033	-0,1
Musi Banyuasin	-0,053	-0,1
Banyuasin	-0,027	0,1
OKU Selatan	0,215	0,8
OKU Timur	0,004	0,031
Ogan Ilir	0,432	-0,8
Empat Lawang	-0,068	-0,2
Palembang	-0,007	0,030
Prabumulih	-0,039	-0,1
Pagar Alam	-0,010	-0,1
Lubuk Linggau	-0,057	-0,4
Pali	Na	Na
Muratara	Na	Na
Sumsel	-0,018	-0,1
Nasional	-0,043	-0,1

Sumber : Data BPS diolah
Ket : Tanda Negatif di abaikan

Pada Kabupaten/Kota untuk sensitivitas pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran yang tertinggi adalah pada Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir, dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen akan mengurangi pengangguran di Kabupaten OKU Selatan dan Ogan Ilir sebesar 0,8 persen. Sedangkan yang terendah adalah pada kota Palembang dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen akan mengurangi pengangguran sebesar 0,30 persen diikuti oleh kabupaten OKU Timur sebesar 0,31 persen. Sedangkan sensitivitas pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan yang terbesar adalah pada Kabupaten Ogan Ilir, dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen akan mengurangi kemiskinan sebesar 0,432 persen di Kabupaten Ogan Ilir dan yang terkecil adalah Kabupaten OKU Timur, dengan peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1 persen akan mengurangi pengangguran sebesar 0,004 persen di Kabupaten OKU Timur.

3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Berdasarkan pergerakan ekonomi global dan nasional serta data terakhir perekonomian Sumatera Selatan hingga triwulan I tahun 2015, maka perekonomian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 diprediksi akan mengalami peningkatan pada kisaran 6 - 6,25 persen dengan asumsi peningkatan kinerja investasi pada tahun 2016 sebesar 6,37 - 14,04 persen setara dengan nilai investasi sebesar Rp. 70,95 Triliun. Pembangunan proyek-proyek infrastruktur strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama pemerintah Pusat akan mendongkrak pertumbuhan secara signifikan diantaranya proyek pembangunan jalan tol Sumatera, proyek pembangunan infrastruktur perhubungan dan pertanian serta pembangunan proyek strategis untuk mendukung ASIAN GAMES 2018. Selain itu pengalihan pengurangan subsidi BBM oleh Pemerintah Pusat kepada sektor produktif juga akan meningkatkan investasi Pemerintah yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan konsumsi rumah tangga. Dengan pangsa pasar yang besar, konsumsi rumah tangga diperkirakan masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 bersama dengan komponen investasi.

Berikut prediksi ekonomi makro Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 berdasarkan exersice Bappeda, BI dan BPS :

Tabel 3.16. Prediksi Ekonomi Makro di Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	2016	
			Target RPJMD	Prediksi
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,25	6,00 – 6,25
2	PDRB dengan migas (ADHB)	Rp T	-	392,91
3	PDRB dengan migas (ADHK)	Rp T	265,85	274,26
4	Inflasi	%	4,00	4,00 – 5,00
5	ICOR	%	-	4,40
6	Investasi	%	10	6,37 – 14,04
7	Nilai Investasi	Rp T	21,19	70,951
8	Tingkat Kemiskinan	%	12,75	12,50 – 12,75
9	Tingkat Pengangguran	%	3,63	3,00 – 4,00

Sumber : Exercise Bappeda, BI dan BPS

Dengan memperhitungkan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 dan juga fluktuasi harga berbagai komoditas, tingkat inflasi pada tahun 2016 diperkirakan akan berada pada kisaran angka 4 - 5 persen. Tingkat inflasi ini akan relatif stabil jika dibanding dengan target inflasi tahun 2015 sebesar 4 persen, karena aksesibilitas arus barang dan jasa meningkat seiring dengan pembangunan beberapa infrastruktur strategis.

Dari sisi eksternal, pertumbuhan ekonomi negara tujuan ekspor pada tahun 2016 masih tumbuh melambat, meskipun pemulihan ekonomi Amerika Serikat semakin solid, namun ekonomi negara-negara maju lainnya masih mengalami perlambatan seperti Uni Eropa dan Jepang akibat masih melemahnya investasi dan tingginya hutang swasta serta pemerintah sebagai warisan dari periode krisis global. Selain itu pertumbuhan ekonomi Tiongkok diprediksikan juga masih cenderung menurun. Berikut proyeksi proporsi ekspor Sumatera Selatan serta pertumbuhan ekonomi negara tujuan ekspor tahun 2014-2015 sebagai berikut :

Tabel 3.17. Proporsi Ekspor Sumatera Selatan, Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara Tujuan Ekspor Tahun 2014-2015 (%)

Negara	Ekspor Sumsel (%)	Proyeksi Ekspor (%)	
		2015	2016
Amerika Serikat	20	3,1	3,1
China	12,2	6,8	6,3
Eropa	15,7	1,5	1,6
Jepang	9,4	1	1,2
India	9,7	7,5	7,5
Negara Maju	-	2,4	2,4
Negara Berkembang	-	4,3	4,7
Dunia	-	3,5	3,8

Sumber : IMF

Meskipun ekspor diprediksi tumbuh, namun peningkatan kualitas produk menjadi tantangan bagi Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu diversifikasi produk juga menjadi salah satu pilihan agar tidak terkena dampak fluktuasi harga komoditas khususnya komoditas karet. Selain itu Peraturan Pemerintah Daerah terkait program bahan olahan karet (bokar) bersih perlu

dioptimalkan secara konsisten, yang diharapkan kualitas karet menjadi lebih baik lagi dan mampu mendorong nilai tambah komoditas karet.

Dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi Sumsel diprediksi masih bertumpu pada sektor pertambangan dan penggalian, pertanian, kehutanan dan perikanan serta industri pengolahan. Berikut prediksi pertumbuhan PDRB sektoral dari masing-masing lapangan usaha tahun 2015-2016 :

Tabel 3.18. Prediksi Pertumbuhan PDRB Sektoral Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2016

Lapangan Usaha	Proyeksi 2015					Proyeksi 2016				
	ADHB (Triliun Rupiah)	ADHK (Triliun Rupiah)	Laju Pertumbuhan (%)	Distribusi (%)	Sumber Pertumbuhan (%)	ADHB (Triliun Rupiah)	ADHK (Triliun Rupiah)	Laju Pertumbuhan (%)	Distribusi (%)	Sumber Pertumbuhan (%)
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	60,32	49,07	5,27	17,35	1,01	66,28	51,67	5,3	16,87	1,01
B. Pertambangan dan Penggalian	84	55,72	4,77	24,17	1,04	95,65	58,53	5,05	24,34	1,09
C. Industri Pengolahan	59,75	47,11	5,49	17,19	1,01	66,46	49,77	5,65	16,92	1,03
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,25	0,23	8,9	0,07	0,01	0,28	0,25	8,91	0,07	0,01
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,33	0,29	4,88	0,1	0,01	0,36	0,3	4,88	0,09	0,01
F. Konstruksi	48,83	30,77	8,43	14,05	0,98	58,09	33,36	8,43	14,78	1,01
G. Perdag. Besar&Eceran, Reparasi Mobil & Spd.Motor	30,85	25,25	6,65	8,88	0,65	34,24	26,93	6,67	8,71	0,65
H. Transportasi dan Pergudangan	6,74	4,72	7,65	1,94	0,14	7,82	5,08	7,67	1,99	0,14
I. Akomodasi dan Makan Minum	4,47	2,94	6,67	1,29	0,08	5,19	3,13	6,68	1,32	0,08
J. Informasi dan Komunikasi	7,97	7,93	7,45	2,29	0,23	8,57	8,52	7,45	2,18	0,23
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	9,13	7,03	9,78	2,63	0,26	10,59	7,71	9,8	2,7	0,27
L. Real Estate	8,97	7,47	8,74	2,58	0,25	10,11	8,13	8,74	2,57	0,25
M,N. Jasa Perusahaan	0,38	0,27	8,67	0,11	0,01	0,44	0,3	8,67	0,11	0,01
O. Adm. Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial	12,14	7,98	3,33	3,49	0,11	13,64	8,25	3,33	3,47	0,1
P. Jasa Pendidikan	9,29	7,57	10,31	2,67	0,29	10,68	8,35	10,31	2,72	0,3
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	2,06	1,76	7,41	0,59	0,05	2,29	1,89	7,41	0,58	0,05
RSTU Jasa Lainnya	2,41	2,01	2,56	0,69	0,02	2,56	2,06	2,56	0,65	0,02
PDRB Dengan Migas	347,6	258,13				392,91	274,26			
PDRB Non Migas	275,72	206,72				311,86	220,11			

Sumber : Exercice Bappeda, BI dan BPS

Sektor-sektor yang menyumbang pembentukan PDRB tertinggi pada tahun 2016 diprediksi adalah pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 95,65 triliun, sektor industri pengolahan sebesar Rp. 66,46 triliun, serta sektor pertanian sebesar Rp. 66,28 triliun. Dengan pertumbuhan ekonomi ini, PDRB atas harga berlaku dengan migas tahun 2016 diperkirakan akan mencapai Rp. 392,91 triliun. PDRB tahun 2015 sebesar Rp. 347,6 triliun, tahun 2014 Rp. 308,41 triliun, realisasi PDRB tahun 2013 sebesar Rp. 281,99 triliun.

Sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan akan tumbuh seiring meningkatnya permintaan untuk kebutuhan pembangkit listrik dan negara tujuan ekspor baru. Sementara itu sektor pertanian juga akan tumbuh positif dengan asumsi pertumbuhan produksi padi dan luas areal panen yang cukup tinggi sehingga akan menjamin ketersediaan pasokan. Namun tantangan investasi pembangunan infrastruktur dalam mendukung ketahanan pangan harus ditingkatkan secara signifikan agar mendorong hasil pertanian menjadi lebih produktif. Industri pengolahan juga diperkirakan akan tumbuh positif dari kontribusi industri makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan domestik terutama pada kegiatan event-event berskala Internasional dan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan.

Penetapan berbagai asumsi kerangka ekonomi makro Provinsi Sumatera Selatan ditujukan untuk memberikan suatu dorongan (stimulus) dan sekaligus peluang bagi para pelaku usaha untuk melakukan investasi baru dan mengembangkan usaha. Dengan bertambahnya investasi dan meningkatnya skala usaha, pertumbuhan ekonomi diharapkan mendorong perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.

3.1.4. Kekuatan, Masalah dan Tantangan Provinsi Sumatera Selatan

Jika dilihat dari aspek daya saing berdasarkan hasil *Global Competitiveness Report*, Provinsi Sumatera Selatan berada pada peringkat 19 tahun 2015 turun 3 peringkat dari tahun 2014 pada peringkat 16 dengan skor (-0,3121). Namun Provinsi Sumatera Selatan dapat dikatakan memiliki daya saing yang relatif baik, dimana dari 4 indikator daya saing, yaitu pertama Stabilitas Ekonomi Makro, Provinsi Sumsel naik peringkat ke peringkat 11 pada tahun 2015 dengan skor 0,0892 dari peringkat 12 tahun 2014, indikator kedua yaitu Perencanaan Pemerintah dan Institusi Provinsi Sumsel berada pada peringkat 18 tahun 2015 dengan skor -0,1049 turun 1 peringkat dari tahun 2014 peringkat ke 17.

Sementara itu indikator ketiga yaitu Kondisi Finansial, Bisnis dan Tenaga Kerja Provinsi Sumsel berada pada peringkat 25 tahun 2015 dengan skor -0,5720, indikator keempat yaitu Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Provinsi Sumsel berada pada peringkat ke 23 tahun 2015 dengan skor -0,4901. Berikut data capaian indeks daya saing Provinsi Sumatera Selatan:

Tabel 3.19. Peringkat Indeks Daya Saing Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2014-2015

Indikator	Tahun 2014	Tahun 2015	Skor
Stabilitas Ekonomi Makro	12	11	0,0892
Perencanaan Pemerintah dan Institusi	17	18	-0,1049
Kondisi Finansial, Bisnis dan Tenaga Kerja	18	25	-0,5720
Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur	18	23	-0,4901
Daya Saing	16	19	-0,3121

Sumber : *Global Competitiveness Report*

Tingkat daya saing ini menjadi salah satu kekuatan Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Indikator stabilitas ekonomi makro Provinsi Sumatera Selatan cukup baik, hal ini menjanjikan investor akan kepastian berusaha di Sumatera Selatan.

Secara geografis, letak Provinsi Sumsel menjadi nilai tambah pengembangan ekonomi karena tempatnya yang strategis dan menguntungkan dari sisi jalur perdagangan yaitu pertemuan antara jalur Hindia, jalur Asia Pasifik, dan jalur sutera Tiongkok. Letak Sumsel juga memberikan akses yang besar untuk menggapai pasar Jawa dan pasar Singapuraq. Selain itu Provinsi Sumsel juga merupakan salah satu lumbung energi akibat produksi minyak bumi, gas, batubara dan panas bumi yang begitu melimpah. Produksi batubara Sumsel termasuk yang terbesar di Indonesia selain provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Provinsi Sumsel menyimpan cadangan terbesar di Indonesia yaitu mencapai 13,16 miliar ton atau 48,6 persen dari cadangan batubara Nasional. Berikut data cadangan batubara per Provinsi di Indonesia :

Tabel 3.20. Cadangan Batubara per Provinsi

Provinsi	Jumlah Cadangan Batubara (Miliar Ton)
Sumatera Selatan	13,63
Kalimantan Timur	8,86
Kalimantan Selatan	3,78
Riau	0,65
Kalimantan Tengah	0,58
Jambi	0,35
Sumatera Barat	0,16
Bengkulu	0,02

Sumber : Kementerian ESDM

Namun disisi lain yang menjadi permasalahan adalah cadangan batubara di Sumatera Selatan tidak diiringi dengan produksi yang besar yaitu hanya mencapai 9,12 persen dari produksi batubara Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan Provinsi penghasil batubara terbesar di Indonesia. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kualitas batubara sumatera Selatan yang rendah. Porsi batubara di Sumatera Selatan yang berkualitas rendah (<5.100 kkal/kg) cukup tinggi, yaitu mencapai 47 persen dari cadangan. Sehingga diversifikasi batubara menjadi hal yang

krusial untuk meningkatkan produksi batubara, sehingga batubara yang ada termanfaatkan dengan optimal. Dengan kondisi batubara yang melimpah, menjadi sebuah peluang untuk Provinsi Sumatera Selatan untuk membangun dan meningkatkan PLTU Mulut Tambang yang pada akhirnya akan berdampak multiplier pada sisi ekonomi.

Produksi tanaman bahan pangan (tabama) Sumsel juga melimpah dan mampu memenuhi kebutuhan daerahnya, bahkan juga dapat memenuhi kebutuhan Provinsi di sekitar seperti Bengkulu, Babel, Jambi, dan Lampung. Selain tabama, perkebunan karet dan kelapa sawit juga dapat tumbuh dengan baik. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Sumsel merupakan Provinsi produsen karet tertinggi di Indonesia atau mencapai 19% dari total produksi karet Nasional. Sementara untuk komoditas kelapa sawit, Sumsel merupakan produsen tertinggi keempat di Indonesia atau menyumbang 10% dari total produksi. Berikut adalah data produksi karet dan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan :

Tabel 3.21. Produksi Komoditas Perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan

Komoditas	2012		2013		2014	
	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
Karet	1.207.096	1.059.326	1.232.038	1.075.09	1.291.392	1.171.859
Kelapa Sawit	825.134	2.145.800	928.223	2.463.388	858.953	2.251.410
Kopi	252.385	136.986	249.293	139.754	249.218	113.495
Kelapa	71.435	63.189	65.308	59.786	66.998	50.066
Total	2.356.049	3.405.302	2.474.862	3.738.137	2.466.561	3.586.830

Sumber : Dinas Perkebunan Prov. Sumsel

Komoditas perkebunan yang paling besar berkontribusi adalah karet dan kelapa sawit. Produksi kelapa sawit terus meningkat dari 2.145.800 ton pada tahun 2012 menjadi 2.251.410 ton pada tahun 2014. Demikian pula pada komoditas karet mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2012 sebesar 1.059.326 ton meningkat 1.171.859 ton pada tahun 2014. Komoditas lain yang juga menjadi andalan sektor perkebunan adalah kopi dan kelapa, namun produksi kopi mengalami

penurunan dari tahun 2012 sebesar 63.189 ton menjadi 50.066 ton pada tahun 2014, demikian pula komoditas kelapa mengalami penurunan produksi dari 63.189 ton pada tahun 2012 menjadi 3.586.830 ton pada tahun 2014.

Namun umumnya komoditas kelapa sawit dan karet sebagian besar diekspor tanpa diolah, meskipun sudah ada pengolahan karet mentah dan memproduksi ban dalam skala kecil, hal ini masih membutuhkan suatu peningkatan baik dari sisi volume maupun skala. Secara geografi, letak Sumsel sangat menguntungkan untuk melakukan perdagangan ekspor komoditas perkebunan dan produk turunannya secara langsung. Memiliki jalur sungai yang membelah sampai ke tengah dan pelosok kab/kota dan memiliki pelabuhan bertaraf internasional memberikan suatu keuntungan bagi Sumsel untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya melalui ekspor dan hilirisasi produk-produk utama ini merupakan suatu langkah yang vital dalam meningkatkan nilai tambah dari masing-masing produk tersebut.

Selain kaya akan sumberdaya alam Provinsi Sumatera Selatan juga kaya akan obyek wisata dan kunjungan wisatawan di Sumatera Selatan meningkat cukup signifikan. Berikut data sektor kepariwisataan :

Tabel. 3.22. Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara ke Provinsi Sumatera Selatan

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Nusantara	Jumlah Total Wisatawan
2009	29.900	2.301.760	2.331.660
2010	30.003	2.078.630	2.108.633
2011	42.953	8.101.459	8.144.412
2012	30.117	11.462.461	11.492.578
2013	31.408	14.705.774	14.737.182

Sumber : BPS

Realisasi kunjungan wisatawan meningkat pesat terutama sejak momen *South East Asian Games* 2011 dan *Islamic Solidarity Games* 2013. Tercatat jumlah wisatawan tahun 2013 meningkat hingga sebesar

14.737.182 orang baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, dan melebihi target tahun 2013 sebesar 13.541.424 wisatawan. Peningkatan jumlah wisatawan yang cukup signifikan ini tentu berdampak baik pada perekonomian daerah, seperti tumbuhnya sektor perhotelan, jasa-jasa, perdagangan, industri makanan dan minuman serta peningkatan jumlah angkutan transportasi udara khususnya penerbangan di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3.23. Jumlah Objek Wisata di Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Palembang	45	45	45	45	31
2	Ogan Ilir	18	18	18	18	8
3	Ogan Komering Ilir	22	22	22	22	2
4	Muara Enim	9	9	9	9	8
5	OKU	23	23	23	23	5
6	OKU Selatan	5	5	5	5	4
7	OKU Timur	24	24	24	24	10
8	Prabumulih	3	3	3	3	1
9	Empat Lawang	-	-	-	-	-
10	Musi Banyuasin	16	16	16	16	17
11	Banyuasin	12	12	12	12	4
12	Musi Rawas	31	31	31	31	7
13	Lahat	32	32	25	25	32
14	Pagaralam	18	18	18	18	15
15	Lubuk Linggau	7	7	7	7	3
Provinsi Sumatera Selatan		265	265	258	258	147

Sumber : Disbudpar Provinsi Sumatera Selatan

Banyaknya objek wisata yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Selatan sejumlah 147 menjadikan suatu potensi untuk meningkatkan perekonomian daerah. Hal ini juga seiring dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang memprioritaskan Pembangunan Pariwisata sebagai salah satu prioritas dari pembangunan Nasional. Arah kebijakan Pusat terkait pembangunan pariwisata adalah Pemasaran Pariwisata Nasional dalam arti mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara, Pembangunan Destinasi Pariwisata dan Pembangunan Industri Pariwisata.

Ketersediaan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan juga merupakan salah satu kekuatan dan tantangan. Mayoritas penduduk Sumatera Selatan bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan, yaitu mencapai 49,8 persen pada tahun 2014. Sementara itu, pangsa sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi dan jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan meningkat tahun 2014 menjadi 17,8 persen dan 13,5 persen. Pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja di sektor utama menunjukkan peningkatan. Berikut data ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan :

Tabel 3.24. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Februari 2012-Februari 2015

No	Lapangan Pekerjaan Umum	2012*)		2013*)		2014**)		2015**)
		Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
1	Pertanian, Perkebunan Kehutanan Perburuan, dan Perikanan	2.083.957	2.021.183	1.985.651	1.933.591	2.021.373	1.970.351	1.501.335
2	Industri	177.014	200.454	192.459	171.486	179.676	136.457	257.174
3	Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi	575.376	522.812	619.315	544.772	670.762	616.329	673.421
4	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	527.977	458.076	520.477	473.733	452.436	491.143	515.493
5	Lainnya ***)	414.573	399.036	438.757	401.001	513.424	427.996	463.219

**) Estimasi Ketenagakerjaan menggunakan penimbang hasil Proyeksi Penduduk

***) Lapangan pekerjaan sektor lainnya mencangkup: sektor Pertambangan,Sektor Listrik, Gas, dan Air, Sektor Bangunan, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Keuangan Perusahaan, dan Sektor Jasa Perusahaan

Sumber : BPS

Pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja di sektor utama menunjukkan peningkatan. Sektor industri, sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan, dan sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi mengalami pertumbuhan dibandingkan awal tahun 2014 masing-masing sebesar 43,1 persen, 6,8 persen, dan 1,1 persen. Sedangkan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan, dan sektor lainnya mengalami penurunan masing-masing sebesar 5,9 persen dan 9,6 persen.

Dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), diidentifikasi dua kelompok utama terkait kegiatan ekonomi, yakni formal dan informal. Kegiatan formal terdiri dari mereka yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan. Sementara kelompok kegiatan informal umumnya adalah mereka yang berstatus di luar itu. Dalam melihat status pekerjaan berdasarkan klasifikasi formal dan informal, sebanyak 36,5 persen tenaga kerja bekerja pada kegiatan formal, sementara 63,5 persen sisanya bekerja pada kegiatan informal. Berdasarkan status pekerjaan, mayoritas status pekerjaan adalah buruh/karyawan dengan pangsa 33,98 persen dan berusaha sendiri dengan pangsa 18,9 persen.

Tabel 3.25. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Februari 2012-Februari 2015

No	Status Pekerjaan Utama	2012*)		2013*)		2014**)		2015**)
		Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
1	Berusaha Sendiri	118.879	601.136	649.355	685.608	680.391	619.905	721.463
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	180.791	114.618	180.109	644.083	117.132	691.137	894.115
3	Berusaha dibantu buruh tetap	106.677	58.418	171.137	96.222	90.372	105.318	91.073
4	Buruh/karyawan	1.088.945	1.195.025	1.148.588	1.160.304	1.211.981	1.211.981	1.796.357
5	Pekerjaan bebas di Pertanian	60.699	114.316	115.850	103.197	117.855	91.970	96.854
6	Pekerjaan bebas di non-pertanian	67.515	18.893	12.396	15.154	97.997	13.593	132.725
7	Pekerjaan Keluaraga/tak dibayar	541.135	198.494	868.614	150.175	850.930	772.792	774.651
Total		3.179.141	3.601.561	3.756.659	3.524.883	3.867.611	3.692.806	3.815.643

*) Februari 2012-Agustus 2013 merupakan hasil Backcasting dari penimbang hasil proyeksi penduduk yang digunakan pada Februari 2014

**) Estimasi keternagakerjaan menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk

Sumber : BPS

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Februari 2015 mencapai 70,54 persen. Jumlah angkatan kerja menunjukkan penurunan yaitu dari 4,02 juta jiwa menjadi 4,01 juta jiwa, atau turun sebesar 0,11 persen. Jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja yang cukup besar masih menyisakan 30 persen yang belum terserap pada lapangan pekerjaan, hal ini merupakan suatu potensi yang bisa dikembangkan.

Sebagai bagian dari perekonomian global yang cukup rentan terpengaruh, Sumatera Selatan merupakan penyuplai komoditas dunia. Ditambah dengan semakin terbuka dan meningkatnya komunikasi internasional, perlu mencermati tantangan dan peluang baik internal maupun eksternal. Prospek perekonomian Indonesia dan Sumatera Selatan masih tetap menjanjikan, namun memerlukan kerja keras dan kerja cerdas terutama bagi peningkatan pembangunan daerah, melalui optimalisasi, ketepatan distribusi dan penajaman alokasi anggaran yang tersedia. Beberapa tantangan tersebut adalah :

A. Tantangan Internal

a. Kekuatan

1. Dimulainya pembangunan fisik Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-api;
2. Trans Sumatera Highway dan Railway;
3. Keamanan dan kondisi geografis yang relatif aman dari potensi bencana/gempa;
4. Penyelenggaraan Asian Games tahun 2018 berpengaruh positif terhadap investasi.

b. Kelemahan

1. Menurunnya kontribusi sektor pertanian, sementara sebagian besar penduduk masih bekerja pada sektor pertanian.
2. Menurunnya kontribusi sektor industri pengolahan dan penyerapan tenaga kerja di sektor ini yang relatif rendah.
3. Kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan belum optimal.

B. Tantangan Eksternal

a. Peluang

1. Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Desember 2015 yang menantang negara-negara ASEAN dalam rangka

peningkatan daya saing (kualitas, komoditas, harga dan biaya logistik) sumber daya yang tersedia untuk penetrasi pasar komoditas ke negara-negara anggota ASEAN tersebut.

2. Akibat beralihnya investasi negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan Kanada, ke Asia Tenggara akibat meningkatnya dinamika politik di China. Negara-negara di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, harusnya mengambil kesempatan ini karena diuntungkan oleh sumber daya manusia yang relatif murah dan terampil, sumber daya alam yang berlimpah dan ketersediaan lahan.

b. Ancaman

1. Resesi ekonomi yang masih membayang-bayangi sebagai akibat masih belum mantapnya perekonomian Eropa dan Amerika dan dampak dari devaluasi yuan (china);
2. Instabilisasi yang sangat mungkin menjalar ke Indonesia sebagai akibat gejolak politik dan ekonomi yang masih berlangsung di beberapa belahan dunia;
3. Anomali iklim yang semakin ekstrim yang masih berlangsung di beberapa belahan dunia.

Sebagai provinsi yang memiliki sumberdaya alam berlimpah khususnya di sektor pertanian dan pertambangan, kesempatan ini dapat menjadi peluang bagi Sumatera Selatan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Namun yang perlu diperhatikan adalah komoditas pertanian rentan terpengaruh oleh harga komoditas dunia khususnya subsektor perkebunan sehingga nilainya akan sangat bergantung pada perkembangan perekonomian global. Sumatera Selatan dengan jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Subsektor Perkebunan pada tahun 2013 (Hasil sensus pertanian tahun 2013) sebesar 733.157 Rumah Tangga Pertanian sub sektor perkebun atau setara dengan 37,46 persen dari penduduk Sumatera Selatan jika diasumsikan 1 (satu) Kepala Keluarga

beranggotakan 4 (empat) orang, sedangkan Sumatera Selatan mengekspor komoditas pertanian khususnya perkebunan dalam bentuk barang mentah maupun setengah jadi, jika terjadi penurunan harga komoditas ekspor Sumatera Selatan tersebut di pasar global yang di pengaruhi oleh perekonomian negara pengguna komoditas tersebut maka akan sangat mempengaruhi harga maupun jumlah beli dari komoditas yang menyebabkan pengaruh yang negatif terhadap tingkat pendapatan masyarakat Sumatera Selatan utamanya petani subsektor perkebunan. Hal ini sudah diantisipasi dengan ditetapkannya Kawasan Ekonomi khusus Tanjung Api-Api sebagai gerbang hilirisasi sumber daya alam Sumatera Selatan.

Di tingkat Provinsi, beberapa hal menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan implementasi Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Energi Nasional. Isu pokok berkaitan dengan pangan adalah a) terjadinya peningkatan kebutuhan pangan karena pertumbuhan penduduk; b) pentingnya swasembada pangan berkelanjutan untuk mengatasi kerentanan dan kerawanan pangan; c) terjadinya kompetisi antara sumber energi dan sumber pangan; d) terdapatnya kerusakan lingkungan sebagai dampak negatif perubahan iklim; e) rendahnya harga komoditas unggulan Sumatera Selatan terutama komoditas karet dan f) kurang meratanya penyebaran infrastruktur terutama yang berkaitan dengan kelistrikan. Di bidang energi, Sumsel masih berlutut dengan upaya memantapkan pemenuhan pasokan energi untuk daerah sendiri, di samping memasok kebutuhan daerah lain di Sumatera dan Jawa.

Di bidang infrastruktur, kondisi mantap jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota masih harus ditingkatkan untuk memastikan kelancaran arus orang, barang, dan jasa. Hal yang sama untuk pengembangan jaringan irigasi, sanitasi, pengelolaan banjir, dan penyediaan air minum/bersih. Memperhatikan kemajuan pembangunan yang telah dicapai, maka ke depan beberapa prasarana transportasi sudah sangat mendesak untuk dibangun, diantaranya adalah Jembatan Musi IV dan VI, Rel KA ganda menuju ke Tanjung Api-Api, Jalan Bebas Hambatan (Toll)

Jambi-Sumatera Selatan-Lampung, monorail dan Light Rail Transit (LRT) di Kota Palembang. Di bidang lingkungan, antisipasi terhadap perubahan iklim harus secara dini diprogramkan baik di sektor kesehatan, pertanian, kehutanan, sumber daya air, energi, infrastruktur dan penanggulangan bencana.

Secara keseluruhan proses pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan diarahkan untuk :

1. Mendorong peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja, terutama untuk meningkatkan pendapatan per kapita;
2. Pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi khususnya dalam akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna;
3. Peningkatan kemudahan perijinan usaha dan penyederhanaan prosedur perijinan, melalui PTSP dan pengurangan biaya untuk memulai usaha;
4. Peningkatan porsi belanja modal APBD untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah;
5. Menerapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dengan tetap mempertimbangkan peningkatan produktivitas untuk menarik investor;
6. Peningkatan koordinasi antar pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif : peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah, penjaminan kredit dan pengendalian inflasi daerah;
7. Peningkatan kualitas infrastruktur terutama jaringan jalan dan listrik;
8. Membatalkan perda yang bermasalah untuk meningkatkan kepastian berusaha.

Seluruh sektor pembangunan akan memiliki kaitan langsung (sebagaimana kaitan hulu-hilir, forward-backward, sentrifugal-sentripetal) dengan fokus pembangunan di atas. Namun seringkali terjadi ketimpangan pembangunan, baik yang bersifat sektoral maupun wilayah,

sehingga diperlukan keseimbangan yang seyogyanya diidentifikasi oleh sektor dominan dalam bentuk program lintas sektor, baik yang bersifat mendukung (hilir/backward) maupun yang bersifat memanfaatkan (hulu/forward). Melalui KISS (koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi) seluruh keterkaitan sektor pembangunan seharusnya dapat digambarkan dalam suatu program pembangunan daerah.

Mekanisme yang diharapkan dapat diterapkan untuk memastikan berlangsungnya keseimbangan dimaksud adalah melalui rapat koordinasi teknis antara SKPD Provinsi dengan SKPD Kabupaten/Kota terkait untuk memastikan 1) kepastian dan ketepatan jenis dan lokasi kegiatan, dan 2) sharing pembiayaan antara Provinsi dengan Kab/Kota untuk memastikan kegiatan dilaksanakan secara tuntas. Melalui mekanisme ini diharapkan dana Provinsi yang akan dialokasikan ke Kabupaten/Kota benar-benar untuk membiayai program/kegiatan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan Kabupaten/Kota.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 mencakup arah dan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Rencana pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Prediksi Pendapatan tahun 2013-2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.26
Kerangka Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2016

NO	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014	Tahun Berjalan 2015	Proyeksi /Target Tahun 2016
1	2	3	4	5	6
1.1	Pendapatan asli daerah	2.021.696.787.275,10	2.422.673.788.768,86	2.784.966.905.383,00	2.716.197.240.400,50
1.1.1	Pajak daerah	1.882.596.915.640,00	2.267.779.726.033,50	2.530.928.660.653,00	2.512.149.699.684,00
1.1.2	Retribusi daerah	16.522.296.308,00	11.422.669.874,00	13.495.183.575,00	15.327.584.000,00
1.1.3	Hasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	59.352.768.749,12	30.668.098.292,55	145.941.418.155,00	86.416.656.716,50
1.1.4	Lain-lain pendapata asli daerah yang sah	63.224.806.577,98	112.803.294.568,81	94.601.643.000,00	102.303.300.000,00
1.2	Dana perimbangan	2.649.216.454.338,00	2.982.866.000.798,00	3.262.707.213.031,00	2.415.242.256.000,00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	1.753.511.287.338,00	1.934.568.340.798,00	2.207.759.133.031,00	1.483.326.786.000,00
1.2.2	Dana alokasi umum	870.516.767.000,00	985.542.760.000,00	985.542.760.000,00	931.915.470.000,00
1.2.3	Dana alokasi khusus	25.188.400.000,00	62.754.900.000,00	69.405.320.000,00	0
1.3.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	797.226.449.420,00	846.596.522.953,65	1.146.028.518.182,00	1.131.937.153.234,77
1.3.1	Hibah	20.519.924.766,00	20.248.984.384,00		
1.3.2	Dana darurat				
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya				
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	776.706.524.654,00	810.472.015.000,00	1.090.947.800.000,00	1.090.947.800.000,00
1.3.5	Pendapatan Lainnya		15.875.523.569,65	55.080.718.182,00	40.989.353.234,77
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)	5.468.139.691.033,10	6.252.136.312.520,51	7.193.702.636.596,00	6.263.376.649.635,27

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Untuk Penganggaran Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Daerah pada APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp. 6.263.376.649.635,27 berkurang bila dibanding APBD Induk Tahun 2015 sebesar Rp. 7.193.702.636.596,- atau berkurang sebesar Rp. 68.769.664.982,50 atau -2,47%, yang bersumber dari:

3.2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2016 menurun dari Rp. 2.784.966.905.383,- pada tahun 2015 menjadi Rp. 2.716.197.240.400,50,- pada tahun 2016 atau berkurang sebesar Rp. 68.769.664.982,50,- atau -2,47% dengan proporsi terhadap APBD Tahun 2016 sebesar 42,35%.

Untuk penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam merencanakan target PAD mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2016 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan perturan perundang-undangan terkait.
- b. Target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2016 mengalami penurunan sekitar 2,47% dari tahun anggaran 2015 dikarenakan terjadinya penurunan target pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akibat keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 101 Tahun 2014 yang mengatur tentang Penghitungan dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebagai solusi untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan harga bahan bakar minyak sehingga dibutuhkan adanya penurunan besaran pajak kendaraan bermotor angkutan umum orang dan barang. Sehingga akan

mengurangi beban biaya transportasi kendaraan umum seperti bis kota, angkot dan sebagainya. Tapi penurunan tersebut bisa diimbangi dengan menaikkan target Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 1,03 % diakibatkan meningkatnya konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor setiap tahunnya serta adanya kenaikan target Pajak Rokok yang mendekati kenaikan sekitar 44,84 % sekitar bisa menutupi penurunan cukup signifikan untuk PKB dan BBNKB diatas.

- c. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang_undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya bertentangan dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan atau telah dibatalkan. Trend terjadinya penurunan pada target Retribusi Daerah untuk beberapa SKPD terjadi karena pemindahaan target SKPD Rumah Sakit Ernardi Bahar, Rumah Sakit Paru – Paru serta Rumah Sakit Mata yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mulai tahun 2015 ini. Sehingga terjadi pemindahaan ke target pendapatan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- d. Optimalisasi Peningkatan Pajak daerah melalui penarikan pajak kendaraan alat-alat berat dengan melibatkan institusi yang terkait seperti POL-PP dalam penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah.
- e. Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain PAD yang Sah, obyek hasil pengelolaan dana bergulir dan rincian obyek hasil pengelolaan dan bergulir dari kelompok masyarakat penerima. Dengan penambahan dana operasional untuk berbagai BUMD dan Bank Daerah oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan pada tahun anggaran 2016 mendatang serta selanjutnya, maka akan terjadi kenaikan deviden atau laba yang disetorkan ke Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.

- f. Kebijakan penganggaran tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- g. Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain PAD yang Sah, obyek hasil pengelolaan dana bergulir dan rincian obyek hasil pengelolaan dan bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
- h. Rumah sakit yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka penerimaan rumah sakit tersebut termasuk pelayanan masyarakat miskin melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dicantumkan dalam APBD sebagai Jenis Retribusi.

3.2.2.2. Dana Perimbangan

Pada Tahun 2016 Dana Perimbangan diproyeksikan sebesar Rp. 2.415.242.256.000,- menurun dari Rp. 3.262.707.213.031,- pada tahun 2015 atau berkurang sebesar Rp. 847.464.957.031,00,- atau -25,97%, dengan proporsi terhadap APBD Tahun 2016 sebesar 37,66%.

Untuk penganggaran Dana Perimbangan yang bersumber dari alokasi Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penurunan drastis target alokasi dana perimbangan setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sangat berdampak untuk penyusunan Target Pendapatan Daerah (PATDA) tahun anggaran 2016.
- b. Perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2015, berpatokan dengan Perpres Nomor 36 Tahun 2015 sebagai dasar penetapan targetnya.
- c. Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) mempertimbangkan besaran alokasi DBH yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 36 tanggal 17 Maret 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 dimana terjadi penurunan drastis pada alokasi target pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak SDA, untuk komponen minyak bumi dan gas alam sehingga Target Pendapatan Daerah (PATDA) Tahun Anggaran 2016 ikut terpangkas.

- d. Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2016 belum dianggarkan. Dalam hal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh DAK Tahun Anggaran 2016 setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menganggarkan DAK dimaksud dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya DAK dimaksud ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

3.2.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah menurun dari Rp. 1.146.028.518.182,- pada tahun 2015 menjadi Rp. 1.131.937.153.234,77 pada tahun 2016 atau berkurang sebesar Rp. 14.091.364.947,23 atau 1,23% dengan proporsi terhadap APBD Tahun 2016 sebesar 17,65%.

Penetapan target penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam/luar negeri yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan dianggarkan dalam APBD pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan

pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas danefisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kebijakan Belanja Daerah terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL).

3.2.3.1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp. 3.433.560.184.000,- menurun dari tahun 2015 yang sebesar Rp. 3.573.744.694.176,- atau berkurang sebesar Rp. 140.184.510.176,- atau -3,92%, dengan proporsi terhadap APBD Tahun 2016 sebesar 53,54 %.

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai :

Belanja Pegawai pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp.854.192.736.000,- meningkat dari tahun 2015 yang sebesar Rp. 777.044.322.960,- atau bertambah sebesar Rp. 77.148.413.040,- naik 9,93% dari tahun 2015 dengan proporsi terhadap APBD tahun 2016 sebesar 13,32%. Penganggaran Belanja Pegawai dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD dan pemberian gaji ketiga belas.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- c. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2016 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

- b. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan

Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.

- c. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, disebutkan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan setelah berakhirnya bulan berjalan dengan memperhatikan tingkat kehadiran.
- d. Penganggaran Insentif pajak Dinas Pendapatan Daerah didasarkan pada capaian target pendapatan dan bagi UPTD yang realisasi pendapatannya tidak mencapai target maka tidak dapat dibayarkan insentif pajaknya.
- e. Tunjangan guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja Hibah pada Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp. **1.764.350.448.000,-** berkurang sebesar Rp. **15.601.200.616,-** dari APBD Tahun 2015 yang sebesar Rp. 1.779.951.648.616.- dengan proporsi terhadap APBD Tahun 2016 sebesar **27,51%**. Sedangkan Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2016 dianggarkan sama dengan tahun 2015 sebesar Rp. 600.000.000,-.

Penganggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan daerah dibidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat namun tetap secara selektif/tidak mengikat, memiliki identitas yang jelas, sesuai dengan tujuan penggunaan dan berdomisili dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan jumlahnya dibatasi dan dalam mekanismenya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Penganggaran dan pencairan hibah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan perubahannya. Penerima hibah yang belum mempertanggungjawabkan hibah yang diterimanya pada Tahun 2015, tidak dapat diberikan hibah Tahun 2016.

3. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota:

Pada Tahun 2016 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dianggarkan Rp. 709.417.000.000 bertambah Rp. 1.980.767.000,- dari anggaran tahun 2015 yang sebesar Rp. 707.436.233.000,- dengan proporsi terhadap APBD 2016 sebesar 11,06%. Penganggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari penerima bantuan keuangan tersebut, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.
- b. Bantuan Keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman, Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertangungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman, Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- c. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah Kabupaten/Kota selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menganggarkan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat umum didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal. Selain bantuan keuangan yang bersifat umum, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus untuk membantu capaian program prioritas Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota seperti program sekolah gratis dan berobat gratis serta pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Kabupaten/Kota. Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan.

4. Belanja Bagi Hasil

Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi Sumatera Selatan kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan pada APBD dilakukan setelah dilakukan penghitungan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan disesuaikan dengan rencana pendapatan pada Tahun Anggaran 2016, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2015 yang belum direalisasikan kepada Pemerintah Provinsi yang menjadi hak Kabupaten/Kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. Pada Tahun 2016 Belanja Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000.000,- dengan proporsi terhadap APBD 2016 sebesar 1,56%.

- a. Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2016, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2015 yang belum

direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

- b. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
- c. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten/kota dan pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten/kota untuk pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

5. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada tahun 2016 dianggarkan Rp. 5.000.000.000,- berkurang senilai Rp. 3.712.489.600,- dari tahun 2015 yang sebesar Rp. 8.712.489.600,- dengan proporsi terhadap APBD tahun 2016 sebesar 0,08 %.

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2015 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2015, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

3.2.3.2. Belanja Langsung

Belanja Langsung pada tahun 2016 dianggarkan Rp. **2.186.504.678.351,79** menurun dari anggaran tahun 2015 Rp. 3.035.963.930.400,- atau berkurang sebesar **Rp. 849.459.252.048,21 27,98%**, dengan proporsi terhadap APBD Tahun 2016 sebesar **34,09%**.

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperhatikan hal - hal sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Program dan kegiatan yang dituangkan harus memperhatikan skala prioritas dan berorientasi pada outcome serta merupakan kewenangan SKPD yang bersangkutan. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani Renstra SKPD, SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
2. Belanja Pegawai :

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian

Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD. Pengalokasian honorarium setinggi-tingginya sesuai dengan besaran yang tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Umum. Penganggaran biaya *outsourcing* maksimum sebesar yang telah dianggarkan pada Tahun 2015.

3. Barang Belanja dan Jasa :

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- b) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- c) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2015.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD.

- e) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan dan Dukungan Biaya Operasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.
- f) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri dilakukan seefisien mungkin dan memperhatikan tingkat kepentingannya. Khusus untuk penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui penerapan penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 1. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai biaya riil;
 2. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 3. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 4. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan harga perjalanan dinas selanjutnya akan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

- h) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
 - i) Tidak diperkenankan untuk menganggarkan biaya pelaksanaan sosialisasi atau bimbingan teknis. Materi yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan pemahaman tersebut agar diserahkan kepada Kabupaten/Kota untuk mensosialisasikannya.
 - j) Pendidikan dan pelatihan (diklat) yang dapat diikuti adalah yang dilaksanakan oleh lembaga resmi yang dapat menerbitkan sertifikasi atas pelaksanaan diklat serta mempunyai kompetensi dan keahlian pada bidang dimaksud.
 - k) Beasiswa yang diberikan bagi PNS Pemerintah Provinsi dialokasikan pada Badan Kepegawaian Daerah, sedangkan alokasi beasiswa pada Belanja Tidak Langsung yang penganggaran dan proses pencairannya berdasarkan rekomendasi Dinas Pendidikan, hanya dapat digunakan oleh Non PNS Pemerintah Provinsi.
 - l) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya mempedomani Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 5) Belanja Modal :
- a) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2016 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
 - b) Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah dan pemeliharaan barang milik daerah menggunakan dasar perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17

Tahun 2007. Selanjutnya, untuk pengadaan barang milik daerah juga memperhatikan standar sarana dan prasarana kerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Penganggaran pengadaan belanja modal

- c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Bangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.
- d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Dengan arah kebijakan belanja tahun 2016, perkiraan belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.27.
Kerangka Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2016

NO	URAIAN	APBD		BERTAMBAH/ BERKURANG	% 6
		APBD 2015	Proyeksi APBD 2016		
1	2	3	4	5	6
2.	BELANJA DAERAH	6.609.708.624.576,00	5.620.064.862.351,79	(989.643.762.224,21)	(14,97)
2.1.	Belanja Tidak Langsung	3.573.744.694.176,00	3.433.560.184.000,00	(140.184.510.176,00)	(3,92)
	- Belanja Pegawai	777.044.322.960,00	854.192.736.000,00	77.148.413.040,00	9,93
	- Belanja Subsidi	-	-	-	-
	- Belanja Hibah	1.779.951.648.616,00	1.764.350.448.000,00	(15.601.200.616,00)	(0,88)
	- Belanja Bantuan Sosial	600.000.000,00	600.000.000,00	-	-
	- Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kabu./Kota dan Pem. Desa	300.000.000.000,00	100.000.000.000,00	(200.000.000.000,00)	(66,67)
	- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab./Kota dan Pem. Desa	707.436.233.000,00	709.417.000.000,00	1.980.767.000,00	0,28
	- Belanja Tidak Terduga	8.712.489.600,00	5.000.000.000,00	(3.712.489.600,00)	(42,61)
2.2.	Belanja Langsung	3.035.963.930.400,00	2.186.504.678.351,79	(849.459.252.048,21)	(27,98)
	- Belanja Pegawai	9.023.654.500,00	-	(9.023.654.500,00)	(100,00)
	- Belanja Barang dan Jasa	1.350.247.242.641,00		(1.350.247.242.641,00)	(100,00)
	- Belanja Modal	1.676.693.033.259,00		(1.676.693.033.259,00)	(100,00)
	JUMLAH BELANJA	6.609.708.624.576,00	5.620.064.862.351,79	(989.643.762.224,21)	(14,97)

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016 terkait dengan proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp. 25.000.000.000,-menurun dari SiLPA tahun 2015 sebesar Rp. 110.000.000.000,-.

Perkiraan Pembiayaan daerah Tahun 2015-2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.28
Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2016

URAIAN	APBD		BERTAMBAH/ BERKURANG	%
	APBD 2015	Proyeksi APBD 2016		
2	3	4	5	6
PEMBIAYAAN DAERAH	(583.994.012.020,00)	(643.311.787.283,48)	(59.317.775.263,48)	10,16
Penerimaan Pembiayaan Daerah	110.000.000.000,00	150.000.000.000,00	40.000.000.000,00	36,36
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	110.000.000.000,00	25.000.000.000,00	(85.000.000.000,00)	(77,27)
- Piutang PKB	-	125.000.000.000,00	125.000.000.000,00	
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	693.994.012.020,00	793.311.787.283,48	99.317.775.263,48	14,31
- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	60.000.000.000,00	125.000.000.000,00	65.000.000.000,00	108,33

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan uraian di muka, maka kerangka pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada APBD Tahun Anggaran 2016 dapat digambarkan dalam tabel 3.29 sebagai berikut:

**Tabel 3.29. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016**

NO	URAIAN	APBD		BERTAMBAH / BERKURANG	%
		APBD 2015	Proyeksi APBD 2016		
1	2	3	4	5	6
1.	Pendapatan	7.193.702.636.596,00	6.263.376.649.635,27	(930.325.986.960,73)	(12,93)
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	2.784.966.905.383,00	2.716.197.240.400,50	(68.769.664.982,50)	(2,47)
	- Pajak Daerah	2.530.928.660.653,00	2.512.149.699.684,00	(18.778.960.969,00)	(0,74)
	- Hasil Retribusi Daerah	13.495.183.575,00	15.327.584.000,00	1.832.400.425,00	13,58
	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	145.941.418.155,00	86.416.656.716,50	(59.524.761.438,50)	(40,79)
	- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	94.601.643.000,00	102.303.300.000,00	7.701.657.000,00	8,14
1.2.	Dana Perimbangan	3.262.707.213.031,00	2.415.242.256.000,00	(847.464.957.031,00)	(25,97)
	- Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	2.207.759.133.031,00	1.483.326.786.000,00	(724.432.347.031,00)	(32,81)
	- Dana Alokasi Umum	985.542.760.000,00	931.915.470.000,00	(53.627.290.000,00)	(5,44)
	- Dana Alokasi Khusus	69.405.320.000,00		(69.405.320.000,00)	(100,00)
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.146.028.518.182,00	1.131.937.153.234,77	(14.091.364.947,23)	(1,23)
	- Dana BOS	1.090.947.800.000,00	1.090.947.800.000,00	-	-
	- Penerimaan Jamsoskes		40.989.353.234,77	40.989.353.234,77	-
	- Piutang PKB				
	- Pendapatan Lainnya	55.080.718.182,00		(55.080.718.182,00)	-
2.	BELANJA DAERAH	6.609.708.624.576,00	5.620.064.862.351,79	(989.643.762.224,21)	(14,97)
2.1.	Belanja Tidak Langsung	3.573.744.694.176,00	3.433.560.184.000,00	(140.184.510.176,00)	(3,92)
	- Belanja Pegawai	777.044.322.960,00	854.192.736.000,00	77.148.413.040,00	9,93
	- Belanja Subsidi			-	-
	- Belanja Hibah	1.779.951.648.616,00	1.764.350.448.000,00	(15.601.200.616,00)	(0,88)
	- Belanja Bantuan Sosial	600.000.000,00	600.000.000,00	-	-
	- Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kabu./Kota dan Pem. Desa	300.000.000.000,00	100.000.000.000,00	(200.000.000.000,00)	(66,67)
	- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab./Kota dan Pem. Desa	707.436.233.000,00	709.417.000.000,00	1.980.767.000,00	0,28
	- Belanja Tidak Terduga	8.712.489.600,00	5.000.000.000,00	(3.712.489.600,00)	(42,61)
2.2.	Belanja Langsung	3.035.963.930.400,00	2.186.504.678.351,79	(849.459.252.048,21)	(27,98)
	- Belanja Pegawai	9.023.654.500,00		(9.023.654.500,00)	(100,00)
	- Belanja Barang dan Jasa	1.350.247.242.641,00		(1.350.247.242.641,00)	(100,00)
	- Belanja Modal	1.676.693.033.259,00		(1.676.693.033.259,00)	(100,00)
	JUMLAH BELANJA	6.609.708.624.576,00	5.620.064.862.351,79	(989.643.762.224,21)	(14,97)
	SURPLUS/(DEFISIT)	583.994.012.020,00	643.311.787.283,48	59.317.775.263,48	10,16
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	(583.994.012.020,00)	(643.311.787.283,48)	(59.317.775.263,48)	10,16
3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	110.000.000.000,00	150.000.000.000,00	40.000.000.000,00	36,36
	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	110.000.000.000,00	25.000.000.000,00	(85.000.000.000,00)	(77,27)
	- Piutang PKB		125.000.000.000,00	125.000.000.000,00	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	110.000.000.000,00	25.000.000.000,00	(85.000.000.000,00)	(77,27)
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	693.994.012.020,00	793.311.787.283,48	99.317.775.263,48	14,31
	- Peryertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	60.000.000.000,00	125.000.000.000,00	65.000.000.000,00	108,33
	- Pembayaran Utang Provinsi	633.994.012.020,00	668.311.787.283,48	34.317.775.263,48	5,41
	JUMLAH PENGELOUARAN PEMBIAYAAN	693.994.012.020,00	793.311.787.283,48	99.317.775.263,48	14,31

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tahun 2016 merupakan tahun pertengahan dari 5 (lima) tahun masa kepemimpinan Gubernur H. Alex Noerdin dan Wakil Gubernur H. Ishak Mekki. Tahun pertengahan menjadi masa yang penting untuk mengevaluasi 2 (dua) tahun pertama untuk kemudian menuju 2 (dua) tahun berikutnya. Oleh karenanya menjadi sangat penting untuk mengkaji keberhasilan dan juga kekurangan pelaksanaan dan capaian setiap program, baik yang bersifat sektoral maupun kewilayahan.

Kinerja Pembangunan tahun 2014 serta capaian sampai dengan tahun 2015 dikaji secara komprehensif sehingga sinergi dengan tema pembangunan tahun 2016 yakni Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis, serta keterkaitannya dengan tema pembangunan tahun 2015 yakni Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Potensi Daerah yang dimaksudkan mendorong transformasi Provinsi Sumatera Selatan melalui peningkatan peran industri pengolahan (hilirisasi) hasil pertanian dan pertambangan di Provinsi Sumatera Selatan.

Perencanaan pembangunan Daerah tahun 2016, harus selaras dengan kebijakan pembangunan pemerintah Pusat. Dua kebijakan pokok Pemerintah Pusat, Trisakti dan Nawacita, sebagaimana dijabarkan ke dalam RPJMN tahun 2015-2019 harus diselaraskan ke dalam kebijakan pembangunan daerah.

Dalam RPJPN 2005-2025 disebutkan bahwa pembangunan RPJMN ke-3 (2015-2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan Iptek yang terus meningkat. Berdasarkan arahan tersebut, pembangunan Indonesia dalam periode 2015-2019 diarahkan untuk mencapai perekonomian yang kuat, inklusif dan berkelanjutan.

Selanjutnya dengan berlandaskan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti, dirumuskan visi tahun 2015-2019 yaitu "Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Untuk menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan (Trisakti), visi tersebut dirumuskan ke dalam 9 (sembilan) agenda prioritas yang disebut Nawa Cita, yaitu:

- a. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
- b. Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
- d. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa.

- i. Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam RPJMN Buku 3 tentang Agenda Pembangunan Wilayah, telah diusulkan tema Pembangunan Wilayah Pulau Sumatera sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional, lumbung energi nasional dan lumbung pangan nasional, diarahkan untuk pengembangan hilirisasi komoditas batubara, serta industri berbasis komoditas padi, kopi, teh, ikan patin, kelapa sawit, karet, timah, bauksit dan kaolin; pengembangan energi terbarukan melalui pemanfaatan potensi kelapa sawit menjadi bio diesel, serta percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari.

Musrenbang RPJMN Regional Sumatera yang dilaksanakan di Belitung tanggal 13 Desember 2014 yang lalu menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk merealisasikan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMN. Untuk itulah maka program dan kegiatan yang diusulkan haruslah realistik, berdampak besar, dan mencapai visi dan misi serta program prioritas yang telah ditetapkan. Kesesuaian program prioritas daerah Sumatera Selatan, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, dengan Nawa Cita seperti dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Sinkronisasi Agenda Nawa Cita dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan

Nawa Cita	Prioritas Pembangunan Sumsel
<ul style="list-style-type: none">- Melindungi Segenap Bangsa Dan Memberikan Rasa Aman- Tata Kelola Pemerintahan- Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none">- Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kamtibmas

<ul style="list-style-type: none"> - Membangun Indonesia dari Pinggiran - Mewujudkan Kemandirian ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Wilayah - Pengelolaan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana - Pembangunan Pertanian - Infrastruktur dan Energi
<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas hidup manusia dan masyarakat - Revolusi karakter bangsa - Memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya - Penanggulaan Kemiskinan
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Produktivitas rakyat dan daya saing 	<ul style="list-style-type: none"> - Invesatasi dan Pengembangan Usaha

Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 telah bersinergi dengan Prioritas RPJMN Tahun 2015-2019. Memperhatikan hal tersebut, perkuatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah percepatan pencapaian target MDGs, yang pada tahun 2016 akan bersalin menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sumatera Selatan masih perlu bekerja keras dan mencari terobosan-terobosan untuk mencapai beberapa target yang masih belum tercapai, diantaranya penuruanan target kemiskinan, Angka Partisipasi Murni SMP dan SMA, Kasus Kematian Ibu, Sanitasi Dasar dan Sumber Air Minum Layak. Walaupun indikator-indikator MDGs sudah menjadi target capaian dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018, namun demikian pengawalan pencapaian target tersebut –terutama capaian target yang masih lemah-- harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah provinsi dan dikawal pencapaiannya di Kabupaten/Kota.

Pendekatan pembangunan wilayah, yakni dengan memperhatikan keunggulan dan/atau kekhasan tiap-tiap daerah, sudah selayaknya didahulukan. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman bahwa majunya daerah Kabupaten/Kota secara agregat merupakan kemajuan Provinsi, sebagaimana juga kemajuan daerah Provinsi secara agregat merupakan kemajuan Nasional. Untuk memastikan terlaksananya konsistensi pelaksanaan RPJMD dalam Renstra SKPD yang terakumulasi secara

tahunan dalam RKPD, maka akan diterapkan e-Planning yang dimulai sejak penyusunan RKPD Tahun 2016.

4.1.1 Tema dan Sub Tema Pembangunan

Rancangan awal RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018, memuat VISI yang diusung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan terpilih yakni "**Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional**" dengan 4 (empat) MISI yakni:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (produktivitas)
2. Memantapkan stabilitas daerah (stabilitas).
3. Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan (ekuitabilitas).
4. Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan penanggulangan bencana (sustainabilitas).

Dalam rumusan sederhana, masa depan Sumatera Selatan yang diinginkan adalah dalam rangka mencapai kemakmuran daerah, kesejahteraan rakyat; dan Eksistensi Sumatera Selatan di lingkup nasional, regional dan internasional.

Upaya untuk mencapai Visi dan Misi Sumatera Selatan 2008-2013 dituangkan ke dalam perencanaan dan dua strategi, yakni strategi pembangunan dan strategi operasional. Strategi pembangunan merupakan sarana untuk menginformasikan dan mendapatkan komitmen dari para stakeholders (pemangku kepentingan) baik untuk kepentingan pelaksanaan program maupun pengawasan. Strategi pembangunan dimaksud adalah:

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (Produktivitas)

Pertumbuhan ekonomi perlu ditopang oleh pertumbuhan dari sisi pengeluaran dan sisi produksi yang seimbang agar peningkatan jumlah permintaan tidak diikuti tekanan inflasi yang tinggi.

- 1) Sisi Pengeluaran meliputi:

- a) Peningkatan daya beli masyarakat.
 - b) Peningkatan iklim investasi.
 - c) Peningkatan penyerapan anggaran dan perbaikan kualitas belanja.
 - d) Peningkatan daya saing ekspor.
- 2) Sisi produksi meliputi:
- a) Peningkatan nilai tambah produksi.
 - b) Peningkatan perdagangan antar wilayah
 - c) Peningkatan infrastruktur.

□Memantapkan Stabilitas Daerah (Stabilitas)

Untuk meningkatkan stabilitas daerah dilakukan 3 (tiga) aspek yaitu:

- 1) Stabilitas ekonomi dengan menjaga stabilitas harga dan nilai tukar.
- 2) Stabilitas sosial dengan mencegah konflik sosial, melalui:
 - a) Pelaksanaan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan keadilan;
 - b) Pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bernuansa membangun harmoni sosial.
- 3) Stabilitas politik
 - a) Memantapkan pertahanan dan keamanan
 - b) Memantapkan pelaksanaan Pemilu 2014 dan Pemilukada
 - c) Memfasilitasi peningkatan peran dan kapasitas forum-forum komunikasi seperti FKPD (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama).

□Meningkatkan Pemerataan Yang Berkeadilan (Ekuitabilitas).

Strategi meningkatkan pemerataan yang berkeadilan adalah:

- 1) Pemberdayaan melalui peningkatan partisipasi dan perluasan pemanfaat.
- 2) Peningkatan SDM yang berkualitas berbasis kompetensi.
- 3) Penanggulangan kemiskinan.

□ Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Yang Lestari Dan Penanggulangan Bencana (Sustainabilitas).

Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, sekaligus sebagai upaya penguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim. Hal ini diselenggarakan dengan:

- 1) Meningkatkan pengelolaan hutan dan lahan gambut secara lestari.
- 2) Mengendalikan kerusakan lingkungan dengan menurunkan, mengawasi dan mengendalikan pencemaran lingkungan dan sumber-sumbernya.
- 3) Meningkatkan pengelolaan daerah aliran sungai secara terpadu.
- 4) Meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana melalui kapasitas aparatur pemerintah dan menjamin berlangsungnya fungsi sistem peringatan dini.

Secara khusus, strategi operasional menuju masyarakat sejahtera meliputi 3 (tiga) hal pokok, yaitu Reorientasi, Reposisi, dan Revitalisasi.

■ **Reorientasi**, ditujukan untuk penguatan SDM aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional dan berjiwa entrepreneur menuju upaya menjamin pembiayaan pembangunan serta manajemen pembangunan yang diarahkan untuk memacu pemerataan melalui pertumbuhan bukan sebaliknya. Pertumbuhan adalah alat ukur yang mengindikasikan kemajuan pencapaian kesejahteraan, yang dalam bentuk sederhana berupa pengurangan jumlah penduduk miskin dan pengangguran.

■ **Reposisi**, dimaksudkan sebagai perubahan peran Pemerintah Provinsi dari pelaksana menjadi perencana, pelaksana dan pembiaya pembangunan sekaligus. Perubahan peran tersebut mengharuskan perbedaan pola kerja pimpinan puncak Pemerintah Provinsi dari mengatur ke dalam (inward looking) menjadi mencari ke luar (outward looking). Artinya, daerah tidak dapat sepenuhnya menggantungkan pada kekuatan sumber daya alam yang tersedia tetapi harus mampu membangun jejaring yang luas (pembiayaan, kerjasama, pasar, investasi).

□**Revitalisasi**, dimaksudkan untuk menguatkan kembali perencanaan jangka panjang dan lembaga perencana. Dalam satu daerah hanya ada satu rencana pembangunan induk yang menjadi acuan semua pihak terkait dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pembiayaan. Hal ini memungkinkan terjadinya keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga lebih efektif, efisien dan profesional.

Strategi operasional ini secara substansif tidaklah berbeda dengan tema pokok yang telah ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun sebelumnya (2008-2013). Namun, mengingat perwujudan masyarakat sejahtera merupakan upaya yang menuntut perubahan mendasar yang dramatis dan terus menerus, maka Tema Pokok ini patut dipertahankan sebagai strategi operasional yang harus ditingkatkan dan dipertajam pelaksanaannya. Artikulasi strategi operasional ini adalah pembangunan yang harus dilaksanakan secara Cerdas oleh orang yang Handal dan Amanah serta memegang Norma yang berlaku melalui Gerakan bersama menuju Ekonomi maju, yang dicapai dengan merubah haluan (Reorientasi), penempatan diri yang proporsional (Reposisi) dan bersandar pada kekuatan rencana yang baik (Revitalisasi).

Dengan melihat capaian pembangunan tahun 2008-2013 yang secara umum menunjukkan peningkatan yang signifikan, maka asumsi yang digunakan dalam penentuan sasaran pembangunan tahun 2013-2018 adalah terlaksananya program prioritas beserta penjabarannya secara tepat, tajam dan terkoordinasi. Memang sangat diperlukan kerja yang ekstra keras untuk mewujudkan berbagai kegiatan atau proyek strategis sebagai upaya terobosan untuk mempercepat sekaligus mendukung terlaksananya program prioritas secara komprehensif. Sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 adalah:

- ✓ Percepatan laju pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga sekitar 2-3 persen pada akhir 2018. Kombinasi percepatan pertumbuhan ekonomi dari berbagai kebijakan yang terarah diharapkan mempercepat penurunan angka kemiskinan menjadi sekitar 6-8 persen. Untuk itu pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh 6-7 persen per tahun dengan tingkat inflasi yang terkendali berkisar 3-4 persen.
- ✓ Sasaran di bidang pendidikan ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatkan mutu dan kompetensi pendidikan. Hal ini akan ditandai oleh meningkatnya lama sekolah, pendidikan lanjutan, berkembangnya pendidikan kejuruan.
- ✓ Sasaran di bidang kesehatan berupa peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, yang antara lain ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan.
- ✓ Dalam bidang pangan diproyeksikan meningkatnya ketahanan pangan yang ditandai oleh meningkatnya nilai tukar petani dan terjangkaunya harga pangan.
- ✓ Bidang infrastruktur akan ditandai antara lain oleh semakin mantapnya jalan provinsi, angkutan kereta api, sungai, laut dan udara yang lancar dan aman, terbangunnya kawasan Tanjung Api-Api, pasokan listrik dan air bersih, pengelolaan persampahan, sanitasi dan telekomunikasi.
- ✓ Di bidang energi perlu dicapai ketahanan energi melalui diversifikasi energi, penggunaan energi terbarukan, dan meningkatnya efisiensi konsumsi energi.
- ✓ Sasaran yang hendak dicapai di bidang lingkungan hidup adalah pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, perbaikan mutu lingkungan hidup, turunnya laju kerusakan

lingkungan, meningkatnya kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Di samping program prioritas baik yang tercantum dalam RPJMD maupun yang sudah berlangsung (seperti Sekolah Gratis, Berobat Gratis), terdapat beberapa kegiatan penting yang harus dilakukan persiapan dan/atau ditingkatkan kelangsungannya hingga tahun 2018, antara lain:

- a. Asian Games 2018
- b. Masjid Raya Sriwijaya
- c. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api
- d. Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Tanjung Carat
- e. Pembangunan Rel Kereta Api Tanjung Enim-Tanjung Api-Api
- f. Pembangunan Monorail Bandara SMB II-Jakabaring
- g. Pembangunan Jalan Tol Palembang-Inderalaya, Palembang-Betung, dan Palembang-Kayuagung
- h. Pembangunan Jembatan Musi IV, V, dan VI
- i. Pengembangan Kebun Raya Sriwijaya
- j. Pengembangan Pusat Penelitian Ikan Air Tawar Asia Tenggara
- k. Pembangunan Pusat Kerbau Rawa
- l. Penanggulangan Kebakaran Hutan
- m. Pengelolaan Dana Desa
- n. Lumbung Energi Nasional
- o. Lumbung Pangan

Hal yang sangat penting lainnya yang harus menjadi perhatian adalah pengawalan percepatan pencapaian target MDGs dan persiapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan melakukan perkuatan SDM dan database serta analisa percepatan apaian MDGs dan Pembangunan Berkelanjutan Sumatera Selatan melalui pembentuak Tim Klinik Perencanaan, Penganggaran dan Pemantauan Berpihak pada Masyarakat

Miskin (P3BM) dan penyusunan Roadmap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sumatera Selatan.

Selain itu, perlu juga diperhatikan bahwa dalam tahun 2015 ini akan berlangsung Pilkada di 7 (tujuh) Kabupaten (Musi Rawas, Ogan Komering Ulu, OKU Selatan, OKU Timur, Musi Rawas Utara, Penukal Abab Lematang Ilir). Oleh karenanya tahun 2016 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD ketujuh Kabupaten tersebut, sehingga penyusunan RKPD tahun 2016 yang dimulai prosesnya pada tahun 2015 ini tentu harus memperhatikan kesinambungan pembangunan kepada pemerintahan yang baru.

Dengan mengacu kepada visi, misi dan 8 (delapan) program prioritas yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018, tahap pembangunan tahun 2016 bertemakan 'Percepatan Pembangunan Infrastruktur'. Tahapan ini menitikberatkan pembangunan infrastruktur strategis terutama:

- a. Pembangunan jalan, pelabuhan, jaringan infrastruktur lainnya untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api
- b. Pemanfaatan hilirisasi industri pengolah hasil pertanian dan pertambangan
- c. Pengembangan pariwisata berstandar internasional.
- d. Peningkatan mutu sumber daya manusia
- e. Pengurangan pengangguran dan kemiskinan
- f. Pemberdayaan masyarakat
- g. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah pertanian
- h. Percepatan pembangunan perdesaan dan daerah tertinggal

Tahap pembangunan tahun 2016 terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal berikut:

- a. Meningkatnya mutu sumber daya manusia.
- b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- c. Terbangunnya infrastruktur strategis terutama pembangunan pelabuhan, jalan dan jaringan infrastruktur pendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api.

- d. Terbangunnya infrastruktur pendukung pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata.
- e. Meningkatnya produksi, produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata.
- f. Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan industri pengolah hasil pertanian dan pertambangan.
- g. Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) terutama dari meningkatnya akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran.
- h. Berkembangnya pusat-pusat inovasi dan bisnis inovatif dalam menghasilkan keunggulan daerah.
- i. Meningkatnya kerjasama riset unggulan.

Hal-hal yang menjadi fokus pembangunan tahun 2016 tersebut tentunya merupakan kelanjutan dari pembangunan tahun 2014 dan juga sedang dilaksanakan dalam tahun 2015 ini. Oleh karenanya menjadi sangat penting untuk mengkaji capaian tahun 2014 yang baru saja kita akhiri, namun karena data capaiannya seringkali belum tersedia/terukur maka data capaian tahun 2013 dapat digunakan sebagai tolok ukur. Adapun data capaian tahun 2015 pastilah belum dapat digunakan mengingat program dan kegiatan baru akan dimulai. Namun asumsi target yang realistik dan objektif untuk capaian tahun 2015 dapat dipakai. Argumen di atas seharusnya dapat membantu SKPD menyusun usulan program dan kegiatan yang realistik, objektif, terukur, dan secara optimal mencapai keseluruhan fokus pembangunan tahun 2016.

Lebih daripada itu, sinergi yang maksimal dengan APBN diharapkan tercapai terutama dalam berbagai bidang sebagaimana diamanatkan oleh Presiden RI dalam Musrenbangnas RPJMN tanggal 18 Desember 2014 yang lalu, yakni:

1. Bidang Pangan, yang menargetkan tercapainya swasembada beras dalam 3 (tiga) tahun. Tahun berikutnya dilanjutkan dengan fokus pada komoditi gula dan jagung. Membangun 49 waduk dalam 5 (lima)

tahun yang dimulai pada tahun 2015 dengan membangun 13 waduk untuk mencapai ketersediaan irigasi yang mampu mengairi 1 juta ha.

2. Bidang Energi, dengan mendahulukan penyederhanaan perijinan untuk memangkas berbagai hambatan regulasi. Target 5 (lima) tahun adalah tersedianya energi listrik sebesar 35.000 MW.
3. Bidang Kemaritiman, dengan membangun 24 pelabuhan sekaligus meningkatkan kapasitas pelabuhan yang sudah ada. Mengembangkan sentra perikanan dan membasmi 'illegal fishing' untuk meningkatkan pendapatan nasional. Membangun toll laut yang dimulai dengan ketersediaan infrastruktur pelabuhan, yang untuk ini mutlak perlu suatu kawasan pelabuhan yang luas.
4. Bidang Pariwisata, dengan menekankan upaya mengatasi masalah yang selama ini berpengaruh besar dalam peningkatan wisatawan. Permasalahan dimaksud meliputi promosi, kemasan produk, dan pembangunan karakter pariwisata yang menyangkut budaya masyarakat.
5. Bidang Pertumbuhan Ekonomi, yang menekankan pada pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi dengan meningkatkan nilai tambah produk. Untuk itu perlu penyederhanaan berbagai aturan yang ada dan meningkatkan peran PTSP di daerah.
6. Bidang Infrastruktur, yang akan memulai pembangunan Trans Sumatera Railway dan Toll Sumatera pada tahun 2015. Dibutuhkan dukungan daerah untuk proses pembebasan lahan.
7. Bidang Sumber Daya Manusia, dengan penegasan pada perubahan karakter, nilai dan pola pikir, terutama di lingkungan aparat pemerintah atau birokrasi. Bahaya Narkoba merupakan lampu merah yang membuat Indonesia sudah masuk pada tahap krisis narkoba. Untuk itu pemerintah tidak akan memberikan grasi kepada penderita narkoba yang dihukum penjara.

Menuju kepada apa yang diinginkan baik dalam RPJMN maupun RPJMD, beberapa evaluasi terhadap pembangunan di tahun 2014 yang baru saja berakhir dan tahun 2015 yang baru dimulai menjadi pertimbangan yang sangat penting. Berbagai event olahraga berskala internasional yang telah diselenggarakan di tahun 2014 menjadi moment yang sangat penting untuk semakin memperkenalkan Sumatera Selatan kepada dunia luar, menggiatkan aktivitas perekonomian yang semakin tinggi, terbukti dengan meningkatnya kunjungan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas maupun profesi tertentu. Hal ini tentu saja menjadi harapan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.

Namun demikian, masih ada sisi lain yang memerlukan kerja ekstra keras, tidak hanya pemerintah akan tetapi seluruh pemangku kepentingan di Sumatera Selatan, yakni perlambatan penurunan angka kemiskinan. Dari analisis diperoleh data bahwa angka kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dari perkotaan. Hal ini disebabkan sebagian masyarakat Sumatera Selatan bermata pencaharian sebagai petani, dan sebagaimana kita sadari bahwa meningkatnya kemiskinan di perdesaan dipengaruhi pula oleh turunnya harga karet dan sawit di pasar dunia yang berpengaruh pada pendapatan petani. Oleh karenanya mutlak perlu penajaman pada berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan.

UMKM harus pula menjadi perhatian penting karena memiliki kemampuan bertahan yang sangat tinggi terhadap fluktuatif perekonomian di Indonesia, sehingga perlu mendapatkan perkuatan. Hilirisasi produk-produk unggulan Sumatera Selatan juga dapat dimulai dengan keberadaan UMKM. Namun demikian harus dijamin pula ketersediaan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat pertumbuhan,

dan percepatan terhadap tersedianya outlet yang representatif di Kawasan Tanjung Api-Api bersama dengan infrastruktur pendukungnya.

Evaluasi terhadap perkembangan pembangunan di Sumatera Selatan mewujudkan pada analisa bahwa program dan kegiatan harus dipertajam dan lebih fokus untuk mencapai sasarannya mengingat alokasi anggaran yang terbatas, sehingga perlu dibarengi dengan analisis yang lebih dalam terhadap permasalahan yang dihadapi provinsi ini sehingga tepat sasaran dan lokasi, sekaligus untuk meningkatkan sinergitas antara provinsi dan kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota.

Beberapa percepatan dan penajaman program dan kegiatan dalam tahun 2016 mendatang perlu dilakukan, yang bertujuan untuk lebih meningkatkan sinergi rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional, dibarengi dengan memperhatikan capaian pembangunan daerah hingga akhir tahun 2014. Hal ini dimaksudkan pula untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan di 2 (dua) tahun terakhir berikutnya (2017-2018) untuk mencapai terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju, dan Berdaya Saing Internasional.

Beberapa program dan kegiatan yang memerlukan percepatan:

- a) Penyelesaian proyek-proyek Tahun Jamak
- b) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api
- c) Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Tanjung Carat
- d) Pembangunan Rel Kereta Api Tanjung Enim-Tanjung Api-Api
- e) Pembangunan Monorail Bandara SMB II-Jakabaring
- f) Pembangunan Jalan Tol Palembang-Inderalaya, Palembang-Betung, dan Palembang-Kayuagung
- g) Pembangunan Jembatan Musi IV, V, dan VI

Beberapa program dan kegiatan yang memerlukan penajaman:

- a) Program dan kegiatan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, seperti dengan semakin meningkatnya peran aktif Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) daerah agar program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran, tepat lokasi.
- b) Program dan kegiatan untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan dan distribusi produksi sumber daya alam.
- c) Program dan kegiatan penguatan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian beserta upaya hilirisasinya, sektor pariwisata, dan sektor industri.

Secara rinci pencapaian visi dan misi pembangunan sumatera selatan periode 2013-2018 digambarkan dalam matrik berikut ini

**Tabel 4.2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan
Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan**

**HALAMAN INI SENGAJA DI KOSONGKAN
Untuk table 4.2 (1)**

**HALAMANINI SENGAJA DI KOSONGKAN
Untuk table 4.2 (2)**

HALAMANINI SENGAJA DI KOSONGKAN
Untuk table 4.2 (3)

**HALAMAN INI SENGAJA DI KOSONGKAN
Untuk table 4.2 (4)**

**HALAMAN INI SENGAJA DI KOSONGKAN
Untuk table 4.2 (5)**

HALAMAN INI SENGAJA DI KOSONGKAN
Untuk table 4.2 (6)

HALAMAN INI SENGAJA DI KOSONGKAN
Untuk table 4.2 (7)

HALAMANINI SENGAJA DI KOSONGKAN
Untuk table 4.2 (8)

HALAMANINI SENGAJA DI KOSONGKAN
Untuk table 4.2 (9)

HALAMANINI SENGAJA DI KOSONGKAN
Untuk table 4.2 (10)

HALAMAN INI SENGAJA DI KOSONGKAN
Untuk table 4.2 (11)

HALAMANINI SENGAJA DI KOSONGKAN
Untuk table 4.2 (12)

HALAMANINI SENGAJA DI KOSONGKAN
Untuk table 4.2 (12)

4.2. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Sumatera Selatan

4.2.1 Tahapan Pembangunan Sumatera Selatan

Sesuai dengan RPJMD Tahun 2013-2018, Tahapan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Selatan, sudah ditentukan sedemikian rupa sehingga sasaran yang diharapkan tahapan dapat dicapai seoptimal mungkin. Tahapan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan seperti digambarkan pada gambar berikut ini :

Gambar 4.1. Tahapan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2014-2018



Tahap pembangunan 2016 menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur strategis terutama pembangunan jalan, pelabuhan, jaringan infrastruktur lainnya untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api; pemantapan hilirisasi industri pengolah hasil dan pertanian dan pertambangan; pengembangan pariwisata berstandar

internasional. Selain itu, tahap ini tetap mengutamakan peningkatan mutu sumber daya manusia, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produktivitas dan nilai tambah pertanian, serta percepatan pembangunan perdesaan dan daerah tertinggal.

Tahap pembangunan 2016 terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal berikut:

- (1) Meningkatnya mutu sumber daya manusia;
- (2) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- (3) Terbangunnya infrastruktur strategis terutama pembangunan pelabuhan, jalan dan jaringan infrastruktur pendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api;
- (4) Terbangunnya infrastruktur pendukung pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata;
- (5) Meningkatnya produksi, produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata;
- (6) Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan industri pengolah hasil pertanian dan pertambangan;
- (7) Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) terutama dari meningkatnya akses permodalan, manajamen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran;
- (8) Berkembangnya pusat-pusat inovasi dan bisnis inovatif dalam menghasilkan keunggulan daerah;
- (9) Meningkatnya kerjasama riset unggulan;

4.2.2 Prioritas Pembangunan Daerah 2016

Dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Sumatera Selatan, prioritas

pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

- (1) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- (2) Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya
- (3) Penanggulangan Kemiskinan
- (4) Pembangunan Pertanian
- (5) Infrastruktur dan Energi
- (6) Investasi dan Pengembangan Usaha
- (7) Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Bencana
- (8) Pengembangan Wilayah.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab terdahulu keterkaitan antar dokumen perencanaan menjadi sangat penting untuk menjaga kontinuitas dan konsistensi pembangunan. Pola pikir keterkaitan perencanaan pembangunan seperti digambarkan pada gambar 4.2 berikut ini :

Gambar 4.2 Pola Pikir Perencanaan Pembangunan tahun 2016



Keterkaitan Masalah daerah dan isu penting dengan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016, seperti digambarkan pada tabel berikut ini

Tabel 4.3. Keterkaitan antara isu penting dan masalah mendesak dengan arah kebijakan pembangunan 2016

No.	Isu Penting dan Masalah Mendesak			Arah Kebijakan Pembangunan 2016
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Lingkungan Eksternal Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketimpangan antara kondisi jalan nasional dengan daerah yang berkontribusi pada kondisi waktu dan biaya logistik. • Angka Kekurangan Rumah (<i>Housing Backlog</i>) masih tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketimpangan kondisi jalan mantap dan infrastruktur lainnya yang menghubungkan antar wilayah, pusat pertanian, pusat pertambangan, pusat perdagangan dan objek wisata • Rendahnya akses air bersih dan sanitasi • Belum terpenuhinya infrastruktur strategis di KEK 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya lalu lintas kendaraan dengan tonase tinggi pengangkut batubara dan kayu industri 	<p><i>Infrastruktur dan Energi :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi, sumber air bersih, sanitasi lingkungan b. Pembangunan jalur KA c. Pembangunan Pelabuhan d. Pengembangan Bandara e. Pembangunan infrastruktur pendukung KEK TAA
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Gini Rasio. • Masih tingginya jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa 	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan tingkat kemiskinan melambat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Turunnya harga komoditas pertanian unggulan di tingkat dunia (karet, kopi, kelapa sawit) 	<p><i>Penanggulangan Kemiskinan :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Efisiensi dan Efektifitas Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan berbasis data terpadu b. Pemerataan peningkatan pendapatan masyarakat <p><i>Pembangunan Pertanian :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tukar Petani. b. Ekstensifikasi pertanian

No.	Isu Penting dan Masalah Mendesak			Arah Kebijakan Pembangunan 2016
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Lingkungan Eksternal Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				dan diversifikasi
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi tidak menyerap tenaga kerja sesuai yang dibutuhkan. • Rendahnya kualitas pekerja menyebabkan produktivitas tenaga kerja rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi melambat • Belum tumbuhnya industri hilir berbasis hasil pertanian • Belum berkembang ya pusat-pusat inovasi produk hilirisasi • Belum berkembang ya kerjasama riset unggulan untuk hilirisasi • Belum beroperasinya KEK Tanjung Api-API 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan harga komoditas unggulan terhadap fluktuasi, pasar internasional. • Faktor globalisasi (Masyarakat Ekonomi Asean, CAFTA) 	<p><i>Investasi dan Pengembangan Usaha :</i></p> <p>a. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah (hilirisasi) dan Pendapatan Industri Pengolah Hasil Pertanian dan Pertambangan</p> <p>b. Pengembangan UMKMK Dari Meningkatnya Akses Permodalan, Manajemen Usaha, Produksi, dan Informasi Pemasaran</p> <p>c. Kerjasama unggulan optimalisasi pusat inovasi</p> <p><i>Pengembangan Wilayah :</i></p> <p>b. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan : KEK, Pusat Pengembangan kerbau rawa, Agrotechno Park, Science Techno Park Kebun Raya Sriwijaya, Palembang Metropolitan</p>
4.	<ul style="list-style-type: none"> • Kesenjangan Partisipasi Pendidikan. • Kualitas Guru Rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya APK SMP dan SMA • Belum 	<ul style="list-style-type: none"> • Tantangan global di era MEA menuntut SDM berkualitas tinggi agar 	<p><i>Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya :</i></p> <p>a. Meningkatnya Mutu dan distribusi Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kesehatan</p>

No.	Isu Penting dan Masalah Mendesak			Arah Kebijakan Pembangunan 2016
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Lingkungan Eksternal Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		meratanya distribusi guru di daerah	dapat bersaing	b. Meningkatkan akses pendidikan
5.	<ul style="list-style-type: none"> AKI dan AKB masih tinggi. Balita <i>stunting</i> hampir terjadi terjedi diseluruh wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> AKI dan AKB masih tinggi Balita <i>stunting</i> hampir terjadi di seluruh wilayah Ketersediaan dan Kualitas tenaga kesehatan masih terbatas Distribusi SDM Kesehatan belum merata Masih rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan terutama bagi daerah terpencil dan perairan 	<ul style="list-style-type: none"> Faktor cuaca ekstrim berakibat pada penyakit musiman Meningkatnya polusi lingkungan 	<p><i>Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya :</i></p> <p>a. Meningkatnya Mutu dan distribusi Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kesehatan</p> <p>c. Meningkatkan akses kesehatan</p>
6.	<ul style="list-style-type: none"> Penyusutan lahan sawah mengancam produksi pangan. Jaringan irigasi dan waduk masih banyak yang perlu direhabilitasi 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pengelolaan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan Masih tingginya konversi lahan pertanian Jaringan irigasi masih 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan pertanian kurang memberikan nilai keekonomian dibandingkan dengan sektor lain Adanya impor bahan pangan menyebabkan produk lokal 	<p><i>Pembangunan Pertanian :</i></p> <p>a. Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tukar Petani.</p> <p>b. Ekstensifikasi pertanian dan diversifikasi</p> <p><i>Infrastruktur dan Energi :</i></p> <p>a. Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi, sumber air bersih, sanitasi lingkungan</p>

No.	Isu Penting dan Masalah Mendesak			Arah Kebijakan Pembangunan 2016
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Lingkungan Eksternal Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		banyak yang rusak	kalah bersaing sehingga tidak memberikan ekonomi yang signifikan terhadap petani	
7.	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pengelolaan lingkungan dan penanggulangan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan DAS belum optimal, Tingginya kasus kebakaran hutan dan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> Cuaca ekstrem 	<p><i>Pengelolaan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan b. Peningkatan daya dukung DAS dan pengelolaan Terpadu c. Menurunkan emisi karbon
8.	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas tata kelola pemerintahan belum memberikan kontribusi yang optimal dalam mendukung pembangunan dan peningkatan daya saing nasional 	<ul style="list-style-type: none"> Opini BPK masih WDP Masih rendahnya jumlah SKPD dengan status laporan kinerja baik Bertambahnya kewenangan provinsi sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya tuntutan penerapan <i>good and clean government</i> 	<p><i>Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kamtibmas :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Reformasi Birokrasi b. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat c. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah <p>Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah</p>
9.	<ul style="list-style-type: none"> Masih tingginya ketimpangan wilayah. Ketimpangan persebaran penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> Konektivitas antar wilayah belum terintegrasi secara optimal Ketimpangan persebaran penduduk Perizinan 	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi geografis Pusat-pusat pertumbuhan belum merata 	<p><i>Infrastruktur dan Energi :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi, sumber air bersih, sanitasi lingkungan <p><i>Pengembangan Wilayah :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kerjasama antar wilayah perbatasan b. Pengembangan pusat-

No.	Isu Penting dan Masalah Mendesak			Arah Kebijakan Pembangunan 2016
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Lingkungan Eksternal Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		usaha terkait daerah yang berbatasan kurang terkoordinasi <ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama pembangunan daerah di wilayah perbatasan belum optimal • Pengendalian dan pemanfaatan ruang belum optimal 		pusat pertumbuhan : KEK, Pusat Pengembangan kerbau rawa, Agrotechno Park, Science Techno Park Kebun Raya Sriwijaya, Palembang Metropolitan
10.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketimpangan rasio elektrifikasi wilayah, Konsumsi dan Produksi listrik masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi Sumsel sebagai Lumbung Energi Nasional belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Harga minera yang tergantung harga internasional yang sangat fluktuatif 	<i>Infrastruktur dan Energi :</i> f. Pembangunan pembangkit listrik

Sementara itu sinkronisasi Prioritas RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dengan Arah Kebijakan Pembangunan tahun 2016, seperti tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel. 4.4 Tabel Prioritas RPJM dan Prioritas RKPD 2016

No	PRIORITAS RPJMD	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kamtibmas	P: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kamtibmas : Ak. 1. Reformasi Birokrasi 2. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat 3. Meningkatkan pengelolaan

		<p>keuangan daerah</p> <p>4. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah</p>
2	Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya	<p>P : Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya :</p> <p>Ak.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Mutu dan distribusi Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kesehatan 2. Meningkatkan akses pendidikan 3. Meningkatkan akses kesehatan
3	Penanggulangan Kemiskinan	<p>P : Penanggulangan Kemiskinan :</p> <p>Ak.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi dan Efektifitas Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 2. Pemerataan peningkatan pendapatan masyarakat
4	Pembangunan Pertanian	<p>P : Pembangunan Pertanian</p> <p>Ak.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tukar Petani. 2. Ekstensifikasi pertanian dan diversifikasi
5	Infrastruktur dan Energi	<p>P : Infrastruktur dan Energi :</p> <p>Ak.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi, sumber air bersih, sanitasi lingkungan 2. Pembangunan jalur KA 3. Pembangunan Pelabuhan 4. Pengembangan Bandara 5. Pembangunan infrastruktur pendukung KEK TAA 6. Pembangunan pembangkit listrik
6	Investasi dan Pengembangan Usaha	<p>P: Investasi dan Pengembangan Usaha:</p> <p>Ak.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah (hilirisasi) dan Pendapatan Industri Pengolah Hasil Pertanian dan Pertambangan serta Pariwisata 2. Pengembangan UMKMK Terutama Dari Meningkatnya Akses Permodalan, Manajemen Usaha, Teknologi Produksi, Informasi dan Pemasaran 3. Kerjasama riset unggulan dan optimalisasi pusat inovasi

7	Pengelolaan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Pengelolaan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana : Ak. 1. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan 2. Peningkatan daya dukung DAS dan pengelolaan DAS Terpadu 3. Menurunkan emisi karbon
8	Pengembangan Wilayah	Pengembangan Wilayah : Ak. 1. Peningkatan kerjasama antar wilayah perbatasan 2. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan : KEK, Pusat Pengembangan kerbau rawa, Agrotechno Park, Science Techno Park Kebun Raya Sriwijaya, Palembang Metropolitan

4.2.2.1 PRIORITAS 1: TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Prioritas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Kemanan dan Ketertiban Masyarakat ini diarahkan untuk :

- (1) Mewujudkan pemerintahan Sumatera Selatan yang professional, semangat kewirausahaan, disiplin dan solid PEDE (*Professional-Entrepreneurship-Discipline-Entity*) dengan reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan prima dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik, terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, taat kepada hukum dan transparan;
- (2) Mewujudkan ekonomi Sumatera Selatan yang kuat dengan optimalisasi penerimaan daerah, efisiensi belanja, peningkatan jejaring ekonomi, peningkatan pelayanan publik, serta peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- (3) Mengembangkan penyediaan data dan informasi pembangunan yang baik berbasis kepada ICT (*Information and Communication Technology*);

- (4) Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pembinaan (preemtif), pencegahan (preventif) dan penindakan (korektif) yang didukung dengan pendekatan terpadu melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan Bakorinda;

Untuk mencapai taget prioritas ini, Arah Kebijakan yang yang dilaksanakan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Melanjutkan Agenda ***Reformasi Birokrasi***, yaitu diantaranya :

- ✓ Memantapkan pelaksanaan road map dan rencana aksi Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Selatan dengan meningkatkan pelayanan publik seperti dibidang perizinan melalui pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), peningkatan disiplin dan kinerja aparatur melalui penerapan penghargaan dan sanksi pada Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pegawai Pemda Sumsel.
- ✓ Menempatkan perencanaan sebagai fungsi utama manajemen pemerintahan daerah untuk mewujudkan *good governance*

- b. ***Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat***, yaitu diantaranya :

- ✓ Melanjutkan pelaksanaan dan pelaporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
- ✓ Penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2015 dan 2016 dengan prioritas pada penyiapan data Agregat kependudukan per Kecamatan, mengalokasikan dana hibah dari Pemerintah Provinsi kepada KPU, Bawaslu Provinsi sesuai dengan kebutuhan peraturan yang berlaku.
- ✓ Meningkatkan kemitraan dengan Ormas, aparat kemanan, tokoh masyarakat, tokoh agama melalui Forum-forum seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

- ✓ Melakukan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban lingkungan
- c. ***Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah***, yaitu diantaranya :
- ✓ Membangun komitmen anti korupsi di seluruh lini di Provinsi Sumatera Selatan melalui penerapan zona integritas, unit pengendalian gratifikasi dan *whistle blower system*;
 - ✓ Meningkatkan pengendalian atas area potensi/rawan korupsi, meliputi; (a) Penyusunan program; (b) perizinan; (c) pajak dan retribusi daerah; (d) pengadaan barang dan jasa; dan (e) belanja hibah dan bantuan sosial;
 - ✓ Mengimplementasikan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam pengelolaan pembangunan tahun 2016
 - ✓ Mengoptimalkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- d. ***Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah***, yaitu diantaranya :
- ✓ Meningkatkan opini BPK hasil Audit LKPD tahun 2016 dengan mentargetkan Laporan APBD 2015 dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
 - ✓ Mendorong SKPD Provinsi untuk menyusun laporan LAKIP dengan laporan kinerja baik.

4.2.2.2 PRORITAS 2: PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN SOSIAL BUDAYA

Prioritas Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya diharapkan menjadikan SDM Provinsi Sumatera Selatan berkualitas berbasis kompetensi melalui sekolah dan berobat gratis; terbangunnya sarana dan prasarana pendidikan; Meningkatnya layanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu dengan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan seperti Rumah Sakit Pratama di setiap kabupaten dan Rumah Sakit Provinsi; Meningkatnya kualitas guru layanan dan pengelolaan sekolah; Meningkatnya penyediaan pemenuhan tenaga medis; berkembangnya seni budaya masyarakat Sumatera Selatan; Meningkatnya pariwisata melalui perbaikan akses sarana dan prasarana tujuan wisata; Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat adat; meningkatnya pembinaan pemuda dan olah raga dengan pengembangan institut olah raga nasional; terkendalinya jumlah penduduk melalui Keluarga Berencana

Untuk mencapai taget prioritas maka beberapa hal yang akan dilaksanakan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

*a. **Meningkatnya Mutu dan Distribusi Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kesehatan***

- ✓ Meningkatkan APK SMP/MTs, SMA/MA dan Rata-rata Lama Sekolah (RRLS) melalui :
 - Peningkatan manajemen penyelenggaran Program Sekolah Gratis dengan mereview PERDA Sekolah Gratis Program Sekolah Gratis terintegrasi melalui program lainnya seperti Program Orang Tua Asuh
 - Peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidik melalui pemetaan sarana dan prasarana distribusi guru dan guru mata pelajaran

- ✓ Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan melalui sertifikasi, pelatihan tenaga kesehatan

b. *Meningkatnya Akses Pendidikan*

- ✓ Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
- ✓ Meningkatkan APK Perguruan Tinggi melalui Program Kuliah Gratis
- ✓ Meningkatkan Angka Melek Huruf melalui Gerakan Bersama Pemberantasan Buta Huruf yang terintegrasi dengan Pemerintahan Desa, dan melalui Program Kejar Paket A.
- ✓ Melakukan inventarisir personel Guru SMA/SMK Kabupaten/Kota dalam rangka penyelesaian inventarisir Personel, Pendanaan, Prasarana dan sarana serta Dokumen (P3D) sebagaimana UU.No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

c. *Meningkatnya Akses Kesehatan*

- ✓ Pembangunan Rumah Sakit Provinsi dan Rumah Sakit Pratama.
- ✓ Pengadaan alat kesehatan dan obat obatan untuk Rumah sakit di Kabupaten Kota sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal
- ✓ Meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui kegiatan gerakan bersama penurunan angka kematian ibu dan bayi.
- ✓ Meningkatkan gizi anak melalui pengadaan makanan tambahan.

Selain hal tersebut di atas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dalam rangka mencapai prioritas Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya, juga mempertimbangkan beberapa yang terkait dengan pencapaian Program-program yang mendukung pengurangan pengangguran dan perluasan kesempatan kerja (**Pro Job**). Untuk itu akan dilaksanakan hal-hal di Bidang Ketenagakerjaan, diantaranya yaitu :

- Meningkatkan Kesempatan kerja melalui penyelenggaraan Pameran kerja (Job Fair), penyelenggaran Padat Karya Produktif, dan perluasan Jiwa Kewirausahaan

- Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka lulusan SMA sederajat dan diatasnya serta meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja melalui optimalisasi penyelenggaran Pelatihan dan revitalisasi BLK yaitu Rehabilitasi, peningkatan Sarana prasana Balai Latihan Kerja, peningkatan instruktur BLK.

Sementara terkait dengan kependudukan, pada tahun 2020 penduduk Sumatera Selatan diproyeksikan akan mencapai 8,57 juta (BPS Sumsel, 2013). Pertumbuhan rata-rata per tahun penduduk Sumatera Selatan pada periode 2010-2020 menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan. Walaupun demikian pertumbuhan penduduk ini tetap harus diantisipasi karena penduduk merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Untuk itulah dalam bidang Kependudukan beberapa hal yang akan dilaksanakan diantaranya :

- Menurunkan Total Fertility Rate melalui Pogram Promosi Kesehatan, sosialisasi dan penyuluhan KB, pencegahan pernikahan dini
- Peningkatan Rasio Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB, yaitu pelayanan KB di Puskesmas, penyediaan alkon
- Pemetaan SDM Sumatera Selatan dengan menyusun Review Grand Design Kependudukan dalam rangka menyongsong persiapan Sumatera Selatan menuju Bonus Demografi Tahun 2020
- Penanganan lansia Sumatera Selatan yang jumlahnya cenderung meningkat dengan Program PMKS bagi Lansia, peningkatan kualitas panti lansia, pelatihan deteksi dasar dan stimulus intelejensi pada lansia, pembinaan dan pemberdayaan posyandu lansia.

Di sisi lain pembangunan bukan hanya dalam arti pembangunan fisik belaka, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tetap memperhatikan dan mengutamakan Bidang Kebudayaan, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal yang akan dilaksanakan di tahun 2016 diantaranya adalah :

- Penanganan budaya dan kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan

- Pelestarian Budaya Sumatera Selatan melalui penyelenggaraan festival seni dan budaya.

4.2.2.3 PRIORITAS 3: PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Penanggulangan kemiskinan diprovinis Sumatera Selatan, secara umum dilaksanakan dengan melihat siklus kehidupan manusia yaitu :

- (1) Masa kehamilan, anak usia dini melalui: persalinan gratis, pemberian nutrisi, makanan bergizi, imunisasi dan berobat gratis;
- (2) Anak usia sekolah: berobat gratis, sekolah gratis, rehabilitasi/ pendampingan terhadap anak yang bermasalah hukum, bantuan sosial anak terlantar;
- (3) Usia Remaja: berobat dan sekolah gratis, beasiswa pendidikan tinggi, pelatihan wirausaha dan ketrampilan; serta pencegahan narkoba.
- (4) Usia pekerja dewasa: berobat gratis, jaminan ketenagakerjaan, penetapan upah minimum provinsi, penyediaan lapangan kerja layak, dan bantuan modal usaha, bantuan hukum gratis, sertifikasi lahan gratis dan bantuan hukum murah.
- (5) Lanjut usia: berobat gratis dan bantuan sosial untuk lansia.

Untuk mencapai taget prioritas tahun 2016 maka beberapa hal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. ***Meningkatnya efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan***
 - ✓ Penajaman lokasi kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan
 - ✓ Penajaman dalam menetapkan target penurunan kemiskinan baik secara persentase maupun jumlah penduduk di Provinsi dan Kabupaten Kota melalui by name, by address dan by visual
 - ✓ Peningkatan kinerja sektor-sektor yang terkait dengan penurunan angka kemiskinan (Pertanian, industri, manufaktur, bangunan)

- ✓ Menpertajam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Sumatera Selatan.
- ✓ Mendorong peningkatan kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota melalui pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis, asistensi kepada TKPK kabupaten Kota.

b. ***Pemerataan Peningkatan Pendapatan Masyarakat***

- ✓ Mengendalikan laju inflasi melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kab/Kota.

4.2.2.4 PRIORITAS 4: PEMBANGUNAN PERTANIAN

Pembangunan Pertanian di Sumatera Selatan tahun 2016 diarahkan untuk dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut :

a. ***Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tukar Petani***

- ✓ Memperbaiki dan meningkatkan kapasitas infrastruktur jaringan irigasi, jalan dan logistik;
- ✓ Memperluas dan meningkatkan akses untuk memperoleh pembiayaan pertanian dalam meningkatkan produksi dan mutu hasil pertanian dan jaminan petani dalam menghadapi resiko kegagalan panen karena adanya dampak perubahan iklim (bencana);
- ✓ Meningkatkan kapasitas dan penerapan teknologi pertanian dari pra-panen, pascapanen hingga distribusi hasil pertanian dengan dukungan tenaga penyuluhan dan pendamping, serta jaringan kemitraan dengan usaha besar, BUMN, untuk mendapatkan nilai tambah berbasis agroindustri serta perluasan pasar nasional dan internasional;

- ✓ Meningkatkan produktivitas pertanian dengan mekanisasi pembangunan pertanian sesuai dengan skala ekonomi, teknis dan lingkungan menurut kondisi daerah;
- ✓ Mengembangkan integrasi sapi sawit.

b. *Ekstensifikasi Pertanian dan Diversifikasi*

- ✓ Mengoptimalkan pengembangan lahan tidur atau lahan terlantar, lahan gambut dan daerah pasang surut untuk produksi pertanian;
- Mengembangkan integrasi sapi sawit.

4.2.2.5 PRIORITAS 5: INFRASTRUKTUR DAN ENERGI

Untuk mencapai taget prioritas maka beberapa hal yang akan dilaksanakan tahun 2016 diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. ***Pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi, sumber air bersih, sanitasi lingkungan***
- b. ***Pembangunan Jalur Kereta Api***
- c. ***Pembangunan Pelabuhan***
- d. ***Pengembangan Bandara***
- e. ***Pembangunan Infrastruktur Pendukung KEK TAA***
- f. ***Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik***

Ke-enam Arah Kebijakan tahun 2016 untuk prioritas Infrastruktur dan Energi tersebut di atas sudah sejalan dengan arah RPJMD Provinsi Sumatera Selatan yaitu diantaranya :

- (1) Membangun transportasi darat dan peningkatan jalan dan jembatan strategis, jalan tol sebagai bagian dari *Trans Sumatera Highway*, dan jalan-jalan akses pedesaan;
- (2) Mempercepat pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api;

- (3) Mengembangkan jalur kereta api *Trans Sumatera Railway*, kereta api perkotaan dan jalur kereta api Tanjung Enim-Tanjung Api-Api;
- (4) Mengembangkan dan meningkatkan transportasi udara;
- (5) Membangun transportasi khusus untuk keperluan pengangkutan komoditi baik jalan, kereta api ataupun pelabuhan/dermaga;
- (6) Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pertanian;
- (7) Mengembangkan sumber daya air dengan perluasan jaringan irigasi, transportasi air, serta sarana dan prasarana pengendalian banjir;
- (8) Meningkatkan kapasitas dan produksi energi listrik dari pemanfaatan berbagai sumber energi daerah untuk melayani kebutuhan dasar, komersial, dan pemasokan regional (luar daerah) secara berkelanjutan;
- (9) Mendayagunakan sumberdaya pertambangan dan energi (fosil dan terbarukan) dengan cerdas dan arif demi kepentingan masyarakat luas;
- (10) Mengembangkan infrastruktur dasar permukiman, air bersih, sanitasi, jalan lingkungan dan pengelolaan sampah;

Rencana utama terkait pengembangan Energi adalah upaya untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur yang berkaitan dengan energi seperti kelistrikan serta pemanfaatan Energi baru terbarukan di provinsi se Sumatera Selatan secara optimal. Program dan kegiatan dalam bidang ini berfokus pada percepatan realisasi pembangunan infrastruktur strategis pendukungnya. Agenda ini akan dipertajam dengan program prioritas yang terindikasi sebagai berikut:

- ✓ Program Pengusahaan Pertambangan dan Peningkatan Produksi Batubara;

- ✓ Program Pengembangan dan Pemanfaatan Geologi ESDM;
- ✓ Program Pemanfaatan dan Pengusahaan Migas; dan
- ✓ Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru untuk Kebutuhan Listrik bagi Masyarakat;

PRIORITAS 6: INVESTASI DAN PENGEMBANGAN USAHA

Isu utama pada Investasi dan pengembangan usaha adalah bagaimana Sumatera Selatan dalam rangka menggaet Investasi baik yang berasal dari Luar Negeri maupun dari Dalam Negeri, terutama dalam upaya pengembangan KEK Tanjung Api-Api. Selain itu juga dalam rangka pengembangan wirau usaha baru baik formal maupun non formal yang selama ini secara tidak disadari wirausaha terutama UMKMK merupakan tulang punggung perekonomian Nasional. Dalam Kerangka Makro (RPJMD), upaya yang telah rencanakan adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi dan industri kecil dan menengah khususnya industri rumah tangga dan kegiatan produktif perempuan melalui bantuan permodalan, dana bergulir, subsidi bunga pinjaman, dan pemasaran;
- (2) Membangun kemitraan strategis antara koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) dengan usaha besar;
- (3) Meningkatkan hilirisasi produk pertanian dan pertambangan melalui pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing, penciptaan nilai tambah, serta penguatan kemitraan hulu-hilir dan industri kecil, menengah dan besar;
- (4) Mendorong pembentukan klaster industri karet, kelapa sawit dan kopi melalui pengembangan Kawasan Perhatian Industri (KPI): Muara Enim, Banyuasin, Palembang dan Ogan Komering Ilir sebagai klaster industri karet, kelapa sawit dan kopi;

- (5) Membangun dan memperkuat jejaring kerjasama ekonomi (industri, perdagangan) dan kelembagaan (regional, nasional, dan internasional);
- (6) Mendorong percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api, Kawasan Industri Terpadu Pendopo, dan pelaksanaan proyek-poyek MP3EI;
- (7) Mengoptimalkan pengelolaan Kawasan Jakabaring Sport City untuk menunjang industri olah raga;

Sementara untuk tahun 2016 penekanan program dan kegiatan diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut :

- a. ***Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah (hilirisasi) dan Pendapatan Industri Pengolah Hasil Pertanian dan Pertambangan serta Pariwisata***
- b. ***Pengembangan UMKMK terutama dari Meningkatnya akses permodalan, Manajemen Usaha, Teknologi Produksi, Informasi dan Pemasaran***
- c. ***Kerjasama Riset Unggulan dan Optimalisasi Pusat Inovasi***

4.2.2.7 PRIORITAS 7: PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN BENCANA

Selaras dengan upaya perwujudan Misi Keempat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan yaitu : Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan pengelolaan bencana (Sustainabilitas) serta memperhatikan program Nawa Cita sebagai agenda prioritas dalam kebijakan Pemerintah Pusat, terutama dalam Program Aksi Berdikari dalam Bidang Ekonomi yaitu Penguasaan SDA melalui 7 (tujuh) langkah & membangun regulasi mewajibkan *Coorporate Social Responsibility* (CSR) dan atau saham untuk masyarakat lokal sekitar tambang, penguatan

kapasitas pengusaha nasional (termsuk penambang rakyat) dalam pengelolaan tambang berkelanjutan, Membangun ekonomi maritim, Penguatan sektor kehutanan, Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan dan Membangun perimbangan pembangunan kawasan.

Untuk itu strategi dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016 dengan fokus pada tema pembangunan “Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis” harus dijalankan dengan tetap memperhatikan konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai dengan penguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Pada tahun 2016 Arah Kebijakan Pembangunan yang terkait dengan prioritas Pengelolaan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana yaitu :

- a. ***Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan***
- b. ***Peningkatan Daya Dukung DAS dan Pengelolaan DAS Terpadu***
- c. ***Menurunkan Emisi Karbon***

Selain itu, strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2016 juga mengedepankan beberapa hal berikut, diantaranya meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang, mewujudkan perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan, mewujudkan pemantapan pengelolaan kawasan hutan, mengendalikan laju penurunan kualitas lingkungan hidup, mengendalikan laju peningkatan emisi GRK, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta meningkatkan pengelolaan mitigasi dan adaptasi bencana, dengan uraian yang sejalan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan pengelolaan dan konservasi hutan, rawa, lahan gambut, lahan pertanian dan perkebunan di hulu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan;

- (2) Mengendalikan kerusakan lingkungan dan menurunkan pencemaran lingkungan melalui reboisasi dan konservasi hutan dan pengawasan ketaatan pengendalian sumber-sumber pencemaran;
- (3) Meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana melalui penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan penjaminan berlangsungnya fungsi sistem peringatan dini;
- (4) Meningkatkan pengelolaan DAS terpadu dan konservasi sempadan sungai, serta pembangunan danau dan embung di hulu untuk menjamin ketersediaan air;
- (5) Meningkatkan penurunan emisi gas rumah kaca di 6 (enam) sumber emisi: pertanian, hutan dan lahan gambut, energi, transportasi, industri, dan pengelolaan limbah;
- (6) Menerapkan insentif dan disinsentif dalam pengelolaan lingkungan;
- (7) Melakukan optimalisasi waduk, situ daerah hulu sungai untuk menampung aliran banjir di hulu;
- (8) Menerapkan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah;

4.2.2.8 PRIORITAS 8: PENGEMBANGAN WILAYAH

Dengan memperhatikan arahan RPJPD, RTRW, dan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan serta prioritas pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun mendatang (2013-2018) mendatang mengutamakan keterpaduan dan keseimbangan antara pendekatan pembangunan sektor atau bidang dengan pendekatan pembangunan wilayah. Beberapa hal yang dilakukan adalah :

- (1) Mendorong pengembangan 21 Kawasan Strategis Provinsi (KSP) antara lain Perkotaan Palembang Metropolitan, Pesisir Pantai Timur

- Sumatera Selatan, Kawasan Terpadu Dana Ranau, Kawasan Agropolitan, pusat-pusat pertumbuhan baru dan pembangunan pedesaan;
- (2) Meningkatkan kerjasama dan keterkaitan antarwilayah terutama peningkatan infrastruktur baik di dalam maupun di luar wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
 - (3) Percepatan pembangunan daerah tertinggal, penyelesaian batas wilayah, kerjasama pembangunan di wilayah perbatasan, pemekaran wilayah dan penyelesaian batas wilayah;
 - (4) Perwujudan *One Map Sumsel* melalui pengembangan Jaringan Data dan Informasi Spasial Provinsi Sumatera Selatan yang mudah diakses.

Untuk tahun 2016 prioritas Pengembangan Wilayah diarahkan untuk :

- a. ***Peningkatan Kerjasama antar Wilayah Perbatasan***
- b. ***Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan seperti : KEK, Pusat Pengembangan Kerbau Rawa, Agrotechno Park, Science Techno Park Kebun Raya Sriwijaya dan Palembang Metropolitan***

4.3 Sinkronisasi RKP 2016 Dengan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab terdahulu, pembangunan provinsi merupakan bagian dari pembangunan nasional, karena itu tercapainya sasaran pembangunan nasional merupakan agregasi dari keseluruhan capaian di tingkat provinsi. Untuk mencapai sasaran Nasional tersebut, bagian terpenting yang menjadi perhatian adalah bagaimana sasaran Nasional sinkron dengan sasaran yang akan dicapai oleh provinsi. Sinkronisasi capaian Nasional (RKP) dengan capaian provinsi (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016, seperti sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.5 Sinkronisasi RKP dengan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016

NO	SUBSTANSI	RKP	RKPD
1.	TEMA :	"Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakan Fondasi Pembangunan yang berkualitas"	"Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis"
2.	Sasaran Ekonomi :		
	- Pertumbuhan Ekonomi	6,6	6,25
	- Inflasi	4,0	4,0
	- Tingkat Kemiskinan	9,0 – 10,0	12,75
	- Tingkat Pengangguran	5,2 – 5,5	3,63
3.	Target Pertumbuhan Ekspor :		
	- Produk Non-Migas	9,9%	3%
	- Rasio Ekspor Jasa terhadap PDB	2,8%	
4.	Investasi :	Rp. 594,8 Triliun (total)	Rp. 21,234 T
	- PMA		Rp. 12,050 T
	- Rasio PMDN	(35%)	43% (Rp.9,184 T)
5.	PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT : PENDIDIKAN		
	- Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	8,5 (tahun)	9 Tahun
	- Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	95,10%	99,40%
	- Prodi Perguruan Tinggi Minimal Terakreditasi B	58,80%	55,95%
	- Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	76,50%	54%
	- Persentase SMP/MT berakreditasi minimal B	71,80%	54%
	- Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	79,10%	54%
	- Persentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B	56,60%	49,66%
	- Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,87	0,70
	- Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20%	0,58	0,40

penduduk terkaya		
Pendidikan Anak Usia Dini		
- Angka Partisipasi PAUD	70,85	72
Pendidikan Dasar		
- Angka Partisipasi Murni SD/MI	91,79	99
- Angka Partisipasi Kasar SD/ MI/ SDLB/ Paket A	111,14	112
- Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	80,87	76
- Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	104,47	94
Pendidikan Menengah		
- Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK	60,84	59
- Angka Partisipasi Kasar SMA/ MA/ SMK/ Paket C	85,51	72
Pendidikan Tinggi		
- Angka Partisipasi Kasar PT	31,31	23
PEMBANGUNAN KESEHATAN		
Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak		
- Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (Pf)	77	90
- Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4)	74	98
- Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)	70	100
Meningkatnya Status Gizi Masyarakat		
- Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	77	22,7
- Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapatkan PMT	50	50
Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular		
- Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	271	168/100.000 penduduk
- Prevalensi HIV (persen)	< 0,5	< 0,5/100.000 penduduk
Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan		
- Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas terakreditasi	700	33 Puskesmas
- Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	80	91
- Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan	2.000	224
PEMBANGUNAN PERUMAHAN, AIR MINUM DAN SANITASI		

	- Akses Air Minum Layak	70% akses 4K; 7% akses Dasar	73,60%
	- Akses Sanitasi Layak	66,3% akses layak; 11% akses dasar	2 kawasan
	- Kawasan Pemukiman Kumuh Perkotaan	38.431 Ha	3 kawasan
6.	PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN : KEDAULATAN PANGAN		
	Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan		
	- Produksi Padi (juta ton)	75,3	4,57
	- Produksi Jagung (juta ton)	21,0	0,182
	- Produksi Kedelai (juta ton)	1,4	0,017
	- Produksi Gula (juta ton)	2,8	-
	- Produksi Daging Sapi (ribu ton)	506,2	0,073
	- Produksi Ikan (juta ton)	14,8	0,096
	Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi		
	- Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Air Permukaan, Air Tanah Rawa	9,89 juta ha	12.500 ha
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Air Tanah dan Rawa	5,71 juta ha	6,92 ha
	- Pembangunan dan Peningkatan Irigasi Tambak	304,75 ribu ha	
	- Pembangunan Waduk	8 waduk baru dan rehabilitasi 3 waduk	1 Waduk
	KEDAULATAN ENERGI		
	Rasio Elektrifikasi	91,09%	94,02% (desa berlistrik)
	Konsumsi Listrik Perkapita	1.058 KWh	
	Peningkatan Produksi SD Energi		
	- Minyak Bumi (ribu BM/hari)	880	27.316 Ribu Barrel
	- Gas Bumi (ribu SBM/hari)	1150	617.602 Ribu MMBTU
	- Batubara (juta ton)	419	24,50
	Penggunaan DN (DMO)		
	- Gas Bumi DN	61%	-
	- Batubara DN	26%	-
	FSRU/Regasifikasi/Receiving Terminal (unit)	2	-
	Jaringan Pipa Gas (km)	15330	-
	Pembangunan SPBG (unit)	30	-
	Jaringan Gas Kota (sambungan)	121 ribu	-

	rumah)		
	Pembangunan Kilang Baru (unit)	PMC/EPC	-
MARITIM DAN KELAUTAN			
Memperkuat jati diri sebagai negara Maritim			
-	Penyelesaian Pencatatan /deposit pulau-pulau kecil ke PBB	500 (tahap validasi pembakuan nama pulau kecil)	-
-	Penyelesaian batas maritim antar negara	35 kali perundingan	-
Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar			
-	Meningkatnya Ketaatan Pelaku Perikanan	71%	
Membangun Konektivitas Nasional:			
-	Pengembangan Pelabuhan untuk Menunjang Tol Laut	-	
-	Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan	48 (pembangunan/ penyelesaian pelabuhan baru)	
-	Pembangunan Kapal Perintis	69 unit	
Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan			
-	Produksi hasil perikanan	29,51 juta ton	675.277 ton
-	Pengembangan pelabuhan perikanan	22 unit	
-	Peningkatan luas kawasan konservasi laut/perairan	17,1 ha	
PARIWISATA DAN INDUSTRI			
Pariwista			
-	Wisatawan Mancanegara (orang)	13 juta	3,55 juta
-	Wisatawan Nusantara (kunjungan)	263 juta	34 ribu
-	Devisa (triliun rupiah)	169	
Industri			
Sasaran Pertumbuhan:			
-	Industri (%)	6,9	
-	Kontribusi dalam PDB	21,3%	
-	Penambahan jumlah Industri skala menengah dan besar	-	
7.	PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN		
	Perlindungan sosial bagi Penduduk Kurang Mampu (40% penduduk termiskin)		
	- Kepemilikan Jaminan Kesehatan	96,2%	
	- Akses Pangan Bernutrisi	60%	
	- Akses terhadap Pelayanan Keuangan	11,88%	
Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)			

	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga yang ditandai dengan meningkatnya keterampilan kerja/usaha, tersedianya alternatif usaha/kerja sebagai sumber penghidupan tersedianya sarana prasarana pendukung ekonomi, meningkatnya akses pasar bagi pengembangan usaha mikro/kecil
Peningkatan daya saing tenaga kerja	
- Penyediaan lapangan kerja (2015-2019)	>2 juta
- Persentase tenaga kerja formal	44,2%
Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan (akumulatif)	
- Pekerja Formal	42,6 juta
- Pekerja Informal	3,2 juta
Meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja	
- Jumlah Pelatihan	807.257
- Jumlah Sertifikat	122.388
- Jumlah Tenaga Kerja Keahlian menengah yang kompeten	35% 25% (peningkatan)
- Kinerja lembaga pelatihan milik negara menjadi berbasis kompetensi	15%
Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	
- Penurunan desa tertinggal	1.000
- Peningkatan desa mandiri	400
Pengembangan kawasan Perbatasan	
- Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN)	10 PKSN (100 lokal prioritas)
- Peningkatan Keamanan dan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan	10 pulau kecil terluar/terdepan
Pengembangan Daerah Tertinggal	
- Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	7,02%
- Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	15,42%
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal	68,49%
Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa	
- Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	7
- Kawasan Industri	12
- Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPS)	4
Pembangunan Kawasan Perkotaan	
- Pembangunan metropolitan di luar Jawa sebagai PKN dan Pusat Investasi	2
- Optimalisasi 20 kota otonomi	5

	berukuran sedang di luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa		
	- Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	7 pusat pertumbuhan baru	
	- Pembangunan 10 kota Baru Publik	2 kota baru	

Sumber : Paparan Menteri PPN/Bappenas pada Acara Musrenbangnas 2015

4.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2016

1.4.1 Prioritas 1 : Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Indikator dan target capaian sasaran prioritas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Program yang akan dilaksanakan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Sasaran, Indikator dan Target tahun 2016 Prioritas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

NO	Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator		Satuan	Target 2016
1	Ekstensifikasi pertanian dan diversifikasi	Terwujudnya ketahanan pangan daerah	-	Ketersediaan dan cadangan pangan:		
				Ketersediaan energi per kilo kalori per kapita per hari minimal 2.200	Kkal/kap/hari	4770
				Ketersediaan protein per gram per kapita per hari minimal 57	Kkal/kap/hari	113
			-	Distribusi dari akses pangan:		
			-	Sistem distribusi pangan yang lancar antara waktu antar wilayah dan stabilitas harga pangan pokok	Komoditi	13

NO	Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator		Satuan	Target 2016
			strategis			
2	Pembangunan pembangkit listrik	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan berorientasi publik	-	Jumlah perijinan dan non perijinan yang diterbitkan	Ijin/non ijin	229
			-	Jangka waktu perijinan dan non perijinan pada unit PTSP yang selesai sesuai SOP	Hari	6
			-	Status laporan keuangan daerah	Opini	WTP
3	Reformasi Birokrasi	Berkembangnya perencanaan dan penganggaran yang partisipatif dan berbasis kinerja	-	Jumlah ringkasan dokumen perencanaan yang dapat diakses publik	Dokumen	16
			-	Persentase penerapan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik	Persen	85
			-	Persentase SKPD dengan status laporan kinerja baik	Persen	80
			-	Persentase peningkatan nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persen	80
4	Reformasi Birokrasi	Terwujudnya kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai	-	Jumlah konflik pendirian rumah ibadah yang ditangani	Kali	1
			-	Jumlah forum pemuda antar umat beragama yang aktif	Forum	6
			-	Jumlah anggota FKUB yang aktif	Orang	310
			-	Jumlah kasus	Kali	0

NO	Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator		Satuan	Target 2016
			konflik antar umat beragama			
5	Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya solidaritas, ketahanan dan modal sosial budaya masyarakat	-	Survei kepuasan masyarakat	Nilai	B
			-	Jumlah anggota KORPRI yang mendapat pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani	Orang	2900
			-	Jumlah anggota KORPRI yang mendapat pembinaan sikap kepedulian sosial	Orang	260
			-	Jumlah anggota KORPRI yang mendapat pembekalan keterampilan kewirausahaan	Orang	280
6	Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah	-	Jumlah arsip dan benda-benda bersejarah yang dilestarikan	berkas	20
7	Reformasi Birokrasi	Terwujudnya tatanan politik dan pemerintahan yang bertumpu pada profesionalisme dan penghormatan terhadap HAM dan kearifan lokal	-	Jumlah kasus konflik kepengurusan partai politik	Kali	0
			-	Jumlah organisasi dan lembaga budaya masyarakat yang aktif	Ormas	64
			-	Persentase masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan	Persen	20
			-	Jumlah anggota Forum Pembaruan	Orang	245

NO	Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2016
			Kebangsaan (FPK) yang aktif		
			- Jumlah kasus konflik antar anggota masyarakat	Kali	12
			- Jumlah anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang aktif	Orang	125
			- Jumlah organisasi masyarakat yang menjalin kerjasama dengan pemerintah	Orkesmas	630
			- Jumlah kasus pelanggaran perda	Kasus	225
			- Persentase anggota DPRD yang aktif dalam perumusan kebijakan publik	Persen	75
			- Jumlah masukan partai politik dalam perumusan kebijakan publik	Masukan	40
			- Jumlah masukan organisasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik	Masukan	18
			- Jumlah sumber daya aparatur yang kompeten dan profesional	Orang	710
			- Jumlah sumber daya widyaiswara yang kompeten dan profesional	Widyaiswara	34
			- Persentase pelanggaran disiplin PNS Prov.	Persen	9

NO	Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator		Satuan	Target 2016
			-	Sumsel		
				Pelayanan administrasi data kepegawaian berbasis WEB	Persen	77
8	Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pilkada, Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil	-	Jumlah kasus sengketa Pemilu dan Pemilukada	Kasus	0
				Persentase kasus sengketa Pemilu dan Pemilukada	Persen	100

Gambaran program untuk mencapai prioritas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran : Terwujudnya ketahanan pangan daerah
 - 1. Program Peningkatan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
 - 2. Program Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan
 - 3. Program Peningkatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan
 - 4. Program Peningkatan SDM dan Teknologi Pangan
 - 5. Program Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya
 - 6. Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan

- b. Sasaran : Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan berorientasi publik
 - 1. Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat
 - 2. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - 3. Program Penataan Daerah Otonom Baru
 - 4. Program Kerjasama Wilayah Perbatasan

5. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Kab/Kota
 8. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
 9. Program Perumusan Kebijakan di Bidang Keagamaan
 10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 12. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 13. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
 14. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
 15. Program Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran
- c. Sasaran : Berkembangnya perencanaan dan penganggaran yang partisipatif dan berbasis kinerja
1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
 2. Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 3. Program Kerjasama Pembangunan
 4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 6. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
 7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
 8. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam
- d. Sasaran : Terwujudnya kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai

1. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- e. Sasaran : Meningkatnya solidaritas, ketahanan dan modal sosial budaya masyarakat
 1. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 3. Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat
 4. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 5. Program Perumusan Kebijakan di Bidang Keagamaan
 6. Program Perumusan Kebijakan di Bidang Kesehatan
 7. Program Perumusan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
 8. Program Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Pemuda dan Olahraga
- f. Sasaran : Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 1. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
- g. Sasaran : Terwujudnya tatanan politik dan pemerintahan yang bertumpu pada profesionalisme dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kearifan lokal
 1. Program Pemberdayaan untuk Menjaga Ketertiban dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat.
 2. Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat
 3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
 5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

- h. Sasaran : Terlaksananya pemilihan kepala daerah (Pilkada) pemilihan umum (Pemilu) yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
1. Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat
 2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

4.4.2 Prioritas 2 : Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya

**Tabel 4.7
Sasaran, Indikator dan Target tahun 2016 Prioritas Pendidikan,
Kesehatan dan Sosial Budaya**

NO	Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator		Satuan	Target 2016
1	Meningkatkan akses kesehatan	Meningkatnya status kesehatan jiwa masyarakat	-	Jumlah kasus gangguan jiwa	Orang	2.700
			-	Jumlah kunjungan penderita gangguan jiwa	Orang	47.208
			-	jumlah kasus pasung	Orang	40
2	Meningkatkan akses kesehatan	Meningkatnya status gizi masyarakat	-	Prevalensi balita dengan berat badan rendah (angka gizi buruk)	Persen	<1
			-	Presentase kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	Persen	98
3	Meningkatkan akses kesehatan	Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi	-	Jumlah kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	Orang	110
			-	Angka pemakaian kontrasepsi bagi pasangan usia subur	Persen	65
			-	Rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi	Persen	6
			-	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	Nilai	2,2

NO	Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator		Satuan	Target 2016
			- Jumlah orang umur >15 tahun yang melakukan KTS (konseling dan testing sukarela)		Orang	31.466
4	Meningkatkan akses kesehatan	Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemic	- Angka kesembuhan penderita TB Paru (BTA +)	Persen	132	
			- Angka kesakitan penyakit DBD per 100.000 penduduk	Nilai	49	
			- <i>Annual Parasit Insidence (API)</i>	Per 1000 penduduk	0,5	
5	Meningkatkan akses kesehatan	Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan	- Persentase Rumah Sehat	Persen	73,9	
			- Persentase keluarga yang memiliki akses air bersih	Persen	73,6	
			- Jumlah kasus narkoba yang direhabilitasi	Orang	90	
			- Jumlah kunjungan penderita narkoba meningkat	Orang	400	
6	Meningkatkan akses pendidikan	Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan dasar dan menengah	- Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif	Persen	10	
			- Jumlah SMP/SMA satu atap	Persen	34	
7	Meningkatnya Mutu dan distribusi Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar dan menengah	- APK SD	Persen	112	
			- APM SD	Persen	101	
			- APK SMP	Persen	94	
			- APM SMP	Persen	76	
			- APK SMP/K	Persen	72	
			- APM SMP/K	Persen	59	
			- APts SD	Persen	0,4	
			- Apts SMP	Persen	7,42	
			- Apts SMA/K	Persen	17	

NO	Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator		Satuan	Target 2016
			-	Angka Kelulusan SD	Persen	99,75
			-	Angka Kelulusan SMP	Persen	99,9
			-	Angka Kelulusan SMA/K	Persen	99,9
			-	Angka Melek Huruf	Persen	99,82
8	Meningkatkan akses pendidikan	Meningkatnya keterampilan siswa SMA	-	SMA yang memiliki lab dan bengkel keterampilan	Persen	29
9	Meningkatkan akses pendidikan	Meningkatnya jumlah dan mutu lulusan perguruan tinggi	-	APK Perguruan Tinggi	Persen	23
10	Meningkatkan akses pendidikan	Meningkatnya minat baca masyarakat	-	Jumlah diversifikasi layanan perpustakaan	Jenis	20
			-	Jumlah masyarakat yang mengakses perpustakaan	Orang	289.300
			-	Jumlah bahan pustaka yang dapat diakses oleh pemustaka	Eks	323.823
			-	Jumlah perpustakaan yang dibina	Unit	2.718
11	Reformasi Birokrasi	Tertatinya dokumen dan arsip daerah	-	Jumlah sarana dan pengolahan penyimpanan arsip yang terpelihara	Sarana	2
			-	Jumlah dokumen/arsip daerah yang telah terdata dan tertata	berkas	250
12	Meningkatkan akses kesehatan	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	-	Angka Harapan Hidup	Persen	70,9
			-	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Orang	138
13	Efisiensi dan Efektifitas Program dan Kegiatan Penanggulanga	Berkembangnya mutu dan layanan kegiatan kepemudaan	-	Jumlah pemuda yang difasilitasi	Orang	3565
			-	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi	OKP	18

NO	Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator		Satuan	Target 2016
	n Kemiskinan		-	Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan	Unit	6
			-	Jumlah anggota pramuka yang difasilitasi dalam kepanduan	Orang	4300
			-	Jumlah pemuda yang difasilitasi meningkatkan pengetahuan terhadap bahaya narkoba.pornografi, pornoaksi, dan HIV/AIDS	Orang	2700
14	Meningkatnya Mutu dan distribusi Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kesehatan	Berkembangnya kewirausahaan para pemuda	- Jumlah usaha-usaha baru yang dikelola oleh pemuda		Orang/unit	600/50
15	Meningkatnya Mutu dan distribusi Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya prestasi pemuda di bidang seni dan budaya, dan ilmu pengetahuan dan teknologi	-	Jumlah medali emas atlet PPLP	Medali	23
			-	Jumlah prestasi atlet pada PON	Peringkat	10
16	Meningkatnya Mutu dan distribusi Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kesehatan	Berkembangnya industri olahraga, jasa, peralatan dan partisipasi masyarakat	-	Jumlah tenaga keolahragaan yang besertifikat	Orang	355
			-	Jumlah produsen peralatan olahraga yang dapat difasilitasi	Orang/pro dusen	50/4
			-	Jumlah masyarakat yang ikut permassalan olahraga	Orang	6.787
			-	Jumlah sarana dan prasarana olahraga	Ponpes/Cabor	50/150

NO	Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator		Satuan	Target 2016
17	Meningkatnya Mutu dan distribusi Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	- Jumlah SKPD Provinsi yang mengimplementasikan PPRG		SKPD	46
			- Jumlah SKPD Prov yang memiliki dan memanfaatkan data terpilih		SKPD	37
18	Pengembangan UMKMK Terutama Dari Meningkatnya Akses Permodalan, Manajemen Usaha, Teknologi Produksi, Informasi dan Pemasaran	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	- Jumlah kelompok usaha perempuan yang dibina		Klmp	319
19	Meningkatnya Mutu dan distribusi Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak	- Indeks Pembangunan Gender (IPG)		Persen	70,63
			- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		Persen	68,32
			- Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani		Kasus	37
			- Jumlah kasus perdagangan perempuan dan anak yang ditangani		Kasus	11
			- Jumlah kasus pelanggaran hak-hak anak yang dilaporkan dan ditangani		Kasus	319

Gambaran indikasi sasaran dan program untuk mencapai Prioritas Pendidikan, Kesehatan dan social Budaya adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran : Meningkatnya status kesehatan masyarakat :
 1. Program Pengawasan Obat dan Makanan

2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 4. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
 5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
 6. Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan
 7. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS, RS Jiwa, RS Paru dan RS Mata
 8. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata
 9. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
 10. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan LANSIA
 11. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
 12. Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Ibu dan Anak
 13. Program Penanganan Keluarga Berencana
 14. Program Pendidikan Kesehatan
 15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
 16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- b. Sasaran : Meningkatnya status kesehatan jiwa masyarakat :
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 2. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS, RS Jiwa, RS Paru dan RS Mata
 3. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
 4. Program Penanganan Keluarga Berencana
- c. Sasaran : Meningkatnya status kesehatan gizi masyarakat :
1. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- d. Sasaran : Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi :
1. Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Ibu dan Anak
- e. Sasaran : Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemic
1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

- f. Sasaran : Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan
 - 1. Program Pengembangan Kesehatan Lingkungan
- g. Sasaran : Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan dan dasar menengah
 - 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 - 3. Program Pendidikan Menengah
 - 4. Program Peningkatan Pendidikan Non Formal
 - 5. Program Pendidikan Luar Biasa
 - 6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- h. Sasaran : Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar dan menengah
 - 1. Program Pendidikan Menengah
 - 2. Program Peningkatan Pendidikan Non Formal
 - 3. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
 - 4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- i. Sasaran : Meningkatnya minat baca masyarakat :
 - 1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- j. Sasaran : Berkembangnya mutu dan layanan kegiatan kepemudaan
 - 1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
 - 2. Program Kependidikan/Kepramukaan
- k. Sasaran : Berkembangnya kewirausahaan para pemuda
 - 1. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
- l. Sasaran : Meningkatnya prestasi pemuda di bidang seni dan budaya , dan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 1. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Peningkatan Imtaq dan Iptek Kepemudaan serta Penanggulangan HIV-AIDS

2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

- m. Sasaran : Berkembangnya industri olahraga, jasa, peralatan dan partisipasi masyarakat
 - 1. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
 - 2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
 - 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
- n. Sasaran : Meningkatnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
 - 1. Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- o. Sasaran : Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan
 - 1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
 - 2. Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
- p. Sasaran : Meningkatnya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak
 - 1. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

4.4.3 Prioritas 3 : Penanggulangan Kemiskinan

**Tabel 4.8
Sasaran, Indikator dan Target tahun 2016 Penanggulangan Kemiskinan**

NO	Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2016
1	Efisiensi dan Efektifitas Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan keahlian	- Jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	Orang	100
2	Efisiensi dan Efektifitas Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Berkurangnya pengangguran tenaga kerja	- Jumlah TKI yang dikirim ke LN legal	Orang	1.931
			- Angka pencari kerja yang dilatih di BLK/LLK yang	Orang	4.417

NO	Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2016
			<p>telah ditempatkan</p> <p>- Jumlah sarana dan prasarana BLKI</p> <p>- Jumlah penduduk yang bekerja</p> <p>- Tingkat partisipasi angkatan kerja</p> <p>- Pengangguran terbuka</p> <p>- Tingkat pengguran terbuka (TPT)</p> <p>- Upah/Gaji Pekerja Lajang terendah berdasarkan tingkat pendidikan terendah, jabatan terendah serta masa kerja terendah</p>		
3	Pemerataan peningkatan pendapatan masyarakat	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat	- Jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Kasus	148
4	Pembangunan pembangkit listrik	Berkembangnya wilayah perdesaan dan kawasan transmigrasi	- Persentase desa dengan akses listrik	Persen	94,02
5	Efisiensi dan Efektifitas Program dan Kegiatan	Berkembangnya kelompok masyarakat, organisasi dan	- Jumlah organisasi dan lembaga desa yang aktif	Organisasi	14.910

NO	Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2016
	Penanggulangan Kemiskinan	lembaga masyarakat desa	- Persentase masyarakat yang terlibat dalam organisasi dan lembaga masyarakat desa - Persentase desa yang melaksanakan Musrenbangdes - Persentase aparatur desa yang profesional	Persen keterlibatan	25-30 85-90 40-45
6	Efisiensi dan Efektifitas Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya surplus usaha koperasi	- Nilai modal koperasi	Rp. M	1.794,36
			- Pertumbuhan modal koperasi	Persen	2
			- Nilai volume usaha koperasi	Rp. M	2.849,77
			- Pertumbuhan volume usaha koperasi	Persen	2
7	Pengembangan UMKMK Terutama Dari Meningkatnya Akses Permodalan, Manajemen Usaha, Teknologi Produksi, Informasi dan Pemasaran	Meningkatnya pendapatan pelaku UMKMK	- Nilai modal UMKMK - Omzet UMKMK - Penyerapan tenaga kerja sektor UMKMK	Rp.M Rp.M Orang	9.788,08 25.469,85 3.017.104

Gambaran dan program prioritas untuk mencapai penanggulangan kemiskinan ialah sebagai berikut :

- a. Sasaran : Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan keahlian
 - 1. Program Peningkatan Kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja
- b. Sasaran : Berkurangnya pengangguran tenaga kerja

1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- c. Sasaran : Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat
 1. Program Perlindungan dan Pengembangan Kembaga Ketenagakerjaan
- d. Sasaran : Berkembangnya wilayah perdesaan dan kawasan transmigrasi
 1. Program Transmigrasi Lokal
 2. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Sumsel
- e. Sasaran : Berkembangnya kelompok masyarakat, organisasi dan lembaga masyarakat desa
 1. Program Peningkatan Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
- f. Sasaran : Meningkatnya surplus usaha koperasi
 1. Program Perkuatan Permodalan UMKMK
 2. Program Peningkatan Usaha UMKMK
- g. Sasaran : Meningkatnya pendapatan pelaku UMKM
 1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

4.4.4 Prioritas 4 : Pembangunan Pertanian

Tabel 4.9
Sasaran, Indikator dan Target tahun 2016 Pembangunan Pertanian

NO	Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator		Satuan	Target 2016
1	Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tukar Petani.	Meningkatnya produksi	-	Produksi Pertanian :		
				Produksi padi	Ton	4.270.088
				Produksi jagung	Ton	182.985
				Produksi Kedelai	Ton	17.317
				Produksi karet	Ton	1.180.000

NO	Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2016
			Produksi kelapa sawit	Ton	2.270.000
			Produksi kelapa	Ton	61.500
			Produksi kopi	Ton	142.000
			Produksi daging	Ton	73.370
			Produksi susu	Liter	105.128
			Produksi telur	Ton	80.283
			Produksi ikan tangkap	Ton	96.292,70
			Produksi ikan budidaya	Ton	578.985
			- Jumlah produksi kayu dan HTI	Juta m ³ / thn	5
			- Sumbangan sektor kehutanan	Rp. M	21
2	Ekstensifikasi pertanian dan diversifikasi	Meningkatnya kemampuan SDM di sektor pertanian pertanian	- Penyuluhan pertanian	Orang	2100
			- Jumlah peningkatan kelas kelompok pelaku utama	Unit	450
			- Jumlah penumbuhan gabungan kelompok pelaku utama	Unit	150
			- Jumlah pelaku usaha teregistrasi	Unit	125
			- Jumlah teknologi yang dikembangkan	Unit	13
			- Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persen	115
3	Peningkatan Produktivitas dan	Meningkatnya jumlah rumah	- Jumlah pertumbuhan	UKM	700

NO	Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2016
	Nilai Tukar Petani.	tangga jasa (UMKM) di sektor pertanian	wirausaha baru		

Gambaran Program prioritas untuk mencapai Pertanian ialah sebagai berikut :

- a. Sasaran : Meningkatnya produksi
 - 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
 - 2. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
 - 3. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan
 - 4. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura
 - 5. Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - 6. Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - 7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
 - 8. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Pemasaran dan Industri Hasil Pertanian
 - 9. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan
 - 10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan
 - 11. Program Pengembangan Perbenihan Perkebunan
 - 12. Program Proteksi Tanaman Perkebunan
 - 13. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan / P2HP
 - 14. Program Pengembangan Sentra-sentra Produksi Perkebunan
 - 15. Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak
 - 16. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
 - 17. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

18. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
 19. Program Pengembangan Perikanan Budidaya
 20. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
 21. Program Pengembangan BBI Sentral Air Tawar dan BBI Lokal
- b. Sasaran :Meningkatnya kemampuan SDM di sector pertanian
1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
 2. Program Pengembangan Kelembagaan Usaha Perkebunan/PKUP
 3. Program Pengembangan Kerjasama Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
 4. Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
 5. Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Perikanan
 6. Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Kehutanan
 7. Program Pengembangan Teknologi Kehutanan Tepat Guna
 8. Program Pengembangan Perikanan Budidaya
- c. Sasaran : Meningkatnya jumlah rumah tangga jasa (UMKM) di sector pertanian
1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
 2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM

4.4.5 Prioritas 5 : Infrastruktur dan Energi

Tabel 4.10

Sasaran, Indikator dan Target tahun 2016 Infrastruktur dan Energi

NO	Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator		Satuan	Target 2016
1	Pemeliharaan Jalan, Jembatan,	Terbangunnya jalan dan jembatan	-	Persentase panjang jalan terbangun dan panjang jalan	Persen	6,83

NO	Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator		Satuan	Target 2016	
	Irigasi, sumber air bersih, sanitasi lingkungan		ditingkatkan/ditebarkan				
			-	Presentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	85	
2	Pembangunan jalur KA	Terbangunnya prasarana, sarana dan jaringan transportasi yang terpadu dan merata	-	Jumlah penumpang dan kendaraan melalui pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-API	Org/Thn	75.000	
	Pembangunan infrastruktur pendukung KEK TAA		-	Jumlah pengguna KA perkotaan Palembang Metropolitan (Plg-Indralaya)	Org/Thn	135.000	
	Pembangunan Pelabuhan		-	Jumlah penumpang angkutan laut	Org/Thn	591.381	
			-	Persentase Kendaraan yang layak jalan	Persen	58	
			-	Jumlah bus pariwisata	Unit Bus	106	
3	Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi, sumber air bersih, sanitasi lingkungan	Terbangunnya prasarana dan sarana permukiman yang sehat dan layak huni	-	Cakupan penanganan drainase permukiman	Kab/kota	3	
			-	Jumlah kawasan kumuh yang tertangani	Kawasan	3	
			-	Jumlah kawasan layak huni yang tertangani	Kawasan	2	
			-	Cakupan penanganan TPA sampah	Kab/kota	2	
			-	Jumlah kawasan agropolitan yang tertangani	Kab/kota	2	
4	Kerjasama riset unggulan dan optimalisasi pusat inovasi	Menguatnya sistem inovasi daerah (SIDa)	-	Jumlah pusat inovasi di kab/kota	PI	4	
5	Kerjasama riset unggulan dan optimalisasi pusat inovasi	Berkembangnya jaringan IPTEKIN	-	Jumlah pusat belajar Iptekin	Pusat Belajar	3	
			-	Jumlah HKI	HKI	3	
			-	Jumlah Technopark	STP	0	

Gambaran program prioritas untuk mencapai Infrastruktur dan Energi ialah sebagai berikut :

- a. Sasaran : Terbangunnya jalan dan jembatan
 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
 2. Program Inpeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
- b. Sasaran : Terbangunnya prasarana, sarana dan jaringan transportasi yang terpadu dan merata
 1. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
 2. Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi
 3. Program Pengembangan Aplikasi Telekomunikasi
 4. Program Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 5. Program Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP)
 6. Program Pengembangan Transportasi Udara
 7. Program Penaggulangan Kelebihan Muatan (Over Loading)
 8. Program Pengembangan Transportasi Perkotaan
 9. Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut
 10. Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Angkutan Kereta Api
 11. Program Laik Jalan Kendaraan Bermotor
 12. Program Penyediaan Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan dan Kominfo
- c. Sasaran : Terbangunnya sarana dan prasarana permukiman yang sehat dan layak huni
 1. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
 2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 3. Program Perencanaan Tata Ruang

4. Program Penataan Bangunan
5. Program Penataan Kawasan
- d. Sasaran : Meningkatnya pelayanan daerah rawan sanitasi
 1. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
 2. Program Kinerja Pengelolaan Persampahan
 3. Program Penataan Kawasan
- e. Sasaran : Berkembangnya jaringan IPTEKIN
 1. Program Sentra HKI
 2. Program Kemitraan Jaringan IPTEK
 3. Program Inkubator Teknologi
 4. Program Desiminasi Iptek Hasil Litbang dan Inovasi
 5. Program Pendayagunaan Iptek
 6. Program Litbang dan Inovasi Bidang Pendidikan
 7. Program Litbang dan Inovasi Bidang Kesehatan
 8. Program Litbang dan Inovasi Bidang Peningkatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan
 9. Program Litbang dan Inovasi Bidang Sosial Kemasyarakatan
 10. Program Penguatan Kelembagaan
 11. Program Program Litbang dan Inovasi Bidang Lingkup Pertanian

4.4.6 Prioritas 6 : Investasi dan Pengembangan Usaha

Tabel 4.11
Sasaran, Indikator dan Target tahun 2016 Investasi dan Pengembangan Usaha

NO	Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator		Satuan	Target 2016
1	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah (hilirisasi) dan Pendapatan Industri Pengolah Hasil Pertanian, Pertambangan	Berkembangnya jasa pariwisata	-	Jumlah sanggar seni yang berkembang	Sanggar	230

	dan Pariwisata				
2	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah (hilirisasi) dan Pendapatan Industri Pengolah Hasil Pertanian,Pertambangan dan Pariwisata	Meningkatnya investasi	- Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	UKM	700
			- Nilai Realisasi PMDN	Rp. Triliun	9.184
			- Nilai Realisasi PMA	Rp. Triliun	12,05
			- Nilai Ekspor	US\$ Jt/Th	2.926,25
			- Pertumbuhan Ekspor	Persen	3
			- Pertumbuhan investasi di sektor industri pengolahan	Persen	2,5

Gambaran program prioritas untuk mencapai Investasi dan Pengembangan Usaha ialah sebagai berikut :

- a. Sasaran : Berkembangnya jasa pariwisata
 - 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - 2. Pengembangan Destinasi Pariwisata
- b. Sasaran : Meningkatnya investasi
 - 1. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
 - 2. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi

4.4.7 Prioritas 7 : Pengelolaan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana

**Tabel 4.12
Sasaran, Indikator dan Target tahun 2016 Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Bencana**

NO	Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator		Satuan	Target 2016
1	Peningkatan daya dukung DAS dan pengelolaan DAS Terpadu	Terkelolanya kawasan hutan	-	Jumlah identifikasi /rencana lokasi permasalahan kawasan hutan yang dapat ditindaklanjuti dengan tata	Lokasi/tahun	10

NO	Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator		Satuan	Target 2016
				batas		
				- Jumlah Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH yang beroperasi	Lokasi/tahun	3
2	Peningkatan daya dukung DAS dan pengelolaan DAS Terpadu	Meningkatkan daya dukung DAS Musi dan Pengelolaan DAS terpadu	<ul style="list-style-type: none"> - Luasan inventarisasi sumber daya hutan tingkat provinsi - Luas lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan yang direhabilitasi (rehab/HL/KSA/KPA dan HKm/HD) 	Luasan inventarisasi sumber daya hutan tingkat provinsi	Ha/tahun	657.114
				Luas lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan yang direhabilitasi (rehab/HL/KSA/KPA dan HKm/HD)	Ha/tahun	250
3	Menurunkan emisi karbon	Menurunkan emisi karbon dan meningkatnya usaha jasa lingkungan di bidang kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan - Luas hutan tanaman 	Jumlah penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan	Ha/tahun	200
				Luas hutan tanaman	Ha/tahun	80.000
4	Menurunkan emisi karbon	Berkurangnya laju penurunan Kualitas Lingkungan Hidup meliputi air, udara dan tutupan lahan	- Laju penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH		53,77

NO	Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator		Satuan	Target 2016
5	Menurunkan emisi karbon	Terselenggaranya partisipasi masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam pengelolaan LH	- Jumlah partisipasi masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup		Orang	800
6	Menurunkan emisi karbon	Terwujudnya ketaatan masyarakat & pelaku usaha kegiatan dalam pengelolaan LH	-	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persen	100
			-	Peraturan Daerah bidang lingkungan hidup yang diterbitkan	Dokumen	1
8	Pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Berkembangnya manajemen penanggulangan bencana	-	Persentase sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>)	Persen	20
9	Pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Berkurangnya kerugian akibat bencana	-	Persentase kerugian akibat bencana	Persen	80
10	Pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana	-	Jumlah masyarakat siaga bencana	Orang	50
			-	Jumlah desa tangguh	Desa	2

NO	Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator		Satuan	Target 2016
			-	Persentase penurunan titik kebakaran (hotspot)	Persen	20

Gambaran program untuk mencapai prioritas Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Bencana adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran : Terkelolanya kawasan hutan
 - 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
 - 2. Program Pengukuhan Kawasan Hutan
 - 3. Program Inventarisasi Sumber Daya Hutan Tingkat Provinsi
- b. Sasaran : Meningkatkan daya dukung DAS Musi dan Pengelolaan DAS terpadu
 - 1. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
 - 2. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
 - 3. Program Pembentukan Kelembagaan Kesatuan Pengelola Hutan/KPH
 - 4. Program Kelembagaan Pengelolaan DAS Terpadu Musi
- c. Sasaran : Menurunkan emisi karbon dan meningkatnya usaha jasa lingkungan di bidang kehutanan
 - 1. Program Rehabilitasi Lahan Kritis dalam Kawasan Hutan
 - 2. Program Penguatan Kelembagaan Implementasi REDD+ dan RAD GRK
- d. Sasaran : Berkurangnya laju penurunan kualitas lingkungan hidup meliputi air, udara dan tutupan lahan
 - 1. Program Pembangunan Talud/Turap dan Bronjong
 - 2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
 - 3. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
 - 4. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
 6. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 7. Program Penurunan Laju Deforestasi
- e. Sasaran : Terselenggaranya partisipasi masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam pengelolaan LH
1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
 2. Program Perencanaan Tata Ruang
 3. Program Penurunan Laju Deforestasi
 4. Program Penurunan Laju Degradasi Hutan
 5. Program Peningkatan Produksi Kayu dari HTI
 6. Program Peningkatan Penerimaan Sub Sektor Kehutanan
- f. Sasaran : Terwujudnya ketaatan masyarakat dan pelaku usaha kegiatan dalam pengelolaan LH
1. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam
 2. Program Penurunan Laju Deforestasi
 3. Program Penurunan Laju Degradasi Hutan
 4. Program Peningkatan Target Penanaman Hutan
 5. Program Peningkatan Produksi Kayu dari HTI
 6. Program Peningkatan Penerimaan Sub Sektor Kehutanan
 7. Program Peningkatan Produksi Industri Kayu Hulu
- g. Sasaran : Berkembangnya manajemen penanggulangan bencana
1. Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana
 2. Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
 3. Program Penurunan Laju Deforestasi
- h. Sasaran : Berkurangnya kerugian akibat bencana
1. Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
 2. Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana
 3. Program Pembangunan Talud/Turap dan Bronjong

4. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
- i. Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana
1. Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana
 2. Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
 3. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana
 4. Program Peningkatan Balai Pengobatan Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan
 5. Program Pengembangan Teknologi Kehutanan Tepat Guna
 6. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana

4.4.8 Prioritas 8 : Pengembangan Wilayah

Tabel 4.13
Sasaran, Indikator dan Target tahun 2016 Pengembangan Wilayah

NO	Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator		Satuan	Target 2016
1	Peningkatan kerjasama antar wilayah perbatasan	Tersedianya peraturan penataan ruang di daerah	-	Jumlah Peraturan Daerah tentang penataan ruang:		
				- RTRW	Perda	2
				- Rencana Rinci	Perda	10
2	Peningkatan kerjasama antar wilayah perbatasan	Meningkatnya kualitas produk rencana tata ruang	-	Menurunnya jumlah konflik pemanfaatan ruang	Jumlah	15

Gambaran program untuk mencapai Prioritas Pengembangan Wilayah adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran : Tersedianya peraturan penataan ruang di daerah
 1. Program Penataan Daerah Otonom Baru
- b. Sasaran : Meningkatnya kualitas produk rencana tata ruang
 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
 2. Program Perencanaan Tata Ruang

3. Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
4. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah dijelaskan pada Bab-bab sebelumnya. Adapun penjabaran bab V ini dengan memperhatikan target indikator kinerja pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 dan memuat rencana program dan kegiatan yang bersifat menyeluruh yaitu mencakup (1) Program dan Kegiatan Pendanaan APBD; (2) Program dan Kegiatan Pendanaan APBN; (3) Program dan Kegiatan Pendanaan CSR; (4) Program dan Kegiatan Pendanaan Swasta.

Penyusunan program dan kegiatan prioritas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 ini juga memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/1854/SJ tanggal 14 April 2015 hal Skala Prioritas Penyusunan RKPD Tahun 2016 yang mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka konsistensi perencanaan dan penganggaran, penyusunan dan penetapan RKPD Tahun 2016 agar berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD atau pada arah kebijakan dan sasaran pokok Tahun 2016 dalam RPJPD bagi daerah yang RPJMD-nya yang telah berakhir.
2. Sambil menunggu ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 yang juga menjadi pedoman penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (4) dalam Undang-Undang tersebut pada angka 1 (satu) diatas, dan untuk terciptanya sinergi pembangunan pusat dan daerah yang pro rakyat, maka sasaran penyusunan RKPD Tahun 2016 agar diselaraskan untuk

mendukung pencapaian sasaran 9 (sembilan) agenda Nawa Cita Jokowi-JK dalam Tahun 2016 berdasarkan 3 (tiga) dimensi pembangunan nasional yang telah ditetapkan RPJMN 2015-2019, dengan skala prioritas sebagai berikut :

- a. Tercapainya peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air serta semangat bela negara.
- b. Mendukung terwujudnya stabilitas dan kedaulatan pangan melalui reformasi agraria, untuk pengendalian pemanfaatan lahan pertanian, pendistribusian bibit dan pupuk, peningkatan biaya operasi dan pemeliharaan irigasi dalam upaya peningkatan produktifitas pertanian dan nilai tambah petani untuk hidup layak dan lebih sejahtera.
- c. Terciptanya pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antarwilayah, antardesa dan pinggiran serta antarwilayah yang seimbang, yang dapat mengurangi kesenjangan pembangunan di masing-masing wilayah.
- d. Terpelihara dan terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan baik di bidang maritim, energi, pariwisata, maupun stabilitas dan kedaulatan pangan. Hal tersebut bertujuan agar tersedia jaringan infrastruktur perhubungan dengan berbagai moda transportasi yang mengedepankan pelayanan cepat, tepat, murah dan aman, sehingga akan mendorong efisiensi dan efektifitas kelancaran arus orang dan distribusi barang serta jasa yang dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menekan angka inflasi.
- e. Penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan dan sosialisasi regulasi dalam upaya peningkatan kinerja sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.

5.1. Program dan Kegiatan Pendanaan Tahun 2016

Berdasarkan RPJMD Tahun 2013-2018, maka target indikator kinerja yang akan dicapai oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 diurai berdasarkan misi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.1
 Penetapan Indikator Kinerja Daerah untuk
 Misi Kesatu (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi)
 RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target 2016
Urusan Wajib		
A. Urusan Pekerjaan Umum		
1 Cakupan Penanganan Drainase Permukiman	Kab/ Kota	3
2 Jumlah kawasan kumuh yang tertangani	Kawasan	3
3 Jumlah kawasan layak huni yang tertangani	Kawasan	2
4 Cakupan penanganan TPA Sampah	Kab/Kota	2
5 Jumlah kawasan agropolitan yang tertangani	Kab/Kota	2
6 Persentase panjang jalan terbangundan panjang jalan ditingkatkan/dilebarkan	%	6,83
7 Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	85
B. Urusan Perencanaan Pembangunan		
1 Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang KEK:		
- Jalan	Km	na
- Air Bersih	L/Det	2.399
- Lahan	Ha	na
- Drainase	Km	9,24
- IPAL	Unit	1
- WTP	Unit	1
- Perkantoran	Ha	9,12
C. Urusan Perhubungan		
1 Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	%	<15
2 Jumlah penumpang yang terlayani melalui angkutan sungai dan danau	org/th	133.000
3 Meningkatnya keterangkutan penumpang pesawat udara pada SMB II ataupun kawasan barat Sumsel dan tumbuhnya penerbangan perintis antar daerah	org/th	3,10 jt
4 Persentase menurunnya pelanggaran kelebihan muatan (over loading)	%	20
5 Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas perkotaan, khususnya kasus kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki dan unmotorized	%	15

6	Jumlah penumpang dan kendaraan melalui Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-API	Org/th	75.000
7	Jumlah Pengguna KA Perkotaan Palembang Metropolitan (Plg-Inderalaya)	Org/th	135.000
8	Jumlah penumpang angkutan laut	Org/th	591.381
9	Jumlah barang dengan angkutan laut	Ton/th	20.554.642
10	Jumlah barang dengan angk. Darat	Ton/th	11.234.880
11	Jumlah barang dengan angkutan kereta api	Ton/th	16.287.909
12	Jumlah barang dengan angkutan udara	Ton/th	13.579
13	Persentase kendaraan yang laik jalan	%	58
14	Jumlah bus pariwisata	Unit Bus	106
D. Urusan Koperasi dan UKM			
1	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	UKM	700
E. Urusan Penanaman Modal			
1	Nilai Realisasi Investasi PMDN	Rp. Triliun	9,184
2	Nilai Realisasi Investasi PMA	Rp. Triliun	12,05
F. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah			
a. Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah			
1	Jumlah pusat belajar Iptekin	Pusat Belajar	3
2	Jumlah HKI terdaftar	HKI	3 HKI
3	Jumlah Technopark	STP	0
4	Jumlah Pusat Inovasi di Kab/kota	PI	4
5	Jumlah Produk bisnis inovatif baru	%	30
6	Jumlah teknologi hasil litbang yg dimanfaatkan	Teknologi	12
7	Jumlah kemitraan strategis IPTEKIN yang menjalin PKS dan MoU	Dokumen perjanjian	3
8	Jumlah pelayanan IPTEKIN di daerah	Unit	3
Urusan Pilihan			
A. Urusan Pertanian			
1	Produksi Pertanian		
	Produksi Padi	Ton	4.270.088
	Produksi Jagung	Ton	182.985
	Produksi Kedelai	Ton	17.317
	Produksi Karet	Ton	1.180.000
	Produksi Kelapa Sawit	Ton	2.270.000
	Produksi Kelapa	Ton	61.500
	Produksi Kopi	Ton	142.000
	Produksi Daging	Ton	73.370
	Produksi Susu	liter	105.128

	Produksi Telur	Ton	80.283
	Produksi Ikan Tangkap	Ton	96.292,7
	Produksi Ikan Budidaya	Ton	578.985
2	Penyuluh Pertanian	Org	2.100
3	Jumlah peningkatan kelas kelompok pelaku utama	Unit	450
4	Jumlah penumbuhan gabungan kelompok pelaku utama	Unit	150
5	Jumlah pelaku usaha teregistrasi	Unit	125
6	Jumlah teknologi yang dikembangkan	Unit	13
7	Rata-rata Harga Produk Pertanian di Tingkat Petani	%	3,10
B. Urusan Kehutanan			
1.	Jumlah produksi kayu dan HTI	Juta m ³ /th	5,00
2	Sumbangan Sektor Kehutanan	Rp. M	21,00
C. Urusan Kelautan dan Perikanan			
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	115,00
D. Urusan Perdagangan			
1	Nilai Ekspor	US \$ Jt /th	2.926,25
2	Pertumbuhan Ekspor	(%)	3,00
3	Nilai Perdagangan Antar Wilayah/ Perdagangan Antar Pulau (Moda Transportasi Laut)	(Ton)	1.975.084
E. Urusan Industri			
1	Jumlah Produksi Industri Pengolahan	Ton	1.902.603
2	Pertumbuhan Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan	%	3,50
3	Pertumbuhan Investasi di Sektor Industri Pengolahan	%	2,50
4	Jumlah Klaster Industri Unggulan Daerah	Unit Usaha	5
5	Jumlah IKM Pangan	Unit Usaha	26.089
6	Jumlah IKM kerajinan sandang dan kulit serta kerajinan dan umum	Unit Usaha	8.590
7	Jumlah Klaster Industri Unggulan Daerah / Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID)/Rencana Inti Pengembangan Industri Daerah (RIPID) yang Ditetapkan	Perda/Perkada	2
F. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral			
1	Produksi Batubara	Juta Ton	24,50
2	Lifting Minyak bumi	Ribu Barrel	27.316
3	Lifting Gas Bumi	Ribu MMBTU	617.602
4	Nilai PNBP Pertambangan (Royalti dan Landrent)	Milyar	176,40
5	Nilai PNBP Minyak Bumi	Milyar	318,12
6	Nilai PNBP Gas Bumi	Milyar	826,71
7	PAD	Juta	97,75
9	Rasio Desa Berlistrik	Persen	80,39
10	Jumlah produksi listrik	Gwh	7.298

11	Share PDRB Sektor Pertambangan	%	1,51
G.	Urusan Pariwisata		
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Orang	3.554.055
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	34.320
3	Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dikembangkan	DTW/Tempat wisata	38
4	Jumlah Sanggar Seni yang Berkembang	Sanggar	230
5	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Pariwisata	Orang	46.386

Tabel 5.1.2
 Penetapan Indikator Kinerja Daerah untuk
 Misi Kedua (Meningkatkan Stabilitas Daerah)
 RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target 2016
Urusan Wajib			
A.	Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah		
1	Jumlah ringkasan dokumen Perencanaan yang dapat diakses publik	Dokumen	16
2	Persentase penerapan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik	%	85
B.	Urusan Penanaman Modal		
1.	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang diterbitkan	Ijin/ no ijin	229
2.	Jangka waktu perijinan dan non perijinan pada unit PTSP yang selesai sesuai dengan SOP	Hari	6
C.	Urusan Kesatuan dan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		
a.	Kesatuan Bangsa		
1	Jumlah Kasus Konflik Kepengurusan Partai Politik	Kali	0
2	Jumlah Konflik Pendirian rumah ibadah yang ditangani	Kali	1
3	Jumlah Forum Pemuda Antar Umat Beragama yang aktif	Forum	6
4	Jumlah Anggota FKUB yang aktif	Orang	310
5	Jumlah kasus konflik antar umat beragama	Kali	0
6	Jumlah organisasi dan lembaga budaya masyarakat yang aktif	Ormas	64
7	Persentase masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan	%	20
8	Jumlah Anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang Aktif	Orang	245
9	Jumlah kasus konflik antar anggota masyarakat	Kali	12
10	Jumlah Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang aktif	Orang	125
11	Jumlah Organisasi Masyarakat yang menjalin kerjasama dengan pemerintah	Orkes-mas	630

12	Persentase penduduk yang ikut dalam Pemilu dan Pemilukada	%	70
13	Jumlah kasus sengketa Pemilu dan Pemilukada	Kasus	0
14	Persentase kasus sengketa Pemilu dan Pemilukada	%	100
b.	Satuan Polisi Pamong Praja		
1	Jumlah kasus pelanggaran perda	Kasus	225
D.	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah		
a.	Sekretariat Daerah		
1	Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	B
b.	Sekretariat DPRD		
1	Persentase anggota DPRD yang aktif dalam perumusan kebijakan publik	%	75
2	Jumlah masukan partai politik dalam perumusan kebijakan publik	Masukan	40
3	Jumlah masukan organisasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik	Masukan	18
c.	BPKAD		
1	Status Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP
d.	Inspektorat		
1	Persentase SKPD dengan status laporan kinerja baik	%	75
2	Persentase peningkatan nilai laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	%	80
e.	KORPRI		
1	Jumlah anggota KORPRI yang mendapat pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani	Orang	2.900
2	Jumlah anggota KORPRI yang mendpt pembinaan sikap kepedulian sosial	Orang	260
3	Jumlah anggota KORPRI yang mendapat pembekalan keterampilan kewirausahaan	Orang	280
E.	Urusan Kepegawaian		
a.	Pendidikan dan Pelatihan		
1	Jumlah Sumber daya aparatur yang kompeten dan profesional	Orang	710
2	Jumlah sumber daya Widyaaiswara yang kompeten dan profesional	Widyaaiswara	34
b.	Kepegawaian		
1	Persentase pelanggaran disiplin PNS Prov. Sumsel	%	9
2	Pelayanan administrasi data kepegawaian berbasis WEB	%	77
Urusan Pilihan			
A.	Urusan Ketahanan Pangan		
1	Ketersediaan dan cadangan pangan - Ketersediaan energi per kilo kalori per kapita per hari minimal 2.200 - Ketersediaan protein per gram per kapita per hari minimal 57	Kkal/kap/hari	4.770
		Gram/Kap/hari	113

2	Distribusi dari akses pangan - Sistem distribusi pangan yang lancar antara waktu antar wilayah dan stabilitas harga pangan pokok strategis	Komoditi	13
3	Penganeka ragaman dan keamanan pangan - Pola pangan harapan	Skor	91,46
	- Pangan segar yang aman dikonsumsi	Sampel	68
4	Penanganan Rawan pangan	%/tahun	60

Tabel 5.1.3
 Penetapan Indikator Kinerja Daerah untuk
 Misi Ketiga (Meningkatkan Pemerataan yang Berkeadilan)
 RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

Urusan dan Indikator Kinerja		Satuan	Target 2016
Urusan Wajib			
A. Urusan Pendidikan			
a.	Pendidikan		
1	APK SD	%	112
2	APM SD	%	101
3	APK SMP	%	94
4	APM SMP	%	76
5	APK SMA/K	%	72
6	APM SMA/K	%	59
7	APtS SD	%	0,4
8	APtS SMP	%	7,42
9	APtS SMA/K	%	17
10	Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif	%	10
11	Jumlah SMP/SMA satu atap	%	34
12	Angka Kelulusan SD	%	99,75
13	Angka Kelulusan SMP	%	99,90
14	Angka Kelulusan SMA/K	%	99,90
15	Angka Melek Huruf	%	99,82
16	SMA yang memiliki Lab dan Bengkel Keterampilan	%	29
17	APK Perguruan Tinggi	%	23
b.	Perpustakaan		
1	Jumlah diversifikasi layanan perpustakaan	jenis	20
2	Jumlah masyarakat yang mengakses perpustakaan	orang	289.300
3	Jumlah bahan pustaka yang dapat diakses oleh pemustaka	Eks	323.823
4	Jumlah perpustakaan yang dibina	Unit	2.718

B.	Urusan Kesehatan		
1	Jumlah Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	Orang	110
2	Angka Harapan Hidup	%	70,90
3	Prevalensi balita dengan berat badan rendah (angka gizi buruk)	%	<1
4	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	Orang	138
5	Persentase kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	%	98
6	Angka pemakaian kontrasepsi bagi pasangan usia subur	%	65
7	Rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi	%	6,0
8	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>		2,2
9	Jumlah orang umur >15 tahun yang melakukan KTS (konseling dan testing sukarela)	orang	31.466
11	Angka Kesembuhan Penderita TB Paru (BTA +)	%	132
12	Angka Kesakitan Penyakit DBD Per 100.000 penduduk		49
13	<i>Annual Parasit Incidence (API)</i>	Per 1000 penddk	0,5
14	Persentase Rumah Sehat	%	73,9
15	Persentase Keluarga yang Memiliki Akses Air Bersih	%	73,6
16	Jumlah Kasus Narkoba yang direhabilitasi	Orang	90
17	Jumlah Kunjungan Penderita narkoba Meningkat	Orang	400
18	Jumlah Kasus Gangguan Jiwa	Orang	2.700
19	Jumlah Kunjungan Penderita Gangguan Jiwa	Orang	47.208
20	Jumlah Kasus Pasung	orang	40
C.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1	Jumlah SKPD provinsi yang mengimplementasikan PPRG	SKPD	46
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	70,63
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	68,32
4	Jumlah SKPD prov yang memiliki dan memanfaatkan Data Terpilih	SKPD	37
5	Jumlah kelompok usaha perempuan yang dibina	Klmpk	319
6	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani	Kasus	211
7	Jumlah kasus perdagangan perempuan dan anak yang ditangani	kasus	11
8	Jumlah kasus pelanggaran hak anak yang dilaporkan dan ditangani	kasus	319
D.	Urusan Sosial		
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mampu melaksanakan fungsi sosialnya	%	6.58
E.	Urusan Ketenagakerjaan		
1	Jumlah Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	Orang	100
2	Jumlah TKI yang dikirim ke LN legal	Orang	1.931
3	Angka pencari kerja yang dilatih di BLK/LLK yang telah ditempatkan	Orang	4.417

4	Jumlah sarana dan prasarana BLKI	Unit	17
5	Jumlah Penduduk Yang bekerja	orang	3.622.878
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68.42
7	Pengangguran Terbuka	orang	182.321
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		4.50
9	Upah/Gaji Pekerja Lajang terendah berdasarkan tingkat pendidikan terendah, jabatan terendah serta masa kerja terendah	Rp.Juta	2.331.108
10	Jumlah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Kasus	148
E. Urusan Koperasi dan UKM			
1	Nilai Modal Koperasi	Rp. M	1.794,36
2	Pertumbuhan Modal Koperasi	%	2
3	Nilai volume usaha koperasi	Rp.M	2.849,77
4	Pertumbuhan volume usaha koperasi	%	2
5	Nilai Modal UMKMK	Rp. M	9.681,73
6	Omzet UMKMK	Rp.M	25.469,85
7	Penyerapan tenaga kerja sektor UMKMK	Orang	3.017.104
F. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral			
1	Persentase desa dengan akses listrik	%	94,02
G. Urusan Kepemudaan dan Olahraga			
1	Jumlah pemuda yang difasilitasi	Orang	3656
2	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi	OKP	18
3	Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan	Unit	6
4	Jumlah anggota Pramuka yang difasilitasi dalam kepanduan	Orang	4.300
5	Jumlah usaha-usaha Baru yang Dikelola oleh Pemuda	Orang/unit	600/50
6	Jumlah pemuda yang dapat difasilitasi meningkatkan pengetahuan terhadap bahaya narkoba, pornografi, pornoaksi, dan HIV/AIDs	Orang	2.700
7	Jumlah tenaga keolahragaan yang bersertifikat	Orang	355
8	Jumlah Produsen peralatan olahraga yang dapat difasilitasi	Orang/ Produsen	50/4
9	Jumlah masyarakat yang ikut permassalan olahraga	Orang	6.787
10	Jumlah medali emas atlet PPLP	Medali	23
11	Jumlah prestasi atlet pada PON	Peringkat	10
12	Jumlah sarana dan prasarana olahraga	Ponpes/Cabor	50/150
H. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1	Jumlah Organisasi dan Lembaga Desa yang Aktif	Organi-sasi	14.910
2	Persentase masyarakat yang terlibat dalam organisasi dan lembaga masyarakat desa	% keterlibatan	25-30
3	Persentase masyarakat yang ikut dalam Musyawarah Perencanaan Desa	%	25-30

4	Persentase Desa yang Melaksanakan Musrenbangdes	%	80-85
5	Persentase aparatur pemdes yang tertib administrasi dan penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (Akte, KTP, Jamkesmas)	%	75-80
6	Persentase Aparatur Desa yang Profesional	%	40-45

Tabel 5.1.4
 Penetapan Indikator Kinerja Daerah untuk Misi Keempat
 (Pengelolaan Lingkungan yang Lestari dan Penanggulangan Bencana)
 RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

Urusan dan Indikator Kinerja		Satuan	Target 2016
Urusan Wajib			
A. Lingkungan Hidup			
1	Laju penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH	53,77
2	Jumlah penurunan laju peningkatan emisi GRK di 6 sektor	Juta ton CO ₂ eq	2,600
3	Jumlah partisipasi masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup	Orang	800
4	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100%
5	Peraturan daerah bidang Lingkungan Hidup yang diterbitkan	Dok	1 dok Perda
6	Laboratorium lingkungan hidup yang terakreditasi	Jenis Akreditasi	Terakreditasi dengan teregistrasi lingkup air dan udara
B. Urusan Penanggulangan Bencana			
1	Persentase Sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>)	%	20
2	Persentase kerugian akibat bencana	%	80
3	Jumlah masyarakat Siaga Bencana	Orang	50
4	Jumlah Desa Tangguh	Desa	2
5	Jumlah kerjasama pencegahan dan penanggulangan bencana	MOU	1
6	Persentase penurunan titik kebakaran (hotspot)	%	20
C. Urusan Penataan Ruang			
1.	Jumlah peraturan daerah tentang penataan ruang - RTRW	Perda	2
	- Rencana Rinci		10
2.	Menurunnya jumlah konflik pemanfaatan ruang	Jumlah 84	15
3.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	80
4.	Panjang garis batas daerah yang disahkan	segmen	6

Urusan Pilihan			
C.	Urusan Kehutanan		
1	Jumlah Identifikasi/Rencana lokasi permasalahan kawasan hutan yang dapat ditindaklanjuti dengan tata batas	Lokasi/ tahun	10
2	Jumlah Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH yang beroperasi	Unit/ tahun	3
3	Luasan Inventarisasi Sumber Daya Hutan Tingkat Provinsi	Ha/ tahun	657,114
4	Luas Lahan Kritis di dalam dan di luar kawasan hutan yang direhabilitasi (rehab HL/KSA/KPA dan HKm/HD)	Ha/ tahun	250
5	Jumlah penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan	Ha/ tahun	200
6	Luas hutan tanaman	Ha/ tahun	80.000

5.1.1 Pendanaan APBD

Dengan mengacu kepada misi dan 8 (delapan) prioritas yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 sebagaimana berikut :

Tabel 5.1.5
Misi dan Prioritas RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

MISI	PRIORITAS
1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Prioritas 4. Pembangunan Pertanian. Prioritas 5. Infrastruktur dan Energi. Prioritas 6. Investasi dan Pengembangan Usaha.
2. Meningkatkan Stabilitas Daerah	Prioritas 1. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
3. Meningkatkan Pemerataan yang Berkeadilan	Prioritas 2. Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya. Penanggulangan Kemiskinan.
4. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan yang Lestari dan Pengelolaan Bencana	Prioritas 7. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. Prioritas 8. Pengembangan Wilayah.

Maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui program prioritas daerah. 8 prioritas tersebut dapat dijelaskan

secara rinci berdasarkan arah kebijakan, urusan, program dan kegiatan pada tabel 5.1.5 berikut:

Tabel 5.1.5. Prioritas, Arah Kebijakan, Urusan dan Program Prioritas							
NO	PRIORITAS	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SKPD	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Keamanan dan Ketertiban masyarakat	Ketahanan Pangan	Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan	Percentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan	4	825.000.000
			Peningkatan SDM dan Teknologi Pangan	Percentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Badan Ketahanan Pangan	2	450.000.000
			Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Rumusan Kebijakan	Badan Ketahanan Pangan	3	808.400.000
		Urusan Kepegawaian	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif	Presentase PNS mengikuti pelatihan kewirausahaan	Sekretariat KORPRI	2	135.000.000
			Penguatan Organisasi KORPRI	Presentase penguatan organisasi KORPRI	Sekretariat KORPRI	4	40.000.000

			Pembinaan dan Pengembangan Aparatur/PNS/Anggota KORPRI	Persentase kegiatan meningkatnya kemampuan dan keterampilan anggota KORPRI	Badan Kepegawaian Daerah	8	753.301.000
					Badan Pendidikan dan Pelatihan	16	6.002.000.000
					Biro Organisasi dan Tatalaksana	2	110.000.000
					Sekretariat KORPRI	3	236.000.000
			Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dan Kesehatan Jasmani	Persentase PNS/anggota KORPRI AKTIF dalam berolahraga	Sekretariat KORPRI	2	181.839.000
		Urusan Perencanaan	Perencanaan Pembangunan Daerah	% Penerapan sistem perencanaan dan Penganggaran berbasis informasi (e-Palnning)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	18	3.630.000.000
		Urusan Pemerintahan	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penetapan peraturan perUU yang sesuai ketentuan yang berlaku	Biro Hukum dan HAM	12	1.267.300.000

					Biro Organisasi dan Tatalaksana	2	100.000.000
			Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	Presentase peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Inspektorat Provinsi	12	4.727.924.000
					Biro Pemerintahan	1	200.000.000
			Perumusan Kebijakan di Bidang Keagamaan	Persentase perumusan kebijakan di bidang keagamaan	Biro Kesejahteraan Rakyat	6	3.187.890.000
			Perumusan Kebijakan di Bidang Kesehatan	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesehatan	Biro Kesejahteraan Rakyat	1	93.300.000
			Perumusan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Persentase perumusan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	Biro Kesejahteraan Rakyat	1	93.250.000

			Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Pemuda dan Olahraga	Persentase perumusan kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pemuda dan olahraga	Biro Kesejahteraan Rakyat	1	93.300.000
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Presentase anggota dewan yang meningkat kapasitasnya	Biro Otonomi dan Kerjasama	4	340.000.000
					Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan	6	16.096.607.000
			Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1	37.500.000
			Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Kab/Kota	Persentase Raperda APBD 17 Kab/Kota yang dievaluasi tepat waktu	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3	52.500.000
			Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah	9	4.353.588.000
		Urusan Kearsipan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase Peningkatan Kualitas pelayanan Informasi	Badan Arsip Daerah	2	100.000.000

			Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Badan Arsip Daerah	5	400.000.000
		Urusan Komunikasi dan Informatika	Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	Angka melek media	Sekretariat KPID	3	305.000.000
			Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran	Jumlah rekomendasi kelayakan yang dikeluarkan KPID untuk proses penerbitan izin penyelenggaraan	Sekretariat KPID	3	160.000.000
			Penguatan Isi Siaran	Jumlah lembaga Penyiaran yg dimonitoring	Sekretariat KPID	3	200.000.000
		Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase pemahaman nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa terhadap organisasi kemasyarakatan	Badan Kesbangpol	5	950.000.000
			Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase pemahaman wawasan kebangsaan di masyarakat	Badan Kesbangpol	6	700.000.000

			Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase keamanan dan kenyamanan masyarakat di wilayah Provinsi Sumsel	Badan Kesbangpol	3	551.550.000
			Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase meningkatnya pendidikan politik bagi masyarakat di Sumsel	Badan Kesbangpol	4	500.000.000
			Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat	Persentase meningkatnya ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja		
2	Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya	Urusan Kesehatan	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	8	2.290.000.000
			Standardisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase RS terakreditasi	Dinas Kesehatan	3	786.345.000
			Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS, RS Jiwa, RS Paru dan RS Mata	Persentase masyarakat yang memanfaatkan rumah sakit	Dinas Kesehatan	6	238.230.596.000

					Rumah Sakit dr. Ernaldi Bahar	2	5.910.066.000
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata	Percentase rumah sakit yang memenuhi standar	Dinas Kesehatan	2	200.000.000
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan LANSIA	Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut	Dinas Kesehatan	3	266.625.000
			Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Percentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memiliki izin edar yang memenuhi persyaratan kesehatan	Dinas Kesehatan	3	1.460.000.000
			Penanganan Keluarga Berencana	Presentase Cakupan KB pada PUS	Dinas Kesehatan	2	548.194.000
	Urusan Pendidikan	Peningkatan Pendidikan Non Formal	% Angka Melek Huruf	Dinas Pendidikan	6	6.730.000.000	
		Pendidikan Luar Biasa	Prosentase Sekolah menerapkan Pendidikan inklusi	Dinas Pendidikan	3	773.000.000	
		Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah SOP/SPM	Dinas Pendidikan	10	4.008.000.000	

		Urusan Perpustakaan	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan minat baca masyarakat dan jumlah perpustakaan yang terbina	Badan Perpustakaan Daerah	6	0
		Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya pemuda dan organisasi kepemudaan yang difasilitasi	Dinas Pemuda dan Olahraga	7	3.070.000.000
			Kependidikan/Kepramukaan	Meningkatnya anggota pramuka yang difasilitasi	Dinas Pemuda dan Olahraga	4	800.000.000
			Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya prestasi atlet dan pemasyarakatan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	9	4.450.000.000
			Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Meningkatnya fasilitasi kejuaraan cabang olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	3	240.000.000
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	3	580.000.000
		Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak	Badan Pemberdayaan Perempuan	4	712.340.000

			Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Badan Pemberdayaan Perempuan	1	89.000.000
			Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Badan Pemberdayaan Perempuan	4	498.000.000
			Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Persentase peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak	Badan Pemberdayaan Perempuan	1	40.000.000
3	Prioritas Penanggulangan Kemiskinan	Urusan Ketenagakerjaan	Peningkatan Kesempatan Kerja	Prosentase tenaga kerja yang diserap pasar kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11	3.095.000.000
		Urusan Koperasi dan UKM	Perkuatan Permodalan UMKMK	Meningkatnya permodalan Koperasi (Rp. Juta)	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1	110.000.000
			Peningkatan Kegiatan Usaha UMKMK	Meningkatnya volume Usaha (Rp.Juta)	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1	200.000.000
			Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1	350.000.000

			Peningkatan Pemasaran Hasil UMKMK	Meningkatnya omset UKM (Rp. Miliar)	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1	200.000.000
4	Pembangunan Pertanian	Urusan Pertanian	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Jumlah produksi benih : Padi (Ton), Buah-buahan (Batang), Sayuran (Kg), Tanaman hias (Batang)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	7	42.217.000.000
			Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura		Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	6	1.563.075.000
			Pengelolaan Sistem Penyediaan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	- Jumlah Alat Penanganan pasca panen dan pengolahan tanaman pangan dan hortikultura (Unit)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	11	5.989.524.000
			Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	- Prosentasi Tingkat Serangan OPT dan DPI	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	3	2.114.162.000
			Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Pemasaran dan Industri Hasil Pertanian	Jumlah produksi benih : Padi (Ton), Buah-buahan (Batang), Sayuran (Kg), Tanaman hias (Batang)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	8	2.984.500.000

		Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan	Persentase peningkatan prasarana dan sarana perkebunan	Dinas Perkebunan	5	700.000.000
		Pengembangan Perbenihan Perkebunan	Meningkatnya jumlah benih bersertifikat yang beredar	Dinas Perkebunan	2	500.000.000
		Proteksi Tanaman Perkebunan	Meningkatnya jumlah areal yang terkendali serangan OPT	Dinas Perkebunan	4	1.350.000.000
		Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan / P2HP	Persentase peningkatan harga komoditas	Dinas Perkebunan	7	1.550.000.000
		Pengembangan Sentra-sentra Produksi Perkebunan	Meningkatnya areal perkebunan	Dinas Perkebunan	3	850.000.000
		Pengembangan Kelembagaan Usaha Perkebunan/PKUP	Meningkatnya jumlah usaha perkebunan dan peningkatan unit usaha perkebunan yang terawasi	Dinas Perkebunan	3	300.000.000
		Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak	Meningkatnya kab/kota yang akan dilakukan pencegahan dan penanggulangan penyakit pada ternak	Dinas Peternakan	6	2.250.000.000

		Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi daging hasil peternakan yang akan ditingkatkan (Ton)	Dinas Peternakan	7	6.475.000.000
		Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya Promosi dan standarisasi pemasaran hasil produksi peternakan	Dinas Peternakan	6	850.000.000
		Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Meningkatnya kelompok dalam penerapan teknologi peternakan	Dinas Peternakan	6	1.075.000.000
		Pengembangan Kerjasama Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Percentase peningkatan kerjasama penyuluhan	Badan Koordinasi Penyuluhan	5	370.000.000
		Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Percentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian	Badan Koordinasi Penyuluhan	2	400.000.000
		Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Perikanan	Percentase peningkatan prestasi kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan perikanan	Badan Koordinasi Penyuluhan	3	400.000.000

			Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Kehutanan	Percentase peningkatan prestasi kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan kehutanan	Badan Koordinasi Penyuluhan	4	550.000.000
			Pengembangan Teknologi Kehutanan Tepat Guna	Meningkatnya penyuluhan kehutanan yang mendapatkan diseminasi tek. tepat guna	Badan Koordinasi Penyuluhan	1	150.000.000
			Pengembangan Teknologi Pertanian Tepat Guna	Meningkatnya jumlah kelompok pelaku utama yang terlatih	Badan Koordinasi Penyuluhan	3	550.000.000
			Pengembangan Teknologi Perikanan Tepat Guna	Meningkatnya jumlah klmpk tani dan nelayan yang dilatih	Badan Koordinasi Penyuluhan	2	400.000.000
		Urusan Kelautan dan Perikanan	Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah Produk Olahan Kelautan dan Perikanan (ton)	Dinas Kelautan dan Perikanan	7	598.060.000
			Pengembangan BBI Sentral Air Tawar dan BBI Lokal	Jumlah Produksi Benih (ekor)	Dinas Kelautan dan Perikanan	2	450.000.000
		Urusan Koperasi dan UKM	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya jumlah Koperasi Aktif	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2	550.000.000

			Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM	Jumlah Pertumbuhan Wirausaha Baru	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1	400.000.000
5	Infrastruktur dan Energi	Urusan Pekerjaan Umum	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan terbangun dan panjang jalan ditingkatkan/dilebarkan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	6	433.749.995.000
				Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi			
			Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Jaringan Jalan dan Jembatan yang tersedia (dokumen)	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	4	48.841.567.000
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Jumlah sarana dan prasarana kebinamargaan yang tersedia (unit)	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	4	15.900.000.000
		Urusan Perhubungan	Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Prosentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Dishubkominfo	3	1.275.000.000

		Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP)	Jumlah penumpang yang terlayani melalui angkutan sungai dan danau	Dishubkominfo	3	566.450.000
		Pengembangan Transportasi Udara	Meningkatnya keterangkutan penumpang pesawat udara pada SMB II ataupun kawasan barat Sumsel dan tumbuhnya penerbangan perintis antar daerah	Dishubkominfo	6	461.450.000
		Penanggulangan Kelebihan Muatan (Over Loading)	Prosentase menurunnya pelanggaran kelebihan muatan (over loading)	Dishubkominfo	3	2.000.000.000
		Pengembangan Transportasi Perkotaan	Prosentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas perkotaan, khususnya kasus kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki dan unmotorized	Dishubkominfo	5	1.000.000.000

			Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut	Jumlah penumpang melalui Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api	Dishubkominfo	5	5.592.314.000
			Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Angkutan Kereta Api	Jumlah Pengguna KA Perkotaan Palembang Metropolitan (Plg-Inderalaya)	Dishubkominfo	2	1.500.000.000
			Laik Jalan Kendaraan Bermotor	Prosentase kendaraan yang laik jalan	Dishubkominfo	3	726.559.000
		Urusan Penataan Ruang	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penanganan TPA Sampah	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	5	3.375.000.000
			Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen dan Arahan Penataan Ruang Kawasan sesuai dengan dokumen RTRW provinsi	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	2	2.100.000.000
			Penataan Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Tertata	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	15	9.950.000.000
			Penataan Kawasan	Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertangani	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	8	6.800.000.000

		Urusan Perumahan Rakyat	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Penanganan Drainase Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	4	3.000.000.000
		Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sentra HKI	Jumlah HKI terdaftar	Balitbangnovda	1	75.000.000
			Kemitraan Jaringan IPTEK	Jumlah technopark	Balitbangnovda	5	575.000.000
				jumlah kemitraan strategis iptekin			
				jumlah kawasan pusat belajar IPTEKIN			
			Inkubator Teknologi	Jumlah kelompok tenant yang diinkubasi	Balitbangnovda	2	275.000.000
			Desiminasi Iptek Hasil Litbang dan Inovasi	Persentase desiminasi hasil litbang dan Inovasi	Balitbangnovda	3	725.000.000

		Pendayagunaan Iptek	jumlah pusat inovasi	Balitbangnovda	3	600.000.000
		Litbang dan Inovasi Bidang Pendidikan	Jumlah teknologi bidang Pertambangan dan energi yang dimanfaatkan	Balitbangnovda	1	50.000.000
		Litbang dan Inovasi Bidang Kesehatan	Jumlah teknologi bidang kesehatan yang dimanfaatkan	Balitbangnovda	1	75.000.000
		Litbang dan Inovasi Bidang Peningkatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah teknologi bidang Peningkatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan yang dimanfaatkan	Balitbangnovda	1	250.000.000
		Litbang dan Inovasi Bidang Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Teknologi Bidang Sosial Kemasyarakatan yang Dimanfaatkan	Balitbangnovda	3	425.000.000
		Penguatan Kelembagaan		Balitbangnovda	2	180.000.000
		Program Litbang dan Inovasi Bidang Lingkup Pertanian	Jumlah teknologi bidang Lingkup Pertanian yang dimanfaatkan	Balitbangnovda	4	1.770.000.000

		Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral	Pengusahaan Pertambangan dan Peningkatan Produksi Batubara	Meningkatnya dana bagi hasil PNBP batubara menjadi 866 miliar rupiah melalui peningkatan produksi batubara 122 juta ton pada tahun 2018	Distamben	7	960.000.000
			Pengembangan dan Pemanfaatan Geologi ESDM	Percentase pemanfaatan sumber daya kegeologian	Distamben	2	150.000.000
			Pemanfaatan dan Penguasaan Migas	Meningkatnya dana bagi hasil PNBP Migas menjadi 5,7 triliun rupiah; lifting minyak bumi 136,5 juta barel; lifting gas bumi 3 milyar MMBTU pada 2018	Distamben	2	175.000.000
			Pemanfaatan Energi untuk Kebutuhan Listrik bagi Masyarakat	Meningkatnya KK yang mendapat aliran listrik	Distamben	3	350.000.000
6	Investasi dan Pengembangan Usaha	Urusan Perencanaan Pembangunan	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Percentase Perencanaan Ekonomi yang diimplementasikan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	900.000.000

		Urusan Pariwisata	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Sumsel	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5	2.014.100.000
			Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2	500.000.000
			Pengembangan Kemitraan	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja usaha pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4	700.000.000
		Urusan Penanaman Modal	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Kerjasama Investasi	Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah	8	2.700.000.000
			Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi	Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah	5	1.335.473.000
		Urusan Perdagangan	Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Prosentase terciptanya Konsumen Yg mandiri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	425.360.000
7	Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Bencana	Urusan Kehutanan	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan		Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	3	115.430.000

		Pengukuhan Kawasan Hutan	Jumlah Identifikasi/Rencana lokasi permasalahan kawasan hutan (lokasi/tahun)	Dinas Kehutanan	1	184.500.000
		Inventarisasi Sumber Daya Hutan Tingkat Provinsi	Luasan Inventarisasi Sumber Daya Hutan Tingkat Provinsi (Ha/Tahun)	Dinas Kehutanan	1	280.000.000
		Pembentukan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH	Jumlah Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH yang dibentuk (unit)	Dinas Kehutanan	1	130.000.000
		Kelembagaan Pengelolaan DAS Terpadu Musi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan Terpadu DAS Musi (kegiatan/tahun ; unit/tahun)	Dinas Kehutanan	5	526.000.000
		Rehabilitasi Lahan Kritis dalam Kawasan Hutan	Luas Rehabilitasi Lahan Kritis Dalam Kawasan Hutan (Ha/Tahun)	Dinas Kehutanan	3	355.000.000
		Penguatan Kelembagaan Implementasi REDD+ dan RAD GRK	Jumlah Peningkatan, Penyerapan dan Penyimpanan Karbon Hutan (ton CO2/tahun)	Dinas Kehutanan	3	185.000.000

			Penurunan Laju Deforestasi	Jumlah penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan(ha/tahun ; ton CO2-eq/tahun)	Dinas Kehutanan	4	620.000.000
			Penurunan Laju Degradasi Hutan		Dinas Kehutanan	2	135.000.000
			Peningkatan Target Penanaman Hutan	Jumlah Peningkatan, Penyerapan dan Penyimpanan Karbon Hutan (ton CO2/tahun)	Dinas Kehutanan	1	90.000.000
		Urusan Pekerjaan Umum	Pembangunan Talud/Turap dan Bronjong	Jumlah kawasan bantaran sungai yang ditangani	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	1	190.000.000
		Urusan Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Laju Penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	7	1.350.000.000
			Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan LH	Badan Lingkungan Hidup	6	1.065.050.000
			Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Meningkatnya Pembangunan dan Penanganan Pasca Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	179.935.000

			Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Penurunan Resiko Akibat Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	300.000.000
			Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Terbantunya Korban Bencana Alam	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	997.000.000
			Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Teratasinya Penanganan Resiko Akibat Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	50.000.000
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	100.000.000
			Peningkatan Balai Pengobatan Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Korban Bencana Yang Berobat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	50.000.000

8	Pengembangan Wilayah	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Penataan Daerah Otonom Baru	Persentase terfasilitasinya DOB	Biro Pemerintahan	1	150.000.000
		Urusan Perencanaan Pembangunan	Perencanaan Tata Ruang	Prosentase Perencanaan Penataan Ruang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2	400.000.000
			Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Prosentase peningkatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	100.000.000
						601	967.746.146.000

Berdasarkan uraian tersebut, maka total Belanja Langsung untuk semua program prioritas sejumlah Rp.967.746.146.000,-. Namun demikian disamping alokasi pada Belanja Langsung, belanja untuk pembangunan juga dialokasikan pada Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.3.433.560.184.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|----|---|------------------------|
| 1. | Belanja Pegawai | Rp. 854.192.736.000,- |
| 2. | Belanja Hibah | Rp.1.764.350.448.000,- |
| 3. | Belanja Bantuan Sosial | Rp. 600.000.000,- |
| 4. | Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | Rp. 100.000.000.000,- |
| 5. | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | Rp. 709.417.000.000,- |
| 6. | Belanja Tidak Terduga | Rp. 5.000.000.000,- |

Untuk mengetahui rincian alokasi anggaran tiap prioritas tidak dapat dilakukan secara baku (dikotomi) karena banyak program yang saling berhubungan dan mempunyai urusan-urusan pendanaan, sebagimana pada tabel berikut :

Tabel 5.16
Prioritas Pada Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

No	PRIORITAS	APBD 2016			
		BL		BTL	
		SKPD	Dana (Rp)	Kegiatan	Dana (Rp)
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Keamanan dan Ketertiban masyarakat	Inspektorat Provinsi	7.499.999.972	Belanja Pegawai	854.192.736.000
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.859.434.000		
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	70.000.000		
		Badan Ketahanan Pangan	4.533.400.000		
		Badan Kesbangpol	6.000.000.000		
		Badan Arsip Daerah	500.000.000		
		Dinas Perkebunan	4.000.000.000		
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	60.299.998.448		
		Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan	11.958.856.080		
		Sekretariat KORPRI	2.000.000.000		
		Sekretariat KPID	945.000.000		
		Biro Pemerintahan	191.849.994.912		
		Biro Otonomi dan Kerjasama	3.031.075.040		
		Biro Perekonomian	1.897.300.000		
		Biro Administrasi Pembangunan	230.000.000		
		Biro Kesejahteraan Rakyat	3.467.740.000		
		Biro Organisasi dan Tatalaksana	3.000.000.000		

		Biro Humas dan Protokol	41.378.524.480		
		Biro Penghubung	4.090.499.968		
		Satuan Polisi Pamong Praja	5.999.999.936		
2	Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya	Badan Perpustakaan Daerah	10.170.000.128	Hibah Dana BOS	1,090,167,800,000
		Dinas Pendidikan	49.956.000.064	Hibah Sekolah Gratis	298,471,048,000
		Dinas Kesehatan	207.100.015.192	Hibah Kuliah Gratis	15,000,000,000
		Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	200.000.000	Hibah Berobat Gratis	113,200,000,000
		Dinas Pemuda dan Olahraga	12.290.000.000	Hibah Pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial	1,544,000,000
		Dinas Sosial	4.641.106.936	Hibah untuk Beasiswa/Bantuan Kepada Guru	35,000,000,000
		Rumah Sakit dr. Ernaldi Bahar	16.403.886.624	Hibah kepada Yayasan Putra Sampoerna	16,500,000,000
		Badan Pemberdayaan Perempuan	2.274.070.016	Hibah kepada KONI Prov. Sumsel	40,000,000,000
				Hibah kepada KNPI Prov. Sumsel	2,000,000,000
				Hibah kepada PMI Prov. Sumsel	2,000,000,000
				Hibah kepada Gerakan Pramuka Kwarda	3,750,000,000
				Hibah kepada BKOW Sumsel	400,000,000
				Hibah kepada LVRI Sumsel	3,667,600,000
				Hibah kepada Yayasan Masjid Sriwijaya	100,000,000,000
				Hibah kepada Yayasan Catur Sumsel	2,500,000,000
				Hibah kepada Organisasi Keagamaan	25,000,000,000

				Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	10,000,000,000
3	Penanggulangan Kemiskinan	Badan Pemberdayaan Masy. dan Pemerintahan Desa	5.808.400.048	Hibah Sekolah Gratis	298,471,048,000
		Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	7.100.000.000	Hibah Kuliah Gratis	15,000,000,000
		Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	18.890.000.000	Hibah Berobat Gratis	113,200,000,000
		Dinas Pemuda dan Olahraga	3.396.799.968	Hibah Pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial	1,544,000,000
		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	950.000.000	Hibah kepada Yayasan Putra Sampoerna	16,500,000,000
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.550.000.016	Hibah lain-lain	5,150,000,000
		Dinas Sosial	14.768.018.000	Belanja Bantuan Sosial	600,000,000
		Badan Pemberdayaan Perempuan	25.500.000	Belanja Bantuan Keuangan	709,417,000,000
4	Pembangunan Pertanian	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	351.260.540.480	Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab/Kota	100,000,000,000
		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	950.000.000		
		Dinas Kelautan dan Perikanan	6.505.625.000		
		Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	21.835.838.704		
		Dinas Peternakan	13.009.999.936		
		Dinas Perkebunan	8.849.999.872		
		Badan Koordinasi Penyuluhan	5.875.000.000		

5	Infrastruktur & Energi	Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah	8.000.000.000	Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab/Kota	100,000,000,000
		Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	2.000.000.000		
		Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	179.868.000.064		
		Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	32.500.000.000		
		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	603.791.586.176		
6	Investasi & Pengembangan Usaha	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.060.000.000	Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab/Kota	100,000,000,000
		Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah	4.035.473.600		
		Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	200.000.000		
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10.450.000.000		
7	Pengelolaan Lingkungan dan Bencana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	375.000.000	Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000
		Badan Lingkungan Hidup	4.944.999.968		
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.099.999.992		
		Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	127.763.789.992		
		Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	7.500.000.000		
		Dinas Kehutanan	6.021.336.992		

	Badan Koordinasi Penyuluhan	125.000.000		
	Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	115.430.000		

5.1.2. Pendanaan APBN

Alokasi anggaran belanja K/L Tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.780.377,9 miliar, jumlah tersebut lebih rendah Rp.15.102,5 miliar atau sebesar 1,9% bila dibandingkan dengan APBNP Tahun 2015. Terdiri dari 4 (empat) kelompok bidang, yaitu:

1. Bidang Perekonomian Rp. 227.676,4 miiliar;
2. Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp.248.469,3 miliar;
3. Bidang Politik, Hukum Kemanan Rp.223.487,2 miliar;
4. Bidang Kemaritiman Rp.80.748,9 miliar.

Berdasarkan Hasil Pra Musrenbang Nasional Tahun 2015 di Bappenas, maka untuk sementara program dan kegiatan yang akan didanai oleh APBN Tahun 2016 sebagaimana dalam tabel berikut :

No	Lokasi	Kegiatan Strategis	Kementerian	Status Kesepakatan	Kesepakatan Target	Alokasi KL (Juta)	Alokasi BUMN (Juta)	Alokasi Inisiatif Baru (Juta)
1	Sumatera Selatan	Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Fasilitasi Penggilingan Padi)	Kementerian Pertanian	Disepakati melalui Anggaran baseline K/L	23 unit	9700.00	0.00	77000.00
2	Sumatera Selatan	Pengembangan Cetak Sawah	Kementerian Pertanian	Disepakati melalui Anggaran baseline K/L	10000	140000.00	0.00	0.00

3	Kab. Lahat	Pengembangan Jaringan Irigasi (JITUS/JIDES) kecamatan dalam Kabupaten Lahat	Kementerian Pertanian	Disepakati melalui Anggaran baseline K/L	40070 ha	44077.00	0.00	0.00
4	Kota Prabumulih	Penguatan Perlindungan Tanaman dari Gangguan OPT dan DPI (Gerakan Pengendalian OPT)	Kementerian Pertanian	Disepakati melalui Anggaran baseline K/L	19090	40089.00	0.00	84000.00
5	Kota Pagar Alam	Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat (4 Lokasi Pasar di Kota Pagar Alam)	Kementerian Perdagangan	Disepakati melalui Anggaran baseline K/L	7 pasar	44000.00	0.00	0.00
6	Kab. PALI	Fasilitas Penyediaan Kapasitas Produksi Kilang Elpiji	Kementerian ESDM	Disepakati Sebagai Inisiatif Baru	4000 Rumah Tangga	0.00	0.00	20000.00
7	Kota Prabumulih	Pengadaan converter Kit	Kementerian ESDM	Disepakati Sebagai Inisiatif Baru	25 Unit	0.00	0.00	500.00
8	Kota Prabumulih	Pembangunan Jaringan Listrik	Kementerian ESDM	Disepakati Melalui Pendanaan BUMN	2500 Sambungan	0.00	6250.00	0.00
9	Kota Prabumulih	Pembangunan Jaringan Distribusi	Kementerian ESDM	Disepakati Melalui Pendanaan BUMN	17 jaringan	0.00	8649.00	0.00
10	Kab. Ogan Komering Ilir	Penambahan Jaringan Listrik PLN perdesaan	Kementerian ESDM	Disepakati Melalui Pendanaan BUMN	36 KM	0.00	18000.00	0.00
11	Kab. Ogan Komering Ilir	Penambahan Jaringan Listrik PLN Perdesaan Desa Tirta Mulya, Suka Mulya, Jadi Mulya Kec. Air Sugihan	Kementerian ESDM	Disepakati Melalui Pendanaan BUMN	39 KM	0.00	19500.00	0.00
12	Kab. Ogan Komering Ilir	Pengadaan PLTS Komunal	Kementerian ESDM	Disepakati Sebagai Inisiatif Baru	5 Unit	0.00	0.00	50000.00

13	Kab. Ogan Komering Ilir	Pembangunan Gardu Induk untuk Jaringan PLN di Kab. OKI	Kementerian ESDM	Disepakati Melalui Pendanaan BUMN	1 Unit	0.00	70000.00	0.00
14	Kab. Lahat	Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan Desa Batu Urip Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat	Kementerian ESDM	Disepakati Melalui Pendanaan BUMN	1 paket	0.00	5000.00	0.00
15	Kab. Lahat	Pembangunan Pembangkit Listrik Mikro Hidro Desa Pulau Timun Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat	Kementerian ESDM	Disepakati Melalui Pendanaan BUMN	1 paket	0.00	25000.00	0.00
16	Kab. Lahat	Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan Desa Mekar Jaya Kec. Kikim Barat Kab. Lahat	Kementerian ESDM	Disepakati Melalui Pendanaan BUMN	1 paket	0.00	3000.00	0.00
17	Kab. Musi Rawas	Pembangunan Jaringan Listrik	Kementerian ESDM	Disepakati Melalui Pendanaan BUMN	17 km	0.00	5200.00	0.00
18	Kab. Ogan Komering Ulu	Pembangunan Jaringan Listrik	Kementerian ESDM	Disepakati Melalui Pendanaan BUMN	1 kecamatan	0.00	1000.00	0.00
19	Kota Lubuk Linggau	Pembangunan Jaringan Listrik	Kementerian ESDM	Disepakati Melalui Pendanaan BUMN	3 kelurahan	0.00	3000.00	0.00
20	Kab. Empat Lawang	Pembangunan Jaringan Listrik	Kementerian ESDM	Disepakati Melalui Pendanaan BUMN	2 kecamatan	0.00	2000.00	0.00
21	Kab. Ogan Ilir	Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan	Kementerian ESDM	Disepakati Melalui Pendanaan BUMN	6 Kecamatan	0.00	6000.00	0.00

22	Kab. PALI	Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan	Kementerian ESDM	Disepakati Melalui Pendanaan BUMN	1000 RTS	0.00	2000.00	0.00
23	Kab. Muara Enim	Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi gas kota	Kementerian ESDM	Disepakati Sebagai Inisiatif Baru	1 paket	0.00	0.00	40000.00
24	Kab. PALI	Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi gas kota	Kementerian ESDM	Disepakati Sebagai Inisiatif Baru	5000 kk	0.00	0.00	27500.00
25	Kota Prabumulih	Pembangunan Jaringan Gas (SR)	Kementerian ESDM	Disepakati Melalui Pendanaan BUMN	30000 SR	0.00	350000.00	0.00
26	Kab. OKU Selatan	Pembangunan PLTS Terpusat	Kementerian ESDM	Disepakati Sebagai Inisiatif Baru	7 kecamatan	0.00	0.00	15100.00
27	Kab. Ogan Ilir	Pembangunan PLTS Terpusat	Kementerian ESDM	Disepakati Sebagai Inisiatif Baru	2 Desa	0.00	0.00	2000.00
28	Kab. Musi Rawas	Pembangunan PLTS Terpusat	Kementerian ESDM	Disepakati Sebagai Inisiatif Baru	1 kecamatan	0.00	0.00	2000.00
29	Sumatera Selatan	Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	Kementerian Sosial	Disepakati melalui Anggaran baseline K/L	1 Provinsi	1000.00	0.00	0.00
30	Kab. Musi Rawas Utara	Pelebaran jalan lintas sumatera,simpang karang jaya-batas jambi	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat	Disepakati melalui Anggaran baseline K/L	2,7 KM	33000.00	0.00	0.00
TOTAL						277.866	524.599	318.100

Selain pembahasan pada saat Pra Musrenbang, terdapat juga usulan melalui Kementerian/Lembaga yang telah disepakati melalui Konreg Per Wilayah di Kementerian PU yang merupakan kewenangan pusat berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 24.591.679.000.000 :

No	Kementerian	Ditjen	Alokasi (Rp. Juta)	Keterangan
1	Pekerjaan Umum	Bina Marga	1.553.213	Kesepakatan
2	Pekerjaan Umum	Sumber Daya Air	1.310.951	Kesepakatan
3	Pekerjaan Umum	Keciptakaryaan	372.026	Kesepakatan
4	Perhubungan		21.355.489	Satuan III
Total			24.591.679	

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Ditjen Bina Marga Kementerian PU

Kegiatan/Output	Satuan Output	Renja KIL 2016		Stok Program		Pagu dalam juta rupiah
		Volume	Pagu	Volume	Pagu	
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional			1.553.213,17			
Pemeliharaan Rutin Jalan	Km	174,35	2.615,25	-	-	
Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan	Km	1.264,94	63.247,20			
Rehabilitasi Mayor	Km	67,01	193.892,50	-	-	
Rekonstruksi	Km	92,06	506.335,50			
Pemeliharaan Rutin Jembatan	M	10.459,00	7.844,25	-	-	
Pemeliharaan Berkala Jembatan	M	3.010,60	17.380,00	-	-	
Pelebaran Jalan	Km	7,10	77.500,00	216,73	2.870.450,00	
Pernbangunan Fly Over/Underpass/ Terowongan	M	600,00	134.000,00	1.050,00	630.000,00	
Pembangunan Jembatan	M	138,30	20.745,00			-
Paembangunan jalan	Km	1,70	25.000,00	43,00	215.000,00	
Pembangunan Jembatan	M	590,00	285.600,00	987,30	415.535,00	
Dukungan pembebasan lahan	Ha.	1,00	10.000,00	-	-	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyelenggaraan jaringan jalan dan jembatan	Dok.	14,00	69.377,46			-

Penyusunan dokumen pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas jalan dan jembatan	Dok.	5,00	19.477,66	-	-
Penyusunan dokumen pengelolaan sistem pelaksanaan pengujian dan peralatan	Dok.	7,00	17.750,00	-	-
Penyusunan laporan pengelolaan administrasi perkantoran	Bulan	72,00	91.139,74	-	-
Penyusunan laporan secara Elektronik (e-Monitoring)	Lap.	32,00	247,23	-	-
Bulan layanan publik (PNBP)	Bulan	12,00	400,00	-	-
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	1,00	725,00	-	-
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Dok.	83,00	2.936,39	-	-
Gedung/Bangunan	Dok.	1.194,00	7.000,00	-	-
			1.553.213,17		4,130,985,00

2. Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU

Kegiatan/Output	Satuan Output	Renja K/L 2016		Stok Program	
		Volume	Pagu	Volume	Pagu
Program Pengelolaan Sumber Daya Air			1.310.951		388.849
PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN TAMBAK		-	762.545	-	42.938
Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dibangun			329.366		13.700
Jaringan irigasi rawa yang dibangun			40.850		1.100
Jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang ditingkatkan/direhabilitasi			171.850		18.000
Jaringan irigasi rawa yang direhabilitasi			217.520		10.138
Layanan Perkantoran			2.959		-
KEGIATAN : KONSERVASI, PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR GUNUNG BERAPI, DAN PENGAMANAN PANTAI			206.658		222.311
Pengendali banjir yang dibangun			197.400		220.061
<i>Kawasan sumber air yang dikonservasi</i>			800		-
<i>Pengendali banjir, pengendali lahar gunung berapi, dan pengaman pantai yang dioperasi dan dipelihara</i>			3.998		-
<i>Bangunan pengendali sedimen (check dam) dipelihara</i>			4.460		2.250

KEGIATAN : PENINGKATAN TATA KELOLA PENGELOLAAN SDA TERPADU			<u>61.632</u>		<u>0</u>
Layanan teknis administrasi pengelolaan SDM, BMN, keuangan, informasi publik, dan lahan			4.948		-
Layanan manajemen administrasi pengelolaan SDM, BMN, keuangan, informasi publik, dan lahan			27.674		-
Layanan manajemen tata kelola pengelolaan SDA terpadu			13.983		-
Operasional & Pemeliharaan			200		-
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			220		-
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran			755		-
Gedung/Bangunan			11.736		-
NSPK pengelolaan banjir, pengendalian lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai			2.116		-
KEGIATAN : PENGELOLAAN WADUK, EMBUNG, SITU, SERTA BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA			<u>80.900</u>		<u>31.200</u>
<i>Bendungan yang dibangun</i>			80.900		31.200
PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU DAN AIR TANAH			<u>144.145</u>		<u>92.400</u>
<i>Intake air baku yang dibangun/ditingkatkan</i>			144.145		92.400

3. Ditjen Keciptakarya Kementerian PU

Kegiatan/Output	Satuan Output	Renja K/L 2016		Stok Program	
		Volume	Pagu	Volume	Pagu
Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Permukiman	lap	4	4.000		
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan	Ha	204	32.250	3	17.500
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan	Kws.	9	20.700	3	‘
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	lap	19	6.965		
Penyelenggaraan Penataan Bangunan	lap	5	2.000		2.500
Penyelanggaraan Penataan Bangunan Kawasan Khusus	Kab/Kota		47.500		5.000
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan PLP	lap	24	31.146		
Sistem Penanganan Persampahan Skala Regional	KK	1	8.250		
Sistem Penanganan Persampahan Skala Kota	KK	7	30.500	4	3.200
Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Kota	KK	5	15.000	1	3.000
Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Kawasan	KK	2	23.651	1	

Sistem Penanganan Persampahan Skala Kawasan				1	10.000
Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM	lap	8	4.300		
SPAM PDAM	PDAM	5	12.500		
SPAM Non PDAM	Kws.	6	36.003		
SPAM Perkotaan	ltr/dt	235	97.261	513	241.500
Jumlah			372.026		282.700

4. Kementerian Perhubungan

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KETERANGAN
		TARGET KINERJA	SATUAN	KERANGKA PENDANAAN [Rp]	
		21.355.489.285.725,00			
A		503.855.676.000,00			
1	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan			187.105.676.000,00	
	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan			71.655.676.000,00	
	Ruas Jalan Akses Bandara (Palembang) - Letjen Harun Sohar (Palembang) termasuk supervisi	1	paket	2.609.372.000,00	Mendukung ASIAN GAMES 2018
	Ruas Jalan Kolonel H. Burlan (Palembang) - Jenderal Sudirman (Palembang) termasuk supervisi	1	paket	4.510.381.000,00	Mendukung ASIAN GAMES 2018
	Ruas Jalan Basuki Rahmat (Palembang) - R. Sukamto (Palembang) termasuk supervisi	1	paket	3.256.000.000,00	Mendukung ASIAN GAMES 2018
	Ruas Jalan Sp. Penyandingan - Bts. Prov. Lampung (termasuk supervisi)	1	paket	8.276.300.000,00	Menekan angka kecelakaan
	Ruas Jalan Betung - Bts. Kota Sekayu (termasuk supervisi)	1	paket	5.210.000.000,00	Menekan angka kecelakaan
	Ruas Jalan Jenderal Sudirman (Prabumulih) - Bts. Kab. Muara Enim (termasuk supervisi)	1	paket	3.654.000.000,00	Menekan angka kecelakaan
	Ruas Jalan Sp. Belimbing - Bts. Kota Muara Enim (termasuk supervisi)	1	paket	4.251.000.000,00	Menekan angka kecelakaan
	Ruas Jalan Terawas - Bts. Kota Lubuk Linggau (termasuk supervisi)	1	paket	3.624.500.000,00	Menekan angka kecelakaan
	Ruas Jalan Bts. Kota Baturaja - Martapura (termasuk supervisi)	1	paket	4.005.623.000,00	Menekan angka kecelakaan
	Ruas Jalan Garuda (Lubuk Linggau) - (Lubuk Linggau - Bts. Prov. Bengkulu) termasuk supervisi	1	paket	1.825.000.000,00	Menekan angka kecelakaan
	Ruas Jalan Tebing Tinggi - Jembatan Kikim Besar/KM.256 (termasuk supervisi)	1	paket	5.862.500.000,00	Menekan angka kecelakaan
	Ruas Jalan Sei Lilin - Betung (termasuk supervisi)	1	paket		Menekan angka

				6.235.000.000,00	kecelakaan
	Ruas Jalan Betung - Bts. Kota Palembang (termasuk supervisi)	1	paket	4.256.000.000,00	Menekan angka kecelakaan
	Ruas Jalan Simpang Sugih Waras - Bts. Kota Baturaja (termasuk supervisi)	1	paket	3.653.000.000,00	Menekan angka kecelakaan
	Ruas Jalan Simpang Air Dingin - Pagar Alam (termasuk supervisi)	1	paket	3.582.000.000,00	Menekan angka kecelakaan
	Ruas Jalan Bts. Kab. Musi Banyuasin - Muara Beliti (termasuk supervisi)	1	paket	6.845.000.000,00	Menekan angka kecelakaan
	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan			37.000.000.000,00	
	Kota Palembang (termasuk supervisi)	1	paket	2.000.000.000,00	Program WTN
	Pengadaan dan Pemasangan ATCS di Kota Palembang (termasuk supervisi)	37	simpang	25.000.000.000,00	Mendukung ASIAN GAMES 2018
	Kota Martapura (termasuk supervisi)	1	paket	2.000.000.000,00	Program WTN
	Kota Muara Enim (termasuk supervisi)	1	paket	2.000.000.000,00	Program WTN
	Kota Sekayu (termasuk supervisi)	1	paket	2.000.000.000,00	Program WTN
	Kota Kayuagung (termasuk supervisi)	1	paket	2.000.000.000,00	Program WTN
	Kota Pagar Alam (termasuk supervisi)	1	paket	2.000.000.000,00	Program WTN
	Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan LLAJ			1.000.000.000,00	
	Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan LLAJ (Jln. H. Abdul Rozak/Patal Pusri/Monginsidi (Palembang)	1	paket	1.000.000.000,00	
	Pengadaan Shuttle Bus (Kapasitas Sedang)			24.750.000.000,00	
	Pengadaan Shuttle Bus	300	unit	24.750.000.000,00	Mendukung ASIAN GAMES 2018
	Subsidi Operasional Angkutan Jalan			1.200.000.000,00	
	Subsidi Operasi Bus Perintis	3	trayek	1.200.000.000,00	Pengembangan wilayah terpencil
	Pembangunan Terminal			51.500.000.000,00	

	Rehabilitasi Terminal Type A Kayu Agung Kabupaten OKI (termasuk supervisi)	1	terminal	25.500.000.000,00	Pendukung PKN dan PKW
	Rehabilitasi Terminal Type A Betung Kabupaten Banyuasin (termasuk supervisi)	1	terminal	26.000.000.000,00	Pendukung PKN dan PKW
2	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sungai Danau dan Penyeberangan			316.750.000.000,00	
	Pembangunan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan			316.750.000.000,00	
	Pembangunan Dermaga Kapal Cepat Tanjung Api-api (termasuk supervisi)	1	unit	12.500.000.000,00	KEK Tanjung Api-api
	Pembangunan Dermaga II Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api (termasuk supervisi)	1	unit	111.500.000.000,00	KEK Tanjung Api-api
	Pengerukan Kolam Alur Pelayaran Tanjung Api-api (termasuk supervisi)	1.000.000	M ³	68.000.000.000,00	KEK Tanjung Api-api
	Normalisasi Alur Pelayaran (termasuk supervisi)	1	paket	30.000.000.000,00	Jalur transportasi pantai timur
	Pembangunan Dermaga Sungai Tanjung Api-api (termasuk supervisi)	1	unit	51.750.000.000,00	KEK Tanjung Api-api
	Pembangunan Dermaga Srimenanti (termasuk supervisi)	1	unit	12.000.000.000,00	Jalur transportasi transmigrasi
	Pembangunan Dermaga Danau Kota Batu (termasuk supervisi)	1	unit	6.000.000.000,00	Mendukung pariwisata danau
	Pembangunan Dermaga Sungai Mesuji (termasuk supervisi)	1	unit	5.000.000.000,00	Jalur angkutan pedalaman
	Pembangunan Dermaga Sungai Pelabuhan Dalam (termasuk supervisi)	1	unit	5.000.000.000,00	Jalur angkutan pedalaman
	Pembangunan Dermaga Sungai Pegayut (termasuk supervisi)	1	unit	5.000.000.000,00	Jalur angkutan pedalaman
	Pembangunan Dermaga Sungai Harapan Mulia (termasuk supervisi)	1	unit	5.000.000.000,00	Jalur angkutan pedalaman
	Pembangunan Dermaga Sungai Muara Kuang (termasuk supervisi)	1	unit	5.000.000.000,00	Jalur angkutan pedalaman
B	Program Pengembangan Transportasi Laut			194.945.774.725,00	
1	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Tanjung Api-api [lanjutan]			194.945.774.725,00	KEK Tanjung Api-api

C	Program Pengembangan Transportasi Udara			160.800.020.000,00	
	Pengembangan Bandar Udara Internasional SMB II Palembang			50.000.000.000,00	Mendukung ASIAN GAMES 2018
	Perluasan Gedung Terminal [+ 60.000 M ²] kapasitas 6 JPT	60.000	M ²		
	Pembangunan Apron Ultimate [125.000 M ²] kapasitas 20 parking stand narrow body	125.000	M ²		
	Penambahan Aero Bridge	3	unit		
	Perpanjangan Runway [3.050 meter menjadi 3.500 meter]	3.500	M		
	Perpanjangan Taxiway	1	paket		
	Pengembangan Bandar Udara Silampari di Kabupaten Musi Rawas	-	-	60.800.020.000,00	
	Pelebaran Landasan Pacu [dari 30 m menjadi 45 m]	45	M	24.446.600.000,00	Pengembangan kawasan
	Pemenuhan Standar RESA	90	M	10.655.000.000,00	
	Lanjutan Pembangunan Terminal	1	unit	20.546.220.000,00	
	Conveyor Belt	1	unit	400.000.000,00	
	Flood Light	1	paket	500.000.000,00	
	Reinstalasi AFL	1	paket	1.200.000.000,00	
	Peralatan X-Ray Cabin	1	unit	2.102.200.000,00	
	UPS 80 KVA termasuk instalasi	1	unit	950.000.000,00	
	Pengembangan Bandara Atung Bungsu di Kota Pagar Alam	1	bandara	50.000.000.000,00	Pengembangan kawasan
D	Program Pengembangan Transportasi Kereta Api				
	Pengembangan Perkeretaapian Sumatera Selatan	-	-	20.495.887.815.000,00	

	Pembangunan Jalur Kereta Api Ganda [Double Track] Stasiun Simpang - Tanjung Api-api	87	KM	10.757.866.143.000,00	KEK Tanjung Api-api
	Pembangunan Monorel atau LRT Sumatera Selatan	24,5	KM	5.000.000.000.000,00	Mendukung ASIAN GAMES 2018
	Pembangunan Jalur Ganda [Double Track] Stasiun Martapura – Baturaja	35	KM	334.500.000.000,00	Multiyears 2015 dan 2016
	Pengadaan Rel R54 Termasuk Angkutan Sampai ke Site = 9248 Ton	85	KM	131.775.719.000,00	
	Pengadaan 50 unit Wesel R54 Pengganti Wesel R25/R42	50	unit	35.227.317.000,00	
	Penggantian Rel R42 Menjadi Rel R54 Stasiun Prabumulih - Kertapati	85	KM	371.692.149.000,00	
	Perkuatan Badan Jalan KA Antara Gilas - Sepancar	1	paket	12.020.031.000,00	
	Pembangunan Jalur Kereta Api Ganda [Double Track] Stasiun Muara Enim - Stasiun Lahat	40	KM	1.099.004.834.000,00	Jalur KA eksisting
	Pembangunan Perpanjangan Jalur KA Eksisting Inderalaya - Kampus UNSRI	1	paket	39.545.086.000,00	Kelancaran mahasiswa UNSRI
	Pembangunan Peron Tinggi dan Shelter [Lubuk Linggau, Martapura, Kertapati]	3	Stasiun	15.000.000.000,00	
	Perbaikan dan Peningkatan Jembatan KA [Banjarsari - Sukacinta dan Sepancar - Baturaja]	2	unit	34.970.068.000,00	
	Pembangunan Sinyal Elektrik Stasiun Muara Enim	1	paket	46.369.348.000,00	
	Pembangunan Sinyal Elektrik Stasiun Baturaja	1	paket	38.620.379.000,00	
	Pengadaan dan Pemasangan ATP [Penimur - Lubuk Linggau]	1	paket	53.567.332.000,00	
	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Perlintasan Sebidang	8	unit	12.500.000.000,00	
	Pengadaan dan Pemasangan Kabel FO	1	paket	138.554.409.000,00	
	DED Perkuatan Badan Jalan KA	3	dokumen	2.500.000.000,00	
	DED Pembangunan Jalur Kereta Api Ganda [Double Track] Tigagajah - Tanjung Rambang	1	dokumen	7.500.000.000,00	
	DED Pembangunan Persinyalan Elektrik Stasiun Lubuk Linggau dan Martapura	2	dokumen	1.500.000.000,00	
	DED Monorel atau LRT Sumatera Selatan	1	dokumen	5.000.000.000,00	Mendukung ASIAN GAMES 2018

	Pembangunan Underpass Perlintasan Jalan HBR Motik Kabupaten Lahat	1	unit	20.000.000.000,00	
	Pembangunan Jalur Kereta Api Ganda [Double Track] Stasiun Tigagajah - Tanjung Rambang	80	KM	2.113.175.000.000,00	
	DED Pembangunan Rek Kereta Api Trans Sumatera Railways [Jambi - Palembang]	1	dokumen	4.000.000.000,00	Trans Sumatera Railways
	Sterilisasi Stasiun Kereta Api Kertapati, Prabumulih, Lahat, Tebing Tinggi, Baturaja, Martapura	6	stasiun	40.000.000.000,00	
	Desain Pengembangan Stasiun Lubuk Linggau	1	dokumen	1.000.000.000,00	
	Base Station [Perangkat Telekomunikasi] Stasiun Lahat - Stasiun Lubuk Linggau	1	paket	30.000.000.000,00	
	Penggantian Wesel R54 di Emplasemen Stasiun Baturaja - Stasiun Prabumulih	1	paket	100.000.000.000,00	
	Perkuatan Tubuh Baan Lahat - Lubuk Linggau	1	paket	50.000.000.000,00	

APBN Dekon dan TP (Tugas Pembantuan) Tahun 2016 yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak:

- Dana Dekonsentrasi untuk BOK sebesar Rp. 710 juta, dan TP sebesar Rp. 46.853
- Dana Dekonsentrasi untuk kesehatan ibu sebesar Rp. 6.375 juta
- Dana Dekonsentrasi untuk kesehatan anak sebesar Rp. 3.385 juta
- Dana Dekonsentrasi untuk pembinaan gizi masyarakat sebesar Rp. 2.981 juta
- Dana Dekonsentrasi untuk kesehatan kerja sebesar Rp. 1.461 juta
- Dana Dekonsentrasi untuk kesehatan tradisional sebesar Rp. 1.489 juta
- Dana Dekonsentrasi untuk dukungan manajemen sebesar Rp. 1.859 juta
- Secara total dana Dekonsentrasi untuk Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak sebesar Rp. 18.262 juta

2. Program Bina Upaya Kesehatan

- Dana Dekonsentrasi untuk pembinaan upaya kesehatan rujukan sebesar Rp. 676 juta
- Dana Dekonsentrasi untuk pembinaan upaya kesehatan dasar sebesar Rp. 2.216 juta
- Dana Dekonsentrasi untuk penunjang medik sebesar Rp. 661 juta
- Dana Dekonsentrasi untuk pembinaan pelayanan keperawatan sebesar Rp. 699 juta
- Dana Dekonsentrasi untuk pembinaan kesehatan jiwa sebesar Rp. 595 juta
- Dana Dekonsentrasi untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BUK sebesar Rp. 653 juta
- Total dana Dekonsentrasi untuk pembinaan upaya kesehatan sebesar Rp. 5.503 juta

3. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

- Dana Dekonsentrasi untuk surveilans, imunisasi, dan kesehatan matra sebesar Rp. 3.127 juta
 - Dana Dekonsentrasi untuk pengendalian penyakit bersumber binatang sebesar Rp. 1.680 juta
 - Dana Dekonsentrasi untuk pengendalian penyakit menular langsung sebesar Rp. 935 juta
 - Dana Dekonsentrasi untuk pengendalian penyakit tidak menular sebesar Rp. 3.774 juta
 - Dana Dekonsentrasi untuk penyehatan lingkungan sebesar Rp. 3.212 juta
 - Dana Dekonsentrasi untuk dukungan manajemen PPPL sebesar Rp. 400 juta
 - Total dana Dekonsentrasi PPPL sebesar Rp. 13.099 juta
4. Program Pembinaan Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Total dana Dekonsentrasi Program Binfar Alkes sebesar Rp. 1.891 juta
5. Program PPSDMK
- Dana Dekonsentrasi untuk perencanaan SDM Kesehatan sebesar Rp. 6.234 juta
 - Dana Dekonsentrasi untuk pendayagunaan SDM kesehatan sebesar Rp. 2.417 juta
 - Dana Dekonsentrasi untuk pendidikan dan pelatihan aparatur sebesar Rp. 1.470 juta
 - Dana Dekonsentrasi untuk dukungan manajemen PPSDMK sebesar Rp. 429 juta
 - Dana Dekonsentrasi untuk pustanserdik sebesar Rp. 1.297 juta
 - Dana Dekonsentrasi untuk diklat nakes sebesar Rp. 2.970 juta
 - Total dana Dekonsentrasi untuk PPSDMK sebesar Rp. 14.819 juta
6. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemkes

- Dana Dekonsentrasi untuk pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan sebesar Rp. 7.921 juta
- Dana Dekonsentrasi untuk peningkatan kesehatan jamaah haji sebesar Rp. 243 juta
- Dana Dekonsentrasi untuk PPJK sebesar Rp. 1.354 juta
- Dana Dekonsentrasi untuk pusdatin sebesar Rp. 851 juta
- Dana Dekonsentrasi untuk perencanaan dan penganggaran sebesar Rp. 1.280 juta
- Dana Dekonsentrasi untuk administrasi keuangan dan BMN sebesar Rp. 136 juta
- Dana Dekonsentrasi untuk administrasi kepegawaian sebesar Rp. 205 juta
- Dana Dekonsentrasi untuk pengelolaan urusan TU sebesar Rp. 180 juta
- Total dana Dekonsentrasi untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp. 12.174 juta

Untuk Tahun 2016, Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan usulan DAK Rp. 544.332.891.100,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Bidang	Dana	
1.	Kesehatan dan KB		22.000.000.000
	- Pelayanan Rujukan	22.000.000.000	
2.	Kedaulatan Pangan		273.637.161.100
	a. Infrastruktur Irigasi	266.483.000.000	
	b. Pertanian	7.154.161.100	
3.	Kelautan dan Perikanan		29.380.080.000
4.	Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah		3.000.000.000
5.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan		5.315.650.000
	a. Lingkungan Hidup	3.005.650.000	
	b. Kehutanan	2.310.000.000	
6.	Transportasi		211.000.000.000
	a. Infrastruktur Jalan	200.000.000.000	
	b. Perhubungan	11.000.000.000	

5.1.3. Pendanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Untuk menunjang pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan, selain bersumber dari dana APBD, APBN juga didukung oleh dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Swasta. CSR ini sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Untuk mangkoordinasikan CSR, pada 2 Desember 2013 telah dilantik Pengurus Forum CSR Sumsel masa bhakti 2013-2018 oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dengan kebijakan sebagai berikut :

- CSR diarahkan bukan untuk memaksa dunia usaha lebih berperan namun lebih kepada upaya menjamin peran serta seluruh pemangku kepentingan termasuk dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan.
- Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan Sumatera Selatan merupakan suatu rangkaian yang tidak terputus dari Pemanfaatan Ruang (Planet), Pemberdayaan Masyarakat (*People*) termasuk hasil dari pelaksanaan kegiatan ekonomi (*Profit*) yang berkelanjutan.
- CSR dilaksanakan dan dikembangkan untuk mendukung program pembangunan lainnya, disamping yang selama ini pendekatan program yang dapat diCSRkan diantaranya pendidikan, kesehatan dan lingkungan.
- Program CSR memiliki peranan yang sangat penting, tentunya tidak sebatas tanggungjawab perusahaan, tapi juga mempunyai arti peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya pada tanggal 13 Pebruari 2014 telah dibentuk Perhimpunan Pembangunan Berkelanjutan Sumatera Selatan. Gubernur Sumatera Selatan, H. Alex Noerdin, sebagai Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Pembangunan Berkelanjutan Sumatera Selatan, dan Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina. Dengan beberapa kesepakatan diantaranya melibatkan

perusahaan se-Sumatera Selatan untuk bekerjasama dalam proyek pertama Perhimpunan dengan menjadikan Puskesmas di daerah kabupaten/kota sebagai Rumah Sakit Pratama. Prioritas selanjutnya adalah peningkatan mutu pendidikan, lingkungan, dan kesejahteraan sosial yang melibatkan perusahaan bersama pemerintah dan masyarakat dalam koridor tanggung jawab sosial.

Adapun beberapa kerjasama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan CSR yang telah dilakukan selama ini adalah sebagai berikut:

1. CSR Bidang Olahraga

- Gedung Senam dibangun oleh Conoco Philips
- *Sport Science Center* dibangun Oleh PT. MEDCO
- Lapangan Tenis dibangun oleh PT. Bukit Asam

2. CSR Bidang Pendidikan dan Energi

- SMAN Sumatera Selatan (*Sampoerna Academy*) dibangun oleh PT. Sampoerna Indonesia
- Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Kabupaten Musirawas, dibangun oleh PT. Medco Energi Indonesia (menjadi aset serta di kelola oleh Pemkab Musi Rawas)

3. CSR Bidang Agama, Kesehatan dan Lingkungan

- Masjid AR Rahman JSC dibangun oleh PT. BNI (Persero) Tbk
- Gedung Paviliun Bukit Asam RSUD Lahat dibangun oleh PT. Bukit Asam
- Penanaman 500 Pohon Bambu dan Tanaman Lainnya di Merah Mata Banyuasin oleh PT. PUSRI

Untuk Tahun 2016 beberapa kerjasama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan CSR yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. CSR Bidang Penelitian dan Pengembangan

- Pembangunan Kebun Raya Sriwijaya pada tahun 2016

Dengan rincian :

1. DED dan Kantor Pengelola dan Pusat Informasi oleh PT. Bukit Asam
 2. Rumah Dinas & Mess karyawan oleh PT.Bukit Asam
 3. Perpustakaan dibangun oleh Gapindo
 4. Wisma/Guest House oleh Bank Sumsel Babel
 5. Rumah kaca dibangun oleh PT. Pertamina
 6. DED rumah Kaca dan Paranet oleh PT. Pertamina
 7. Komposting oleh PT. Pusri
 8. Panggung terbuka/ Amphitheater oleh BRI
 9. Koleksi tematik tanaman obat dan tanaman basah oleh mitra SKK Migas
 10. Parkir (mushola, toilet & pos jaga) oleh PT. Sentosa Bahagia Bersama
2. CSR Bidang Air Bersih, Air Minum dan Sanitasi
- Bidang Air Bersih
- Provinsi Sumatera Selatan secara khusus menyiapkan strategi pendanaan untuk percepatan capaian air bersih dan sanitasi. Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), hal itu dimulai dengan menyiapkan perencanaan yang matang dalam bentuk Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), studi kelayakan (FS) dan *Detail Engineering Design (DED)*. Perencanaan tersebut menyasar pada beberapa program prioritas seperti SPAM Regional, PAMSIMAS, SPAM Perdesaan.

Pendanaan untuk tiap-tiap program menggunakan investasi pemerintah maupun non-pemerintah. Untuk investasi pemerintah, dana investasi berasal dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Untuk APBN, salah satu kendala terbesar adalah bagaimana memenuhi *readiness criteria*, mengingat beberapa daerah tidak memiliki tanah kas atau lahan yang menjadi salah satu

persyaratan. Untuk investasi non-pemerintah, dana investasi bisa berasal dari pihak swasta, swadaya masyarakat, CSR, dan lain lain.

Pemerintah Provinsi banyak mengambil peran dalam sharing pendanaan karena konsep besarnya adalah pembangunan SPAM Provinsi Sumatera Selatan, telah memetakan pembangunan SPAM di wilayah yang meliputi kluster yang capaian kinerja air minum nya masih rendah.

Bidang Air Minum

Kegiatan CSR yang beroperasional dibidang air minum di Sumatera Selatan sudah dilaksanakan oleh PT. Hindoli pada tahun 2011 dengan dana anggaran sebesar 10 Milyar dengan kapasitas produksi 40 liter/det dengan bantuan pembangunan klorinator, jaringan perpipaan, rumah operasional dan rumah produksi untuk melayani venus-venus yang ada di Kawasan Jakabaring Sport City.

Rencana pengembangan jaringan dan infrastruktur air minum dengan sistem Reserve Osmosis (RO) atau air siap minum di kawasan Jakabaring Sport City membutuhkan anggaran sebesar 30 Milyar. Pengembangan pelayanan air minum dalam mendukung Asean Games 2018 berupa :

1. Pembuatan *ground reservoir* dengan kapasitas 1000 M³
2. Pembangunan rumah pompa
3. Pengembangan Jaringan perpipaan
4. Pembangunan *Water Treatment Plant* (WTP) dengan kapasitas 60 liter/detik

Bidang Sanitasi

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan arti pentingnya keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan kini semakin banyak perusahaan yang memenuhi tanggung jawab sosialnya (CSR). Tanggung jawab perusahaan diwujudkan dalam

beragam bentuk kegiatan, dan perusahaan sebagai pelaksana yang melibatkan mitra-mitra yang kompeten di bidangnya. Dukungan mitra kerja sama menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program-program CSR. Program CSR tidak selalu diwujudkan dalam bentuk kegiatan amal, melainkan juga dapat dilaksanakan dalam program pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara langsung sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kegiatan CSR yang dilakukan beberapa perusahaan sekarang ini sangat beragam, termasuk kegiatan CSR dalam bentuk pembangunan infrastruktur permukiman (bidang infrastruktur dasar) Diantaranya program sanitasi berupa pengelolaan persampahan, dan pengelolaan limbah.

CSR ini juga sudah berkembang di level Kabupaten/Kota, salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang telah beberapa tahun memanfaatkan dana CSR untuk pembangunan adalah Kabupaten Muara Enim. Kabupaten Muara Enim yang telah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk program kemitraan bina lingkungan (CSR-PKBL). Kabupaten Muara Enim mendapatkan penghargaan *National Awards For CSR Leading Region* karena berhasil memaksimalkan pembangunan berkelanjutan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan menjaga kelestarian lingkungan. Perusahaan - perusahaan yang merealisasikan Program CSR-PKBL di Kabupaten Muara Enim diantaranya :

1. PT. Bukit Asam (Persero) Tbk pada tahun 2014 anggaran CSR-PKBL sebesar 17,5 Milyar dan untuk kegiatan Prasarana Umum (jalan lingkungan, drainase, persampahan, penyediaan air bersih dan pengelolahan limbah).

2. PT. Pertamina EP pada tahun 2014 anggaran CSR-PKBL sebesar 40,12 Milyar dan untuk kegiatan prasarana umum sebesar 18 Milyar.
3. PT. Medco EP Asset Lematang Enim pada tahun 2014 anggaran CSR-PKBL sebesar 632 Juta dan untuk kegiatan prasarana umum sebesar 389 Juta.
4. PT. Sumberdaya Sewatama (perusahaan pertambangan dan energi) pada tahun 2014 anggaran CSR-PKBL sebesar 102 Juta yang dialokasikan untuk pengadaan sumur gali untuk memenuhi kebutuhan air bersih di perdesaan.

Untuk tahun 2015 Kabupaten Muara Enim mengajukan usulan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebesar 644 Milyar terdiri dari :

- Alokasi kegiatan infrastruktur dasar permukiman/prasarana umum (jalan lingkungan, drainase, persampahan, penyediaan air bersih dan pengelolahan limbah) sebesar 291 Milyar
- Alokasi kegiatan kesehatan, pendidikan dan pasar sebesar 353 Milyar.

Dan Pada tahun 2016 Kabupaten Muara Enim rencana usulan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebesar 750 Milyar terdiri dari :

- Alokasi kegiatan Infrastruktur dasar permukiman/prasarana umum (jalan lingkungan, drainase, persampahan, penyediaan air bersih dan pengelolahan limbah) sebesar 423 Milyar.
- Alokasi kegiatan kesehatan, pendidikan dan pasar sebesar 327 Milyar.

5.1.4. Pendanaan Swasta

Pada Kota Palembang dalam pelayanan air minum sudah dibantu oleh pihak swasta yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Perusahaan air minum PT. Adhi Tirta Sriwijaya (ATS) dan PT. Sekawan Kontrindo.

1. PT. Adhi Tirta Sriwijaya (ATS)

- Pada saat ini cakupan pelayanan air minum oleh PT Adhi Tirta Sriwijaya melayani air minum sebanyak 163.381 jiwa dengan kapasitas terpasang sebesar 130 liter/detik, dan wilayah pelayanan di kelurahan Talang Kelapa Kota Palembang.
- Rencana kedepan mengembangkan pelayanan air minum dengan kapasitas terpasang 40 liter/detik yang akan melayani 100.000 jiwa atau 20.000 KK daerah cakupan di kelurahan Talang Jambe dan sekitarnya. Pengembangan tersebut direncanakan sebesar 20 Milyar.

2. PT. Sekawan Kontrindo

- Pada saat ini cakupan pelayanan air minum oleh PT. Sekawan Kontrindo melayani air minum sebanyak 19.200 jiwa dengan kapasitas terpasang sebesar 60 liter/detik dan wilayah pelayanan di Komplek Ogan Permata Indah (OPI) Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.
- Rencana kedepan pengembangan pelayanan air minum dengan kapasitas terpasang 20 liter/detik yang akan melayani 50.000 jiwa atau sekitar 10.000 KK, daerah cakupan pelayanan di perumahan OPI dan sekitarnya. Pengembangan tersebut membutuhkan dana sebesar 15 Milyar.

5.1.5. Kerjasama Pemerintah Swasta

1. Rencana Pembangunan Jalan Tol Palembang-Indralaya

Jalan Lintas Timur Sumatera pada ruas Palembang-Indralaya sepanjang 22 km dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi salah satu ruas yang paling sering terjadi kemacetan. Waktu tempuh ruas Palembang-Indralaya terus mengalami perlambatan dari 30 menit pada tahun 2005 saat ini mencapai 1 jam dalam kondisi tidak macet. Pada saat macet waktu tempuh Palembang-Indralaya dapat mencapai 3 jam bahkan lebih. Lamanya waktu tempuh akan mempengaruhi biaya angkut kendaraan. Dengan kondisi Pulau Sumatera pada umumnya dan Provinsi Sumatera Selatan pada khususnya yang mengandalkan distribusi logistik melalui angkutan darat (jalan raya) maka lamanya waktu tempuh akan mempengaruhi besarnya ongkos angkut yang pada akhirnya akan mempengaruhi harga barang di tingkat konsumen.

Untuk mempercepat waktu tempuh ruas Palembang-Indralaya (target Nasional tahun 2019 = 2,2 jam/100km) maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengusulkan untuk dibangunnya jalan Tol Ruas Palembang-Indralaya sebagai alternatif bagi pengguna jalan yang melintasi ruas Palembang-Indralaya. Jalan Tol Palembang-Indralaya direncanakan sepanjang 22 km dengan lebar ruang milik jalan (rumija) selebar 80 m dan kecepatan rencana sebesar 100 km/jam.

Pembangunan Jalan Tol Palembang-Indralaya ini dilakukan dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Pihak swasta yang akan membangun Jalan Tol ini adalah PT. Hutama Karya Tbk. sesuai dengan Perpres RI No. 100 tahun 2014 tanggal 17 September 2014. Total biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan Jalan Tol ini adalah sebesar 3,3 triliun rupiah. Pada tahun 2015 ini akan dibangun Jalan Tol Tahap I sepanjang 7 km senilai 1 triliun rupiah dan sisanya sepanjang 15 km akan dibangun pada tahun 2016 senilai 2,2 triliun rupiah.

2. Rencana Pembangunan Jalur Kereta Api Tanjung Enim-Tanjung Api-Api
Dalam rangka menunjang proses pengembangan hulu-hilir ini pemerintah Sumatera Selatan berencana akan membangunan sarana prasarana angkutan penunjang yaitu Rencana Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Tanjung Enim-Tanjung Api-Api dan pengembangan terminal khusus batubara di Pelabuhan Tanjung Carat. Jalur kereta api yang akan dibangun ini sepanjang 372 km dengan trase utama sepanjang 295 km mulai dari Tanjung Api-Api melewati Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muba, Kabupaten Pali, Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat. Trase kereta api cabang akan dibangun sepanjang 77 km dari Kabupaten Musi Banyuasin ke Kabupaten Musi Rawas Utara. Total batubara yang mampu diangkut keseluruhan mencapai 57 juta ton per tahun. Dari sisi ekonomi proyek pembangunan jalan Kereta Api Tanjung Enim – Tanjung Api-Api ini akan memberikan nilai Economic Internal Rate Return (EIRR) sebesar 28,87 %, Benefit Cost Ratio (BCR) sebesar 2,41 dan Economic Net Present Value (ENPV) sebesar US\$ 6.287,40 juta. Dari sisi kelayakan finansial rencana proyek ini memberikan nilai Financial Internal Rate Return (FIRR) sebesar 17,48 %, dengan Net Present Value (NPV) sebesar US\$ 6.175 juta dan Payback Period selama 12 tahun (Hasil Studi Jalur Kereta Api Batubara Tanjung Enim-Tanjung Api-Api, 2014)

Rencana Jalur Kereta Api Tanjung Enim - Tanjung Api-Api ini juga terintegrasi untuk mensuplai angkutan bahan mentah ke Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api dan Kawasan Ekonomi Tanjung Carat. Enam Kabupaten yang dilewati rencana trase Kereta Api selain merupakan sentra produksi batubara juga merupakan sentra produksi karet dan sawit.

Rencana Jalur Kereta Api Tanjung Enim – Tanjung Api-Api ini akan dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dengan inisiatif/pemrakarsa dari Pihak Swasta (*unsolicited project*) total biaya untuk pembangunan Jalur Kereta Api dan Dermaga khususnya adalah sebesar 34,2 triliun rupiah.

5.2. Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2017 (Prakiraan Maju)

Tahap pembangunan 2017 merupakan percepatan (akselerasi) dan perluasan hilirisasi industri pengolahan hasil pertanian dan pertambangan dengan didukung oleh pemantapan Kawasan Ekonomi khusus Tanjung Api-Api, pemanfaatan hasil ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi; dan peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM); dan pengembangan pariwisata berstandar internasional di Provinsi Sumatera Selatan.

Tahap pembangunan 2017 terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal berikut:

- (1) Meningkatnya standar pelayanan pendidikan dan kesehatan sesuai standar nasional dan ASEAN;
- (2) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- (3) Terbangunnya dan tertatanya jaringan infrastruktur strategis pendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api;
- (4) Terbangunnya dan tertatanya infrastruktur pendukung pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur pariwisata;
- (5) Meningkatnya produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan, serta kelautan dan perikanan;
- (6) Berkembangnya kawasan/klaster industri sebagai simpul industri pengolahan berbasis pertanian dan pertambangan;
- (7) Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) terutama dari meningkatnya akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran;
- (8) Meningkatnya mutu jasa pariwisata sesuai dengan standar nasional dan ASEAN;

- (9) Meningkatnya nilai tambah dan perdagangan komoditas unggulan dari hasil pengembangan pusat-pusat inovasi;
- (10) Berkembangnya kerjasama riset unggulan sesuai standar nasional dan ASEAN.

Berdasarkan RPJMD Tahun 2013-2018, maka target indikator kinerja yang akan dicapai oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 diurai berdasarkan misi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.1
 Penetapan Indikator Kinerja Daerah untuk
 Misi Kesatu (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi)
 RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

Urusan dan Indikator Kinerja		Satuan	Target 2017
Urusan Wajib			
B. Urusan Pekerjaan Umum			
1	Cakupan Penanganan Drainase Permukiman	Kab/ Kota	3
2	Jumlah kawasan kumuh yang tertangani	Kawasan	3
3	Jumlah kawasan layak huni yang tertangani	Kawasan	2
4	Cakupan penanganan TPA Sampah	Kab/Kota	2
5	Jumlah kawasan agropolitan yang tertangani	Kab/Kota	2
6	Persentase panjang jalan terbangun dan panjang jalan ditingkatkan/dilebarkan	%	21,72
7	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	85
B. Urusan Perencanaan Pembangunan			
1	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang KEK:		
	- Jalan	Km	na
	- Air Bersih	L/Det	na
	- Lahan	Ha	na
	- Drainase	Km	na
	- IPAL	Unit	na
	- WTP	Unit	na
	- Perkantoran	Ha	na
C. Urusan Perhubungan			
1	Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	%	<13

2	Jumlah penumpang yang terlayani melalui angkutan sungai dan danau	org/th	140.000
3	Meningkatnya keterangkutan penumpang pesawat udara pada SMB II ataupun kawasan barat Sumsel dan tumbuhnya penerbangan perintis antar daerah	org/th	3,18 jt
4	Persentase menurunnya pelanggaran kelebihan muatan (over loading)	%	15
5	Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas perkotaan, khususnya kasus kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki dan unmotorized	%	13
6	Jumlah penumpang dan kendaraan melalui Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-API	Org/th	90.000
7	Jumlah Pengguna KA Perkotaan Palembang Metropolitan (Plg-Inderalaya)	Org/th	140.000
8	Jumlah penumpang angkutan laut	Org/th	620.920
9	Jumlah barang dengan angkutan laut	Ton/th	21.582.375
10	Jumlah barang dengan angk. Darat	Ton/th	11.796.624
11	Jumlah barang dengan angkutan kereta api	Ton/th	17.102.304
12	Jumlah barang dengan angkutan udara	Ton/th	14.258
13	Persentase kendaraan yang laik jalan	%	65
14	Jumlah bus pariwisata	Unit Bus	116
D. Urusan Koperasi dan UKM			
1	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	UKM	1.050
E. Urusan Penanaman Modal			
1	Nilai Realisasi Investasi PMDN	Rp. Triliun	10,1
2	Nilai Realisasi Investasi PMA	Rp. Triliun	13,25
F. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah			
a. Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah			
1	Jumlah pusat belajar Iptekin	Pusat Belajar	3
2	Jumlah HKI terdaftar	HKI	3 HKI
3	Jumlah Technopark	STP	1
4	Jumlah Pusat Inovasi di Kab/kota	PI	4
5	Jumlah Produk bisnis inovatif baru	%	40
6	Jumlah teknologi hasil litbang yg dimanfaatkan	Teknologi	12
7	Jumlah kemitraan strategis IPTEKIN yang menjalin PKS dan MoU	Dokumen perjanjian	3
8	Jumlah pelayanan IPTEKIN di daerah	Unit	3
Urusan Pilihan			
B. Urusan Pertanian			
1	Produksi Pertanian		
	Produksi Padi	Ton	4.419.461

	Produksi Jagung	Ton	188.474
	Produksi Kedelai	Ton	18.219
	Produksi Karet	Ton	1.200.000
	Produksi Kelapa Sawit	Ton	2.280.000
	Produksi Kelapa	Ton	62.000
	Produksi Kopi	Ton	144.000
	Produksi Daging	Ton	77.750
	Produksi Susu	liter	115.640
	Produksi Telur	Ton	85.152
	Produksi Ikan Tangkap	Ton	96.485,4
	Produksi Ikan Budidaya	Ton	636.884
2	Penyuluh Pertanian	Org	2.150
3	Jumlah peningkatan kelas kelompok pelaku utama	Unit	525
4	Jumlah penumbuhan gabungan kelompok pelaku utama	Unit	175
5	Jumlah pelaku usaha teregistrasi	Unit	175
6	Jumlah teknologi yang dikembangkan	Unit	18
7	Rata-rata Harga Produk Pertanian di Tingkat Petani	%	2,70
B. Urusan Kehutanan			
1.	Jumlah produksi kayu dan HTI	Juta m ³ /th	5,50
2	Sumbangan Sektor Kehutanan	Rp. M	19,35
C. Urusan Kelautan dan Perikanan			
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	116,00
D. Urusan Perdagangan			
1	Nilai Ekspor	US \$ Jt /th	2.994,30
2	Pertumbuhan Ekspor	(%)	3,50
3	Nilai Perdagangan Antar Wilayah/ Perdagangan Antar Pulau (Moda Transportasi Laut)	(Ton)	2.098.750
E. Urusan Industri			
1	Jumlah Produksi Industri Pengolahan	Ton	1.946.850
2	Pertumbuhan Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan	%	4,00
3	Pertumbuhan Investasi di Sektor Industri Pengolahan	%	3,00
4	Jumlah Klaster Industri Unggulan Daerah	Unit Usaha	5
5	Jumlah IKM Pangan	Unit Usaha	27.017
6	Jumlah IKM kerajinan sandang dan kulit serta kerajinan dan umum	Unit Usaha	8.858
7	Jumlah Klaster Industri Unggulan Daerah / Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID)/Rencana Inti Pengembangan Industri Daerah (RIPID) yang Ditetapkan	Perda/Perkada	2
F. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral			

1	Produksi Batubara	Juta Ton	25,20
2	Lifting Minyak bumi	Ribu Barrel	27.518
3	Lifting Gas Bumi	Ribu MMBTU	621.882
4	Nilai PNBP Pertambangan (Royalti dan Landrent)	Milyar	189,83
5	Nilai PNBP Minyak Bumi	Milyar	331,09
6	Nilai PNBP Gas Bumi	Milyar	875,57
7	PAD	Juta	106,09
9	Rasio Desa Berlistrik	Persen	85,53
10	Jumlah produksi listrik	Gwh	7.517
11	Share PDRB Sektor Pertambangan	%	1,53
G. Urusan Pariwisata			
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Orang	3.650.377
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	35.349
3	Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dikembangkan	DTW/Tempat wisata	42
4	Jumlah Sanggar Seni yang Berkembang	Sanggar	240
5	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Pariwisata	Orang	47.698

Tabel 5.2.2
 Penetapan Indikator Kinerja Daerah untuk
 Misi Kedua (Meningkatkan Stabilitas Daerah)
 RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target 2016
Urusan Wajib			
A.	Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah		
1	Jumlah ringkasan dokumen Perencanaan yang dapat diakses publik	Dokumen	17
2	Persentase penerapan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik	%	100
B.	Urusan Penanaman Modal		
1.	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang diterbitkan	Ijin/ no ijin	252
2.	Jangka waktu perijinan dan non perijinan pada unit PTSP yang selesai sesuai dengan SOP	Hari	5
C.	Urusan Kesatuan dan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		
a.	Kesatuan Bangsa		
1	Jumlah Kasus Konflik Kepengurusan Partai Politik	Kali	0
2	Jumlah Konflik Pendirian rumah ibadah yang ditangani	Kali	0
3	Jumlah Forum Pemuda Antar Umat Beragama yang aktif	Forum	9

4	Jumlah Anggota FKUB yang aktif	Orang	310
5	Jumlah kasus konflik antar umat beragama	Kali	0
6	Jumlah organisasi dan lembaga budaya masyarakat yang aktif	Ormas	72
7	Persentase masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan	%	20
8	Jumlah Anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang Aktif	Orang	275
9	Jumlah kasus konflik antar anggota masyarakat	Kali	10
10	Jumlah Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang aktif	Orang	136
11	Jumlah Organisasi Masyarakat yang menjalin kerjasama dengan pemerintah	Orkes-mas	650
12	Persentase penduduk yang ikut dalam Pemilu dan Pemilukada	%	70
13	Jumlah kasus sengketa Pemilu dan Pemilukada	Kasus	1
14	Persentase kasus sengketa Pemilu dan Pemilukada	%	100
b.	Satuan Polisi Pamong Praja		
1	Jumlah kasus pelanggaran perda	Kasus	225
D.	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah		
a.	Sekretariat Daerah		
1	Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	B
b.	Sekretariat DPRD		
1	Persentase anggota DPRD yang aktif dalam perumusan kebijakan publik	%	78
2	Jumlah masukan partai politik dalam perumusan kebijakan publik	Masukan	40
3	Jumlah masukan organisasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik	Masukan	20
c.	BPKAD		
1	Status Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP
d.	Inspektorat		
1	Persentase SKPD dengan status laporan kinerja baik	%	80
2	Persentase peningkatan nilai laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	%	82
e.	KORPRI		
1	Jumlah anggota KORPRI yang mendapat pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani	Orang	3.000
2	Jumlah anggota KORPRI yang mendapat pembinaan sikap kepedulian sosial	Orang	340
3	Jumlah anggota KORPRI yang mendapat pembekalan keterampilan kewirausahaan	Orang	320
E.	Urusan Kepegawaian		
a.	Pendidikan dan Pelatihan		

1	Jumlah Sumber daya aparatur yang kompeten dan profesional	Orang	640
2	Jumlah sumber daya Widya swara yang kompeten dan profesional	Widya swara	37
b.	Kepegawaian		
1	Persentase pelanggaran disiplin PNS Prov. Sumsel	%	6
2	Pelayanan administrasi data kepegawaian berbasis WEB	%	85

Urusan Pilihan

B. Urusan Ketahanan Pangan

1	Ketersediaan dan cadangan pangan - Ketersediaan energi per kilo kalori per kapita per hari minimal 2.200	Kkal/kap/hari	5.009
	- Ketersediaan protein per gram per kapita per hari minimal 57	Gram/Kap/hari	119
2	Distribusi dari akses pangan - Sistem distribusi pangan yang lancar antara waktu antar wilayah dan stabilitas harga pangan pokok strategis	Komoditi	13
3	Penganeka ragaman dan keamanan pangan - Pola pangan harapan	Skor	94,31
	- Pangan segar yang aman dikonsumsi	Sampel	85
4	Penanganan Rawan pangan	%/tahun	60

Tabel 5.2.3

Penetapan Indikator Kinerja Daerah untuk
Misi Ketiga (Meningkatkan Pemerataan yang Berkeadilan)
RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

Urusan dan Indikator Kinerja		Satuan	Target 2017
Urusan Wajib			
A. Urusan Pendidikan			
a.	Pendidikan		
1	APK SD	%	112,06
2	APM SD	%	102
3	APK SMP	%	97
4	APM SMP	%	78
5	APK SMA/K	%	76
6	APM SMA/K	%	62
7	APtS SD	%	0,3
8	APtS SMP	%	6,31
9	APtS SMA/K	%	10
10	Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif	%	10

11	Jumlah SMP/SMA satu atap	%	68
12	Angka Kelulusan SD	%	99,81
13	Angka Kelulusan SMP	%	99,90
14	Angka Kelulusan SMA/K	%	99,90
15	Angka Melek Huruf	%	99,84
16	SMA yang memiliki Lab dan Bengkel Keterampilan	%	32
17	APK Perguruan Tinggi	%	26
b.	Perpustakaan		
1	Jumlah diversifikasi layanan perpustakaan	jenis	23
2	Jumlah masyarakat yang mengakses perpustakaan	orang	350.500
3	Jumlah bahan pustaka yang dapat diakses oleh pemustaka	Eks	327.383
4	Jumlah perpustakaan yang dibina	Unit	2.868
B.	Urusan Kesehatan		
1	Jumlah Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	Orang	105
2	Angka Harapan Hidup	%	80,10
3	Prevalensi balita dengan berat badan rendah (angka gizi buruk)	%	<1
4	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	Orang	136
5	Persentase kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	%	99
6	Angka pemakaian kontrasepsi bagi pasangan usia subur	%	67
7	Rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi	%	5,5
8	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>		2,1
9	Jumlah orang umur >15 tahun yang melakukan KTS (konseling dan testing sukarela)	orang	36.500
11	Angka Kesembuhan Penderita TB Paru (BTA +)	%	139
12	Angka Kesakitan Penyakit DBD Per 100.000 penduduk		48
13	<i>Annual Parasit Incidence (API)</i>	Per 1000 penddk	0,5
14	Persentase Rumah Sehat	%	76,4
15	Persentase Keluarga yang Memiliki Akses Air Bersih	%	76,8
16	Jumlah Kasus Narkoba yang direhabilitasi	Orang	86
17	Jumlah Kunjungan Penderita narkoba Meningkat	Orang	415
18	Jumlah Kasus Gangguan Jiwa	Orang	2.640
19	Jumlah Kunjungan Penderita Gangguan Jiwa	Orang	49.208
20	Jumlah Kasus Pasung	orang	20
C.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1	Jumlah SKPD provinsi yang mengimplementasikan PPRG	SKPD	43

2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	71,13
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	69,18
4	Jumlah SKPD prov yang memiliki dan memanfaatkan Data Terpilih	SKPD	39
5	Jumlah kelompok usaha perempuan yang dibina	Klmpk	327
6	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani	Kasus	197
7	Jumlah kasus perdagangan perempuan dan anak yang ditangani	kasus	10
8	Jumlah kasus pelanggaran hak hak anak yang dilaporkan dan ditangani	kasus	327
D.	Urusan Sosial		
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mampu melaksanakan fungsi sosialnya	%	7.57
E.	Urusan Ketenagakerjaan		
1	Jumlah Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	Orang	120
2	Jumlah TKI yang dikirim ke LN legal	Orang	2.040
3	Angka pencari kerja yang dilatih di BLK/LLK yang telah ditempatkan	Orang	4.859
4	Jumlah sarana dan prasarana BLKI	Unit	15
5	Jumlah Penduduk Yang bekerja	orang	3.677.221
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69.06
7	Pengangguran Terbuka	orang	182.303
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		4.23
9	Upah/Gaji Pekerja Lajang terendah berdasarkan tingkat pendidikan terendah, jabatan terendah serta masa kerja terendah	Rp.Juta	2.634.152
10	Jumlah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Kasus	162
E.	Urusan Koperasi dan UKM		
1	Nilai Modal Koperasi	Rp. M	1.828,21
2	Pertumbuhan Modal Koperasi	%	2
3	Nilai volume usaha koperasi	Rp.M	2.903,54
4	Pertumbuhan volume usaha koperasi	%	2
5	Nilai Modal UMKMK	Rp. M	9.788,08
6	Omzet UMKMK	Rp.M	25.719,52
7	Penyerapan tenaga kerja sektor UMKMK	Orang	3.039.329
F.	Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral		
1	Persentase desa dengan akses listrik	%	94,02
G.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga		
1	Jumlah pemuda yang difasilitasi	Orang	4156
2	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi	OKP	19
3	Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan	Unit	6
4	Jumlah anggota Pramuka yang difasilitasi dalam	Orang	4.300

	kepanduan		
5	Jumlah usaha-usaha Baru yang Dikelola oleh Pemuda	Orang/unit	600/50
6	Jumlah pemuda yang dapat difasilitasi meningkatkan pengetahuan terhadap bahaya narkoba, pornografi, pornoaksi, dan HIV/AIDs	Orang	2.700
7	Jumlah tenaga keolahragaan yang bersertifikat	Orang	355
8	Jumlah Produsen peralatan olahraga yang dapat difasilitasi	Orang/ Produsen	50/8
9	Jumlah masyarakat yang ikut permassalan olahraga	Orang	10.447
10	Jumlah medali emas atlet PPLP	Medali	25
11	Jumlah prestasi atlet pada PON	Peringkat	na
12	Jumlah sarana dan prasarana olahraga	Ponpes/Cabor	50/150
H.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
1	Jumlah Organisasi dan Lembaga Desa yang Aktif	Organi-sasi	15.236
2	Persentase masyarakat yang terlibat dalam organisasi dan lembaga masyarakat desa	% keterlibatan	30-35
3	Persentase masyarakat yang ikut dalam Musyawarah Perencanaan Desa	%	30-35
4	Persentase Desa yang Melaksanakan Musrenbangdes	%	85-90
5	Persentase aparatur pemdes yang tertib administrasi dan penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (Akte, KTP, Jamkesmas)	%	80-85
6	Persentase Aparatur Desa yang Profesional	%	45-50

Tabel 5.2.4
 Penetapan Indikator Kinerja Daerah untuk Misi Keempat
 (Pengelolaan Lingkungan yang Lestari dan Penanggulangan Bencana)
 RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

Urusan dan Indikator Kinerja		Satuan	Target 2017
Urusan Wajib			
A. Lingkungan Hidup			
1	Laju penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH	51,226
2	Jumlah penurunan laju peningkatan emisi GRK di 6 sektor	Juta ton CO ₂ eq	2,730
3	Jumlah partisipasi masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup	Orang	900
4	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100%
5	Peraturan daerah bidang Lingkungan Hidup yang diterbitkan	Dok	0
6	Laboratorium lingkungan hidup yang terakreditasi	Jenis Akreditasi	Terakreditasi dengan teregistrasi lingkup air dan udara
B.	Urusan Penanggulangan Bencana		

1	Persentase Sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>)	%	20
2	Persentase kerugian akibat bencana	%	70
3	Jumlah masyarakat Siaga Bencana	Orang	50
4	Jumlah Desa Tangguh	Desa	2
5	Jumlah kerjasama pencegahan dan penanggulangan bencana	MOU	1
6	Persentase penurunan titik kebakaran (hotspot)	%	20
C.	Urusan Penataan Ruang		
1.	Jumlah peraturan daerah tentang penataan ruang - RTRW	Perda	-
	- Rencana Rinci		12
2.	Menurunnya jumlah konflik pemanfaatan ruang	Jumlah 84	20
3.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	80
4.	Panjang garis batas daerah yang disahkan	segmen	8
Urusan Pilihan			
C.	Urusan Kehutanan		
1	Jumlah Identifikasi/Rencana lokasi permasalahan kawasan hutan yang dapat ditindaklanjuti dengan tata batas	Lokasi/ tahun	10
2	Jumlah Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH yang beroperasi	Unit/ tahun	3
3	Luasan Inventarisasi Sumber Daya Hutan Tingkat Provinsi	Ha/ tahun	473,972
4	Luas Lahan Kritis di dalam dan di luar kawasan hutan yang direhabilitasi (rehab HL/KSA/KPA dan HKm/HD)	Ha/ tahun	250
5	Jumlah penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan	Ha/ tahun	200
6	Luas hutan tanaman	Ha/ tahun	80.000

Untuk Total Program dan Kegiatan Tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp.2.186.504.678.351,79 dan Tahun 2017 (Prakiraan Maju) diperkirakan sebesar Rp 3.072.074.495.541,87 dengan rincian per SKPD sebagai berikut :

Tabel 5.2.
Pagu SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju 2017

NO	NAMA SKPD	RANCANGAN 2016	PRAKIRAAN MAJU 2017
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Dinas Pendidikan	55.709.475.000	160.000.000.000
2	Dinas Kesehatan	250.600.000.000	300.000.000.000
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	597.500.000.000	1.000.000.000.000
4	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	206.700.000.000	210.000.000.000
5	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	202.258.000.000	300.000.000.000
6	Dishubkominfo	32.700.000.000	50.000.000.000
7	Dinas Sosial	21.425.000.000	40.000.000.000
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.550.000.000	10.000.000.000
9	Dinas Koperasi dan UKM	4.000.000.000	15.000.000.000
10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9.220.000.000	30.000.000.000
11	Dinas Pemuda dan Olahraga	13.200.000.000	30.000.000.000
12	Dinas Pendapatan Daerah	25.500.000.000	28.600.000.000
13	Dinas Pertanian TPH	21.585.838.900	35.000.000.000
14	Dinas Perkebunan	13.000.000.000	20.000.000.000
15	Dinas Peternakan	15.700.000.000	17.270.000.000
16	Dinas Kehutanan	7.850.837.041	11.000.000.000
17	Dinas Pertambangan dan Energi	6.300.000.000	10.000.000.000
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.900.000.000	25.000.000.000
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	60.500.000.000	76.000.000.000
20	Inspektorat Provinsi	7.500.000.000	8.250.000.000
21	Bappeda	12.837.932.310,79	14.121.725.542
22	Badan Lingkungan Hidup	5.100.000.000	8.000.000.000
23	Badan Pemberdayaan Perempuan dan PA	4.000.000.000	8.000.000.000
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.200.000.000	7.920.000.000
25	BP3MD	7.000.000.000	9.000.000.000
26	Badan Kesbangpol	6.000.000.000	7.000.000.000

27	Badan Pendidikan dan Pelatihan	12.000.000.000	15.000.000.000
28	BPKAD	32.000.000.000	35.200.000.000
29	Balitbangnovda	8.000.000.000	8.800.000.000
30	Badan Kepegawaian Daerah	4.600.000.000	5.060.000.000
31	Badan Ketahanan Pangan	6.000.000.000	8.000.000.000
32	BPMPD	6.172.200.000	6.789.420.000
33	Badan Arsip Daerah	2.000.000.000	3.000.000.000
34	Badan Perpustakaan Daerah	21.500.000.000	23.650.000.000
35	Badan Koordinasi Penyuluhan	6.000.000.000	7.000.000.000
36	Sekretariat Daerah	328.421.340.000	361.263.474.000
37	<i>a. Biro Pemerintahan</i>	<i>192.000.000.000</i>	<i>211.200.000.000</i>
38	<i>b. Biro Otonomi dan Kerjasama</i>	<i>3.031.075.000</i>	<i>3.334.182.500</i>
39	<i>c. Biro Hukum dan HAM</i>	<i>2.000.000.000</i>	<i>2.200.000.000</i>
40	<i>d. Biro Perekonomian</i>	<i>2.000.000.000</i>	<i>2.200.000.000</i>
41	<i>e. Biro Administrasi Pembangunan</i>	<i>3.000.000.000</i>	<i>3.300.000.000</i>
42	<i>f. Biro Kesejahteraan Rakyat</i>	<i>5.950.000.000</i>	<i>6.545.000.000</i>
43	<i>g. Biro Organisasi dan Tatalaksana</i>	<i>3.000.000.000</i>	<i>3.300.000.000</i>
44	<i>h. Biro Umum dan Perlengkapan</i>	<i>73.540.265.000</i>	<i>80.894.291.500</i>
45	<i>I. Biro Humas dan Protokol</i>	<i>43.900.000.000</i>	<i>48.290.000.000</i>
46	Badan Penghubung	8.000.000.000	8.800.000.000
47	Satuan Polisi Pamong Praja	6.000.000.000	6.600.000.000
48	Sekretariat DPRD	111.659.894.000	122.825.876.000
49	Sekretariat KPID	3.000.000.000	4.000.000.000
50	Sekretariat KORPRI	2.000.000.000	3.000.000.000
51	Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	600.000.000	660.000.000
52	Rumah Sakit DR. Ernaldi Bahar	17.714.161.100	22.264.000.000
TOTAL		2.186.504.678.351,79	3.072.074.495.541,87

5.3. Rencana Program dan Kegiatan Per SKPD

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja, kebutuhan dana/pagu indikatif, sumber dana, catatan penting, dan prakiraan maju masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel 5.3. sebagai berikut :

BAB VI

BAB VI RENCANA PEMBANGUNAN BERDIMENSI KEWILAYAHAN

Dalam menyusun perencanaan pembangunan berbasis pengembangan wilayah, penting untuk melihat keterpaduan sektoral, spasial, dan antar pelaku pembangunan di dalam dan antar wilayah. Sebagai upaya mewujudkan pembangunan berimbang, maka pembangunan wilayah perlu senantiasa diarahkan pada tujuan pengembangan wilayah, antara lain mencapai pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan.

Arah kebijakan pembangunan kewilayahannya dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dengan tetap mengoptimalkan pengembangan potensi daerah. Tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya sinergi pembangunan antardaerah dalam memantapkan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan dan energi nasional serta pendorong pertumbuhan wilayah dalam Koridor Ekonomi Sumatera.

Penyusunan arah kebijakan pembangunan kewilayahannya dilakukan dengan tahapan: (i) melakukan identifikasi kekuatan dan potensi wilayah Sumatera Selatan, (ii) mengidentifikasi sebaran dan konsentrasi spasial sektor-sektor unggulan, (iii) mengidentifikasi konektivitas wilayah, dan (iv) formulasi arah kebijakan dan strategi.

6.1 Gambaran Kekuatan dan Potensi Wilayah

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan memiliki kawasan bergambut seluas 1,42 juta ha atau 15,46 persen dari luas wilayah. Dengan luasan seperti ini menjadikan Provinsi Sumatera Selatan sebagai provinsi terluas kedua di Pulau Sumatera (setelah Provinsi Riau) yang memiliki kawasan gambut. Dilihat dari ketebalannya, kawasan gambut di Provinsi Sumatera Selatan memiliki ketebalan yang bervariasi antara 50-400 cm atau termasuk kategori dangkal hingga dalam. Sekitar 96,8 persen termasuk gambut dangkal hingga sedang, sisanya 3,2 persen atau 45.009 ha merupakan gambut dalam yang sebarannya terdapat di Kabupaten Musi

Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung, bahwa gambut yang termasuk dalam kategori kawasan lindung apabila mempunyai ketebalan lebih dari 3 m.

Tabel 6.1

Sebaran dan Luas Kawasan Gambut Menurut Kedalaman di Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)	Dangkal (50-100 cm)	Sedang (100-200 cm)	Dalam (200-400 cm)
1	Banyuasin	252.706,52	dangkal	sedang	dalam
2	Muara Enim	24.104,00	-	sedang	dalam
3	Musi Banyuasin	340.604,48	dangkal	Sedang	dalam
4	Musi Rawas	34.126,00	-	sedang	-
5	Ogan Komering Ilir	768.501,00	-	Sedang	dalam
Jumlah		1.420.042	-	-	-

Sumber: Raperda RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2033, Bappeda

Provinsi Sumatera Selatan memiliki sumberdaya hutan yaitu seluas 3.022.622 ha atau sekitar 37,98 persen dari luas Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rentan terhadap bencana kebakaran hutan, baik yang disebabkan oleh manusia/masyarakat maupun perubahan musim kemarau. Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di dalam Provinsi Sumatera Selatan saja, tapi juga masyarakat yang berada di provinsi yang berdekatan, bahkan hingga menimbulkan dampak internasional hingga ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Tabel 6.2
Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi/Status
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014

No	Fungsi Hutan	Luas (Ha)	%
1	Hutan Lindung	585.548	6.37
2	Hutan Produksi Tetap	1.711.000	18.63
3	Hutan Produksi Konversi	172.179	1.87
4	Hutan Produksi Terbatas	214.730	2.95
5	Suaka Margasatwa	271.110	2.33
6	Taman Nasional	531.928	5.79
7	Taman Hutan Raya	0	0
8	Taman Wisata Alam	223	0
Total		3.022.622,11	37,98

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, 2014 berdasarkan SK Menhut 866 tahun 2014

Sumberdaya air di Provinsi Sumatera Selatan dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu sumberdaya air permukaan dan sumberdaya air tanah. Wilayah Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah kaya sumberdaya air, karena dialiri oleh banyak sungai. Beberapa sungai yang relatif besar adalah Sungai Musi, Sungai Ogan, Sungai Komering dan Sungai Lematang. Persediaan air di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada dasarnya sangat tergantung dari sungai-sungai utama, yakni Sungai Musi dan anak-anak sungainya. Ketergantungan masyarakat yang tinggal di sepanjang pinggiran sungai terhadap keberadaan sungai tersebut masih sangat besar terutama dalam memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari. Komponen utama pembentuk air tanah adalah air hujan yang sebagian meresap ke dalam tanah di daerah imbuhan (*recharge area*) dan sebagian tersimpan di dalam akuifer serta sebagian lagi keluar secara alamiah di daerah luah (*discharge area*). Berdasarkan tempatnya air tanah tidak terlepas dari litologi dan morfologinya. Melihat persebaran keberadaan air tanah di Provinsi Sumatera Selatan dapat dibedakan menjadi : wilayah air tanah dataran, wilayah air tanah perbukitan dan

wilayah air tanah kaki gunung api (Robert, H. 1996). Namun, secara umum data potensi air tanah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan belum banyak dilakukan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Geologi Tata Lingkungan, diketahui bahwa cekungan air tanah yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 9 (sembilan) lokasi, yaitu: (1) Dua cekungan di dalam provinsi: (a) CAT Karangagung (Kab. Musi Banyuasin dan Kab. Ogan Komering Ilir); (b) CAT Palembang-Kayuagung (Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang dan Prabumulih); dan (2) tujuh cekungan lintas batas provinsi: (a) CAT Jambi-Dumai (Prov. Sumsel, Prov. Jambi, dan Prov. Riau); (b) CAT Bangko-Sarolangun (Prov. Sumsel dan Prov. Jambi); (c) CAT Sugiwaras (Prov. Sumsel dan Prov. Jambi); (d) CAT Lubuk Linggau-Muara Enim (Prov. Sumsel, Prov. Bengkulu, dan Prov. Lampung); (e) CAT Muaraduo-Curup (Prov. Sumsel dan Prov. Bengkulu), (f) CAT Baturaja (Prov. Sumsel dan Prov. Lampung), dan (g) CAT Ranau (Prov. Sumsel dan Prov. Lampung).

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai potensi sumberdaya energi yang sangat melimpah, baik sumberdaya energi fosil maupun non fosil. Jenis sumberdaya energi fosil seperti batubara, minyak, dan gas bumi merupakan cadangan yang patut diperhitungkan secara nasional karena potensinya yang cukup besar. Demikian juga dengan potensi sumberdaya non fosil yang bersifat terbarukan seperti panas bumi, biomasa, dan mini/mikro-hidro, terdapat dalam jumlah yang signifikan. Potensi sumberdaya energi terbarukan ini apabila dikembangkan secara optimal akan memberikan alternatif untuk menggantikan penggunaan energi fosil.

Potensi cadangan minyak bumi di Provinsi Sumatera Selatan hingga saat ini tersebar di Kabupaten Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Komering Ulu, Ogan Ilir dan Kota Prabumulih. Cadangan minyak di 8 (delapan) daerah tersebut diperkirakan sebesar 757,6 MMSTB atau sekitar 8,78 % dari total cadangan minyak bumi nasional. Berdasarkan statusnya cadangan minyak bumi di Provinsi Sumatera Selatan dengan status terbukti sebesar 448,2 MMSTB atau 10,7 % dari total cadangan terbukti minyak bumi nasional.

Berdasarkan besarnya *lifting* yang terdapat di setiap daerah penghasil, maka terdapat beberapa sentra akumulasi besar dari minyak

bumi di Provinsi Sumatera Selatan, mulai dari yang terbesar sampai terkecil berturut-turut adalah Kabupaten Musi Banyuasin (48,50%), Kabupaten Muara Enim (24,04%), Kabupaten Musi Rawas (10,85%) dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (5,69%). Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi di 4 (empat) kabupaten tersebut dapat dikategorikan sebagai area prospek ekonomi tinggi.

Cadangan gas bumi di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 24.179.980 BSCF. Bila dibandingkan dengan cadangan gas bumi nasional yaitu 185.797.870 BSCF, maka rasio potensi gas bumi Provinsi Sumatera Selatan terhadap cadangan gas bumi nasional adalah 13,01%. Ada 2 (dua) sentra akumulasi besar dari gas alam di Provinsi Sumatera Selatan apabila dilihat berdasarkan *lifting* gas buminya, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin (48,41%) dan Kabupaten Musi Rawas (39,21%). Wilayah kerja pertambangan gas bumi di kedua kabupaten tersebut dapat dikategorikan sebagai area prospek ekonomi tinggi.

Potensi batubara di Provinsi Sumatera Selatan cukup besar, yaitu 22.240,4 juta ton atau sekitar 38,5 % dari total cadangan sumberdaya batubara nasional yaitu 57.847,7 juta ton. Sedangkan potensi cadangan yang siap tambang di Provinsi Sumatera Selatan adalah sekitar 2.653,9 juta ton atau sekitar 38 % dari cadangan siap tambang nasional yaitu 6.981,6 juta ton. Cadangan batubara di Provinsi Sumatera Selatan tersebar di 6 (enam) kabupaten. Cadangan batubara di Provinsi Sumatera Selatan dengan status terukur sebesar 19.843,68 juta ton, cadangan batubara dengan status terunjuk sebesar 2.071,79 juta ton dan cadangan batubara dengan status tereka sebesar 325 juta ton.

Pengusahaan batubara di Provinsi Sumatera Selatan terlihat sangat prospektif pada masa yang akan datang. Hal ini dapat dilihat dari penjualan batubara yang cenderung naik dari tahun 2004 hingga tahun 2008. Kenaikan penjualan batubara terlihat signifikan seiring dengan peningkatan kebutuhan batubara, terutama untuk PLTU. Selain dipergunakan untuk PLTU, batubara dimanfaatkan juga untuk memenuhi kebutuhan pabrik semen dan industri lain.

Tabel 6.3
Cadangan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten	Cadangan (Juta Ton)			Jumlah (Juta Ton)
		Terukur	Terunjuk	Tereka	
1	Muara Enim	13.563,21	-	-	13.563,21
2	Lahat	2.714,97	-	-	2.714,97
3	Musi Rawas	-	1.235,00	-	1.235,00
4	Musi Banyuasin	3.565,50	-	-	3.565,50
5	Ogan Komering Ulu	-	836,79	-	836,79
6	Ogan Komering Ilir	-	-	325,00	325,00
Total		19.843,68	2.071,79	325,00	22.240,47

Sumber : Statistik Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan 2008.

Laporan Masterplan Sumatera Selatan Lumbung Energi Nasional.

Gas metana adalah gas yang terdapat di dalam lapisan batubara. Pada umumnya gas metana berasosiasi dengan gas CO₂, N₂ dan air. Wilayah Provinsi Sumatera Selatan memiliki daerah prospektif seluas 20.000 km² atau 27,03 persen dari luas daerah prospektif di Indonesia. Sedangkan potensi sumberdaya gas metana di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 120 TCF.

Gas metana dapat digunakan untuk keperluan gas domestik, pembangkit listrik dan bahan baku untuk industri kimia. Peralatan dan infrastruktur yang diperlukan dalam pemanfaatan gas metana adalah sama dengan yang dipergunakan untuk gas bumi, sehingga di masa mendatang apabila gas CBM telah diproduksi, maka dapat langsung disalurkan pada jaringan pemipaan gas bumi yang telah tersedia.

Panas bumi merupakan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Energi tersebut berasal dari magma yang mendidihkan air yang ada di dalam tanah, kemudian uap air yang ada dapat diubah menjadi tenaga listrik. Energi ini tidak menimbulkan limbah seperti minyak bumi dan batubara. Potensi panas bumi di Provinsi Sumatera Selatan berada di 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang dan Kota Pagar Alam. Potensi

panas bumi terbesar dan telah dikembangkan di Provinsi Sumatera Selatan terdapat di Bukit Lumut Balai Kabupaten Muara Enim (835 MWe).

Tabel 6.4
Potensi Panas Bumi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009

No	Lokasi	Kabupaten/ Kota	Potensi (MWe)	Keterangan
1	Ulu Danau (Pulau Beringin)	OKU Selatan	231	Spekulatif
2	Marga Bayur (Lawang Agung)	OKU Selatan	339	Hipotesis
3	Way Selabung	OKU Selatan	231	Spekulatif
4	Rantau Dadap (Segamit)	Muara Enim	225	Hipotesis
5	Bukit Lumut Balai	Muara Enim	835	Spekulatif
6	Tanjung Sakti	Lahat	50	Indikasi
7	Way Panas, Kota Batu	OKU Selatan	-	Indikasi
8	Ulu Musi	Empat Lawang	-	Indikasi
Total			1.911	

Sumber: Statistik Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan 2009.

Di Provinsi Sumatera Selatan terdapat potensi sumberdaya air untuk Pembangkit Listrik Mini Hidro (PLTMH) yang tersebar di 5 (lima) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Lahat, Musi Rawas, OKU Selatan, Muara Enim dan Kota Pagar Alam. Total daya yang dapat dihasilkan dari sumberdaya air yang terdapat di 5 (lima) kabupaten/kota tersebut sekitar 8.506,08 KW.

Hal ini dapat dilihat dari daya terpasang pada Pembangkit Listrik Mini Hidro (PLTMH) yang baru mencapai 390 KW atau 4,58 persen dari potensi total daya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Selain potensi sumberdaya air untuk PLTMH, di Provinsi Sumatera Selatan juga memiliki sumberdaya air yang dapat dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang terdapat di Sungai Lematang (83,2 MW), Sungai Enim (47 MW) dan Danau Ranau (34 MW).

Tabel 6.5
Sebaran Potensi Sumberdaya Air (Mini/Mikrohidro)
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/ Kota	Lokasi	Total Daya (Kw)
1	Lahat	Perigi, Sungai Salak, Sungai Ayun, Sungai Endikat, Lawang Agung, Tanjungan, Sungai Betung, Sungai Cawang, Sungai Kikim Kanan, Air Betung.	1.613,28
2	Pagar Alam	Prahu, Pematang Bango, Mingkik, Sukajadi, Talang Sejemput, Tebat Benawa.	1.285,27
3	Musi Rawas	Lekok, Layang, Temam II, Sungai Kerale, Bukit Bukok, Sungai Kejatan.	2.028,11
4	OKU Selatan dan OKU	Pematang Danau, Ulu Danau, Arom Ante, Cukuhnau, Sungai Kepayang Kecil, Way Telema, Air Kenik.	1.619,21
5	Muara Enim	Bedegung, Air Dingin, Penindaian, Tanjung Agung, Sungai Basung, Air Bodor, Segamit	1.960,21
Total			8.506,08

Sumber: Masterplan Provinsi Sumatera Selatan Sebagai Lumpung Energi Nasional

Potensi sumberdaya air yang ada tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan energi listrik di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 6.6
**Sebaran PLTMH dan Daya Terpasangnya Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009**

No	Kabupaten	Lokasi	Daya Terdapat (KW)	Kondisi
1	OKU	Pulau Bringin	30	Operasional
		Muara Dua Kisam	22	Operasional
2	Muara Enim	Aremantai	40	Operasional
		Semendo Darat	40	Operasional
3	Lahat	Kota Agug	30	Operasional
		Pulau Pinang	40	Operasional

4	OKU Selatan	Sugihan	61	Operasional
		Penyandingan	15	Operasional
		Pagar Agung	32	Operasional
		Tanjung Durian	80	Operasional
Total		390		

Sumber: *Statistik Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan, 2009.*

Pengembangan wilayah Sumatera Selatan sebagaimana yang telah direncanakan menjadi beberapa kawasan budidaya yaitu diantaranya pertanian, perkebunan, industri dan lain-lain. Secara rinci arah pengembangan wilayah dimaksud dapat dilihat pada tabel 6.7 berikut ini:

Tabel 6.7
Arahan Pengembangan Wilayah Berdasarkan Karakteristik dan
Unggulan Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

No	Wilayah	Karakteristik Wilayah	Unggulan Wilayah	Arahan Pengembangan
Kabupaten				
1	Banyuasin	Dataran rendah, bergelombang	Pertanian, perkebunan, perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan pertanian • Kawasan perkebunan • Kawasan perikanan • Kawasan industri
2	Empat Lawang	Perbukitan, Pegunungan	Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perkebunan
3	Lahat	Perbukitan, Pegunungan	Perkebunan, tambang mineral, pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perkebunan • Kawasan pertambangan • Kawasan pertanian
4	Muara Enim	Dataran rendah, perbukitan, pegunungan	Tambang, perkebunan, hutan tamanan, pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan pertambangan • Kawasan perkebunan • Kawasan pertanian • Kawasan industri

No	Wilayah	Karakteristik Wilayah	Unggulan Wilayah	Arahan Pengembangan
5	Musi Banyuasin	Dataran rendah, perbukitan	Tambang, perkebunan, pertanian, hutan tanaman	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan hutan produksi • Kawasan perkebunan • Kawasan pertanian • Kawasan pertambangan
6	Musi Rawas	Perbukitan, pegunungan	Perkebunan, pertanian,	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perkebunan • Kawasan pertanian
7	Musi Rawas Utara	Perbukitan, pegunungan	Perkebunan, tambang	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perkebunan • Kawasan pertambangan
8	Ogan Ilir	Dataran rendah, perbukitan	Pertanian, perikanan, perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan pertanian • Kawasan perkebunan • Kawasan perikanan
9	Ogan Komering Ilir	Dataran rendah	Hutan tanaman, perkebunan, pertanian, perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan hutan produksi • Kawasan perkebunan • Kawasan pertanian • Kawasan perikanan
10	Ogan Komering Ulu	Perbukitan	Perkebunan, pertanian, tambang	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perkebunan • Kawasan pertanian • Kawasan pertambangan
11	OKU Selatan	Perbukitan, Pegunungan	Perkebunan, pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perkebunan • Kawasan pertanian
12	OKU Timur	Perbukitan	Pertanian, perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan pertanian • Kawasan perkebunan

No	Wilayah	Karakteristik Wilayah	Unggulan Wilayah	Arahan Pengembangan
13	Penukal Abab Lematang Ilir	Dataran rendah, perbukitan	Perkebunan, tambang, hutan tanaman	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan hutan produksi • Kawasan perkebunan • Kawasan pertambangan
Kota				
14	Lubuklinggau	Pegunungan	Jasa, pariwisata, perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perkebunan • Kawasan permukiman • Kawasan pariwisata
15	Pagar Alam	Pegunungan	Pariwisata, pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan pertanian • Kawasan permukiman • Kawasan pariwisata
16	Palembang	Dataran rendah	Jasa, industri	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan permukiman
17	Prabumulih	Perbukitan	Perkebunan, pertanian, jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Perkebunan • Kawasan pertanian • Kawasan permukiman

Sumber : Raperda RTRW Provinsi Tahun 2013-2033

6.2 Konsentrasi dan Sebaran Spasial Sektor Unggulan Wilayah

Dalam rangka pengembangan klaster industri unggulan diperlukan analisis konsentrasi dan sebaran spasial sektor-sektor unggulan wilayah. Dengan mengkombinasikan metode kuantitatif *Coefficient of Localization* dan *Location Quotient* akan diketahui pola-pola sebaran sektor-sektor tersebut secara spasial. Sektor-sektor pertambangan, perikanan budidaya, hortikultura buah-buahan, perkebunan karet dan industri manufaktur relatif terkonsentrasi di beberapa daerah saja. Demikian juga dengan sektor angkutan dan telekomunikasi serta keuangan, di mana Palembang memiliki peran yang sangat besar.

Tabel 6.8
Konsentrasi dan Sebaran Spasial Sektor Unggulan

NO	SEKTOR	COEFF. OF LOCALIZATION	KONSENTRASI SPASIAL
1.	Padi	0.33	Banyuasin (25%) Ogan Komering Ulu Timur (17%) Ogan Komering Ilir (16%)
2.	Palawija	0.37	Ogan Komering Ilir (23%) Musi Banyuasin (18%) Ogan Komering Ulu Timur (16%) Banyuasin (16%)
3.	Hortikultura – sayuran	0.29	Ogan Komering Ulu Timur (16%) Muara Enim (15%) Banyuasin (13%) Ogan Komering Ilir (13%)
4.	Hortikultura – buah-buahan	0.48	Ogan Ilir (27%) Ogan Komering Ulu Timur (27%) Muara Enim (14%)
5.	Sapi	0.30	Muara Enim (17%) Ogan Komering Ulu Timur (16%) Lahat (11%) Musi Rawas (11%) Ogan Komering Ilir (10%)
6.	Perikanan Budidaya	0.60	Ogan Komering Ilir (43%) Banyuasin (23%) Musi Banyuasin (22%)
7.	Karet	0.43	Musi Rawas (40%) Musi Banyuasin (16%)
8.	Kopi	na	OKU Selatan (23,4%) Empat Lawang (18,6%) Muara Enim (18,3%)
9.	Kelapa Sawit	Na	Musi Banyuasin (23,34%) Banyuasin (23,04%) Musi Rawas (17,70%)
10.	Manufaktur	0.42	Palembang (60%)
11.	Pertambangan	0.57	Musi Banyuasin (32%) Banyuasin (32%) Muara Enim (20%)
12.	Perdagangan	0.25	Palembang (40%)

NO	SEKTOR	COEFF. OF LOCALIZATION	KONSENTRASI SPASIAL
13.	Angkutan & telekomunikasi	0.6	Palembang (80%) Lubuk Linggau (3%)
14.	Keuangan	0.35	Palembang (47%) Prabumulih (6%) Lubuk Linggau (6%)
15	Sektor jasa	0.30	Palembang (47%), Lubuk Linggau (4%), OKU (5%), Prabumulih (3%)

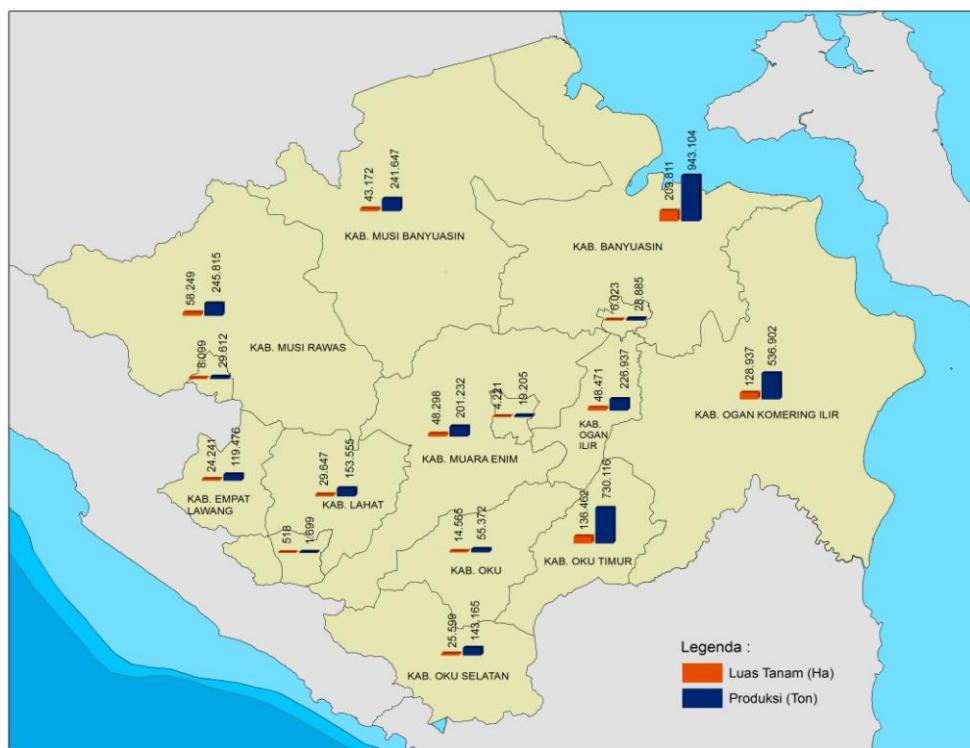
Sumber : Hasil Analisis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015

Catatan: Angka di dalam kurung menggambarkan peran Kab/Kota dalam pembentukan output sektoral secara wilayah

6.2.1 Produksi Padi

Capaian produksi padi di Sumatera Selatan tahun 2013 sebesar 3.676.722 ton yang merupakan peningkatan dari produksi tahun sebelumnya yaitu 3.295.246 ton, yang meliputi produksi padi sawah sebesar 3.436.262 ton dan padi ladang sebesar 240.460 ton. Daerah utama penyokong lumbung beras Sumatera Selatan terdiri dari Kabupaten Banyuasin dengan produksi 943.104 ton padi atau sebesar 25,65% yang dihasilkan dari lahan sawah pasang surut, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan produksi 730.116 ton padi atau sebesar 19,86% yang dihasilkan dari lahan sawah irigasi teknis, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan produksi 536.902 ton padi atau sebesar 14,60 % yang dihasilkan dari lahan sawah rawa lebak dan sonor.

Gambar 6.1 :
Sebaran Produksi Padi Kabupaten/Kota Tahun 2013

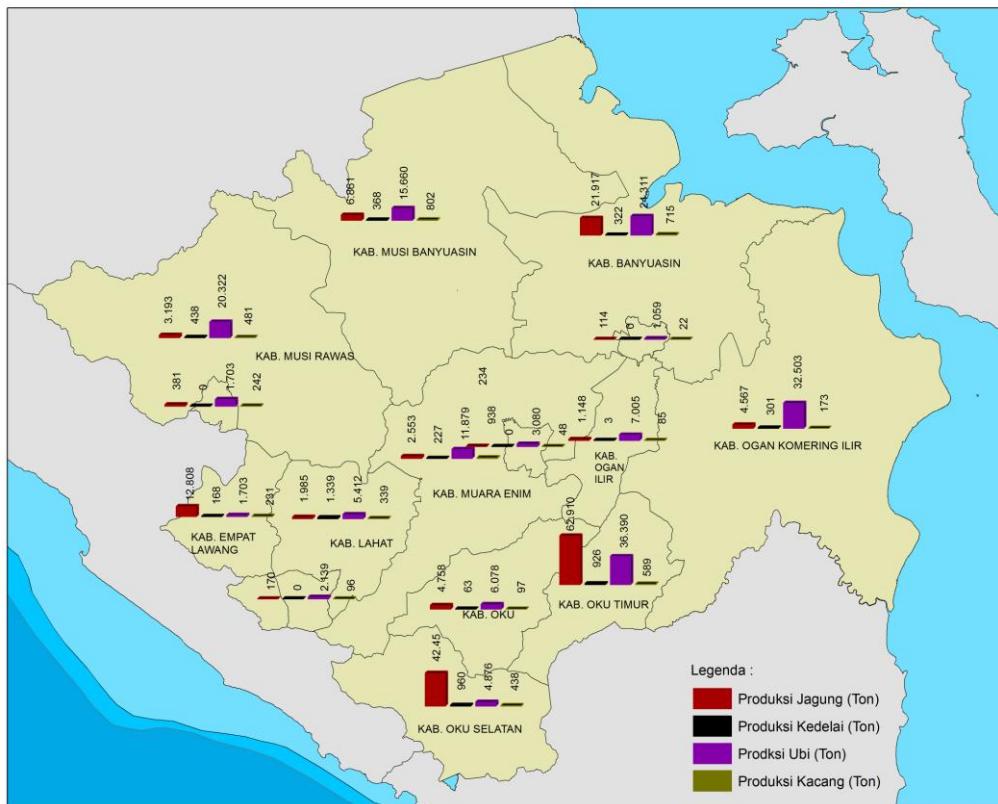


Sumber: Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2014

6.2.2 Produksi Palawija

Capaian produksi palawija di Kabupaten/Kota pada tahun 2013 didominasi oleh jagung dan ubi dimana produksi untuk jagung berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebesar 62.910 ton dimana terjadi peningkatan yang signifikan dari pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 26.315 ton. Untuk produksi ubi (meliputi ubi kayu dan ubi jalar) terbesar juga berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Beberapa produksi unggulan palawija selain jagung dan ubi adalah kedelai dan kacang yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

Gambar 6.2 :
Sebaran produksi palawija di Kabupaten/Kota Tahun 2013



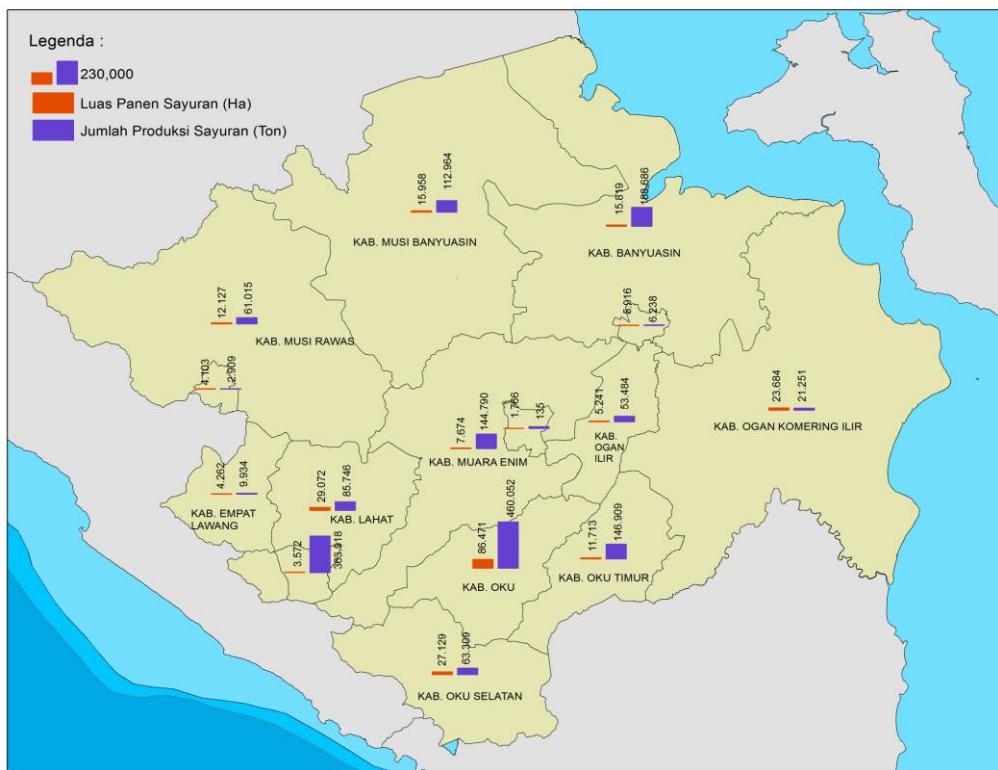
Sumber: Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2014

6.2.3 Produksi Hortikultura Sayuran

Produksi sayur-sayuran di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013 mencapai 1.737.559 ton yang didukung dari luas panen seluas ± 245.602 ha, dimana sentra produksi sayuran adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Banyuasin, Muara Enim, Musi Banyuasin, OKU Timur dan Kota Pagar Alam. Jenis sayuran yang menyokong Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai wilayah yang terluas dalam penanaman maupun produksinya adalah jamur, dimana secara keseluruhan produksi hortikultura sayuran di kabupaten ini adalah sebesar 460.062 ton. Kabupaten/Kota yang produksinya paling sedikit adalah Kota Prabumulih dengan luas tanam seluas 1.468 ha dan jumlah produksi sayurannya

sebesar 17.534 ton dengan penyokong terbesar untuk produksi jenis sayurannya adalah kangkung.

Gambar 6.3 :
Sebaran Produksi Hortikultura Sayuran Kabupaten/Kota Tahun 2013

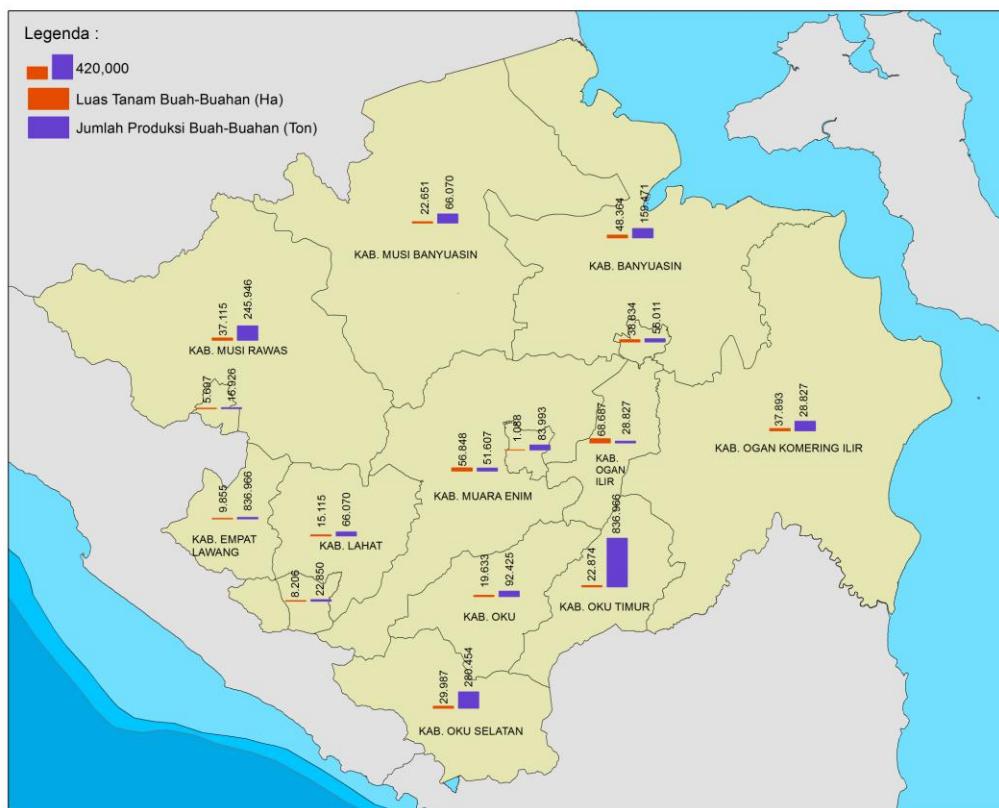


Sumber: Sumsel Dalam Angka 2014, BPS

6.2.4 Produksi Hortikultura Buah-Buahan

Produksi buah-buahan di Provinsi Sumatera Selatan tersebar di seluruh Kabupaten/Kota namun yang terbesar berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan produksi sebesar 83.834 ton dan penyokong terbesar dari hasil produksi tersebut adalah pepaya dengan menyumbang sekitar 69.887 ton. Berdasarkan besaran produksi buah-buahan, sebanyak 10 Kabupaten/Kota yang menghasilkan kurang dari 20.000 ton.

Gambar 6.4 :
Sebaran Produksi Hortikultura Buah-buahan Kabupaten/Kota
Tahun 2013



Sumber: Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2014

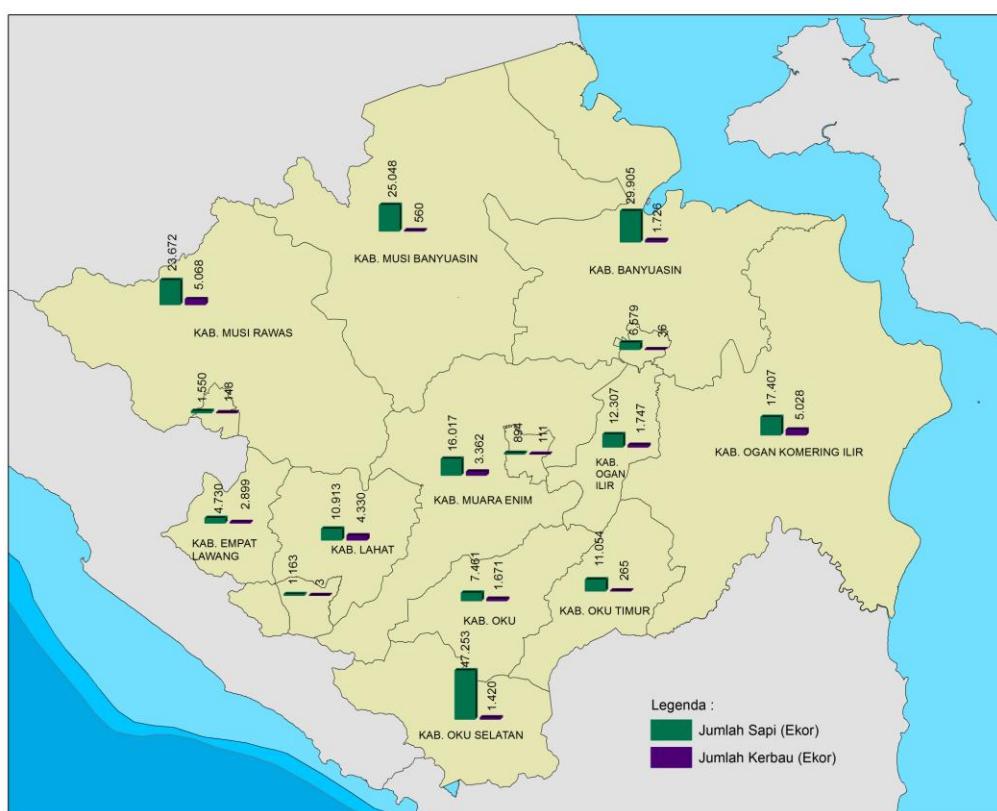
6.2.5 Produksi Sapi dan Kerbau

Sentra peternakan sapi dan kerbau tersebar di wilayah tengah dan tenggara yakni Ogan Komering Ulu Timur dengan populasi sapi mencapai 70 ribu ekor dan kerbau 2,4 ribu ekor. Di samping daerah utama tersebut menyusul empat kabupaten dengan populasi sapi pada kisaran 30-40 ribu ekor, yakni Musi Rawas, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, dan Banyuasin. Total populasi sapi di keenam kabupaten tersebut menyumbang 70 persen lebih populasi ternak sapi Sumatera Selatan.

Dukungan yang diperlukan bagi sentra-sentra peternakan sapi adalah penyuluhan dan pembinaan khususnya terkait dengan kesehatan dan reproduksi sapi, akses pemasaran, pengawasan infrastruktur rumah

potong hewan dan pendingin untuk sapi potong, dan pengembangan/pembinaan koperasi susu untuk sapi perah.

Gambar 6.5 :
Sebaran Populasi Ternak Sapi dan Kerbau
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013



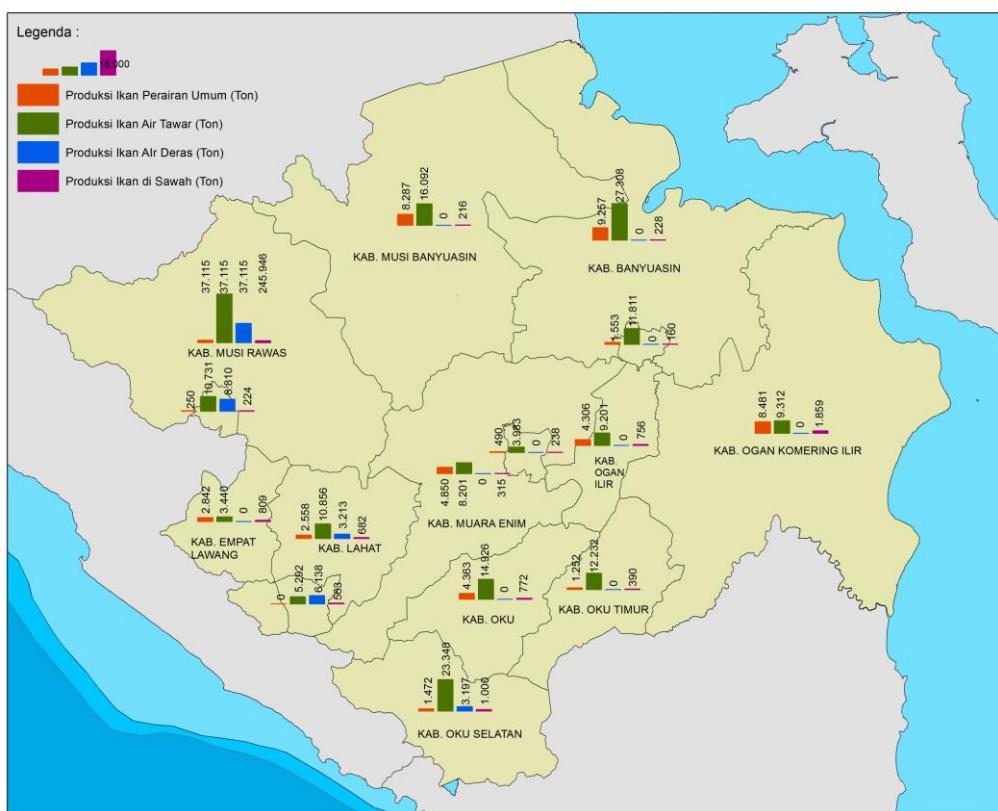
Sumber: Sumatera Selatan Dalam Angka 2013 (BPS), diolah.

6.2.6 Produksi Perikanan Budidaya

Produksi perikanan Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan peningkatan pada tahun 2013 yaitu sebesar 500.450 ton, dimana hal ini merupakan dukungan dari kondisi alam seperti Sungai Musi yang cukup luas sebagai faktor penunjang kelangsungan produksi perikanan, khususnya perikanan budidaya. Jenis budidaya perikanan yang menyumbang terbesar yaitu kolam air tawar atau tambak dengan jumlah produksi sebesar 202.805 ton dan yang terendah adalah kolam air deras atau keramba. Sentra penghasil perikanan budidaya kolam air tawar

adalah Kabupaten Musi Rawas, Banyuasin dan Ogan Komering Ulu Selatan.

Gambar 6.6 :
Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten/Kota Tahun 2013



Sumber : Sumatera Selatan Dalam Angka 2014, BPS

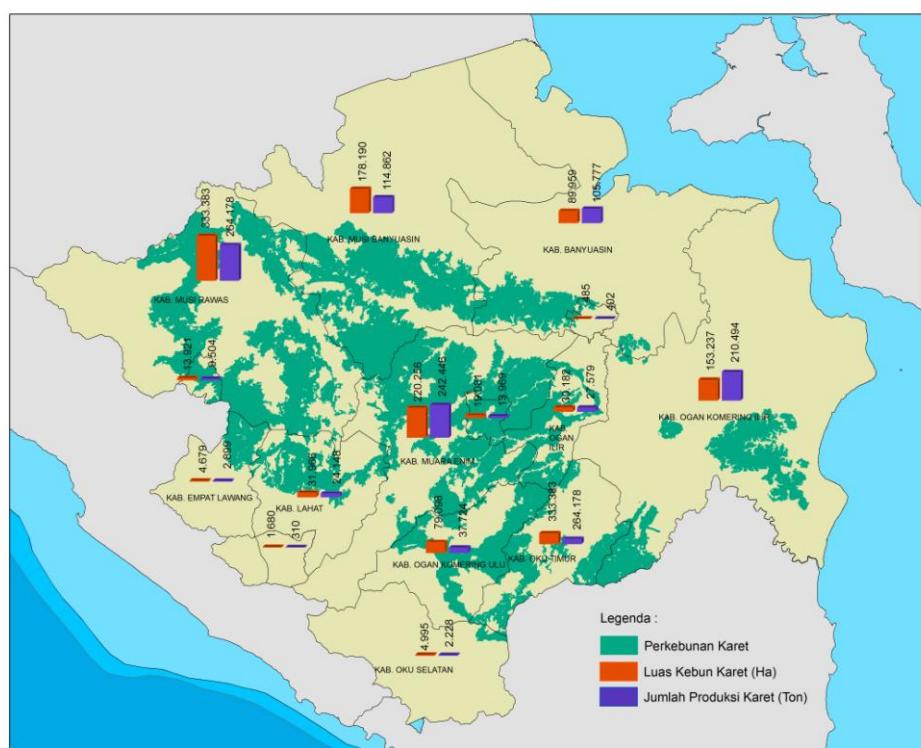
6.2.7 Produksi Karet

Jika dilihat dari volume produksinya, sentra budidaya perkebunan karet rakyat terkonsentrasi di dua daerah di wilayah tengah-barat, yakni Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Muara Enim. Kedua daerah tersebut pada tahun 2011 berproduksi masing-masing sebesar 273 ribu ton dan 233 ribu ton. Di samping kedua daerah utama tersebut, kabupaten Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin juga menghasilkan produksi yang lumayan tinggi, masing-masing 169 ribu ton dan 106 ribu ton. Total produksi keempat daerah tersebut menyumbang 70 persen

lebih produksi karet rakyat Sumatera Selatan. Sementara itu produksi karet di daerah lain bervariasi di bawah 100 ribu ton.

Dukungan yang diperlukan bagi sentra-sentra produksi karet tersebut adalah penyuluhan teknik budidaya, perlindungan dari gejolak harga, dan akses pendanaan khususnya untuk mendukung peremajaan tanaman yang telah melewati periode optimum tingkat produktivitasnya. Di samping itu untuk petani karet skala kecil perlu dipikirkan pengembangan sumber penghasilan tambahan berupa aktivitas non-farm di perdesaan.

Gambar 6.7 :
Sebaran Penghasil Karet di Provinsi Sumatera Selatan, tahun 2013



Sumber: Dinas Perkebunan Prov. Sumatera Selatan 2014,, diolah.

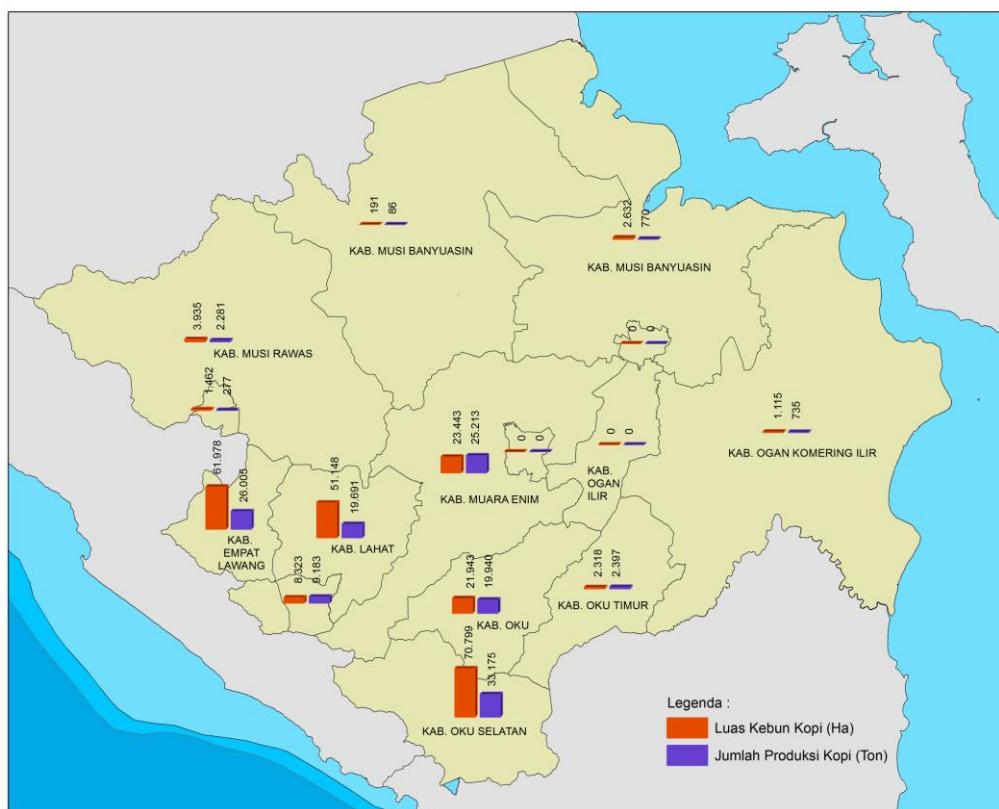
6.2.8 Produksi Kopi

Sentra produksi kopi utama Sumatera Selatan terkonsentrasi di wilayah barat-selatan (barat daya) yang merupakan daerah dataran tinggi. Kabupaten penghasil kopi terbesar pada tahun 2011 adalah Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan dan Empat Lawang, masing-masing dengan volume produksi 40,8 ribu ton, 32,9 ribu ton, dan 28,7 ribu ton.

Total produksi ketiga daerah tersebut menyumbang 60 persen produksi Sumatera Selatan. Di samping ketiga sentra utama tersebut, masih terdapat dua daerah dengan hasil kopi relatif besar yakni Kabupaten Lahat dengan produksi 21 ribu ton. Sedangkan produksi daerah-daerah lain bervariasi di kisaran dua-ribuan ton ke bawah.

Dukungan yang diperlukan bagi sentra-sentra produksi tersebut adalah penyuluhan teknik budidaya, pembinaan pascapanen (pengolahan, pengemasan, dan standarisasi mutu), akses pemasaran, dan akses pendanaan untuk mendukung pengembangan dan peremajaan tanaman tua dengan varitas unggul. Pengembangan industri pengolahan kopi sangat strategis meningkatkan nilai tambah industri kopi di tingkat lokal.

Gambar 6.8
Sebaran Penghasil Kopi Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013



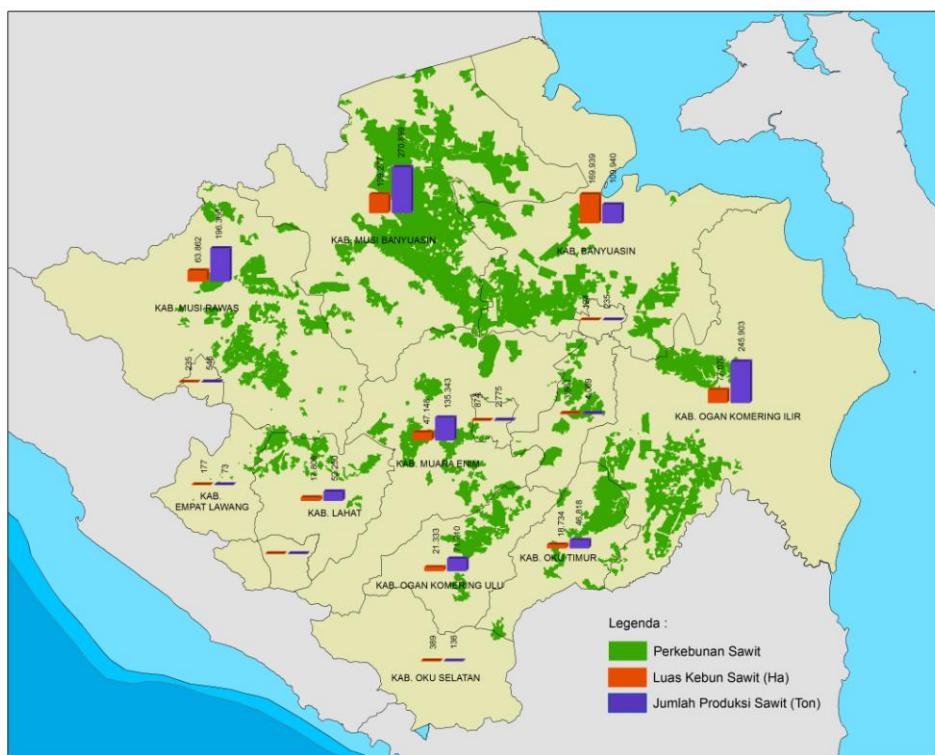
Sumber: Dinas Perkebunan Prov. Sumatera Selatan 2014, diolah.

6.2.9 Kelapa Sawit

Sentra produksi kelapa sawit rakyat yang utama terkonsentrasi di wilayah utara-barat (barat laut) yaitu di Kabupaten Musi Banyuasin Muara Enim, dan Musi Rawas. Pada tahun 2011 total produksi di ketiga daerah tersebut menyumbang 67 persen (dua pertiga) total produksi sawit Sumatera Selatan, dengan masing-masing produksinya berturut-turut adalah 1,429 juta ton, 1,225 juta ton, dan 1,186 juta ton. Di samping ketiga sentra utama tersebut menyusul dua daerah dengan total produksi cukup signifikan yakni Kabupaten Banyuasin (814 ribu ton) dan Ogan Komering Ilir (812 ribu ton).

Dukungan yang diperlukan bagi sentra-sentra produksi sawit adalah penyuluhan, pembinaan, dan akses pendanaan untuk mendukung peremajaan tanaman tua khususnya kepada petani perkebunan rakyat. Hal ini penting mengingat indikasi penurunan tingkat produktivitas kelapa sawit dibandingkan periode 90-an sampai awal 2000-an. Di samping itu mediasi dan penyelesaian permasalahan pertanahan juga sangat penting untuk menjamin keberlangsungan industri sawit dan pemberdayaan masyarakat sekitar perkebunan.

Gambar 6.9
Sebaran Penghasil Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2013

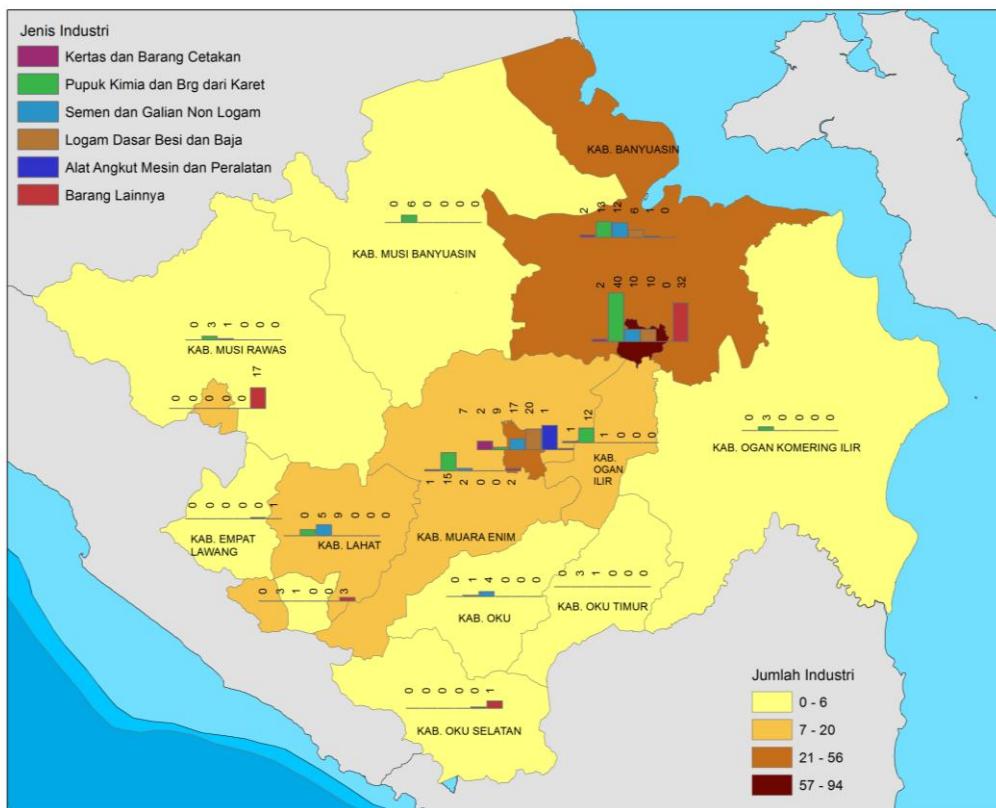


Sumber: Dinas Perkebunan Prov. Sumatera Selatan 2014, diolah.

6.2.10 Manufaktur

Beberapa industri pengolahan di Sumatera Selatan pada tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah industri maupun jenis industrinya, terutama untuk industri menengah dan besar yaitu sebanyak 279 unit. Lokasi industri yang paling banyak terdapat di Kota Palembang sebanyak 114 unit dengan jenis industri dominan adalah industri pupuk kimia dan barang dari karet yaitu sebanyak 40 unit. 2 (dua) wilayah yang banyak industrinya adalah Kabupaten Banyuasin dengan jumlah 40 unit dan Kota Prabumulih sebanyak 36 unit. Jenis industri yang terbanyak di Provinsi Sumatera Selatan adalah industri pupuk kimia dan barang dari karet dengan jumlah sekitar 100 unit.

Gambar 6.10 :
Sebaran industri di Kabupaten/Kota Tahun 2013

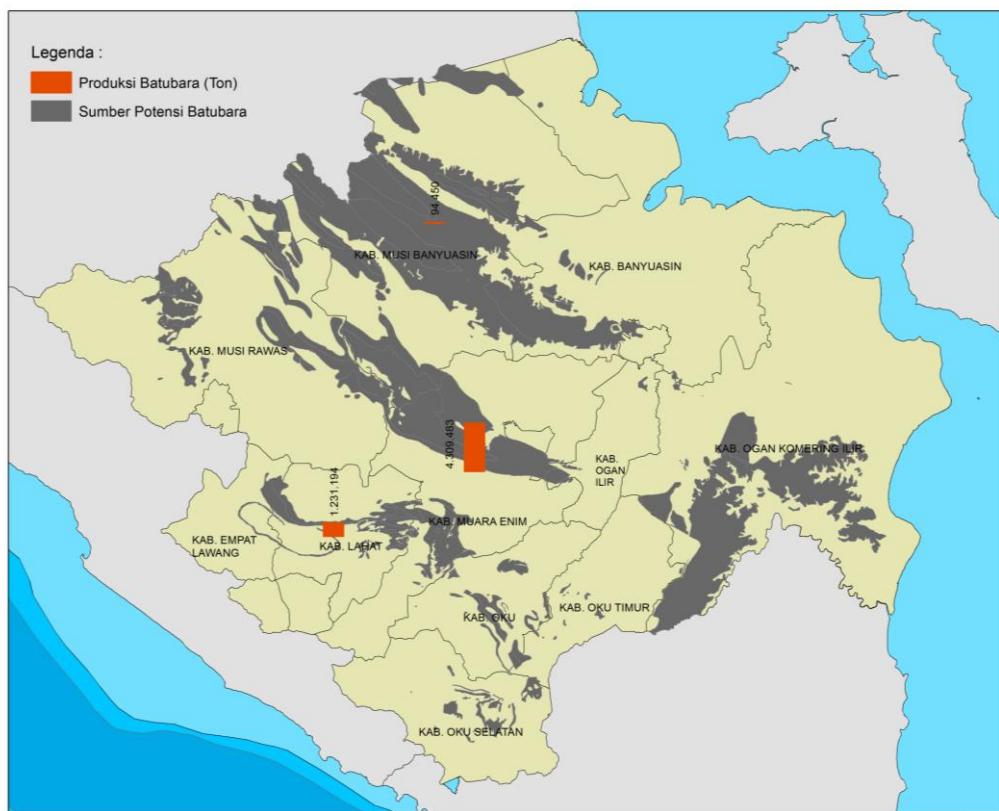


Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014

6.2.11 Pertambangan

Capaian produksi batubara di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2014 sebesar ± 4.309.483 ton yang dihasilkan dari Kabupaten Muara Enim, Musi Banyuasin dan Lahat. Penurunan capaian produksi batubara di tahun 2014 ini diakibatkan beberapa perusahaan pemegang izin usaha pertambangan tidak melakukan eksploitasi yang disebabkan turunnya harga global batubara dan masih banyaknya perusahaan yang belum *clear and clean* (CNC).

Gambar 6.11 :
Produksi Batubara di Sumatera Selatan Tahun 2014

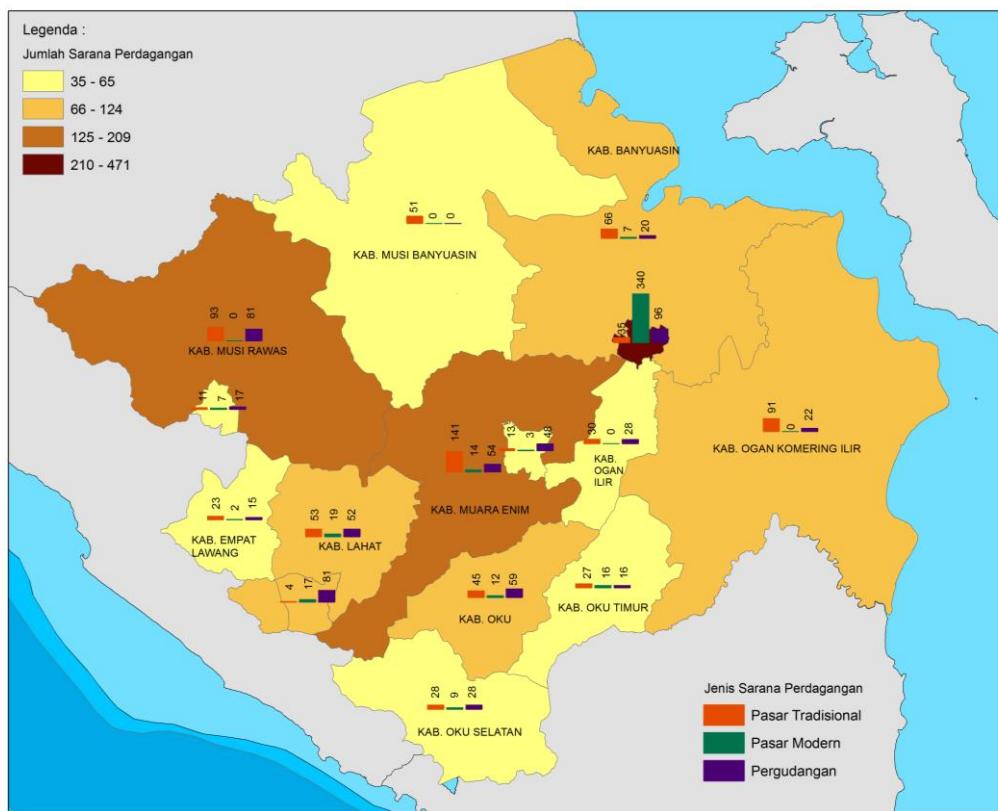


Sumber : 1. Badan Geologi, Kementerian ESDM, 2008
 2. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015

6.2.12 Perdagangan

Sarana perdagangan Provinsi Sumatera Selatan didominasi oleh pasar tradisional yang tersebar dan merata di seluruh Kabupaten/Kota namun untuk pasar modern hanya didominasi oleh Kota Palembang yang menyebabkan menjadi lokasi terbanyak untuk sarana perdagangan. Jumlah sarana perdagangan di Kota Palembang sebanyak 471 unit dimana hal tersebut didukung dengan banyaknya pasar modern (swalayan dan mal) yang tumbuh pesat dibanding dengan pertumbuhan pasar tradisional.

Gambar 6.12 :
Jumlah sarana perdagangan Kabupaten/Kota

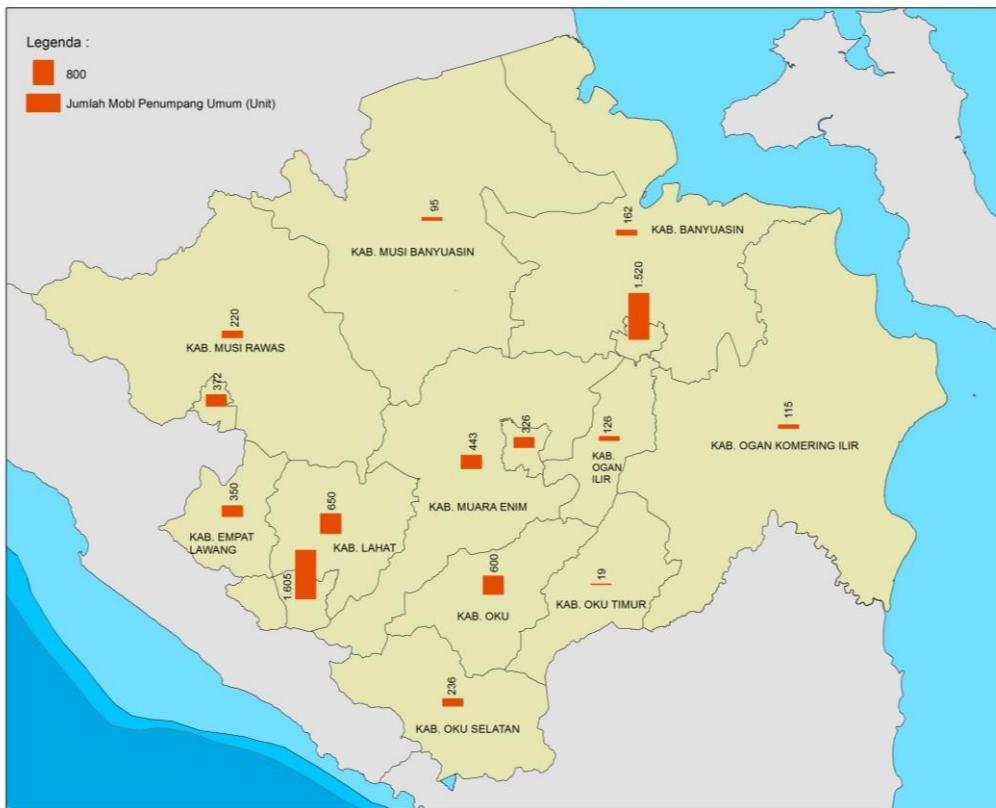


Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, 2014

6.2.13 Angkutan dan Telekomunikasi

Sarana angkutan umum di Provinsi Sumatera Selatan yang tersebar di Kabupaten/Kota adalah kendaraan mobil penumpang umum sedangkan untuk kereta api hanya berada di Kota Palembang. Pemilik mobil penumpang umum paling banyak berada di Kota Palembang sebanyak 1.520 unit dan Pagar Alam sebanyak 1.605 unit, sedangkan daerah yang paling sedikit memiliki mobil penumpang umum adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebanyak 19 unit.

Gambar 6.13 :
Jumlah Mobil Penumpang Umum Kabupaten/Kota tahun 2013



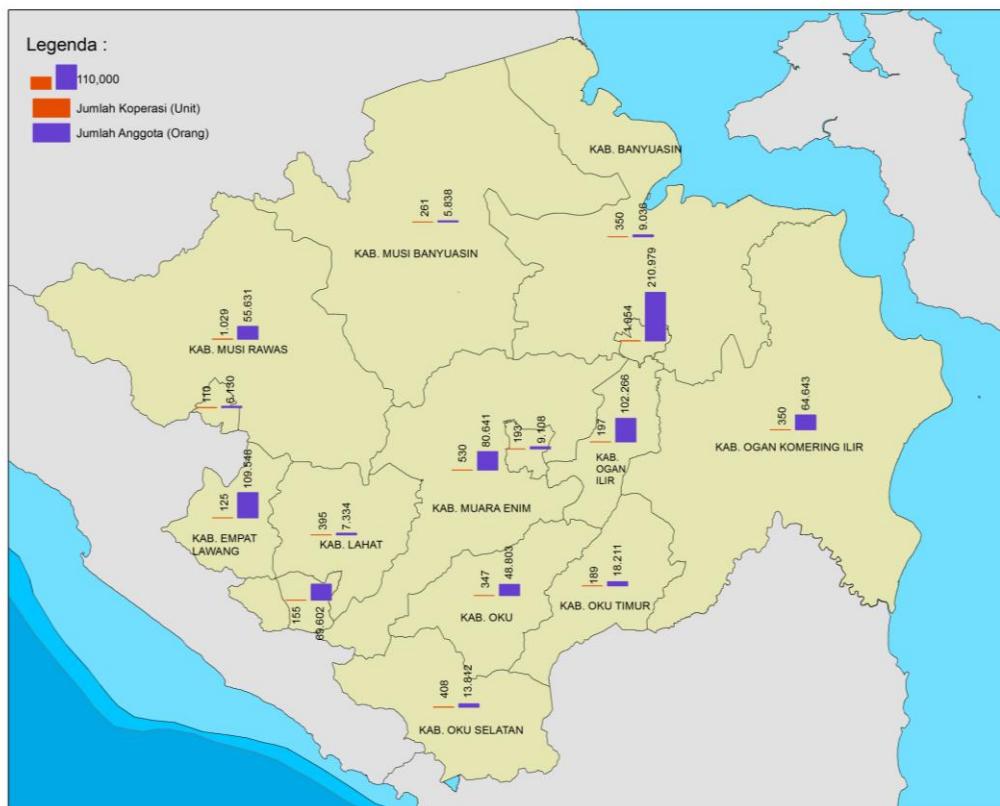
Sumber : Statistik Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2013

6.2.14 Keuangan

Capaian layanan keuangan di Kabupaten/Kota yang melibatkan koperasi sangat besar peranannya dalam menggerakan ekonomi daerah, dimana potensi koperasi saat ini sudah mampu untuk memulai gerakan koperasi yang otonomi, namun fokus bisnis diarahkan pada ciri universalitas kebutuhan yang tinggi seperti jasa keuangan, pelayanan infrastruktur dan lainnya. Jumlah koperasi yang terbanyak berada di Kota Palembang yaitu sebanyak 1.054 unit termasuk juga anggota koperasinya yang terbanyak sekitar 210.979 orang.

Dalam hal ini konsolidasi potensi keuangan, pengembangan jaringan informasi serta pengembangan pusat inovasi dan teknologi merupakan kebutuhan untuk kuatnya kehadiran koperasi.

Gambar 6.14 :
Jumlah koperasi di Kabupaten/Kota tahun 2013



Sumber : Sumsel Dalam Angka Tahun 2014, BPS

6.3 Peta Permasalahan Utama Pembangunan Berbasis Wilayah

Isu utama pembangunan wilayah di Sumatera Selatan adalah masih adanya kesenjangan antarwilayah khususnya kesenjangan dilihat dari sisi ekonomi, sosial, pendapatan dan infrastruktur.

6.3.1 Kesenjangan Ekonomi antar Wilayah

Distribusi nilai PDRB antar kabupaten tahun 2013, menunjukkan tingkat kesenjangan yang cukup tinggi, berdasarkan data PDRB atas

dasar harga berlaku tahun 2013 menunjukan nilai PDRB share terbesar masih terkonsentrasi di 3 kabupaten yaitu Kota Palembang, Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin. Kontribusi dari wilayah tersebut tahun 2013 mencapai 60 persen terhadap perekonomian provinsi Sumatera Selatan, sementara untuk wilayah lainnya relatif rendah terutama Kota Pagar Alam.

Tabel 6.10 :
PDRB Sumsel Per Kab/Kota Berdasarkan ADHB dan ADHK Tahun 2013

No	Prov/Kab/Kota	Tahun 2013			
		PDRB ADHB		Share	
		Migas	Non Migas	Migas	Non Migas
1	Ogan Komering Ulu	8.820	7.643	3,81	4,24
2	Ogan Komering Ilir	10.471	10.471	4,52	5,80
3	Muara Enim	23.955	17.255	10,34	9,56
4	Lahat	8.321	7.486	3,59	4,15
5	Musi Rawas	8.243	6.505	3,56	3,61
6	Musi Banyuasin	38.130	18.917	16,46	10,48
7	Banyuasin	16.919	13.126	7,30	7,28
8	OKU Selatan	4.527	4.527	1,95	2,51
9	OKU Timur	7.997	7.997	3,45	4,43
10	Ogan Ilir	5.799	5.616	2,50	3,11
11	Empat Lawang	2.968	2.968	1,28	1,64
12	PALI	4.656	2.119	2,01	1,17
13	Mura Utara	2.989	2.186	1,29	1,21
14	Kota Palembang	77.514	63.030	33,46	34,93
15	Kota Prabumulih	4.375	3.361	1,89	1,86
16	Kota Pagar Alam	1.836	1.836	0,79	1,02
17	Kota Lubuk Linggau	3.177	3.177	1,37	1,76
	Sumatera Selatan	231.683	180.430	100,00	100,00

Sumber : Data BPS tahun 2014, diolah

6.3.2 Kesenjangan Wilayah (Williamson Index)

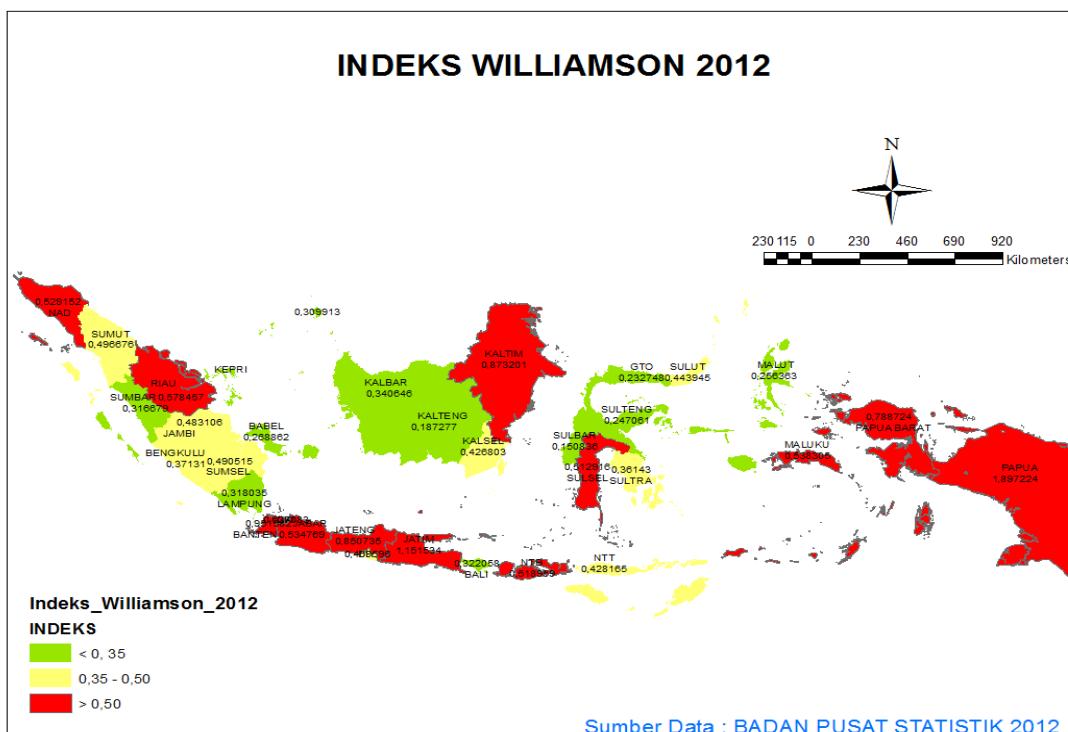
Berdasarkan dari analisis indeks kesenjangan wilayah (indeks williamson) dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 menunjukkan bahwa kesenjangan wilayah di provinsi sumatera selatan semakin baik artinya bahwa kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota di Sumatera Selatan semakin kecil. Pada tahun 2009 Indeks Williamson provinsi Sumatera Selatan cukup tinggi yaitu 0,81 dan pada tahun 2012 Indeks Williamson provinsi Sumatera Selatan menjadi 0,49 (hasil analisis Bappenas 2013, dan BPS).

Tabel 6.11 :
Indeks Williamson Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera
Tahun 2007 – 2011

Provinsi	2007	2008	2009	2010*	2011**
Aceh	0.84	0.81	0.72	0.68	0.65
Sumatera Utara	0.66	0.68	0.68	0.78	0.72
Sumatera Barat	0.38	0.38	0.38	0.35	0.34
Riau	0.68	0.69	0.69	0.57	0.66
Jambi	0.40	0.46	0.46	0.48	0.47
Sumatera Selatan	0.80	0.81	0.81	0.77	0.74
Bengkulu	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40
Lampung	0.30	0.35	0.35	0.37	0.43
Kep. Bangka Belitung	0.27	0.29	0.29	0.29	0.28
Kep. Riau	0.52	0.41	0.41	0.43	0.38

Sumber : Data BPS 2012, Diolah Bappenas 2012

Gambar 6.15
Indeks Williamson Provinsi di Indonesia Tahun 2012



Dengan menggunakan matriks tipologi Klassen maka dapat dilihat posisi kabupaten/kota dengan memperhatikan posisi perkonomian yang dimiliki kabupaten/kota terhadap perekonomian provinsi Sumatera Selatan yang diajukan.

Dari tipologi Klassen maka dapat disampaikan bahwa :

		Rata-rata pertumbuhan Ekonomi 5,47%	
		Rendah < 5,47	Tinggi 5,47 >
Rata-rata PDRB perkapita Rp. 26.742,236 (dalam ribu)	Tinggi > Rp. 26.742,236	Kuadran II : Muba,	Kuadran I : Palembang
	Rendah< Rp. 26.742,236	Kuadran IV : OKI, OI, Prabumulih, Pagar Alam,	Kuadran III :OKU, Lahat, MURA, BA, OKUS, OKUT, Empat Lawang, Lubuk Linggau

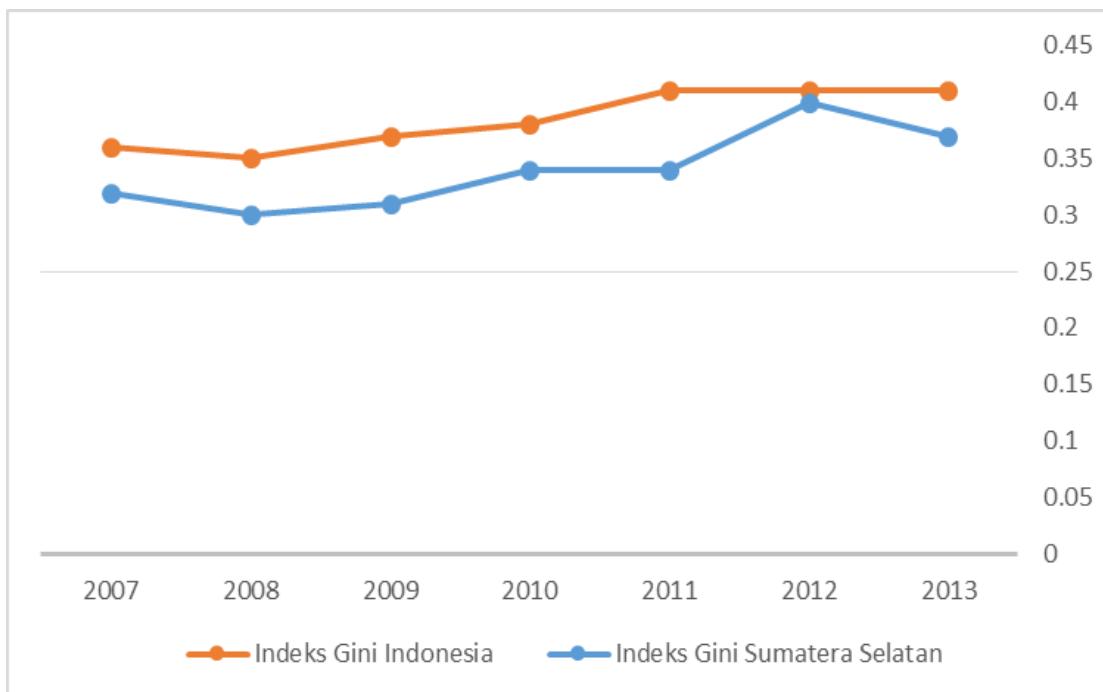
Pengelompokan dengan tipologi Klassen menggambarkan :

1. Daerah yang maju dan tumbuh dengan pesat (Kuadran I). Kuadran ini merupakan kuadran daerah dengan laju pertumbuhan PDRB yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan daerah yang menjadi acuan (Pertumbuhan Provinsi Sumsel) dan memiliki PDRB per kapita yang lebih besar dibandingkan PDRB per kapita daerah Provinsi Sumsel.
2. Daerah yang maju tapi tertekan (Kuadran II). Daerah yang berada pada kuadran ini memiliki nilai pertumbuhan PDRB yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB Provinsi Sumsel, tetapi memiliki PDRB per kapita yang lebih besar dibandingkan PDRB perkapita Provinsi Sumsel.
3. Daerah yang masih dapat berkembang dengan pesat (Kuadran III). Kuadran ini merupakan kuadran untuk daerah yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB yang lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB Provinsi Sumsel, tetapi PDRB per kapita daerah tersebut lebih kecil dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Sumsel.
4. Daerah relatif tertinggal (Kuadran IV). Kuadran ini ditempati oleh daerah yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB yang relatif rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB Provinsi Sumsel dan sekaligus PDRB per kapita yang lebih kecil dibandingkan per kapita Provinsi Sumsel.

6.3.3 Kesenjangan Pendapatan (Gini Ratio)

Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk di Sumatera Selatan dalam periode 2008-2012 kecenderungan meningkat, hal ini ditunjukan dengan Indeks Gini dari tahun 2008 – 2012 semakin meningkat. Pada tahun 2012 tercatat Indeks Gini sebesar 0,40 lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Grafik 6.1 :
Perkembangan Gini Rasio Sumatera Selatan Hingga Tahun 2013



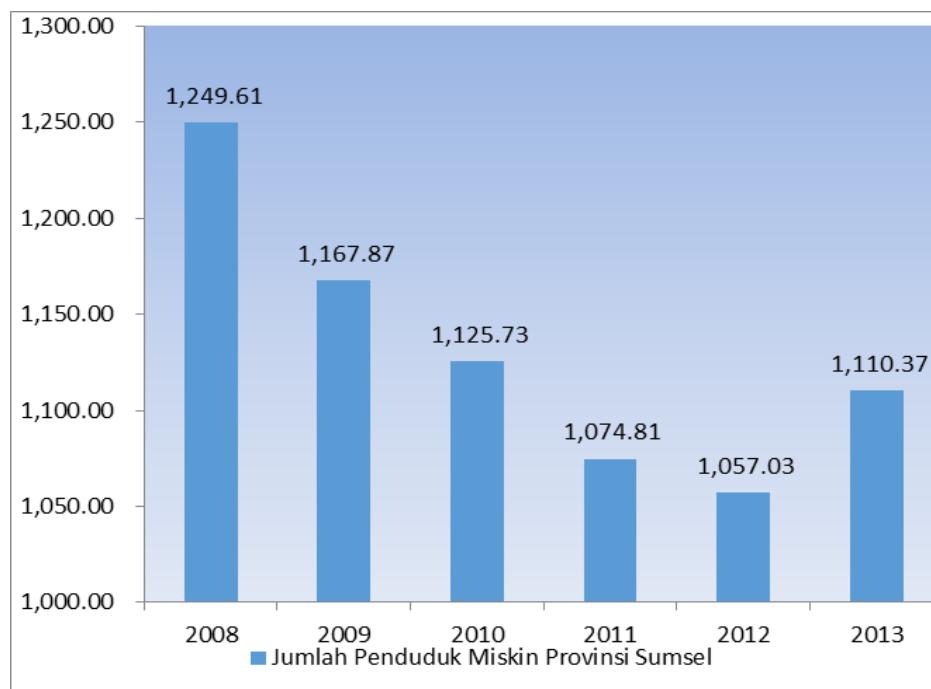
Sumber : Susenas BPS, 2013

6.3.4 Kesenjangan Sosial

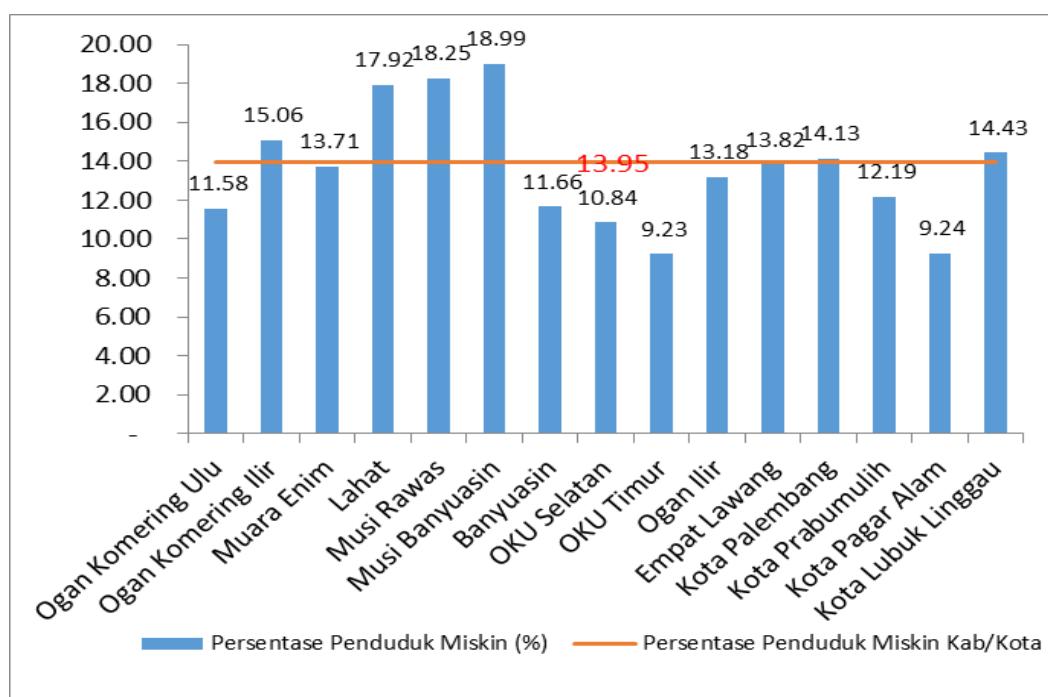
Kesenjangan sosial antarwilayah dapat digambarkan dengan beberapa indikator seperti kondisi tingkat kemiskinan, IPM, tingkat pengangguran terbuka.

Berdasarkan data BPS 2013, jumlah penduduk miskin terbesar adalah Kota Palembang, sementara jumlah penduduk miskin paling rendah terdapat di Kota Pagar Alam Dari sisi persentase penduduk miskin, sebanyak 4 kabupaten/kota memiliki prosentase kemiskinan di atas provinsi. Sementara untuk tingkat kemiskinan paling rendah terdapat di Kota Pagar Alam.

Grafik 6.2
Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013

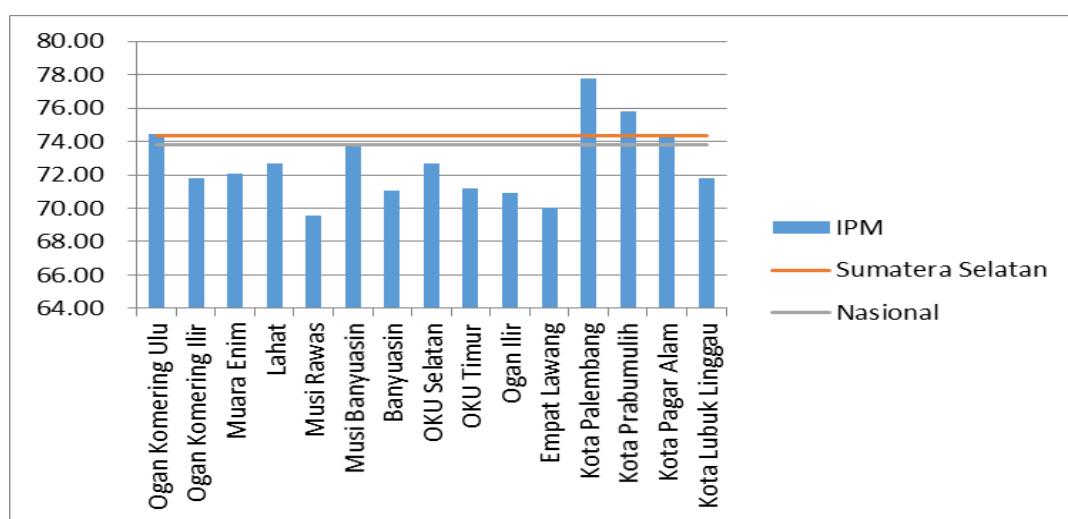


Grafik 6.3 :
Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan (%) Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013

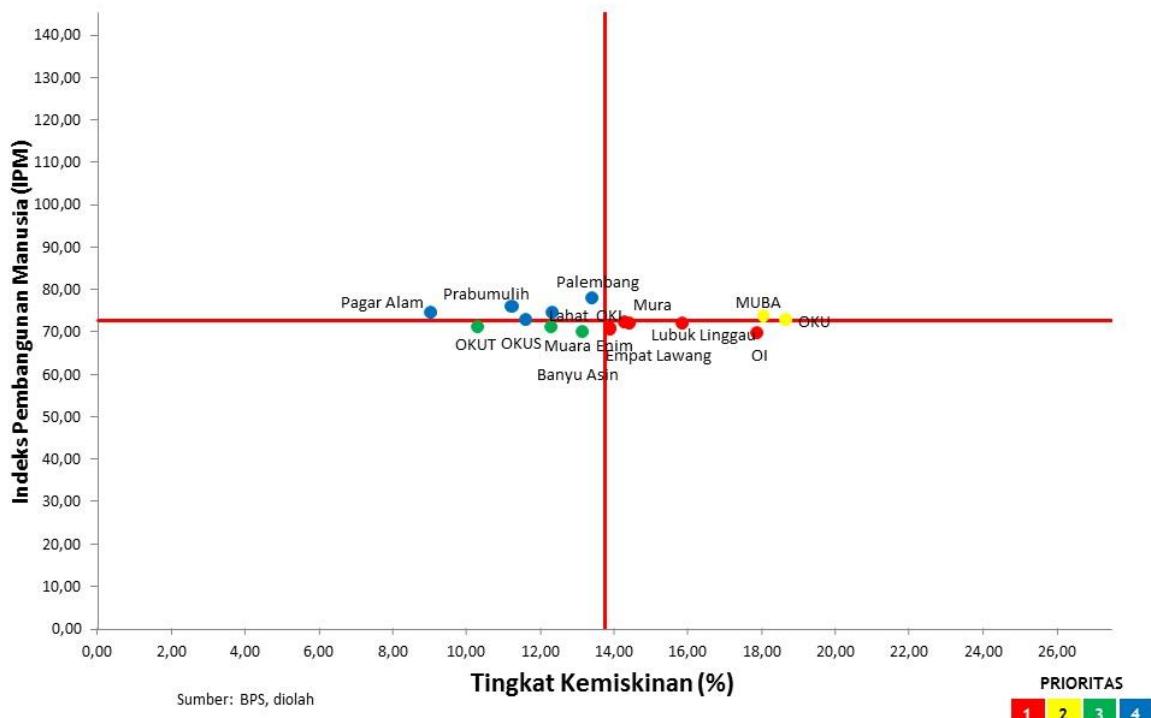


Berdasarkan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia yang mencakup indikator pendidikan, kesehatan dan pengeluaran masyarakat, maka pada tahun 2013 yang pencapaian IPM tertinggi adalah Kota Palembang, dan IPM terendah adalah Kabupaten Musi Rawas. Kecenderungan pencapaian IPM tertinggi berada di kota, hal ini disebabkan karena adanya kemudahan akses pendidikan dan kesehatan serta memiliki peluang ekonomi yang cukup baik. Sementara di kabupaten yang wilayah cukup luas dan sporadis cenderung tingkat pelayanan pendidikan dan kesehatan belum merata sampai ke pelosok daerah.

Grafik 6.4 :
Tingkat IPM Kabupaten/Kota Tahun 2013



Grafik 6.5 :
Tingkat Kemiskinan (%) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Sumatera Selatan 2013



Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Selatan 2015, diolah

Dilihat dari diagram Cartesius berdasarkan tingkat kemiskinan terhadap IPM Sumatera Selatan Tahun 2013, bahwa prioritas utama yang harus mendapatkan perhatian di dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan IPM adalah Kabupaten/Kota yang masuk di dalam kuadran dimana tingkat kemiskinan masih tinggi dan pencapaian IPM masih rendah di bawah rata-rata provinsi yaitu Mura, Lubuk Linggau, Empat Lawang, Ogan Ilir, Kabupaten Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ulu.

6.3.5 Kesenjangan Infrastruktur

Salah satu penyebab kesenjangan yang terjadi antar daerah di Sumatera Selatan dapat diakibatkan oleh kesenjangan ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur merupakan suatu input dalam proses produksi yang dapat memberikan peningkatan produktivitas. Salah

satu peran infrastruktur adalah menjadi faktor daya tarik investasi di setiap daerah.

6.3.5.1 Kesenjangan Infrastruktur Jalan

Kesenjangan ketersediaan infrastruktur jalan dapat ditunjukkan melalui indikator kerapatan jalan yang menggambarkan panjang jalan pada setiap luas wilayah 1 km². Rasio kerapatan jalan tertinggi di Kota Palembang (2,41) dan Kota Lubuk Linggau (1,48) dan Kota Prabumulih (1,14), sedangkan ratio kerapatan jalan terendah di Kabupaten OKI, Musi Banyuasin dan Banyuasin dengan ratio kerapatan jalan hanya mencapai 0,1. Perbedaan yang cukup nyata dari kerapatan jalan antar kabupaten/kota menjadi salah satu faktor terjadinya ketimpangan antar wilayah.

Tabel 6.12
Panjang Jalan, Luas Wilayah dan Kerapatan Jalan

Kabupaten/Kota	Panjang Jalan (km)	Luas Wilayah (km ²)	Ratio Kerapatan Jalan (km/km ²)
Ogan Komering Ulu	1.298,39	4.797,06	0,27
Ogan Komering Ilir	1.778,35	18.359,04	0,10
Muara enim	1.620,12	7.383,90	0,22
Lahat	1.500,45	5.311,74	0,28
Musi Rawas	1.465,75	6.350,00	0,23
Musi Banyuasin	1.435,30	14.226,26	0,10
Palembang	966,04	400,61	2,41
Prabumulih	493,47	434,50	1,14
Pagaralam	592,20	633,66	0,93
OKU Selatan	893,74	5.493,94	0,16
OKU Timur	1.145,58	3.370,00	0,34
Ogan Ilir	1.027,98	2.666,07	0,39
Empat Lawang	1.417,94	2.256,44	0,63
Lubuk Linggau	593,24	401,50	1,48
Banyuasin	1.308,97	11.832,99	0,11
Provinsi SUMSEL	17.537,51	83.917,71	0,21

Sumber : BPJN III, DPU BM Sumsel, DAK Kab/Kota

6.3.5.2 Kesenjangan Infrastruktur Listrik

Persentase rumah tangga memiliki sumber listrik per kabupaten/kota di Sumatera Selatan cukup baik di atas 90 persen. Hanya untuk Kabupaten OKU Selatan persentase rumah tangga memiliki listrik masih cukup rendah yaitu 75,36 persen, hal ini disebabkan terhambatnya pembangunan gardu induk dan jaringan transmisi oleh PLN di Kabupaten OKU Selatan.

Tabel 6.13 :

Prosentase Rumah Tangga Miskin Memilik Sumber Listrik

No	Wilayah	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Ogan Komering Ulu	91,84	93,06	91,22	94,06	93,85	96,27
2	Ogan Komering Ilir	76,35	84,94	79,14	90,74	92,95	91,60
3	Muara Enim	86,71	90,84	92,45	96,27	97,13	96,22
4	Lahat	84,66	89,30	91,83	94,87	95,31	97,03
5	Musi Rawas	81,29	82,03	82,57	90,29	93,68	92,30
6	Musi Banyuasin	77,78	87,29	85,02	88,33	93,25	93,24
7	Banyuasin	66,70	78,69	88,00	86,4	95,76	91,99
8	OKU Selatan	52,33	72,13	74,04	70,89	68,3	75,36
9	OKU Timur	84,01	86,04	89,76	95,55	97,61	98,17
10	Ogan Ilir	78,24	83,51	81,76	83,64	88,15	92,83
11	Empat Lawang	68,39	82,45	80,60	85	88,57	92,35
12	Kota Palembang	98,42	99,48	98,47	99,58	97,75	99,70
13	Kota Prabumulih	94,96	98,40	96,26	96,6	99,23	98,79
14	Kota Pagar Alam	95,06	97,57	94,96	98,22	98,24	98,51
15	Kota Lubuk Linggau	92,39	96,04	98,02	99,06	99,22	99,78
	Sumatera Selatan	82,1	88,05	88,69	92,01	94,02	94,84

Sumber : BPS Sumsel 2008-2012 (Inkesra Sumsel)

6.3.5.3 Kesenjangan Infrastruktur Dasar

Persentase rumah tangga dengan akses air bersih masih terlihat ketimpangan yang cukup signifikan. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih tertinggi di Kota Palembang yang mencapai 96,07 persen sedangkan sebagian besar masih di bawah 50 persen, dan terendah adalah Kota Pagar Alam hanya mencapai 35,75 persen.

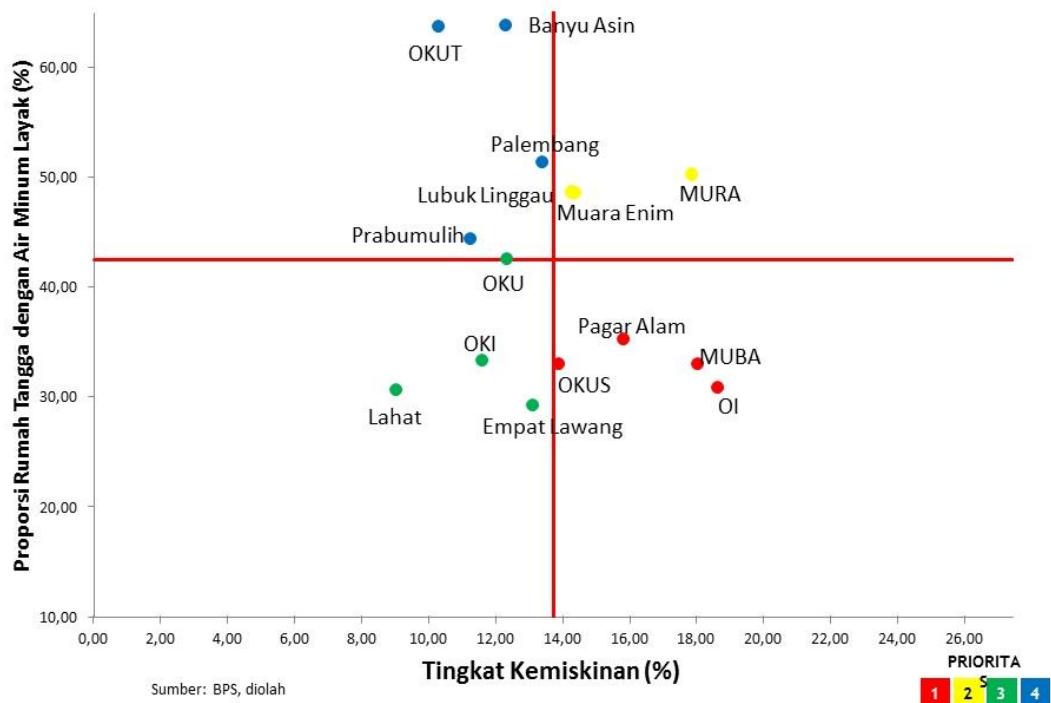
Demikian juga untuk rumah tangga dengan akses sanitasi masih relatif rendah. Kota Lubuk Linggau dengan rumah tangga terakses sanitasi sudah cukup tinggi yaitu 84,40 persen dan terendah Kabupaten Oku Selatan hanya 29,90 persen.

Tabel 6.14 :
Prosentase Rumah Tangga Miskin memiliki Akses Air Bersih

No	Wilayah	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Ogan Komering Ulu	58,02	62,78	53,45	67,16	62,52	67,51
2	Ogan Komering Ilir	36,60	39,84	46,06	49,02	46,81	39,62
3	Muara Enim	50,17	46,16	46,68	59,56	61,09	58,74
4	Lahat	35,19	38,31	37,42	39,56	42,19	42,75
5	Musi Rawas	38,98	40,62	43,05	41,86	60,48	55,32
6	Musi Banyuasin	41,52	43,17	42,84	46,75	47,66	43,22
7	Banyuasin	29,48	31,10	37,16	43,02	43,19	45,58
8	OKU Selatan	21,42	29,17	30,39	27,34	29,91	39,46
9	OKU Timur	46,80	58,46	57,06	63,21	62,20	69,16
10	Ogan Ilir	40,14	40,11	46,13	46,18	43,00	57,76
11	Empat Lawang	12,08	15,86	15,12	22,23	20,80	37,22
12	Kota Palembang	88,30	94,40	90,32	95,08	94,23	96,07
13	Kota Prabumulih	55,27	48,47	58,80	74,49	69,65	68,47
14	Kota Pagar Alam	45,77	42,88	38,25	37,34	44,29	35,75
15	Kota Lubuk Linggau	59,08	59,91	58,36	62,12	54,41	68,26
	Sumatera Selatan	48,23	51,83	52,50	57,37	58,13	59,77

Sumber : BPS Sumsel 2008-2012 (Buku MDGs Sumsel)

Grafik 6.6
Tingkat Kemiskinan (%) Terhadap Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Sumatera Selatan 2013



Berdasarkan analisa diagram Cartesius, Kota Pagar Alam, Muba, Ogan Ilir dan Lahat masuk dalam kelompok kabupaten/kota yang tingkat kemiskinannya tinggi dan prosentase proporsi rumah tangga dengan air minum layak masih rendah. Untuk itu maka 4 kabupaten/kota tersebut menjadi prioritas di dalam penanganan pelayanan air minum.

Tabel 6.15 :
Prosentase Rumah Tangga Miskin dengan Akses Sanitasi Layak

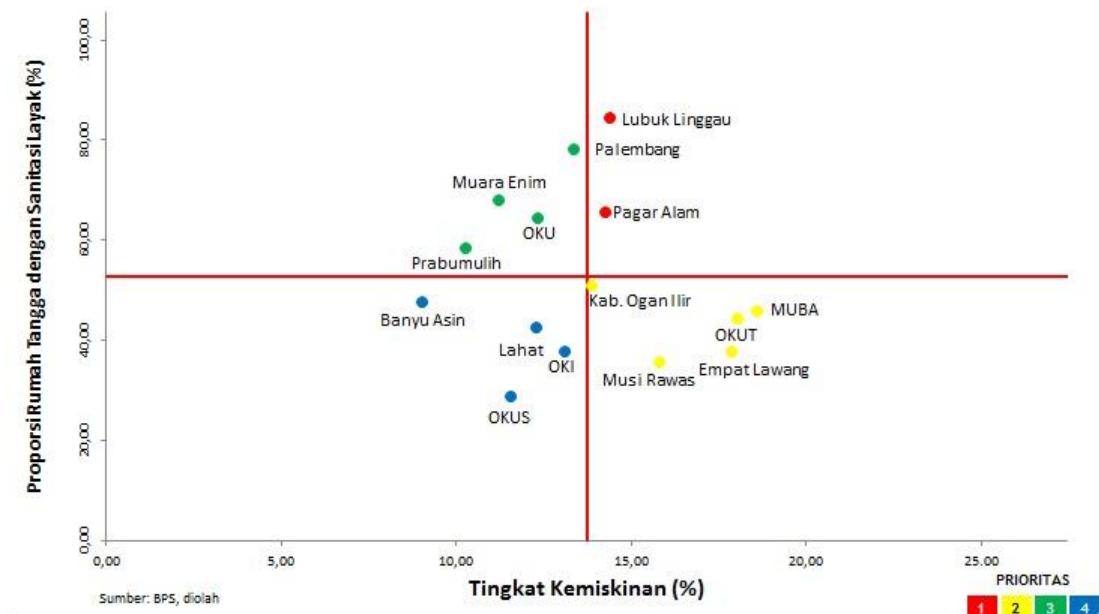
No	Wilayah	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Ogan Komering Ulu	55,95	52,06	47,89	59,57	56,81	64,50
2	Ogan Komering Ilir	19,14	20,09	21,11	28,10	29,75	35,60
3	Muara Enim	38,83	42,94	50,22	59,30	56,28	65,70
4	Lahat	32,56	34,90	33,29	28,59	47,32	46,00
5	Musi Rawas	21,38	26,87	28,07	31,10	36,35	37,70
6	Musi Banyuasin	27,55	27,09	44,33	43,24	57,70	44,30
7	Banyuasin	38,79	38,40	33,54	40,49	38,81	42,50
8	OKU Selatan	23,23	21,27	35,35	26,99	22,28	29,00
9	OKU Timur	21,56	26,18	38,52	44,25	56,81	58,30
10	Ogan Ilir	42,72	44,39	37,84	46,27	48,16	50,90
11	Empat Lawang	11,40	15,87	24,85	32,81	41,79	37,90
12	Kota Palembang	74,11	75,13	76,83	77,49	68,54	78,20
13	Kota Prabumulih	61,80	69,09	64,50	70,36	83,65	68,00
14	Kota Pagar Alam	13,91	10,05	43,88	48,70	59,64	47,80
15	Kota Lubuk Linggau	60,83	75,62	78,79	69,96	70,00	84,40
Sumatera Selatan		39,03	41,40	45,32	49,48	50,93	54,20

Sumber : BPS Sumsel 2008-2012 (Buku MDGs Sumsel)

Berdasarkan analisa diagram Cartesius, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten OKU Timur dan Kabupaten Ogan Ilir masuk dalam kelompok kabupaten/kota yang tingkat kemiskinannya tinggi dan prosentase proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak masih rendah. Untuk itu maka 5 kabupaten/kota tersebut menjadi prioritas di dalam penanganan pelayanan sanitasi yang layak.

Grafik 6.7

Tingkat Kemiskinan (%) Terhadap Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Sumatera Selatan 2013



6.4 Arah Kebijakan, Strategi dan Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016

Arah kebijakan pembangunan wilayah difokuskan pada upaya pencepatan pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan mendorong akselerasi pembangunan wilayah di setiap kabupaten kota sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah masing-masing.

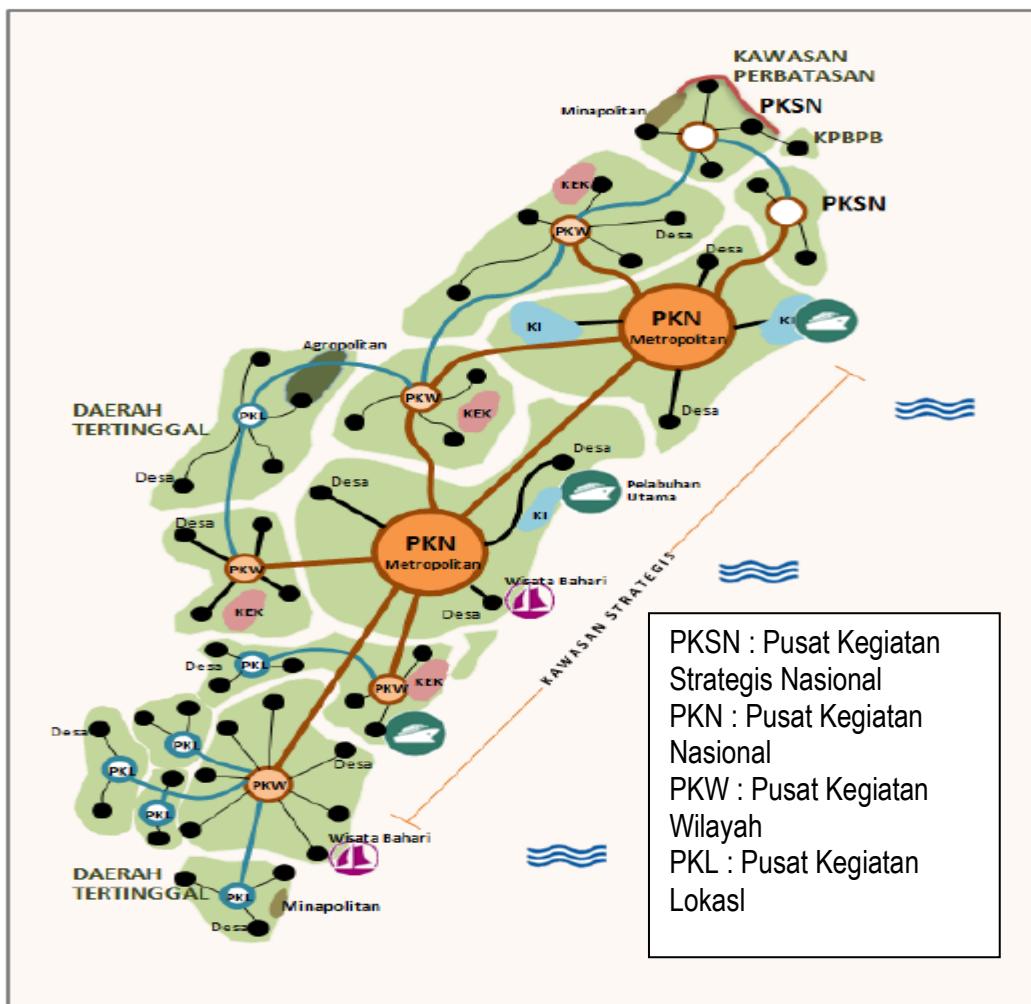
Akselerasi pembangunan wilayah tersebut bertumpu pada peningkatan konektivitas antar wilayah kabupaten/kota, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, efisiensi dan nilai tambah sumber daya alam, penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyediaan infrastruktur yang terpadu dan merata dengan memperhatikan posisi geo-strategis regional dan global dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

6.4.1 Konektivitas antar Wilayah Kabupaten/Kota

Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur di wilayah pertumbuhan, antar wilayah pertumbuhan serta antar wilayah dengan wilayah di sekitarnya melalui percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, jalan, informasi, telekomunikasi, serta pasokan energi. Tujuannya adalah untuk :

1. Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan.
2. Memperluas pertumbuhan ekonomi dari pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah belakangnya (hinterland).
3. Menyebarkan manfaat pembangunan secara meluas melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan.

Gambar 6.16
Sketsa Hirarki Pusat-Pusat Pertumbuhan dan Hinterland

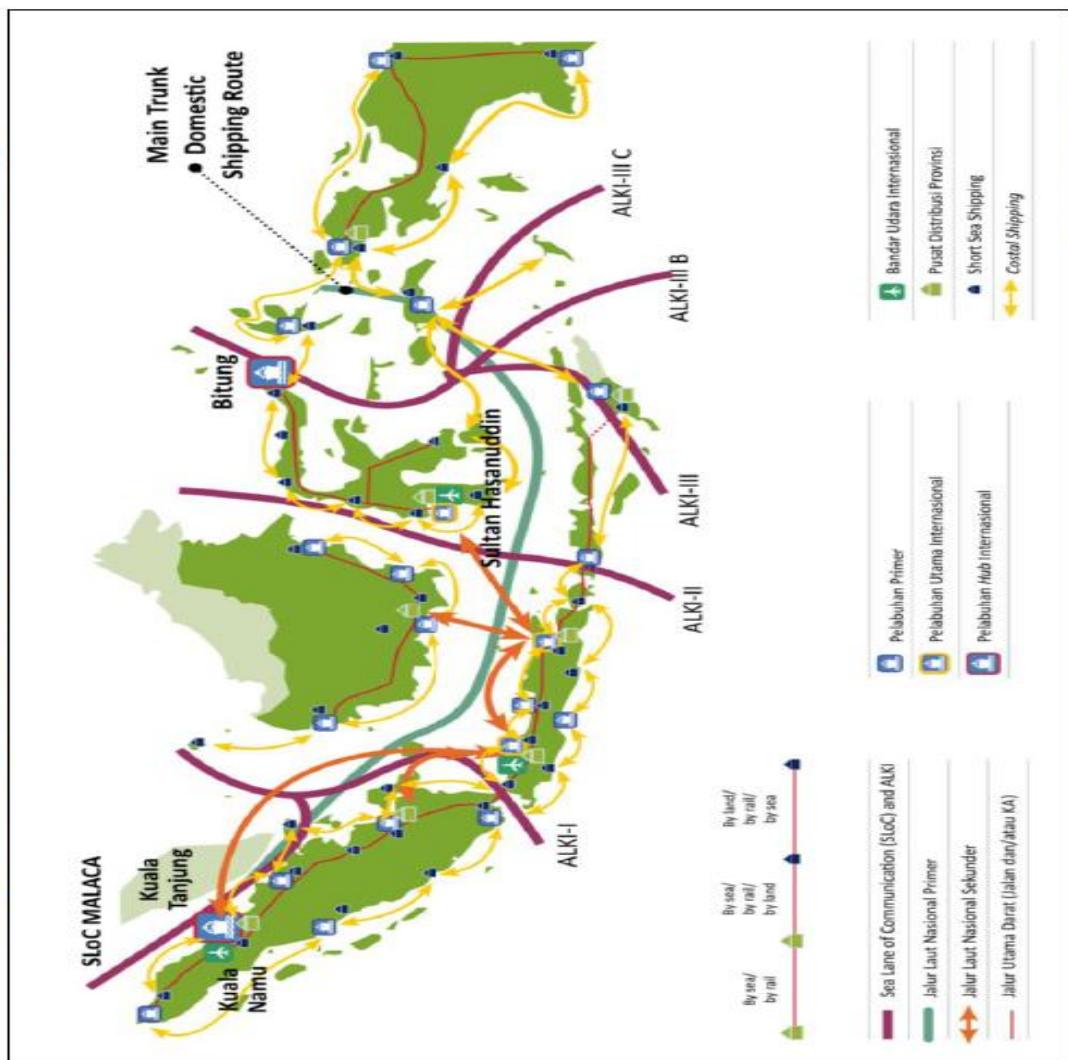


Sumber : Bappenas, 2014

6.4.1.1 Konektivitas Dengan Wilayah Sekitarnya

Provinsi Sumatera Selatan secara geografis terletak di posisi yang cukup strategis, baik secara regional maupun nasional, termasuk dalam pengembangan koridor timur Sumatera yang terhubungkan dengan akses pelabuhan (Pelabuhan Tanjung Api-Api), terhubungkan dengan adanya jalan lintas timur sumatera, jalan kereta api, bandara internasional Sultan Mahmud Badaruddin, akses yang menghubungkan bagian barat di Sumatera Selatan dengan bagian Timur Sumatera Selatan baik melalui jalan, akses sungai maupun kereta api.

Gambar 6.17
Konsep Gerbang Pelabuhan dan Bandar Udara Internasional
Di Masa Depan



Sumber : Menko Perekonomian, 2014

6.4.1.2 Konektivitas antar Wilayah Kabupaten/Kota

Selain mempertimbangkan kawasan strategis, zonasi bangkitan dan tarikan pergerakan juga mempertimbangkan batasan administrasi kabupaten/kota, dimana dalam struktur ruang RTRW Provinsi telah ditetapkan fungsinya. Zonasi bangkitan pergerakan berdasarkan pada batasan administrasi kabupaten kota serta pola kegiatan ekonomi masyarakatnya dapat dilihat pada tabel berikut:

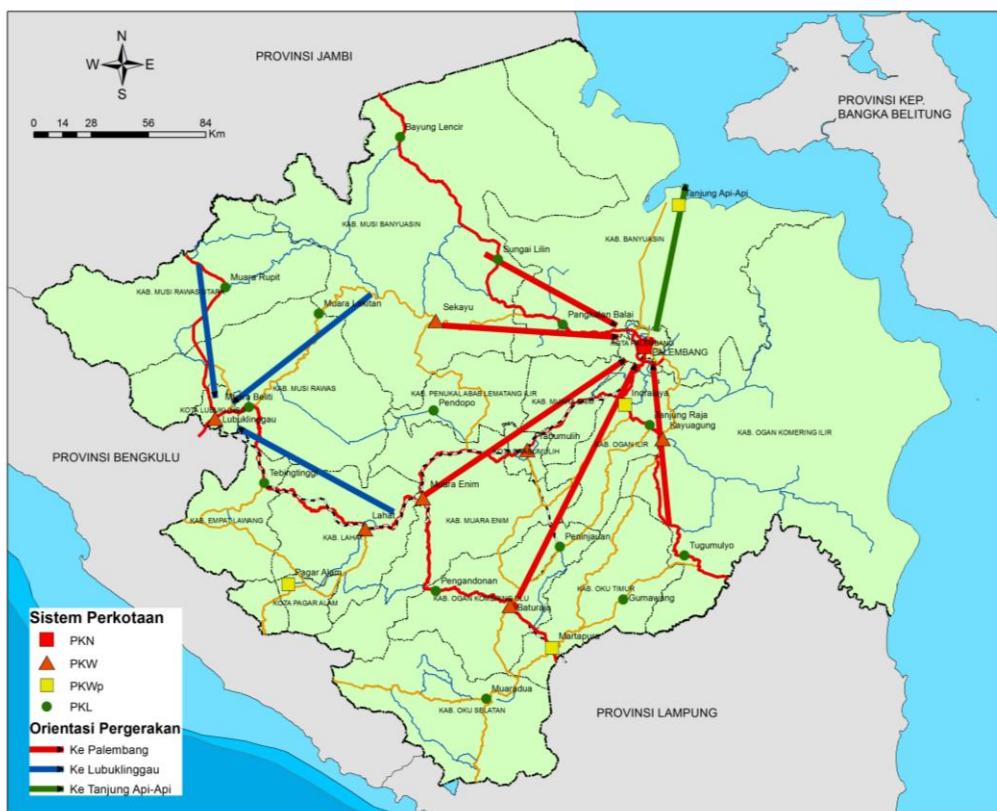
Tabel. 6.9
Zona Bangkitan dan Tarikan Pergerakan Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Selatan

No.	Kabupaten/Kota (Zona Bangkitan dan Tarikan Pergerakan)	Aktivitas	Produk (Potensi)
1	Ogan Komering Ulu (OKU)	<ul style="list-style-type: none"> - Perkebunan - Industri turunan karet - Industri turunan sawt 	<ul style="list-style-type: none"> - Industri berbasis karet - Industri berbasis sawit - Sentra: daerah hilir Kota Baturaja
2	Ogan Komering Ilir (OKI)	<ul style="list-style-type: none"> - Industri kecil dan kerajinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Industri kecil dan kerajinan: kemplang, keramik, gerabah, ukiran, sentra Kec. Kayu Agung
3	Muara Enim	<ul style="list-style-type: none"> - Tambang - Perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Batubara - Karet - CPO
4	Lahat	<ul style="list-style-type: none"> - Perkebunan - Industri 	<ul style="list-style-type: none"> - Karet - Kopi - Industri logam, mesin, elektronik dan kimia - Industri hasil pertanian dan kehutanan - Aneka industri
5	Musi Rawas	<ul style="list-style-type: none"> - Perkebunan - Pertanian tanaman pangan (padi) 	<ul style="list-style-type: none"> - Agroindustri karet, sawit di Kec Muara Beliti - Pengolahan padi di Tugumulyo
6	Musi Banyuasin (Muba)	<ul style="list-style-type: none"> - Perkebunan - Industri Agro 	<ul style="list-style-type: none"> - Karet - Sawit - Industri pengolah Karet - Industri CPO - Lokasi sentra industri mendekati Kec. Sungai Lais
7	Banyuasin	<ul style="list-style-type: none"> - Perkebunan - Industri Kimia - Industri Agro 	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Kimia (Tj Apiapi) - Industri Karet (Tj. Api-Api) - Industri turunan sawit (CPO, Oleokemikal)
8	OKU Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Perkebunan - Bahan galian - Industri pengolahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan Kopi di Muaradua - Galian di Pulau Beringin
9	OKU Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian tanaman pangan: padi - Perkebunan: sawit, jarak - Bahan Galian - Industri 	<ul style="list-style-type: none"> - Industri pangan: beras/padi - Industri energi: biodiesel (jarak, sawit) - Industri bahan galian: batu, genteng, permata, batu mulia - Industri hasil pertanian: agropolitan - Sentra: Martapura

No.	Kabupaten/Kota (Zona Bangkitan dan Tarikan Pergerakan)	Aktivitas	Produk (Potensi)
10	Ogan Ilir	<ul style="list-style-type: none"> - Industri rumah tangga - Industri kecil dan kerajinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Rumah Tangga (kerupuk kemplang), sentra: Inderalaya Utara - Industri kecil dan kerajinan (anyaman aluminium), sentra di Tanjung Batu - Industri pandai besi, sentra di Tanjung Pinang dan Sungai Pinang
11	Empat Lawang	<ul style="list-style-type: none"> - Perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Karet - Nilam - Kopi - Industri pengolah hasil pertanian
12	Palembang	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat pemerintahan - Perdagangan jasa - Industri kerajinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat pemerintahan provinsi - Pusat perdagangan jasa skala nasional - Sentra produksi songket: kelurahan 30 ilir - Kawasan industri makanan mpekmpek: kelurahan 13 ulu dan gandus - Sentra home industri: Klurahan Tuan Kentang - Kawasan kerajinan dan pertukangan: sekitar mesjid agung
13	Prabumulih	<ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan - Industri pengolahan hasil pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan - Industri pengolahan hasil pertanian (nanas) - Sentra kearah Prabumulih barat
14	Pagar Alam	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian (hortikultura) - Industri pengolahan hasil pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> - Produksi hasil pertanian hortikultura (Dempo selatan, daerah menuju bandara)
15	Lubuk Linggau	<ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan jasa - Industri pengolahan agro 	<ul style="list-style-type: none"> - Sentra perdagangan, jasa pendidikan - Sentra produksi gula aren

Sumber: Diolah dari Raperda RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2033

Gambar 6.18 :
Orientasi Pergerakan di Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : Raperda RTRW Provinsi Sumsel 2013-2033, diolah

Dari gambar terlihat dari pola pergerakan internal akan ada 2 kutub yang akan menjadi gate di timur (Palembang) dan di barat (Lubuk Linggau). Pergerakan penumpang dan barang dalam provinsi Sumatera Selatan didominasi oleh moda jalan, walaupun ada yang menggunakan kereta api dan sungai. Orientasi pergerakan penumpang dan barang adalah menuju 2 poros jalan nasional yaitu jalan lintas timur dan jalan lintas tengah dengan outlet utama Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau.

Jalan Lintas Tengah dan Lintas Timur dihubungkan oleh jalan nasional di bagian utara (melalui Sekayu) dan Selatan (melalui Muara Enim, Lahat). Jalan penghubung utara: Kota Palembang - Pangkalan Balai (Banyuasin)- Betung (Banyuasin) - Sekayu (Muba) - Muara Beliti (Musi Rawas) - Lubuk Linggau . Jalan penghubung selatan: Kota Palembang - Inderalaya (OI) - Prabumulih - Muara Enim - Lahat - Tebing Tinggi (Empat Lawang) - Muara Beliti (Musi Rawas) - Lubuk Linggau.

Gambar 6.19 :
Hirarki Fungsi Jalan di Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No: 630/KPTS/M/2009

6.4.2 Pengembangan Kawasan Strategis

Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis adalah percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah yang selaras serta peningkatan efisiensi penyediaan infrastruktur.

- Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah**
Mengembangkan pusat pertumbuhan di 4 (empat) Kawasan Industri (KI), yaitu di Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Kota Palembang dan Kota Lubuklinggau serta Kawasan

Ekonomi Khusus Tanjung Api-API yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 guna mendukung hilirisasi, pembangunan pusat olah raga Jakabaring Sport City (JSC) di Kota Palembang sebagai tempat pelaksanaan Asian Games ke XVIII tahun 2018 berdasarkan *Host City Contract* oleh OCA tanggal 28 September 2014, pembangunan Kebun Raya Sriwijaya di Kabupaten Ogan Ilir, pembangunan pusat kerbau rawa di kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin,

b. Percepatan Pembangunan konektivitas

Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur di wilayah pertumbuhan, antar wilayah petumbuhan melalui percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, jalan, informasi dan telekomunikasi serta pasokan energi yang mendorong berkembangnya potensi ekonomi wilayah.

6.4.3 Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

a. Pembangunan Perkotaan

Arah kebijakan pembangunan wilayah perkotaan difokuskan untuk membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi dan budaya lokal.

Strategi pembangunan perkotaan :

- Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional
Mendorong kawasan perkotaan Palembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, terutama dalam mewujudkan Palembang sebagai kota MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition).
- Perwujudan Sistem Perkotaan Wilayah dan Lokal
Mendorong 7 (tujuh) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), 4 (empat) Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) dan 14 (empat belas) Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Pembangunan kota yang nyaman, aman dan cerdas sehingga mampu berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal Pemenuhan sarana dan prasarana dasar perkotaan.

b. Pembangunan Perdesaan

Arah kebijakan pembangunan perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Strategi pembangunan perdesaan :

- Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa.
- Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan ekonomi masyarakat desa.
- Pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi dan pendampingan.
- Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan.

6.4.4 Pengembangan daerah perbatasan

Pengembangan daerah perbatasan difokuskan pada perbatasan antara Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Jambi, Lampung, Bengkulu dan perbatasan antar kabupaten/kota. Pendekatan pembangunan di daerah perbatasan melalui pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Strategi :

- Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di perbatasan berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal dengan di dukung pembangunan infrastruktur
- Pembangunan SDM yang handal serta pemanfaatan IPTEK.
- Penegasan batas wilayah.
- Peningkatan kerjasama antar wilayah.

6.4.5 Pengembangan Tata Ruang Wilayah Provinsi

Untuk mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan wilayah diperlukan landasan utama pembangunan yaitu : penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang ditujukan untuk perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Arah kebijakan pengembangan tata ruang provinsi adalah sebagai berikut:

- Kebijakan terkait pengembangan struktur tata ruang :
 - Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki.
 - Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata.
- Kebijakan terkait pengembangan pola ruang :
 - Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
 - Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan.
 - Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan yang produktif, efisien.

Strategi :

- Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara, jaringan energi dan jaringan telekomunikasi.
- Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mewujudkan paling sedikit 30 persen dari luas provinsi sumatera selatan sebagai ruang terbuka hijau dan kawasan indung.
- Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pembatasan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana, mengembangkan perkotaan, mengembangkan 30 persen sebagai ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan.

6.5 Arah Pengembangan 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota

Sasarana pembangunan wilayah tahun 2016 adalah dalam rangka mengurangi kesenjangan wilayah di Sumatera Selatan yang ditandai dengan meningkatnya peran Kabupaten/Kota dalam membentuk PDRB Provinsi Sumatera Selatan, meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan peningkatan IPM, menurunnya kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan penyediaan infrastruktur wilayah sehingga konektivitas antar wilayah dapat lebih baik.

Adapun sasaran pembangunan wilayah tahun 2016 sebagai berikut :

Kab/Kota	Pertumbuhan Ekonomi			Kemiskinan			Pengangguran			IPM			Prioritas
OKU Selatan	5.99	7.35	-1.36	11.57	9.19	-2.38	2.33	2.50	0.17	72.67	73.01	-0.34	Peningkatan PE
Pagar Alam	5.87	6.38	-0.51	9.00	7.78	-1.22	7.04	3.95	-3.09	74.47	75.03	-0.56	Penurunan Pengangguran
Empat Lawang	5.81	6.34	-0.53	13.10	12.17	-0.93	4.53	2.78	-1.75	70.02	70.60	-0.58	Peningkatan IPM
Lahat	5.58	6.20	-0.62	18.61	15.74	-2.87	3.76	3.98	0.22	72.68	73.35	-0.67	Peningkatan IPM & Penurunan Kemiskinan
Lubuklinggau	6.41	6.60	-0.19	14.37	13.08	-1.29	7.17	4.66	-2.51	71.83	72.26	-0.43	Penurunan Kemiskinan
Musi Rawas	5.89	5.63	0.26	17.85	16.24	-1.61	0.92	1.85	0.93	69.57	69.98	-0.41	Penurunan Kemiskinan
Musi Rawas Utara	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	-
Musi Banyuasin	4.21	3.33	0.88	18.02	17.09	-0.93	3.19	4.81	1.62	73.57	74.41	-0.84	Penurunan Kemiskinan

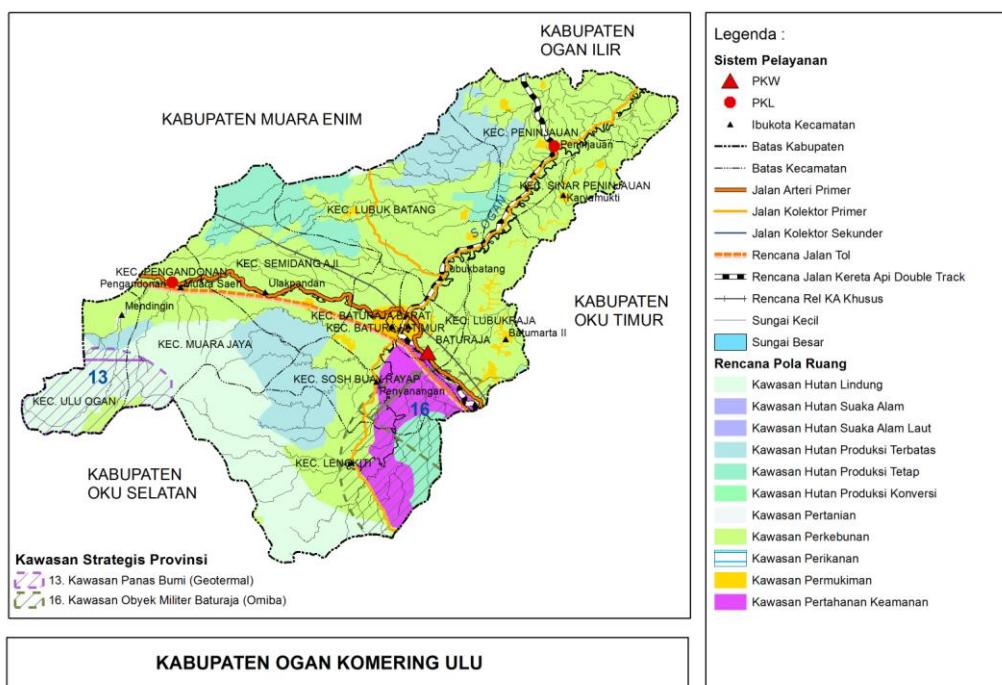
Kab/Kota	Pertumbuhan Ekonomi			Kemiskinan			Pengangguran			IPM			Prioritas
Muara Enim	4.98	5.46	-0.48	14.26	12.15	-2.11	4.23	3.37	-0.86	72.68	72.45	0.23	Penurunan Kemiskinan
PALI	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	-
OKU Timur	6.82	7.21	-0.39	10.28	8.21	-2.07	2.07	1.80	-0.27	71.19	71.65	-0.46	Pertumbuhan Ekonomi & IPM
Ogan Komering Ulu	6.28	7.33	-1.05	12.31	10.19	-2.12	2.02	-0.42	-2.44	74.42	74.95	-0.53	Pertumbuhan Ekonomi & Penurunan Kemiskinan
Prabumulih	5.41	5.77	-0.36	11.23	10.52	-0.71	0.71	-2.36	-3.07	75.83	76.51	-0.68	Pengurangan Pengangguran
Ogan Ilir	5.24	7.22	-1.98	13.86	11.25	-2.61	2.61	-0.86	-3.47	70.99	71.37	-0.38	Penurunan Kemiskinan
Palembang	8.14	8.81	-0.67	13.84	9.19	-4.65	9.15	9.53	0.38	77.74	78.26	-0.52	Peningkatan PE
Banyuasin	6.18	6.28	-0.10	12.28	9.95	-2.33	6.49	4.85	-1.64	71.46	75.03	-3.57	Penurunan Pengangguran
Ogan Komering Ilir	4.98	6.59	-1.61	15.81	12.37	-3.44	4.58	8.52	3.94	72.28	70.60	1.68	Peningkatan IPM

6.5.1 Kabupaten Ogan Komering Ulu

Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu yang memiliki 1 PKW (Baturaja) dan 2 PKL (Pengandonan dan Peninjauan). diarahkan sebagai sentra perkebunan, peternakan dan pertambangan Dari sisi sektoral, sumber pertumbuhan wilayah adalah perdagangan, pertanian, dan jasa-jasa. Oleh karena itu, prioritas pembangunan di Ogan Komering Ulu diarahkan pada:

- Pembangunan Kota Baturaja sebagai PKW.
- Peningkatan produktivitas perkebunan
- Peningkatan akses permodalan khususnya bagi petani skala kecil
- Pemantapan jaringan jalan produksi
- Pemantapan pengelolaan pasar Baturaja sebagai kolektor dan distributor lokal

Gambar 6.20 :
Arah Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu



Tabel 6.16 :
Alokasi Kegiatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016

Nomor	Kegiatan	Lokasi	Indikator	Volume	Anggaran
1.17.110	Pemantauan dan Evaluasi Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Provinsi Sumatera Selatan.	Ogan Ilir, Banyuasin, Lahat, Musi Rawas, dan Ogan Komering Ulu	Jumlah KTM yang terevaluasi	5 Kabupaten	30,000,000
2.26.205	Penyelidikan Kasus kasus Peredaran hasil Hutan	- Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Lahat; Kabupaten Ogan Komering Ulu;	Jumlah kasus peredaran hasil hutan	4 lokasi	60,000,000
2.26.201	Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)	- Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Lahat; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;	Jumlah fasilitasi pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi	4 Unit	130,000,000
1.15.97	Dukungan Peralatan Olahraga untuk Masyarakat	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Pagar Alam; Kota Palembang; Kota Prabumulih;	Jumlah peralatan olahraga untuk masyarakat	40 Klub/Karang Taruna	190,000,000
1.15.97	Dukungan peralatan olahraga untuk pondok pesantren di Sumsel	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Pagar Alam; Kota Palembang;	Jumlah ponpes di Provinsi Sumatera Selatan yang mendapat bantuan peralatan olahraga	25 Pondok Pesantren	190,000,000
1.10.70	Fasilitasi Taruna Siaga Bencana (Tagana), Petugas Penata Usahaan Gudang Logistik, dan Petugas Posko	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu	Terpenuhinya tali asih dan Uniform TAGANA, Petugas Penata Usahaan Gudang Logistik, dan Petugas POSKO Kesiap Siagaan Bencana Bidang Perlindungan	945 orang	1,412,800,000

		Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Pagar Alam; Kota Palembang; Kota Prabumulih;	Sosial		
1.10.69	Fasilitasi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)	- Kota Pagar Alam; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muratara; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kota Prabumulih; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kota Palembang; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu;	ersedianya tali asih bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	228 orang	730,000,000
1.7.55	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Lahat; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Muratara;	Jumlah Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang dikelola	5 UPPKB	1,000,000,000
1.5.43	Peningkatan Infrastruktur Kawasan Kumuh Kec. Baturaja Barat Kab. OKU	Kec. Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;	-Jumlah Kawasan Agropolitan yang di bangun	1 -paket	1,000,000,000
1.3.25	Penggantian Jembatan Kisam	Kabupaten Ogan Komering Ulu;	Panjang Jembatan Yang Diganti	40.06 M	8,000,000,000
2.25.199	Diseminasi Teknologi Pengembangan Usaha Kehutanan	Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Lahat;	Jumlah yang mendapat teknologi pengembangan usaha kehutanan	100 Persen	150,000,000
2.25.194	Peningkatan Kapasitas Gapoktan Pelaku Utama Berbasis Teknologi Karet (Bahan Olah Karet)	- Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Ogan Komering Ulu;	Jumlah Gapoktan/Pelaku Utama yang berusaha tani berbasis teknologi	100 Persen	300,000,000
1.3.27	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kab. OKU	Ogan Komering Ulu	Panjang Jalan Yang Terpelihara	532 Km	1,600,000,000
1.4.40	Pembangunan TPST/3R kec. Lubuk Raja Kab. OKU	Kec. Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu;	-TPA sampah yang di tangani	1 -unit	425,000,000

1.20.159	Pembinaan dan Pemberdayaan Cadangan Pangan Pemerintahan Desa (CPPD)	OKU Timur	-Jumlah Kades yang dibina	60 -Orang	100,000,000
1.2.9	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana	Pagar Alam ; PALI ; Muratara ; Empat Lawang ; Lahat ; OKU ; OKUT ; OKUS	-Jumlah pelayanan Kesehatan bagi pengungsi dan korban bencana di provinsi Sumsel	8 -Kejadian Bencana	250,000,000
1.15.92	Jambore Pemuda Daerah (JPD) Prov. Sumsel	Palembang, OKU	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan jambore pemuda daerah	400 orang	400,000,000
1.10.69	Pembinaan Organisasi Sosial	Kab. Banyuasin; Kota Lubuk Linggau; Kab. OKUT; Kab. MUBA; Kab. OKI	terbinanya organisasi sosial dan terseleksinya orsos berprestasi	250 orang	80,000,000
1.10.67	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	Kab. MUBA; Kab. Empat Lawang; Kab. OKUS	Tersalurkannya bantuan Bahan bangunan rumah, Jaminan hidup, sarana penerangan dan UEP terhadap Komunitas Adat Terpencil	185 kk	1,225,000,000
1.5.41	Penyusunan RTR Kawasan Koridor Baturaja-Martapura	Kab. OKU	-jumlah laporan perencanaan dan pengawasan gedung	1 -paket	1,000,000,000
1.4.37	Pembangunan IPLT Kab. OKU	Kab. OKU	Jumlah SPAM IKK yang terbangun	1 IKK	750,000,000
2.31.238	Pelatihan dan Bantuan Peralatan bagi IKM Batu Akik	Palembang, OKU, MURA	Jumlah IKM batu Akik yang dibina	100 IKM Batu Akik	200,000,000
2.30.226	- Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Palembang, OI, OKI, OKU, OKUT, OKUS, PBM, ME, LHT, PGA, 4L, PALI, MURA, LL, MUBA, BA	-Jumlah jenis barang dan jasa yang terawasi dalam peredarannya	4 - Jenis Barang	128,125,000
2.25.198	Penilaian Lomba PKA Wana Lestari	OKU, OKUT, Muba, Empat Lawang, Muara Enim, Lahat, Prabu, Pali, Mura, L. Linggau, Palembang	Jumlah Penyuluh Kehutanan, KMDM, PKSM, KTH dan Desa Peduli Hutan	100 Persen	175,000,000
2.25.191	Pembinaan Kawasan Peternakan	Muba, Banyuasin, Mura, OKI, OKU, Muara enim, Lahat	Jumlah Peserta mengikuti pembinaan kawasan peternakan	8 kab	100,000,000
2.25.185	Pelatihan dan Pengembangan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) Petani	OKU, OI, Muratara, OKUT, MUBA, OKI,	- Terlaksananya pelatihan dan pengembangan SKE petani perkebunan	150 - Orang	150,000,000

	Perkebunan				
2.25.185	Pembinaan dan Pengawalan Revitalisasi Perkebunan	Mura, Muratara, Prabumulih, OKI, OKU, OKUT, MUBA, M Enim, Banyuasin, Pali	- Jumlah petani, petugas dan perusahaan peserta revit perkebunan yang terbina	120 - Orang	100,000,000
2.25.185	Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Besar (PBS/N)	Kab. Muara Enim, Banyuasin, Muba, OKU, OKUT, OKUS, OI, OKI, Lahat, PaGAR ALAM, MURA, EMPAT Lawang	- Jumlah kebun yang terawasi dan terbina	17 - Kebun PBS/N	100,000,000
2.25.184	Bantuan bahan dan alat pembeku karet	Prabumulih, Bayuasin, OKU, Pali,	- Terlaksananya bantuan bahan pembeku karet	8000 - Liter	200,000,000
2.25.184	Pengadaan Alat Panen Karet Rakyat	pRABUMULIH, OKU, M Enim, OKI, PALI, MURATARA	- Terlaksananya bantuan alat panen karet	200 - paket	200,000,000
2.25.183	Pengendalian Penyakit Kering Alur Sadap	Kota Prabumulih, b asin, oku, m enim, oi, muba,	- Terlaksananya pengendalian kering alur sadap	500 - Ha	400,000,000
1.19.155	Penanganan Daerah Rawan Pangan	3 Kab/Kota (OKU, Lahat, BA)	jumlh KK yang diberi bantuan bahan pangan	1500 KK Miskin	400,000,000
2.25.178	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	16 Kab./Kota (Banyuasin, OKU Timur, OKI, OKU, OKU Selatan, Ogan Ilir, Prabumulih, Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, Musi Rawas, Muratara, PALI, Empat Lawang, Musi Banyuasin dan Palembang)	Meningkatnya pemanfaatan pembiayaan program dan kredit komersial mendukung peningkatan produksi dan mutu produk	100 Kelompok	150,000,000
2.25.178	Peningkatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan	14 Kab./Kota (OKU Timur, Musi Rawas, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Muratara, PALI, OKU Selatan, Muara Enim dan OKU)	Jumlah Kelompoktani yang dibina untuk melaksanakan penanganan pasca panen tanaman pangan	28 Kelompok	200,000,000
2.25.177	Penyediaan Sarana Pengembangan Pupuk Organik	5 Kab./Kota (Lahat, Pagar Alam, PALI, OKU Timur dan OKU Selatan)	Jumlah Alat Pembuat Pupuk Organik	5 Unit	180,000,000
2.25.175	Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	11 Kab./Kota (Ogan Ilir, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, OKU Timur, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Lubuk Linggau dan OKU)	Luas Penangkaran Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang disertifikasi : - Padi (400 Ha) - Buah-buahan (30.000 Btg) - Sayuran (15 Ton)	400 Ha	640,000,000
2.25.175	Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan dan	13 Kab./Kota (Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, OKI, OKU, OKU Timur, Lahat, Muara Enim, Empat Lawang, Musi Rawas, Pagar Alamm Lubuk Linggau	Jumlah Produsen/Penyalur Pedagang Benih yang diawasi	1 Unit	100,000,000

	Hortikultura dan PALI)				
2.25.174	Pengelolaan Produksi Tanaman Buah	Kabupaten OKI, Muara Enim, Lahat, OKU, Banyuasin, Muaratara dan Kota Pagar Alam	Meningkatnya Pengelolaan Produksi Tanaman Buah	8 Kelompok	200,050,000
2.25.174	Penyediaan Sarana Produksi Pengelolaan Tanaman Buah	Kabupaten OKI, Muara Enim, Lahat, Muratara, OKU, OKI, Banyuasin dan Kota Pagar Alam	Meningkatnya Luas Tanam Tanaman Buah	85 Ha	410,825,000
1.3.27	Pengendalian rutin dan penanggulang an jalan dan jembatan wilayah II	Kab OKU, Kab. OKU Selatan	Jumlah titik rawan bencana	40 Paket	8,000,000,000
2.25.186	Bantuan benih karet untuk batang bawah	OKU	-Jumlah bantuan benih batang bawah karet yang tersalurkan	500000 Butir	100,000,000
1.3.31	-Pembuatan drainase	-Desa Saung Naga kec Peninjauan kab OKU	-	0 -	500,000,000
1.3.25	Pembangunan siring palang, gorong-gorong dan jalan setapak	Lr Mangga RT 01 dusun IV desa Tanjung Baru kec BTA Timur kab OKU	-	0 -	200,000,000
1.3.28	Cor beton	Desa Negeri Agung kec Lengkiti kab OKU	-	0 -	200,000,000
1.3.28	Cor beton kiri kanan badan jalan	Blok P2 desa Baturaden kec Lubuk Raja kab OKU	-	0 -	500,000,000
1.3.27	-Semenisasi jalan setapak	-Desa Tanjung Jati kec Warkuk Ranau Selatan kab OKU Selatan	-	0 -	500,000,000
1.3.27	Cor beton	Jl Blok D desa Lekis unit 3 kec Lubuk Raja kab OKU	-	0 -	200,000,000
1.3.28	Cor beton	Jl Blok E desa Lekis unit 3 kec Lubuk Raja kab OKU	-	0 -	200,000,000
1.3.28	Cor beton	Desa Tihang kec Lengkiti kab OKU	-	0 -	200,000,000
1.3.25	Cor beton	Desa Lubuk Hara kec Lengkiti kab OKU	-	0 -	200,000,000
1.3.28	Cor beton	Jl Sinto tegal Arum kel Sepancar Lawang Kulon kec Baturajo Timur kab OKU	-	0 -	200,000,000
1.3.28	Cor beton	Jl Pancowati kel Sepancar kec Baturajo Timur kab OKU	-	0 -	200,000,000
1.3.31	Pembangunan siring	-Tegal Arum kel Sepancar kec Baturajo Timur kab OKU	-	0 -	500,000,000
1.3.30	Pembangunan talut jalan	Tegal Arum kel Sepancar kec Baturajo Timur kab OKU	-	0 -	200,000,000
1.3.29	Cor beton	Jl Rambutan kel Baturaja Permai kec Baturaja Timur kab OKU	-	0 -	200,000,000
1.3.30	Pembuatan Talud/Bronjon g Sungai Ogan	KAB OKU	BERTAMBAHNYA KAWASAN YANG BEBAS LONGSOR	417 m'	2,500,000,000

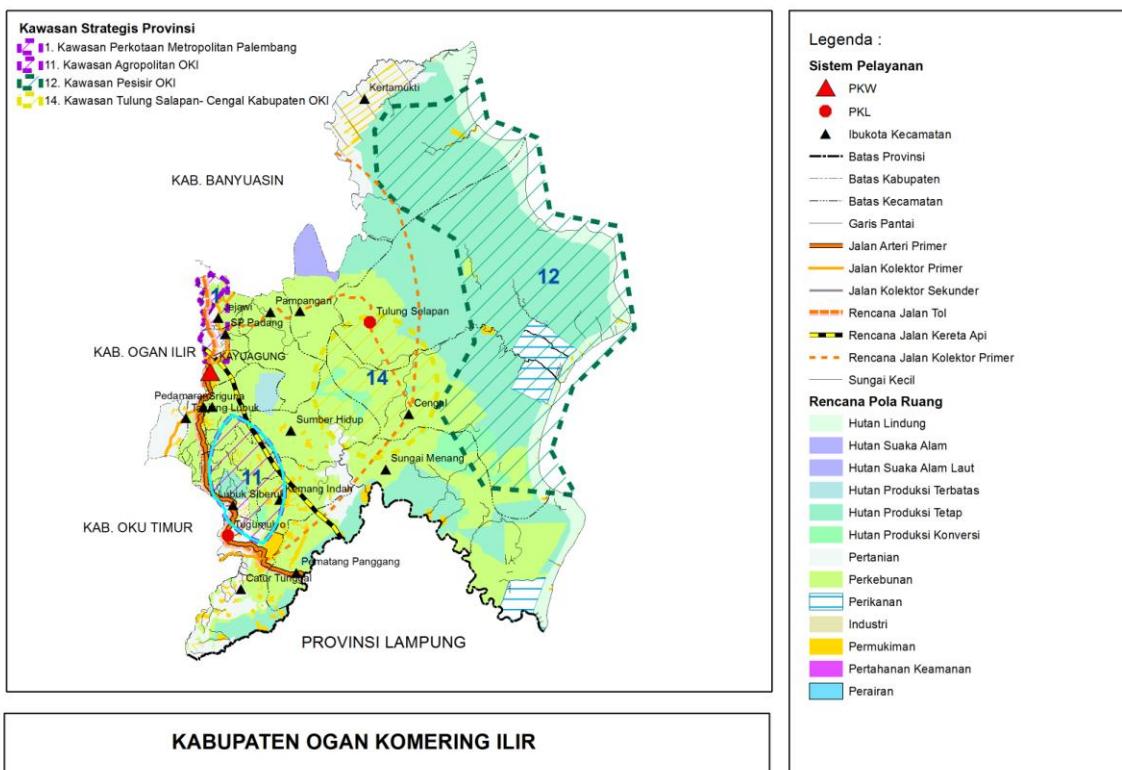
	Desa Banu Ayu				
1.3.30	Pembuatan Turap/Site File Sungai Ogan Desa Suka Pindah	KAB OKU	BERTAMBAHNYA PANJANG TEBING YANG BEBAS LONGSOR	523 m'	3,135,388,000
1.3.30	Pembuatan Talud/Bronjong Sungai Ogan Desa Banu Ayu	Desa Banu Ayu Kab. OKU	panjang tebing sungai yang terlindungi	417 m	2,500,000,000
1.3.30	-Pembuatan Turap/Site File Sungai Ogan Desa Suka Pindah	Ds.Suka Pindah Kab OKU	-	0 -	5,500,000,000
					48,792,188,000

6.5.2 Kabupaten Ogan Komering Ilir

Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang memiliki 1 PKW (Kayuagung) dan 2 PKL (Tugumulyo dan Tulung Selapan) diarahkan sebagai sentra produksi pangan khususnya padi, palawija, hortikultura, ternak, dan perikanan budidaya. Dari sisi sektoral, sumber utama pertumbuhan daerah adalah pertanian, perdagangan, dan bangunan. Oleh karena itu, prioritas pembangunan di Ogan Komering Ilir perlu diarahkan pada:

- Pembangunan Kota Kayu Agung sebagai PKW serta Tugumulyo dan Tulung Selapan sebagai PKL.
- Peningkatan produktivitas pertanian dengan fokus pemantapan jaringan irigasi dan penyuluhan.
- Peningkatan efisiensi distribusi input produksi : sarana pertanian/alsintan, bibit unggul, pupuk, pakan ternak.
- Pemantapan prasarana dengan fokus jalan produksi dan pasar produk pertanian.
- Peningkatan dukungan akses permodalan, yang bias dilakukan melalui subsidi kredit dan didukung penjaminan produksi pertanian.
- Pemberdayaan koperasi petani.
- Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses pendidikan menengah dan kesehatan.
- Pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan peningkatan perlindungan kawasan pesisir pantai.

Gambar 6.21 : Arah Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ilir



Tabel 6.17 :
Alokasi Kegiatan Kabupaten Ogan Komering Ilir
Tahun Anggaran 2016

Nomor	Kegiatan	Lokasi	Indikator	Volume	Anggaran
1.17.109	Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah	Kab. OKI, Kab. Muara Enim dan Kab. Muba	Jumlah Daerah Pemekaran yang difasilitasi	9 kabupaten dan kecamatan	500,000,000
1.10.74	Pembentukan Desa Tangguh Kesiapsiagaan Bencana	Kabupaten OKI	Jumlah Desa tangguh yang terbentuk	1 desa	50,000,000
1.10.72	Pemadaman darat akibat kebakaran hutan dan lahan	Kab OKI, OI, Banyuasin, MUBA, Muara Enim dan Kota Palembang	Jumlah Pemadaman darat akibat kebakaran hutan dan lahan	30 titik api (hotspot)	1,200,000,000
1.10.69	Pembinaan Organisasi Sosial	Kab. Banyuasin; Kota Lubuk Linggau; Kab. OKUT; Kab. MUBA; Kab. OKI	terbinanya organisasi sosial dan terseleksinya orsos berprestasi	250 orang	80,000,000
2.30.226	- Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Palembang, OI, OKI, OKU, OKUT, OKUS, PBM, ME, LHT, PGA, 4L, PALI, MURA, LL, MUBA, BA	-Jumlah jenis barang dan jasa yang terawasi dalam peredarannya	4 - Jenis Barang	128,125,000
2.29.222	Pemberdayaan Wanita Nelayan	OKI, Banyuasin	Jumlah sarana penangkapan ikan (paket)	2 paket	198,870,000
2.29.222	Operasional Perizinan dan Pengendalian Perikanan Tangkap	Palembang, Oki dan Banyuasin	Jumlah Sertifikat perizinan dan pengendalian perikanan tangkap yang dikeluarkan selama satu tahun	75 unit	225,000,000
2.29.220	Operasional Pengawasan Terpadu Sumber Daya Ikan di Perairan Umum dan Laut	MUBA, OKI, OI, Lahat, Muara Enim, Banyuasin	Jumlah operasional pengawasan terpadu yang telah dilaksanakan dengan pihak ALRI dan Polisi Perairan	6 Kab/Kota	84,515,000
2.25.191	Pembinaan Kawasan Peternakan	Muba, Banyuasin, Mura, OKI, OKU, Muara enim, Lahat	Jumlah Peserta mengikuti pembinaan kawasan peternakan	8 kab	100,000,000
2.25.191	Pembinaan Sekolah Peternakan Rakyat	Kab. Banyuasi, OKI, Muba, Muara Enim	Jumlah Kabupaten pada kelompok Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) yang dibina	4 kab	500,000,000
2.25.188	Pengembangan Ternak Sapi Integrasi sawit	OKI, Muba, Banyuasin, Lahat dan Muara Enim	Jumlah Kwitansi pembayaran jenis barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	7 kwitansi	300,000,000
2.25.185	Pelatihan dan Pengembangan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) Petani Perkebunan	OKU, OI, Muratara, OKUT, MUBA, OKI,	- Terlaksananya pelatihan dan pengembangan SKE petani perkebunan	150 - Orang	150,000,000
2.25.185	Pembinaan dan Pengawalan Revitalisasi Perkebunan	Mura, Muratara, Prabumulih,OKI,OKU,OKUT ,MUBA,M Enim, Banyuasin, Pali	- Jumlah petani, petugas dan perusahaan peserta revit perkebunan yang	120 - Orang	100,000,000

			terbina		
2.25.185	Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Besar (PBS/N)	Kab. Muara Enim, Banyuasin, Muba, OKU, OKUT, OKUS, OI, OKI, Lahat, PaGAR ALAM, MURA, EMPAT Lawang	- Jumlah kebun yang terawasi dan terbina	17 - Kebun PBS/N	100,000,000
2.25.184	Pembinaan Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Kab. Muara Enim, Muratara, OKI, Lahat, PALI, dan Musi Rawas	- Terlaksananya bantuan unit pengolahan dan pemasaran bokar	5 - kelompok tani	100,000,000
2.25.184	Pengadaan Alat Panen Karet Rakyat	pRABUMULIH, OKU, M Enim, OKI, PALI, MURATARA	- Terlaksananya bantuan alat panen karet	200 - paket	200,000,000
2.25.183	Pengendalian Penyakit Jamur Akar Putih (JAP) pada tanaman karet	Kabupaten Bokus, oki,muba	- Terlaksananya pengendalian Jamur Akar Putih	200 - Ha	300,000,000
1.19.156	Operasional Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	Kab/Kota. ME, PA, OKUT, OKI	Jumlah sertifikasi Prima-3 dan pendaftaran PD pangan segar	4 komoditi	125,000,000
1.12.80	Penyuluhan dan Pemasyarakatan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi	Palembang, Banyuasin, OKI	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan sadar koperasi	1000 Orang	400,000,000
2.25.178	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	16 Kab./Kota (Banyuasin, OKU Timur, OKI, OKU, OKU Selatan, Ogan Ilir, Prabumulih, Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, Musi Rawas, Muratara, PALI, Empat Lawang, Musi Banyuasin dan Palembang)	Meningkatnya pemanfaatan pembiayaan program dan kredit komersial mendukung peningkatan produksi dan mutu produk	100 Kelompok	150,000,000
2.25.178	Peningkatan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, OKI, Musi Rawas dan OKU Timur	Jumlah kelompok tani yang dibina untuk melaksanakan pengolahan hasil tanaman pangan berbasis GMP	13 Kelompok	200,000,000
2.25.178	Peningkatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan	14 Kab./Kota (OKU Timur, Musi Rawas, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Muratara, PALI, OKU Selatan, Muara Enim dan OKU)	Jumlah Kelompoktani yang dibina untuk melaksanakan penanganan pasca panen tanaman pangan	28 Kelompok	200,000,000
2.25.178	Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, OKI, Musi Rawas dan OKU Timur	Jumlah peralatan pengolahan hasil tanaman pangan : - RMU (5 Unit) - Mesin Pemipil Jagung (6 Unit) - Mesin Penepung Jagung (2 Unit)	13 Unit	700,000,000
2.25.178	Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan	14 Kab./Kota (OKU Timur, Musi Rawas, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Muratara, PALI,	Jumlah Peralatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan : - Power Tresher (17 Unit)	244 Unit/Lembar	392,700,000

		OKU Selatan, Muara Enim dan OKU	- Combine Harvester (2 Unit) - Terpal Jemur (225 Lembar)		
2.25.177	Optimasi Pemanfaatan Lahan Sawah	Kabupaten OKI dan Musi Banyuasin	Jumlah Kelompok Yang menerapkan peningkatan intensitas pertanaman : - Pertanaman 100-200	17 Kelompok	300,000,000
2.25.177	Penyediaan Sarana Optimasi Pemanfaatan Lahan	Kabupaten OKI dan Musi Banyuasin	Luas areal pertanaman yang menerapkan Fiberisasi	275 Ha	880,000,000
2.25.177	Pengelolaan Infrastruktur Pertanian	Kabupaten OKI, Muara Enim, Lahat, OKU Selatan, OKU Timur dan Musi Rawas	Jumlah Kelompok P3A	132 Kelompok	200,000,000
2.25.175	Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	11 Kab./Kota (Ogan Ilir, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, OKU Timur, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Lubuk Linggau dan OKU)	Luas Penangkaran Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang disertifikasi : - Padi (400 Ha) - Buah-buahan (30.000 Btg) - Sayuran (15 Ton)	400 Ha	640,000,000
2.25.175	Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	13 Kab./Kota (Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, OKI, OKU, OKU Timur, Lahat, Muara Enim, Empat Lawang, Musi Rawas, Pagar Alamm Lubuk Linggau dan PALI)	Jumlah Produsen/Penyalur Pedagang Benih yang diawasi	1 Unit	100,000,000
2.25.175	Pengelolaan Penangkaran Benih Tanaman Pangan	11 Kab./Kota (Ogan Ilir, OKI, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Musi Rawas, Banyuasin, OKU Timur dan Musi Banyuasin)	Pengelolaan ketersediaan benih di produsen, penangkar dan pengecer	400 Ton	209,800,000
2.25.175	Penyediaan Sarana Pengelolaan Penangkaran Benih Tanaman Pangan	11 Kab./Kota (Ogan Ilir, OKI, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Musi Rawas, Banyuasin, OKU Timur dan Musi Banyuasin)	Ketersediaan Benih Tanaman Pangan yang unggul dan bersertifikat	5000 Kg	1,176,225,000
2.25.174	Pengelolaan Produksi Tanaman Sayuran	Kabupaten Banyuasin, Muara Enim, Musi rawas, Ogan ilir, OKI,	Meningkatnya Pengelolaan Produksi Tanaman Sayuran	19 Ha	432,525,000
2.25.174	Pengelolaan Produksi Tanaman Buah	Kabupaten OKI, Muara Enim, Lahat, OKU, Banyuasin, Muaratara dan Kota Pagar Alam	Meningkatnya Pengelolaan Produksi Tanaman Buah	8 Kelompok	200,050,000
2.25.174	Penyediaan Sarana Produksi Pengelolaan Tanaman Buah	Kabuapten OKI, Muara Enim, Lahat, Muratara, OKU, OKI, Banyuasin dan Kota Pagar Alam	Meningkatnya Luas Tanam Tanaman Buah	85 Ha	410,825,000
2.29.222	Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	Banyuasin dan Oki	Jumlah rumah/tanah nelayan yang teridentifikasi	2 Kab/Kota	113,380,000
2.29.220	Pembinaan Pokmaswas	OKI, Banyuasin, Muba, Ogan Ilir	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan	4 kab/kota	70,000,000

2.29.223	Pengembangan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan untuk POKLAHSAR	Palembang, OI, OKI	Jumlah paket yang diberikan	3 paket	129,000,000
2.29.223	Fasilitasi Penerapan SKP dan SNI	Palembang, Banyuasin dan OKI	Jumlah kab/kota yang UMKM dan UPI-nya bersertifikat	3 Kab/kota	111,450,000
1.3.29	Pembangunan drainase Kel. Sukadana kec Kayuagung OKI	Kel. Sukadana kec Kayuagung OKI	-	0 -	200,000,000
1.3.28	Cor beton jalan lingkungan Dusun III desa Lubuk Siberuk kec Lempuing Jaya kab OKI	Dusun III desa Lubuk Siberuk kec Lempuing Jaya kab OKI	-	0 -	600,000,000
1.3.25	Pembangunan Jembatan Gantung di Desa Kelampaian, Kec. Rantau Alai, Kab. OKI	Desa Kelampaian, Kec. Rantau Alai, Kab. OKI	Panjang Jembatan Terbangun	1 Unit Jembatan	500,000,000
1.3.25	Pengerasan jalan di desa Lubuk Seberuk Blok B kec Lempuing Jaya kab OKI	-Kec Lempuing Jaya kab OKI	-	0 -	1,000,000,000
1.3.31	-Pembuatan cor beton dan siring kel Tanjung Rancing kec Kayu Agung kab OKI	-Kel Tanjung Rancing kec Kayu Agung kab OKI	-	0 -	500,000,000
1.3.27	Pengerasan jalan lingkungan	Teluk Gelam kab OKI	-	0 -	1,000,000,000
1.3.27	Pengerasan jalan lingkungan	Kec Lempuing kab OKI	-	0 -	1,000,000,000
1.3.25	-Pembangunan jalan lingkungan di kec Tanjung Lubuk OKI	-Kec Tanjung Lubuk kab OKI	-	0 -	1,000,000,000
1.3.26	- Jalan cor beton dan box culvert	-Lingkungan kel. Tanjung Rancing kec. Kayu Agung kab OKI	-	0 -	1,600,000,000
1.3.31	-Pembuatan siring petaling kec Tulung Selapan kab OKI	-Kec Tulung Selapan kab OKI	-	0 -	1,000,000,000
1.3.30	Pembangunan Talud Ds.Cahaya Tani, Kec Lempuing	Kab OKI	PANJANG TEBING SUNGAI YANG DILINDUNGI	167 m'	1,000,000,000
1.3.31	DED Danau Teloko	Kab OKI	BERTAMBAHNYA DOKUMEN PERENCANAAN	1 dokumen	350,000,000
1.3.34	Normalisasi Sungai Terusan (Delas I)	Kabupaten OKI	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	4000 M'	1,100,000,000
1.3.34	Normalisasi Sungai Pulau Layang Ulak Pati	Kabupaten OKI	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	4500 M'	1,100,000,000
1.3.34	Normalisasi Sungai Tapus	Kabupaten OKI	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	2000 M'	1,100,000,000
1.3.34	Normalisasi Sungai Arisan Buntal	Kabupaten OKI	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	3000 M'	1,600,000,000
1.3.34	Normalisasi Sungai Ds. Suka Pulih, Kec Pedamaran	Kabupaten OKI	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	375 M'	1,500,000,000
1.3.34	Pembangunan Saluran/Kanal Ds. Ulak Kedondong	Kabupaten OKI	Panjang Saluran yang dibangun	750 M'	3,000,000,000

1.3.34	Pembangunan Saluran/Kanal Ds.Sungai Ketupak, Kec Cengal	Kabupaten OKI	Panjang Saluran yang dibangun	250 M'	1,000,000,000
1.3.34	Pembangunan Saluran/Kanal Ds.Sungai Ketupak, Kec Cengal	Kabupaten OKI	Panjang Saluran yang dibangun	250 M'	1,000,000,000
1.3.34	Normalisasi Sungai Pasir, Kec. Cengal	Kabupaten OKI	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	250 M'	1,000,000,000
1.3.34	Normalisasi Sungai Ds. Bumi Agung, Kec. Lempuing	Kabupaten OKI	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	375 M'	1,500,000,000
1.3.34	Normalisasi anak sungai Ogan, Kec Teluk Gelam	Kabupaten OKI	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	250 M'	1,000,000,000
1.3.34	Normalisasi Sungai Ds. Siju, Kec Rambutan	Kabupaten OKI	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	125 M'	500,000
1.3.30	Pembangunan Bronjong di Ds.Talang Pangeran, Kec Teluk Gelam	Kab OKI	PANJANG TEBING SUNGAI YANG DILINDUNGI	250 m'	1,500,000,000
1.3.34	Normalisasi Sungai Ds. Pangkalan Lampam	Kabupaten OKI	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	4000 M'	1,200,000,000
1.3.30	Perkuatan Tebing Sungai Segonang	kab OKI	Panjang tebing sungai yang dilindungi terhadap gerusan	150 m'	1,300,000,000
1.3.31	Pemeliharaan Sungai simpang tiga beringin	-kab OKI	BERTAMBAHNYA DAERAH IRIGASI YANG TERPELIHARA	666.67 m'	500,000,000
1.3.31	Review Desain D.I.R. Jejawi	-KAB OKI	BERTAMBAHNYA DOKUMEN PERENCANAAN	1 dokumen	490,000,000
1.3.31	Review Desain D.I.R. Ulak Jermun	-kab OKI	BERTAMBAHNYA DOKUMEN PERENCANAAN	1 dokumen	367,500,000
1.3.30	Pemasangan Fero cement di Ds.Sukaraja Kec Pangkalan Lampam	-kab OKI	BERTAMBAHNYA PANJANG TEBING SUNGAI YANG BEBAS LONGSOR	567 m'	3,400,000,000
1.3.30	-Pemasangan Fero cement di Ds.Sukaraja Kec Pangkalan Lampam	ds sukaraja kec pangkalan lampam kab OKI	-	0 -	5,000,000,000
1.3.33	Pemeliharaan Sungai simpang tiga beringin	Kab. OKI	-	0 -	500,000,000
1.3.34	Normalisasi Sungai Ds. Pangkalan Lampam	Ds.Pangkalan Lampam Kab OKI	-	0 -	3,000,000,000
1.3.31	Pemeliharaan Irigasi rehabilitasi tembok penahan sungai komering kelurahan kota kayu agung	-Kab OKI	-	0 -	500,000,000
1.3.31	Review Desain D.I.R. Jejawi	-KAB OKI	-	0 -	490,000,000
1.3.31	Review Desain D.I.R. Ulak Jermun	Kab OKI	-	0 -	367,500,000
1.3.30	-Pembuatan saluran/canal/jalur desa Ulak	-Kel Cengal kab OKI	-	0 -	3,000,000,000

	Kedondong				
1.3.30	-Pembuatan saluran/canal/jalur desa Sungai Sunur	-Kec Cengal kab OKI	-	0 -	1,000,000,000
1.3.31	- Talut/tembok penahan tanah	-Desa Cahaya Tani kec. Lempuing kab OKI	-	0 -	1,000,000,000
1.3.33	Normalisasi anak sungai Ogan	Kec Teluk Gelam kab OKI	-	0 -	1,000,000,000
1.3.33	-Tembok penahan sungai di desa Talang Pangeran kec Teluk Gelam kab OKI	-Kec Teluk Gelam kab OKI	-	0 -	1,500,000,000
1.3.33	Normalisasi sungai di Desa Suka Pulih Kec. Pedamaran OKI	-Kec. Pedamaran, OKI	-	0 -	1,500,000,000
1.3.33	Normalisasi sungai di Desa Bumi Agung Kec. Lempuing.OKI	Kec. Lempuing, OKI	-	0 -	1,500,000,000
1.3.33	-Normalisasi sungai pasir kec Cengal kab OKI	-Kec Cengal kab OKI	-	0 -	1,000,000,000
2.26.206	Pembinaan dan Pengendalian Hama dan Penyakit Hutan Alam dan Hutan Tanaman	- Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Musi Banyuasin;	Jumlah orang yang dibina	3 lokasi	90,000,000
2.26.205	Pengembangan Kelembagaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	- Kabupaten Ogan Komering Ilir;	Jumlah penuruan laju deforestasi (ha/tahun)	30 Orang	60,000,000
2.26.201	Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)	- Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Lahat; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;	Jumlah fasilitasi pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi	4 Unit	130,000,000
1.2.14	Penyemprotan fogging sarang nyamuk	- Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Lahat; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Ogan Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Prabumulih;	-Jumlah fogging fokus pemberantasan penyakit DBD	135 Fokus	300,000,000
1.15.97	Dukungan Peralatan Olahraga untuk Masyarakat	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Pagar Alam; Kota Palembang; Kota Prabumulih;	Jumlah peralatan olahraga untuk masyarakat	40 Klub/Karang Taruna	190,000,000

1.15.97	Dukungan peralatan olahraga untuk pondok pesantren di Sumsel	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Pagar Alam; Kota Palembang;	Jumlah ponpes di Provinsi Sumatera Selatan yang mendapat bantuan peralatan olahraga	25 Pondok Pesantren	190,000,000
1.10.70	Fasilitasi Taruna Siaga Bencana (Tagana), Petugas Penata Usahaan Gudang Logistik, dan Petugas Posko	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Pagar Alam; Kota Palembang; Kota Prabumulih;	Terpenuhinya tali asih dan Uniform TAGANA, Petugas Penata Usahaan Gudang Logistik, dan Petugas POSKO Kesiap Siagaan Bencana Bidang Perlindungan Sosial	945 orang	1,412,800,000
1.10.69	Penyuluhan sosial terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Lahat; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Musi Rawas;	Terlaksananya penyuluhan sosial Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); mengikuti pameran Sriwijaya Ekspo dan KSN Ekspo	150 orang	175,000,000
1.10.69	Fasilitasi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)	- Kota Pagar Alam; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muratara; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kota Prabumulih; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kota Palembang; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu;	ersedianya tali asih bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	228 orang	730,000,000

1.10.68	Fasilitasi dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kabupaten Musi Banyuasin; Kota Lubuk Linggau; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Komering Ilir;	Terlayaninya penyandang cacat melalui unit pelayanan sosial keliling (UPSK) 200 Org dan Bantuan bagi penyandang disabilitas berupa: kursi roda, hearing aid, tangan/kaki palsu, kruk ketiak 175 Org	800 orang	500,000,000
1.7.55	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Lahat; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Muratara;	Jumlah Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang dikelola	5 UPPKB	1,000,000,000
1.5.43	Pembangunan Infrastruktur Kawasan agropolitan (Kerbau Rawa) Kec. Pampangan Kab. OKI	Kec. Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir;	-Jumlah Kawasan Agropolitan yang dibangun	1 -paket	250,000,000
1.4.37	OPTIMALISASI SPAM IKK PEDAMARAN	Kec. Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir;	Jumlah SPAM IKK yang terbangun	1 IKK	1,000,000,000
1.3.25	Pembangunan Jembatan Sukadana Kab. OKI	Kabupaten Ogan Komering Ilir;	Panjang Jembatan Yang Terbangun	180 M	39,750,000,000
2.25.198	Pendampingan Mitigasi Kebakaran Hutan	- Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Muara Enim;	-Jumlah penyuluh dan Masyarakat Hutan yang terlatih	100 Persen	125,000,000
2.25.197	Diseminasi Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan	- Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Banyuasin;	Jumlah Penyuluh, kelompok yang mendapat pelatihan budidaya perikanan	100 Persen	200,000,000
2.25.197	Diseminasi Pengolahan Hasil Perikanan	- Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;	Jumlah Penyuluh, kelompok yang mendapatkan pelatihan pengolahan hasil Perikanan	100 Persen	200,000,000
2.25.196	Penyuluhan dan Pendampingan dalam rangka Peningkatan Produktivitas Perikanan	- Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Banyuasin;	Jumlah Petani dan Penyuluh yang meningkat Pengetahuan	100 Persen	100,000,000
2.25.196	Pengembangan Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan	- Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Lahat;	Jumlah POKTU, Pelaku Usaha Perikanan yang ditingkatkan klasifikasinya	100 Persen	200,000,000

2.25.194	Peningkatan Kapasitas Gapoktan Pelaku Utama Berbasis Teknologi Karet (Bahan Olah Karet)	- Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Ogan Komering Ulu;	Jumlah Gapoktan/Pelaku Utama yang berusaha tani berbasis teknologi	100 Persen	300,000,000
2.25.194	Penerapan Teknologi Komoditas Kedelai	- Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Muara Enim;	Jumlah Gapoktan/Pelaku Utama yang dapat mengaplikasikan teknologi Kedelai	100 Persen	150,000,000
2.25.174	Pemasarakatan Benih Unggul Tanaman Hortikultura untuk Peningkatan Produksi dan Produktivitas	Kabupaten Lubuk Linggau, Ogan Komering Ilir dan Pagar Alam	Meningkatnya Kemampuan Petani dalam memanfaatkan Benih Unggul Tanaman Hortikultura	3 Kelompok	75,000,000
2.25.174	Penyediaan Sarana Produksi Pemasarakatan Benih Unggul Tanaman Hortikultura	Kabupaten Lubuk Linggau, Ogan Komering Ilir dan Pagar Alam	Jumlah sarana produksi Pemanfaatan Benih Unggul Tanaman Sayuran	3 Paket	150,000,000
2.25.174	Penyediaan Sarana Produksi Pengelolaan Tanaman Sayuran	Kab. Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, OKU Timur, Palembang dan Pagar Alam	Meningkatnya luas tanam sayuran	19 Ha	450,000,000
1.3.27	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kab. OKI	Ogan Komering Ilir	Panjang Jalan yang Terpelihara	223 Km	1,550,000,000
1.7.55	Rehabilitasi Sarana Prasarana Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	- Kabupaten Lahat; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;	Jumlah Unit Pelaksana Penimbangan Bermotor (UPPKB) yang dikelola target	5 UPPKB	500,000,000
1.7.55	Pemeliharaan Alat-alat ukur dan Penggantian Suku Cadang Timbangan	Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;	Jumlah Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang dikelola dengan baik	5 UPPKB	270,000,000
1.3.25	-Pembangunan jalan lingkungan kec SP Padang kab OKI	-Kab Ogan Komering Ilir	-	0 -	3,000,000,000
1.3.30	Pemeliharaan Sungai Simpang Tiga Beringin	Kabupaten Ogan Komering Ilir;	Panjang Sungai Yang Terpelihara	126.67 M'	190,000,000
1.3.33	Pemeliharaan sungai simpang Tiga Beringin	kabupaten organ komering ilir	panjang sungai yang terpelihara	127 m'	190,000,000
1.3.30	pemasangan ferosemenn di desa sukaraja kec pangkalan lampam	Kec. Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir;	panjang tebing sungai yang dilindungi	83 m'	500,000,000
					120,150,765,000

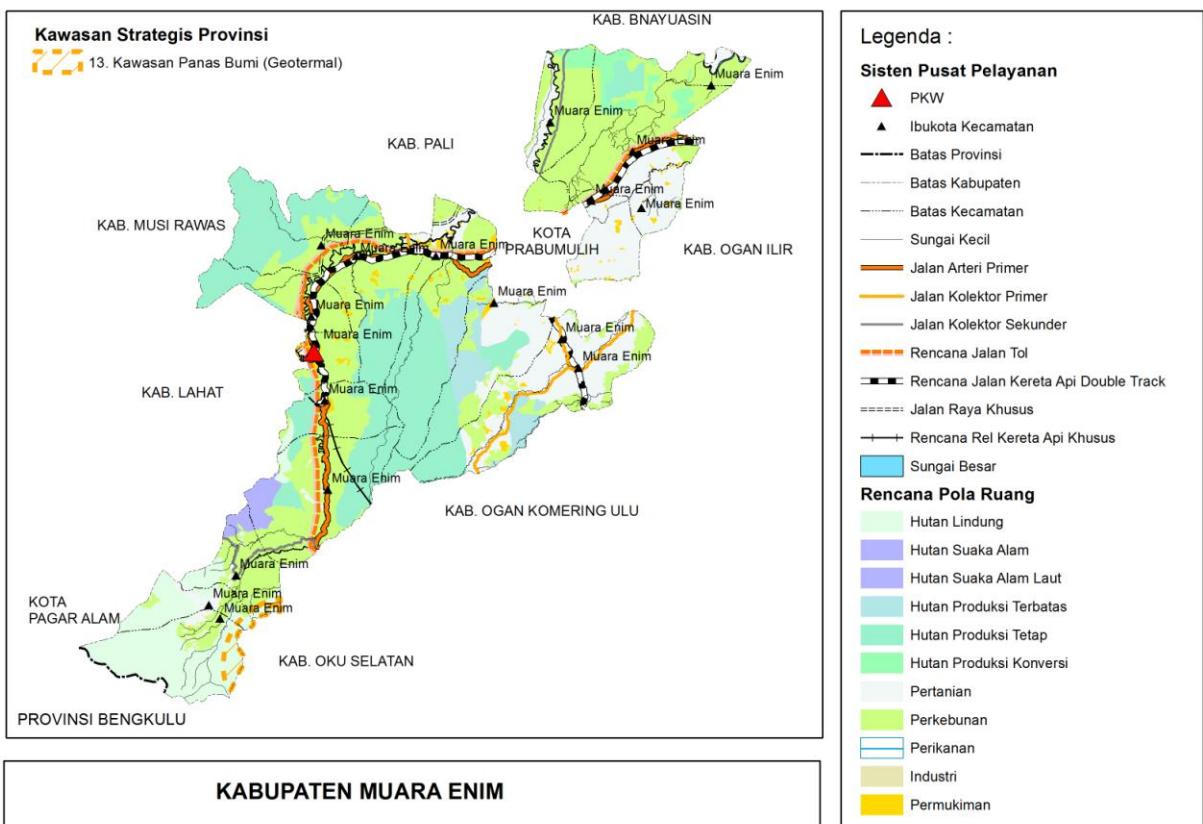
6.5.3 Kabupaten Muara Enim

Pengembangan Kabupaten Muara Enim yang memiliki 1 PKW (Muara Enim) diarahkan untuk memantapkan perannya sebagai salah satu sentra pertambangan. Namun demikian untuk perspektif jangka panjang, pengembangan daerah ini juga diarahkan pada sektor-sektor unggulan terbarukan dengan basis utama pertanian, khususnya komoditi sapi, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Sektor pertambangan dan pertanian merupakan sumber utama pertumbuhan daerah. Oleh karena itu, prioritas pembangunan diarahkan pada:

- Peningkatan peran Kota Muara Enim sebagai PKW.
- Pemantapan dan pemeliharaan infrastruktur jalan
- Peningkatan produktivitas pertanian dengan fokus: penyuluhan, pemanfaatan bibit unggul, jaminan distribusi pupuk dan pakan ternak
- Peningkatan dukungan akses permodalan bagi petani dan peternak
- Peningkatan dukungan pemberdayaan koperasi petani.
- Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses pendidikan menengah dan kesehatan.
- Pengendalian dan pemanfaatan tata ruang.

Gambar 6.22 :

Arah Pengembangan Kabupaten Muara Enim



Tabel 6.18 :
Alokasi Kegiatan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2016

Nomor	Kegiatan	Lokasi	Indikator	Volume	Anggaran
2.26.207	Fasilitasi Kegiatan REDD+ dan Pendampingan Bioclime	- Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Muratara; Kabupaten Muara Enim;	Jumlah fasilitasi kegiatan REDD+ dan pendampingan Bioclime	4 Kali	60,000,000
2.26.206	Pembinaan dan Pengendalian Hama dan Penyakit Hutan Alam dan Hutan Tanaman	- Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Musi Banyuasin;	Jumlah orang yang dibina	3 lokasi	90,000,000
2.26.205	Penyelidikan Kasus kasus Peredaran hasil Hutan	- Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Lahat; Kabupaten Ogan Komering Ulu;	Jumlah kasus peredaran hasil hutan	4 lokasi	60,000,000
1.8.60	pembinaan areal ijin pemanfaatan dan penggunaan hutan	KAB.Musi Banyuasin, Musi Rawas, Muara Enim, PALI, Lahat, Lubuk Linggau	pembinaan areal ijin pemanfaatan dan penggunaan hutan produksi	16 -ijin	36,870,000
1.17.109	Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah	Kab. OKI, Kab. Muara Enim dan Kab. Muba	Jumlah Daerah Pemekaran yang difasilitasi	9 kabupaten dan kecamatan	500,000,000
1.10.72	Pemadaman darat akibat kebakaran hutan dan lahan	Kab OKI, OI, Banyuasin, MUBA, Muara Enim dan Kota Palembang	Jumlah Pemadaman darat akibat kebakaran hutan dan lahan	30 titik api (hotspot)	1,200,000,000
1.20.159	Penguatan dan Perlombaan Kelembagaan Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS) Tk. Provinsi	Muba dan Muara Enim	-Jumlah Anggota BP-SPAMS yang dibina	200 -Orang	100,000,000
1.2.21	Pembinaan dan pengawasan produk pangan industri pabrikan	7 Kab/Kota (Palembang, Lubuk Linggau, 4 Lawang, Prabumulih, Muara Enim, Banyuasin, Lahat)	-Jumlah Industri Makanan Minuman yang dibina tentang kesehatan dan keamanan makanan	10 -Industri Makanan	350,000,000
1.2.14	Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	- Kota Lubuk Linggau; Kabupaten Muara Enim;	Jumlah masyarakat yang diskрining faktor risiko PTM	200 Orang	469,554,000
1.16.101	Pembinaan Tibum dan Tranmas kepada masyarakat di provinsi sumatera selatan	Kota Palembang; Kabupaten Muara Enim; Kota Prabumulih; Kota Pagar Alam;	terselenggarannya pembinaan tibum tranmas kepada masyarakat	4 kab/kota	120,000,000
1.15.97	Dukungan Peralatan Olahraga untuk Masyarakat	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering	Jumlah peralatan olahraga untuk masyarakat	40 Klub/Karang Taruna	190,000,000

		Ulu Timur; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Pagar Alam; Kota Palembang; Kota Prabumulih;			
1.15.97	Dukungan peralatan olahraga untuk pondok pesantren di Sumsel	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Pagar Alam; Kota Palembang;	Jumlah ponpes di Provinsi Sumatera Selatan yang mendapat bantuan peralatan olahraga	25 Pondok Pesantren	190,000,000
1.10.70	Fasilitasi Taruna Siaga Bencana (Tagana), Petugas Penata Usahaan Gudang Logistik, dan Petugas Posko	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Pagar Alam; Kota Palembang; Kota Prabumulih;	Terpenuhinya tali asih dan Uniform TAGANA, Petugas Penata Usahaan Gudang Logistik, dan Petugas POSKO Kesiap Siagaan Bencana Bidang Perlindungan Sosial	945 orang	1,412,800,000
1.7.53	Penertiban dan Pengawasan Tersus dan TUKS	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Musi Banyuasin;	Terlaksananya kegiatan penertiban dan pengawasan Tersus dan TUKS	3 Lokasi	150,000,000
1.5.43	Pembangunan Infrastruktur Kawasan Agropolitan Kec. Semende Darat Ulu Kab. Muara Enim	Kec. Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim;	-Jumlah Kawasan Agropolitan yang dibangun	1 -kawasan	750,000,000
1.4.40	-PEMBANGUNAN TPST/3R Kecamatan Muara Enim	Kabupaten Muara Enim;	-Tpa sampah yang ditangani	1 -paket	450,000,000
1.4.36	Pembangunan Saluran Drainase Kec. Tj. Enim Kab. Muara Enim	Kabupaten Muara Enim kecamatan TANJUNG ENIM	-Panjang Saluran Drainase yang dibangun	1 -paket	1,000,000,000
1.3.25	Pembangunan	Kabupaten Muara Enim;	Panjang Jembatan	31 M	7,000,000,000

	Jembatan Air Rambah		Yang Diganti		
2.29.220	Operasional Pengawasan Terpadu Sumber Daya Ikan di Perairan Umum dan Laut	MUBA, OKI, OI, Lahat, Muara Enim, Banyuasin	Jumlah operasional pengawasan terpadu yang telah dilaksanakan dengan pihak ALRI dan Polisi Perairan	6 Kab/Kota	84,515,000
2.27.215	Inventarisasi dan Evaluasi Perkembangan Kondisi PLTS dan PLTMH Terpasang	- Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Lahat; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;	Jumlah dokumen inventarisasi	1 dokumen	100,000,000
2.25.199	Diseminasi Teknologi Pengembangan Usaha Kehutanan	Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Lahat;	Jumlah yang mendapat teknologi pengembangan usaha kehutanan	100 Persen	150,000,000
2.25.198	Pendampingan Mitigasi Kebakaran Hutan	- Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Muara Enim;	-Jumlah penyuluh dan Masyarakat Hutan yang terlatih	100 Persen	125,000,000
2.25.198	Temu Teknis Petugas Penyuluh dan Kelompok Tani Hutan / Penghijauan	- Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Lahat;	Jumlah Petugas Penyuluh dan PKSM yang dibina	100 Persen	150,000,000
2.25.198	Penilaian Lomba PKA Wana Lestari	OKU, OKUT, Muba, Empat Lawang, Muara Enim, Lahat, Prabu, Pali, Mura, L. Linggau, Palembang	Jumlah Penyuluh Kehutanan, KMDM, PKSM, KTH dan Desa Peduli Hutan	100 Persen	175,000,000
2.25.197	Diseminasi Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan	- Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Banyuasin;	Jumlah Penyuluh, kelompok yang mendapat pelatihan budidaya perikanan	100 Persen	200,000,000
2.25.196	Penyuluhan dan Pendampingan dalam rangka Peningkatan Produktivitas Perikanan	- Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Banyuasin;	Jumlah Petani dan Penyuluh yang meningkat Pengetahuan	100 Persen	100,000,000
2.25.194	Peningkatan Kapasitas Gapoktan Pelaku Utama Berbasis Teknologi Karet (Bahan Olah Karet)	- Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Ogan Komering Ulu;	Jumlah Gapoktan/Pelaku Utama yang berusaha tani berbasis teknologi	100 Persen	300,000,000
2.25.194	Penerapan Teknologi Komoditas Kedelai	- Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Muara Enim;	Jumlah Gapoktan/Pelaku Utama yang dapat mengaplikasikan teknologi Kedelai	100 Persen	150,000,000
2.25.191	Pembinaan Kawasan Peternakan	Muba, Banyuasin, Mura, OKI, OKUT, Muara enim, Lahat	Jumlah Peserta mengikuti pembinaan kawasan peternakan	8 kab	100,000,000
2.25.191	Pembinaan Sekolah Peternakan Rakyat	Kab. Banyuasin, OKI, Muba, Muara Enim	Jumlah Kabupaten pada kelompok Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) yang dibina	4 kab	500,000,000

2.25.188	Pengembangan Ternak Sapi Integrasi sawit	OKI, Muba, Banyuasin, Lahat dan Muara Enim	Jumlah Kwitansi pembayaran jenis barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	7 kwitansi	300,000,000
2.25.185	Pembinaan Kemitraan Usaha Perkebunan	Kab. Muara Enim, Muba, Banyuasin, Mura,	- Terlaksananya pembinaan kemitraan usaha perkebunan	100 - Orang	100,000,000
2.25.185	Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Besar (PBS/N)	Kab. Muara Enim, Banyuasin, Muba, OKU, OKUT, OKUS, OI, OKI, Lahat, PaGAR ALAM, MURA, EMPAT Lawang	- Jumlah kebun yang terawasi dan terbina	17 - Kebun PBS/N	100,000,000
2.25.184	Pasar Lelang Terpadu Perkebunan	Kab. Banyuasin, Muara Enim, Lahat, Muba	- Terlaksananya bantuan perleengkapan pasar lelang karet	4 -Paket	150,000,000
2.25.184	Pembinaan Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Kab. Muara Enim, Muratara, OKI, Lahat, PALI, dan Musi Rawas	- Terlaksananya bantuan unit pengolahan dan pemasaran bokar	5 - kelompok tani	100,000,000
2.25.184	Bantuan Alat Pengolahan Kopi Rakyat	Kab. Lahat, Muara Enim, Empat Lawang, dan kota Pagaralam	- Terlaksananya bantuan alat pengolahan kopi rakyat	4 - Paket	300,000,000
2.25.180	Peremajaan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat	MUBA, PALI, Prabumulih, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Muratara	- Terlaksananya peremajaan dan pengembangan tanaman karet rakyat	700 - Ha	4,050,000,000
2.25.178	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	16 Kab./Kota (Banyuasin, OKU Timur, OKI, OKU, OKU Selatan, Ogan Ilir, Prabumulih, Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, Musi Rawas, Muratara, PALI, Empat Lawang, Musi Banyuasin dan Palembang)	Meningkatnya pemanfaatan pembiayaan program dan kredit komersial mendukung peningkatan produksi dan mutu produk	100 Kelompok	150,000,000
2.25.178	Peningkatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan	14 Kab./Kota (OKU Timur, Musi Rawas, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Muratara, PALI, OKU Selatan, Muara Enim dan OKU)	Jumlah Kelompoktan yang dibina untuk melaksanakan penanganan pasca panen tanaman pangan	28 Kelompok	200,000,000
2.25.178	Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan	14 Kab./Kota (OKU Timur, Musi Rawas, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Muratara, PALI, OKU Selatan, Muara Enim dan OKU)	Jumlah Peralatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan : - Power Tresher (17 Unit) - Combine Harvester (2 Unit) - Terpal Jemur (225 Lembar)	244 Unit/Lembar	392,700,000
2.25.177	Pengelolaan Infrastruktur Pertanian	Kabupaten OKI, Muara Enim, Lahat, OKU Selatan, OKU Timur dan Musi Rawas	Jumlah Kelompok P3A	132 Kelompok	200,000,000
2.25.175	Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	11 Kab./Kota (Ogan Ilir, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, OKU Timur, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Lubuk Linggau dan OKU)	Luas Penangkaran Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang disertifikasi : - Padi (400 Ha) - Buah-buahan (30.000 Btg)	400 Ha	640,000,000

			- Sayuran (15 Ton)		
2.25.175	Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	13 Kab./Kota (Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, OKI, OKU, OKU Timur, Lahat, Muara Enim, Empat Lawang, Musi Rawas, Pagar Alam Lubuk Linggau dan PALI)	Jumlah Produsen/Penyalur Pedagang Benih yang diawasi	1 Unit	100,000,000
2.25.175	Pengelolaan Penangkaran Perbenihan Tanaman Buah-buahan dan Sayuran	Kabupaten Muara Enim, Banyuasin dan Muratara	Jumlah kelompok Penangkar Hortikultura yang dibina	12 Kelompok	150,000,000
2.25.175	Penyediaan Sarana Penangkaran Perbenihan Tanaman Buah-buahan dan Sayuran	Kabupaten Muara Enim, Banyuasin dan Muratara	Jumlah Sarana Produksi Hortikultura : - Buah-buahan (7.500 Btg) - Sayuran (12.500,3 Kg)	20000.3 Btg/Kg/Gr	800,000,000
2.25.175	Pengelolaan Penangkaran Benih Tanaman Pangan	11 Kab./Kota (Ogan Ilir, OKI, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Musi Rawas, Banyuasin, OKU Timur dan Musi Banyuasin)	Pengelolaan ketersediaan benih di produsen, penangkar dan pengecer	400 Ton	209,800,000
2.25.175	Penyediaan Sarana Pengelolaan Penangkaran Benih Tanaman Pangan	11 Kab./Kota (Ogan Ilir, OKI, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Musi Rawas, Banyuasin, OKU Timur dan Musi Banyuasin)	Ketersediaan Benih Tanaman Pangan yang unggul dan bersertifikat	5000 Kg	1,176,225,000
2.25.174	Pengelolaan Produksi Tanaman Sayuran	Kabupaten Banyuasin, Muara Enim, Musi rawas, Ogan ilir, OKI,	Meningkatnya Pengelolaan Produksi Tanaman Sayuran	19 Ha	432,525,000
2.25.174	Pengelolaan Produksi Tanaman Buah	Kabupaten OKI, Muara Enim, Lahat, OKU, Banyuasin, Muaratara dan Kota Pagar Alam	Meningkatnya Pengelolaan Produksi Tanaman Buah	8 Kelompok	200,050,000
2.25.174	Penyediaan Sarana Produksi Pengelolaan Tanaman Buah	Kabupaten OKI, Muara Enim, Lahat, Muaratara, OKU, OKI, Banyuasin dan Kota Pagar Alam	Meningkatnya Luas Tanam Tanaman Buah	85 Ha	410,825,000
2.25.173	Pemasyarakatan Benih Unggul Tanaman Pangan untuk Peningkatan Produksi dan Produktivitas	Kabupaten OKU Timur, Muara Enim, PALI, Lahat,	Jumlah Unit Percontohan	4 Demplot	150,000,000
2.25.173	Penyediaan Sarana Produksi Pemasyarakatan Benih Unggul Tanaman Pangan	Kabupaten OKU Timur, Muara Enim, PALI, Lahat,	Jumlah Sarana Produksi yang diserahkan kepada masyarakat	1700 Kg	200,000,000
2.25.173	Pengelolaan Tanaman Serealia	Kabupaten PALI, MURATARA, Muara Enim, Musi Banyuasin	Jumlah Kelompok Tani yang menerapkan teknologi yang tepat	8 Kelompok	214,300,000
1.12.82	Optimalisasi Pemanfaatan Modal Bagi UMKMK	Palembang, OI, Muara Enim, OKUT, Pali	Jumlah Temu Mitra yang dilaksanakan	5 Kegiatan	200,000,000

1.3.27	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kab. Muara Enim	Muara Enim	Panjang Jalan Yang Terpelihara	215 Km	1,550,000,000
1.3.27	Pengendalian rutin dan penanggulangan jalan dan jembatan wilayah I	Kab. Muara Enim, Kab. Musi Rawas, Kab. Lahat, Kab. Muratara	Jumlah titik rawan bencana	52 Paket	10,500,000,000
2.27.212	Studi Perencanaan Reklamasi Kawasan Pertambangan	Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim;	-jumlah dokumen perencanaan reklamasi tambang	1 dokumen	50,000,000
2.25.180	Diversifikasi tanaman kopi, kakao/Lada	OKUS, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Pagar Alam	-Jumlah lahan kopi yang terdiversifikasi dengan lada	150 Ha	350,000,000
1.3.25	-Jalan lingkungan desa	-Kec Tanjung Agung kab Muara Enim	-	0 -	500,000,000
1.3.25	Jalan lingkungan desa	-Kec Lawang Kidul kab Muara Enim	-	0 -	500,000,000
1.3.25	-Jalan lingkungan desa	-Kec Gunung Megang kab Muara Enim	-	0 -	500,000,000
1.3.25	-Jalan lingkungan desa	-Kec Banakat kab Muara Enim	-	0 -	500,000,000
1.3.25	Pembangunan jalan setapak (trotoar)	Desa Penyandingan, Desa Muara Danu kec Semendo Darat Laut kab Muara Enim	-	0 -	400,000,000
1.3.31	-Pembangunan siring/drainase	Desa Suban Jeriji, desa Tanjung Menang, desa Gemawang dan desa Air Enau kec Rambang Dangku kab Muara Enim	-	0 -	1,000,000,000
1.3.25	Pembangunan jalan lingkungan	Dusun I desa Kencana Mulya dan dusun II desa Kencana Mulya kec Rambang kab Muara Enim	-	0 -	1,000,000,000
1.3.31	Pembangunan siring/drainase	Desa Tanjung Raya kec Rambang, desa Lecah kec Lubay Ulu dan desa Bitis kec Gelumbang kab Muara Enim	-	0 -	400,000,000
1.3.25	Pembangunan jalan lingkungan/setapak	Desa Kepur, desa Tungkal, desa Tanjung Jati kec Muara Enim kab Muara Enim	-	0 -	500,000,000
1.3.25	-Jalan lingkungan desa	-Kec Muara Belida kab Muara Enim	-	0 -	500,000,000
1.3.25	-Jalan lingkungan desa	-Kec Muara Enim kab Muara Enim	-	0 -	500,000,000
1.3.25	Pembangunan cor beton dan pengerasan kec Gelumbang kab Muara Enim	Kec Gelumbang kab Muara Enim	-	0 -	500,000,000
1.3.25	-Jalan lingkungan desa	-Kec Belimbing kab Muara Enim	-	0 -	500,000,000
1.3.25	-Jalan lingkungan desa	-Kec Rambang Dangku kab Muara Enim	-	0 -	500,000,000
1.3.25	-Jalan lingkungan desa	-Kec Lubay Ulu kab Muara Enim	-	0 -	500,000,000
1.3.25	-Jalan lingkungan desa	-Kec Sungai Rotan kab Muara Enim	-	0 -	500,000,000
1.3.27	-Perbaikan jalan desa	-Kec Lubai Ulu kab Muara Enim	-	0 -	1,000,000,000
1.3.26	-Pengecoran jalan	-Desa Lembak kab Muara Enim	-	0 -	200,000,000
1.3.26	-Pengecoran jalan	-Desa Modong kab Muara Enim	-	0 -	250,000,000

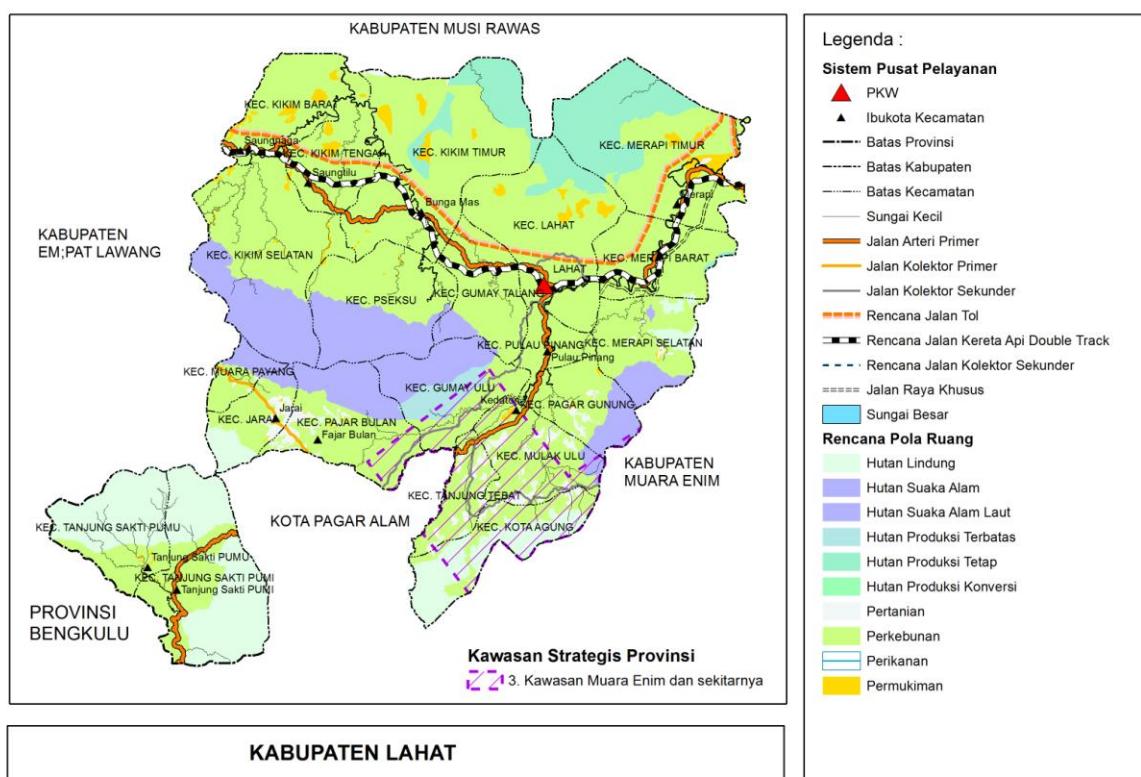
1.3.26	-Pengecoran jalan talang air guci Desa Sugihan Kec. Rambang, Kabupaten Muara Enim	-Desa Sugihan Kec. Rambang, Kabupaten Muara Enim	-	0 -	1,500,000,000
1.4.39	Perencanaan dan pengawasan PSDU pemukiman kab Muara Enim	Kabupaten Muara Enim	-	0 -	300,000,000
1.4.40	Pembangunan TPA Terlangu kabupaten Banyuasin	Kec. Talang Bulu Kabupaten Muara Enim	-TPA sampah di bangun	1 -kab/kota	1,000,000,000
1.3.34	Normalisasi Sungai Tapus	Kab Muara Enim	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	6000 m'	4,000,000,000
1.3.34	Normalisasi Sungai Arisan Belido	Kabupaten Muara Enim	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	4000 M'	1,500,000,000
1.3.34	Normalisasi Sungai di Ds. Jambu, Kec. Gelumbang	Kabupaten Muara Enim	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	333.33 M'	2,000,000,000
1.3.34	Normalisasi Sungai di Ds. Melilian, Kec. Gelumbang	Kabupaten Muara Enim	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	666.67 M'	4,000,000,000
1.3.34	Normalisasi Sungai Buluh Ds. Lubuk Raman, Kec Rambang Dangku	Kabupaten Muara Enim	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	166.67 M'	1,000,000,000
1.3.34	Normalisasi Sungai Belida Ds. Kartamulia, Kec Gelumbang	Kabupaten Muara Enim	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	333.33 M'	2,000,000,000
1.3.33	Normalisasi Aliran Sungai Belida	Ds. Kartamulia, Kec. Gelumbang, Kab. Muara Enim	-	0 -	1,000,000,000
1.3.31	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Endikat Bengkok	-KAB MUARA ENIM	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	666 m'	1,000,000,000
1.3.31	Review Desain D.I.Danau Tampang	-kab muara enim	bertambahnya dokumen perencanaan	1 dokumen	891,500,000
1.3.31	-Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Endikat Bengkok	Kab Muara Enim	-	0 -	4,000,000,000
1.3.31	Review Desain D.I.Danau Tampang	-Kab Muara Enim	-	0 -	941,500,000
1.3.31	-Review Desain D.I.Ataran Sungai Air Deras (Cahaya Alam)	-Kab Muara Enim	-	0 -	350,000,000
1.3.31	- Normalisasi Aliran Sungai Belida	-Ds. Kartamulia, Kec. Gelumbang, Kab. Muara Enim	-	0 -	1,000,000,000
1.3.33	Normalisasi Aliran sungai Belida	Ds. Kartamulia, Kec. Gelumbang, Kab. Muara Enim	-	0 -	1,000,000,000
1.3.33	Normalisasi sungai Buluh	Desa Lubuk Raman kec Rambang Dangku kab Muara Enim	-	0 -	1,000,000,000
1.3.31	- Normalisasi/pengerukan sungai Lingkis kec Sungai Rotan kab Muara Enim	-Kec Sungai Rotan kab Muara Enim	-	0 -	4,000,000,000
1.3.33	- Normalisasi/pengerukan sungai Lingkis	-Kec Sungai Rotan kab Muara Enim	-	0 -	5,000,000,000
					87,373,164,000

6.5.4 Kabupaten Lahat

Pengembangan Kabupaten Lahat yang memiliki 1 PKW (Lahat) diarahkan sebagai sentra produksi hortikultura khususnya sayur-sayuran dan peternakan khususnya sapi. Sektor pertanian dan pertambangan berperan penting bagi perekonomian daerah dan merupakan sumber utama pertumbuhan. Oleh karena itu prioritas pembangunan diarahkan pada:

- Pembangunan Kota Lahat sebagai PKW.
- Peningkatan produktivitas pertanian dan peternakan melalui penyuluhan, pemanfaatan bibit/benih unggul, serta didukung jaminan kelancaran distribusi pupuk, pakan ternak dan alsintan.
- Peningkatan dukungan akses kredit modal
- Peningkatan infrastruktur jalan
- Dukungan pemberdayaan koperasi petani
- Pengembangan agrowisata.
- Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses kesehatan.
- Peningkatan daya dukung lingkungan.

Gambar 6.23 :
Arah Pengembangan Kabupaten Lahat



Tabel 6.19 :
Alokasi Kegiatan Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2016

No	Kegiatan	Lokasi	Indikator	Volume	Anggaran
1	Pemantauan dan Evaluasi Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Provinsi Sumatera Selatan.	Ogan Ilir, Banyuasin, Lahat, Musi Rawas, dan Ogan Komering Ulu	Jumlah KTM yang terevaluasi	5 Kabupaten	30,000,000
2	Penyelidikan Kasus kasus Peredaran hasil Hutan	- Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Lahat; Kabupaten Ogan Komering Ulu;	Jumlah kasus peredaran hasil hutan	4 lokasi	60,000,000
3	Tanaman Hutan Rakyat Sebagai Tabungan Pendidikan	Lahat	Jumlah luas tanaman HR	25 Ha	130,000,000
4	Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)	- Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Lahat; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;	Jumlah fasilitasi pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi	4 Unit	130,000,000
5	pembinaan areal ijin pemanfaatan dan penggunaan hutan	KAB.Musi Banyuasin, Musi Rawas, Muara Enim, PALI, Lahat, Lubuk Linggau	pembinaan areal ijin pemanfaatan dan penggunaan hutan produksi	16 -ijin	36,870,000
6	Peningkatatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana	Pagar Alam ; PALI ; Muratara ; Empat Lawang ; Lahat ; OKU ; OKUT ; OKUS	-Jumlah pelayanan Kesehatan bagi pengungsi dan korban bencana di provinsi Sumsel	8 -Kejadian Bencana	250,000,000
7	Pembinaan dan pengawasan produk pangan industri pabrikian	7 Kab/Kota (Palembang, Lubuk Linggau, 4 Lawang, Prabumulih, Muara Enim, Banyuasin, Lahat)	-Jumlah Industri Makanan Minuman yang dibina tentang kesehatan dan keamanan makanan	10 -Industri Makanan	350,000,000
8	Penyemprotan fogging sarang nyamuk	- Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Lahat; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Ogan Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Prabumulih;	-Jumlah fogging fokus pemberantasan penyakit DBD	135 Fokus	300,000,000
9	Rakor Kepegawaian	Kab. Lahat	Terlaksananya Rakor Kepegawaian	17 Kabupaten/Kota	142,490,000

10	Dukungan Peralatan Olahraga untuk Masyarakat	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Pagar Alam; Kota Palembang; Kota Prabumulih;	Jumlah peralatan olahraga untuk masyarakat	40 Klub/Karang Taruna	190,000,000
11	Dukungan peralatan olahraga untuk pondok pesantren di Sumsel	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Pagar Alam; Kota Palembang;	Jumlah ponpes di Provinsi Sumatera Selatan yang mendapat bantuan peralatan olahraga	25 Pondok Pesantren	190,000,000
12	Fasilitasi Taruna Siaga Bencana (Tagana), Petugas Penata Usahaan Gudang Logistik, dan Petugas Posko	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Penukal	Terpenuhinya tali asih dan Uniform TAGANA, Petugas Penata Usahaan Gudang Logistik, dan Petugas POSKO Kesiap Siagaan Bencana Bidang Perlindungan Sosial	945 orang	1,412,800,000

		Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Pagar Alam; Kota Palembang; Kota Prabumulih;			
13	Penyuluhan sosial terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Lahat; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Musi Rawas;	Terlaksananya penyuluhan sosial Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); mengikuti pameran Sriwijaya Ekspo dan KSN Ekspo	150 orang	175,000,000
14	Fasilitasi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)	- Kota Pagar Alam; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muratara; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kota Prabumulih; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kota Palembang; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu;	ersedianya tali asih bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	228 orang	730,000,000
15	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Lahat; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Muratara;	Jumlah Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang dikelola	5 UPPKB	1,000,000,000
16	OPTIMALISASI SPAM IKK Batu Niding Kab. Lahat	KAB. Lahat	Jumlah SPAM IKK yang terbangun	1 IKK	1,000,000,000
17	-PEMBANGUNAN DRAINASE KEC. JARAI	Kec. Jarai Kabupaten Lahat;	-Panjang Saluran Drainase yang dibangun	1 -paket	500,000,000
18	Operasional Pengawasan Terpadu Sumber Daya Ikan di Perairan Umum dan Laut	MUBA, OKI, OI, Lahat, Muara Enim, Banyuasin	Jumlah operasional pengawasan terpadu yang telah dilaksanakan dengan pihak ALRI dan Polisi Perairan	6 Kab/Kota	84,515,000

19	Inventarisasi dan Evaluasi Perkembangan Kondisi PLTS dan PLTMH Terpasang	- Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Lahat; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;	Jumlah dokumen inventarisasi	1 dokumen	100,000,000
20	Diseminasi Teknologi Pengembangan Usaha Kehutanan	Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Lahat;	Jumlah yang mendapat teknologi pengembangan usaha kehutanan	100 Persen	150,000,000
21	Temu Teknis Petugas Penyuluhan dan Kelompok Tani Hutan / Penghijauan	- Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Lahat;	Jumlah Petugas Penyuluhan dan PKSM yang dibina	100 Persen	150,000,000
22	Penilaian Lomba PKA Wana Lestari	OKU, OKUT, Muba, Empat Lawang, Muara Enim, Lahat, Prabu, Pali, Mura, L. Linggau, Palembang	Jumlah Penyuluhan Kehutanan, KMDM, PKSM, KTH dan Desa Peduli Hutan	100 Persen	175,000,000
23	Pengembangan Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan	- Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Lahat;	Jumlah POKTU, Pelaku Usaha Perikanan yang ditingkatkan klasifikasinya	100 Persen	200,000,000
24	Pembinaan Kawasan Peternakan	Muba, Banyuasin, Mura, OKI, OKU, Muara enim, Lahat	Jumlah Peserta mengikuti pembinaan kawasan peternakan	8 kab	100,000,000
25	Pengembangan Ternak Sapi Integrasi sawit	OKI, Muba, Banyuasin, Lahat dan Muara Enim	Jumlah Kwitansi pembayaran jenis barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	7 kwitansi	300,000,000
26	Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Besar (PBS/N)	Kab. Muara Enim, Banyuasin, Muba, OKU, OKUT, OKUS, OI, OKI, Lahat, PaGAR ALAM, MURA, EMPAT Lawang	- Jumlah kebun yang terawasi dan terbina	17 - Kebun PBS/N	100,000,000
27	Pasar Lelang Terpadu Perkebunan	Kab. Banyuasin, Muara Enim, Lahat, Muba	- Terlaksananya bantuan perleengkapan pasar lelang karet	4 - Paket	150,000,000
28	Pembinaan Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Kab. Muara Enim, Muratara, OKI, Lahat, PALI, dan Musi Rawas	- Terlaksananya bantuan unit pengolahan dan pemasaran bokar	5 - kelompok tani	100,000,000
29	Bantuan Alat Pengolahan Kopi Rakyat	Kab. Lahat, Muara Enim, Empat Lawang, dan kota Pagaralam	- Terlaksananya bantuan alat pengolahan kopi rakyat	4 - Paket	300,000,000
30	Pengujian Teknologi Proteksi dan Operasional Laboratorium Proteksi	Kab.Lahat, MURATARA	- Terlaksananya uji lapang pengendalian penggunaan agen hayati	30 - Ha	150,000,000

31	Sekolah lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)	MUBA, OKUS, OI, OKUT, LAHAT	- Terlaksananya Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu	125 - orang	250,000,000
32	Pengembangan Pupuk Organik	Kabupaten Lahat; OKU Selatan	- Terlaksananya pelatihan pembuatan pupuk organik	50 -orang	100,000,000
33	Peremajaan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat	MUBA, PALI, Prabumulih, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Muratara	- Terlaksananya peremajaan dan pengembangan tanaman karet rakyat	700 - Ha	4,050,000,000
34	Penanganan Daerah Rawan Pangan	3 Kab/Kota (OKU, Lahat, BA)	jumlh KK yang diberi bantuan bahan pangan	1500 KK Miskin	400,000,000
35	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	3 Kab/Kota (Prabu, PA, lahat)	Jumlah bantuan dan pelatihan di desa mandiri pangan	7 paket (bantuan dan pelatihan)	425,000,000
36	Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat	Kab. Lahat, Kab. MURA	Jumlh lbg pgn masyarkt. Jumlah RMU. Jumlah anggota/klp Lmbg pgn yg dilatih.	2 Paket lumbung pgn, RMU, Timbangan	700,000,000
37	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	16 Kab./Kota (Banyuasin, OKU Timur, OKI, OKU, OKU Selatan, Ogan Ilir, Prabumulih, Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, Musi Rawas, Muratara, PALI, Empat Lawang, Musi Banyuasin dan Palembang)	Meningkatnya pemanfaatan pembiayaan program dan kredit komersial mendukung peningkatan produksi dan mutu produk	100 Kelompok	150,000,000
38	Peningkatan Penanganan Pasca Panen Hortikultura	3 Kab./Kota (Pagar Alam, OKU Timur dan Lahat)	Jumlah kelompok tani yang dibina untuk melaksanakan penanganan pascapanen hortikultura berbasis GHP	3 Kelompok	65,000,000
39	Peningkatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan	14 Kab./Kota (OKU Timur, Musi Rawas, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Muratara, PALI, OKU Selatan, Muara Enim dan OKU)	Jumlah Kelompoktani yang dibina untuk melaksanakan penanganan pasca panen tanaman pangan	28 Kelompok	200,000,000
40	Pengadaan Alat Pasca Panen Hortikultura	3 Kab./Kota (Pagar Alam, OKU Timur dan Lahat)	Jumlah peralatan penanganan pascapanen hortikultura : - Keranjang (111 Unit) - Roda 3 (1 Unit)	112 Unit	135,000,000
41	Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan	14 Kab./Kota (OKU Timur, Musi Rawas, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Muratara, PALI, OKU	Jumlah Peralatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan : - Power Tresher (17 Unit) - Combine Harvester	244 Unit/Lembar	392,700,000

		Selatan, Muara Enim dan OKU)	(2 Unit) - Terpal Jemur (225 Lembar)		
42	Pembinaan Pengembangan Pupuk Organik	5 Kab./Kota (Lahat, Pagar Alam, PALI, OKU Timur dan OKU Selatan)	Jumlah kelompok tani yang membuat pupuk organik	5 Kelompok	75,000,000
43	Penyediaan Sarana Pengembangan Pupuk Organik	5 Kab./Kota (Lahat, Pagar Alam, PALI, OKU Timur dan OKU Selatan)	Jumlah Alat Pembuat Pupuk Organik	5 Unit	180,000,000
44	Pengelolaan Infrastruktur Pertanian	Kabupaten OKI, Muara Enim, Lahat, OKU Selatan, OKU Timur dan Musi Rawas	Jumlah Kelompok P3A	132 Kelompok	200,000,000
45	Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	11 Kab./Kota (Ogan Ilir, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, OKU Timur, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Lubuk Linggau dan OKU)	Luas Penangkaran Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang disertifikasi : - Padi (400 Ha) - Buah-buahan (30.000 Btg) - Sayuran (15 Ton)	400 Ha	640,000,000
46	Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	13 Kab./Kota (Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, OKI, OKU, OKU Timur, Lahat, Muara Enim, Empat Lawang, Musi Rawas, Pagar Alam, Lubuk Linggau dan PALI)	Jumlah Produsen/Penyalur Pedagang Benih yang diawasi	1 Unit	100,000,000
47	Pengelolaan Penangkaran Benih Tanaman Pangan	11 Kab./Kota (Ogan Ilir, OKI, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Musi Rawas, Banyuasin, OKU Timur dan Musi Banyuasin)	Pengelolaan ketersediaan benih di produsen, penangkar dan pengecer	400 Ton	209,800,000
48	Penyediaan Sarana Pengelolaan Penangkaran Benih Tanaman Pangan	11 Kab./Kota (Ogan Ilir, OKI, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Musi Rawas, Banyuasin, OKU Timur dan Musi Banyuasin)	Ketersediaan Benih Tanaman Pangan yang unggul dan bersertifikat	5000 Kg	1,176,225,000
49	Pengelolaan Produksi Tanaman Buah	Kabupaten OKI, Muara Enim, Lahat, OKU, Banyuasin, Muaratara dan Kota Pagar Alam	Meningkatnya Pengelolaan Produksi Tanaman Buah	8 Kelompok	200,050,000
50	Penyediaan Sarana Produksi Pengelolaan Tanaman Buah	Kabupaten OKI, Muara Enim, Lahat, Muratara, OKU, OKI, Banyuasin dan Kota Pagar Alam	Meningkatnya Luas Tanam Tanaman Buah	85 Ha	410,825,000
51	Pemasarkan Benih Unggul Tanaman Pangan untuk Peningkatan Produksi dan Produktivitas	Kabupaten OKU Timur, Muara Enim, PALI, Lahat,	Jumlah Unit Percontohan	4 Demplot	150,000,000

52	Penyediaan Sarana Produksi Pemasyarakatan Benih Unggul Tanaman Pangan	Kabupaten OKU Timur, Muara Enim, PALI, Lahat,	Jumlah Sarana Produksi yang diserahkan kepada masyarakat	1700 Kg	200,000,000
53	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Kota Palembang, Kabupaten OKU Timur, Lahat dan Banyuasin	Tersedianya jasa tenaga kerja jaga malam kantor dinas dan UPTD	28 Orang	718,900,000
54	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Koperasi	Pali, Banyuasin, Empat Lawang, OI, Lahat	Jumlah Peserta Temu Usaha	200 Orang	200,000,000
55	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kab. Lahat	Lahat	Panjang Jalan Yang Terpelihara	231.42 Km	1,550,000,000
56	Pengendalian rutin dan penanggulangan jalan dan jembatan wilayah I	Kab. Muara Enim, Kab. Musi Rawas, Kab. Lahat, Kab. Muratara	Jumlah titik rawan bencana	52 Paket	10,500,000,000
57	Studi Perencanaan Reklamasi Kawasan Pertambangan	Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim;	-jumlah dokumen perencanaan reklamasi tambang	1 dokumen	50,000,000
58	Diversifikasi tanaman kopi, kakao/Lada	OKUS, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Pagar Alam	-Jumlah lahan kopi yang terdiversifikasi dengan lada	150 Ha	350,000,000
59	Pengawasan dan Pengembangan Kebun Benih Tanaman Perkebunan	-Pagar Alam, Lahat	-Terlaksananya pembangunan kebun induk kopi	4 Ha	150,000,000
60	Dukungan Partisipasi Pemprov. Sumsel Terhadap Proyek Pembangunan/Rehabilitasi Sarana/Prasarana SDA Wilayah Irrigasi (WISMP)	Musi Rawas, OKU selatan dan Lahat	Meningkatnya kemandirian perkumpulan petani pemakai air	15 Kelompok	80,000,000
61	Rehabilitasi Sarana Prasarana Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	- Kabupaten Lahat; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;	Jumlah Unit Pelaksana Penimbangan Bermotor (UPPKB) yang dikelola target	5 UPPKB	500,000,000
62	Pengembangan jaringan pipa distribusi kota Lahat	Lahat	-	0 -	900,000,000
63	Pengembangan jaringan pipa distribusi kota Lahat	Kota Lahat	-	0 -	500,000,000
64	Pembangunan jalan setapak kec Lahat	Kab Lahat	-	0 -	1,000,000,000
65	Pembangunan jalan setapak kec Tanjung Tebat kota Agung dan kec Mulaku	Kab Lahat	-	0 -	500,000,000
66	Pembangunan siring di kec Lahat	Kab Lahat	-	0 -	500,000,000
67	-Pengerasan serta jalan pertanian dan saluran air desa Tanjung Alam kec Tanjung Sakti kab Lahat	-Desa Tanjung Alam kec Tanjung Sakti kab Lahat	-	0 -	1,000,000,000
68	-Peningkatan Jalan menuju perkebunan desa kembang Ayun kec Tanjung sakti Kab Lahat	kecamatan Tanjung sakti Kab Lahat	-	0 -	220,000,000

69	-Pengerasan Jalan Usaha tani Area Persawahan Tebat Empai Desa Tanjung Bulan Kec. Tj Sakti PUMI Kab. Lahat	-Desa Tanjung Bulan Kec. Tj Sakti PUMI Kab. Lahat	-	0 -	220,000,000
70	-Pengerasan Jalan Usaha Tani Desa Gedung Agung Kec. Kota Agung Kab. Lahat	Kec. Kota Agung Kab. Lahat	-	0 -	200,000,000
71	-Pembangunan Jalan Setapak Lingkar Desa Tertap Kec. Jarai Kab. Lahat	-Kec. Jarai Kab. Lahat	-	0 -	200,000,000
72	-Pembangunan Jalan Setapak Lingkar Desa Nanti Giri Kec. Jarai Kab. Lahat	-Kec. Jarai Kab. Lahat	-	0 -	200,000,000
73	-Pembangunan SPAL Desa Tanjung Tebat Kec. Lahat Kab. Lahat	Kec.Lahat Kab. Lahat	-	0 -	218,000,000
74	-Pengerasan Jalan Ke Perkebunan Rakyat Desa Ulak Lebar Kec. Lahat Kab. Lahat	Kec. Lahat Kab. Lahat	-	0 -	200,000,000
75	-Pembangunan Jalan usaha tani Desa Sumur Kec. Pajar Bulan Kab. Lahat	Kec. Pajar Bulan Kab. Lahat	-	0 -	200,000,000
76	- Pembangunan drainase dusun II (desa Selawi) kec Lahat kab Lahat	-Lahat	-	0 -	600,000,000
77	- Pembangunan drainase desa Muara Siban (dusun 3) kec Pl. Pinang kab Lahat	-Lahat	-	0 -	400,000,000
78	Pembangunan jalan cor beton	-Desa Talang Banyu RT 01 RW 08 kel Tanjung Kepung kec Tebing Tinggi kab Lahat	-	0 -	200,000,000
79	Pembuatan tembok penahan pemukiman	Desa Pulau Beringin kec Kikim Selatan kab Lahat	-	0 -	1,000,000,000
80	Pemeliharaan Saluran Irigasi Ds. Pandan Arang Kec Kikim Selatan	kab Lahat	Panjang saluran irigasi yang dipelihara	333 m'	500,000,000
81	Normalisasi Danau di Ds. Muara Danau, Kec Tanjung Tebat	Kabupaten Lahat	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	466.67 M'	2,800,000,000
82	Perkuatan Tebing Sungai Pulau Timun	kec tanjung sakti pumi kab Lahat	panjang tebing sungai yang dilindungi akibat gerusan	500 m	7,500,000,000
83	Perkuatan Tebing Sungai Ulak Lebar	Kab Lahat	bertambahnya panjang tebing sungai yang dilindungi	300 m	3,500,000,000
84	Pemeliharaan saluran Irigasi Ds. Pandan Arang Kec Kikim Selatan	kab lahat	bertambahnya panjang jaringan irigasi yang berfungsi dengan baik	333 m'	500,000,000
85	Rehabilitasi Irigasi D.I.Siring Agung Ds.Muara Pinang	-kab lahat	bertambahnya panjang jaringan irigasi yang berfungsi dengan baik	971 m'	1,456,350,000

86	-Rehabilitasi Irigasi D.I.Siring Agung Ds.Muara Pinang	KAB LAHAT	BERTAMBAHNYA PANJANG JARINGAN IRIGASI YANG TERPELIHARA	1000 m'	1,500,000,000
87	Peningkatan Saluran Irigasi Ds. Gunung Raya, Kec. Tj. Sakti PUMU	kab lahat	bertambahnya daerah irigasi yang terpelihara	315 m'	472,500,000
88	Peningkatan Saluran Irigasi Ds. Muara Cawang, Kec. Tj. Sakti PUMU	kab lahat	bertambahnya daerah irigasi yang terpelihara	210 m'	315,000,000
89	Pemeliharaan Irigasi Ds. Karang Agung, Kec. Tj. Sakti PUMU	kab lahat	bertambahnya daerah irigasi yang terpelihara	133.33 m'	200,000,000
90	Pemeliharaan Irigasi Ds. Lubuk Dalam, Kec. Tj. Sakti PUMU	kab lahat	bertambahnya daerah irigasi yang terpelihara	133.33 -	200,000,000
91	Rehabilitasi Irigasi Air Manna II Ds. Karang Agung	-KAB LAHAT	BERTAMBAHNYA KAWASAN YANG DIAIRI IRIGASI	1333 m'	2,000,000,000
92	Review Desain D.I. Masam Bulau	-kab lahat	bertambahnya dokumen perencanaan	1 dokumen	475,000,000
93	Peningkatan Saluran Irigasi Ds. Muara Cawang, Kec. Tj. Sakti PUMU	Ds.Muara Cawang Kab Lahat	-	0 -	645,000,000
94	-Pemeliharaan Irigasi Ds. Karang Agung, Kec. Tj. Sakti PUMU	-Kec Tanjung sakti PUMU Kab Lahat	-	0 -	200,000,000
95	Review Desain D.I. Masam Bulau	-Kab Lahat	-	0 -	525,000,000
96	-Pengerukan danau di desa Muara Danau kec Tanjung Tebat kab Lahat	-Desa Muara Danau kec Tanjung Tebat kab Lahat	-	0 -	1,800,000,000
97	-Normalisasi danau di desa Muara Danau kec Tanjung Tebat kab Lahat	Kec Tanjung Tebat kab Lahat	-	0 -	1,000,000,000
					67,042,025,000

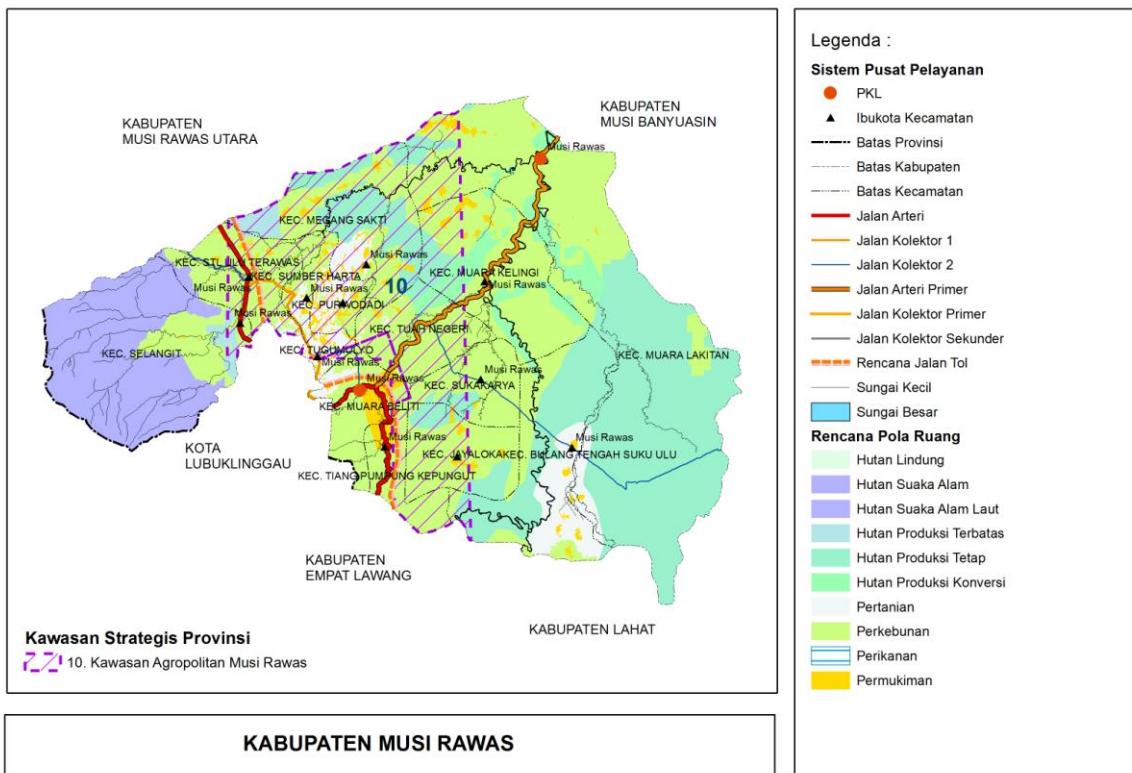
6.5.5 Kabupaten Musi Rawas

Pengembangan Kabupaten Musi Rawas yang memiliki 2 PKL (Muara Beliti dan Muara Lakitan) diarahkan sebagai sentra produksi perkebunan dan pertanian, khususnya komoditi karet, sapi, padi, dan buah-buahan. Di samping itu Musi Rawas juga merupakan salah satu penghasil tambang. Sektor pertanian dan pertambangan merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu prioritas pembangunan diarahkan pada:

- Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi
- Peningkatan produktivitas melalui kegiatan penyuluhan, pemanfaatan bibit unggul, jaminan distribusi pupuk dan alsintan, serta dukungan peremajaan (revitalisasi) tanaman karet
- Peningkatan dukungan akses permodalan bagi petani dan pelaku usaha perkebunan rakyat yang bisa dilakukan melalui pemberian subsidi kredit maupun dukungan sertifikasi tanah
- Peningkatan infrastruktur jalan
- Pemberdayaan koperasi petani.
- Penanggulangan kemiskinan serta peningkatan akses pendidikan menengah dan kesehatan.
- Peningkatan daya dukung lingkungan.

Gambar 6.24 :

Arah Pengembangan Kabupaten Musi Rawas



Tabel 6.20 :
Alokasi Kegiatan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2016

Nomor	Kegiatan	Lokasi	Indikator	Volume	Anggaran
1.17.110	Pemantauan dan Evaluasi Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Provinsi Sumatera Selatan.	Ogan Ilir, Banyuasin, Lahat, Musi Rawas, dan Ogan Komering Ulu	Jumlah KTM yang terevaluasi	5 Kabupaten	30,000,000
2.26.207	Fasilitasi Kegiatan REDD+ dan Pendampingan Bioclime	- Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Muratara; Kabupaten Muara Enim;	Jumlah fasilitasi kegiatan REDD+ dan pendampingan Bioclime	4 Kali	60,000,000
2.26.204	Pengembangan Hasil Hasil hutan Non kayu	- Kabupaten Musi Rawas;	Luas penanaman hasil hutan non kayu	25 Ha	125,000,000
2.26.200	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	- ; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Empat Lawang;	Jumlah laporan permasalahan dan pemgunaan kawasan hutan	16 lokasi	184,500,000
1.8.60	-Pembinaan Masyarakat Desa sekitar kawasan Hutan	Musi banyuasin dan Musi rawas	-Pembinaan Masyarakat desa sekitar hutan	2 -desa	24,180,000
1.8.60	pembinaan areal ijin pemanfaatan dan penggunaan hutan	KAB.Musi Banyuasin, Musi Rawas, Muara Enim, PALI, Lahat, Lubuk Linggau	pembinaan areal ijin pemanfaatan dan penggunaan hutan produksi	16 -ijin	36,870,000
1.15.97	Dukungan Peralatan Olahraga untuk Masyarakat	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Pagar Alam; Kota Palembang; Kota Prabumulih;	Jumlah peralatan olahraga untuk masyarakat	40 Klub/Karang Taruna	190,000,000
1.15.97	Dukungan peralatan olahraga untuk pondok pesantren di Sumsel	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Pagar Alam; Kota Palembang;	Jumlah ponpes di Provinsi Sumatera Selatan yang mendapat bantuan peralatan olaharaga	25 Pondok Pesantren	190,000,000

1.10.70	Fasilitasi Taruna Siaga Bencana (Tagana), Petugas Penata Usahaan Gudang Logistik, dan Petugas Posko	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Pagar Alam; Kota Palembang; Kota Prabumulih;	Terpenuhinya tali asih dan Uniform TAGANA, Petugas Penata Usahaan Gudang Logistik, dan Petugas POSKO Kesiap Siagaan Bencana Bidang Perlindungan Sosial	945 orang	1,412,800,000
1.10.69	Penyuluhan sosial terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Lahat; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Musi Rawas;	Terlaksananya penyuluhan sosial Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); mengikuti pameran Sriwijaya Ekspo dan KSN Ekspo	150 orang	175,000,000
1.10.69	Fasilitasi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)	- Kota Pagar Alam; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muratara; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kota Prabumulih; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kota Palembang; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu;	ersedianya tali asih bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	228 orang	730,000,000
1.10.68	Fasilitasi dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kabupaten Musi Banyuasin; Kota Lubuk Linggau; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Komering Ilir;	Terlayaninya penyandang cacat melalui unit pelayanan sosial keliling (UPSK) 200 Org dan Bantuan bagi penyandang disabilitas berupa: kursi roda, hearing aid, tangan/kaki palsu, kruk ketiak 175 Org	800 orang	500,000,000
1.10.68	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (Eks Wts, Waria, dan ODHA	Kota Prabumulih; Kabupaten Musi Rawas;	Tersedianya Bimbingan Mental, Sosial, Psikologis, Keterampilan bagi eks WTS, Waria, dan ODHA	50 orang	225,000,000

1.10.67	Pemberdayaan Fakir Miskin	Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Musi Rawas;	Tersalurkannya bantuan pemberdayaan keluarga Fakir miskin dlm bentuk KUBE	600 -kk	1,450,000,000
1.5.43	Pembangunan Infrastruktur Kawasan Minapolitan Kec. Tugumulyo Kab. Mura	Kec. Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;	-Jumlah Kawasan Agropolitan yang dibangun	1 -kawasan	800,000,000
2.29.224	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan UPTD BBI Sentral Air Tawar	Musi Rawas	Jumlah sarana dan prasarana baru dan yang telah direhab di UPTD BBISAT Air Satan	1 Paket	500,000,000
2.25.199	Diseminasi Teknologi Pengembangan Usaha Kehutanan	Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Lahat;	Jumlah yang mendapat teknologi pengembangan usaha kehutanan	100 Persen	150,000,000
2.25.197	Diseminasi Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan	- Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Banyuasin;	Jumlah Penyuluh, kelompok yang mendapat pelatihan budidaya perikanan	100 Persen	200,000,000
2.25.196	Penyuluhan dan Pendampingan dalam rangka Peningkatan Produktivitas Perikanan	- Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Banyuasin;	Jumlah Petani dan Penyuluh yang meningkat Pengetahuan	100 Persen	100,000,000
2.25.194	Peningkatan Kapasitas Gapoktan Pelaku Utama Berbasis Teknologi Karet (Bahan Olah Karet)	- Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Ogan Komering Ulu;	Jumlah Gapoktan/Pelaku Utama yang berusaha tani berbasis teknologi	100 Persen	300,000,000
2.25.184	Pembinaan Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Kab. Muara Enim, Muratara, OKI, Lahat, PALI, dan Musi Rawas	- Terlaksananya bantuan unit pengolahan dan pemasaran bokar	5 - kelompok tani	100,000,000
2.25.182	Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Perkebunan	Kota Palembang, Lubuk Linggau, Kab. Musi Rawas, Banyuasin,	- Terlaksananya sertifikasi benih / bibit	80000000 - Benih	250,000,000
2.25.182	Pembinaan dan Pengawasan Penangkar Benih/Bibit tanaman Perkebunan	Kota Palembang; Lubuk Linggau; Kabupaten, Musi Rawas, Banyuasin	- Terlaksananya pengawasan sumber benih dan peredaran benih/bibit	80000000 - Benih	250,000,000
2.25.178	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	16 Kab./Kota (Banyuasin, OKU Timur, OKI, OKU, OKU Selatan, Ogan Ilir, Prabumulih, Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, Musi Rawas, Muratara, PALI, Empat Lawang, Musi Banyuasin dan Palembang)	Meningkatnya pemanfaatan pembiayaan program dan kredit komersial mendukung peningkatan produksi dan mutu produk	100 Kelompok	150,000,000

2.25.178	Peningkatan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, OKI, Musi Rawas dan OKU Timur	Jumlah kelompok tani yang dibina untuk melaksanakan pengolahan hasil tanaman pangan berbasis GMP	13 Kelompok	200,000,000
2.25.178	Peningkatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan	14 Kab./Kota (OKU Timur, Musi Rawas, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Muratara, PALI, OKU Selatan, Muara Enim dan OKU)	Jumlah Kelompoktani yang dibina untuk melaksanakan penanganan pasca panen tanaman pangan	28 Kelompok	200,000,000
2.25.178	Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, OKI, Musi Rawas dan OKU Timur	Jumlah peralatan pengolahan hasil tanaman pangan : - RMU (5 Unit) - Mesin Pemipil Jagung (6 Unit) - Mesin Penepung Jagung (2 Unit)	13 Unit	700,000,000
2.25.178	Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan	14 Kab./Kota (OKU Timur, Musi Rawas, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Muratara, PALI, OKU Selatan, Muara Enim dan OKU)	Jumlah Peralatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan : - Power Tresher (17 Unit) - Combine Harvester (2 Unit) - Terpal Jemur (225 Lembar)	244 Unit/Lembar	392,700,000
2.25.177	Pengelolaan Infrastruktur Pertanian	Kabupaten OKI, Muara Enim, Lahat, OKU Selatan, OKU Timur dan Musi Rawas	Jumlah Kelompok P3A	132 Kelompok	200,000,000
2.25.175	Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	11 Kab./Kota (Ogan Ilir, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, OKU Timur, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Lubuk Linggau dan OKU)	Luas Penangkaran Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang disertifikasi : - Padi (400 Ha) - Buah-buahan (30.000 Btg) - Sayuran (15 Ton)	400 Ha	640,000,000
2.25.175	Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	13 Kab./Kota (Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, OKI, OKU, OKU Timur, Lahat, Muara Enim, Empat Lawang, Musi Rawas, Pagar Alamm Lubuk Linggau dan PALI)	Jumlah Produsen/Penyular Pedagang Benih yang diawasi	1 Unit	100,000,000
2.25.175	Pengelolaan Penangkaran Benih Tanaman Pangan	11 Kab./Kota (Ogan Ilir, OKI, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Musi Rawas, Banyuasin, OKU Timur dan Musi Banyuasin	Pengelolaan ketersediaan benih di produsen, penangkar dan pengecer	400 Ton	209,800,000
2.25.175	Penyediaan Sarana Pengelolaan Penangkaran Benih Tanaman Pangan	11 Kab./Kota (Ogan Ilir, OKI, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Musi Rawas,	Ketersediaan Benih Tanaman Pangan yang unggul dan	5000 Kg	1,176,225,000

		Banyuasin, OKU Timur dan Musi Banyuasin)	bersertifikat		
2.25.174	Pengelolaan Produksi Tanaman Sayuran	Kabupaten Banyuasin, Muara Enim, Musi Rawas, Ogan Ilir, OKI,	Meningkatnya Pengelolaan Produksi Tanaman Sayuran	19 Ha	432,525,000
2.25.174	Penyediaan Sarana Produksi Pengelolaan Tanaman Sayuran	Kab. Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, OKU Timur, Palembang dan Pagar Alam	Meningkatnya luas tanam sayuran	19 Ha	450,000,000
1.3.27	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kab. Musi Rawas	Musi Rawas	Panjang Jalan Yang Terpelihara	94.25 Km	1,550,000,000
1.3.27	Pengendalian rutin dan penanggulangan jalan dan jembatan wilayah I	Kab. Muara Enim, Kab. Musi Rawas, Kab. Lahat, Kab. Muratara	Jumlah titik rawan bencana	52 Paket	10,500,000,000
2.25.177	Dukungan Partisipasi Pemprov. Sumsel Terhadap Proyek Pembangunan/Rehabilitasi Sarana/Prasarana SDA Wilayah Irigasi (WISMP)	Musi Rawas, OKU selatan dan Lahat	Meningkatnya kemandirian perkumpulan petani pemakai air	15 Kelompok	80,000,000
1.7.55	Rehabilitasi Sarana Prasarana Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	- Kabupaten Lahat; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;	Jumlah Unit Pelaksana Penimbangan Bermotor (UPPKB) yang dikelola target	5 UPPKB	500,000,000
1.7.55	Pemeliharaan Alat-alat ukur dan Penggantian Suku Cadang Timbangan	Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;	Jumlah Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang dikelola dengan baik	5 UPPKB	270,000,000
1.3.25	- Pembuatan jalan lingkungan cor beton Desa Temuan Sari, Temuan Jaya kec. Muara Kelingi kab Musi Rawas	-Desa Temuan Sari, Temuan Jaya kec. Muara Kelingi kab Musi Rawas	-	0 -	1,000,000,000
1.4.37	Optimalisasi SPAM IKK Kec. Tugumulyo	Kec. Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;	Akses Layanan Air Minum yang Tersedia	1 Paket	1,000,000,000
1.3.31	Pemeliharaan Irigasi D.I. Air Deras BD2 - BD3	Kab Musi Rawas	Panjang saluran irigasi yang dipelihara	290 m'	200,000,000
1.3.31	Pemeliharaan Irigasi D.I. Megang Tikip	Kab Musi Rawas	Panjang saluran irigasi yang dipelihara	333 m'	250,000,000
1.3.31	Pemeliharaan Irigasi D.I. Tebat Gede	Kab Musi Rawas Utara	Panjang saluran irigasi yang dipelihara	180 m'	180,740,000
1.3.31	-Pemeliharaan Irigasi D.I. Megang Tikip	-Kab Musi Rawas	-	0 -	250,000,000
1.3.31	Review Desain D.I. Air Gegas	Kab Musi Rawas	bertambahnya dokumen perencanaan	1 dokumen	755,000,000
1.3.30	Pembuatan Bronjong Pengaman Sungai Senaro Desa Megang Sakti V	-Ds Megang Sakti V Kab Musi Rawas	-	0 -	3,500,000,000
1.8.61	-Normalisasi sungai di	-Rupit kab Musi Rawas	-	0 -	3,000,000,000

	Rupit kab Musi Rawas				
1.3.31	pemeliharaan D.I.Nitap	kabupaten musi rawas utara	panjang jaringan irigasi dan rawa yang terbangun	130 m'	195,000,000
2.30.226	- Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Palembang, OI, OKI, OKU, OKUT, OKUS, PBM, ME, LHT, PGA, 4L, PALI, MURA, LL, MUBA, BA	-Jumlah jenis barang dan jasa yang terawasi dalam peredarannya	4 - Jenis Barang	128,125,000
2.29.223	Pengembangan dan Peningkatan Konsumsi Ikan	Muratara dan Empat Lawang	Jumlah anak yang mendapatkan paket makanan berbahan dasar ikan	400 anak	100,000,000
2.29.221	Paket Sarana dan Prasarana Budidaya di Desa Model dan Lumbung Pangan	Palembang, Banyuasin, Ogan Ilir, PALI, Mura	Jumlah sarana dan prasarana budidaya di desa model dan desa lumbung pangan	5 Paket	150,000,000
2.25.198	Penilaian Lomba PKA Wana Lestari	OKU, OKUT, Muba, Empat Lawang, Muara Enim, Lahat, Prabu, Pali, Mura, L. Linggau, Palembang	Jumlah Penyuluh Kehutanan, KMDM, PKSM, KTH dan Desa Peduli Hutan	100 Persen	175,000,000
2.25.191	Pembinaan Kawasan Peternakan	Muba, Banyuasin, Mura, OKI, OKU, Muara enim, Lahat	Jumlah Peserta mengikuti pembinaan kawasan peternakan	8 kab	100,000,000
2.25.186	Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Empat Lawang, Muratara, MUBA, Ogan Ilir	- Terlaksananya bantuan bibit kelapa sawit rakyat	10000 - batang	500,000,000
2.25.185	Pelatihan dan Pengembangan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) Petani Perkebunan	OKU, OI, Muratara, OKUT, MUBA, OKI,	- Terlaksananya pelatihan dan pengembangan SKE petani perkebunan	150 - Orang	150,000,000
2.25.185	Pembinaan Kemitraan Usaha Perkebunan	Kab. Muara Enim, Muba, Banyuasin, Mura,	- Terlaksananya pembinaan kemitraan usaha perkebunan	100 - Orang	100,000,000
2.25.185	Pembinaan dan Pengawalan Revitalisasi Perkebunan	Mura, Muratara, Prabumulih,OKI,OKU,OKUT, MUBA,M Enim, Banyuasin, Pali	- Jumlah petani, petugas dan perusahaan peserta revit perkebunan yang terbina	120 - Orang	100,000,000
2.25.185	Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Besar (PBS/N)	Kab. Muara Enim, Banyuasin, Muba, OKU, OKUT, OKUS, OI, OKI, Lahat, PAGAR ALAM, MURA, EMPAT Lawang	- Jumlah kebun yang terawasi dan terbina	17 - Kebun PBS/N	100,000,000
2.25.184	Pembinaan Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Kab. Muara Enim, Muratara, OKI, Lahat, PALI, dan Musi Rawas	- Terlaksananya bantuan unit pengolahan dan pemasaran bukar	5 - kelompok tani	100,000,000
2.25.184	Pengadaan Alat Panen Karet Rakyat	pRABUMULIH, OKU, M Enim, OKI, PALI, MURATARA	- Terlaksananya bantuan alat panen karet	200 - paket	200,000,000

2.25.183	Pengujian Teknologi Proteksi dan Operasional Laboratorium Proteksi	Kab.Lahat, MURATARA	- Terlaksananya uji lapang pengendalian penggunaan agen hayati	30 - Ha	150,000,000
2.25.181	Pengembangan Pembiayaan Usaha Perkebunan	Lingga, Mura, Prabu, B. Asin, OKUT, Muba, OI	- Terlaksananya pertemuan kelompok tani dengan lembaga keuangan/perbankan	10 - Kabupaten/Kota	100,000,000
2.25.180	Peremajaan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat	MUBA, PALI, Prabumulih, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Muratara	- Terlaksananya peremajaan dan pengembangan tanaman karet rakyat	700 - Ha	4,050,000,000
1.19.155	Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat	Kab. Lahat, Kab. MURA	Jumlah lbg pgn masyarkt. Jumlah RMU. Jumlah anggota/klp Lmbg pgn yg dilatih.	2 Paket lumbung pgn, RMU, Timbangan	700,000,000
2.25.178	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	16 Kab./Kota (Banyuasin, OKU Timur, OKI, OKU, OKU Selatan, Ogan Ilir, Prabumulih, Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, Musi Rawas, Muratara, PALI, Empat Lawang, Musi Banyuasin dan Palembang)	Meningkatnya pemanfaatan pembiayaan program dan kredit komersial mendukung peningkatan produksi dan mutu produk	100 Kelompok	150,000,000
2.25.178	Peningkatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan	14 Kab./Kota (OKU Timur, Musi Rawas, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Muratara, PALI, OKU Selatan, Muara Enim dan OKU)	Jumlah Kelompok tani yang dibina untuk melaksanakan penanganan pasca panen tanaman pangan	28 Kelompok	200,000,000
2.25.178	Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan	14 Kab./Kota (OKU Timur, Musi Rawas, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Muratara, PALI, OKU Selatan, Muara Enim dan OKU)	Jumlah Peralatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan : - Power Tresher (17 Unit) - Combine Harvester (2 Unit) - Terpal Jemur (225 Lembar)	244 Unit/Lembar	392,700,000
2.25.175	Pengelolaan Penangkaran Perbenihan Tanaman Buah-buahan dan Sayuran	Kabupaten Muara Enim, Banyuasin dan Muratara	Jumlah kelompok Penangkar Hortikultura yang dibina	12 Kelompok	150,000,000
2.25.175	Penyediaan Sarana Penangkaran Perbenihan Tanaman Buah-buahan dan Sayuran	Kabupaten Muara Enim, Banyuasin dan Muratara	Jumlah Sarana Produksi Hortikultura : - Buah-buahan (7.500 Btg) - Sayuran (12.500,3 Kg)	20000.3 Btg/Kg/Gr	800,000,000
2.25.174	Penyediaan Sarana Produksi Pengelolaan Tanaman Buah	Kabupaten OKI, Muara Enim, Lahat, Muratara, OKU, OKI, Banyuasin dan Kota Pagar	Meningkatnya Luas Tanam Tanaman Buah	85 Ha	410,825,000

		Alam			
2.25.173	Pengelolaan Tanaman Serealia	Kabupaten PALI, MURATARA, Muara Enim, Musi Banyuasin	Jumlah Kelompok Tani yang menerapkan teknologi yang tepat	8 Kelompok	214,300,000
1.3.27	Pengendalian rutin dan penanggulangan jalan dan jembatan wilayah I	Kab. Muara Enim, Kab. Musi Rawas, Kab. Lahat, Kab. Muratara	Jumlah titik rawan bencana	52 Paket	10,500,000,000
1.3.34	Normalisasi sungai Rupit dan Sungai Rawas	Kabupaten Muratara	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	500 M'	3,000,000,000
1.3.34	Normalisasi sungai di Ds. Pauh dan Pauh I, Kec Rawas Ilir	Kabupaten Muratara	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	333.33 M'	2,000,000,000
1.3.31	-Pembuatan Bronjong Pengaman Sungai Megang Desa Megang Sakti II	-KAB MURA	BERTAMBAHNYA PANJANG TEBING SUNGAI YANG BEBAS LONGSOR	416.67 m'	2,500,000,000
1.3.31	Pemeliharaan Irigasi D.I. Megang Tikip	-kab mura	bertambahnya daerah irigasi yang terpelihara	333.33 m'	250,000,000
1.3.31	Pemeliharaan Irigasi D.I. Nitap	-KAB MURATARA	BERTAMBAHNYA DAERAH IRIGASI YANG TERPELIHARA	260 m'	195,000,000
1.3.31	Pemeliharaan Irigasi D.I. Merung	-KAB MURATARA	BERTAMBAHNYA DAERAH IRIGASI YANG TERPELIHARA	264 m'	198,000,000
1.3.31	Review Desain D.I. Air Gegas	-kab mura	bertambahnya dokumen perencanaan	1 dokumen	805,000,000
1.3.30	Pembuatan Bronjong Pengaman Sungai Senaro Desa Megang Sakti V	KAB MURA	BERTAMBAHNYA PANJANG TEBING SUNGAI YANG BEBAS LONGSOR	583.33 m'	3,500,000,000
1.3.31	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Satan	-Kab MURA	-	0 -	2,500,000,000
1.3.31	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Deras I	-Kab MURA	-	0 -	3,000,000,000
1.3.33	-Normalisasi sungai/irigasi persawahan	Desa Pauh dan Pauh I kec Rawas Ilir kab Muratara	-	0 -	2,000,000,000
					75,734,290,000

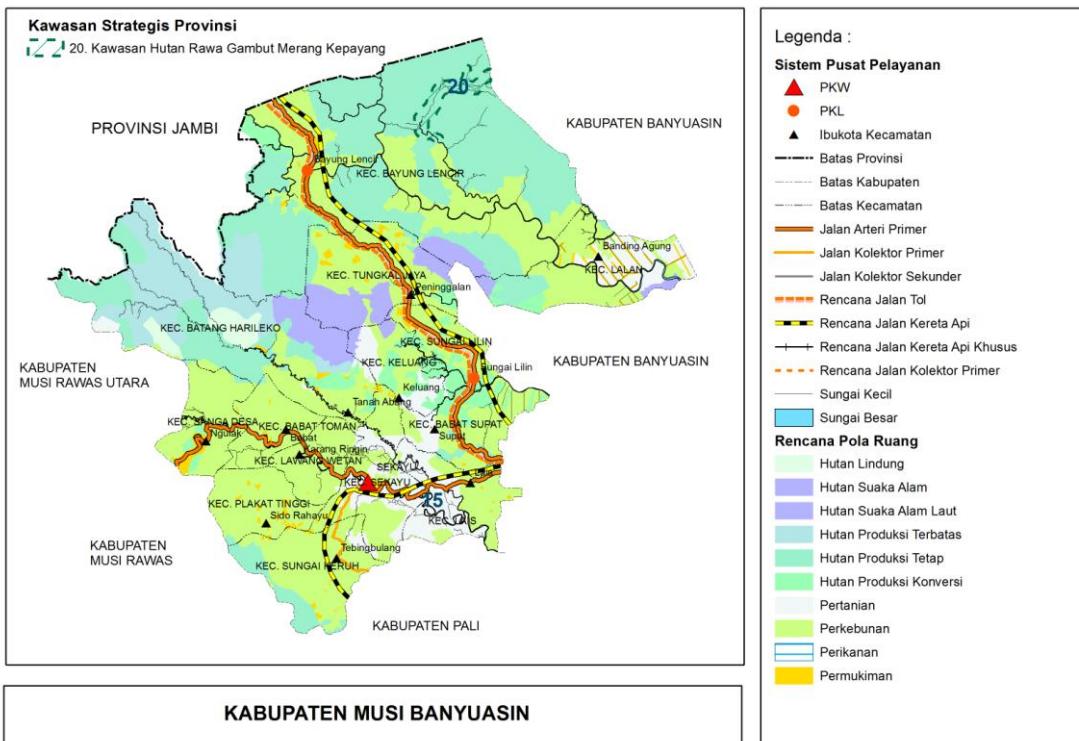
6.5.6 Kabupaten Musi Banyuasin

Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki 1 PKW (Sekayu) dan 2 PKL (Bayung Lencir dan Sungai Lilin) diarahkan untuk memantapkan perannya sebagai salah satu sentra utama pertambangan, perkebunan, dan pertanian. Kabupaten Musi Banyuasin merupakan perekonomian terbesar kedua setelah Palembang (diukur dari PDRB ADHB) dan diperkirakan semakin berkembang karena berada dalam Koridor Ekonomi Sumatera. Musi Banyuasin memiliki banyak komoditas unggulan, diantaranya pertambangan, karet, perikanan, palawija, padi, dan peternakan sapi. Secara sektoral, sumber utama pertumbuhan ekonomi daerah adalah pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Oleh karena itu prioritas pembangunan diarahkan pada:

- Pengendalian kompetisi lahan untuk pertambangan, pertanian, dan perkebunan
- Pemantapan dan pemeliharaan jaringan jalan
- Peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi
- Peningkatan produktivitas pertanian khususnya melalui dukungan penyuluhan, pemanfaatan bibit/benih unggul, jaminan distribusi pupuk dan alsintan
- Peningkatan jalur logistik dan pemasaran
- Peningkatan akses permodalan bagi petani, peternak, nelayan, dan petani perkebunan rakyat.
- Pemberdayaan koperasi petani, peternak, nelayan.
- Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses pendidikan menengah.
- Pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Gambar 6.25 :

Arah Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin



Tabel 6.21 :
Alokasi Kegiatan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2016

Nomor	Kegiatan	Lokasi	Indikator	Volume	Anggaran
1.17.109	Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah	Kab. OKI, Kab. Muara Enim dan Kab. Muba	Jumlah Daerah Pemekaran yang difasilitasi	9 kabupaten dan kecamatan	500,000,000
1.10.72	Pemadaman darat akibat kebakaran hutan dan lahan	Kab OKI, OI, Banyuasin, MUBA, Muara Enim dan Kota Palembang	Jumlah Pemadaman darat akibat kebakaran hutan dan lahan	30 titik api (hotspot)	1,200,000,000
1.20.159	Penguatan dan Perlombaan Kelembagaan Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS) Tk. Provinsi	Muba dan Muara Enim	-Jumlah Anggota BP-SPAMS yang dibina	200 -Orang	100,000,000
1.10.69	Pembinaan Organisasi Sosial	Kab. Banyuasin; Kota Lubuk Linggau; Kab. OKUT; Kab. MUBA; Kab. OKI	terbinanya organisasi sosial dan terseleksinya orsos berprestasi	250 orang	80,000,000
1.10.67	Pemberdayaan Keluarga Rentan	Kab. MUBA; Kab. OI; Kota Palembang	Tersedianya Usaha Ekonomi Produktif bagi Keluarga Rentan	150 kk	500,000,000
1.10.67	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	Kab. MUBA; Kab. Empat Lawang; Kab. OKUS	Tersalurkannya bantuan Bahan bangunan rumah, Jaminan hidup, sarana penerangan dan UEP terhadap Komunitas Adat Terpencil	185 kk	1,225,000,000
1.10.67	Bedah Kampung	MUBA dan Kota Palembang	-Tersedianya Lingkungan/Pemu kiman yang Sehat	25 kk	700,000,000
1.4.37	Pembangunan IPLT Kab. MUBA	Kab. MUBA	Jumlah SPAM IKK yang terbangun	1 IKK	750,000,000
2.30.232	- Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Bersertifikasi Surat Keterangan Asal (SKA) dan Angka Pengenal Importir (API)	- PLG, OI, ME, BA, MUBA	- Jumlah sertifikasi Surat Keterangan Asal (SKA) dan Angka Pengenal Importir (API) perusahaan yang dimonev	120 - 50 SKA, 70 API	75,000,000
2.30.226	- Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Palembang, OI, OKI, OKU, OKUT, OKUS, PBM, ME, LHT, PGA, 4L, PALI, MURA, LL, MUBA, BA	-Jumlah jenis barang dan jasa yang terawasi dalam peredarannya	4 - Jenis Barang	128,125,000
2.29.220	Operasional Pengawasan Terpadu Sumber Daya Ikan di Perairan Umum dan Laut	MUBA, OKI, OI, Lahat, Muara Enim, Banyuasin	Jumlah operasional pengawasan terpadu yang telah dilaksanakan dengan pihak ALRI dan Polisi Perairan	6 Kab/Kota	84,515,000

2.25.198	Penilaian Lomba PKA Wana Lestari	OKU, OKUT, Muba, Empat Lawang, Muara Enim, Lahat, Prabu, Pali, Mura, L. Linggau, Palembang	Jumlah Penyuluhan Kehutanan, KMDM, PKSM, KTH dan Desa Peduli Hutan	100 Persen	175,000,000
2.25.191	Pembinaan Kawasan Peternakan	Muba, Banyuasin, Mura, OKI, OKU, Muara enim, Lahat	Jumlah Peserta mengikuti pembinaan kawasan peternakan	8 kab	100,000,000
2.25.191	Pembinaan Sekolah Peternakan Rakyat	Kab. Banyuasi, OKI, Muba, Muara Enim	Jumlah Kabupaten pada kelompok Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) yang dibina	4 kab	500,000,000
2.25.188	Pengembangan Ternak Sapi Integrasi sawit	OKI, Muba, Banyuasin, Lahat dan Muara Enim	Jumlah Kwitansi pembayaran jenis barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	7 kwitansi	300,000,000
2.25.186	Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Empat Lawang, Muratara, MUBA, Ogan Ilir	- Terlaksananya bantuan bibit kelapa sawit rakyat	10000 - batang	500,000,000
2.25.185	Pelatihan dan Pengembangan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) Petani Perkebunan	OKU, OI, Muratara, OKUT, MUBA, OKI,	- Terlaksananya pelatihan dan pengembangan SKE petani perkebunan	150 - Orang	150,000,000
2.25.185	Pembinaan Kemitraan Usaha Perkebunan	Kab. Muara Enim, Muba, Banyuasin, Mura,	- Terlaksananya pembinaan kemitraan usaha perkebunan	100 - Orang	100,000,000
2.25.185	Pembinaan dan Pengawalan Revitalisasi Perkebunan	Mura, Muratara, Prabumulih,OKI,OKU, OKUT,MUBA,M Enim, Banyuasin, Pali	- Jumlah petani, petugas dan perusahaan peserta revit perkebunan yang terbina	120 - Orang	100,000,000
2.25.185	Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Besar (PBS/N)	Kab. Muara Enim, Banyuasin, Muba, OKU, OKUT, OKUS, OI, OKI, Lahat, PAGAR ALAM, MURA, EMPAT Lawang	- Jumlah kebun yang terawasi dan terbina	17 - Kebun PBS/N	100,000,000
2.25.184	Pasar Lelang Terpadu Perkebunan	Kab. Banyuasin, Muara Enim, Lahat, Muba	- Terlaksananya bantuan perleengkapan pasar lelang karet	4 -Paket	150,000,000
2.25.183	Sekolah lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)	MUBA, OKUS, OI, OKUT, LAHAT	- Terlaksananya Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu	125 - orang	250,000,000
2.25.183	Pengendalian Penyakit Kering Alur Sadap	Kota Prabumulih, b asin, oku, m enim, oi, muba,	- Terlaksananya pengendalian kering alur sadap	500 - Ha	400,000,000
2.25.183	Pengendalian Penyakit Jamur Akar Putih (JAP) pada tanaman karet	Kabupaten Bokus, oki,muba	- Terlaksananya pengendalian Jamur Akar Putih	200 - Ha	300,000,000
2.25.181	Pengembangan Pembiayaan Usaha	Linggau, Mura, Prabu, B. Asin, OKUT, Muba,	- Terlaksananya pertemuan	10 - Kabupaten/Kota	100,000,000

	Perkeebunan	OI	kelompok tani dengan lembaga keuangan/perban kan		
2.25.180	Peremajaan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat	MUBA, PALI, Prabumulih, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Muratara	- Terlaksananya peremajaan dan pengembangan tanaman karet rakyat	700 - Ha	4,050,000,000
2.29.220	Pembinaan Pokmaswas	OKI, Banyuasin, Muba, Ogan Ilir	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan	4 kab/kota	70,000,000
1.3.26	Peningkatan jalan dalam desa Bayat Ilir kec Bayung Lencir kab Muba	Kab Muba	-	0 -	1,000,000,000
1.3.25	Pengerasan jalan	Desa Paldas kec. Rantau Bayur kab Banyuasin dan Desa Purwosari kec. Lais kab Muba	-	0 -	2,000,000,000
1.3.25	Peningkatan jalan dalam dusun III desa Sinar Tungkal kab Muba	-Kec Tungkal Jaya kab Muba	-	0 -	500,000,000
1.3.25	Pengecoran jalan setapak dalam kel Bayung Lencir	RT 05/09 Belakang Pasar Lama Kec Bayung Lencir kab Muba	-	0 -	300,000,000
1.3.25	Pengecoran jalan setapak menuju Mushollah Al Barokah desa Senawar kec Bayung Lencir kab Muba	Desa Senawa kec Bayung Lencir kab muba	-	0 -	300,000,000
1.3.26	-Pengecoran jalan setapak dalam kel Bayung Lencir	-RT 08 Lr TK Kec Bayung Lencir kab Muba	-	0 -	200,000,000
1.3.26	-Pengecoran jalan setapak dalam kel Bayung Lencir	-RT 11 Srimaju samping dealer YAMAHA Kec Bayung Lencir kab Muba	-	0 -	300,000,000
1.3.32	Pekerjaan pemasangan jaringan pipa transmisi distribusi air bersih PDAM Tirta Randik kel Soak Baru kec Sekayu kab Muba Prov Sumsel	Kec Sekayu kab Muba	-	0 -	2,000,000,000
1.3.25	Pembangunan jalan penghubung desa induk desa Mendis Jaya	Desa Mendis Jaya kec Bayung Lencir kab Muba	-	0 -	480,000,000
1.5.42	Pembangunan jalan setapak di desa Teluk Kijing I kec Lais kab Muba	-Desa Teluk Kijing I kec Lais kab Muba	-	0 -	500,000,000
1.3.25	Peningkatan jalan dengan cor beton penghubung desa Banjar Jaya menuju desa Sidomulyo kec Tungkal Jaya kab Muba	-Desa Banjar Jaya menuju desa Sidomulyo kec Tungkal Jaya kab Muba	-	0 -	2,000,000,000
1.3.31	Rehab. Tanggul Banjir D.I.R. Karang Agung Tengah	Kab MUBA	Panjang jaringan rawa yang direhabilitasi dan dapat diairi	3000 m'	1,000,000,000

1.3.31	Rehabilitasi D.I.R. Karang Agung Hilir	kab MUBA	Panjang jaringan rawa yang direhabilitasi dan dapat diairi	4500 -	4,000,000,000
1.3.31	Rehab. Saluran dan Pintu Air D.I.R. Karang Agung Tengah	Kab MUBA	Panjang jaringan rawa yang direhabilitasi dan dapat diairi	8100 m'	6,500,000,000
1.3.31	Rehab. Berat Pintu Air Sekunder di Primer 16 DR. Karang Agung Tengah	KAB MUBA	BERTAMBAHNYA KAWASAN YANG DIAIRI IRIGASI	4 UNIT	1,000,000,000
1.3.31	Review Desain D.I.R. Lumpatan	-kab muba	bertambahnya dokumen perencanaan	1 dokumen	455,000,000
1.3.31	-Review Desain D.I.R. Bailangu	kab muba	bertambahnya dokumen perencanaan	1 dokumen	752,500,000
1.3.31	Review Desain D.I.R. Pinang Banjar	-kab muba	bertambahnya dokumen perencanaan	1 dokumen	350,000,000
1.3.31	Rehab. Berat Pintu Air Sekunder di Primer 1 DR. Karang Agung Tengah	Kab. Muba	-	0 -	1,500,000,000
1.3.31	Normalisasi Saluran Primer II dan Primer VIII DR. Karang Agung Hilir	Kab MUBA	-	0 -	3,400,000,000
1.3.31	Rehab. Berat Pintu Air Sekunder di Primer 16 DR. Karang Agung Tengah	-Kab MUBA	-	0 -	1,000,000,000
1.3.31	Review Desain D.I.R. Lumpatan	Kab MUBA	-	0 -	455,000,000
1.3.31	Review Desain D.I.R. Bailangu	Kab MUBA	-	0 -	702,500,000
1.3.31	Review Desain D.I.R. Pinang Banjar	-Kab MUBA	-	0 -	350,000,000
1.3.33	-Pembersihan sungai kecil/parit pembuangan air rawa di kel Bayung Lincir Indah kec Bayung Lincir kab Muba	Kel Bayung Lincir Indah kec Bayung Lincir kab Muba	-	0 -	1,000,000,000
2.26.207	Fasilitasi Kegiatan REDD+ dan Pendampingan Bioclime	- Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Muratara; Kabupaten Muara Enim;	Jumlah fasilitasi kegiatan REDD+ dan pendampingan Bioclime	4 Kali	60,000,000
2.26.206	Pembinaan dan Pengendalian Hama dan Penyakit Hutan Alam dan Hutan Tanaman	- Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Musi Banyuasin;	Jumlah orang yang di bina	3 lokasi	90,000,000
2.26.205	Penyelidikan Kasus kasus Peredaran hasil Hutan	- Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Lahat; Kabupaten Ogan Komering Ulu;	Jumlah kasus peredaran hasil hutan	4 lokasi	60,000,000
2.26.200	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	- ; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten	Jumlah laporan permasalahan dan pemgunaan kawasan hutan	16 lokasi	184,500,000

		Empat Lawang;			
1.8.60	-Pembinaan Masyarakat Desa sekitar kawasan Hutan	Musi banyuasin dan Musi rawas	-Pembinaan Masyarakat desa sekitar hutan	2 -desa	24,180,000
1.8.60	pembinaan areal ijin pemanfaatan dan penggunaan hutan	KAB.Musi Banyuasin, Musi Rawas, Muara Enim, PALI, Lahat, Lubuk Linggau	pembinaan areal ijin pemanfaatan dan penggunaan hutan produksi	16 -ijin	36,870,000
1.2.14	Penyemprotan fogging sarang nyamuk	- Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Lahat; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Ogan Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Prabumulih;	-Jumlah fogging fokus pemberantasan penyakit DBD	135 Fokus	300,000,000
1.15.97	Dukungan Peralatan Olahraga untuk Masyarakat	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Pagar Alam; Kota Palembang; Kota Prabumulih;	Jumlah peralatan olahraga untuk masyarakat	40 Klub/Karang Taruna	190,000,000
1.10.70	Fasilitasi Taruna Siaga Bencana (Tagana), Petugas Penata Usahaan Gudang Logistik, dan Petugas Posko	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu	Terpenuhinya tali asih dan Uniform TAGANA, Petugas Penata Usahaan Gudang Logistik, dan Petugas POSKO Kesiap Siagaan Bencana Bidang Perlindungan Sosial	945 orang	1,412,800,000

		Timur; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Pagar Alam; Kota Palembang; Kota Prabumulih;			
1.10.69	Penyuluhan sosial terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Lahat; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Musi Rawas;	Terlaksananya penyuluhan sosial Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); mengikuti pameran Sriwijaya Ekspo dan KSN Eksopo	150 orang	175,000,000
1.10.69	Fasilitasi Persatuan Amal Kematian (PAK) di Sumatera Selatan	- Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Palembang; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Banyuasin; ; Kota Prabumulih; Kabupaten Empat Lawang;	Tersedianya bantuan tenda, kursi , wireless dan Mobil Ambulance untuk Persatuan Amal Kematian; dan kend R4	30 pak	3,345,000,000
1.10.68	Fasilitasi dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kabupaten Musi Banyuasin; Kota Lubuk Linggau; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Komering Ilir;	Terlayaninya penyandang cacat melalui unit pelayanan sosial keliling (UPSK) 200 Org dan Bantuan bagi penyandang diasabilitas berupa: kursi roda, hearing aid, tangan/kaki palsu, kruk ketiak 175 Org	800 orang	500,000,000
1.10.67	Pemberdayaan Fakir Miskin	Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Musi Rawas;	Tersalurkannya bantuan pemberdayaan keluarga Fakir miskin dlm bentuk KUBE	600 -kk	1,450,000,000

1.7.55	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Lahat; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Muratara;	Jumlah Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang dikelola	5 UPPKB	1,000,000,000
1.7.53	Penertiban dan Pengawasan Tersus dan TUKS	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Musi Banyuasin;	Terlaksananya kegiatan penertiban dan pengawasan Tersus dan TUKS	3 Lokasi	150,000,000
1.5.43	Pembangunan Infrastruktur Kawasan Minapolitan Kec. Lais Kab. Muba	Kec. Lais Kabupaten Musi Banyuasin;	- Jumlah Kawasan Agropolitan yang dibangun	1 -kawasan	1,000,000,000
1.4.37	OPTIMALISASI SPAM IKK Desa Bumi Kencana Sungai Lilin	-Kec. Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;	Jumlah SPAM IKK yang terbangun	1 IKK	1,000,000,000
1.3.31	Rehab Berat Pintu Air di Saluran Primer 16 Daerah Rawa Karang Agung Tengah	Kec. Lalan Kabupaten Musi Banyuasin;	Panjang Jaringan Rawa Yang Direhabilitasi Dan Dapat Diairi	4 Unit	500,000,000
2.31.234	- Pengembangan Teknologi Industri Hilir Kelapa Sawit	- Musi Banyuasin	- Jumlah Petani sawit yang mendapat bimbingan teknologi ind. Hilir kelapa sawit (CPO Mini)	20 - Petani sawit (1 KUB) + 1 Pkt Banper	75,000,000
2.25.198	Pendampingan Mitigasi Kebakaran Hutan	- Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Muara Enim;	-Jumlah penyuluh dan Masyarakat Hutan yang terlatih	100 Persen	125,000,000
2.25.198	Pemberdayaan Masyarakat/Kelompok Tani Hutan	- Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kabupaten Musi Banyuasin; Kota Pagar Alam;	Jumlah Masyarakat/Kelompok Tani Hutan yang Mendukung Penyelenggaraan Penyuluh Kehutanan	100 Persen	100,000,000
2.25.196	Pengembangan Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan	- Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Lahat;	Jumlah POKTU, Pelaku Usaha Perikanan yang ditingkatkan klasifikasinya	100 Persen	200,000,000
2.25.194	Penerapan Teknologi Tepat Guna Komoditas Padi	- Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Banyuasin;	Jumlah Gapoktan/Pelaku Utama yang dapat mengaplikasikan teknologi Padi	100 Persen	100,000,000

2.25.178	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	16 Kab./Kota (Banyuasin, OKU Timur, OKI, OKU, OKU Selatan, Ogan Ilir, Prabumulih, Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, Musi Rawas, Muratara, PALI, Empat Lawang, Musi Banyuasin dan Palembang)	Meningkatnya pemanfaatan pembiayaan program dan kredit komersial mendukung peningkatan produksi dan mutu produk	100 Kelompok	150,000,000
2.25.178	Peningkatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan	14 Kab./Kota (OKU Timur, Musi Rawas, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Muratara, PALI, OKU Selatan, Muara Enim dan OKU)	Jumlah Kelompoktan yang dibina untuk melaksanakan penanganan pasca panen tanaman pangan	28 Kelompok	200,000,000
2.25.178	Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan	14 Kab./Kota (OKU Timur, Musi Rawas, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Muratara, PALI, OKU Selatan, Muara Enim dan OKU)	Jumlah Peralatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan : - Power Tresher (17 Unit) - Combine Harvester (2 Unit) - Terpal Jemur (225 Lembar)	244 Unit/Lembar	392,700,000
2.25.177	Optimasi Pemanfaatan Lahan Sawah	Kabupaten OKI dan Musi Banyuasin	Jumlah Kelompok Yang menerapkan peningkatan intensitas pertanaman : - Pertanaman 100-200	17 Kelompok	300,000,000
2.25.177	Penyediaan Sarana Optimasi Pemanfaatan Lahan	Kabupaten OKI dan Musi Banyuasin	Luas areal pertanaman yang menerapkan Fiberisasi	275 Ha	880,000,000
2.25.175	Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	11 Kab./Kota (Ogan Ilir, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, OKU Timur, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Lubuk Linggau dan OKU)	Luas Penangkaran Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang disertifikasi : - Padi (400 Ha) - Buah-buahan (30.000 Btg) - Sayuran (15 Ton)	400 Ha	640,000,000
2.25.175	Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	13 Kab./Kota (Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, OKI, OKU, OKU Timur, Lahat, Muara Enim, Empat Lawang, Musi Rawas, Pagar Alamm Lubuk Linggau dan PALI)	Jumlah Produsen/Penyalar Pedagang Benih yang diawasi	1 Unit	100,000,000

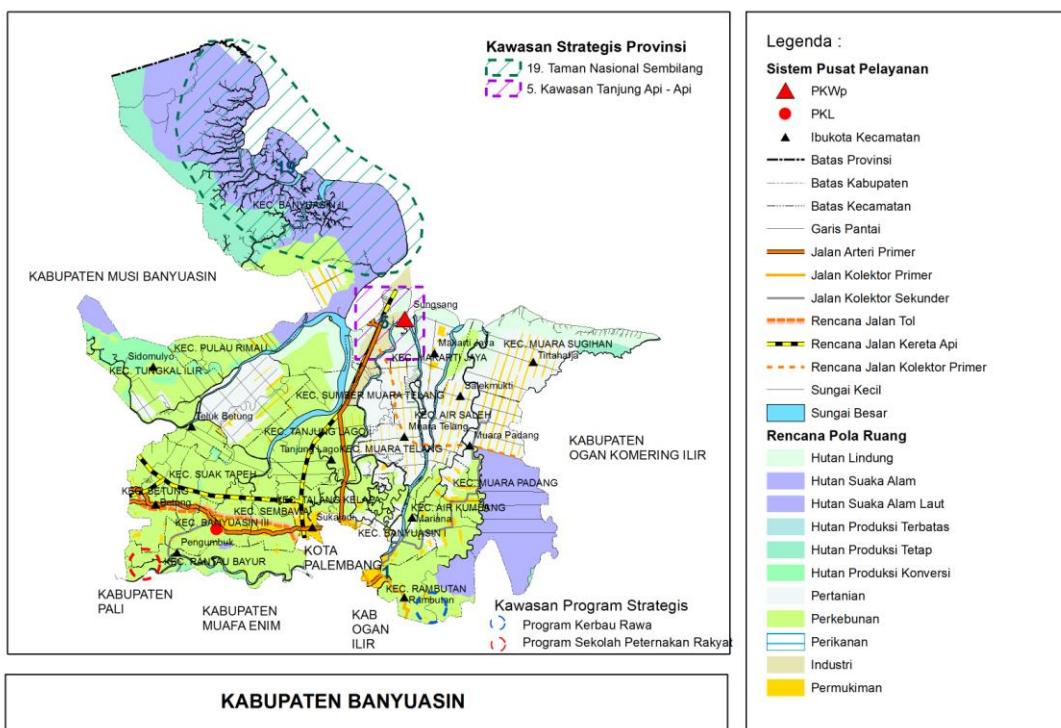
2.25.175	Pengelolaan Penangkaran Benih Tanaman Pangan	11 Kab./Kota (Ogan Ilir, OKI, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Musi Rawas, Banyuasin, OKU Timur dan Musi Banyuasin)	Pengelolaan ketersediaan benih di produsen, penangkar dan pengecer	400 Ton	209,800,000
2.25.175	Penyediaan Sarana Pengelolaan Penangkaran Benih Tanaman Pangan	11 Kab./Kota (Ogan Ilir, OKI, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Musi Rawas, Banyuasin, OKU Timur dan Musi Banyuasin)	Ketersediaan Benih Tanaman Pangan yang unggul dan bersertifikat	5000 Kg	1,176,225,000
2.25.173	Pengelolaan Tanaman Serealia	Kabupaten PALI, MURATARA, Muara Enim, Musi Banyuasin	Jumlah Kelompok Tani yang menerapkan teknologi yang tepat	8 Kelompok	214,300,000
1.3.27	Kegiatan Pemeliharaan Rutin UPTD PJ3 Kab. MUBA	Musi Banyuasin	Panjang Jalan Yang Terpelihara	101.75 Km	1,550,000,000
1.3.25	Peningkatan jalan Sekayu-Bts. Kab. Muara Enim	Kab.Musi Banyuasin	Panjang jalan yang ditingkatkan/dilebar	1.2 km	3,000,000,000
1.7.55	Rehabilitasi Sarana Prasarana Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	- Kabupaten Lahat; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;	Jumlah Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang dikelola target	5 UPPKB	500,000,000
1.7.55	Pemeliharaan Alat-alat ukur dan Penggantian Suku Cadang Timbangan	Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;	Jumlah Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang dikelola dengan baik	5 UPPKB	270,000,000
1.3.34	Normalisasi Sungai Pake	Kabupaten Musi Banyuasin	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	4000 M'	1,200,000,000
1.3.34	Normalisasi Sungai Rimba Rakit	Kabupaten Musi Banyuasin	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	4000 M'	2,200,000,000
					69,794,015,000

6.5.7 Kabupaten Banyuasin

Pengembangan Kabupaten Banyuasin yang memiliki 1 PKWp (Sungsang/Tanjung Api-Api) dan 1 PKL (Pangkalan Balai) diarahkan untuk memantapkan perannya sebagai salah satu sentra utama pertanian dan pertambangan. Kabupaten Banyuasin berperan penting dalam mendukung Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan dengan komoditi unggulan padi, palawija, hortikultura sayur-sayuran, dan perikanan. Dari sisi sektoral, sumber utama pertumbuhan ekonomi daerah adalah pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Oleh karena itu prioritas pembangunan diarahkan pada:

- Percepatan pembangunan KEK Tanjung Api-Api
- Peningkatan akses Palembang-Tanjung Api-Api
- Penyelesaian pembangunan pelabuhan peti kemas Tanjung Api-Api.
- Pembangunan Pusat Kerbau Rawa di Kecamatan Rambutan.
- Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi
- Peningkatan produktivitas usaha pertanian melalui penyuluhan, pemanfaatan bibit unggul, jaminan distribusi pupuk dan alsintan
- Peningkatan dukungan akses permodalan bagi petani dan nelayan
- Pemantapan dan pemeliharaan jaringan jalan
- Pemantapan akses pemasaran
- Pemberdayaan koperasi petani dan nelayan
- Peningkatan akses pendidikan menengah dan kesehatan

Gambar 6.26 :
Arah Pengembangan Kabupaten Banyuasin



Tabel 6.22 :
Alokasi Kegiatan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016

No	Kegiatan	Lokasi	Indikator	Volume	Anggaran
1	Pemantauan dan Evaluasi Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Provinsi Sumatera Selatan.	Ogan Ilir, Banyuasin, Lahat, Musi Rawas, dan Ogan Komering Ulu	Jumlah KTM yang terevaluasi	5 Kabupaten	30,000,000
2	Integritas Pelayanan Kesehatan dan Jejaring Epidemiologi	Kota Palembang; Kab Ogan Ilir; Kab Banyuasin	Jumlah korban bencana yang dilayani	1000 orang	50,000,000
3	Pemadaman darat akibat kebakaran hutan dan lahan	Kab OKI, OI, Banyuasin, MUBA, Muara Enim dan Kota Palembang	Jumlah Pemadaman darat akibat kebakaran hutan dan lahan	30 titik api (hotspot)	1,200,000,000
4	Pembinaan dan pengawasan produk pangan industri pabrikan	7 Kab/Kota (Palembang, Lubuk Linggau, 4 Lawang, Prabumulih, Muara Enim, Banyuasin, Lahat)	-Jumlah Industri Makanan Minuman yang dibina tentang kesehatan dan keamanan makanan	10 -Industri Makanan	350,000,000
5	Dukungan Peralatan Olahraga untuk Masyarakat	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Pagar Alam; Kota Palembang; Kota Prabumulih;	Jumlah peralatan olahraga untuk masyarakat	40 Klub/Karang Taruna	190,000,000
6	Dukungan peralatan olahraga untuk pondok pesantren di Sumsel	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Pagar Alam; Kota Palembang;	Jumlah ponpes di Provinsi Sumatera Selatan yang mendapat bantuan peralatan olahraga	25 Pondok Pesantren	190,000,000

7	Fasilitasi Taruna Siaga Bencana (Tagana), Petugas Penata Usahaan Gudang Logistik, dan Petugas Posko	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Pagar Alam; Kota Palembang; Kota Prabumulih;	Terpenuhinya tali asih dan Uniform TAGANA, Petugas Penata Usahaan Gudang Logistik, dan Petugas POSKO Kesiap Siagaan Bencana Bidang Perlindungan Sosial	945 orang	1,412,800,000
8	Pembinaan Organisasi Sosial	Kab. Banyuasin; Kota Lubuk Linggau; Kab. OKUT; Kab. MUBA; Kab. OKI	terbinanya organisasi sosial dan terseleksinya orsos berprestasi	250 orang	80,000,000
9	Fasilitasi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)	- Kota Pagar Alam; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muratara; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kota Prabumulih; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kota Palembang; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu;	ersedianya tali asih bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	228 orang	730,000,000
10	Pemeliharaan Berkala Fasilitas Sandar pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api	Kabupaten Banyuasin;	Jumlah Fasilitas Sandar Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api yang Dipelihara	1 Pelabuhan	577,089,000
11	Pemeliharaan Berkala Fasilitas Darat Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api	Kabupaten Banyuasin;	Jumlah Fasilitas Darat Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api yang Dipelihara	1 Pelabuhan	500,000,000
12	Penyediaan jasa pendukung tenaga teknis pengelolaan pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api	Kota Palembang;Kab. Banyuasin	Jumlah jasa teknis pengelolaan pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-apis	43 Orang	1,104,025,000
13	Penyelenggaraan dan Pengelolaan UPTD	Kabupaten Banyuasin;	Jumlah UPTD PPALSDP yang dikelola	1 UPTD	939,000,000
14	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai	Kabupaten Banyuasin; Kota Palembang;	Jumlah Rambu-rambu sungai yang terpasang	150 Rambu	275,000,000
15	Razia Kapal Pedalaman Angkutan Sungai	Kabupaten Banyuasin;Kota Palembang	Terlaksananya kegiatan razia kapal pedalaman angkutan sungai	1 Lokasi	100,000,000

16	Penertiban dan Pengawasan Tersus dan TUKS	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Musi Banyuasin;	Terlaksananya kegiatan penertiban dan pengawasan Tersus dan TUKS	3 Lokasi	150,000,000
17	Posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Palembang;Banyuasin	Jumlah Posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	7 Posko	200,000,000
18	OPTIMALISASI SPAM IKK Makarti Jaya	Kec. Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin;	Jumlah SPAM IKK yang terbangun	1 IKK	1,000,000,000
19	- Pengembangan Industri Minyak Atsiri	- Banyuasin	- Jumlah Petani Gaharu yang mendapat pelatihan pengembangan Ind. Minyak Atsiri	20 - Orang (1 KUB)+ Banper	90,000,000
20	- Pengembangan dan Bantuan Peralatan Industri Pengolahan Berbasis Kelapa	- Banyuasin	- Jumlah Pelaku Usaha Kelapa yang mendapat Pelatihan Ind.Pengolahan Berbasis Kelapa + Banper	40 - Orang pengrajin industri (1 KUB) + 1 Pkt Banper	85,000,000
21	Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap	Banyuasin	Jumlah paket bantuan (pkt)	8 paket	300,000,000
22	Pemberdayaan Wanita Nelayan	OKI, Banyuasin	Jumlah sarana penangkapan ikan (paket)	2 paket	198,870,000
23	Operasional Perizinan dan Pengendalian Perikanan Tangkap	Palembang, Oki dan Banyuasin	Jumlah Sertifikat perizinan dan pengendalian perikanan tangkap yang dikeluarkan selama satu tahun	75 unit	225,000,000
24	Operasional PPI Sungsang	Kabupaten Banyuasin;	Jumlah sarana dan prasarana PPI Sungsang	1 paket	200,000,000
25	Paket Sarana dan Prasarana Budidaya di Desa Model dan Lumbung Pangan	Palembang, Banyuasin, Ogan Ilir, PALI, Mura	Jumlah sarana dan prasarana budidaya di desa model dan desa lumbung pangan	5 Paket	150,000,000
26	Operasional Pengawasan Terpadu Sumber Daya Ikan di Perairan Umum dan Laut	MUBA, OKI, OI, Lahat, Muara Enim, Banyuasin	Jumlah operasional pengawasan terpadu yang telah dilaksanakan dengan pihak ALRI dan Polisi Perairan	6 Kab/Kota	84,515,000
27	Pendampingan Mitigasi Kebakaran Hutan	- Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Muara Enim;	-Jumlah penyuluhan dan Masyarakat Hutan yang terlatih	100 Persen	125,000,000

28	Diseminasi Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan	- Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Banyuasin;	Jumlah Penyuluhan, kelompok yang mendapat pelatihan budidaya perikanan	100 Persen	200,000,000
29	Diseminasi Pengolahan Hasil Perikanan	- Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;	Jumlah Penyuluhan, kelompok yang mendapatkan pelatihan pengolahan hasil Perikanan	100 Persen	200,000,000
30	Penyuluhan dan Pendampingan dalam rangka Peningkatan Produktivitas Perikanan	- Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Banyuasin;	Jumlah Petani dan Penyuluhan yang meningkat Pengetahuan	100 Persen	100,000,000
31	Pengembangan Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan	- Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Lahat;	Jumlah POKTU, Pelaku Usaha Perikanan yang ditingkatkan klasifikasinya	100 Persen	200,000,000
32	Peningkatan Kapasitas Gapoktan Pelaku Utama Berbasis Teknologi Karet (Bahan Olah Karet)	- Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Ogan Komering Ulu;	Jumlah Gapoktan/Pelaku Utama yang berusaha tani berbasis teknologi	100 Persen	300,000,000
33	Penerapan Teknologi Tepat Guna Komoditas Padi	- Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Banyuasin;	Jumlah Gapoktan/Pelaku Utama yang dapat mengaplikasikan teknologi Padi	100 Persen	100,000,000
34	Pembinaan Kawasan Peternakan	Muba, Banyuasin, Mura, OKI, OKU, Muara enim, Lahat	Jumlah Peserta mengikuti pembinaan kawasan peternakan	8 kab	100,000,000
35	Pengembangan Ternak Perah	Kec. Rambutan Kabupaten Banyuasin;	Jumlah unit fasilitas untuk pusat pengembangan kerbau rawa	40 unit	2,425,000,000
36	Pengembangan Ternak Sapi Integrasi sawit	OKI, Muba, Banyuasin, Lahat dan Muara Enim	Jumlah Kwitansi pembayaran jenis barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	7 kwitansi	300,000,000
37	Pembinaan Kemitraan Usaha Perkebunan	Kab. Muara Enim, Muba, Banyuasin, Mura,	- Terlaksananya pembinaan kemitraan usaha perkebunan	100 - Orang	100,000,000
38	Pembinaan dan Pengawalan Revitalisasi Perkebunan	Mura, Muratara, Prabumulih,OKI,OKU,OKUT,M UBA,M Enim, Banyuasin, Pali	- Jumlah petani, petugas dan perusahaan peserta revit perkebunan yang terbina	120 - Orang	100,000,000

39	Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Besar (PBS/N)	Kab. Muara Enim, Banyuasin, Muba, OKU, OKUT, OKUS, OI, OKI, Lahat, PaGAR ALAM, MURA, EMPAT Lawang	- Jumlah kebun yang terawasi dan terbina	17 - Kebun PBS/N	100,000,000
40	Pasar Lelang Terpadu Perkebunan	Kab. Banyuasin, Muara Enim, Lahat, Muba	- Terlaksananya bantuan perleengkapan pasar lelang karet	4 -Paket	150,000,000
41	Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Perkebunan	Kota Palembang, Lubuk Linggau, Kab. Musi Rawas, Banyuasin,	- Terlaksananya sertifikasi benih / bibit	80000000 - Benih	250,000,000
42	Pembinaan dan Pengawasan Penangkar Benih/Bibit tanaman Perkebunan	Kota Palembang; Lubuk Linggau; Kabupaten, Musi Rawas, Banyuasin	- Terlaksananya pengawasan sumber benih dan peredaran benih/bibit	80000000 - Benih	250,000,000
43	Penyuluhan dan Pemasyarakatan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi	Palembang, Banyuasin, OKI	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan sadar koperasi	1000 Orang	400,000,000
44	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	16 Kab./Kota (Banyuasin, OKU Timur, OKI, OKU, OKU Selatan, Ogan Ilir, Prabumulih, Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, Musi Rawas, Muratara, PALI, Empat Lawang, Musi Banyuasin dan Palembang)	Meningkatnya pemanfaatan pembiayaan program dan kredit komersial mendukung peningkatan produksi dan mutu produk	100 Kelompok	150,000,000
45	Peningkatan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, OKI, Musi Rawas dan OKU Timur	Jumlah kelompok tani yang dibina untuk melaksanakan pengolahan hasil tanaman pangan berbasis GMP	13 Kelompok	200,000,000
46	Peningkatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan	14 Kab./Kota (OKU Timur, Musi Rawas, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Muratara, PALI, OKU Selatan, Muara Enim dan OKU)	Jumlah Kelompoktani yang dibina untuk melaksanakan penanganan pasca panen tanaman pangan	28 Kelompok	200,000,000
47	Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, OKI, Musi Rawas dan OKU Timur	Jumlah peralatan pengolahan hasil tanaman pangan : - RMU (5 Unit) - Mesin Pemipil Jagung (6 Unit) - Mesin Penepung Jagung (2 Unit)	13 Unit	700,000,000

48	Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan	14 Kab./Kota (OKU Timur, Musi Rawas, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Muratara, PALI, OKU Selatan, Muara Enim dan OKU)	Jumlah Peralatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan : - Power Tresher (17 Unit) - Combine Harvester (2 Unit) - Terpal Jemur (225 Lembar)	244 Unit/Lembar	392,700,000
49	Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	11 Kab./Kota (Ogan Ilir, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, OKU Timur, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Lubuk Linggau dan OKU)	Luas Penangkaran Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang disertifikasi : - Padi (400 Ha) - Buah-buahan (30.000 Btg) - Sayuran (15 Ton)	400 Ha	640,000,000
50	Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	13 Kab./Kota (Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, OKI, OKU, OKU Timur, Lahat, Muara Enim, Empat Lawang, Musi Rawas, Pagar Alam Lubuk Linggau dan PALI)	Jumlah Produsen/Penyalur Pedagang Benih yang diawasi	1 Unit	100,000,000
51	Pengelolaan Penangkaran Perbenihan Tanaman Buah-buahan dan Sayuran	Kabupaten Muara Enim, Banyuasin dan Muratara	Jumlah kelompok Penangkar Hortikultura yang dibina	12 Kelompok	150,000,000
52	Penyediaan Sarana Penangkaran Perbenihan Tanaman Buah-buahan dan Sayuran	Kabupaten Muara Enim, Banyuasin dan Muratara	Jumlah Sarana Produksi Hortikultura :- Buah-buahan (7.500 Btg)- Sayuran (12.500,3 Kg)	20000.3 Btg/Kg/Gr	800,000,000
53	Pengelolaan Penangkaran Benih Tanaman Pangan	11 Kab./Kota (Ogan Ilir, OKI, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Musi Rawas, Banyuasin, OKU Timur dan Musi Banyuasin)	Pengelolaan ketersediaan benih di produsen, penangkar dan pengecer	400 Ton	209,800,000
54	Penyediaan Sarana Pengelolaan Penangkaran Benih Tanaman Pangan	11 Kab./Kota (Ogan Ilir, OKI, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Musi Rawas, Banyuasin, OKU Timur dan Musi Banyuasin)	Ketersediaan Benih Tanaman Pangan yang unggul dan bersertifikat	5000 Kg	1,176,225,000
55	Pengelolaan Penyediaan Benih Padi di Balai Benih Induk	Kabupaten Banyuasin dan OKU Timur	Meningkatnya Ketersediaan Benih Tanaman Pangan yang unggul dan bersertifikat	28 Ha	628,900,000
56	Pengelolaan Produksi Tanaman Sayuran	Kabupaten Banyuasin, Muara Enim, Musi rawas, Ogan ilir, OKI,	Meningkatnya Pengelolaan Produksi Tanaman Sayuran	19 Ha	432,525,000

57	Penyediaan Sarana Produksi Pengelolaan Tanaman Sayuran	Kab. Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, OKU Timur, Palembang dan Pagar Alam	Meningkatnya luas tanam sayuran	19 Ha	450,000,000
58	Pengelolaan Produksi Tanaman Buah	Kabupaten OKI, Muara Enim, Lahat, OKU, Banyuasin, Muaratara dan Kota Pagar Alam	Meningkatnya Pengelolaan Produksi Tanaman Buah	8 Kelompok	200,050,000
59	Penyediaan Sarana Produksi Pengelolaan Tanaman Buah	Kabuapten OKI, Muara Enim, Lahat, Muratara, OKU, OKI, Banyuasin dan Kota Pagar Alam	Meningkatnya Luas Tanam Tanaman Buah	85 Ha	410,825,000
60	Pengelolaan Aneka Tanaman Kacang dan Umbi	Kabupaten Banyuasin,OKU Timur, PALI	Jumlah Kelompok Tani yang menerapkan pengelolaan aneka tanaman kacang dan umbi	4 Kelompok	98,000,000
61	Penyediaan Sarana Produksi Pengelolaan Aneka Tanaman Kacang dan Umbi	Kabupaten Banyuasin, PALI dan OKU Timur	Jumlah Bantuan Benih	602500 kg/stek	161,750,000
62	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Kota Palembang, Kabupaten OKU Timur, Lahat dan Banyuasin	Tersedianya jasa tenaga kerja jaga malam kantor dinas dan UPTD	28 Orang	718,900,000
63	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Koperasi	Pali, Banyuasin, Empat Lawang, OI, Lahat	Jumlah Peserta Temu Usaha	200 Orang	200,000,000
64	Pembangunan Jalan Akses Kawasan KEK	Kabupaten Banyuasin;	Panjang Jalan Yang Terbangun	2 Km	10,000,000,000
65	Pembebasan Lahan KEK Tj. Api-API	Banyuasin	- Jumlah Lahan KEK yang dibebaskan	60 - Hektar	43,750,000,000
66	- Bantuan hand tractor untuk kel. Tani "Barokah" desa Telang Karya kec Muara Telang Banyuasin	-Desa Telang Karya kec Muara Telang Banyuasin	-	0 -	25,000,000
67	- Bantuan hand tractor utk kel. Tani"Harapan Sejahtera" Telang Karya kec Muara Telang Banyuasin	-Kec Muara Telang Banyuasin	-	0 -	25,000,000
68	- Bantuan hand tractor untuk kel. Tani "Tani Makmur" dusun 2 desa Srimulyo kec Air Saleh Banyuasin	-Dusun 2 desa Srimulyo kec Air Saleh Banyuasin	-	0 -	25,000,000
69	- Bantuan hand tractor untuk kel. Tani "Sri Maju" dusun 2 desa Mekar Mukti kec Muara Telang Banyuasin	-Dusun 2 desa Mekar Mukti kec Muara Telang Banyuasin	-	0 -	25,000,000
70	- Bantuan hand tractor utk kel. Tani	-Desa Sumber Mulyo kec Muara Telang Banyuasin	-	0 -	25,000,000

	"Mulya Bersama" desa Sumber Mulyo kec Muara Telang Banyuasin				
71	- Bantuan hand tractor utk kel. Tani "Gemi Nastiti" dusun 5 desa Sidoarjo kec Air Saleh Banyuasin	-Dusun 5 desa Sidoarjo kec Air Saleh Banyuasin	-	0 -	25,000,000
72	- Bantuan hand tractor utk kel. Tani "Tirto Ayu" dusun 2 desa Sidoarjo kec Air Saleh Banyuasin	-Dusun 2 desa Sidoarjo kec Air Saleh Banyuasin	-	0 -	25,000,000
73	- Bantuan hand tractor utk kel. Tani "Mekar Harapan" ds Sungai Lilin kec Rantau Bayur Banyuasin	-Ds Sungai Lilin kec Rantau Bayur Banyuasin	-	0 -	25,000,000
74	- Bantuan hand tractor utk kel. Tani "Sido Makmur" desa Enggal Rejo kec Air Saleh Banyuasin	-Desa Enggal Rejo kec Air Saleh Banyuasin	-	0 -	25,000,000
75	- Bantuan hand tractor utk kel. Tani "Jaya Bersama" desa Telang Jaya kec Muara Telang Banyuasin	-Desa Telang Jaya kec Muara Telang Banyuasin	-	0 -	25,000,000
76	Bantuan Paket Budidaya Perikanan Air Payau	Banyuasin	Jumlah bantuan bantuan paket budidaya perikanan air payau	1 Kegiatan	100,000,000
77	Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	Banyuasin dan Oki	Jumlah rumah/tanah nelayan yang teridentifikasi	2 Kab/Kota	113,380,000
78	Pembinaan Pokmaswas	OKI, Banyuasin, Muba, Ogan Ilir	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan	4 kab/kota	70,000,000
79	Fasilitasi Penerapan SKP dan SNI	Palembang, Banyuasin dan OKI	Jumlah kab/kota yang UMKM dan UPI-nya bersertifikat	3 Kab/kota	111,450,000
80	Pengadaan Gamelan dan Kuda Lumping untuk PEPADI	Banyuasin dan Palembang	Jumlah gamelan dan wayang kulit yang tersedia	3 Gamelan dan 3 Wayang Kulit	230,000,000
81	Rapat Teknis SKPD	-Kec. Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;	Jumlah peserta yang mengikuti	80 Orang	40,000,000
82	Pembuatan Pipa Penyalur Sumber Air Baku WTP	; Kabupaten Banyuasin;	Jumlah Pipa Penyalur WTP Yang Dibangun	1 Unit	325,000,000
83	Pemeliharaan Jaringan Instalasi Listrik Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api	Kabupaten Banyuasin;	Jumlah Istalasi Listrik	1 Jaringan	550,000,000
84	Cor beton Komplek Handayani RT 36 kel Sukajadi kec Talang Kelapa	Komplek Handayani RT 36 kel Sukajadi kec Talang Kelapa	-	0 -	100,000,000

	Sukajadi kec Talang Kelapa kab Banyuasin	kab Banyuasin			
85	Peningkatan jalan lingkungan kel. Sukomoro kec. Talang Kelapa kab Banyuasin	Kel. Sukomoro kec. Talang Kelapa kab. Banyuasin	-	0 -	500,000,000
86	Peningkatan jalan lingkungan desa Ujung Tanjung kec. Banyuasin III kab Banyuasin	Desa Ujung Tanjung kec Banyuasin III kab Banyuasin	-	0 -	500,000,000
87	Pengerasan jalan	Desa Paldas kec. Rantau Bayur kab Banyuasin dan Desa Purwosari kec. Lais kab Muba	-	0 -	2,000,000,000
88	-Pengecoran jalan	Jl. Harapan Baru RT 014 Talang Keramat kab Banyuasin	-	0 -	200,000,000
89	Pembangunan jalan cor beton RT 11 dusun III desa Mera Mata kec Banyuasin I	-Dusun III desa Mera Mata kec Banyuasin I	-	0 -	200,000,000
90	-Pengecoran jalan lingkungan perumahan Megah Asri 2 RT 32 RW 012 kel Sukajadi kec Talang Kelapa kab Banyuasin	Kel Sukajadi kec Talang Kelapa kab Banyuasin	-	0 -	350,000,000
91	-Pengecoran jalan lingkungan perumahan Bumi Mas Indah RT 10 dan RT 38 RW 003 kel Tanah Mas kec Talang Kelapa kab Banyuasin	Kel Tanah Mas kec Talang Kelapa kab Banyuasin	-	0 -	400,000,000
92	-Pengecoran jalan lingkungan perumahan Bumi Mas Indah RT 09 RW 03 kel Tanah Mas kec Talang Kelapa kab Banyuasin	Kel Tanah Mas kec Talang Kelapa kab Banyuasin	-	0 -	200,000,000
93	-Pengecoran jalan lingkungan perumahan Bumi Mas Indah RT 35 dan RT 03 kel Tanah Mas kec Talang Kelapa kab Banyuasin	Kel Tanah Mas kec Talang Kelapa kab Banyuasin	-	0 -	400,000,000
94	Pengecoran jalan lingkungan dusun III desa kenten Laut jalan Dani Barin RT 38 kec Talang Kelapa kab Banyuasin	Kec Talang Kelapa kab Banyuasin	-	0 -	500,000,000

95	Pengecoran jalan lingkungan perumahan Azhar kel Tanah Mas kec Talang Kelapa kab Banyuasin	Kec Talang Kelapa kab Banyuasin	-	0 -	200,000,000
96	Pengecoran jalan lingkungan perumahan Asri 2 RT 35 RW 12 kel Sukajadi kec Talang Kelapa kab Banyuasin	Kel Sukajadi kec Talang Kelapa kab Banyuasin	-	0 -	150,000,000
97	Pengecoran jalan lingkungan pada jalan Pendawa/Lr Tikus RT 26 dan RT 13 lingkungan III kel Air Batu kec Talang Kelapa kab Banyuasin	Jalan Pendawa/Lr Tikus RT 26 dan RT 13 lingkungan III kel Air Batu kec Talang Kelapa kab Banyuasin	-	0 -	200,000,000
98	Cor beton	Komplek Handayani RT 48 kel Sukajadi kec Talang Kelapa kab Banyuasin	-	0 -	200,000,000
99	Pembangunan jalan lingkungan	Kec. Banyuasin 2	-	0 -	2,500,000,000
100	Pengerasan jalan lingkungan	Kel Tanah Mas kec Talang Kelapa kab Banyuasin	-	0 -	250,000,000
101	Pembangunan jalan lingkungan	RT 15 RW 07 lingkungan 4 kel Air Batu kec Talang Kelapa kab Banyuasin	-	0 -	150,000,000
102	- Jalan lingkungan cor beton dan drainase perumahan dari bumi mas	Perumahan Bumi Mas RW 003 kel. Tanah Mas kec Talang Kelapa kab Banyuasin	-	0 -	1,000,000,000
103	Pembangunan jalan lingkungan	Jl Roda RT 50 kel Sukajadi kec Talang Kelapa kab Banyuasin lebar 2,5 m panjang 225 m	-	0 -	250,000,000
104	-Pengecoran jalan di desa Gelebak Dalam kec Rambutan kab Banyuasin	-Desa Gelebak Dalam kec Rambutan kab Banyuasin	-	0 -	1,000,000,000
105	-Pembangunan saluran air	Kel Air Batu kec Talang Kelapa kab Banyuasin	-	0 -	400,000,000
106	-Perbaikan jalan menuju ke desa Sukamulya, Tanjung Menang, Sari Bandung, Karang Petai kecamatan Banyuasin III	Desa Sukamulya, Tanjung Menang, Sari Bandung, Karang Petai kecamatan Banyuasin III	-	0 -	1,000,000,000
107	Rehab. Jalan Produksi di Ds. Tirta Mulya, Kec. Pulau Rimau	Kab Banyuasin	Panjang jalan inspeksi yang diperbaiki	3000 m'	200,000,000
108	Rehab. Jalan Produksi di Ds. Banjar Sari, Kec. Pulau Rimau	Kab Banyuasin	Panjang jalan produksi yang dipelihara	3000 m'	200,000,000
109	Rehabilitasi D.I.R Pulau Rimau	Kab Banyuasin	Panjang jaringan rawa yang direhabilitasi dan	60000 m'	5,150,000,000

			dapat diairi		
110	Rehabilitasi Saluran Primer 17 D.I.R. Sugihan Kiri	Kab Banyuasin	Panjang jaringan rawa yang direhabilitasi dan dapat diairi	10000 m'	6,000,000,000
111	Rehabilitasi Saluran Primer 17 D.I.R. Sugihan Kiri	Kab Banyuasin	Panjang jaringan rawa yang direhabilitasi dan dapat diairi	10000 m'	6,000,000,000
112	Rehabilitasi D.I.R Sugihan Kiri	Kab Banyuasin	Panjang jaringan rawa yang direhabilitasi dan dapat diairi	40000 m'	3,034,000,000
113	Rehabilitasi D.I.R Karang Agung Hulu	Kab Banyuasin	Panjang jaringan rawa yang direhabilitasi dan dapat diairi	80000 m'	6,200,000,000
114	Rehabilitasi D.I.R. Delta Upang	kab Banyuasin	Panjang jaringan rawa yang direhabilitasi dan dapat diairi	48000 m'	6,750,000,000
115	Rehabilitasi D.I.R. Telang II	Kab banyuasin	Panjang jaringan rawa yang direhabilitasi dan dapat diairi	20000 m'	2,500,000,000
116	Normalisasi SPD/SDU di Sumber Jaya Kec. Sumber Marga Telang	KAB BANYUASIN	Panjang jaringan rawa yang direhabilitasi dan dapat diairi	1000 m'	1,000,000,000
117	Normalisasi Sungai SP4 Ds. Tirta Makmur dan SP5 Ds. Panca Mulya, Kec Air Kuabang	Kabupaten Banyuasin ;	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	500 M'	2,000,000,000
118	Normalisasi Sungai Talang Buluh Gasing	Kabupaten Banyuasin	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	1525 M'	6,100,000,000
119	Normalisasi Sungai Ds. Petaling, Kec Banyuasin III	Kabupaten Banyuasin	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	125 M'	500,000,000
120	Normalisasi Sungai Ds. Pulau Harapan, Kec Sumbawa	Kabupaten Banyuasin	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	125 M'	500,000,000
121	Normalisasi Sungai Pake	Kabupaten Musi Banyuasin	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	4000 M'	1,200,000,000
122	Normalisasi Sungai Rimba Rakit	Kabupaten Musi Banyuasin	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	4000 M'	2,200,000,000
123	DED Jalur irigasi dan bendungan di Kec Banyuasin III	KAB BANYUASIN	TERLAKSANANYA DOKUMEN PERENCANAAN	1 dokumen	340,000,000
124	Pembangunan Dinding Penahan sungai di Desa Gelebak Dalam	-KAB BANYUASIN	BERTAMBAHNYA PANJANG TEBING SUNGAI YANG BEBAS LONGSOR	167 m'	1,000,000,000
125	Pembangunan Dinding Penahan sungai di Desa Gelebak Dalam	-Ds.Gelebak Dalam Kec Rambutan Kab Banyuasin	-	0 -	1,000,000,000
126	Normalisasi Sungai	Kab Banyuasin	-	0 -	1,000,000,000

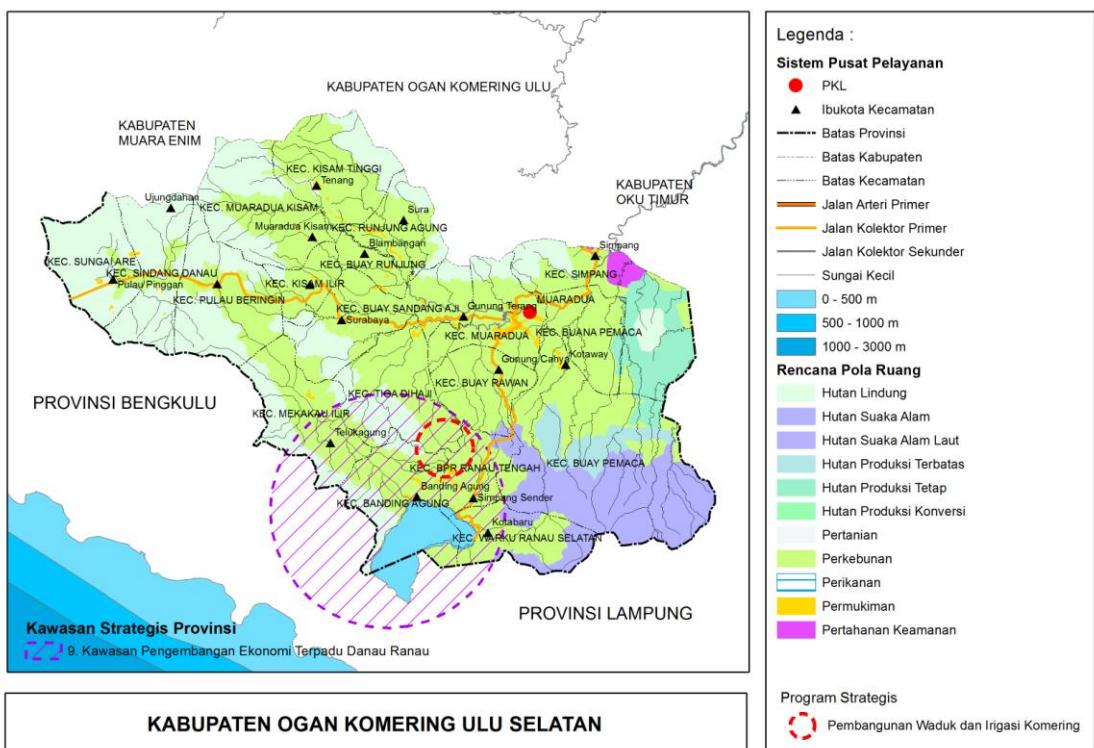
	Gasing - Talang Buluh				
127	- Normalisasi Sungai Gasing - Talang Buluh	-Kab. Banyuasin	-	0 -	1,500,000,000
128	Normalisasi Sungai Gasing - Talang Buluh	Kab. Banyuasin	-	0 -	3,100,000,000
129	-Normalisasi sungai	-Desa Petaling kec Banyuasin III kab Banyuasin	-	0 -	500,000,000
130	-Normalisasi sungai	-Desa Pulau Harapan kec Sumbawa kab Banyuasin	-	0 -	500,000,000
131	Rehabilitasi jaringan pengairan desa mekar sari	Kec. Banyuasin II Kabupaten Banyuasin;	panjang jaringan irigasi dan rawa yang terbangun	627 m'	940,000,000
132	DED jalur irigasi dan bendungan di Kec Banyuasin III	Kec. Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;	luas irigasi dan bendungan	1 dokumen	340,000,000
133	Inkubasi bisnis dan teknologi pengalengan pindang patin	Palembang, Banyuasin	-	0 -	550,000,000
134	Pendampingan Pasca Inovasi (UKM berbasis inovasi, desa binaan)	OKU Selatan, Banyuasin, Palembang, Pagaralam	-	0 -	175,000,000
					152,499,804,000

6.5.8 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang memiliki 1 PKL (Muaradua) diarahkan untuk memacu pertumbuhannya dan mengejar ketertinggalannya dari daerah lain. Percepatan pembangunan diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif, yakni tanaman pangan padi, palawija, sayur-sayuran, buah-buahan, dan peternakan sapi. Pengembangan sektoral ini perlu didukung dengan penguatan aksesibilitas wilayah dengan memperkuat konektivitas jaringan jalan dengan Jalur Lintas Tengah serta dengan hub lokal Baturaja (Ogan Komering Ulu). Oleh karena itu, prioritas pembangunan diarahkan pada:

- Perluasan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, pembangunan waduk Tiga Diaji.
- Peningkatan produktivitas pertanian melalui peningkatan penyuluhan, pemanfaatan bibit/benih unggul, peningkatan distribusi pupuk dan alsintan
- Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan
- Peningkatan akses permodalan bagi petani
- Peningkatan akses pemasaran
- Peningkatan daya dukung lingkungan
- Peningkatan akses pendidikan menengah
- Pengendalian dan pemanfaatan tata ruang

Gambar 6.27 :
Arah Pengembangan Kabupaten OKU Selatan



Tabel 6.23 :
Alokasi Kegiatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun Anggaran 2016

Nomor	Kegiatan	Lokasi	Indikator	Volume	Anggaran
1.2.9	Peningkatatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana	Pagar Alam ; PALI ; Muratara ; Empat Lawang ; Lahat ; OKU ; OKUT ; OKUS	-Jumlah pelayanan Kesehatan bagi pengungsi dan korban bencana di provinsi Sumsel	8 -Kejadian Bencana	250,000,000
1.10.67	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	Kab. MUBA; Kab. Empat Lawang; Kab. OKUS	Tersalurkannya bantuan Bahan bangunan rumah, Jaminan hidup, sarana penerangan dan UEP terhadap Komunitas Adat Terpencil	185 kk	1,225,000,000
2.30.226	- Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Palembang, OI, OKI, OKU, OKUT, OKUS, PBM, ME, LHT, PGA, 4L, PALI, MURA, LL, MUBA, BA	-Jumlah jenis barang dan jasa yang terawasi dalam peredarannya	4 - Jenis Barang	128,125,000
2.25.185	Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Besar (PBS/N)	Kab. Muara Enim, Banyuasin, Muba, OKU, OKUT, OKUS, OI, OKI, Lahat, PaGAR ALAM, MURA, EMPAT Lawang	- Jumlah kebun yang terawasi dan terbina	17 - Kebun PBS/N	100,000,000
2.25.183	Sekolah lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)	MUBA, OKUS, OI, OKUT, LAHAT	- Terlaksananya Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu	125 - orang	250,000,000
2.25.183	Pengendalian Penyakit Jamur Akar Putih (JAP) pada tanaman karet	Kabupaten Bokus, oki,muba	- Terlaksananya pengendalian Jamur Akar Putih	200 - Ha	300,000,000
2.25.180	Diversifikasi tanaman kopi, kakao/Lada	OKUS, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Pagar Alam	-Jumlah lahan kopi yang terdiversifikasi dengan lada	150 Ha	350,000,000
1.3.31	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Sungkai Ds.Bunga Mas Kec Sandang Aji	Kab OKUS	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	666 m'	1,000,000,000
1.3.30	Perkuatan Tebing Sungai di Desa Teluk Agung, Kec. Mekakau Ilir	Kab OKUS	bertambahnya panjang tebing sungai yang dilindungi	250 m'	1,600,000,000
1.3.30	Perkuatan tebing ds teluk agung kec mekakau ilir (lanjutan)	kab okus	bertambahnya panjang tebing sungai yang bebas longsor	250 m'	1,600,000,000
1.3.30	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Desa Muara Payang	KAB OKUS	BERTAMBAHNYA PANJANG TEBING SUNGAI YANG BEBAS LONGSOR	667 m'	4,000,000,000
1.3.30	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Desa Muara Payang	Desa Muara Payang Kab. OKUS	panjang tebing sungai yang dilindungi	667 m	4,000,000,000
1.4.37	OPTIMALISASI SPAM IKK SIMPANG MARTAPURA	KAB. OKU SELATAN	Jumlah SPAM IKK yang terbangun	1 IKK	1,000,000,000

2.31.236	- Pengembangan dan Bantuan Peralatan Industri Pengolahan Kopi	- OKU Selatan	- Jumlah pelaku usaha kopi yang mendapat pelatihan Ind. Pengolahan kopi	20 - Orang pelaku industri (1 KUB)+ Banper	100,000,000
2.25.181	Pengembangan Pupuk Organik	Kabupaten Lahat; OKU Selatan	- Terlaksananya pelatihan pembuatan pupuk organik	50 -orang	100,000,000
2.25.178	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	16 Kab./Kota (Banyuasin, OKU Timur, OKI, OKU, OKU Selatan, Ogan Ilir, Prabumulih, Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, Musi Rawas, Muratara, PALI, Empat Lawang, Musi Banyuasin dan Palembang)	Meningkatnya pemanfaatan pembiayaan program dan kredit komersial mendukung peningkatan produksi dan mutu produk	100 Kelompok	150,000,000
2.25.178	Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan	14 Kab./Kota (OKU Timur, Musi Rawas, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Muratara, PALI, OKU Selatan, Muara Enim dan OKU)	Jumlah Peralatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan : - Power Tresher (17 Unit) - Combine Harvester (2 Unit) - Terpal Jemur (225 Lembar)	244 Unit/Lembar	392,700,000
2.25.177	Pembinaan Pengembangan Pupuk Organik	5 Kab./Kota (Lahat, Pagar Alam, PALI, OKU Timur dan OKU Selatan)	Jumlah kelompoktani yang membuat pupuk organik	5 Kelompok	75,000,000
2.25.177	Penyediaan Sarana Pengembangan Pupuk Organik	5 Kab./Kota (Lahat, Pagar Alam, PALI, OKU Timur dan OKU Selatan)	Jumlah Alat Pembuat Pupuk Organik	5 Unit	180,000,000
2.25.177	Pengelolaan Infrastruktur Pertanian	Kabupaten OKI, Muara Enim, Lahat, OKU Selatan, OKU Timur dan Musi Rawas	Jumlah Kelompok P3A	132 Kelompok	200,000,000
2.25.177	Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian	Kabupaten OKU Selatan	Luas Jaringan Irigasi yang diperbaiki	100 Ha	260,000,000
1.3.27	Pengendalian rutin dan penanggulangan jalan dan jembatan wilayah II	Kab OKU, Kab. OKU Selatan	Jumlah titik rawan bencana	40 Paket	8,000,000,000
2.25.177	Dukungan Partisipasi Pemprov. Sumsel Terhadap Proyek Pembangunan/Rehabilitasi Sarana/Prasarana SDA Wilayah Irigasi (WISMP)	Musi Rawas, OKU selatan dan Lahat	Meningkatnya kemandirian perkumpulan petani pemakai air	15 Kelompok	80,000,000
2.29.221	Percontohan Budidaya Ikan Air Tawar	OKU Selatan	Jumlah Percontohan Budidaya Ikan Air Tawar	1 Keg	200,000,000
2.28.217	Dukungan Festival Danau Ranau	OKU Selatan	Jumlah wisatawan	200 Wisatawan	50,000,000
1.23.171	Pembelian satu Unit Organ Tunggal	Desa Tanjung batu Kec. warkuk Ranau Kab. Oku Selatan	Jumlah Peralatan Kepemudaan yang diberikan ke masyarakat	1 Paket	200,000,000
1.3.25	-Cor/beton jalan setapak	-Desa Simpang Pancur kec Pulau Beringin kab OKU	-	0 -	200,000,000

		Selatan			
1.3.25	-Cor/beton jalan setapak	-Desa Pulau Beringin Utara kec Pulau Beringin kab OKU Selatan	-	0 -	200,000,000
1.3.25	-Cor/beton jalan setapak	-Desa Suka Rena kec Tigadihaji kab OKU Selatan	-	0 -	250,000,000
1.6.51	-Cor/beton jalan setapak	-Desa Jago Rago kec Buana Pemaca kab OKU Selatan	-	0 -	250,000,000
1.3.29	-Pembuatan drainase/parit	-Desa Pedagan kec Muara Dua kab OKU Selatan	-	0 -	500,000,000
1.3.33	-Pembuatan drainase/parit	-Desa Tekana kec Buana Pemaca kab OKU Selatan	-	0 -	500,000,000
1.3.27	-Semenisasi jalan setapak	-Desa Gunung Aji kec Warkuk Ranau Selatan kab OKU Selatan	-	0 -	200,000,000
1.3.27	-Semenisasi jalan setapak	-Desa Tanjung Jati kec Warkuk Ranau Selatan kab OKU Selatan	-	0 -	500,000,000
1.3.27	-Semenisasi jalan setapak	Desa Kota Batu kec Warkuk Ranau Selatan kab OKU Selatan	-	0 -	500,000,000
1.3.31	-Pembangunan siring	-Desa Sukarami kec Buay Pematang Ribu Ranau Tengah kab OKU Selatan	-	0 -	200,000,000
1.3.31	-Pembangunan siring	-Desa Jepara kec Buay Pematang Ribu Ranau Tengah kab OKU Selatan	-	0 -	200,000,000
1.3.25	-Pembangunan jalan setapak pangkal jaya	-Desa Simpang Sender Tengah kec Buay Pematang Ribu Ranau Tengah kab OKU Selatan	-	0 -	200,000,000
1.3.25	-Pembangunan jalan setapak	-Desa Serumpun Jaya kec Buay Pematang Buay Pematang Ribu Ranau Tengah kab OKU Selatan	-	0 -	200,000,000
1.3.25	-Pembangunan jalan setapak	-Desa Jepara kec Buay Pematang Ribu Ranau Tengah kab OKU Selatan	-	0 -	200,000,000
1.3.25	-Pembangunan jalan setapak	-Desa Sipatuhu II kec Banding Agung kab OKU Selatan	-	0 -	200,000,000
1.3.25	-Pembangunan jalan setapak	-Desa Tanjung Agung kec Banding Agung kab OKU Selatan	-	0 -	200,000,000
1.3.25	-Pembangunan jalan setapak	Desa Sukarna Kec. Tiga Dihaji Kab Oku Selatan	-	0 -	200,000,000
1.3.25	-Pembangunan jalan setapak	-Desa Tanjung Kemala kec Buay Pematang Ribu Ranau Tengah kab OKU Selatan	-	0 -	200,000,000
1.3.25	-Pembangunan jalan setapak	-Desa Padang Ratu kec Buay Pematang Ribu Ranau Tengah kab OKU Selatan	-	0 -	200,000,000
1.3.25	-Pembangunan jalan setapak	-Desa Merbau kec Banding Agung kab OKU Selatan	-	0 -	200,000,000
1.3.25	-Pembangunan jalan setapak	-Desa Air Upik kec Banding Agung kab OKU Selatan	-	0 -	200,000,000

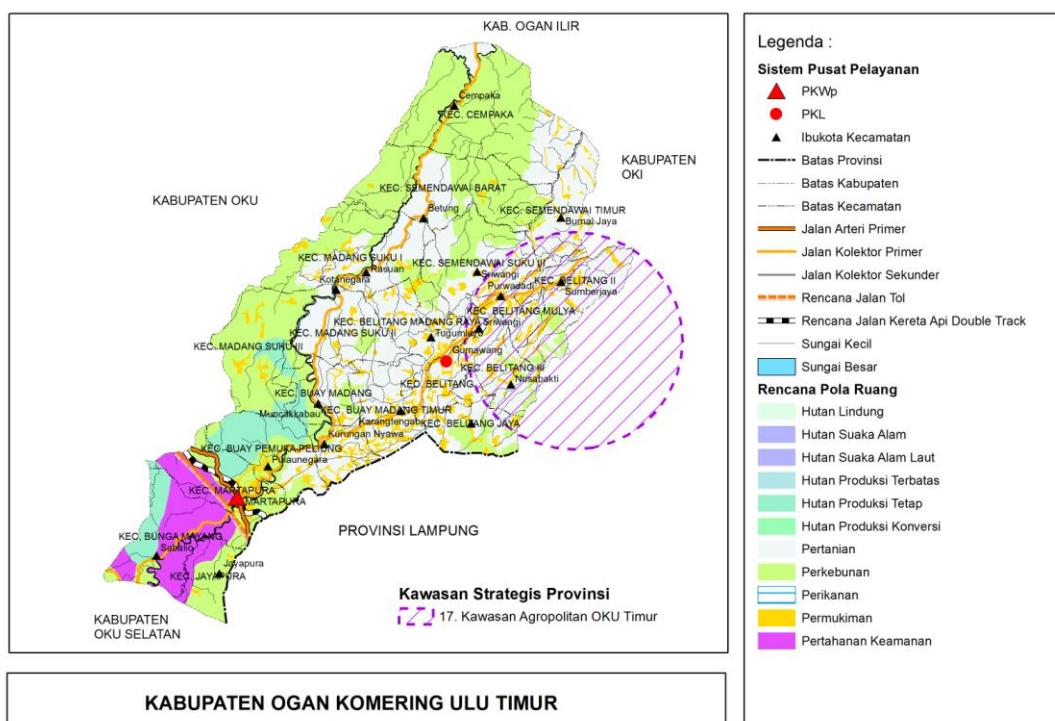
1.3.25	-Pembangunan jalan setapak	-Desa Kembang Bandung Kec Mekakau Ilir Kab kab OKU Selatan	-	0 -	200,000,000
1.3.33	-Pembangunan siring	-Desa Sukarami kec Buay Pematang Ribu Ranau Tengah kab OKU Selatan	-	0 -	200,000,000
1.3.33	-Pembangunan siring	-Kel Simpang Sender Ilir kec Buay Pematang Ribu Ranau Tengah kab OKU Selatan	-	0 -	200,000,000
1.7.57	-Pembangunan jalan setapak	-Desa Pardhasuka kec Buay Pematang Ribu Ranau Tengah kab OKU Selatan	-	0 -	200,000,000
1.3.25	-Pembangunan jalan setapak setingkul	-Desa Simpang Sender Utara kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah kabupaten OKU Selatan	-	0 -	200,000,000
1.3.25	- Pembangunan jalan setapak	- Desa Banding Agung kec Banding Kab OKU Selatan	-	0 -	200,000,000
1.3.34	Normalisasi Sungai Selabung Ds. Kuripan II, Kec Tigadihaji	Kabupaten OKU Selatan	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	250 M'	1,000,000,000
1.3.33	Normalisasi sungai Selabung	-Desa Kuripan 2 kec Tigadihaji kab OKU Selatan	-	0 -	1,000,000,000
1.6.46	Peningkatan DI Air Sungkai	Kab OKU Selatan	-	0 -	1,000,000,000
1.17.132	Pendampingan Pasca Inovasi (UKM berbasis inovasi, desa binaan)	OKU Selatan, Banyuasin, Palembang, Pagaralam	-	0 -	175,000,000
1.17.132	Inkubasi bisnis produk inovatif baru (kopi palm berstandar internasional)	OKU Selatan	-	0 -	100,000,000
					35,765,825,000

6.5.9 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang memiliki 1 PKWp (Martapura) dan 1 PKL (Gumawang) diarahkan sebagai sentra produksi pangan, khususnya komoditi padi, palawija, sayur-sayuran, buah-buahan, dan ternak sapi. Pertumbuhan komoditi-komoditi tersebut telah berkontribusi menjadikan sektor pertanian sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah di samping sektor perdagangan dan jasa-jasa. Oleh karena itu prioritas pembangunan diarahkan pada:

- Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi
- Peningkatan dukungan akses permodalan
- Peningkatan produktivitas usaha pertanian dengan fokus pada peningkatan penyuluhan, pemanfaatan bibit unggul, peningkatan jaminan distribusi pupuk dan alsintan
- Peningkatan dan pemeliharaan jalan produksi
- Dukungan pemberdayaan koperasi petani dan peternak

Gambar 6.28 :
Arah Pengembangan Kabupaten OKU Timur



Tabel 6.24 :
Alokasi Kegiatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2016

Nomor	Kegiatan	Lokasi	Indikator	Volume	Anggaran
1.2.9	Peningkatatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana	Pagar Alam ; PALI ; Muratara ; Empat Lawang ; Lahat ; OKU ; OKUT ; OKUS	-Jumlah pelayanan Kesehatan bagi pengungsi dan korban bencana di provinsi Sumsel	8 -Kejadian Bencana	250,000,000
1.10.69	Pembinaan Organisasi Sosial	Kab. Banyuasin; Kota Lubuk Linggau; Kab. OKUT; Kab. MUBA; Kab. OKI	terbinanya organisasi sosial dan terseleksinya orsos berprestasi	250 orang	80,000,000
2.30.226	- Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Palembang, OI, OKI, OKU, OKUT, OKUS, PBM, ME, LHT, PGA, 4L, PALI, MURA, LL, MUBA, BA	-Jumlah jenis barang dan jasa yang terawasi dalam peredarannya	4 - Jenis Barang	128,125,000
2.25.198	Penilaian Lomba PKA Wana Lestari	OKU, OKUT, Muba, Empat Lawang, Muara Enim, Lahat, Prabu, Pali, Mura, L. Linggau, Palembang	Jumlah Penyuluhan Kehutanan, KMDM, PKSM, KTH dan Desa Peduli Hutan	100 Persen	175,000,000
2.25.185	Pelatihan dan Pengembangan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) Petani Perkebunan	OKU, OI, Muratara, OKUT, MUBA, OKI,	- Terlaksananya pelatihan dan pengembangan SKE petani perkebunan	150 - Orang	150,000,000
2.25.185	Pembinaan dan Pengawalan Revitalisasi Perkebunan	Mura, Muratara, Prabumulih,OKI,OKU,O KUT,MUBA,M Enim, Banyuasin, Pali	- Jumlah petani, petugas dan perusahaan peserta revit perkebunan yang terbina	120 - Orang	100,000,000
2.25.185	Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Besar (PBS/N)	Kab. Muara Enim, Banyuasin, Muba, OKU, OKUT, OKUS, OI, OKI, Lahat, PaGAR ALAM, MURA, EMPAT Lawang	- Jumlah kebun yang terawasi dan terbina	17 - Kebun PBS/N	100,000,000
2.25.183	Sekolah lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)	MUBA, OKUS, OI, OKUT, LAHAT	- Terlaksananya Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu	125 - orang	250,000,000
2.25.181	Pengembangan Pembiayaan Usaha Perkebunan	Linggau, Mura, Prabu, B. Asin, OKUT, Muba, OI	- Terlaksananya pertemuan kelompok tani dengan lembaga keuangan/perbankan	10 - Kabupaten/Kota	100,000,000
1.19.156	Operasional Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	Kab/Kota. ME, PA, OKUT, OKI	jumlah sertifikasi Prima-3 dan pendaftaran PD pangan segar	4 komoditi	125,000,000
1.12.82	Optimalisasi Pemanfaatan Modal Bagi UMKMK	Palembang, OI, Muara Enim, OKUT, Pali	Jumlah Temu Mitra yang dilaksanakan	5 Kegiatan	200,000,000
1.3.26	-Jalan cor beton	-Desa Teko Rejo kecamatan Buay Madang Timur kabupaten OKUTimur	-	0 -	500,000,000
1.3.34	Normalisasi Anak	Kab OKUT	Panjang aliran	3000 m'	1,700,000,000

	Sungai Bul III		sungai yang dinormalisasi		
1.3.31	Pemeliharaan Sungai Adu Manis	Kab OKUT	Panjang sungai yang dipelihara	600 m'	200,000,000
1.3.34	Normalisasi Sungai Belitang (Lanjutan)	Kab OKUT	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	7500 m'	3,000,000,000
1.3.31	Pemeliharaan irigasi Kab OKUT	Kab OKUT	Panjang saluran irigasi yang dipelihara	2000 m'	2,500,000,000
1.3.31	Pemeliharaan irigasi Kec Belitang II Kec Semendawai Suku III	kab OKUT	Panjang saluran irigasi yang dipelihara	2000 m'	1,000,000,000
1.3.30	Perkuatan Tebing Sungai di Desa Mengkulak - Rasuan	Kab OKUT	panjang tebing sungai yang dilindungi	50 m'	5,000,000,000
1.3.30	Perkuatan Tebing Sungai Komering	kab OKUT	panjang tebing sungai yang dilindungi	200 m'	2,000,000,000
1.3.31	Peningkatan jalan inspeksi saluran sub sekunder Karang Binangun	-kab okut	bertambahnya daerah irigasi yang terpelihara	571.8 m'	285,902,000
1.3.31	Peningkatan jalan inspeksi saluran sub srimulyo	kab okut	bertambahnya daerah irigasi yang terpelihara	400 m'	200,000,000
1.3.31	Peningkatan jalan inspeksi saluran sub sekunder Karang Binangun	-kab okut	bertambahnya daerah irigasi yang terpelihara	400 m'	200,000,000
1.3.31	Review Desain D.I.R. Lebak Datuk	-KAB OKUT	BERTAMBAHNYA DOKUMEN PERENCANAAN	1 dokumen	636,000,000
1.3.31	Peningkatan jalan inspeksi saluran sub sekunder Karang Binangun	-Kec belitang madang raya kab OKUT	-	0 -	285,902,000
1.3.31	Peningkatan jalan inspeksi saluran sub srimulyo	-Kec belitang kab OKUT	-	0 -	200,000,000
1.3.31	Peningkatan jalan inspeksi saluran sub sekunder Karang Binangun	-kec belitang madang raya Kab OKUT	-	0 -	200,000,000
1.3.31	Review Desain D.I.R. Lebak Datuk	-Kab OKUT	-	0 -	686,000,000
1.20.159	Pembinaan dan Pemberdayaan Cadangan Pangan Pemerintahan Desa (CPPD)	OKU Timur	-Jumlah Kades yang dibina	60 -Orang	100,000,000
2.25.179	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pengurus kelembagaan Petani	UPTD BPSDM Pertanian Martapura Kabupaten OKU Timur ;	Jumlah pengurus kelembagaan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	120 Orang	320,000,000
2.25.179	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Petugas Teknis Pertanian Non PNS	UPTD BPSDM Pertanian Martapura Kabupaten OKU Timur	Jumlah petugas pertanian Non PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	90 Orang	240,000,000
2.25.179	Pendidikan dan Pelatihan Bagi	UPTD BPSDM Pertanian Martapura Kabupaten	Jumlah petugas pertanian PNS yang	90 Orang	240,000,000

	Petugas Teknis Pertanian PNS	OKU Timur	mengikuti pendidikan dan pelatihan		
2.25.179	Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Pendidikan dan Pelatihan	UPTD BPSDM Pertanian Martapura Kabupaten OKU Timur	Demplot dan kebun praktek tanaman pangan dan hortikultura	5 Unit	200,000,000
2.25.178	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	16 Kab./Kota (Banyuasin, OKU Timur, OKI, OKU, OKU Selatan, Ogan Ilir, Prabumulih, Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, Musi Rawas, Muratara, PALI, Empat Lawang, Musi Banyuasin dan Palembang)	Meningkatnya pemanfaatan pembiayaan program dan kredit komersial mendukung peningkatan produksi dan mutu produk	100 Kelompok	150,000,000
2.25.178	Peningkatan Penanganan Pasca Panen Hortikultura	3 Kab./Kota (Pagar Alam, OKU Timur dan Lahat)	Jumlah kelompok tani yang dibina untuk melaksanakan penanganan pascapanen hortikultura berbasis GHP	3 Kelompok	65,000,000
2.25.178	Peningkatan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, OKI, Musi Rawas dan OKU Timur	Jumlah kelompok tani yang dibina untuk melaksanakan pengolahan hasil tanaman pangan berbasis GMP	13 Kelompok	200,000,000
2.25.178	Peningkatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan	14 Kab./Kota (OKU Timur, Musi Rawas, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Muratara, PALI, OKU Selatan, Muara Enim dan OKU)	Jumlah Kelompoktani yang dibina untuk melaksanakan penanganan pasca panen tanaman pangan	28 Kelompok	200,000,000
2.25.178	Pengadaan Alat Pasca Panen Hortikultura	3 Kab./Kota (Pagar Alam, OKU Timur dan Lahat)	Jumlah peralatan penanganan pascapanen hortikultura :- Keranjang (111 Unit)- Roda 3 (1 Unit)	112 Unit	135,000,000
2.25.178	Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, OKI, Musi Rawas dan OKU Timur	Jumlah peralatan pengolahan hasil tanaman pangan : - RMU (5 Unit) - Mesin Pemipil Jagung (6 Unit) - Mesin Penepung Jagung (2 Unit)	13 Unit	700,000,000

2.25.178	Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan	14 Kab./Kota (OKU Timur, Musi Rawas, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Muratara, PALI, OKU Selatan, Muara Enim dan OKU)	Jumlah Peralatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan : - Power Tresher (17 Unit) - Combine Harvester (2 Unit) - Terpal Jemur (225 Lembar)	244 Unit/Lembar	392,700,000
2.25.177	Pembinaan Pengembangan Pupuk Organik	5 Kab./Kota (Lahat, Pagar Alam, PALI, OKU Timur dan OKU Selatan)	Jumlah kelompoktani yang membuat pupuk organik	5 Kelompok	75,000,000
2.25.177	Penyediaan Sarana Pengembangan Pupuk Organik	5 Kab./Kota (Lahat, Pagar Alam, PALI, OKU Timur dan OKU Selatan)	Jumlah Alat Pembuat Pupuk Organik	5 Unit	180,000,000
2.25.177	Pengelolaan Infrastruktur Pertanian	Kabupaten OKI, Muara Enim, Lahat, OKU Selatan, OKU Timur dan Musi Rawas	Jumlah Kelompok P3A	132 Kelompok	200,000,000
2.25.175	Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	11 Kab./Kota (Ogan Ilir, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, OKU Timur, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Lubuk Linggau dan OKU)	Luas Penangkaran Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang disertifikasi : - Padi (400 Ha) - Buah-buahan (30.000 Btg) - Sayuran (15 Ton)	400 Ha	640,000,000
2.25.175	Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	13 Kab./Kota (Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, OKI, OKU, OKU Timur, Lahat, Muara Enim, Empat Lawang, Musi Rawas, Pagar Alam Lubuk Linggau dan PALI)	Jumlah Produsen/Penyalur Pedagang Benih yang diawasi	1 Unit	100,000,000
2.25.175	Pengelolaan Penangkaran Benih Tanaman Pangan	11 Kab./Kota (Ogan Ilir, OKI, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Musi Rawas, Banyuasin, OKU Timur dan Musi Banyuasin)	Pengelolaan ketersediaan benih di produsen, penangkar dan pengecer	400 Ton	209,800,000
2.25.175	Penyediaan Sarana Pengelolaan Penangkaran Benih Tanaman Pangan	11 Kab./Kota (Ogan Ilir, OKI, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Musi Rawas, Banyuasin, OKU Timur dan Musi Banyuasin)	Ketersediaan Benih Tanaman Pangan yang unggul dan bersertifikat	5000 Kg	1,176,225,000
2.25.175	Pengelolaan Penyediaan Benih Padi di Balai Benih Induk	Kabupaten Banyuasin dan OKU Timur	Meningkatnya Ketersediaan Benih Tanaman Pangan yang unggul dan bersertifikat	28 Ha	628,900,000

2.25.175	Pembangunan/Rehab Gedung dan Sarana Prasarana Pendukung Lainnya pada UPTD Balai Perbanyak Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dak dan Pendampingan)	BBIH Sijacarana (OKU Timur) dan Kota Palembang	Jumlah Bangunan yang direhab/diperbaiki	2 Unit	150,000,000
2.25.174	Penyediaan Sarana Produksi Pengelolaan Tanaman Sayuran	Kab. Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, OKU Timur, Palembang dan Pagar Alam	Meningkatnya luas tanam sayuran	19 Ha	450,000,000
2.25.173	Pemasyarakatan Benih Unggul Tanaman Pangan untuk Peningkatan Produksi dan Produktivitas	Kabupaten OKU Timur, Muara Enim, PALI, Lahat,	Jumlah Unit Percontohan	4 Demplot	150,000,000
2.25.173	Penyediaan Sarana Produksi Pemasyarakatan Benih Unggul Tanaman Pangan	Kabupaten OKU Timur, Muara Enim, PALI, Lahat,	Jumlah Sarana Produksi yang diserahkan kepada masyarakat	1700 Kg	200,000,000
2.25.173	Pengelolaan Aneka Tanaman Kacang dan Umbi	Kabupaten Banyuasin,OKU Timur, PALI	Jumlah Kelompok Tani yang menerapkan pengelolaan aneka tanaman kacang dan umbi	4 Kelompok	98,000,000
2.25.173	Penyediaan Sarana Produksi Pengelolaan Aneka Tanaman Kacang dan Umbi	Kabupaten Banyuasin, PALI dan OKU Timur	Jumlah Bantuan Benih	602500 kg/stek	161,750,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palembang dan OKU Timur	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	37,000,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Palembang dan Kabupaten OKU Timur	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3 Jenis	49,220,000
1.17.144	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palembang dan Kabupaten OKU Timur	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada dinas dan uptd	5 Jenis	150,000,000
1.17.143	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri	Kota Palembang dan Kabupaten OKU Timur	Tersedianya perjalanan menghadiri rapat koordinasi, perencanaan dan Konsultasi ke Luar Daerah	230 Kali	500,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Kota Palembang, Kabupaten OKU Timur, Lahat dan Banyuasin	Tersedianya jasa tenaga kerja jaga malam kantor dinas dan UPTD	28 Orang	718,900,000

1.17.143	Penyediaan Jasa Tutor SKJ	Kota Palembang dan Kabupaten OKU Timur	Tersedianya Jasa tutor SKJ pada dinas dan UPTD	220 Kali	66,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa pendukung administrasi teknis/perkantoran	Kota Palembang dan Kabupaten OKU Timur	Tersedianya jasa tenaga kerja pendukung administrasi teknis/ perkantoran pada dinas dan UPTD	19 Orang	487,825,000
1.17.143	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Palembang dan Kabupaten OKU Timur	-Tersedianya makanan dan minuman pada dinas dan UPTD	106 kali	130,240,000
1.17.143	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Kota Palembang dan Kabupaten OKU Timur	Tersediannya Bahan Bacaan dinas dan UPTD	2 Jenis	100,000,000
1.17.143	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palembang dan Kabupaten OKU Timur	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dinas dan upto	12 Jenis	50,000,000
1.17.143	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Palembang dan Kabupaten OKU Timur	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan pada dinas dan upto	15 Jenis	112,500,000
1.17.143	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Palembang dan Kabupaten OKU Timur	Tersedianya alat tulis kantor pada dinas dan upto	25 Jenis	183,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kota Palembang dan Kabupaten OKU Timur	Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor	13 Orang	333,775,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Palembang dan Kabupaten OKU Timur	Tersedianya jasa administrasi keuangan	24 Orang	84,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OPerasional	Kota Palembang dan Kabupaten OKU Timur	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	221 Unit	1,511,920,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Kota Palembang dan Kabupaten OKU Timur	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	19 Unit	92,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palembang dan Kabupaten OKU Timur	Jumlah layanan Komunikasi, Air dan Listrik pada Dinas dan 4 UPTD	54 Rekening	601,290,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Palembang dan Kabupaten OKU Timur	Jumlah Pengiriman Surat menyurat pada Dinas dan UPTD	130 Eksemplar	7,270,000
1.3.25	Peningkatan Jalan Simpang Kepuh-Kurungan Nyawa	OKU Timur	Panjang jalan yang ditingkatkan/dilebar kan	3 km	7,600,000,000
1.3.26	Jalan cor beton Desa Rejosari kecamatan Belitang Jaya kabupaten OKU Timur	OKU Timur	-	0 -	200,000,000
1.3.26	Jalan cor beton Desa Rejosari Jaya kecamatan Belitang Jaya kabupaten OKU Timur	OKU Timur	-	0 -	200,000,000

1.3.26	Cor jalan desa Nikan kec. Madang Suku III	Kab OKU Timur	-	0 -	4,000,000,000
1.3.27	Perbaikan jalan/cor beton	Desa Tebing Sari kec. BMR kab OKU Timur	-	0 -	1,000,000,000
1.3.25	Pembangunan jalan lingkungan	Desa Bina Amarta kec Madang Suku III kab OKU Timur	-	0 -	1,000,000,000
1.3.27	Perbaikan jalan/cor beton	Desa Tebing Sari kec. BMR kab OKU Timur	-	0 -	1,000,000,000
1.3.26	Peningkatan jalan lingkungan cor beton	Desa Purwodadi kec Belitang Mulia kab OKU Timur	-	0 -	500,000,000
1.3.26	Peningkatan jalan lingkungan cor beton	Desa Tebat Jaya kec Buay Madang kab OKU Timur	-	0 -	500,000,000
1.3.26	Peningkatan jalan lingkungan cor beton	Desa Sukarame kec Belitang kab OKU Timur	-	0 -	500,000,000
1.3.26	Peningkatan jalan lingkungan cor beton	Desa Kurungan Nyawa I kec Buay Madang kab OKU Timur	-	0 -	500,000,000
1.3.26	Peningkatan jalan lingkungan cor beton	Desa Sukodadi kec Buay Madang Timur kab OKU Timur	-	0 -	200,000,000
1.3.26	Peningkatan jalan lingkungan cor beton	Desa Karsa Jaya kec Belitang Jaya kab OKU Timur	-	0 -	200,000,000
1.3.26	Peningkatan jalan lingkungan cor beton	Desa Lubuk Harjo kec Belitang Madang Raya kab OKU Timur	-	0 -	200,000,000
1.3.26	Peningkatan jalan lingkungan cor beton	Desa Mendah kec Jayapura kab OKU Timur	-	0 -	200,000,000
1.3.26	Peningkatan jalan lingkungan cor beton	Desa Pengandonan kec Buay Madang kab OKU Timur	-	0 -	200,000,000
1.3.26	Peningkatan jalan lingkungan cor beton	Desa Aman Jaya kec Buay Madang kab OKU Timur	-	0 -	200,000,000
1.3.26	Peningkatan jalan lingkungan cor beton	Dusun Pencil desa Mujo Rahayu kec Semendawai Suku III kab OKU Timur	-	0 -	200,000,000
1.3.26	Peningkatan jalan lingkungan cor beton	Desa Sridadi kec Buay Madang kab OKU Timur	-	0 -	200,000,000
1.3.26	Peningkatan jalan lingkungan cor beton	Desa Agung Jaya kec Buay Madang kab OKU Timur	-	0 -	200,000,000
1.3.26	Peningkatan jalan lingkungan cor beton	Desa Tanjung Agung kec Buay Madang Timur kab OKU Timur	-	0 -	200,000,000
1.3.26	-Peningkatan jalan lingkungan cor beton	Desa Sukosari kec Belitang kab OKU Timur	-	0 -	200,000,000
1.3.26	Peningkatan jalan lingkungan cor beton	Desa Sumber Suko Jaya kec Belitang kab OKU Timur	-	0 -	200,000,000
1.3.26	Peningkatan jalan lingkungan cor beton	Desa Sumber Makmur kec Belitang Jaya kab OKU Timur	-	0 -	200,000,000
1.3.26	Peningkatan jalan lingkungan cor beton	Desa Windu Sari kec Belitang Jaya kab OKU Timur	-	0 -	200,000,000

1.3.26	Peningkatan jalan lingkungan cor beton	Desa Cahya Negeri kec Semendawai Suku III kab OKU Timur	-	0 -	200,000,000
1.3.26	Peningkatan jalan lingkungan cor beton	Desa Melati Agung kec Semendawai Timur kab OKU Timur	-	0 -	200,000,000
1.3.26	-Jalan cor beton	-Desa Tri Karya kecamatan Belitang III kabupaten OKU Timur	-	0 -	500,000,000
1.3.26	Peningkatan jalan lingkungan cor beton	Desa Sriwangi Ulu kec Semendawai Suku III kab OKU Timur	-	0 -	200,000,000
1.3.26	-Jalan cor beton	-Desa Gumuk Rejo kecamatan Buay Madang Timur kabupaten OKU Timur	-	0 -	200,000,000
1.3.29	Peningkatan jalan lingkungan cor beton	Desa Burnai Mulia kec Semendawai Timur kab OKU Timur	-	0 -	200,000,000
1.3.26	-Jalan cor beton	-Desa Wonodadi Asri kecamatan Buay Madang Timur kabupaten OKU Timur	-	0 -	200,000,000
1.3.26	-Jalan cor beton	-Desa Wana Makmur kecamatan Semendawai Timur kabupaten OKU Timur	-	0 -	200,000,000
1.3.26	-Jalan cor beton	-Desa Nirwana kecamatan Semendawai Timur kabupaten OKU Timur	-	0 -	200,000,000
1.3.26	Peningkatan jalan lingkungan cor beton	Desa Wana Sari kecamatan Semendawai Timur kabupaten OKU Timur	-	0 -	200,000,000
1.3.26	-Jalan cor beton	-Desa Wana Jaya kecamatan Semendawai Timur kabupaten OKU Timur	-	0 -	200,000,000
1.3.26	Peningkatan jalan lingkungan cor beton	Desa Bunga Mayang kec Jayapura kab OKU Timur	-	0 -	200,000,000
1.3.26	-Jalan cor beton	-Desa Harapan Makmur kecamatan Semendawai Timur kabupaten OKU Timur	-	0 -	200,000,000
1.3.26	-Jalan cor beton	-Desa Wanasisari kecamatan Semendawai Timur kabupaten OKU Timur	-	0 -	200,000,000
1.3.26	-Jalan cor beton	-Desa Girimulyo kecamatan Belitang Jaya kabupaten OKU Timur	-	0 -	200,000,000
1.3.26	-Jalan cor beton	-Desa Pujorahayu kecamatan Belitang kabupaten OKU Timur	-	0 -	200,000,000
1.3.26	-Jalan cor beton	-Desa Kurungan Nyawa 1 Buay Madang kabupaten OKU Timur	-	0 -	200,000,000
1.3.26	-Jalan cor beton	-Desa Tanjung Raya kecamatan Belitang kabupaten OKU Timur	-	0 -	400,000,000

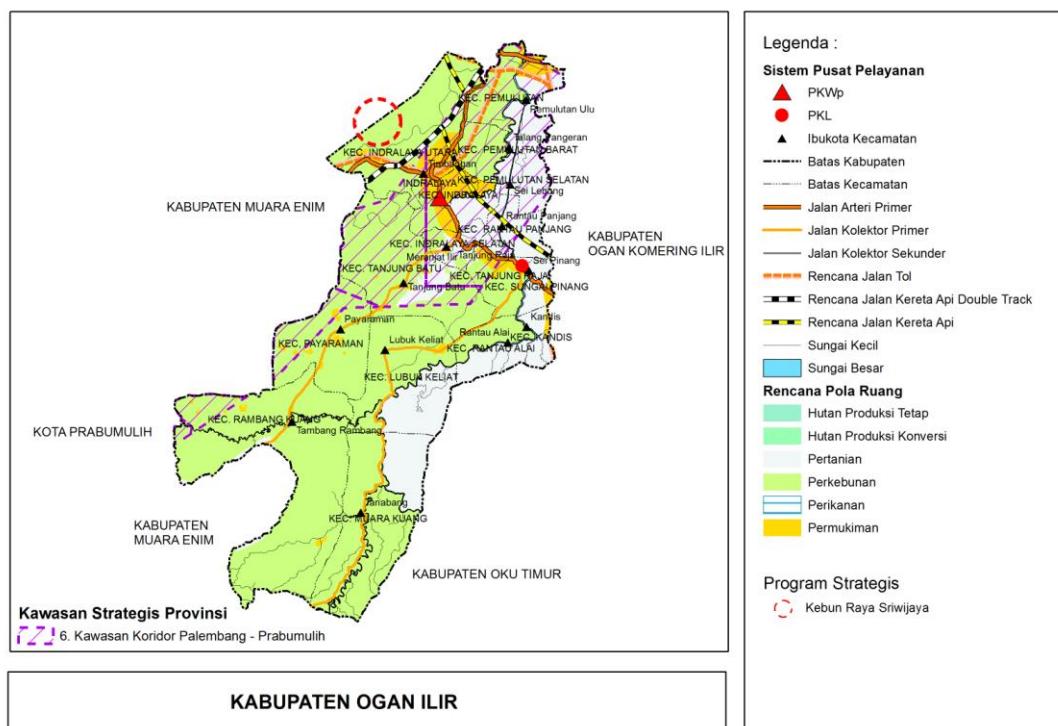
1.3.26	-Jalan cor beton	-Desa Harjo Winangun kecamatan Belitang kabupaten OKU Timur	-	0 -	200,000,000
1.3.26	-Jalan cor beton	-Desa Muda Sentosa kecamatan Buay Madang kabupaten OKU Timur	-	0 -	200,000,000
1.3.31	-Pembangunan siring pembuangan air	Desa Sidomulyo kecamatan Belitang kabupaten OKU Timur	-	0 -	500,000,000
1.3.31	-Pembangunan siring pembuangan air	-Desa Gedung Rejo kecamatan Belitang kabupaten OKU Timur	-	0 -	200,000,000
1.3.31	-Pembangunan siring pembuangan air	-Desa Sukajadi kecamatan Belitang kabupaten OKU Timur	-	0 -	200,000,000
1.3.26	-Pelebaran jalan dan pengerasan	-Desa Tunggal Jaya-Panca Tunggal kecamatan Belitang Jaya kabupaten OKU Timur	-	0 -	400,000,000
1.3.27	-Penimbunan dan pengerasan jalan	-Desa Argokoyo (Jalan Argopeni) kecamatan Belitang Jaya kabupaten OKU Timur	-	0 -	500,000,000
1.3.34	Normalisasi Anak Sungai Komering	Kab. OKU Timur	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	7000 M'	2,800,000,000
1.3.34	Normalisasi Anak Sungai Bul III	Kabupaten OKU Timur	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	3000 M'	1,700,000,000
1.3.31	Operasi dan pemeliharaan irigasi	Kec Belitang II kec Semendawai Suku III kab OKU Timur	-	0 -	1,000,000,000
1.3.31	Operasi dan pemeliharaan irigasi	Kab OKU Timur	-	0 -	2,500,000,000
1.3.33	-Normalisasi Sungai Belitang	-Kab OKU Timur	-	0 -	4,000,000,000
					70,929,244,000

6.5.10 Kabupaten Ogan Ilir

Pengembangan Kabupaten Ogan Ilir yang memiliki 1 PKWp (Indralaya) dan 1 PKL (Tanjung Raja) diarahkan untuk memantapkan perannya sebagai sentra produksi pangan dan daerah penyangga perkotaan Palembang dan Prabumulih. Komoditi unggulan daerah adalah hortikultura buah-buahan, sayur-sayuran, padi dan ternak sapi. Namun demikian sumber pertumbuhan ekonomi daerah dalam beberapa tahun terakhir adalah jasa-jasa, bangunan, dan perdagangan. Hal ini menggambarkan besarnya pengaruh kegiatan di daerah tetangga Palembang dan Prabumulih. Oleh karena itu prioritas pembangunan diarahkan pada:

- Percepatan pembangunan jalan tol Palembang-Inderalaya
- Pembangunan Kebun Raya, pemanfaatan lahan eks ATP.
- Pembangunan & pemeliharaan jaringan irigasi
- Peningkatan produktivitas usaha pertanian dengan fokus pada kegiatan penyuluhan, pemanfaatan bibit/benih unggul, peningkatan jaminan distribusi pupuk dan alsintan
- Peningkatan infrastruktur jalan produksi
- Pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya alih fungsi lahan pertanian beririgasi teknis
- Peningkatan akses pendidikan menengah dan kesehatan

Gambar 6.29 :
Arah Pengembangan Kabupaten Ogan Ilir



Tabel 6.25 :
Alokasi Kegiatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016

Nomor	Kegiatan	Lokasi	Indikator	Volume	Anggaran
1.17.110	Pemantauan dan Evaluasi Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Provinsi Sumatera Selatan.	Ogan Ilir, Banyuasin, Lahat, Musi Rawas, dan Ogan Komering Ulu	Jumlah KTM yang terevaluasi	5 Kabupaten	30,000,000
1.2.14	Penyemprotan fogging sarang nyamuk	- Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Lahat; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Ogan Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Prabumulih;	-Jumlah fogging fokus pemberantasan penyakit DBD	135 Fokus	300,000,000
1.15.97	Dukungan Peralatan Olahraga untuk Masyarakat	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Pagar Alam; Kota Palembang; Kota Prabumulih;	Jumlah peralatan olahraga untuk masyarakat	40 Klub/Karang Taruna	190,000,000
1.15.97	Dukungan peralatan olahraga untuk pondok pesantren di Sumsel	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Pagar Alam; Kota Palembang;	Jumlah ponpes di Provinsi Sumatera Selatan yang mendapat bantuan peralatan olahraga	25 Pondok Pesantren	190,000,000
1.10.70	Fasilitasi Taruna Siaga Bencana (Tagana), Petugas Penata Usahaan Gudang Logistik, dan Petugas Posko	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten	Terpenuhinya tali asih dan Uniform TAGANA, Petugas Penata Usahaan Gudang Logistik, dan Petugas POSKO Kesiap Siagaan Bencana Bidang Perlindungan Sosial	945 orang	1,412,800,000

		Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Pagar Alam; Kota Palembang; Kota Prabumulih;			
1.10.69	Fasilitasi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)	- Kota Pagar Alam; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muratara; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kota Prabumulih; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kota Palembang; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu;	ersedianya tali asih bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	228 orang	730,000,000
1.10.67	Pemberdayaan Fakir Miskin	Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Musi Rawas;	Tersalurkannya bantuan pemberdayaan keluarga Fakir miskin dlm bentuk KUBE	600 -kk	1,450,000,000
2.29.221	Paket Sarana dan Prasarana Budidaya di Desa Model dan Lumbung Pangan	Palembang, Banyuasin, Ogan Ilir, PALI, Mura	Jumlah sarana dan prasarana budidaya di desa model dan desa lumbung pangan	5 Paket	150,000,000
2.25.198	Pendampingan Mitigasi Kebakaran Hutan	- Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Muara Enim;	-Jumlah penyuluh dan Masyarakat Hutan yang terlatih	100 Persen	125,000,000
2.25.197	Diseminasi Pengolahan Hasil Perikanan	- Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;	Jumlah Penyuluh, kelompok yang mendapatkan pelatihan pengolahan hasil Perikanan	100 Persen	200,000,000
2.25.196	Pengembangan Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan	- Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Lahat;	Jumlah POKTU, Pelaku Usaha Perikanan yang ditingkatkan klasifikasinya	100 Persen	200,000,000
2.25.188	Pelestarian Flasma Nutfah	Kab. Ogan Ilir	Jumlah kab untuk penangkaran Itik pegagan	1 kab	300,000,000
2.25.188	Pengembangan ternak integrasi tanaman	Kab. Ogan Ilir	Jumlah Kwitansi pembayaran jenis barang yang akan diserahkan	3 kwitansi	2,020,000,000

			kepada masyarakat		
2.25.186	Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Empat Lawang, Muratara, MUBA, Ogan Ilir	- Terlaksananya bantuan bibit kelapa sawit rakyat	10000 - batang	500,000,000
1.17.151	-Difusi teknologi padi organik	-Ogan Ilir	-jumlah teknologi	1 -teknologi	85,000,000
1.12.79	Pertumbuhan Usaha Baru	Ogan Ilir	Jumlah Usaha Baru yang mendapatkan bantuan	20 UKM	350,000,000
2.25.178	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	16 Kab./Kota (Banyuasin, OKU Timur, OKI, OKU, OKU Selatan, Ogan Ilir, Prabumulih, Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, Musi Rawas, Muratara, PALI, Empat Lawang, Musi Banyuasin dan Palembang)	Meningkatnya pemanfaatan pembiayaan program dan kredit komersial mendukung peningkatan produksi dan mutu produk	100 Kelompok	150,000,000
2.25.178	Peningkatan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, OKI, Musi Rawas dan OKU Timur	Jumlah kelompok tani yang dibina untuk melaksanakan pengolahan hasil tanaman pangan berbasis GMP	13 Kelompok	200,000,000
2.25.178	Peningkatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan	14 Kab./Kota (OKU Timur, Musi Rawas, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Muratara, PALI, OKU Selatan, Muara Enim dan OKU)	Jumlah Kelompoktani yang dibina untuk melaksanakan penanganan pasca panen tanaman pangan	28 Kelompok	200,000,000
2.25.178	Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, OKI, Musi Rawas dan OKU Timur	Jumlah peralatan pengolahan hasil tanaman pangan : - RMU (5 Unit) - Mesin Pemipil Jagung (6 Unit) - Mesin Penepung Jagung (2 Unit)	13 Unit	700,000,000
2.25.178	Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan	14 Kab./Kota (OKU Timur, Musi Rawas, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Muratara, PALI, OKU Selatan, Muara Enim dan OKU)	Jumlah Peralatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan : - Power Tresher (17 Unit) - Combine Harvester (2 Unit) - Terpal Jemur (225 Lembar)	244 Unit/Lembar	392,700,000

2.25.175	Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	11 Kab./Kota (Ogan Ilir, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, OKU Timur, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Lubuk Linggau dan OKU)	Luas Penangkaran Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang disertifikasi :- Padi (400 Ha)- Buah-buahan (30.000 Btg)- Sayuran (15 Ton)	400 Ha	640,000,000
2.25.175	Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	13 Kab./Kota (Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, OKI, OKU, OKU Timur, Lahat, Muara Enim, Empat Lawang, Musi Rawas, Pagar Alam Lubuk Linggau dan PALI)	Jumlah Produsen/Penyalur Pedagang Benih yang diawasi	1 Unit	100,000,000
2.25.175	Pengelolaan Penangkaran Benih Tanaman Pangan	11 Kab./Kota (Ogan Ilir, OKI, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Musi Rawas, Banyuasin, OKU Timur dan Musi Banyuasin)	Pengelolaan ketersediaan benih di produsen, penangkar dan pengecer	400 Ton	209,800,000
2.25.175	Penyediaan Sarana Pengelolaan Penangkaran Benih Tanaman Pangan	11 Kab./Kota (Ogan Ilir, OKI, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Musi Rawas, Banyuasin, OKU Timur dan Musi Banyuasin)	Ketersediaan Benih Tanaman Pangan yang unggul dan bersertifikat	5000 Kg	1,176,225,000
2.25.174	Pengelolaan Produksi Tanaman Sayuran	Kabupaten Banyuasin, Muara Enim, Musi rawas, Ogan ilir, OKI,	Meningkatnya Pengelolaan Produksi Tanaman Sayuran	19 Ha	432,525,000
2.25.174	Penyediaan Sarana Produksi Pengelolaan Tanaman Sayuran	Kab. Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, OKU Timur, Palembang dan Pagar Alam	Meningkatnya luas tanam sayuran	19 Ha	450,000,000
1.3.25	Peningkatan Jalan SP Meranjat - Bts. Kab. Muara Enim	kab Ogan Ilir	Panjang jalan yang ditingkatkan/dile barkan	2 km	5,000,000,000
2.29.220	Pembinaan Pokmaswas	OKI, Banyuasin, Muba, Ogan Ilir	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan	4 kab/kota	70,000,000
1.3.25	Pembangunan gorong-gorong kota Mandiri Terpadu kec. Indralaya Utama desa Rambutan Ogan Ilir	Desa Rambutan Ogan Ilir	-	0 -	200,000,000
1.3.26	Jalan cor beton perbatasan kel. Tj Batu dan Tj Batu Timur, dari masjid Walimah ke masjid Al Falah kel Tj Batu	-Kab Ogan Ilir	-	0 -	1,300,000,000
1.3.34	Pembuatan Embung (Kolam) Ds.Limbang Jaya, Kec Tanjung Batu	Kabupaten Ogan Ilir	Luas Kolam yang dibangun	325 M2	1,300,000,000

1.3.34	Normalisasi Sungai Ds.Limbang Jaya dan Ds.Tanjung Pinang, Kec Tanjung Batu	Kabupaten Ogan Ilir	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	175 M'	700,000,000
1.3.34	Normalisasi Sungai Ds.Sri Banding, Kec Pemulutan Barat	Kabupaten Ogan Ilir	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	375 M'	1,500,000,000
1.3.34	Normalisasi Sungai di Ds. Lebak Bakung	Kabupaten Ogan Ilir	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	3000 M'	1,800,000,000
1.3.34	Normalisasi sungai Simpang Pelabuhan Dalam	Kabupaten Ogan Ilir	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	3000 M'	1,500,000,000
1.3.30	Penimbunan Bantaran Sungai Tanjung Tambak, Tanjung Batu, Limbang Jaya	-Kab Ogan Ilir	PANJANG TEBING SUNGAI YANG DILINDUNGI	333 m'	2,000,000,000
1.3.30	Penimbunan Bantaran Sungai Tanjung Tambak, Tanjung Batu, Limbang Jaya	-Kab Ogan Ilir	PANJANG TEBING SUNGAI YANG DILINDUNGI	333 m'	2,000,000,000
1.3.30	Penimbunan Bantaran Sungai Penesak	Kab Ogan Ilir	PANJANG TEBING SUNGAI YANG DILINDUNGI	417 m'	2,500,000,000
1.3.31	Review Desain D.I.R. Lbk Bakung	Kab Ogan Ilir	-	0 -	1,041,250,000
1.3.33	Penimbunan bantaran sungai Penesak kab Ogan Ilir	Kab Ogan Ilir	-	0 -	2,500,000,000
1.17.151	Pembuatan Sertifikat Tanah di (STP-ATP)	Ogan Ilir	-	0 -	300,000,000
1.17.151	Operasional Teknis Science Technopark (STP-ATP)	Ogan Ilir	-	0 -	700,000,000
1.17.151	Operasional Teknis Kebun Raya Sriwijaya Sumsel	Ogan Ilir	-	0 -	300,000,000
1.17.151	Datasering kebun raya Sumsel	Ogan Ilir	-	0 -	200,000,000
1.17.144	Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Kebun Raya	Ogan Ilir	-	0 -	200,000,000
1.10.72	Pemadaman darat akibat kebakaran hutan dan lahan	Kab OKI, OI, Banyuasin, MUBA, Muara Enim dan Kota Palembang	Jumlah Pemadaman darat akibat kebakaran hutan dan lahan	30 titik api (hotspot)	1,200,000,000
1.10.67	Pemberdayaan Keluarga Rentan	Kab. MUBA; Kab. OI; Kota Palembang	Tersedianya Usaha Ekonomi Produktif bagi Keluarga Rentan	150 kk	500,000,000
2.30.232	- Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Bersertifikasi Surat Keterangan Asal (SKA) dan Angka Pengenal Importir (API)	- PLG, OI, ME, BA, MUBA	- Jumlah sertifikasi Surat Keterangan Asal (SKA) dan Angka Pengenal Importir (API) perusahaan yang dimonev	120 - 50 SKA, 70 API	75,000,000

2.30.226	- Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Palembang, OI, OKI, OKU, OKUT, OKUS, PBM, ME, LHT, PGA, 4L, PALI, MURA, LL, MUBA, BA	-Jumlah jenis barang dan jasa yang terawasi dalam peredarannya	4 - Jenis Barang	128,125,000
2.29.220	Operasional Pengawasan Terpadu Sumber Daya Ikan di Perairan Umum dan Laut	MUBA, OKI, OI, Lahat, Muara Enim, Banyuasin	Jumlah operasional pengawasan terpadu yang telah dilaksanakan dengan pihak ALRI dan Polisi Perairan	6 Kab/Kota	84,515,000
2.25.185	Pelatihan dan Pengembangan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) Petani Perkebunan	OKU, OI, Muratara, OKUT, MUBA, OKI,	- Terlaksananya pelatihan dan pengembangan SKE petani perkebunan	150 - Orang	150,000,000
2.25.185	Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Besar (PBS/N)	Kab. Muara Enim, Banyuasin, Muba, OKU, OKUT, OKUS, OI, OKI, Lahat, PaGAR ALAM, MURA, EMPAT Lawang	- Jumlah kebun yang terawasi dan terbina	17 - Kebun PBS/N	100,000,000
2.25.183	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)	MUBA, OKUS, OI, OKUT, LAHAT	- Terlaksananya Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu	125 - orang	250,000,000
2.25.183	Pengendalian Penyakit Kering Alur Sadap	Kota Prabumulih, b asin, oku, m enim, oi, muba,	- Terlaksananya pengendalian kering alur sadap	500 - Ha	400,000,000
2.25.181	Pengembangan Pembiayaan Usaha Perkebunan	Linggau, Mura, Prabu, B. Asin, OKUT, Muba, OI	- Terlaksananya pertemuan kelompok tani dengan lembaga keuangan/perbankan	10 - Kabupaten/Kota	100,000,000
1.12.83	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Koperasi	Pali, Banyuasin, Empat Lawang, OI, Lahat	Jumlah Peserta Temu Usaha	200 Orang	200,000,000
1.12.82	Optimalisasi Pemanfaatan Modal Bagi UMKMK	Palembang, OI, Muara Enim, OKUT, Pali	Jumlah Temu Mitra yang dilaksanakan	5 Kegiatan	200,000,000
2.29.223	Pengembangan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan untuk POKLAHSAR	Palembang, OI, OKI	Jumlah paket yang diberikan	3 paket	129,000,000
1.3.26	Cor beton jalan lingkungan	Desa Burai kec Tanjung Batu kab OI	-	0 -	900,000,000
1.3.26	Cor beton jalan lingkungan	Desa Tanjung Tambak Baru kec Tanjung Batu kab OI	-	0 -	200,000,000
1.3.26	Cor beton jalan lingkungan	Desa Sentul kec Tanjung Batu kab OI	-	0 -	700,000,000
1.3.26	Cor beton jalan lingkungan	Teluk Harapan 3 Dusun III desa Bangun Jaya kec Tanjung Batu kab OI	-	0 -	200,000,000
1.3.26	Cor beton jalan lingkungan	Desa Tanjung Laut kec Tanjung Batu kab OI	-	0 -	200,000,000
1.3.26	Cor beton jalan lingkungan	Desa Senuro Barat kec Tanjung Batu kab OI	-	0 -	200,000,000
1.3.26	Cor beton jalan	Desa Tanjung Atap Barat kec	-	0 -	200,000,000

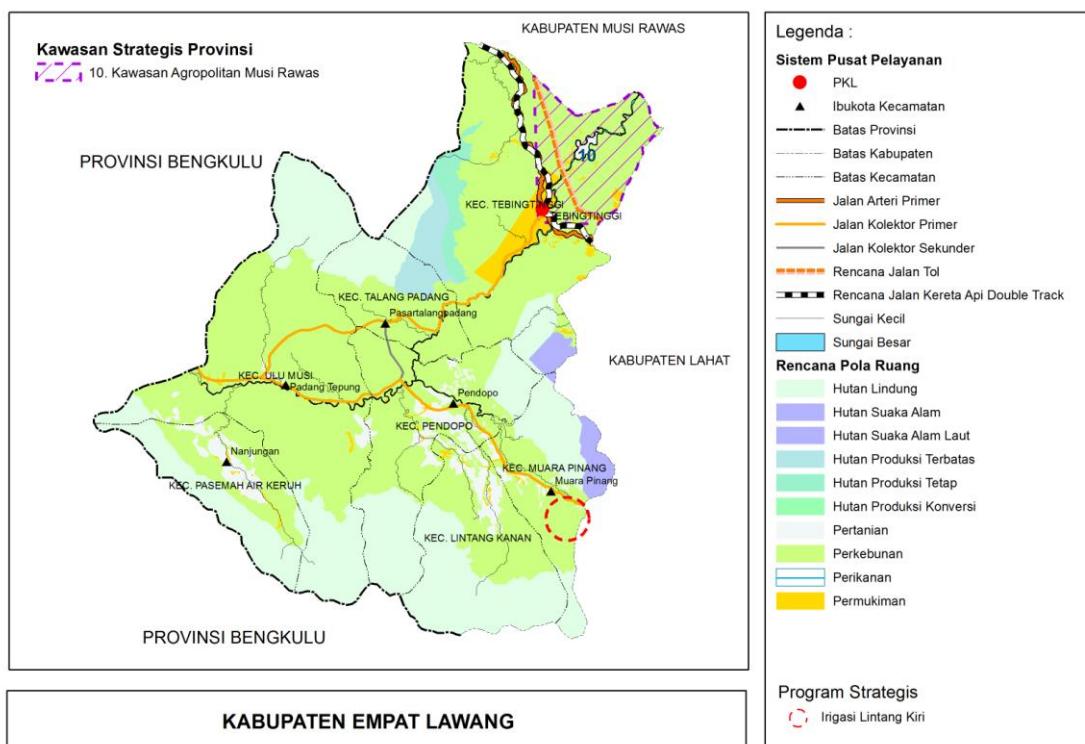
	lingkungan	Tanjung Batu kab OI			
1.3.26	Cor beton jalan lingkungan	Desa Tanjung Atap kec Tanjung Batu kab OI	-	0 -	200,000,000
1.3.26	Cor beton jalan lingkungan	RT 09 lingkungan 5 kel Tanjung Batu kec Tanjung Batu kab OI	-	0 -	200,000,000
1.3.26	Cor beton jalan lingkungan	Desa Seri Tanjung kec Tanjung Batu kab OI	-	0 -	200,000,000
1.3.25	Cor beton jalan lingkungan	Desa Tanjung Batu Seberang kec Tanjung Batu kab OI	-	0 -	200,000,000
1.3.25	Cor beton jalan lingkungan	Desa Tanjung Batu Petai kec Tanjung Batu kab OI	-	0 -	200,000,000
1.3.26	Cor beton jalan lingkungan	Desa Tanjung Baru Petai kec Indralaya Selatan kab OI	-	0 -	200,000,000
1.3.25	Pembangunan jalan lingkungan di kec Kandis kab OI	Kec Kandis kab OI	-	0 -	1,000,000,000
1.3.26	- Jalan lingkungan cor beton	-Desa Kandis II kec. Kandis kab OI	-	0 -	200,000,000
1.3.25	Pembangunan jalan cor beton dan pengerasan beton di kec Indralaya Utara kab OI	Kec Indralaya Utara kab OI	-	0 -	1,500,000,000
1.3.34	Normalisasi sungai Ds. Bakung Kec Inderalaya Utara	-Ds.Bakung Kec Indralaya utara kab OI	-	0 -	3,000,000,000
					51,011,940,000

6.5.11 Kabupaten Empat Lawang

Pengembangan Kabupaten Empat Lawang yang memiliki 1 PKL (Tebing Tinggi) diarahkan sebagai sentra produksi pertanian. Sumber utama pertumbuhan ekonomi daerah adalah sektor pertanian dan perdagangan. Percepatan pertumbuhan pertanian sangat penting mengingat besarnya pangsa pertanian dalam struktur perekonomian daerah. Oleh karena itu prioritas pembangunan diarahkan pada:

- Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi
- Peningkatan produktivitas usaha pertanian melalui penyuluhan, pemanfaatan bibit unggul, peningkatan jaminan distribusi pupuk dan alsintan
- Peningkatan dukungan akses permodalan melalui subsidi kredit pertanian dan sertifikasi tanah
- Peningkatan infrastruktur jalan produksi
- Pemberdayaan koperasi pertanian
- Peningkatan daya dukung lingkungan
- Peningkatan akses pendidikan menengah dan kesehatan

Gambar 6.30 :
Arah Pengembangan Kabupaten Empat Lawang



Tabel 6.26
Alokasi Kegiatan Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2016

No	Kegiatan	Lokasi	Indikator	Volume	Anggaran
1	Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)	- Kabupaten Ogan Komering Iler; Kabupaten Lahat; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;	Jumlah fasilitasi pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi	4 Unit	130,000,000
2	Pengukuhan dan Penetapan Kawasan Hutan	- ; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Empat Lawang;	Jumlah laporan permasalahan dan pemgunaan kawasan hutan	16 lokasi	184,500,000
3	Sistem Peringatan Dini (early warning system)	Kabupaten Empat Lawang	Jumlah sistem peringatan Dini	1 unit	50,000,000
4	Inventarisasi potensi wirausaha pasca bencana	Kab. Empat Lawang	Tersedianya data dan potensi wirausaha pasca bencana	2 kabupaten/kota	41,291,000
5	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana	Pagar Alam ; PALI ; Muratara ; Empat Lawang ; Lahat ; OKU ; OKUT ; OKUS	-Jumlah pelayanan Kesehatan bagi pengungsi dan korban bencana di provinsi Sumsel	8 -Kejadian Bencana	250,000,000
6	Pembinaan dan pendampingan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	Empat Lawang, Muratara, Lubuk Linggau	-Jumlah Kabupaten /Kota yang dibina dalam pelaksanaan Ante Natal Care (ANC)	3 - Kabupaten / Kota	240,000,000
7	Rapat Koordinasi Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak se-Sumatera Selatan	Kabupaten Empat Lawang;	Jumlah Peserta Aktif Rakor	75 Orang	70,000,000
8	Dukungan Peralatan Olahraga untuk Masyarakat	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Iler; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Pagar Alam; Kota Palembang; Kota Prabumulih;	Jumlah peralatan olahraga untuk masyarakat	40 Klub/Karang Taruna	190,000,000

9	Dukungan peralatan olahraga untuk pondok pesantren di Sumsel	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Pagar Alam; Kota Palembang;	Jumlah ponpes di Provinsi Sumatera Selatan yang mendapat bantuan peralatan olahraga	25 Pondok Pesantren	190,000,000
10	Fasilitasi Taruna Siaga Bencana (Tagana), Petugas Penata Usahaan Gudang Logistik, dan Petugas Posko	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Pagar Alam; Kota Palembang; Kota Prabumulih;	Terpenuhinya tali asih dan Uniform TAGANA, Petugas Penata Usahaan Gudang Logistik, dan Petugas POSKO Kesiap Siagaan Bencana Bidang Perlindungan Sosial	945 orang	1.412.800.000
11	Fasilitasi Persatuan Amal Kematian (PAK) di Sumatera Selatan	- Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Palembang; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Banyuasin; ; Kota Prabumulih; Kabupaten Empat Lawang;	Tersedianya bantuan tenda, kursi , wireless dan Mobil Ambulance untuk Persatuan Amal Kematian; dan kend R4	30 pak	730.000.000
12	Fasilitasi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)	- Kota Pagar Alam; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muratara; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kota Prabumulih; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kota Palembang; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu;	ersedianya tali asih bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	228 orang	730,000,000

13	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	Kab. MUBA; Kab. Empat Lawang; Kab. OKUS	Tersalurkannya bantuan Bahan bangunan rumah, Jaminan hidup, sarana penerangan dan UEP terhadap Komunitas Adat Terpencil	185 kk	1.225.000.000
14	Pemberdayaan Fakir Miskin	Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Musi Rawas;	Tersalurkannya bantuan pemberdayaan keluarga Fakir miskin dlm bentuk KUBE	600 -kk	1.450.000.000
15	Rehab Gedung TK Pertiwi I, II, III, IV, dan V	Kab. Empat Lawang	Jumlah Bangunan yang terbangun	1 Gedung	1.000.000.000
16	Pengembangan dan Peningkatan Konsumsi Ikan	Muratara dan Empat Lawang	Jumlah anak yang mendapatkan paket makanan berbahan dasar ikan	400 anak	100,000,000
17	Bantuan Paket Pengembangan Budidaya	Empat Lawang	Jumlah bantuan pengembangan budidaya ikan	1 Kab	200,000,000
18	Penilaian Lomba PKA Wana Lestari	OKU, OKUT, Muba, Empat Lawang, Muara Enim, Lahat, Prabu, Pali, Mura, L. Linggau, Palembang	Jumlah Penyuluhan Kehutanan, KMDM, PKSM, KTH dan Desa Peduli Hutan	100 Persen	175,000,000
19	Diseminasi Pengolahan Hasil Perikanan	- Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;	Jumlah Penyuluhan, kelompok yang mendapatkan pelatihan pengolahan hasil Perikanan	100 Persen	200,000,000
20	Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Empat Lawang, Muratara, MUBA, Ogan Ilir	- Terlaksananya bantuan bibit kelapa sawit rakyat	10000 - batang	500,000,000
21	Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Besar (PBS/N)	Kab. Muara Enim, Banyuasin, Muba, OKU, OKUT, OKUS, OI, OKI, Lahat, PaGAR ALAM, MURA, EMPAT Lawang	- Jumlah kebun yang terawasi dan terbina	17 - Kebun PBS/N	100,000,000
22	Bantuan Alat Pengolahan Kopi Rakyat	Kab. Lahat, Muara Enim, Empat Lawang, dan kota Pagaralam	- Terlaksananya bantuan alat pengolahan kopi rakyat	4 - Paket	300,000,000
23	Peremajaan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat	MUBA, PALI, Prabumulih, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Muratara	- Terlaksananya peremajaan dan pengembangan tanaman karet rakyat	700 - Ha	4.050.000.000

24	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	16 Kab./Kota (Banyuasin, OKU Timur, OKI, OKU, OKU Selatan, Ogan Ilir, Prabumulih, Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, Musi Rawas, Muratara, PALI, Empat Lawang, Musi Banyuasin dan Palembang)	Meningkatnya pemanfaatan pembiayaan program dan kredit komersial mendukung peningkatan produksi dan mutu produk	100 Kelompok	150,000,000
25	Peningkatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan	14 Kab./Kota (OKU Timur, Musi Rawas, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Muratara, PALI, OKU Selatan, Muara Enim dan OKU)	Jumlah Kelompok tan yang dibina untuk melaksanakan penanganan pasca panen tanaman pangan	28 Kelompok	200,000,000
26	Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan	14 Kab./Kota (OKU Timur, Musi Rawas, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Muratara, PALI, OKU Selatan, Muara Enim dan OKU)	Jumlah Peralatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan : - Power Tresher (17 Unit) - Combine Harvester (2 Unit) - Terpal Jemur (225 Lembar)	244 Unit/Lembar	392,700,000
27	Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	13 Kab./Kota (Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, OKI, OKU, OKU Timur, Lahat, Muara Enim, Empat Lawang, Musi Rawas, Pagar Alam Lubuk Linggau dan PALI)	Jumlah Produsen/Penyalur Pedagang Benih yang diawasi	1 Unit	100,000,000
28	Pengelolaan Penangkaran Benih Tanaman Pangan	11 Kab./Kota (Ogan Ilir, OKI, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Musi Rawas, Banyuasin, OKU Timur dan Musi Banyuasin)	Pengelolaan ketersediaan benih di produsen, penangkar dan pengecer	400 Ton	209,800,000
29	Penyediaan Sarana Pengelolaan Penangkaran Benih Tanaman Pangan	11 Kab./Kota (Ogan Ilir, OKI, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Musi Rawas, Banyuasin, OKU Timur dan Musi Banyuasin)	Ketersediaan Benih Tanaman Pangan yang unggul dan bersertifikat	5000 Kg	.1.176.225.000
30	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Koperasi	Pali, Banyuasin, Empat Lawang, OI, Lahat	Jumlah Peserta Temu Usaha	200 Orang	200,000,000
31	Diversifikasi tanaman kopi, kakao/Lada	OKUS, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Pagar Alam	-Jumlah lahan kopi yang terdiversifikasi dengan lada	150 Ha	350,000,000
32	Pembangunan jalan di kec Ulu Musi	Kab Empat Lawang	-	0 -	800,000,000
33	Pembangunan jalan setapak di kec Saling	-Kab Empat Lawang	-	0 -	600,000,000
34	Pembangunan jalan setapak di kec Tebing Tinggi	Kab Empat Lawang	-	0 -	1.000.000.000

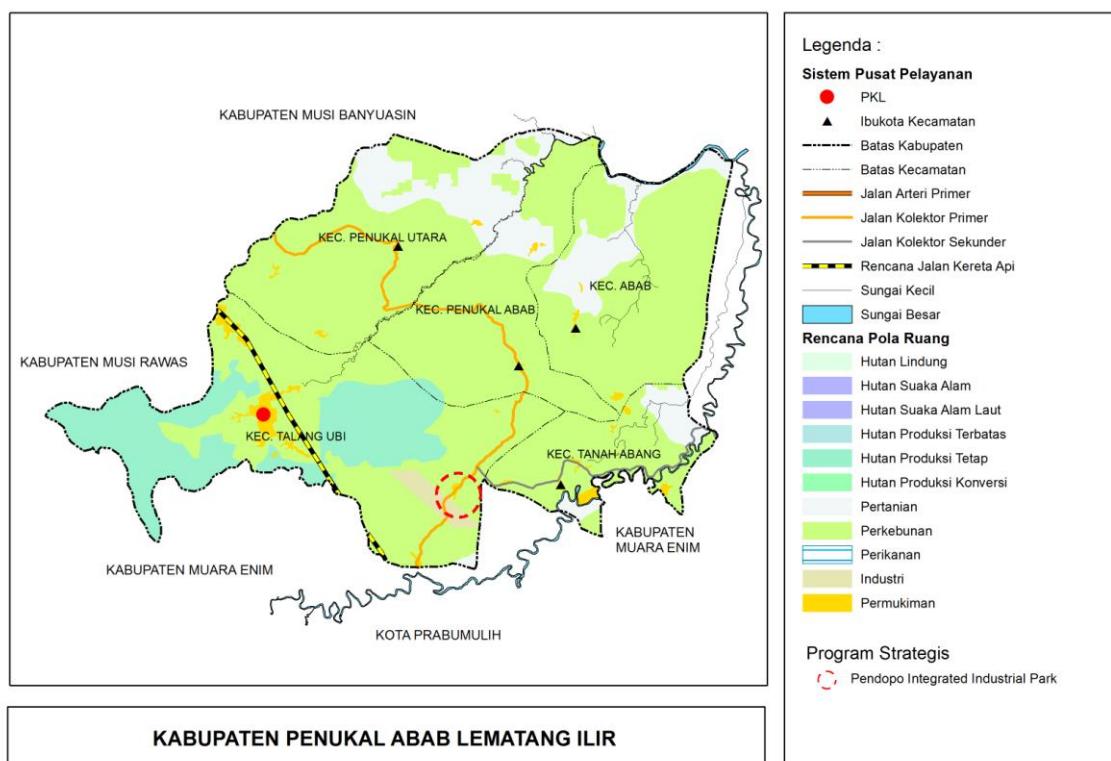
35	Pembangunan drainase kec Saling	Kab Empat Lawang	-	0 -	200,000,000
36	Pembangunan jalan cor beton	Desa Tanjung Kurung kec Muara Pinang kab Empat Lawang	-	0 -	200,000,000
37	-Pembangunan jalan cor beton	-Desa Babatan kec Lintang Kanan kab Empat Lawang	-	0 -	200,000,000
38	Pembangunan jalan cor beton	Desa Ulak Mengkudu kec. Tebing Tinggi kab. Empat Lawang	-	0 -	200,000,000
39	Pembangunan jalan cor beton	-Desa Umo Jati kec Lintang Kanan kab Empat Lawang	-	0 -	200,000,000
40	Pembangunan jalan cor beton	-Desa Muara Karang kec Pendopo kab Empat Lawang	-	0 -	200,000,000
41	Pembangunan jalan cor beton	Desa Bandar Agung kec Pendopo kab Empat Lawang	-	0 -	200,000,000
42	Pembuatan jalan lingkungan cor beton	-Desa Sawah kec Muara Pinang kab Empat Lawang	-	0 -	500,000,000
43	Pembuatan jalan lingkungan cor beton	Desa Niur kec Muara Pinang kab Empat Lawang	-	0 -	200,000,000
44	Pembangunan jalan cor beton	-Desa Muara Pinang Lama kec Muara Pinang kab Empat Lawang	-	0 -	200,000,000
45	Pembangunan jalan cor beton	Desa Muara Timbuk kec Muara Pinang kab Empat Lawang	-	0 -	200,000,000
46	Pembangunan Bronjong di Desa Batu Pance, Kec Tebing Tinggi	KAB EMPAT LAWANG	PANJANG TEBING SUNGAI YANG DILINDUNGI	30 m'	200,000,000
47	Pembangunan Bronjong di Desa Kota Gading, Kec Tebing Tinggi	KAB EMPAT LAWANG	PANJANG TEBING SUNGAI YANG DILINDUNGI	30 m'	200,000,000
48	Pembangunan bronjong kec Tebing Tinggi	Kab Empat Lawang	-	0 -	400,000,000
49	Sistem Peringatan Dini (Early Warning System)	Kabupaten Empat Lawang	JUmlah sistem peringatan dini	1 unit	50,000,000
					24.662.316.000

6.5.12 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Pengembangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang memiliki 1 PKL (Pendopo) diarahkan untuk memantapkan perannya sebagai salah satu sentra pertambangan. Namun demikian untuk perspektif jangka panjang, pengembangan daerah ini juga diarahkan pada sektor-sektor unggulan terbarukan dengan basis utama perkebunan, khususnya komoditi karet dan sawit serta sektor pertanian. Sektor pertambangan dan perkebunan merupakan sumber utama pertumbuhan daerah. Oleh karena itu, prioritas pembangunan diarahkan pada:

- Peningkatan peran Kota Pendopo sebagai PKL.
- Pemantapan dan pemeliharaan infrastruktur jalan
- Peningkatan produktivitas perkebunan
- Peningkatan dukungan akses permodalan bagi petani dan peternak
- Peningkatan dukungan pemberdayaan koperasi petani.
- Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses pendidikan menengah dan kesehatan.
- Pengendalian dan pemanfaatan tata ruang.

Gambar 6.31 :
Arah Pengembangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir



Tabel 6.27 :
Alokasi Kegiatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Tahun Anggaran 2016

Nomor	Kegiatan	Lokasi	Indikator	Volume	Anggaran
1.8.60	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Genset	Talang Ubi, PALI	-Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Genset	2 -unit	10,000,000
1.8.60	Sewa Mess dan Rumah Dinas KPH	Talang Ubi, PALI	-Sewa Mess dan Rumah Dinas KPH	1 -UNIT	25,000,000
1.8.60	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Talang Ubi, Pali	-Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 -unit	10,000,000
1.8.60	pembinaan areal ijin pemanfaatan dan penggunaan hutan	KAB.Musi Banyuasin, Musi Rawas, Muara Enim, PALI, Lahat, Lubuk Linggau	pembinaan areal ijin pemanfaatan dan penggunaan hutan produksi	16 -ijin	36,870,000
1.2.9	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana	Pagar Alam ; PALI ; Muratara ; Empat Lawang ; Lahat ; OKU ; OKUT ; OKUS	-Jumlah pelayanan Kesehatan bagi pengungsi dan korban bencana di provinsi Sumsel	8 -Kejadian Bencana	250,000,000
2.30.229	- Pemberian Bantuan Timbangan bagi Pelaku DKM	- Muratara, Pali	- Jumlah unit Timbangan yang diberikan kepada pelaku UKM	200 - Unit Timbangan	110,000,000
2.30.226	- Pemberdayaan Konsumen	Muratara, Pali	- Jumlah Peserta Pemberdayaan Konsumen Cerdas (Konsumen dan Pelaku Usaha)	200 - Orang	146,515,000
2.30.226	- Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Palembang, OI, OKI, OKU, OKUT, OKUS, PBM, ME, LHT, PGA, 4L, PALI, MURA, LL, MUBA, BA	-Jumlah jenis barang dan jasa yang terawasi dalam peredarannya	4 - Jenis Barang	128,125,000
2.29.221	Paket Sarana dan Prasarana Budidaya di Desa Model dan Lumbung Pangan	Palembang, Banyuasin, Ogan Ilir, PALI, Mura	Jumlah sarana dan prasarana budidaya di desa model dan desa lumbung pangan	5 Paket	150,000,000
2.25.198	Penilaian Lomba PKA Wana Lestari	OKU, OKUT, Muba, Empat Lawang, Muara Enim, Lahat, Prabu, Pali, Mura, L. Linggau, Palembang	Jumlah Penyuluhan Kehutanan, KMDM, PKSM, KTH dan Desa Peduli Hutan	100 Persen	175,000,000
2.25.188	Pengembangan peternakan sapi perah melalui pemberdayaan perempuan	Kota Pagaralam, Kota Palembang dan Kab. PALI	Jumlah jenis barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Demo Farm; konsentrat, Pakan HMT, Sapi Perah dan Bantuan Kandang)	4 jenis	800,000,000
2.25.185	Pembinaan dan Pengawalan Revitalisasi Perkebunan	Mura, Muratara, Prabumulih,OKI,OKU, OKUT,MUBA,M Enim, Banyuasin, Pali	- Jumlah petani, petugas dan perusahaan peserta revit perkebunan yang terbina	120 - Orang	100,000,000
2.25.184	Bantuan bahan dan alat pembeku karet	Prabumulih, Bayuasin, OKU, Pali,	- Terlaksananya bantuan bahan pembeku karet	8000 - Liter	200,000,000

2.25.184	Pembinaan Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Kab. Muara Enim, Muratara, OKI, Lahat, PALI, dan Musi Rawas	- Terlaksananya bantuan unit pengolahan dan pemasaran bokar	5 - kelompok tani	100,000,000
2.25.184	Pengadaan Alat Panen Karet Rakyat	pRABUMULIH, OKU, M Enim, OKI, PALI, MURATARA	- Terlaksananya bantuan alat panen karet	200 - paket	200,000,000
2.25.180	Peremajaan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat	MUBA, PALI, Prabumulih, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Muratara	- Terlaksananya peremajaan dan pengembangan tanaman karet rakyat	700 - Ha	4,050,000,000
2.25.178	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	16 Kab./Kota (Banyuasin, OKU Timur, OKI, OKU, OKU Selatan, Ogan Ilir, Prabumulih, Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, Musi Rawas, Muratara, PALI, Empat Lawang, Musi Banyuasin dan Palembang)	Meningkatnya pemanfaatan pembiayaan program dan kredit komersial mendukung peningkatan produksi dan mutu produk	100 Kelompok	150,000,000
2.25.178	Peningkatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan	14 Kab./Kota (OKU Timur, Musi Rawas, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Muratara, PALI, OKU Selatan, Muara Enim dan OKU)	Jumlah Kelompok tani yang dibina untuk melaksanakan penanganan pasca panen tanaman pangan	28 Kelompok	200,000,000
2.25.178	Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan	14 Kab./Kota (OKU Timur, Musi Rawas, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Muratara, PALI, OKU Selatan, Muara Enim dan OKU)	Jumlah Peralatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan : - Power Tresher (17 Unit) - Combine Harvester (2 Unit) - Terpal Jemur (225 Lembar)	244 Unit/Lembar	392,700,000
2.25.177	Pembinaan Pengembangan Pupuk Organik	5 Kab./Kota (Lahat, Pagar Alam, PALI, OKU Timur dan OKU Selatan)	Jumlah kelompok tani yang membuat pupuk organik	5 Kelompok	75,000,000
2.25.177	Penyediaan Sarana Pengembangan Pupuk Organik	5 Kab./Kota (Lahat, Pagar Alam, PALI, OKU Timur dan OKU Selatan)	Jumlah Alat Pembuat Pupuk Organik	5 Unit	180,000,000
2.25.175	Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	13 Kab./Kota (Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, OKI, OKU, OKU Timur, Lahat, Muara Enim, Empat Lawang, Musi Rawas, Pagar Alamm Lubuk Linggau dan PALI)	Jumlah Produsen/Penyalur Pedagang Benih yang diawasi	1 Unit	100,000,000
2.25.173	Pemasarkan Benih Unggul Tanaman Pangan untuk Peningkatan Produksi dan Produktivitas	Kabupaten OKU Timur, Muara Enim, PALI, Lahat,	Jumlah Unit Percontohan	4 Demplot	150,000,000

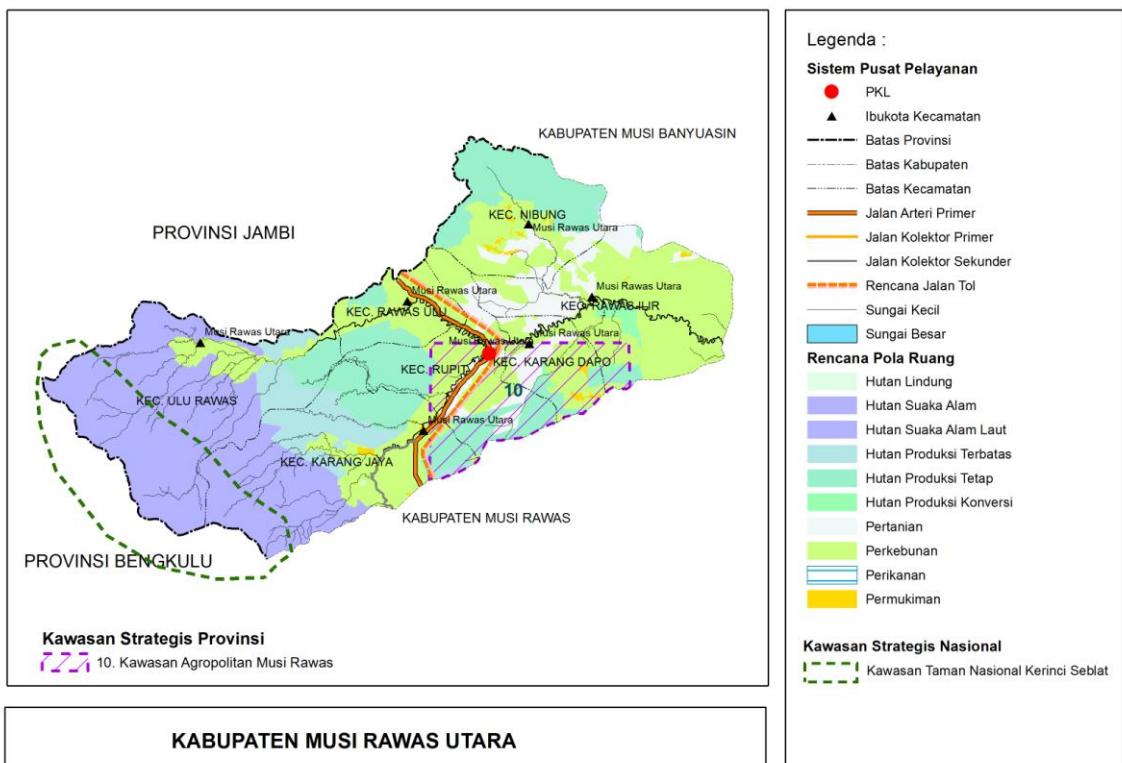
2.25.173	Penyediaan Sarana Produksi Pemasyarakatan Benih Unggul Tanaman Pangan	Kabupaten OKU Timur, Muara Enim, PALI, Lahat,	Jumlah Sarana Produksi yang diserahkan kepada masyarakat	1700 Kg	200,000,000
2.25.173	Pengelolaan Tanaman Serealia	Kabupaten PALI, MURATARA, Muara Enim, Musi Banyuasin	Jumlah Kelompok Tani yang menerapkan teknologi yang tepat	8 Kelompok	214,300,000
2.25.173	Pengelolaan Aneka Tanaman Kacang dan Umbi	Kabupaten Banyuasin,OKU Timur, PALI	Jumlah Kelompok Tani yang menerapkan pengelolaan aneka tanaman kacang dan umbi	4 Kelompok	98,000,000
2.25.173	Penyediaan Sarana Produksi Pengelolaan Aneka Tanaman Kacang dan Umbi	Kabupaten Banyuasin, PALI dan OKU Timur	Jumlah Bantuan Benih	602500 kg/stek	161,750,000
1.12.83	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Koperasi	Pali, Banyuasin, Empat Lawang, OI, Lahat	Jumlah Peserta Temu Usaha	200 Orang	200,000,000
1.12.82	Optimalisasi Pemanfaatan Modal Bagi UMKMK	Palembang, OI, Muara Enim, OKUT, Pali	Jumlah Temu Mitra yang dilaksanakan	5 Kegiatan	200,000,000
1.3.26	Peningkatan jalan desa	Kec Talang Ubi kab PALI	-	0 -	3,000,000,000
1.3.31	Pembangunan drainase desa mangkunegara	-Kec Penukal kab PALI	-	0 -	1,000,000,000
1.3.25	Pembangunan jalan lingkungan/setapak	Desa Handayani kec Talang Ubi kab PALI	-	0 -	150,000,000
1.3.32	Studi identifikasi kebutuhan air bersih kabupaten PALI	Kabupaten PALI	-	0 -	250,000,000
1.3.34	Normalisasi Sungai Pengabuan	Ds. Pengabuan kec. Abab KAB PALI	bertambahnya DAS yang terpelihara	3238 m	12,953,950,000
1.3.30	Pembangunan bronjong Sungai Lematang Desa Curup	Desa Curup Kab. PALI	panjang tebing sungai yang terlindungi	333.33 m	2,000,000,000
1.3.34	Normalisasi Sungai benauang	Ds. Benuang Kab PALI	-	0 -	11,000,000,000
1.3.34	Normalisasi Sungai Pengabuan	Ds.Pengabuan Kec Abab Kab PALI	-	0 -	18,013,950,000
					57,181,160,000

6.5.13 Kabupaten Musi Rawas Utara

Pengembangan Kabupaten Musi Rawas yang memiliki 1 PKL (Muara Rupit) diarahkan sebagai sentra produksi perkebunan dan pertanian, khususnya komoditi karet, sawit, sapi, padi, dan buah-buahan. Di samping itu Musi Rawas Utara juga merupakan salah satu penghasil tambang. Sektor pertanian dan pertambangan merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu prioritas pembangunan diarahkan pada:

- Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi
- Peningkatan produktivitas melalui kegiatan penyuluhan, pemanfaatan bibit unggul, jaminan distribusi pupuk dan alsintan, serta dukungan peremajaan (revitalisasi) tanaman karet
- Peningkatan dukungan akses permodalan bagi petani dan pelaku usaha perkebunan rakyat yang bisa dilakukan melalui pemberian subsidi kredit maupun dukungan sertifikasi tanah
- Peningkatan infrastruktur jalan
- Pemberdayaan koperasi petani.
- Penanggulangan kemiskinan serta peningkatan akses pendidikan menengah dan kesehatan.
- Peningkatan daya dukung lingkungan

Gambar 6.32 :
Arah Pengembangan Kabupaten Musi Rawas Utara



Tabel 6.28 :
Alokasi Kegiatan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2016

Nomor	Kegiatan	Lokasi	Indikator	Volume	Anggaran
2.26.207	Fasilitasi Kegiatan REDD+ dan Pendampingan Bioclime	- Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Muratara; Kabupaten Muara Enim;	Jumlah fasilitasi kegiatan REDD+ dan pendampingan Bioclime	4 Kali	60,000,000
1.2.9	Peningkatatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana	Pagar Alam ; PALI ; Muratara ; Empat Lawang ; Lahat ; OKU ; OKUT ; OKUS	-Jumlah pelayanan Kesehatan bagi pengungsi dan korban bencana di provinsi Sumsel	8 -Kejadian Bencana	250,000,000
1.2.22	Pembinaan dan pendampingan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	Empat Lawang, Muratara, Lubuk Linggau	-Jumlah Kabupaten /Kota yang dibina dalam pelaksanaan Ante Natal Care (ANC)	3 - Kabupaten / Kota	240,000,000
1.15.97	Dukungan Peralatan Olahraga untuk Masyarakat	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Pagar Alam; Kota Palembang; Kota Prabumulih;	Jumlah peralatan olahraga untuk masyarakat	40 Klub/Karang Taruna	190,000,000
1.15.97	Dukungan peralatan olahraga untuk pondok pesantren di Sumsel	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Pagar Alam; Kota Palembang;	Jumlah ponpes di Provinsi Sumatera Selatan yang mendapat bantuan peralatan olahraga	25 Pondok Pesantren	190,000,000
1.10.70	Fasilitasi Taruna Siaga Bencana (Tagana), Petugas Penata Usahaan Gudang Logistik, dan Petugas Posko	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten	Terpenuhinya tali asih dan Uniform TAGANA, Petugas Penata Usahaan Gudang Logistik, dan Petugas POSKO Kesiap Siagaan Bencana Bidang Perlindungan Sosial	945 orang	1,412,800,000

		Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Pagar Alam; Kota Palembang; Kota Prabumulih;			
1.10.69	Fasilitasi Persatuan Amal Kematian (PAK) di Sumatera Selatan	- Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Palembang; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Banyuasin; ; Kota Prabumulih; Kabupaten Empat Lawang;	Tersedianya bantuan tenda, kursi , wireless dan Mobil Ambulance untuk Persatuan Amal Kematian; dan kend R4	30 pak	3,345,000,000
1.10.69	Fasilitasi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)	- Kota Pagar Alam; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muratara; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kota Prabumulih; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kota Palembang; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu;	ersedianya tali asih bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	228 orang	730,000,000
1.10.67	Pemberdayaan Fakir Miskin	Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Musi Rawas;	Tersalurkannya bantuan pemberdayaan keluarga Fakir miskin dlm bentuk KUBE	600 -kk	1,450,000,000
1.7.55	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Lahat; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Muratara;	Jumlah Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang dikelola	5 UPPKB	1,000,000,000
1.4.37	OPTIMALISASI SPAM IKK KARANG DAPO	;Kec. Karang Dapo Kabupaten Muratara;	Jumlah SPAM IKK yang terbangun	1 IKK	1,000,000,000
1.3.31	Pemeliharaan Daerah Irigasi Merung	Kabupaten Muratara;	Panjang Jaringan Irigasi Yang Direhabilitasi	132 m'	198,000,000
2.30.229	- Pemberian Bantuan Timbangan bagi Pelaku DKM	- Muratara, Pali	- Jumlah unit Timbangan yang diberikan kepada pelaku UKM	200 - Unit Timbangan	110,000,000
2.30.226	- Pemberdayaan Konsumen	Muratara, Pali	- Jumlah Peserta Pemberdayaan Konsumen Cerdas (Konsumen dan Pelaku Usaha)	200 - Orang	146,515,000
2.29.223	Pengembangan dan Peningkatan Konsumsi Ikan	Muratara dan Empat Lawang	Jumlah anak yang mendapatkan paket makanan berbahan dasar ikan	400 anak	100,000,000

2.25.186	Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Empat Lawang, Muratara, MUBA, Ogan Ilir	- Terlaksananya bantuan bibit kelapa sawit rakyat	10000 - batang	500,000,000
2.25.185	Pelatihan dan Pengembangan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) Petani Perkebunan	OKU, OI, Muratara, OKUT, MUBA, OKI,	- Terlaksananya pelatihan dan pengembangan SKE petani perkebunan	150 - Orang	150,000,000
2.25.185	Pembinaan dan Pengawalan Revitalisasi Perkebunan	Mura, Muratara, Prabumulih,OKI,OKU,OKUT, MUBA,M Enim, Banyuasin, Pali	- Jumlah petani, petugas dan perusahaan peserta revit perkebunan yang terbina	120 - Orang	100,000,000
2.25.184	Pembinaan Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Kab. Muara Enim, Muratara, OKI, Lahat, PALI, dan Musi Rawas	- Terlaksananya bantuan unit pengolahan dan pemasaran bokar	5 - kelompok tani	100,000,000
2.25.184	Pengadaan Alat Panen Karet Rakyat	pRABUMULIH, OKU, M Enim, OKI, PALI, MURATARA	- Terlaksananya bantuan alat panen karet	200 - paket	200,000,000
2.25.183	Pengujian Teknologi Proteksi dan Operasional Laboratorium Proteksi	Kab.Lahat, MURATARA	- Terlaksananya uji lapang pengendalian penggunaan agen hayati	30 - Ha	150,000,000
2.25.180	Peremajaan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat	MUBA, PALI, Prabumulih, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Muratara	- Terlaksananya peremajaan dan pengembangan tanaman karet rakyat	700 - Ha	4,050,000,000
2.25.178	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	16 Kab./Kota (Banyuasin, OKU Timur, OKI, OKU, OKU Selatan, Ogan Ilir, Prabumulih, Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, Musi Rawas, Muratara, PALI, Empat Lawang, Musi Banyuasin dan Palembang)	Meningkatnya pemanfaatan pembiayaan program dan kredit komersial mendukung peningkatan produksi dan mutu produk	100 Kelompok	150,000,000
2.25.178	Peningkatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan	14 Kab./Kota (OKU Timur, Musi Rawas, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Muratara, PALI, OKU Selatan, Muara Enim dan OKU)	Jumlah Kelompoktani yang dibina untuk melaksanakan penanganan pasca panen tanaman pangan	28 Kelompok	200,000,000
2.25.178	Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan	14 Kab./Kota (OKU Timur, Musi Rawas, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Muratara, PALI, OKU Selatan, Muara Enim dan OKU)	Jumlah Peralatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan : - Power Tresher (17 Unit) - Combine Harvester (2 Unit) - Terpal Jemur (225 Lembar)	244 Unit/Lembar	392,700,000
2.25.175	Pengelolaan Penangkaran Perbenihan Tanaman Buah-buahan dan Sayuran	Kabupaten Muara Enim, Banyuasin dan Muratara	Jumlah kelompok Penangkar Hortikultura yang dibina	12 Kelompok	150,000,000

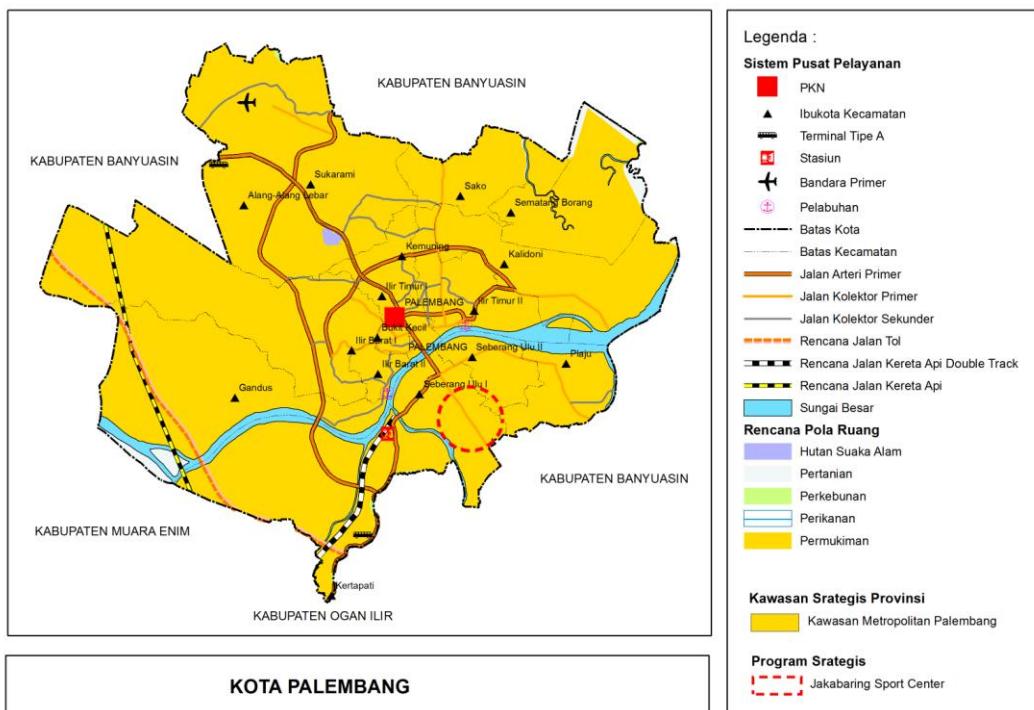
2.25.175	Penyediaan Sarana Penangkaran Perbenihan Tanaman Buah-buahan dan Sayuran	Kabupaten Muara Enim, Banyuasin dan Muratara	Jumlah Sarana Produksi Hortikultura : - Buah-buahan (7.500 Btg) - Sayuran (12.500,3 Kg)	20000.3 Btg/Kg/Gr	800,000,000
2.25.174	Penyediaan Sarana Produksi Pengelolaan Tanaman Buah	Kabupaten OKI, Muara Enim, Lahat, Muratara, OKU, OKI, Banyuasin dan Kota Pagar Alam	Meningkatnya Luas Tanam Tanaman Buah	85 Ha	410,825,000
2.25.173	Pengelolaan Tanaman Serealia	Kabupaten PALI, MURATARA, Muara Enim, Musi Banyuasin	Jumlah Kelompok Tani yang menerapkan teknologi yang tepat	8 Kelompok	214,300,000
1.3.27	Pengendalian rutin dan penanggulangan jalan dan jembatan wilayah I	Kab. Muara Enim, Kab. Musi Rawas, Kab. Lahat, Kab. Muratara	Jumlah titik rawan bencana	52 Paket	10,500,000,000
1.3.34	Normalisasi sungai Rupit dan Sungai Rawas	Kabupaten Muratara	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	500 M'	3,000,000,000
1.3.34	Normalisasi sungai di Ds. Pauh dan Pauh I, Kec Rawas Ilir	Kabupaten Muratara	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	333.33 M'	2,000,000,000
1.3.31	Pemeliharaan Irigasi D.I. Nitap	-KAB MURATARA	BERTAMBAHNYA DAERAH IRIGASI YANG TERPELIHARA	260 m'	195,000,000
1.3.31	Pemeliharaan Irigasi D.I. Merung	-KAB MURATARA	BERTAMBAHNYA DAERAH IRIGASI YANG TERPELIHARA	264 m'	198,000,000
1.3.33	-Normalisasi sungai/irigasi persawahan	Desa Pauh dan Pauh I kec Rawas Ilir kab Muratara	-	0 -	2,000,000,000
					35,883,140,000

6.5.14 Kota Palembang

Pengembangan Kota Palembang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan untuk memantapkan perannya sebagai kota utama yang merupakan pusat industri, jasa keuangan, serta simpul utama perdagangan dan transportasi untuk intra dan antarwilayah. Sektor unggulan wilayah merupakan ciri daerah perkotaan yakni industri manufaktur dan sektor jasa (perdagangan, keuangan, angkutan dan komunikasi). Sektor-sektor tersebut merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan Kota Palembang akan menentukan sejauh mana wilayah Sumatera Selatan mendapatkan manfaat dari percepatan pembangunan Koridor Ekonomi Sumatera. Oleh karena itu prioritas pembangunan diarahkan pada:

- Peningkatan dan pemantapan infrastruktur perkotaan yang meliputi: jalan kota dan jembatan, jaringan energi (listrik dan gas), persampahan, sanitasi dan drainase
- Peningkatan dan pemantapan infrastruktur strategis wilayah seperti telekomunikasi, perhubungan (bandar udara dan akses pelabuhan laut)
- Peningkatan manajemen transportasi perkotaan dan antar kota
- Peningkatan manajemen pasar sebagai kolektor dan distributor regional
- Pengembangan pariwisata
- Pengendalian pemanfaatan ruang
- Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan pelaku usaha di sektor informal

Gambar 6.33 : Arah Pengembangan Kota Palembang



Tabel 6.29 :
Alokasi Kegiatan Kota Palembang Tahun Anggaran 2016

Nomor	Kegiatan	Lokasi	Indikator	Volume	Anggaran
1.17.143	Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis/perkantoran	Palembang	Tersedianya tenaga ouschorcing	5 orang	128,375,000
1.17.143	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah, dan ke Luar Negeri.	Palembang-Sumsel	Terfasilitasinya Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan	50 Kali	100,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Palembang-Sumsel	Terciptanya Tenaga Administrasi Teknis/Perkantoran	9 Orang	282,425,000
1.17.121	Fasilitasi Perizinan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Ketua/Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan ke Luar Negeri	Palembang-Sumsel	Tebitnya Surat Izin Gubernur/Wakil Gubernur dan Ketua/Anggota DPRD ke Luar Negeri	10 Surat Izin	50,000,000
1.17.121	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan Akhir Tahun Anggaran 2015	Palembang-Sumsel	Tersusunnya Naskah LKPJ Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2015	3 Dokumen	263,925,000
1.17.121	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2015	Palembang-Sumsel	Tersusunnya Naskah LPPD Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2015	1 Dokumen	215,000,000
1.17.120	Fasilitasi Kunjungan Kerja Gubernur Sumatera Selatan ke Kabupaten/Kota	Palembang-Sumsel	Terfasilitasinya Kunjungan Kerja Gubernur Sumatera Selatan ke Daerah-daerah dalam rangka Memperingati Hari Jadi Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan	17 Kali	130,000,000
1.17.120	Verifikasi Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota	Palembang-Sumsel	Terlaksananya PAW Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota	15 Kali	30,000,000
1.17.120	Fasilitasi dan Koordinasi Kunjungan Kerja Lembaga Legislatif di Provinsi Sumatera Selatan	Palembang-Sumsel	Terlaksananya Kegiatan Kunjungan Kerja Lembaga Legislatif di Prov. Sumsel	23 Kali	50,000,000
1.17.112	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa	Palembang	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	150 orang	80,000,000
1.17.112	Bimtek pembinaan dan penatausahaan pelaksanaan pembangunan	Palembang Sumatera Selatan	Jumlah peserta skpd dan kab/kota yang mengikuti Bimtek	100 orang	75,000,000
1.17.112	Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi	Palembang	Laporan pemberdayaan jasa konstruksi prov.sumsel	1 laporan	70,000,000
1.17.112	Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Palembang Sumatera Selatan	Jumlah SKPD yang mendapat layanan pengadaan	50 SKPD	1,800,000,000

1.17.110	Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Evaluasi Kerjasama antar Daerah	Palembang-Sumsel	Tercapainya Koordinasi dan Evaluasi Kerjasama di Provinsi Sumatera Selatan	1 Laporan	50,000,000
1.17.110	Pengembangan Kerjasama Wilayah Perbatasan antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi	Palembang-Sumsel	Terealisasinya Pengembangan Kerjasama Wilayah Perbatasan	55 Orang	50,000,000
1.17.110	Pembinaan Aparatur tentang Kerjasama Daerah	Palembang-Sumsel	Pemahaman Permendagri dan PERDA	55 Orang	50,000,000
1.17.110	Rakorgub se Sumatera	Palembang dan Luar Palembang	Terealisasinya Kerjasama Ekonomi Pembangunan se Sumatera	9 Provinsi	50,000,000
1.17.110	Koordinasi dan Pemantauan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan di Daerah Otonom Baru di Provinsi Sumatera Selatan	Palembang-Sumsel	Jumlah KTP yang diterbitkan	10 Kabupaten/Kota	50,000,000
1.17.109	Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Daerah Otonom Baru	Palembang-Sumsel	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemda di Kabupaten Pemekaran	2 Buku Laporan	50,000,000
2.26.211	Fasilitasi Pokja Pengembangan Industri Pengelolaan Kayu Rakyat	Palembang	Jumlah pertemuan pengelolaan kayu rakyat	3 Kali	25,000,000
2.26.210	Sriwijaya Expo dan Pameran Kehutanan	Palembang dan Jakarta	Jumlah pelaksanaan pameran kehutanan	2 Kali	120,000,000
1.8.61	Pengembangan SDM Lingkungan Hidup	Palembang	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan teknis LH	3 orang	50,050,000
1.8.61	Peningkatan kapasitas petugas laboratorium lingkungan	Palembang	Jumlah inhouse training khusus laboratorium lingkungan yang dilaksanakan	15 orang (1 kali 15 orang)	25,000,000
1.8.61	Pengembangan data dan informasi lingkungan hidup	Kota Palembang	Jumlah dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan database LH	1 dokumen dan 1 website	140,000,000
1.8.61	Penyusunan Dok Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH (RPPLH)	Palembang	Jumlah dokumen RPPLH yang disusun	1 dok RPPLH	260,000,000
1.8.60	Penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup	Palembang	Jumlah peraturan daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan	1 perda	185,000,000
1.17.147	Fasilitasi penyusunan program/kegiatan bidang LH	Palembang	Jumlah dokumen rencana kerja Program/Kegiatan bid LH di Prov Sumsel yang disusun	1 dokumen	35,000,000
1.17.144	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palembang	Jumlah Peralatan yang dibeli	1 paket	300,000,000
1.17.144	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palembang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	25 Unit	80,000,000
1.17.144	Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Publik di Bidang Kehutanan	Kota Palembang	Jumlah Pelayanan informasi publik di bidang kehutanan	1 Unit	15,000,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kota Palembang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	40 Unit	17,000,000

1.17.144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Palembang	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	2 Unit	200,000,000
1.17.144	Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	Palembang	Jumlah alat yang diadakan	4 unit	302,500,000
1.17.144	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor	Palembang	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	10 item	61,500,000
1.17.144	Pengadaan Bahan-Bahan Kimia Habis Pakai	Palembang	Jumlah pengadaan bahan kimia yang diadakan	80 jenis	702,500,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Kalibrasi Alat Laboratorium	Palembang	Jumlah Peralatan yang dikalibrasi	29 alat	100,000,000
1.17.144	Pembangunan Gudang Limbah B3 dan Bangunan Incenerator	Palembang	Jumlah gudang limbah B3 yang dibangun	1 gudang	76,000,000
1.17.144	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Palembang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	49 unit	50,000,000
1.17.143	Penyediaan Makanan dan Minuman	Palembang	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	1 paket	40,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang ;	Tersedianya Kebutuhan Surat Menyurat	1 kegiatan	5,950,000
1.17.143	penyediaan jasa pendukung administrasi teknis/perkantoran	palembang	jumlah honorarium jasa pendukung administrasi perkantoran-	10 orang tenaga honorer	256,750,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Kota Palembang	Jumlah tenaga kerja honorer	18 Orang	426,600,000
1.17.143	Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih	Kota Palembang	Jumlah peralatan dan bahan pembersih yang tersedia	408 Unit	10,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Tutor SKJ	Kota Palembang	Jumlah SKJ yang dilaksanakan	38 Kali	11,400,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kota Palembang	Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor	5 Orang	109,536,000
1.17.143	Penyedian Makan dan Minuman	Kota Palembang	Jumlah makan minum rapat	50 Paket	33,000,000
1.17.143	Penyedian Bahan Bacaan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang	Jumlah bahan bacaan	168 Eksemplar	29,880,000
1.17.143	Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional	Kota Palembang	Jumlah Kendaraan dinas/oprasional yang terpelihara	43 Kendaraan (Mobil dan Motor)	200,000,000
1.17.143	Penyedian Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Kota Palembang	Jumlah unit telepon, Internet, air dan listrik yang terbayar	4 Unit	330,000,000
1.17.143	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palembang	Jumlah komponen instalasi listrik	350 Buah	15,000,000
1.17.143	Penyediaan Barang Cetakaan dan Penggandaan	Kota Palembang	Jumlah barang cetak penggandaan	25000 Lembar	30,000,000
1.17.143	Penyedian Alat Tulis Kantor	Kota Palembang	Jumlah alat tulis kantor	2000 Buah	30,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah	Kota Palembang	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang diasuransikan	1 Unit	8,000,000
1.17.143	Penyediaan Surat Menyurat	Kota Palembang;	Jumlah Surat Yang terkirim	2200 Surat	5,000,000

1.17.143	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah	Kota palembang	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	62 Kali	279,084,000
1.17.143	Penyediaan jasa tutor SKJ	Palembang	Jumlah senam yang dilaksanakan	44 kali	11,000,000
1.17.143	Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	Palembang	Jumlah perjalanan dinas dalam provinsi, luar provinsi dan luar negeri	175 OH	380,000,000
1.17.143	Penyediaan jasa akreditasi laboratorium	Palembang	Jumlah pelaksanaan akreditasi laboratorium	1 kali	20,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Palembang	Jumlah tenaga kerja/tenaga lainnya	10 orang	256,750,000
1.17.143	Penyediaan makanan dan minuman	Palembang	Jumlah makanan dan minuman untuk rapat kantor dan konsumsi untuk kegiatan SKJ pegawai	75 kali (50 kali rapat + 25 kali SKJ)	75,000,000
1.17.143	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Palembang	Jumlah surat kabar dan buku bacaan kantor	4350 surat kabar dan 30 buku LH dan perundangan	20,000,000
1.17.143	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Palembang	Jumlah komponen alat listrik dan penerangan kantor	107 unit	4,000,000
1.17.143	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Palembang	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	72419 lembar	50,150,000
1.17.143	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Palembang	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	2585 item	85,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Palembang	Jumlah gedung kantor yang dibersihkan	1 gedung	200,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Palembang	-	0 -	36,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Palembang	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	9 unit	200,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palembang	Jumlah perngisian tabung pemadam kebakaran	5 tabung	4,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Palembang	Jumlah jasa pembayaran jasa telepon, air dan listrik	60 kali pembayaran	297,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	Jumlah surat menyurat yang terkirim	700 surat	3,550,000
1.17.126	Updating Data Website Biro Pemerintahan	Palembang	Jumlah data dan informasi yang tersedia	50 buletin	50,000,000
1.17.121	Monitoring dan Evaluasi Kependudukan	palembang	jumlah monitoring dan evaluasi yang dilakukan	17 kab/kota	335,000,000
1.17.121	pembinaan pelaporan catatan sipil	palembang	Jumlah SDM pencatatan sipil kabupaten/kota dan Instansi terkait yang terbina-	90 peserta	332,000,000
1.17.110	pembinaan dan pemantauan pelayanan administrasi terpadu di kecamatan provinsi sumatera selatan	Palembang	jumlah kabupaten/kota yang terbina dan terpantau	17 - kabupaten/kota	300,000,000
1.17.108	Ganti Rugi Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan	Palembang	Jumlah lahan yang dibebaskan	100 %	182,272,300,000

1.17.107	implementasi, pengelolaan dan sosialisasi SIAK secara terpadu	-Palembang	-jumlah SDM pengelola administrasi kependudukan yang terbina	17 kab/kota	470,000,000
1.10.75	Integritas Pelayanan Kesehatan dan Jejaring Epidemiologi	Kota Palembang; Kab Ogan Iliir; Kab Banyuasin	Jumlah korban bencana yang dilayani	1000 orang	50,000,000
1.10.74	Kerjasama dengan BUMN/BUMD dan Dunia Usaha	Kota Palembang	Jumlah penyusunan kerjasama dengan BUMN/BUMD dan dunia usaha	1 Kegiatan	50,000,000
1.10.72	Pembuatan Galangan Kapal	Palembang	Jumlah galangan kapal yang tersedia	1 unit	150,000,000
1.10.72	Pemadaman darat akibat kebakaran hutan dan lahan	Kab OKI, OI, Banyuasin, MUBA, Muara Enim dan Kota Palembang	Jumlah Pemadaman darat akibat kebakaran hutan dan lahan	30 titik api (hotspot)	1,200,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	Palembang	Jumlah honorarium yang dibayarkan kepada pengelola administrasi	12 Orang	308,100,000
1.17.144	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palembang	Rekapitulasi peralatan dan perlengkapan kantor	1 Laporan	200,000,000
1.18.148	Pembinaan dan Monitoring Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemprov. Sumsel	Palembang	Penyusunan SAKIP dilingkungan Pemprov. Sumsel	1 /SKPD	200,000,000
1.18.148	Pemutahiran Analisa Jabatan dan Analisa beban Kerja di lingkungan Setda Prov. Sumsel	Palembang	tersedianya Data Anjab dan ABK yang terkini di lingkungan Pemprov Sumsel	1 Dokumen	400,000,000
1.17.144	Pengembangan Aplikasi SIMPEG berbasis Online di Lingkungan Setda Prov. Sumsel	Palembang	tersedianya jaringan SIMPEG yang berbasis online	1 Aplikasi/Sistem	75,000,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	Kota Palembang	- Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 - unit	100,000,000
1.17.105	Penyusunan Uraian Tugas dan Fungsi SKPD serta Penataan UPT Dinas/Badan di Prov. Sumsel	Palembang	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang uraian tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan pembentukan UPT Prov. Sumsel	1	125,000,000
1.9.63	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Wanita (Dharma Wanita)	Palembang Sumatera Selatan	Jumlah Organisasi Wanita yang di fasilitasi	1 Dharma Wanita	318,140,000
1.9.62	Peranan Perempuan Dalam Politik	Palembang Sumatera Selatan	Jumlah anggota parpol perempua dalam Politik	180 Orang	89,000,000
1.9.62	Pelatihan Bagi Petugas Pencatatan dan Pelaporan data tindak Kekerasan	Palembang Sumatera Selatan	Jumlah Peserta Pelatihan Bagi Petugas Pencatatan dan Pelaporan Tindak Kekerasan	60 Orang	33,500,000
1.9.62	Advokasi Bahaya Narkoba dan HIV AIDS	Palembang Sumatera Selatan	Jumlah Anggota Organisasi Perempuan	200 Orang	26,000,000

1.20.159	Pembinaan Lembaga Penyuluhan HIV-AIDS Tk. Provinsi	Palembang	-Jumlah Peserta yang dibina	100 -Orang	100,000,000
1.2.9	Pelatihan GELS untuk perawat Emergency	Palembang	-Jumlah Tenaga Perawat di RSUD Kab/Kota yang terlatih GELS	60 -orang	170,000,000
1.2.9	Sosialisasi Program Pengendalian Resistensi Anti Mikroba (PPRA) Provinsi Sumsel	Palembang	-Jumlah RSUD yang tersosialisasi tentang program PPRA	21 -RSUD	87,880,000
1.2.9	Pertemuan Evaluasi Pelayanan Darah Aman	Palembang	-Jumlah Rumah Sakit, UTD, BDRS Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan darah aman	80 -RS, Dinkes, UTD PMI	135,000,000
1.2.9	Pertemuan DOTS T B dan MDR/XDR di RS	Palembang	-Jumlah RSUD yang melaksanakan Program DOTS TB dan MDR/XDR di RS	21 -RSUD	87,880,000
1.2.9	Pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan dan kebugaran	Kota Palembang;	-Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan olahraga	445 orang	195,955,000
1.2.21	Pembinaan dan pengawasan produk pangan industri pabrikan	7 Kab/Kota (Palembang, Lubuk Linggau, 4 Lawang, Prabumulih, Muara Enim, Banyuasin, Lahat)	-Jumlah Industri Makanan Minuman yang dibina tentang kesehatan dan keamanan makanan	10 -Industri Makanan	350,000,000
1.18.154	Penyelenggaraan Musyawarah KORPRI Prov. Sumsel	Palembang	Jumlah Musyawarah KORPRI Prov. Sumsel yang dilaksanakan	1 Kali	40,000,000
1.18.152	Pertandingan Olahraga Bola Volly Antar SKPD Prov. Sumsel	Palembang	Jumlah Pertandingan Olahraga Bola Volly Antar SKPD yang dilaksanakan	1 Kali	121,839,000
1.18.152	Senam Kesegaran Jasmani (SKJ)	Palembang	Jumlah Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) Bersama Anggota KORPRI yang dilaksanakan	6 Kali	120,000,000
1.18.150	Pembekalan Kewirausahaan Bagi PNS/Anggota KORPRI Yang Akan Memasuki Masa Pensiun	Palembang	Jumlah Penyelenggaraan Pembekalan Kewirausahaan bagi Anggota KORPRI yang akan memasuki masa Pensiun	1 Kali	110,000,000
1.18.149	Pelepasan PNS/Anggota KORPRI yang memasuki masa Pensiun	Palembang	Jumlah Pelepasan bagi PNS/Anggota KORPRI yang memasuki masa Pensiun yang dilaksanakan	3 Kali	55,500,000
1.18.149	Penyelenggaraan Pengajian dan Ceramah Agama Islam	Palembang	Jumlah Pengajian dan Ceramah Agama Islam yang dilaksanakan	15 Kali	105,500,000
1.18.149	Pelatihan Paduan Suara KORPRI Prov. Sumsel	Palembang	Jumlah pelatihan paduan suara bagi anggota KORPRI yang dilaksanakan	1 Kali	100,000,000
1.17.147	Rapat Teknis SKPD Satpol. PP. Prov dengan Satpol. PP. Kab/Kota se-Sumse	Palembang	Terlaksananya Rapat Teknis SKPD Satpol. PP. Prov dengan Satpol. PP. Kab/Kota se-Sumsel	1 kegiatan	50,000,000
1.17.147	Monitoring dan Evaluasi Teknis Kepamong Prajaan	Palembang	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Teknis Kepamong Prajaan	1 dokumen	60,000,000

1.17.147	Penyusunan Rencana Program/Kegiatan dan Pelaporan	Palembang	Terlaksananya Penyusunan Rencana Program/Kegiatan dan Pelaporan	5 dokumen	10,000,000
1.17.147	Rapat Teknis SKPD	Palembang	Jumlah kabupaten / kota yang mengikuti kegiatan rapat teknis SKPD	17 Kabupaten / Kota	114,000,000
1.17.146	Pelatihan Kebugaran Fisik dan Penyegaran Anggota Satpol. PP.	Palembang	Terlaksananya Pelatihan Kebugaran Anggota Satpol. PP.	175 orang	125,000,000
1.17.145	Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai yang Berprestasi	Palembang	Terlaksananya Penghargaan Pegawai yang berprestasi	12 orang	6,000,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Palembang Sumatera Selatan	Tersedianya Perlengkapan kantor yang dibutuhkan	4 Jenis	20,000,000
1.17.144	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	BPP-PA Palembang Sumatera Selatan	Jumlah Gedung/ Kantor yang di rehabilitasi	1 Gedung	93,000,000
1.17.144	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Palembang Sumatera Selatan	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	50,000,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palembang	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor secara rutin/berkala	10 paket	95,000,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Palembang	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 paket	50,000,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Palembang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 Unit	50,000,000
1.17.144	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palembang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 Paket	49,385,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan	Palembang	Jumlah peralatan kerja kantor yang mendapatkan perawatan/ perbaikan	85 Jenis	75,000,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Palembang	Jumlah gedung kantor yang diperlihara	1 Gedung	200,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Tentor SKJ	Palembang Sumatera Selatan	Jumlah tenaga Tentor SKJ yang dibayar	1 Orang	13,200,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/ Perkantoran	Palembang Sumatera Selatan	Jumlah tenaga outsourcing yang dibayar	12 Orang	256,750,000
1.17.143	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palembang Sumatera Selatan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	15,000,000
1.17.143	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Palembang Sumatera Selatan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan	26 Jenis	150,000,000
1.17.143	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Palembang Sumatera Selatan	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan	55 Jenis	200,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Palembang Sumatera Selatan	Jumlah Jenis Peralatan Kerja Yang diperbaiki	4 Jenis	27,500,000
1.17.143	Penyediaan Alat Kebersihan Kantor	Palembang Sumatera Selatan	Jumlah Alat dan Bahan Kebersihan Kantor disediakan	41 Jenid	65,800,000

1.17.143	Penyedian Jasa Administrasi Keuangan	Palembang Sumatera Selatan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan Yang dibayar	9 Orang	43,200,000
1.17.143	Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Palembang Sumatera Selatan	Jumlah STNK, jasa service, penggantian suku candang dan BBM Kendaraan Dinas/Operasional roda dua dan roda empat	12 unit	220,000,000
1.17.143	Penyedian Jasa Kemunikasi, Telpon, Air, Listrik dan Internet	Palembang Sumatera Selatan	Jumlah Jasa Kemunikasi, Telpon, Air, Listrik dan Internet	9 Jaringan	200,000,000
1.17.143	Penyedian Jasa Surat Menyurat	Palembang Sumatera Selatan	Jumlah Pengiriman Surat dan Pembelian Benda Pos	910 surat/materai	7,000,000
1.17.143	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Palembang	Tersedianya bahan bacaan	12 bulan	18,000,000
1.17.143	Penyediaan peralatan dan bahan pembersih	Palembang	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	12 bulan	36,000,000
1.17.143	Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis/perkantoran	Palembang	Tersedianya jas pendukung administrasi teknis/perkantoran	58 orang	1,489,150,000
1.17.143	Penyediaan makanan dan minuman	Palembang	Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	400,000,000
1.17.143	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Palembang	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	24,000,000
1.17.143	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Palembang	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	100,000,000
1.17.143	Penyediaan alat tulis kantor	Palembang	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	150,000,000
1.17.143	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Palembang	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	12 bulan	98,400,000
1.17.143	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Palembang	Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	47 unit	950,050,000
1.17.143	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Palembang	Terlaksananya jasa telepon, air dan listrik	12 bulan	263,600,000
1.17.143	Penyediaan jasa surat menyurat	Palembang	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	4,800,000
1.17.143	Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis/perkantoran	Palembang ;	insentif bagi tenaga sukarela	4 Orang	102,700,000
1.17.143	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Palembang	Jumlah Alat kebersihan kantor dan bahan pembersih yang dibeli	40 Jenis	20,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Palembang	Jumlah tenaga administrasi/Teknis Perkantoran yang dibayar	65 OB	128,375,000
1.17.143	Penyediaan Makanan dan Minuman	Palembang	Jumlah rapat-rapat yang dilaksanakan	12 Kali	14,510,000
1.17.143	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Palembang	Jumlah surat kabar/koran/majalah/bahan bacaan/peraturan perundang-undangan yang dibeli	5 Jenis	10,200,000
1.17.143	Penyediaan Komponen Instalasi	Palembang	Jumlah Alat-alat Listrik yang dibeli	20 Jenis	10,000,000

	Listirk/Penerangan Bangunan Kantor				
1.17.143	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Palembang	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang dibeli	25 Jenis	57,585,000
1.17.143	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Palembang	Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibeli	65 Jenis	84,201,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Palembang	Jasa kebersihan kantir yang dibayar	26 OB	51,350,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Palembang	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan	108 OB	43,200,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Palembang	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	10 Unit	130,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Palembang	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di asuransikan	4 Unit	18,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palembang	Jumlah rekening listrik, telepon/fax, dan internet yang dibayar	48 Kwitansi/Rekening Pembayaran	91,240,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	Jumlah Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya yang dibeli	650 Buah	3,500,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	Jumlah surat yang terkirim dalam satu tahun	1800 Surat/Materai/Perangko	30,000,000
1.17.143	Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih	Palembang	Jumlah peralatan dan bahan pembersih yang tersedia	464 Kotak / Buah / Jerigen	10,600,000
1.17.143	Dokumentasi dan Publikasi	Palembang	Jumlah publikasi dan dokumentasi kegiatan dinas	10 Kali	70,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Tutor SKJ	Palembang	Jumlah tenaga tutor SKJ	44 Orang	13,200,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis / Perkantoran	Palembang	Jumlah tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran	21 Orang	539,175,000
1.17.143	Penyediaan Makanan dan Minuman	Palembang	Jumlah porsi / kegiatan makan dan minum rapat dan tamu serta kegiatan olahraga	104 Kali	150,000,000
1.17.143	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Palembang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	9720 Buku / Eksemplar	35,000,000
1.17.143	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Palembang	Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor	84092 Lembar / Rim / Buku	80,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Palembang	Jumlah pegawai administrasi keuangan	20 Orang Bulan	93,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Pemeriharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Palembang	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	31 Unit	382,821,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Palembang	Jumlah jasa jaminan barang milik daerah	26 Unit	50,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palembang	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	60 Rekening / Kwitansi	372,000,000

1.17.143	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palembang	Jumlah komponen listrik / penerangan bangunan kantor	4 Jenis	19,000,000
1.17.143	-Penyediaan Alat Tulis Kantor	Palembang	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam satu tahun	45 Jenis	99,919,000
1.17.143	-Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Palembang	Jumlah jasa kebersihan kantor	72 OB	200,000,000
1.17.143	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Palembang	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman-	12 bln	185,000,000
1.17.143	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palembang	-Terlaksananya Sarana penunjang Pelaksanaan Tugas Dinas Pendidikan dan UPTD	1 Paket	150,000,000
1.17.143	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Palembang	-Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bln	180,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	Tersedianya Jasa surat menyurat	14510 surat	49,500,000
1.17.143	Dokumentasi dan Publikasii	Palembang	Terlaksanannya Kegiatan Dokumentasi dan Publikasi-	12 bln	100,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Tutor SKJ	Palembang	-Terlaksannya Kegiatan Penyediaan Jasa Tutor SKJ	44 kali	5,400,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Palembang	Terlaksannya Kegiatan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran-	12 bln	877,500,000
1.17.143	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Palembang	Terlaksannya Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bln	85,000,000
1.17.143	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dari Penerangan Bangunan Kantor	Palembang	-Terlaksannya Penyediaan Komponen Instalasi Lisrik /Penerangan Bangunan Kantor	1 -Paket	80,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Palembang	Tersedianya Alat Tulis Kantor-	12 bln	165,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Palembang	-Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12 bln	600,000,000
1.17.143	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palembang	Terlaksananya Sarana Penunjang Pelaksanaan Tugas Dinas Pendidikan dan UPTD	12 bln	100,000,000
1.17.143	-Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Palembang ;	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik-	12 bln	2,376,075,000
1.17.122	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan di Lingkungan Setda Prov. Sumsel	Kota Palembang;	Jumlah karyawan yang mengikuti kegiatan keagamaan	15600 Orang	89,150,000
1.17.122	Fasilitasi Embarkasi dan Debarksi Haji	Kota Palembang;	Jumlah Calon Jemaah Haji yang difasilitasi	5250 orang	312,400,000
1.17.122	Forum Lintas Agama	Kota Palembang;	Jumlah peserta yang mengikuti forum	300 Orang	257,550,000
1.17.105	Pemberian Bantuan Hukum Cuma - cuma pada masyarakat miskin Sumsel	Palembang	Jumlah Kasus yang ditangani	5 perkara	400,000,000

1.17.105	Penelitian & Penelaahan draf Kpts Gubernur Sumsel	Palembang	Jumlah Penelitian dan penelaahan draft keputusan gubernur sumsel	750 Draf	75,000,000
1.17.105	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Daerah Melalui Media Cetak	Palembang	Jumlah Peraturan yang di sosialisasikan	6 (2 Perda / 2 Raperda /2 Pergub)	40,000,000
1.17.105	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi Hukum di Provinsi Sumatera Selatan	Palembang	Jumlah Perda dan Pergub	50 Jumlah Updating Data	40,000,000
1.17.105	Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Program RANHAM dan Koordinasi Pelaksanaan HAM	Palembang	Laporan Monev	30 Kali 17 Kab/Kota	50,000,000
1.17.105	Penyuluhan Hukum	Palembang	Jumlah Perda dan Pergub	2 Kab/Kota	80,000,000
1.17.105	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Palembang	Jumlah Perda dan Pergub	52 Peraturan (12 perda dan 40 Pergub)	300,000,000
1.16.101	Operasi Penertiban Tibum dan Tranmas di Wilayah Prov. Sumsel	Kota Palembang	terlaksanannya operasi penertiban tibum dan tranmas	3 kali	175,000,000
1.16.101	Pembinaan Tibum dan Tranmas kepada masyarakat di provinsi sumatera selatan	Kota Palembang; Kabupaten Muara Enim; Kota Prabumulih; Kota Pagar Alam;	terselenggarannya pembinaan tibum tranmas kepada masyarakat	4 kab/kota	120,000,000
1.15.98	Perkemahan Saka Kepramukaan	Palembang	Jumlah peserta pramuka yang mengikuti perkemahan saka	1000 orang	500,000,000
1.15.98	Jambore On The Air dan Jambore On The Internet (JOTA & JOTI)	Palembang	Jumlah peserta pramuka yang mengikuti kegiatan jambore on the air dan jambore on the internet	30 orang	30,000,000
1.15.98	Giat Prestasi Pramuka	Palembang	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan giat prestasi pramuka	1000 orang	150,000,000
1.15.98	Rapat Kerja Daerah	Palembang	Jumlah peserta pramuka yang mengikuti rapat kerja daerah	100 orang	120,000,000
1.15.97	Dukungan Peralatan Olahraga untuk Masyarakat	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten	Jumlah peralatan olahraga untuk masyarakat	40 Klub/Karang Taruna	190,000,000

		Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Pagar Alam; Kota Palembang; Kota Prabumulih;			
1.15.97	Dukungan peralatan olahraga untuk pondok pesantren di Sumsel	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk	Jumlah ponpes di Provinsi Sumatera Selatan yang mendapat bantuan peralatan olaharaga	25 Pondok Pesantren	190,000,000

		Lingga; Kota Pagar Alam; Kota Palembang;			
1.15.97	Pengembangan Industri Olahraga	Palembang	Jumlah Peserta Pelatihan Industri Olahraga	50 orang	200,000,000
1.15.96	Olahraga antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel	Palembang	Jumlah peserta olahraga masal dalam 1 tahun	1000 orang	100,000,000
1.15.96	Pemasalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat	Palembang	Jumlah peserta olahraga masal dalam 1 tahun	2500 orang	100,000,000
1.15.96	Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi	Palembang	Jumlah insan olahraga yang mendapat penghargaan	22 orang	300,000,000
1.15.96	Dukungan Pekan Paralympic Nasional	Palembang-Jawa Barat	Jumlah Kontingen Sumatera Selatan	1 Kegiatan	500,000,000
1.15.96	Dukungan PON	Palembang	Jumlah Monitoring kegiatan PON Jawa Barat	1 Kontingen	200,000,000
1.15.96	Pusat Pembinaan Latihan Pelajar (PPLP) Sumsel	Palembang	Jumlah Atlet dan cabor PPLP yang mendapat fasilitasi	32 orang	1,000,000,000
1.15.95	Pelatihan Tenaga Pelatih Olahraga	Palembang	JUmlah Peserta Pelatihan Tenaga Pelatih Olahraga Prestasi	25 orang	70,000,000
1.15.95	Sosialisasi Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan	Palembang	Jumlah peserta sosialisasi standarisasi dan akreditasi nasional keolahragaan	50 orang	100,000,000
1.15.95	Pelatihan Pengukuran Kebugaran Olahraga	Palembang	Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Pelatih Olahraga Prestasi	40 orang	70,000,000
1.15.94	Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda	Palembang	Jumlah pemuda (laki-laki dan perempuan) yang mengikuti penyuluhan tentang bahaya narkoba	300 orang	300,000,000
1.15.93	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	Palembang	-jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	50 orang	350,000,000
1.15.92	Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP)	Palembang, Luar Daerah	Jumlah pemuda yang mengikuti program pertukaran pemuda antar provinsi	6 orang	70,000,000
1.15.92	Pemilihan Pemuda Pelopor	palembang	jumlah pemuda pelopor berprestasi di sumatera selatan	15 -orang	240,000,000
1.15.92	Lomba Lintas Alam Pemuda se-Sumatera Selatan	palembang	jumlah pemuda yang mengikuti lomba lintas alam pemuda dan meningkatkan semangat juang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	2000 -orang	200,000,000
1.15.92	Paskibraka Provinsi Sumatera Selatan	Palembang	jumlah peserta yang mengikuti seleksi dan pelatihan paskibraka	104 -orang	2,000,000,000

1.15.92	Jambore Pemuda Daerah (JPD) Prov. Sumsel	Palembang, OKU	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan jambore pemuda daerah	400 orang	400,000,000
1.10.70	Perlindungan Sosial bagi Korban tindak kekerasan dalam rumah tangga dan Pekerja Migran	Kota Palembang	Terlaksananya pemberian bantuan UEP korban tindak kekerasan dalam rumah tangga dan tersedianya konseling trauma center bagi KTK dan Eks KTK	60 orang	200,000,000
1.10.70	Fasilitasi Taruna Siaga Bencana (Tagana), Petugas Penata Usahaan Gudang Logistik, dan Petugas Posko	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Pagar Alam; Kota Palembang; Kota Prabumulih;	Terpenuhinya tali asih dan Uniform TAGANA, Petugas Penata Usahaan Gudang Logistik, dan Petugas POSKO Kesiap Siagaan Bencana Bidang Perlindungan Sosial	945 orang	1,412,800,000
1.10.69	Sosialisasi Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	Kota Palembang	Terselenggaranya seminar calon pahlawan, pelestarian dan peringatan HKSN	500 orang	250,000,000
1.10.69	Fasilitasi Persatuan Amal Kematian (PAK) di Sumatera Selatan	- Kabupaten Penukal Abab Lematang	Tersedianya bantuan tenda, kursi , wireless dan Mobil Ambulance untuk Persatuan Amal Kematian;	30 pak	3,345,000,000

		Ilor; Kota Palembang; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Banyuasin; ; Kota Prabumulih; Kabupaten Empat Lawang;	dan kend R4		
1.10.69	Fasilitasi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)	- Kota Pagar Alam; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muratara; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kota Prabumulih; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kota Palembang; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu;	ersedianya tali asih bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	228 orang	730,000,000
1.10.67	Pemberdayaan Keluarga Rentan	Kab. MUBA; Kab. OI; Kota Palembang	Tersedianya Usaha Ekonomi Produktif bagi Keluarga Rentan	150 kk	500,000,000
1.10.67	Bedah Kampung	MUBA dan Kota Palembang	-Tersedianya Lingkungan/Pemukiman yang Sehat	25 kk	700,000,000
1.1.7	Pendidikan Untuk Semua	Palembang	Terlaksanannya Kegiatan Pendidikan Untuk Semua	3 Laporan	140,000,000
1.1.7	Pembinaan Kreatifitas Siswa(Cerdas Cermat)	Palembang	Terlaksanannya Kegiatan Lomba Cerdas Cermat	3 Kegiatan	345,000,000
1.1.7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Palembang	Terlaksanannya Kegiatan Monitoring dan Pelaporan	5 Laporan	380,000,000

1.1.7	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Palembang	Tersediannya data profil Pendidikan Sumsel 15 Dokumen	3 Dokumen	350,000,000
1.1.7	Evaluasi dan Pembinaan Beasiswa Kemitraan	Palembang	Terselenggarannya Kegiatan Evaluasi dan Pembinaan Beasiswa Kemitraan	635 Orang	125,000,000
1.1.7	Perencanaan dan Penyusunan Program Bidang Pendidikan	Palembang	Terselenggarannya Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Program Bidang Pendidikan	4 Kegiatan	385,000,000
1.1.7	Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa	Palembang	Terselenggarannya Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa	90 Kegiatan	198,000,000
1.1.7	Pembinaan Dewan Pendidikan	Palembang	Terlaksanannya Kegiatan Dewan Pendidikan	300 Orang	600,000,000
1.1.4	Seleksi dan Identifikasi Bakat Olah raga Siswa	Palembang	Terselenggarannya Kegiatan Seleksi dan Indetifikasi Bakat dan Olah raga Siswa	200 Orang	220,000,000
1.1.4	Pembinaan dan Kreativitas Seni Budaya	Palembang	Pembinaan dan Kreatifitas Seni Budaya	6 Kegiatan	1,600,000,000
1.1.4	Pengembangan Model Pendidikan Non Formal	Palembang ;	Meningkatnya kualitas Pengembangab Model	160 Orang	260,000,000
1.1.4	Pekan Olah Raga Mahasiswa	Palembang	Terselenggarannya Kegiatan Pekan Olahraga Mahasiswa	3 Kegiatan	2,900,000,000
1.1.4	Pengembangan Bakat Olahraga	Palembang	Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Bakat Olahraga	340 Orang	250,000,000
1.1.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD BP3NFI	Palembang	Perlengkapan Kantor, Meubeler Kantor, Taman Lingkungan dan Asrama Kantor	1 paket	500,000,000
1.1.4	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Palembang	Terlatihnya tenaga pendidik, Tenaga Kependidikan PNFI	195 orang	260,000,000
1.5.42	Rehab Gedung UPTD PIP2B	Kota Palembang	Jumlah Bangunan yang terbangun	1 Gedung	500,000,000
1.7.60	Rapat Teknis SKPD	Kota Palembang;	Jumlah Dokumen Rapat Teknis	1 Dokumen	75,000,000
1.7.60	Penyusunan Statistik Perhubungan dan Kominfo	Kota Palembang;	Jumlah dokumen Statistik perhubungan dan kominfo	1 dokumen	60,000,000
1.7.59	Sosialisasi Bengkel Konstruksi /(Penguji dan Karoseri) Kendaraan Bermotor Se-Sumsel	Kota Palembang;	Jumlah Peserta Yang Memperoleh Peserta	50 Peserta	80,000,000
1.7.59	Pemeliharaan Alat Pengujian	Palembang;	Jumlah Alat Uji Yang Terpelihara	1 Alat	50,000,000
1.7.59	Pengelolaan dan Penyelenggaraan UPTD BPLJKB	Kota Palembang;	Jumlah Gedung Yang Dikelola dan Dipelihara	1 Gedung UPTD BPLJKB	546,559,000
1.7.57	Penyediaan jasa pendukung tenaga teknis pengelolaan pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api	Kota Palembang;K ab. Banyuasin	Jumlah jasa teknis pengelolaan pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api	43 Orang	1,104,025,000
1.7.56	Penyelenggaraan dan Pemeliharaan ATCS	Kec. Bukit Kcil Kota Palembang;	Jumlah persimpangan yang terpantau	1 Simpang	300,000,000
1.7.56	Lomba tertib Lalu Lintas Tingkat Provinsi	Kota Palembang;	Jumlah terseleksinya Kab/Kota yang mendapatkan piala	8 Piala	200,000,000

1.7.56	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	Kota Palembang;	Frekuensi penyelenggaraan kegiatan pemilihan pelajar pelopor	1 Kali	150,000,000
1.7.54	Perencanaan Heliport di Jakabaring Sport City	Kota Palembang;	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan heliport di jakabaring sport city	1 Dokumen	141,450,000
1.7.54	Posko Haji dan Event Lainnya	Kota Palembang;	Jumlah posko yang tersedia	1 posko	60,000,000
1.7.54	Forum Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional SMB II Palembang	Kota Palembang;	Jumlah dokumen rumusan informasi dan permasalahan bandara internasional	1 Dokumen	60,000,000
1.7.54	Pembuatan Software Database Kebandarudaraan	Kota Palembang;	Jumlah sistem software database kebandarudaraan	1 Sistem	35,000,000
1.7.53	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai	Kabupaten Banyuasin; Kota Palembang;	Jumlah Rambu-rambu sungai yang terpasang	150 Rambu	275,000,000
1.7.53	Razia Kapal Pedalaman Angkutan Sungai	Kabupaten Banyuasin;Kota Palembang	Terlaksananya kegiatan razia kapal pedalaman angkutan sungai	1 Lokasi	100,000,000
1.7.52	Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Palembang	Frekuensi Penyelenggraan Kegiatan Pemilihan	34 Orang	175,000,000
1.7.52	Posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Palembang;Banyuasin	Jumlah Posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	7 Posko	200,000,000
1.5.42	Rehab Pelataran Parkir Dan Pagar Gedung PPAD di Palembang	Kota Palembang	- Bangunan Gedung Negara yang di tata	1 -unit	400,000,000
1.5.42	Lomba Pekerja Konstruksi Tingkat Provinsi Tahun 2015	Kota Palembang	Jumlah Dokumen yang tersusun	1 Dokumen	200,000,000
1.5.42	Diseminasi Peraturan Perundang-undangan terkait Jasa Konstruksi	Kota Palembang	Jumlah Dokumen yang tersusun	1 Dokumen	250,000,000
1.5.42	Peningkatan Kualitas SDM Bidang Jasa Konstruksi	Kota Palembang	Jumlah Dokumen yang tersusun	1 Dokumen	400,000,000
1.5.42	Bimtek SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan SMM (Sistem Manajemen Mutu)	Kota Palembang	Jumlah Dokumen yang tersusun	1 Dokumen	300,000,000
1.5.42	Pelatihan Administrasi Kontrak / Hukum Kontrak	Kota Palembang	Jumlah Dokumen yang tersusun	1 Dokumen	150,000,000
1.5.42	Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Sumsel	Kota Palembang	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	6 keg	400,000,000
1.5.42	Rehab Gedung Asrama Haji	Kota Palembang	Jumlah Bangunan yang terbangun	1 Gedung	2,150,000,000
1.5.42	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Murah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kawasan OPI Jakabaring Palembang	Kota Palembang	Jumlah Bangunan Gedung yang terbangun	1 kws	2,050,000,000
1.5.41	PENYUSUNAN RTR Kawasan Metropolitana	Kota Palembang	-jumlah laporan perencanaan dan	1 -paket	1,500,000,000

	Kota Palembang		pengawasan gedung		
1.3.32	pembuatan kolam retensi RS.Ernaldi Bahar	kota palembang	bertambahnya jumlah kolam retensi	1 lokasi	15,071,990,000
1.3.34	Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Kolam Retensi	Kota Palembang	Meningkatnya Jumlah Lahan Untuk Pembangunan Kolam Retensi	1 Lokasi	3,154,466,000
1.3.29	Pemeliharaan Alat - Alat Kebinamargaan	Kota Palembang;	Jumlah Alat - Alat Kebinamargaan Yang Dipelihara	11 Unit	1,000,000,000
1.3.29	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Laboratorium	Kota Palembang;	Jumlah Alat - Alat Laboratorium Yang Dipelihara / Kalibrasi (Set)	1 Set	1,500,000,000
1.3.28	Penyusuna IIRMS Yang Terintegrasi Dengan Sistem Informasi Jaringan Jalan Provinsi	Kota Palembang;	Jumlah Dokumen IIRMS (Dokmen)	1 Dokumen	250,000,000
1.3.28	Paket Ganti Rugi Pembebasan Lahan	Kota Palembang;	Lahan Yang Dibebaskan (Lokasi)	4 Kab/Kota	34,091,570,000
1.3.28	Penyusunan Sistem Informasi Bridge Management System (BMS)	Kota Palembang;	Jumlah Dokumen BMS	1 Dokumen	400,000,000
1.3.25	Pembangunan Jembatan Musi 6 Kota Palembang	Kota Palembang;	Panjang Jembatan Yang Terbangun	400 M	340,000,000,000
1.23.171	Pengadaan Peralatan Presentase	Kota Palembang	Jumlah Peralatan Presentase Yang Tersedia	4 Unit	200,000,000
1.23.171	Sumatera Selatan Wifi Area mendukung Asian Games	Kab/Kota Sumsel;Kota Palembang ;	Jumlah Wifi Area Titik dan Lokasi	68 Titik	3,400,000,000
1.23.171	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Palembang	Tersedianya Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik	50 SKPD	457,107,000
1.23.171	Bandwith Internet Prov. Sumsel	Kota Palembang ;	Tersedianya Layanan Bandwith Secara Elektronik	200 MBps	1,300,000,000
1.23.170	Pameran Dishubkominfo Prov. Sumsel dan Festival Filateli Sumsel	Kota Palembang;	Jumlah peserta yang dibina	200 Orang	300,000,000
1.23.170	Pembinaan Amatir Radio	Kota Palembang;	Jumlah peserta yang dibina	110 Orang	75,000,000
1.23.170	Sriwijaya HAM Festival	Kota Palembang;	Frekuensi Festival	1 Kali	350,000,000
1.23.170	Pemeliharaan dan Operasional Radio Komunikasi	Kota Palembang;	Jumlah radio komunikasi	30 Radio komunikasi	150,000,000
1.23.170	Pembinaan dan Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi	Kota Palembang;	Jumlah peserta sosialisasi jasa titipan	100 Peserta	85,000,000
1.23.169	Pekan Informasi Nasional (PIN)	Kota Palembang;	Jumlah peserta PIN	45 Peserta	246,670,000
1.23.169	Publikasi Sumsel Melalui Elektronik dan Media Cetak	Kota Palembang;	Jumlah publikasi melalui media	10 Media	300,000,000
1.23.169	Dukungan Penyelenggaraan Komisi Informasi Prov. Sumsel	Kota Palembang;	Jumlah bulan penyelenggaraan kegiatan komisi informasi Prov. Sumsel	12 Bulan	1,250,000,000
1.23.169	Pembinaan dan Pertunjukkan FK-METRA	Kota Palembang;	Jumlah FK-Metra yang dibina	45 Kelompok FK-METRA	75,000,000

1.23.169	Publikasi Sumsel Melalui Media Baliho dan LED	- Kota Palembang; - Kota Jakarta;	Jumlah titik lokasi	5 Titik	3,525,000,000
1.23.166	Rakornis Pengembangan Penyiaran di wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Palembang	-Jumlah rakornis	1 -Rapat	45,850,000
1.23.165	Publikasi Lembaga KPID	Palembang	Jumlah Publikasi Lembaga KPID yang terpublikasi	8 Kali	50,000,000
1.17.147	Penyusunan DPA Setda	Palembang	Tersedianya Dokumen Anggaran	15 Buku RKA-DPA SKPD	40,000,000
1.17.147	Pendataan dan Penataan Arsip Aktif dan Non Aktif	Palembang	Rekapitulasi Pendataan dan Penataan Arsip Aktif dan Non Aktif	9000 Arsip	300,000,000
1.17.147	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palembang	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	20,000,000
1.17.147	Rapat Teknis SKPD	Kota Palembang;	Jumlah Kegiatan Rapat teknis (Kegiatan)	1 Kegiatan	75,000,000
1.17.147	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD	Kota Palembang;	Jumlah Rencana Kerja SKPD Dinas PU Bina Marga (Dokumen)	1 Dokumen	10,000,000
1.17.147	Penyusunan LAKIP	Kota Palembang;	Jumlah Laporan Kinerja (Dokumen)	1 Dokumen	10,000,000
1.17.147	-Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Palembang	-jumlah laporan yang disediakan	1 -dokumen	100,000,000
1.17.147	-Rapat Teknis SKPD	Palembang	-Rapat kegiatan yang dilaksanakan	1 -kegiatan	100,000,000
1.17.147	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Palembang	-Jumlah dokumen yang disediakan	1 -dokumen	10,000,000
1.17.147	-Penyusunan LAKIP	Palembang	-Jumlah Dokumen yang disediakan	1 -dokumen	10,000,000
1.17.147	Rapat Koordinasi Teknis SKPD PU Pengairan	Kota Palembang;	jumlah dokumen hasil rapat teknis	1 dokumen	22,000,000
1.17.146	Rekrutmen Anggota KPID Sumsel	Palembang	Jumlah Anggota KPID yang di rekrut	7 Orang	230,000,000
1.17.146	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Palembang	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek	10 Orang	100,000,000
1.17.146	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kota Palembang;	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat	20 Orang	150,000,000
1.17.145	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Palembang	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	303 Orang	950,000,000
1.17.145	Fasilitasi Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI	Palembang	Pelaksanaan Peringatan HUT Proklamsi Kemerdekaan RI	1 Kegiatan	1,500,000,000
1.17.144	Rehab gedung Kantor	Palembang	Jumlah Gedung Kantor yang Direhab	1 Paket	110,000,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palembang	Jumlah peralatan dan Perlengkapan yang dipelihara	15 Jenis	24,000,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Palembang	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Paket	24,000,000
1.17.144	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palembang	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	15 Jenis	128,500,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palembang	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Telah Dipelihara	26 Aset	1,100,000,000

1.17.144	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Palembang	Rekapitulasi Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Kegiatan	2,300,000,000
1.17.144	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palembang ;	Rekapitulasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26 Aset	3,157,500,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Palembang	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	195 Unit	6,000,000,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Palembang	Jumlah Rumah Dinas yang Dipelihara	1 Kegiatan	3,500,000,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Palembang	Jumlah Rumah Jabatan yang Dipelihara	3 Unit	400,000,000
1.17.144	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Palembang	Rekapitulasi Penambahan Kendaraan Dinas	5 Unit	5,454,943,000
1.17.144	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Palembang	Bangunan/Gedung Yang Direhab	1 Kegiatan	500,000,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Palembang	Bangunan dan Gedung Yang Dipelihara	26 Aset	4,000,000,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Palembang;	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dipe;ihara (Set)	1 Set	95,000,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Palembang;	Jumlah Gedung Yang Terpelihara (Gedung)	4 Gedung UPTD	1,000,000,000
1.17.144	Pemeliharaan Berkala Mobil Derek	Palembang;	Jumlah Mobil Derek Yang Dipelihara	3 Unit	150,000,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palembang;	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Terpelihara	1 Keg	200,000,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Palembang;	Jumlah GedungYang Terpelihara	3 Gedung	300,000,000
1.17.144	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palembang;	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Keg	300,000,000
1.17.144	-Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Palembang	-Sarana dan prasarana Perkantoran di sediakan	3 -ruang	200,000,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Palembang	-Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di laksanakan	1 -gedung	185,000,000
1.17.144	Pengadaan Mebeleur	Palembang	-Jumlah Mebeleur di sediakan	3 -ruang	150,000,000
1.17.144	Pelatihan Pengawasan Pekerjaan Bidang Pengairan	Kota Palembang;	Jumlah Kebutuhan pelatihan tenaga kerja pengawas yang handal	50 Orang	46,750,000
1.17.144	Rehabilitasi Sedang / berat Gedung Kantor	Kota Palembang;	Jumlah Kebutuhan Rehab. Sedang Gedung	1 Gedung	500,000,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Palembang;	Jumlah Pemeliharaan Rutin Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan	2 Gedung	77,000,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Palembang;	Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Rutin Gedung	2 Gedung	110,000,000
1.17.144	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Palembang;	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dibutuhkan	1 tahun	700,000,000

1.17.143	Penyediaan Jasa Tutor SKJ	Palembang	Tutor SKJ	1 Orang (11 OB)	13,200,000
1.17.143	Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih	Palembang	Jumlah Peralatan Kebersihan yang tersedia dan bahan pembersih	18 8 jenis alat dan 10 jenis bahan	24,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	Palembang	Jumlah tenaga kerja sukarela (TKS) yang tersedia	20 Orang (240 OB)	513,500,000
1.17.143	Penyediaan Makanan dan Minuman	Palembang	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu dan Peserta Rapat	24 Kali Jamuan Tamu dan Rapat	65,000,000
1.17.143	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang	Palembang	Jumlah Media cetak yang tersedia	5 Jenis (60 exp)	6,000,000
1.17.143	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palembang	Jumlah Komponen Listrik yang tersedia	10 Jenis	40,000,000
1.17.143	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Palembang	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	6 Jenis	53,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	Palembang	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	20 Jenis	70,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Palembang	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	14 Orang (168 OB)	553,800,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Palembang	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	12 Unit	160,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, Listrik	Palembang	Jumlah Rekening yang Dibayar	4 Rekening (48 Kwitansi)	90,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	Jumlah Surat yang Dikirim	400 Surat	10,000,000
1.17.143	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri	Palembang	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	385 Kali	4,800,000,000
1.17.143	Penyediaan Makanan dan Minuman	Palembang	Jumlah Makanan dan Minuman Untuk Rapat/Kegiatan	12 Bulan	12,101,650,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Palembang	Rekapitulasi Kendaraan yang Telah Membayar Pajak	195 Unit	350,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik daerah	Palembang	Rekapitulasi Aset Gedung dan Bangunan yang Difasilitasi Asuransi	2 Polis Asuransi	1,100,000,000
1.17.143	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Palembang	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan di Lingkungan Setda	35 Dokumen	1,000,000,000
1.17.143	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Palembang	Jumlah ATK di Lingkungan Setda	35 Kegiatan	900,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	Palembang	Rekapitulasi Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	275 Orang	6,209,625,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Sewa Sarana dan Mobilitas	Palembang	Jumlah Penyediaan Jasa Sewa Sarana dan Mobilitas	500 Unit	1,500,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palembang	Daftar Rekapitulasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Kegiatan	2,000,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Peralatan Sandi Telkom	Palembang	Jumlah Peralatan Sandi Telkom yang terpelihara	1 Set	800,000,000

1.17.143	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palembang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	26 Aset	1,700,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Palembang	Daftar Rekapitulasi Jasa Listrik, Telpon dan Air yang Difasilitasi	26 Aset	5,413,697,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Palembang	Jumlah Honorarium Yang Dibayarkan Kepada Pengelola Administrasi Keuangan	34 Orang	97,500,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Palembang ;	Jumlah Aset dan Bangunan Kantor Yang Bersih	7 Aset	3,500,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	Rekapitulasi surat masuk	9000 surat	100,000,000
1.17.143	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palembang;	Jumlah Koran (Exp)	17544 Exp	45,000,000
1.17.143	Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah Dan Luar Negeri	Kota Palembang;	Jumlah Koordinasi Dan Kunjungan Ke Luar Daerah (Kali)	40 Kali	1,000,000,000
1.17.143	Penyediaan Dana Pengukuran Sertifikasi Tanah Pemprov	Kota Palembang;	Jumlah Tanah Pemprov Yang Disertifikasi (Sertifikat)	13 Sertifikat Tanah	200,000,000
1.17.143	Penyedia Jasa Tutor SKJ	Kota Palembang;	Frekuensi Tutor SKJ	44 Kali	8,800,000
1.17.143	Penyedia Jasa Pendukung Administrasi Teknisi / Perkantoran	Kota Palembang;	Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran (Orang)	177 Orang Honorer	3,750,630,000
1.17.143	Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat	Kota Palembang;	Jangka Waktu Makanan Dan Minuman Untuk Rapat (Bulan)	12 Bulan	100,000,000
1.17.143	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Palembang;	Jumlah Peralatan Rumah Tangga (Set)	1 Set	11,000,000
1.17.143	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palembang;	Jangka Waktu Tersedianya Komponen Listrik Dan Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	30,000,000
1.17.143	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kota Palembang;	Jangka Waktu Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan (Bulan)	12 Bulan	150,000,000
1.17.143	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Palembang;	Jumlah Alat Tulis Kantor (Set)	1 Set	300,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kota Palembang;	Jumlah Gedung Kantor Yang Dibersihkan	1 Gedung	300,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Palembang;	Jumlah Tenaga Pengelola Keuangan	25 Orang	51,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Palembang;	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Dipelihara	37 Unit Roda Empat	600,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Kota Palembang;	Jumlah Kendaraan Yang Dipelihara (Unit)	20 Unit Roda Empat	162,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palembang;	Jumlah Gedung Yang Tersedia Penerangan, Telepon, Pam dan Web	8 Gedung	1,100,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Palembang;	Jumlah Surat Dinas yang Terkirim (Surat)	1512 Surat	10,000,000
1.17.143	Penyedian Jasa Administrasi Keuangan	Palembang	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan Yang Mendapatkan Tunjangan Fungsional	30 Orang	138,000,000

1.17.143	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Palembang; 5 Kab/kota	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Memiliki Surat-surat Lengkap	57 Kendaraan R4 dan R2	700,000,000
1.17.143	Penyedian Jasa Surat Menyurat	Kota Palembang;K ab/Kota Sumsel	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat	1000 Surat	44,000,000
1.17.143	Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Palembang	Jumlah Bulan Pembiayaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	1,000,000,000
1.17.143	Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih	Palembang;	Jumlah Paket Peralatan dan Bahan Pembersih	12 Bulan	30,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Tutor SKJ	Palembang;	Jumlah Honor Tenaga Tutor SKJ	1 Orang	13,200,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Palembang;	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Honor	108 Orang	2,772,900,000
1.17.143	Penyediaan Makanan dan Minuman	Palembang;	Frekuensi Rapat-rapat	100 Kali	100,000,000
1.17.143	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Palembang;	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	20,000,000
1.17.143	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palembang;	Jumlah Titik Penerangan Lampu dan Instalasi Listrik Yang Tersedia	50 Titik	25,000,000
1.17.143	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Palembang;	Jumlah Pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bidang/UPTD	500,000,000
1.17.143	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Palembang	Jumlah Bulan Pemenuhan ALat Tulis Kantor	12 Bidang/UPTD	400,000,000
1.17.143	-Penyedia Jasa Tutor SKJ	Palembang	- Jasa Tutor SKJ di sediakan	88 -kali	8,800,000
1.17.143	-Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Palembang	-Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran di sediakan	58 -orang	1,489,150,000
1.17.143	-Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Luar Daerah	Palembang	- Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Luar Daerah di laksanakan	80 -kali	391,850,000
1.17.143	-Penyediaan Makanan dan Minuman	Palembang	- Jumlah Makanan dan Minuman di sediakan	455 Kotak	20,000,000
1.17.143	-Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Palembang	- Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan di sediakan	5565 - eksemplar	25,000,000
1.17.143	-Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	palembang	-Jangka waktu tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan kantor di sediakan	12 -bulan	20,000,000
1.17.143	-Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Palembang	-Jangka waktu tersedianya barang cetakan dan penggandaan dilayani	12 -bulan	80,000,000
1.17.143	-Penyediaan Alat Tulis Kantor	Palembang	-Jumlah alat tulis kantor di sediakan	1 -paket	160,000,000
1.17.143	-Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Palembang	-Jumlah peralatan kerja kantor di tangani	48 -unit	20,000,000
1.17.143	-Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Palembang	-Jumlah tenaga kebersihan kantor dilayani	12 -orang	300,000,000
1.17.143	-Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Palembang	-Jangka waktu honor untuk bendahara di layani	18 -orang	83,400,000

1.17.143	-Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional	Palembang	-Jumlah kendaraan dinas untuk operasional ditangani	15 -unit	275,000,000
1.17.143	-Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah	Palembang	-Jumlah kendaraan operasional kantor di layani	9 -unit	60,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palembang	-Jumlah gedung yang tersedia penerangan, telepon, pam dan web di tangani	1 -dinas dan uptd	418,800,000
1.17.143	-Penyediaan Jasa dan Menyurat	palembang	-Jumlah surat yang dikirim	1000 -surat	18,000,000
1.17.143	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri	Kota Palembang;	Rata-rata kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Satu Tahun	1 Tahun	627,045,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Tutor SKJ	Kota Palembang;	Jumlah Tutor SKJ Setiap Hari Jumat	1 Orang	13,800,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis /Perkantoran	Kota Palembang;	Jumlah Staf Non PNS yang diperlukan	69 Orang	1,635,300,000
1.17.143	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Palembang;	Jumlah Rapat Dinas Yang Dilaksanakan	12 Rapat	96,000,000
1.17.143	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palembang;	Jumlah kebutuhan akan bahan bacaan dan peraturan perundangan	3360 Lembar	44,308,000
1.17.143	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palembang;	Jumlah gedung yang mendapatkan penerangan	2 Gedung	40,000,000
1.17.143	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palembang;	Rata-rata penggunaan barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	61,000,000
1.17.143	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Palembang;	Rata-rata penggunaan alat tulis kantor	1 Tahun	102,563,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kota Palembang;	Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor	4 Orang	125,200,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Palembang;	Jumlah pegawai administrasi keuangan	21 Orang	99,900,000
1.17.143	Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Palembang;	Jumlah kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan dan perizinan	14 Unit	343,568,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palembang;	Jumlah gedung yang mendapat fasilitas komunikasi, air dan listrik	2 Gedung	351,000,000
1.17.121	Fasilitasi Kegiatan KDH/WKDH	Palembang	Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan KDH/WKDH	12 Kegiatan	2,285,350,000
2.31.238	Pelatihan dan Bantuan Peralatan bagi IKM Batu Akik	Palembang, OKU, MURA	Jumlah IKM batu Akik yang dibina	100 IKM Batu Akik	200,000,000
2.31.238	- Fasilitasi Pengembangan Graha Songket	- Palembang	- Jumlah IKM sandang Se-Sumsel yang terbantu pemasaran produknya	100 - Orang Pengrajin	150,000,000
2.31.234	- Perda Rencana Pembangunan Industri Sumatera Selatan	Palembang	- Perda RPI Prov. Sumsel	1 - Perda RPI Prov. Sumsel	145,000,000
2.30.233	- Publikasi Indag di Media Elektronik	- Palembang	- Jumlah frekuensi publikasi potensi indag di media elektronik	150 - kali	100,000,000
2.30.233	- Penyusunan Buku Data Perkembangan Indag	Palembang	- Jumlah buku data industri dan perdagangan	30 - Buku	85,000,000

2.30.232	- Akreditasi Lab Pengujian BPSMB	Palembang	- Jumlah dokumen akreditasi Lab pengujian dan lab. Kalibrasi UPTD BPSMB	1 - Dokumen Lab yang Terakreditasi KAN	100,000,000
2.30.232	- Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji dan Laboratorium Kalibrasi Barang Ekspor dan Impor	Palembang	- Jumlah Paket Fasilitas Peralatan Standar Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi	1 - Paket Peralatan Lab Pengujian dan Lab Kalibrasi	100,000,000
2.30.232	- Pameran South Sumatera 2016	Palembang	- Jumlah kali terpromosikannya produk IKM Sumsel dalam Pameran South Sumatera 2016	1 - Kali	50,000,000
2.30.226	- Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Palembang, OI, OKI, OKU, OKUT, OKUS, PBM, ME, LHT, PGA, 4L, PALI, MURA, LL, MUBA, BA	-Jumlah jenis barang dan jasa yang terawasi dalam peredarannya	4 - Jenis Barang	128,125,000
2.29.225	Pengadaan media dan reagensia	Kota Palembang;	Operasional LPPMHP	1 Tahun	90,000,000
2.29.222	Operasional Perizinan dan Pengendalian Perikanan Tangkap	Palembang, Oki dan Banyuasin	Jumlah Sertifikat perizinan dan pengendalian perikanan tangkap yang dikeluarkan selama satu tahun	75 unit	225,000,000
2.29.221	Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Palembang (Provinsi)	Jumlah sarana dan prasarana untuk pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan	1 paket	170,000,000
2.29.221	Paket Sarana dan Prasarana Budidaya di Desa Model dan Lumbung Pangan	Palembang, Banyuasin, Ogan Ilir, PALI, Mura	Jumlah sarana dan prasarana budidaya di desa model dan desa lumbung pangan	5 Paket	150,000,000
2.29.221	Optimalisasi UPPU (Unit Pengembangan Perairan Umum) Pulokerto	Palembang (Provinsi)	Jumlah sarana dan prasarana UPPU Pulokerto	1 Tahun	250,000,000
2.27.215	Sosialisasi Perda Ketenagalistrikan Provinsi Sumatera Selatan	- Kota Palembang;	jumlah peserta sosialisasi	100 dokumen	50,000,000
2.25.198	Penilaian Lomba PKA Wana Lestari	OKU, OKUT, Muba, Empat Lawang, Muara Enim, Lahat, Prabu, Pali, Mura, L. Linggau, Palembang	Jumlah Penyuluhan Kehutanan, KMDM, PKSM, KTH dan Desa Peduli Hutan	100 Persen	175,000,000
2.25.192	Fasilitasi Pameran South Sumatera Expo	Palembang	Terlaksananya Pameran South Sumatera Expo	100 Persen	100,000,000
2.25.192	Fasilitasi Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Palembang dan 17 Kab/Kota	Terfasilitasinya Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	100 Persen	50,000,000
2.25.192	Pengembangan Sistem jaringan informasi penyuluhan	Palembang	Tersedianya Jaringan Informasi Penyuluhan	100 Persen	50,000,000
2.25.192	Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian,	Palembang dan 17	Terfasilitasinya Peenyusunan Programa	100 Persen	100,000,000

	Perikanan dan Kehutanan	Kab/Kota	Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan		
2.25.191	Pembinaan pencinta hewan kesayangan dan hewan langka	Palembang ;	Jumlah peserta yang mengikuti lomba hewan kesayangan dan hewan langka	50 orang	75,000,000
2.25.189	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	Palembang	jumlah kali promosi yang akan diikuti	1 kali	250,000,000
2.25.188	Pengembangan peternakan sapi perah melalui pemberdayaan perempuan	Kota Pagaralam, Kota Palembang dan Kab. PALI	Jumlah jenis barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Demo Farm; konsentrat, Pakan HMT, Sapi Perah dan Bantuan Kandang)	4 jenis	800,000,000
2.25.187	Fasilitasi klinik hewan	Km. 5 Palembang	Jumlah sampel dalam pelayanan keswan/ternak	400 sampel	200,000,000
2.25.182	Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Perkebunan	Kota Palembang, Lubuk Linggau, Kab. Musi Rawas, Banyuasin,	- Terlaksananya sertifikasi benih / bibit	80000000 - Benih	250,000,000
2.25.182	Pembinaan dan Pengawasan Penangkar Benih/Bibit tanaman Perkebunan	Kota Palembang; Lubuk Linggau; Kabupaten, Musi Rawas, Banyuasin	- Terlaksananya pengawasan sumber benih dan peredaran benih/bibit	80000000 - Benih	250,000,000
2.25.181	Pembinaan dan Antisipasi Kebakaran Lahan Perkebunan	16 Kabupaten/Kota kecuali palembang	- Terlaksananya pemantauan dan antisipasi kebakaran lahan	50 - orang	100,000,000
1.19.158	Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan	Palembang	Jumlah laporan database dan informasi ketahanan pangan	1 Laporan	100,000,000
1.19.158	Operasional Dewan Ketahanan Pangan	Palembang	Jumlah rapat koordinasi, pokja ahli dan pokja teknis	5 Rapat	200,000,000
1.19.158	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan pangan	Palembang	Jumlah Pertemuan yang dilaksanakan dan monev	11 pertemuan (rakor, FGD, Evaluasi)	508,400,000
1.17.150	Rakorda Kelembagaan Litbang	palembang	-Jumlah dokumen kesepakatan sinkronisasi yang dihasilkan melalui rakorda keitbangtan se sumsel	1 -dokumen	90,000,000
1.17.147	Rapat Teknis SKPD	Kota Palembang;	Jumlah peserta kab/kota dalam rapat teknis	30 orang	25,000,000
1.17.147	Validasi Indeks Teknis DAK	Palembang	Jumlah kab/kota yang diundang	17 kab/kota	75,000,000
1.17.147	Laporan Tahunan	Palembang	Jumlah laporan tahunan TA. 2015 yang dicetak	15 Eksemplar	15,000,000
1.17.147	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Palembang	Jumlah Renja yang dicetak	15 Eksemplar	15,000,000
1.17.147	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palembang	Jumlah dokumen LAKIP TA. 2015 yang dicetak	15 Eksemplar	15,000,000

1.17.146	- Rapat Koordinasi dengan Kab/kota	Palembang	- Frekwensi Rapat Koordinasi dalam rangka sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan Indag se Sumsel	1 - Kali	75,000,000
1.17.146	Rapat Koordinasi dengan Kabupaten/Kota	Palembang	Jumlah kabupaten/kota yang diundang	17 kab/kota	75,000,000
1.17.145	Pengadaan pakaian olahraga	Palembang	Tersedianya pakaian dan perlengkapan olahraga	185 Paket	92,500,000
1.17.145	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Palembang	Pakaian khusus hari-hari tertentu	120 Stel	45,000,000
1.17.144	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Palembang	Jumlah Pengadaan Alat Gedung Kantor di Biro Perekonomian	1 Paket	162,300,000
1.17.144	- Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	- Palembang	- Jumlah Ketersediaan Jenis Peralatan & Perlengkapan Kantor untuk Dinas + 4 UPTD	17 - Jenis Peralatan Kantor	500,000,000
1.17.144	- Penyediaan Bahan Kimia untuk Pengujian Laboratorium	Palembang	- Jumlah dan Jenis Bahan Kimia untuk Pengujian Laboratorium	10 - Jenis Bahan Kimia	25,000,000
1.17.144	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Laboratorium	Palembang	- Jumlah Unit Peralatan Laboratorium yang terpelihara dengan baik sesuai fungsinya	3 - Unit Peralatan Pengujian Lab. Karet, Kopi, CPO	25,000,000
1.17.144	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Dinas	Palembang	- Jumlah Paket Pemeliharaan Halaman Kantor Dinas Perindag yang Tertata dan Terpelihara dengan Baik	1 - Paket pemeliharaan Halaman	200,000,000
1.17.144	- Rehabilitasi Instalasi Listrik Gedung Kantor UPTD. BPSMB	Palembang	- Jumlah Unit Instalasi Listrik Gedung UPTD BPSMB	1 - Unit Instalasi Listrik Gedung UPTD BPSMB	50,000,000
1.17.144	- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan rumah tangga	Palembang	- Jumlah Ketersediaan Jenis Peralatan Rumah Tangga untuk Dinas & 4 UPTD	9 - Jenis Peralatan Rumah Tangga	500,000,000
1.17.144	- Pemeliharaan Komplek Dekranasda	Palembang	- Jumlah Paket Pemeliharaan Komplek Dekranasda yang Terata dan Terpelihara dengan Baik	1 - Paket Pemeliharaan Komplek Dekranasda	100,000,000
1.17.144	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kota Palembang;	Jumlah gedung yang direhab	1 gedung	200,000,000
1.17.144	Pemeliharaan Peralatan/Instrumen Laboratorium	Kota Palembang;	Jumlah instrumen labor yang dipelihara	4 unit	65,000,000
1.17.144	Pemeliharaan/Kalibrasi Alat Laboratorium	Kota Palembang;	Jumlah peralatan labor yang dikalibrasi dan dipelihara	15 unit	60,000,000
1.17.144	Pemeliharaan Peralatan Eksplorasi	Kota Palembang;	Jumlah pemeliharaan peralatan eksplorasi	13 jenis	50,000,000
1.17.144	Pengadaan Bahan Kimia	Kota Palembang;	Jumlah kebutuhan bahan-bahan kimia labor	13 jenis	65,000,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kota Palembang;	Jumlah kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	70 jenis	208,350,000
1.17.144	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kota Palembang;	Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	10 jenis	400,000,000

1.17.144	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Palembang	Terlaksananya perbaikan komputer,ac, lemari dll	10 Jenis	50,000,000
1.17.144	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Palembang	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	86 Unit	207,500,000
1.17.144	Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	Palembang	Tersedianya peralatan kebersihan dan tabung gas kebakaran	39 Jenis	30,000,000
1.17.144	Fasilitasi Rumah Sakit Hewan (RSH)	RSH Km.5 Palembang	Jumlah unit fasilitasi rumah sakit hewan	1 unit	1,000,000,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palembang	-	0 -	35,000,000
1.17.144	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Palembang	-	0 -	63,975,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Palembang	Terpeliharanya gedung BP3MD Prov.Sumsel	100 persen	60,000,000
1.17.144	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Palembang	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	50,000,000
1.17.144	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Palembang	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	10 Jenis	142,551,400
1.17.144	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Palembang	Tersedianya kendaraan dinas siap operasional	100 persen	520,000,000
1.17.144	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	palembang	-jumlah gedung yang di rehabilitasi	2 -gedung	60,000,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	palembang	-jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	12 -jenis	65,000,000
1.17.144	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	palembang	-jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	10 -jenis	199,000,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palembang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	1 paket	130,000,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Palembang	Gedung kantor yang direhab	1 Paket	150,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/ Perkantoran	Palembang	Jumlah Pegawai Honorer non Aplikasi pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumsel	4 Orang	102,700,000
1.17.143	Penyediaan Makanan dan Minuman	Palembang	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	16 Kali	60,000,000
1.17.143	- Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Palembang	- Frekwensi Koordinasi & Konsultasi Dalam, Luar Daerah, dan Keluar Negeri untuk Dinas & 4 UPTD	101 - Kali	703,560,000
1.17.143	- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Palembang	- Jumlah Jenis Peralatan yang Tersedia Jasa Pemeliharaannya	7 - Jenis Peralatan/Tahun	46,540,000
1.17.143	-Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih	Palembang	- Jumlah pcs Peralatan & bahan kebersihan rumah tangga yang tersedia untuk Dinas & 4 UPTD selama 1 thn	1700 - Pcs bahan/peralatan pembersih	30,000,000

1.17.143	- Penyediaan Jasa Tutor SKJ	Palembang	- Frekwensi terbayarnya Jasa tutor senam/SKJ untuk Dinas & 4 UPTD selama 1 thn	48 - Kali/tahun	7,800,000
1.17.143	- Penyediaan Jasa Pendukung Adminstrasi Teknis/Perkantoran	Palembang	- Jumlah bulan terbayarnya Jasa tenaga honorer yang masuk database dan non database selama 1 tahun	481 - Bulan untuk 37 org	949,975,000
1.17.143	- Penyediaan Makanan dan Minuman	Palembang	- Frekwensi tersedianya makan dan minum untuk rapat teknis SKPD dan keperluan Dinas+ 4 UPTD selama 1 tahun	40 - Kali	57,275,000
1.17.143	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Palembang	- Jumlah Exp tersedianya Jenis Bahan Bacaan (Koran, majalah) untuk Dinas & 4 UPTD selama 1 tahun	6864 - Exp	27,000,000
1.17.143	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palembang	- Jumlah Pcs tersedianya jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan untuk Dinas & 4 UPTD	900 - Pcs Instalasi Peralatan Listrik	45,350,000
1.17.143	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Palembang	- Jumlah lembar tersedianya jenis Barang cetak dan penggandaan utk Dinas & 4 UPTD selama 1 tahun	233000 - Lembar	70,000,000
1.17.143	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Palembang	- Jumlah Pcs ATK yang tersedia untuk Dinas & 4 UPTD di lingkungan Disperindag selama 1 thn	2050 - Pcs ATK	70,000,000
1.17.143	-Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Palembang	- Jumlah bulan terbayarnya Jasa administrasi keuangan (PPK, bendahara gaji, bendahara penerima pembuatan dafta gaji, bendahara non gaji, pengurus Barang selama 1 tahun)	288 - Bulan untuk 24 org	106,800,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Palembang	- Jumlah kendaraan dinas/operasional Dinas dan 4 UPTD yang terpelihara & terurus perizinannya selama 1 tahun	264 - Unit/Thn (R4=180, R2=84)	442,200,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Palembang	- Jumlah Rekening terbayarnya jasa telpon sumber daya air dan listrik untuk keperluan Dinas & 4 UPTD di lingkungan Disperindag selama 1 tahun	396 - Rekening	754,800,000
1.17.143	-Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Palembang	- Jumlah dokumen yang terkirim untuk dinas & 4 UPTD selama 1 tahun	1175 - Surat	33,700,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Tutor SKJ	Kota Palembang;	Jumlah tutor SKJ untuk 44 kali pertemuan	1 orang	11,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Kota Palembang;	Jumlah kebutuhan tenaga outsourcing administrasi dan teknis kantor	38 orang	975,650,000
1.17.143	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Palembang;	Jumlah kebutuhan makan dan minum rapat	2 jenis	100,000,000

1.17.143	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kota Palembang;	Jumlah kebutuhan bahan bacaan kantor	5 jenis	15,000,000
1.17.143	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Kota Palembang;	Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggadaan kantor	30 jenis	150,000,000
1.17.143	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Palembang;	Jumlah kebutuhan ATK kantor	36 jenis	300,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Kota Palembang;	Jumlah gedung yang dibersihkan	3 gedung	200,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Palembang;	Jumlah aparatur pengelola keuangan dan barang	13 orang	60,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kota Palembang;	Pemeliharaan untuk 12 unit mobil; 8 unit motor	2 jenis	305,000,000
1.17.143	Penyediaan Komponen dan Alat-alat Listrik	Kota Palembang;	Jumlah jenis komponen alat listrik	75 jenis	50,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palembang;	Jumlah tagihan telepon, internet, air dan listrik	3 jenis	350,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Palembang;	jumlah surat keluar	2527 surat	15,000,000
1.17.143	Rapat Teknis SKPD, Monev dan Statistik Perkebuna	Palembang	Pertemuan Teknis, Monev, dan Statistik Perkebunan	3 Dok	250,000,000
1.17.143	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Palembang	jumlah tenaga administrasi keuangan kantor yang tersedia	22 orang	78,000,000
1.17.143	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Palembang	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi kedaerah, luar daerah dan luar negeri	12 Bulan	800,000,000
1.17.143	Penyediaan jasa tutor SKJ	Palembang	Terlaksananya pelaksanaan SKJ	44 kali	15,400,000
1.17.143	Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	palembang	jumlah jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	16 orang	410,800,000
1.17.143	Penyediaan makan dan minum	Palembang	Terlaksananya kegiatan rapat di dinas dan 2 UPTD	12 bulan	75,000,000
1.17.143	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Palembang	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	5 Jenis	40,000,000
1.17.143	Penyediaan komponen instalasi listri/penerangan gedung kantor	Palembang	terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik	3 kantor	100,000,000
1.17.143	Penyediaan barang cetakan dan penggadaan	Palembang	Terlaksananya penyediaan fotocopy, buku laporan, cetakan, blanko dll	20 Jenis	120,000,000
1.17.143	Penyediaan alat tulis kantor	Palembang	Tersedianya alat tulis kantor	3 Paket	150,000,000
1.17.143	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Palembang	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas	113 -Unit	750,000,000
1.17.143	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Palembang	-Terlaksananya Penyediaan jasa listrik dan air	20 -rekening	510,800,000
1.17.143	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	-Terlaksananya pengiriman surat menyurat dan paket pos	2500 -surat	20,000,000

1.17.143	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Ke Luar Negeri	Palembang	Jumlah pembinaan,koordinasi dan konsultasi	1 tahun	250,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Tutor SKJ	Palembang	Jumlah pelaksanaan SKJ	44 kali	11,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Palembang	Jumlah jasa pendukung administrasi teknis/perkantoran	11 orang honorer	282,425,000
1.17.143	Penyediaan Makanan dan Minuman	Palembang	Jumlah rapat	24 kali	20,000,000
1.17.143	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Palembang	Jumlah Media cetak yang tersedia	6 judul media cetak	15,000,000
1.17.143	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Palembang	-	0 -	15,000,000
1.17.143	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Palembang	jumlah alat tulis kantor yang tersedia	20 jenis alat tulis kantor	25,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Palembang	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan terurus izinya	22 kendaraan dinas	250,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Palembang	-	0 -	150,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palembang	-	0 -	200,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	-	0 -	3,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Palembang	jumlah penerima honor jasa pendukung administrasi perkantoran	10 orang	46,200,000
1.17.143	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Palembang	Tersedianya formulir dan dokumen administrasi perkantoran	12 Bulan	80,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Palembang	Tersedianya administrasi keuangan	10 Orang	36,000,000
1.17.143	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Palembang	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	60,000,000
1.17.143	Penyediaan peralatan dan bahan pembersih	Palembang	Terlaksananya kebersihan kantor	12 Bulan	12,000,000
1.17.143	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Palembang	Tersedianya kendaraan dinas siap operasional	17 Unit	250,000,000
1.17.143	Penyediaan Makanan dan Minuman	Palembang	Tersedianya kebutuhan konsumsi pelaksanaan kegiatan kantor	12 Bulan	65,000,000
1.12.80	Penyuluhan dan Pemasyarakatan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi	Palembang, Banyuasin, OKI	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan sadar koperasi	1000 Orang	400,000,000
2.25.178	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	16 Kab./Kota (Banyuasin, OKU Timur, OKU, OKU Selatan, Ogan Ilir, Prabumulih, Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, Musi)	Meningkatnya pemanfaatan pembiayaan program dan kredit komersial mendukung peningkatan produksi dan mutu produk	100 Kelompok	150,000,000

		Rawas, Muratara, PALI, Empat Lawang, Musi Banyuasin dan Palembang)			
2.25.175	Pengelolaan Penyediaan Benih Florikultura dan Hortikultura Lainnya	Kebun Kenten Palembang	Meningkatnya Ketersediaan Benih Florikultura yang unggul	5500 Btg/Stek/Pot/Rumpun	200,000,000
2.25.175	Pembangunan/Rehab Gedung dan Sarana Prasarana Pendukung Lainnya pada UPTD Balai Perbanyak Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dak dan Pendampingan)	BBIH Sijacarana (OKU Timur) dan Kota Palembang	Jumlah Bangunan yang direhab/diperbaiki	2 Unit	150,000,000
2.25.174	Penyediaan Sarana Produksi Pengelolaan Tanaman Sayuran	Kab. Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, OKU Timur, Palembang dan Pagar Alam	Meningkatnya luas tanam sayuran	19 Ha	450,000,000
1.17.144	Pembangunan/Rehab Gedung dan Sarana Prasarana Pendukung Lainnya Pada Dinas	Kota Palembang	Jumlah bangunan gudang kantor yang diperbaiki	1 Unit	100,000,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Sarana Pendukung Lainnya	Kota Palembang	Tersedianya pemeliharaan taman kantor	2 Unit	34,500,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palembang dan OKU Timur	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	37,000,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Palembang dan Kabupaten OKU Timur	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3 Jenis	49,220,000
1.17.144	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palembang dan Kabupaten OKU Timur	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada dinas dan uptd	5 Jenis	150,000,000
1.17.143	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri	Kota Palembang dan Kabupaten OKU Timur	Tersedianya perjalanan menghadiri rapat koordinasi, perencanaan dan Konsultasi ke Luar Daerah	230 Kali	500,000,000
1.17.143	Penyediaan Instalasi Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kota Palembang	Tersedianya Sumber daya air , listrik dan Telepon	1 Jenis	92,600,000
1.17.143	Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih	Kota Palembang	Tersedianya Peralatan dan Bahan Kebersihan dinas dan UPTD	15 Jenis	75,000,000

1.17.143	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Kota Palembang, Kabupaten OKU Timur, Lahat dan Banyuasin	Tersedianya jasa tenaga kerja jaga malam kantor dinas dan UPTD	28 Orang	718,900,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Tutor SKJ	Kota Palembang dan Kabupaten OKU Timur	Tersedianya Jasa tutor SKJ pada dinas dan UPTD	220 Kali	66,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa pendukung administrasi teknis/perkantoran	Kota Palembang dan Kabupaten OKU Timur	Tersedianya jasa tenaga kerja pendukung administrasi teknis/ perkantoran pada dinas dan UPTD	19 Orang	487,825,000
1.17.143	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Palembang dan Kabupaten OKU Timur	-Tersedianya makanan dan minuman pada dinas dan UPTD	106 kali	130,240,000
1.17.143	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Kota Palembang dan Kabupaten OKU Timur	Tersediannya Bahan Bacaan dinas dan UPTD	2 Jenis	100,000,000
1.17.143	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palembang dan Kabupaten OKU Timur	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dinas dan uptd	12 Jenis	50,000,000
1.17.143	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Palembang dan Kabupaten OKU Timur	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan pada dinas dan upto	15 Jenis	112,500,000
1.17.143	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Palembang dan Kabupaten OKU Timur	Tersedianya alat tulis kantor pada dinas dan upto	25 Jenis	183,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kota Palembang dan Kabupaten OKU Timur	Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor	13 Orang	333,775,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Palembang dan Kabupaten OKU Timur	Tersedianya jasa administrasi keuangan	24 Orang	84,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OPerasonal	Kota Palembang dan Kabupaten OKU Timur	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	221 Unit	1,511,920,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Kota Palembang dan Kabupaten OKU Timur	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	19 Unit	92,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Kota Palembang	Jumlah layanan Komunikasi, Air dan Listrik	54 Rekening	601,290,000

	Air dan Listrik	dan Kabupaten OKU Timur	pada Dinas dan 4 UPTD		
1.17.143	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Palembang dan Kabupaten OKU Timur	Jumlah Pengiriman Surat menyurat pada Dinas dan UPTD	130 Eksemplar	7,270,000
1.17.143	Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah keluar daerah dan luar negeri	palembang	-Jumlah koordinasi & konsultasi ke luar daerah yang terlaksana	12 -bulan	700,000,000
1.17.143	Penyediaan Peralatan dan Bahan pembersih	palembang	-jumlah jasa perizinan bangunan	10 -jenis	40,000,000
1.17.143	Penyediaan Tutor SKJ	palembang	-jumlah frekwensi tutor SKJ setiap hari jum'at pagi	44 -kali	11,000,000
1.17.143	Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis/perkantoran	palembang	-jumlah honorer outsourcing perkantoran yang terpenuhi	10 -orang	256,000,000
1.17.143	Penyediaan Makanan dan Minuman	palembang	-jumlah frekwensi konsumsi rapat yang terpenuhi	60 -kali	50,000,000
1.17.143	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	palembang	-jumlah jenis bahan bacaan yang terpenuhi	4 -jenis	25,000,000
1.17.143	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	palembang	-jumlah jenis komponen listrik/penerangan yang terlaksana	10 -jenis	40,000,000
1.17.143	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Palembang	-jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	20 -jenis	70,000,000
1.17.143	-Penyediaan Alat Tulis Kantor	palembang	-Jumlah jenis ATK yang tersedia untuk keperluan kantor	1 -jenis	70,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Palembang	-Jumlah penyedia jasa kebersihan gedung kantor dan halaman	6 -orang	131,400,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Palembang	-Jumlah bendahara, penatausahaan keuangan	9 Orang	39,600,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Palembang	Jumlah Kendaraan Dinas/Investaris/Operasional yang dimaintenance	0 -	128,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Palembang	Jumlah Barang Milik Daerah yang di Asuransikan	0	52,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palembang	Jumlah Rekening yang dibayarkan untuk penggunaan listrik, air dan telepon dan internet	0 rekening, bulan	232,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasar Surat Menyurat	Palembang	Jumlah Jenis Pengiriman Surat Menyurat yang dipenuhi	1200 Lembar	6,000,000
1.17.143	Penyediaan Alat Kebersihan Kantor	Palembang	Penyediaan alat kebersihan di DKP Sumsel	1 Paket	40,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Tutor SKJ	Palembang	Jumlah tutor SKJ di DKP Sumsel	1 Orang	13,200,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Palembang	Jumlah administrator keuangan DKP Sumsel	9 Orang	231,075,000
1.17.143	Penyediaan Makanan dan Minuman	Palembang	Ketersediaan makanan dan minuman untuk rapat di DKP Sumsel	12 Bulan	85,000,000

1.17.143	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Palembang	Ketersediaan koran di kantor DKP Sumsel	12 Bulan	15,000,000
1.17.143	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palembang	Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	220,800,000
1.17.143	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palembang	Ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan lingkup DKP Sumsel	1 Paket	30,000,000
1.17.143	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Palembang	Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan di lingkup DKP Sumsel	12 Bulan	40,000,000
1.17.143	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Palembang	Ketersediaan ATK lingkup DKP Sumsel	12 Bulan	85,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Palembang	Operasional pelaksanaan cleaning service di DKP Sumsel	12 Bulan	180,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Palembang	Waktu operasional administrasi keuangan di DKP Sumsel	12 Bulan	65,100,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Palembang	Jumlah kendaraan roda 2 dan 4 milik DKP Sumsel yang dilakukan pemeliharaan dan/atau diperbarui izinnya	30 Unit	350,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Palembang	Jumlah barang milik DKP Sumsel yang diasuransikan	6 Unit	40,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	Operasional pengiriman surat	12 Bulan	20,000,000
1.17.139	Penyusunan Master Plan Kampung Santri Sumatera Selatan	Palembang	-	0	150,000,000
1.17.136	-Analisis prilaku masyarakat dan lingkungan kesehatan di wilayah kumuh/daerah pasang surut	palembang	-jumlah dokumen rekomendasi	1 -dokumen rekomendasi	75,000,000
1.17.135	Penguatan jarlitbang Pendidikan Sumatera Selatan	palembang	-jumlah dokumen rekomendasi	1 -dokumen rekomendasi	50,000,000
1.17.133	-Penyusunan dan Penggandaan Buku Litbang dan Inovasi	palembang	-jumlah jenis buku yang dicetak	3 -jenis	100,000,000
1.17.133	Publikasi Hasil Litbang Melalui Media Massa, Cetak & Elektronik	palembang	-jumlah jenis media untuk publikasi	7 -jenis	100,000,000
1.17.133	Seminar Hasil Litbang	palembang	-jumlah frekuensi seminar hasil litbang	4 -kali seminar	100,000,000
1.17.131	Penguatan Jaringan Intertek	palembang	-jumlah jaringan intertek	3 Unit pelayanan Iptekin	100,000,000
1.13.86	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Palembang	Terlaksananya pembuatan bahan promosi potensi investasi daerah	100 persen	250,000,000
1.13.86	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	Palembang	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama dibidang PM dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	1 Kegiatan	100,000,000
1.17.143	Rapat-Rapat Teknis	Palembang	Jumlah Rapat Teknis	2 Kali	78,275,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Publikasi	Palembang	Jumlah Publikasi	4 kali	100,000,000

1.12.85	Peningkatan Informasi Pemasaran melalui Multi Media	Palembang	Jumlah Informasi Pemasaran	5 Kegiatan	200,000,000
1.12.82	Optimalisasi Pemanfaatan Modal Bagi UMKMK	Palembang, OI, Muara Enim, OKUT, Pali	Jumlah Temu Mitra yang dilaksanakan	5 Kegiatan	200,000,000
1.12.81	Peningkatan SDM UMKMK	Palembang	Jumlah diklat yang dilaksanakan	2 Kegiatan	400,000,000
1.18.148	Bimbingan Teknis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja dilingkungan Pemprov. Sumsel	Palembang	terlaksananya reviu Dokumen Road map Reformasi Birokrasi di Pemerintah prov. Sumsel	1 Kegiatan	200,000,000
1.18.148	Monitoring dan Reviu Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Prov. Sumsel	Palembang	Penyusunan dokumen-dokumen pendukung Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	150,000,000
1.18.148	Pembinaan dan Monitoring Standard pelayanan Minimal (SPM) Prov. Sumsel	Palembang	terlaksananya monitoring SPM di Provinsi dan Kab./Kota	1 Kegiatan	150,000,000
1.18.148	Evaluasi capaian Indikator kinerja utama (IKU) Prov. Sumsel yang berbasis informatika	palembang ;	Capaian IKU Prov. Sumsell yang tepat waktu	4 triwulan	200,000,000
1.17.147	Penataan Administrasi Aparatur, dan Penyusunan Laporan Data Potensi Aparatur di lingkungan Setda, LPPD dan LKPJ Biro Ortala	Palembang	Data dan Laporan Administrasi Aparatur di lingkungan Setda Prov. Sumsel	1 Dokumen	100,000,000
1.18.148	Pembinaan dan Monitoring Survei Kepuasan Masyarakat di provinsi dan Kab./Kota se Sumsel	Palembang	Nilai Survei IKM	1 Kegiatan	100,000,000
1.18.148	Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan Penilaian Prestasi Kerja ASN di Lingkungan Setda Prov. Sumsel	Palembang ;	persentase peningkatan ASN yang membuat SKP	100 persen	85,000,000
1.17.144	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palembang	-	0 -	30,000,000
1.17.146	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Palembang	Memahami Pelatihan yang diberikan	5 Orang	30,000,000
1.17.121	Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Palembang - Sumatera Selatan	Terlaksananya Peresmian Pengangkatan 7 (tujuh) Kepala Daerah	7 Kabupaten	1,479,725,000
1.3.27	Kegigitan Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PJ3 Kota Palembang	Palembang	Panjang Jalan Yang Terpelihara	59.21 Km	1,550,000,000
1.3.25	Peningkatan Jalan Pangeran Ayin, Cs	Kota Palembang	Panjang jalan yang ditingkatkan/dilebarkan	2.68 Km	6,700,000,000
1.3.28	Paket Leger Jalan	Kota Palembang;	Jumlah Dokumen Leger	4 Dokumen	500,000,000
1.3.25	Peningkatan Jalan Mayor Zen, Cs	Kec. Ilir Timur I dan Ilir Timur II Palembang	Panjang jalan yang ditingkatkan/dilebarkan	1 km	1,000,000,000

1.3.25	Pembangunan Jalan Akses Kawasan KEK	Kota Palembang;	Panjang Jalan yang Terbangun	2 Km	14,000,000,000
1.3.28	Paket Leger Jalan	Palembang	Jumlah Dokumen Leger	4 Dokumen	1,500,000,000
1.3.29	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Kebinamargaan	- Kota Palembang	Jumlah Dokumen Monitoring Dana Evaluasi Kegiatan Kebinamargaan (unit)	71 Unit	400,000,000
1.17.146	KPID Award	Palembang	Jumlah Lembaga Penyiaran yang mendapat penghargaan	6 Katagori / penghargaan	175,000,000
1.23.167	Cerdas Cermat Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran	Palembang	Jumaah Peserta Cerdas Ceramt	100 orang	40,000,000
1.17.143	Dokumentasi dan Publikasi	Palembang	Terselenggaranya dokumentasi dan Publikasi	1 tahun	50,000,000
1.17.143	Penyediaan Website	Palembang	Jumlah Website yang dibuat	1 Web	45,000,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Palembang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	40 Unit/Buah	60,000,000
1.18.149	Pemberangkatan Kafilah MTQ KORPRI Prov. Sumsel di tingkat Nasional	Palembang	Terkirimnya Kontingen/Kafilah KORPRI Prov. Sumsel pada MTQ KORPRI Tingkat Nasional	1 Kontingen	200,000,000
1.18.149	Pemusatan Latihan/TC bagi Qori/Qori'ah KORPRI Prov. Sumsel	Palembang	Jumlah Pemusatan Latihan/TC bagi Qori/Qori'ah KORPRI yang dilaksanakan	1 Kali	40,000,000
1.18.149	Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) KORPRI Prov. Sumsel	Palembang	Jumlah Seleksi Calon Qori/Qori'ah yang dilaksanakan	1 Kali	40,000,000
1.17.144	Pembangunan Gedung Kantor Disperindag Prov.Sumsel	Palembang	-Jumlah unit terbangunnya gedung Disperindag Prov. Sumsel	1 -Unit Gedung Disperindag Prov.Sumsel	7,250,000,000
1.17.144	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Palembang	- Jumlah Kendaraan Dinas (R4)	1 - Unit Kendaraan Dinas (R4)	200,000,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Taman Komplek UPTD. BPSMB	Palembang	- Jumlah Paket pemeliharaan Komplek UPTD. BPSMB yang Tertata dan Terpelihara dengan baik	1 - Paket Pemeliharaan Komplek UPTD. BPSMB	50,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Survailen Asesor KAN dan Peningkatan Mutu Pengujian Laboratorium	Kota Palembang;	Jumlah kebutuhan survailen asesor KAN dalam pelayanan laboratorium	2 kali	50,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Palembang	-Jumlah tenaga kebersihan kantor	7 -orang	300,000,000
2.29.225	Sarana Pengujian Laboratorium	Palembang	Laporan hasil uji yang akurat	1 Tahun	30,000,000
1.17.144	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Palembang	Ketersediaan kendaraan dinas/operasional	1 Unit	250,000,000
2.29.221	Pengembangan Unit Pemberian	Palembang	Jumlah Pengembangan Unit Pemberian	1 Keg	700,000,000
1.17.143	Penyediaan Instalasi Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Palembang	Penyediaan instalasi Sumberdaya Air	1 paket	50,000,000
1.17.147	Validasi Statistik Kelautan dan Perikanan Sumsel Tahun 2015	Palembang	Jumlah eselon III yang mengumpulkan data	6 unit kerja	50,000,000

1.17.147	Monev Prioritas KP	Palembang	Jumlah kabupaten/kota yang diundang	17 kab/kota	75,000,000
2.29.220	Finalisasi Perda RZWP3K	Palembang	Pelaksanaan finalisasi Perda RZWP3K	1 paket	100,000,000
2.29.225	Validasi Uji Kimia Produk Perikanan, Uji Mikrobiologi dan Uji Air oleh LPPMHP	Palembang	Jumlah metode yang dilaksanakan	3 validasi metode	50,000,000
2.29.225	Uji Mutu Kaji Terap dan Keragaan Produk Hasil Perikanan oleh LPPMHP	Palembang	Jumlah peralatan untuk uji mutu, kaji terap dan keragaan	1 paket	50,000,000
2.29.225	Sertifikasi Laboratorium dan Kalibrasi	Palembang	Jumlah kegiatan sertifikasi LPPMHP	1 kegiatan	100,000,000
2.29.223	Pengembangan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan untuk POKLAHSAR	Palembang, OI, OKI	Jumlah paket yang diberikan	3 paket	129,000,000
2.29.223	Temu Teknis Kemitraan Usaha	Palembang	Jumlah UMKM dan KKMB yang mengikuti acara	20 Orang	68,595,000
2.29.223	Fasilitasi Penerapan SKP dan SNI	Palembang, Banyuasin dan OKI	Jumlah kab/kota yang UMKM dan UPI-nya bersertifikat	3 Kab/kota	111,450,000
1.17.144	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Disbudpar Prov Sumsel	Palembang	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga	4 Unit	79,100,000
2.14.88	Pengadaan Gamelan dan Kuda Lumping untuk PEPADI	Banyuasin dan Palembang	Jumlah gamelan dan wayang kulit yang tersedia	3 Gamelan dan 3 Wayang Kulit	230,000,000
1.14.90	Penelitian Tinggalan Sejarah Bukit Siguntang	Palembang	Jumlah penggalian untuk penelitian bukit siguntang	5 Kali penggalian	120,000,000
2.28.219	Prolegda Kepariwisataan	Palembang	Jumlah buku yang tersedia	80 Buku	100,000,000
1.14.88	Pergelaran Pameran Seni Se Sumatera	Palembang	Frekuensi pameran	1 Kali Pameran	30,000,000
1.14.88	Siguntang Hill Festival	Palembang	Jumlah pergelaran yang ditampilkan	1 Festival	100,000,000
2.28.217	Festival Kuliner	Palembang	Jumlah peserta yang mengikuti	18 Orang	100,000,000
2.28.217	Festival Musi Jazz Sriwijaya	Palembang	Jumlah wisatawan	100 Wisatawan	100,000,000
1.14.89	Pemeliharaan Rutin Berkala Lingkungan UPTD Taman Budaya	Palembang	Jumlah outshourcing di UPTD Taman Budaya	6 Orang dan 1 Lokasi	200,000,000
1.14.91	Pemeliharaan Barang Bercorak Budaya, Restorasi, Preparasi dan Konservasi Koleksi Museum Negeri	Palembang	Jumlah benda situs yang dikonservasi	150 Koleksi Museum	75,000,000
1.14.91	Pemeliharaan Rutin/Berkala Museum Negeri Sumatera Selatan	Palembang	Jumlah benda koleksi yang dipelihara	200 Benda Koleksi	200,000,000
1.14.90	Pemeliharaan Rutin Lingkungan dan Bangunan TPKS dan Bukit Siguntang	Palembang	Terpeliharanya lokasi cagar budaya seperti TPKS, Bukit Siguntang dan Graha Budaya	12 Bulan	1,000,000,000
1.14.90	Perawatan / Konservasi Koleksi Museum Sriwijaya	Palembang	Jumlah benda yang terpelihara	50 Benda Koleksi	50,000,000
2.28.219	Pemilihan Putra Putri Sriwijaya	Palembang	Jumlah peserta dalam ajang pemilihan BGSS	18 Pasang	300,000,000
1.14.88	Fasilitasi Seniman di Taman Budaya Jakabaring	Palembang	Jumlah pergelaran seni yang ditampilkan di Jakabaring	3 Kali penampilan seni budaya	200,000,000

2.28.217	Publikasi Media Massa	Palembang	Jumlah publikasi media massa	5 Media Publikasi	250,000,000
2.28.217	Penyediaan Bahan-Bahan Promosi Pariwisata Sumsel	Palembang	Jenis Bahan-Bahan Promosi	5 Jenis	250,000,000
1.17.147	Penyusunan LPPD,LAKIP dan LKPJ Disbudpar Prov. Sumsel	Palembang	Jumlah dokumen yang dicetak	12 Dokumen	10,000,000
1.17.147	Penyusunan Renja Program dan Kegiatan Disbudpar Prov.Sumsel	Palembang	Jumlah dokumen yang dicetak	12 RKA dan DPA	10,000,000
1.17.146	Pendidikan dan Pelatihan	Palembang dan Luar Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti Kursus-kursus dan Pelatihan	15 Orang	50,000,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palembang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	30 Barang	75,000,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Palembang	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang dipelihara	10 Barang	40,000,000
1.17.144	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palembang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan	15 Barang	75,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Tutor SKJ	Palembang	Jumlah instruktur senam yang dibayar	1 Orang 11 Bulan	11,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/ Perkantoran	Palembang	Jumlah tenaga administrasi perkantoran	4 Orang	100,000,000
1.17.143	Penyediaan Makanan dan Minuman	Palembang	Jumlah yang tersedia makan dan minum untuk Rapat-rapat, koordinasi dan kegiatan	100 Kali	150,000,000
1.17.143	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Palembang	Jumlah yang tersedia bahan bacaan dan perundang-undang	25 Buah	60,000,000
1.17.143	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Palembang	Jumlah yang tersedia untuk komponen listrik kantor	20 Buah	50,000,000
1.17.143	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Palembang	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	80000 Lembar dan 16.600	100,000,000
1.17.143	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Palembang	Jumlah ATK yang tersedia	50 ATK	100,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,Peralatan dan Bahan Pembersih	Palembang	Jumlah tenaga,peralatan dan bahan pembersih yang tersedia	12 Orang	500,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Palembang	Jumlah tenaga pengelola keuangan	25 Orang	99,900,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Palembang	Jumlah perbaikan dan pemeliharaan kendaraan dinas	12 Kendaraan Dinas	325,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	Palembang	Jumlah Pembayaran listrik,Air dan Internet yang tersedia	36 Rekening	810,000,000
2.17.143	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	Jumlah perangko, materia yang tersedia untuk kantor	2000 Surat	10,000,000
1.17.144	Pengadaan dan Pemasangan Genset	Palembang	Jumlah Genset Yang Terpasang	1 Unit	200,000,000

1.7.57	Pemeliharaan Berkala Kapal Patroli	Palembang	Jumlah Kapal Patroli Yang Diperbaiki	1 Unit	100,000,000
1.7.57	Pengadaan Alat Survey Alur Pelayaran Sungai	Palembang	Jumlah Alat Survey ALur Yang Dimiliki	1 Unit	200,000,000
1.17.144	Pemeliharaan Taman dan Parkir Kantor	Palembang	Luasan Taman Parkir Yang terpelihara	1 Taman Parkir	30,000,000
1.15.96	Fasilitasi Olahraga Sumatera Selatan	Palembang	Jumlah fasilitasi olahraga	1 Kegiatan	2,500,000,000
1.15.96	Dukungan Pembinaan National Paralympic Committee (NPC) Prov. Sumsel	Palembang	Jumlah Pengurus NPC Sumsel yang difasilitasi	13 orang	200,000,000
1.15.96	Dukungan Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantern Nasional	Palembang-.	Jumlah Squad Sumatera Selatan pada POSPENAS	300 Orang	300,000,000
1.3.25	Peningkatan jalan lingkungan dan saluran drainase kel. Bukit Sangkal kec. Kalidoni di Palembang	Kel. Bukit Sangkal kec. Kalidoni di Palembang	-	0 -	1,000,000,000
1.3.29	Prasarana komplek olahraga Jakabaring Palembang	Jakabaring Palembang	-	0 -	2,500,000,000
1.3.29	Fasilitas Olah Raga Jakabaring	Jakabaring Palembang	-	0 -	3,000,000,000
1.3.29	Fasilitas olahraga jakabaring	Jakabaring Palembang	-	0 -	2,700,000,000
1.3.26	Peningkatan jalan pendidikan (Jl. Lais) dan pemasangan dinding penahan saluran	Palembang	-	0 -	500,000,000
1.3.27	Perbaikan jalan lingkungan 135 m x 6,5 m x 23 cm	Perum OPI PNS Jl. Papua dan Jl. Papua III kec. SU I kel. 15 Ulu Jakabaring Palembang	-	0 -	200,000,000
1.3.27	Perbaikan jalan lingkungan 200 m x 4 m x 30 cm	Jl. Buster Lr. Nanas RT 5 kel. Sukodadi kec. Sukarami Palembang	-	0 -	200,000,000
1.3.27	Perbaikan jalan lingkungan	Aspal curah Jl. Bank Raya XI RT 060 RW 013 kel. Bukit Baru kec. IB I Palembang	-	0 -	200,000,000
1.3.27	Perbaikan jalan lingkungan 200m x 3m x 25cm	Lr. Jaya Sampurna RW 09 kel. Bukit Baru kec. Ilir Barat I Palembang	-	0 -	200,000,000
1.3.29	Prasarana komplek olahraga Jakabaring Palembang	Jakabaring Palembang	-	0 -	6,000,000,000

1.3.25	-Pengecoran jalan	Jl Sumatera RT 03 Talang Jambi Sukarami Palembang	-	0 -	200,000,000
1.3.25	-Pengecoran jalan	Komplek Mataram Talang Jambi Palembang	-	0 -	200,000,000
1.3.25	-Pengecoran jalan	Komplek Gria Angkasa Permai Talang Jambi Sukarami Palembang	-	0 -	200,000,000
1.3.25	Pengecoran jalan	Lr. Melati 2 Perumahan Jaya Mandiri Telang Jambi Palembang	-	0 -	1,000,000,000
1.3.25	-Pengecoran jalan	Jl. Tanjung Barang RT 04 RW 03 Kel. Bukit Baru kec Ilir Barat I Palembang	-	0 -	200,000,000
1.3.25	-Pengecoran jalan	-Lr. Seruni Sukarami Palembang	-	0 -	200,000,000
1.3.25	-Pengecoran jalan	Jl. Pendawa Lr. Sukarelah 2 RT 10 kel. 2 Ilir kec Ilir Timur II Palembang	-	0 -	200,000,000
1.3.25	-Pengecoran jalan	-Lr. Lilin Sukarami Palembang	-	0 -	200,000,000
1.3.25	-Pengecoran jalan	-Kancil Putih Palembang	-	0 -	200,000,000
1.3.25	-Perbaikan jalan/cor beton Jl Temiyang 8 RT 04 RW 03 kel Bukit Baru kec Ilir Barat I Tanjung Barangan Palembang	-Kel Bukit Baru kec Ilir Barat I Tanjung Barangan Palembang	-	0 -	200,000,000
1.3.25	-Perbaikan jalan/cor beton perumahan PNS Pemkot RT 035 RW 005 kel Gandus kec Gandus Palembang	-Kel Gandus kec Gandus Palembang	-	0 -	200,000,000
1.3.27	Perbaikan jalan/cor	Jl Sumatera V RT 50 RW 15 kel 15 Ulu kec. Seberang Ulu I Palembang	-	0 -	200,000,000
1.3.27	Perbaikan jalan/cor	Jl Pangeran Sido Ing Lautan Lrg. Palang	-	0 -	200,000,000

		Merah RT 29 dan RT 34 kel. 35 Ilir kec. Ilir Barat II Palembang			
1.3.27	Perbaikan jalan/cor	Jl. Sultan M Mansyur Lrg. Keluarga RT 40 RW 08 kel 32 Ilir kec. Ilir Barat II Palembang	-	0 -	200,000,000
1.3.26	- Cor beton jalan utama Maskerebet K.H.A. Dahlan Kel. Talang Kelapa kec AAL dan Pembuatan box calpet samping Palapa Soekarno Hatta Jl. Kerinci Maskerebet kel. AAL	-Kota Palembang	-	0 -	1,000,000,000
1.3.26	- Cor beton Jl Hasanuddin (depan ruko Griya Hero) Maskerebet kel. Talang Kelapa kec AAL	-Kota Palembang	-	0 -	1,000,000,000
1.3.26	-Cor beton Jl Penyaringan RT 7 RW 02 kel. 3 Ilir kec IT II (L= 6m dan panjang = 600m)	-Kota Palembang	-	0 -	1,000,000,000
1.3.25	Pembangunan dan peningkatan cor beton jalan Tegal Binangun Plaju Darat Palembang	Palembang	-	0 -	1,000,000,000
1.3.25	Pengecoran, peningkatan dan perbaikan jalan	Kel Tegal Binangun kec Plaju Palembang	-	0 -	480,000,000
1.3.25	Pengecoran, peningkatan dan perbaikan jalan	Kel Sei Selincah kec Kalidoni Palembang	-	0 -	240,000,000
1.3.25	Pengecoran, peningkatan dan perbaikan jalan	Kel Sako kec Sako Palembang	-	0 -	340,000,000
1.3.25	Pengecoran, peningkatan dan perbaikan jalan	Kec Ilir Barat II Palembang	-	0 -	340,000,000
1.3.25	Pengecoran, peningkatan dan perbaikan jalan	Kel Gandus kec Gandus Palembang	-	0 -	310,000,000
1.3.25	Pengecoran, peningkatan dan perbaikan jalan	Kec Seberang Ulu II Palembang	-	0 -	410,000,000
1.3.31	Pembuatan parit	Jl DI Panjain Lr Sinar Madang Palembang	-	0 -	100,000,000
1.3.26	-Peningkatan jalan Soak Simpur kec Sukarame	-Kec Sukarame Palembang	-	0 -	1,000,000,000
1.3.25	Pembuatan drainase sekitar lingkungan	Kec. Plaju Palembang	-	0 -	200,000,000

	Universitas Muhammadiyah kec. Plaju Palembang				
1.3.26	-Cor beton Jl DI Panjaitan Lr Gaya Baru kel Sentosa kec SU II Palembang	Kec SU II Palembang	-	0 -	500,000,000
1.3.26	Cor beton Jl Sentosa Dalam kel Plaju Ulu kec Plaju	Kec Plaju Palembang	-	0 -	500,000,000
1.3.27	-Perbaikan jalan/normalisasi jalan	-Kec Alang-Alang Lebar Palembang	-	0 -	2,000,000,000
1.3.27	-Perbaikan jalan/normalisasi jalan	-Kec Sukarami Palembang	-	0 -	2,000,000,000
1.3.26	Cor beton Jl Mega Mendung kel Sentosa kec SU II Palembang	Kec SU II Palembang	-	0 -	500,000,000
1.3.50	Peningkatan jalan cor beton di perumahan Bukit Sejahtera ke IB I Palembang	Kec IB I Palembang	-	0 -	1,000,000,000
1.3.26	-Cor beton Jl Macan Kumbang dan Jl Tanah Merah kec Ilir Barat I kec Demang Lebar Daun kota Palembang	Kel Demang Lebar Daun kec IB I Palembang	-	0 -	1,000,000,000
1.3.28	Pembangunan Jl Sila Beranti Perum Griya Silaberanti Indah kel Silaberanti Kec SU I Palembang	Kec SU I Palembang	-	0 -	200,000,000
1.3.25	-Pengecoran jalan	-Lr. Kulim Ujung Sukarami Palembang	-	0 -	200,000,000
1.3.27	- Pengecoran lorong Perigi Besar RT 14-15 kel 2 Ulu Jl. Faqih Usman Palembang	-Palembang	-	0 -	100,000,000
1.3.27	- Pengecoran Lr Jayalaksana RT 8-12 kel 3-4 Ulu Palembang	-Palembang	-	0 -	100,000,000
1.3.26	Peningkatan jalan Lingkungan kec Sukarami Palembang	Kec Sukarami Palembang	-	0 -	3,500,000,000
1.3.26	- Peningkatan jalan pendidikan (JL. Lais) dan pemasangan dinding penahan saluran	-Palembang	-	0 -	5,000,000,000
1.3.26	-Pengerasan Jl Rawasari kec IT I Sekip Ujung Palembang	-Palembang	-	0 -	100,000,000
1.3.26	-Pengecoran Jl Palemraya dan Jl Beringin Raya	-Palembang	-	0 -	200,000,000
1.3.25	-Pembuatan Jl Lingkungan Lr Gardu RT 47 RW 54 Jl. Sultan Mansyur kel Bukit Lama Kec IB I Palembang	-Palembang	-	0 -	150,000,000
1.3.26	-Pengaspalan Jl Macan Kumbang III kel Demang Lebar Daun kec IB I Palembang	-Palembang	-	0 -	100,000,000

1.5.42	Rehab Gedung Masjid Taqwa Palembang	Kota Palembang	Bangunan Gedung Negara Yang Tertata	1 -unit	2,000,000,000
1.5.42	Rehab Pagar Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi SumSel	Kota Palembang	-Jumlah Gedung negara yang di tata	1 -unit	400,000,000
1.5.42	Pengelolaan Data dan Informasi Keciptakaryaan	Kota Palembang	Tersusunnya Dokumen	1 Paket	1,000,000,000
1.5.42	Fasilitasi Penyusunan Perda Bidang Jasa Konstruksi Provinsi/Kabupaten/Kota	Kota Palembang	Tersusunnya Dokumen	1 Paket	300,000,000
1.3.32	Pembuatan/Pembangunan Kolam Retensi Arafur	Kota Palembang	Luas Kolam Retensi Yang Dibangun	1.5 Ha	4,000,000,000
1.17.112	Rapat Koordinasi Teknis SKPD PU Pengairan	kota palembang	Jumlah dokumen hasil rapat teknis	1 DOKUMEN	22,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak dan Media Elektronik	Kota Palembang	Keterbukaan Informasi Publik	1 Tahun	350,000,000
1.3.34	Normalisasi Sungai Muhid, Kec Kalidoni	Kota Palembang	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	333 M'	2,000,000,000
1.3.34	Normalisasi Sungai Lebak Ketapang, Kel. Plaju Darat	Kota Palembang	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	750 M'	3,000,000,000
1.3.34	Normalisasi Anak Sungai di Kec. Sematang Borang	Kota Palembang	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	250 M'	1,000,000,000
1.3.34	Normalisasi Sungai di Kel. Alang-alang Lebar, Kec Talang Kelapa	Kota Palembang	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	250 M'	1,000,000,000
1.3.34	Normalisasi sungai di Kec. Alang -alang Lebar	Kota Palembang	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	250 M'	1,000,000,000
1.3.34	Normalisasi Sungai Kemang Manis, Kec. IB I	Kota Palembang	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	250 M'	1,000,000,000
1.3.34	Normalisasi Sungai di Kec Sematang Borang	Kota Palembang	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	250 M'	1,000,000,000
1.3.34	Normalisasi Kolam retensi di komp Amin Mulya Type 100 Jakabaring	Kota Palembang	Luas Kolam Retensi yang di pelihara	100 M2	400,000,000
1.3.30	Pembangunan Dinding Penahan Sungai Lebak Keranji	KOTA PALEMBANG	PANJANG TEBING SUNGAI YANG DILINDUNGI	500 m'	3,000,000,000
1.3.31	FS dan DED Kolam Retensi Kec.Kertapati	kota palembang	bertambahnya dokumen perencanaan	1 dokumen	300,000,000
1.3.32	Pengelolaan data dan Pelaporan	kota palembang	bertambahnya dokumen pelaporan	1 dokumen	10,000,000
1.3.32	Pembuatan kolam retensi Sei Selayur Kec Kalidoni	kota palembang	bertambahnya luasan tempat air baku	1.5 ha	600,000,000
1.3.34	Pengendalian Banjir di Kawasan RS .Ernaldi Bahar	kota palembang	Meningkatnya Lokasi yang bebas banjir	1 lokasi	17,764,260,000
1.3.32	Pengelolaan data dan Pelaporan	kota palembang	terpeliharanya fungsi pos hidroklimatologi	1 dokumen	10,000,000
1.3.31	Review Desain D.I.Ataran Sungai Air Deras (Cahaya Alam)	KOTA PALEMBANG	BERTAMBAHNYA DOKUMEN PERENCANAAN	1 dokumen	350,000,000
1.3.31	-DED Kolam Retensi Sei Selayur Kec Kalidoni	KOTA PALEMBANG	BERTAMBAHNYA DOKUMEN PERENCANAAN	1 dokumen	150,000,000
1.3.34	Pembuatan saluran primer dan jalan inspeksi Kel Talang Jambe Kec Sukarami	-Jl gotong royong kel tlg jambe kec sukarami	-	0 -	5,000,000,000

		kota palembang			
1.3.33	Rehabilitasi sungai Lebak Ketapang kel. Plaju Darat	Palembang	-	0 -	3,000,000,000
1.3.33	Normalisasi sungai Kemang Manis kec Ilir Barat I Palembang	Kec IB I Palembang	-	0 -	1,000,000,000
1.3.33	- Normalisasi dan Pasangan Ferrocement di Sungai Muhid	-Kec. Kalidoni Kota Palembang	-	0 -	1,000,000,000
1.3.31	Normalisasi dan Pasangan Ferrocement di Sungai Muhid	Kec. Kalidoni Kota Palembang	-	0 -	1,000,000,000
1.3.33	- Normalisasi dan Pasangan Ferrocement di Sungai Muhid	Kec. Kalidoni Kota Palembang	-	0 -	1,000,000,000
1.3.31	- Normalisasi dan Pasangan Ferrocement di Sungai Muhid	-Kec. Kalidoni Kota Palembang	-	0 -	1,000,000,000
1.3.33	Normalisasi Sungai Rengas	Kec. Gandus Kota Palembang	-	0 -	1,000,000,000
1.3.31	Normalisasi dan Pasangan Ferrocement di Sungai Muhid	Kec. Kalidoni Kota Palembang	-	0 -	1,000,000,000
1.3.31	- Normalisasi dan Pasangan Ferrocement di Sungai Muhid	-Kec. Kalidoni Kota Palembang	-	0 -	1,000,000,000
1.3.33	- Normalisasi Sungai rengas	-Kec. Gandus Kota Palembang	-	0 -	1,000,000,000
1.3.33	Normalisasi Sungai rengas	Kec. Gandus Kota Palembang	-	0 -	1,000,000,000
1.3.31	Optimalisasi kolam retensi di Komp Amin Mulya Type 100 Jakabaring	Kec SU I Palembang	-	0 -	400,000,000
1.3.31	-Normalisasi saluran irigasi	Kel Alang-Alang Lebar kec Talang Kelapa kota Palembang	-	0 -	1,000,000,000
1.3.33	Normalisasi anak sungai kec. Sematang Borang Palembang	Palembang	-	0 -	1,000,000,000
1.3.33	Normalisasi anak sungai kec. Alang-Alang Lebar	Kec. Alang-Alang Lebar Palembang	-	0 -	1,000,000,000
1.3.32	Konsultan Penaksir Harga Tanah	Kota Palembang	Meningkatnya Lokasi Lahan yang ditaksir	1 Lokasi	100,000,000
1.3.31	Pembersihan Rutin dan Berkala Sungai Solok Udang	Kota Palembang; Sungai Solok Udang	Panjang Sungai Yang Terpelihara	1400 M'	200,000,000
1.3.31	operasi dan pemeliharaan kolam dan saluran situs karanganyar	kota palembang	panjang sungai yang dipelihara	1500 m'	200,000,000
1.3.31	Pembersihan rutin dan berkala sungai kedukan/aur	kota palembang	panjang sungai yang terpelihara	1400 m'	200,000,000
1.3.31	Pembersihan rutin dan berkala sungai Propitan	kota palembang	panjang sungai yang terpelihara	1400 m'	200,000,000

1.3.31	Pembersihan rutin dan berkala sungai Durian	kota palembang	panjang sungai yang terpelihara	1400 m'	200,000,000
1.3.31	Pembersihan rutin dan berkala saluran dan drainase lingkar luar kawasan jakabaring	kota palembang	panjang sungai yang terpelihara	1400 m'	200,000,000
1.3.32	DED Kolam retensi Sei Selayur Kec Kalidoni	Kec. Kalidoni Kota Palembang;	luas kolam yang di desain	1 dokumen	150,000,000
1.17.147	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Palembang;	Jumlah Tenaga Kerja Jasa Administrasi Keuangan	21 Orang	81,000,000
1.10.72	Penyediaan Peralatan Dasar Bencana	Palembang	Jumlah peralatan/bahan dasar penanggulangan bencana	1000 Liter Flame Freeze	195,000,000
1.10.73	Workshop pengkajian kebutuhan Pasca bencana (PDNA)	Palembang	Jumlah peserta pelatihan perhitungan PDNA pasca bencana	60 orang	74,662,500
1.10.72	Koordinasi Penanggulangan Darurat Bencana	Palembang	Jumlah koordinasi Penanggulangan Darurat Bencana	4 kali	200,000,000
1.17.144	Pembuatan Website	Palembang	Tersedianya Website	100 persen	70,000,000
1.17.143	Sertifikasi Tanah Badan Diklat	Palembang	Jumlah dokumen/sertifikat	1 dokumen	60,000,000
1.17.144	Pengadaan Peralatan ICT Perpustakaan	Palembang	-	0 -	9,100,000,000
1.17.144	Pengadaan Sarana Pojok Layanan Perpustakaan	Palembang	Jumlah pojok layanan diarea publik	1 paket	30,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Listrik dan Komunikasi	Palembang	Jumlah tagihan listrik air dan komunikasi yang dibayar	12 bln	436,000,000
1.17.138	Komersialisasi Produk Hidroponik	Palembang	-	0 -	250,000,000
1.17.132	Inkubasi bisnis dan teknologi pengalengan pindang patin	Palembang, Banyuasin	-	0 -	550,000,000
1.17.144	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palembang	-	0 -	100,000,000
1.17.132	Pendampingan Pasca Inovasi (UKM berbasis inovasi, desa binaan)	OKU Selatan, Banyuasin, Palembang, Pagaralam	-	0 -	175,000,000
1.17.146	Rapat Koordinasi dengan Kabupaten/kota	Palembang	Terlaksananya rapat koordiansi kabupaten/kota	1 Kali	100,000,000
1.17.144	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Palembang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis	125,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Tutor SKJ	Palembang	Terlaksananya senam SKJ	11 Bulan	13,200,000
1.17.143	Penyedia jasa pendukung administrasi teknis/perkantoran	Palembang	Tercapainya pelayanan kepada pegawai BP3MD Prov. Sumsel	13 Orang	333,775,000
1.17.143	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Palembang	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi/internet, air dan listrik	12 Bulan	400,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	Terlaksananya Proses Surat Menyurat	12 Bulan	12,000,000
1.17.115	Inventarisasi Aset	Palembang	Inventarisasi Aset SKPD	100 Persen	427,500,000
1.17.144	Pembangunan Kawasan JSC	Palembang	Tersedianya kebutuhan Warehouse	100 Persen	2,000,000,000
1.17.115	Pengamanan Aset Daerah	Palembang	Jumlah aset yang diamankan	100 Persen	900,000,000

1.6.48	Pelaksanaan forum SKPD Provinsi Sumatera Selatan	Palembang	-Jumlah rapat forum SKPD Provinsi Sumsel	1 -kali	200,000,000
1.17.143	Penyediaan Publikasi dan Dokumentasi	Palembang	Jumlah Publikasi dan Dokumentasi, baliho, spanduk dan papan nama	1 Kegiatan	92,000,000
1.6.48	Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Selatan	Palembang	Jumlah pelaksanaan rapat Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Selatan	1 kali rapat	780,000,000
1.6.48	Forum Tematik lintas SKPD	Palembang	Jumlah Rapat Forum tematik lintas SKPD	8 Kali Rapat	120,000,000
1.6.48	Road Show Kab/Kota	Palembang	jumlah laporan hasil road show	1 Dokumen	150,000,000
1.6.52	Fasilitasi pusat data informasi	Palembang	Jumlah fasilitasi pusat data informasi	4 kali rapat, 1 aplikasi	200,000,000
1.6.48	Penyusunan dan Sosialisasi Arah Kebijakan	Palembang	-jumlah dokumen arah kebijakan	1 jenis dokumen	50,000,000
1.6.47	Surveilen ISO 9001:2008	Palembang	Jumlah surveilen ISO 9001:2008	1 Dokumen	95,000,000
1.17.144	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Palembang	Jumlah Gedung yang direhab	1 Gedung	100,000,000
1.6.47	Pemeliharaan dan operasional website Bappeda Prov Sumsel	Palembang	Jumlah peralatan website yang terpelihara	1 tahun	117,734,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Tehnis/Perkantoran	Palembang	Jumlah tenaga pendukung administrasi tehnis perkantoran	12 Orang	308,100,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Palembang	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara-	1 Gedung	198,500,000
1.6.48	Evaluasi kinerja pemerintah daerah Sumatera selatan	Palembang	Jumlah dokumen RKPD Kab/Kota se Sumatera Selatan	1 Dokumen	200,000,000
1.21.161	Penyusunan buku SDGs provinsi SUmatera Selatan	Palembang	Jumlah buku analisis	1 jenis buku	150,000,000
1.5.41	Penyusunan perencanaan pembangunan wilayah	Palembang	Tersusunnya dokumen perencanaan kewilayahan	1 Dokumen	250,000,000
1.6.53	Koordinasi adaptasi mitigasi perubahan iklim Sumatera Selatan	Palembang	Terlaksananya koordinasi perubahan iklim di Sumatera Selatan	15 -kali	100,000,000
1.6.53	Monitoring evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang	Palembang	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang	1 laporan	100,000,000
1.6.51	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar pemukiman	Palembang	Jumlah laporan percepatan pembangunan infrastruktur dasar pemukiman	1 laporan	150,000,000
1.6.48	Konsultasi Publik	Palembang	Jumlah rapat konsultasi publik	1 kali rapat	30,000,000
1.6.49	Koordinasi Agenda Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Sumatera Selatan	Palembang	Jumlah laporan SDGs	25 buku	100,000,000
1.6.48	Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)	Palembang	Jumlah dokumen KUPA	1 Dokumen	50,000,000
1.21.161	Penyusunan perekonomian makro daerah Sumatera Selatan	Palembang	Jumlah buku perekonomian yang tersedia	1 buku	250,000,000
1.6.51	perkuatan perencanaan program air minum dan penyehatan lingkungan	Palembang	dokumen program air minum dan penyehatan lingkungan	1 dokumen	200,000,000

1.6.48	Penyusunan RKPD dan perubahan RKPD	Palembang	Jumlah dokumen RKPD dan perubahan RKPD	2 Dokumen	250,000,000
1.17.144	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Palembang	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	10 Jenis	50,000,000
1.17.143	Penyediaan Alat Tulis kantor	Palembang	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	60 Jenis	155,000,000
1.24.172	Publikasi dan Sosialisasi minat dan budaya baca	Palembang	Jumlah publikasi di bidang perpustakaan	8 jenis	200,000,000
1.24.172	Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan	Palembang	Jumlah Peserta Fokus Group Discussion	150 orang	90,000,000
1.24.172	Peningkatan Akses Informasi Bahan Pustaka kepada Masyarakat	Palembang	Jumlah pos-pos layanan yang dapat dijangkau dan dilayani	50 pos	325,000,000
1.24.172	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Palembang	Jumlah anak TK/PAUD yang memperoleh layanan perpustakaan dan jumlah sekolah yang berkunjung ke perpustakaan	60 kali	75,000,000
1.24.172	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus dan sekolah	Palembang	Jumlah perpustakaan yang dibina	52 Perpustakaan	80,000,000
1.24.172	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum, daerah	Palembang	Jumlah koleksi perpustakaan	0	1,650,000,000
1.22.164	Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana pengolahan penyimpanan arsip	Palembang	Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang terpelihara	2 kali	100,000,000
1.22.164	Pelestarian, Perlindungan Arsip dan benda-benda bersejarah	Palembang	Jumlah arsip dan benda-benda bersejarah yang dilestarikan	20 berkas	120,000,000
1.22.164	Restorasi Arsip	Palembang	Jumlah arsip yang telah direstorasi (diperbaiki)	50 berkas	50,000,000
1.22.164	Penyusunan buku arsip Sumatera Selatan	Palembang	Jumlah buku arsip Sumatera Selatan yang tersusun	50 buku	50,000,000
1.22.164	Pendataan dan penataan Dokumen/Arsip Daerah	Palembang	Jumlah dokumen/arsip daerah yang telah terdata dan tertata	250 berkas	80,000,000
1.22.163	Publikasi Layanan Kearsipan (Pameran)	Palembang	Jumlah Publikasi Layanan Kearsipan bagi masyarakat Sumsel	1 kali	50,000,000
1.22.163	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	Palembang	Jumlah peralatan layanan informasi yang tersedia	1 unit	50,000,000
1.17.148	Pemulangan pegawai yang pensiun	Palembang	Jumlah PNS yang memasuki pensiun	4 org	6,000,000
1.17.147	Penyusunan LAKIP	Palembang	Jumlah LAKIP yang tersusun	10 buku	5,000,000
1.17.147	Rapat Teknis SKPD	Palembang	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun melalui Rapat Teknis	1 Dokumen	84,940,000
1.17.147	Penyusunan Renja, Tapkin, IKU dan Lakip BPKAD	Palembang	Tersedianya Renja, Tapkin, IKU dan Lakip BPKAD	4 Laporan	30,000,000
1.17.146	Workshop Pengelolaan Kearsipan	Palembang	Jumlah peserta yang mengikuti workshop Pengelolaan Kearsipan	30 Orang	100,000,000

1.17.146	Pemantapan Pendidikan Kepustakaan	Palembang	Jumlah pustakawan yang mengikuti Pemantapan Kependidikan Kepustakaan	25 Orang	65,000,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor	Palembang	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	32 unit	100,000,000
1.17.144	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Palembang	Jumlah inventaris kantor yang mendapat perawatan	12 Jenis	70,000,000
1.17.144	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palembang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	10 Jenis	1,000,000,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Area Jakabaring Sport City	Palembang	Area Jakabaring Sport City yang dipelihara	100 Persen	15,603,000,000
1.17.143	Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	Palembang	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dalam daerah dan luar negeri	50 Kali	100,000,000
1.17.143	Penyediaan peralatan dan bahan pembersih	Palembang	Jumlah peralatan dan bahan pembersih yang tersedia	12 Set	20,000,000
1.17.143	Penyediaan jasa tutor SKJ	Palembang	Jumlah tenaga tutor SKJ yang tersedia	1 Orang	11,000,000
1.17.143	Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis/perkantoran	Palembang	Jumlah tenaga Non PNS yang tersedia	11 Orang	260,975,000
1.17.143	Penyediaan makanan dan minuman	Palembang	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	30 Rapat	39,300,000
1.17.143	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Palembang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia	2500 eksemplar	10,000,000
1.17.143	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Palembang	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	10 jenis	30,000,000
1.17.143	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Palembang	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100 eksemplar	95,000,000
1.17.143	Penyediaan alat tulis kantor	Palembang	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	40 jenis	150,000,000
1.17.143	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Palembang	Jumlah penyedia jasa kebersihan kntor	6 Orang	171,400,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Palembang	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	9 orang	42,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Palembang	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Kantor Yang terpelihara	8 unit	60,325,000
1.17.143	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya Air dan Listrik	Palembang	Jumlah rekening listrik, telepon, internet dan air	5 rekening	300,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	Jumlah surat yang terkirim	300 lembar	5,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Tutor SKJ	Palembang	Jumlah tutor SKJ	1 Orang	13,200,000
1.17.143	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Palembang	Aktivitas rapat-rapat koordinasi dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	150 kali	350,000,000
1.17.143	Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Palembang	Jumlah insentif yang tersedia bagi tenaga non PNS	8 Orang	205,400,000

1.17.143	Penyediaan peralatan dan bahan pembersih	Palembang	Jumlah alat dan bahan pembersih yang diadakan	60 Jenis	80,000,000
1.17.143	Penyediaan makanan dan Minuman	Palembang	Lamanya ketersediaan makan minum	12 bln	100,000,000
1.17.143	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Palembang	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	20 Jenis	85,000,000
1.17.143	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Palembang	Jumlah komponen instalasi listrik yang dibutuhkan	15 Jenis	142,200,000
1.17.143	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Palembang	Jumlah Jasa kebersihan Kantor	6 Orang	184,860,000
1.17.143	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Palembang	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	60 Jenis	100,000,000
1.17.143	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Palembang	Jumlah Pengelola Keuangan	10 Orang	47,400,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Palembang	kendaraan jabatan dan operasional yang mendapat pemeliharaan	16 Unit Kendaraan roda 2 dan roda 4	175,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	Jumlah kebutuhan perangko dan materai	1000 perangko dan materai	7,000,000
1.17.143	Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, ke luar daerah dan luar negeri	Palembang	Laporan koordinasi dan konsultasi dalam daerah, ke luar daerah dan luar negeri	12 Laporan	597,861,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palembang	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	300,000,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Palembang	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	432,600,000
1.17.144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Palembang	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	1 Rumah Dinas	100,000,000
1.17.143	Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih	Palembang	Tersedianya Peralatan dan Bahan Pembersih	12 Bulan	150,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Tekhnis Perkantoran	Palembang	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Tekhnis Perkantoran	35 Orang	1,086,250,000
1.17.143	Penyediaan Makanan dan Minuman	Palembang	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan	500,000,000
1.17.143	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Palembang	Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7 Surat kabar	40,000,000
1.17.143	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palembang	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 Jenis	70,000,000
1.17.143	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Palembang	Jenis blanko cetakan	21 Jenis	536,939,000
1.17.143	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Palembang	Tersedianya Alat Tulis Kantor	80 Jenis	600,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Palembang	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	63,350,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Palembang	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	12 Bulan	10,000,000
1.17.143	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Palembang	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	6,412,500,000

	Air dan Listrik				
1.17.143	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	2500 Surat	20,000,000
1.17.115	Implementasi SIMDA Barang Milik Daerah	Palembang	Update SIMDA barang milik daerah pada seluruh SKPD	41 SKPD	125,000,000
1.17.115	Pemanfaatan Aset Daerah	Palembang	Jumlah aset yang dimanfaatkan	16 Aset	300,000,000
1.17.147	Implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP	Palembang	1 Pergub tentang kebijakan akuntansi dan 1 Pergub SAPD	200 Orang	202,500,000
1.17.115	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Palembang	Perda pertanggungjawaban APBD dan Pergub Penjabaran Pertanggungjawaban APBD	1 Perda dan Pergub	102,500,000
1.17.115	Penyusunan Raperda Tentang Perubahan APBD dan Rapergub tentang Penjabaran Perubahan APBD	Palembang	Perda APBDP dan Pergub Penjabaran APBDP	1 Perda dan Pergub	140,000,000
1.17.115	Penyusunan Raperda tentang APBD dan Rapergub tentang Penjabaran APBD	Palembang	Perda APBD dan Pergub Penjabaran APBD	1 Perda dan Pergub	140,000,000
1.6.51	Pembinaan perkuatan kelembagaan Sumber Daya Air Provinsi Sumsel (Pendamping WISMP II)	Palembang	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan Sumber Daya Air	1 dokumen	75,000,000
1.6.51	Pembinaan perkuatan kelembagaan Sumber Daya Air Provinsi Sumsel (LOAN WISMP II)	Palembang	Jumlah laporan penujang pelaksanaan WISMP	1 laporan	100,000,000
1.6.48	Pembangunan Aplikasi E-Monev	Palembang	Jumlah E-monev yang dibangun	1 sistem aplikasi	300,000,000
1.6.48	Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Palembang	Jumlah dokumen hasil Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	1 dokumen	300,000,000
1.6.48	Perkuatan pemerintah provinsi dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Kab/Kota	Palembang	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi kegiatan APBD Provinsi/Kab/Kota	3 dokumen	300,000,000
1.6.48	Penyusunan PPAS Perubahan (PPAS-P)	Palembang	Jumlah Dokumen PPAS-P	1 jenis	100,000,000
1.6.48	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Palembang	-Jumlah dokumen PPAS	1 dokumen	140,000,000
1.6.48	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	Palembang	-Jumlah dokumen KUA	1 jenis	60,000,000
1.6.46	Kerjasama Pembangunan Antar Wilayah	Palembang	Jumlah dokumen laporan akhir rapat kerjasama pembangunan antar wilayah	2 Dokumen	250,000,000
1.6.52	Penyusunan Buletin Pembangunan Sumatera Selatan	Palembang	Frekuensi penerbitan Buletin Pembangunan Sumatera Selatan dalam 1 tahun	2 Kali	100,000,000
1.5.41	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Prov. Sumsel	Palembang	Tersusunnya dokumen KLHS RTRW Sumsel	1 dokumen	500,000,000

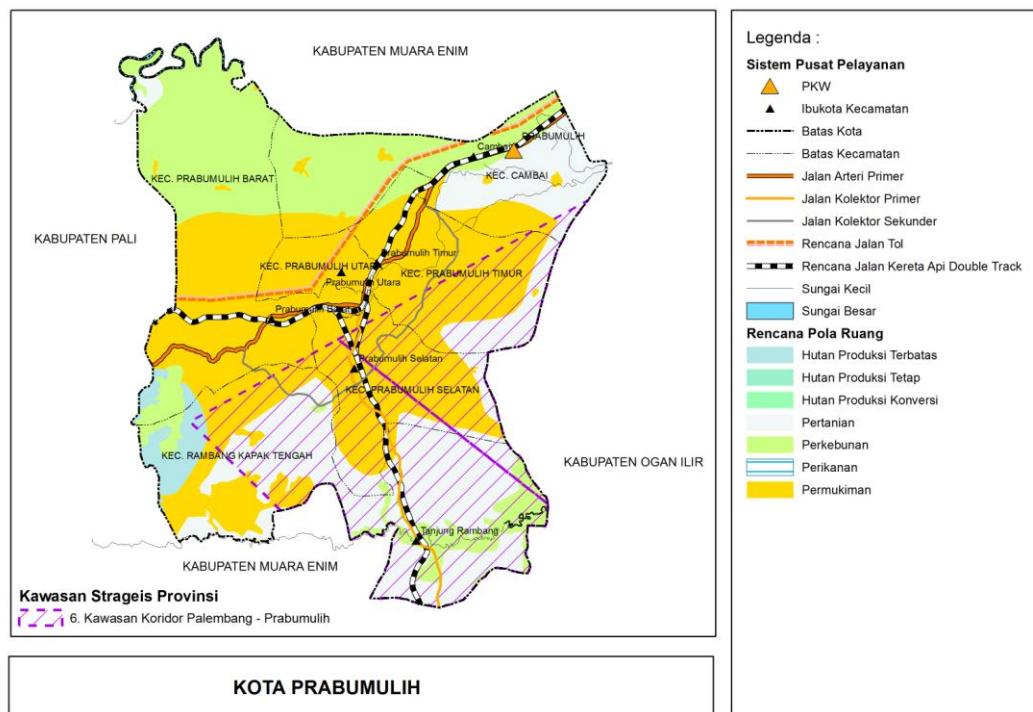
1.5.41	Koordinasi BKPRD Provinsi Sumatera Selatan	Palembang	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja BKPRD Sumsel dalam upaya penataan ruang di Sumatera Selatan	1 Laporan	150,000,000
1.5.41	Operasional Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD)	Palembang	Terlaksananya Jaringan Informasi Geospasial Daerah	1 Laporan	100,000,000
1.21.161	Penyusunan buku profil Provinsi Sumatera Selatan	Palembang	Jumlah dokumen yang disusun	1 jenis dokumen	200,000,000
1.17.146	Pendidikan dan pelatihan formal	Palembang Sumsel	-Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan	10 -orang	100,000,000
1.17.144	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palembang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	16 jenis	453,400,000
1.17.144	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional dan genset	Palembang	-jumlah kendaraan dinas operasional dan genset yang terpelihara	10 mobil, 10 motor dan 1 genset	345,000,000
1.17.144	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Palembang	Jumlah taman yang terpelihara	1 taman	50,000,000
1.17.143	Koordinasi dan konsultasi ke dalam, keluar daerah dan keluar negeri	Palembang	Frekuensi Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri	213 Dalam Daerah, Luar Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri	700,000,000
1.17.143	Penyediaan peralatan dan bahan pembersih	Palembang	Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	50,000,000
1.17.143	Penyediaan jasa operator komputer	Palembang	Jumlah Petugas Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	6 OK	169,120,000
1.17.143	Penyediaan jasa tutor SKJ	Palembang	Jumlah Pelaksanaan SKJ	44 -kali	13,200,000
1.17.143	Penyediaan makanan dan minuman	Palembang	Jumlah makanan dan minuman senam dan rapat	70 kali	70,000,000
1.17.143	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Palembang	Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia	2 jenis bahan bacaan	35,000,000
1.17.143	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Palembang	Jumlah jenis komponen peralatan listrik yang tersedia	10 jenis	30,000,000
1.17.143	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Palembang	jumlah cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	20 Jenis	76,878,310
1.17.143	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Palembang	Jumlah tenaga administrasi yang menerima honor pengelola keuangan	5 orang	28,200,000
1.17.143	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Palembang	-Jumlah kendaraan yang diasuransikan	9 -polis asuransi kendaraan	42,300,000
1.17.143	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Palembang	-jumlah rekening pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	156 rekening	465,000,000
1.17.143	Penyediaan jasa surat menyurat	Palembang	Jumlah surat yang terkirim/bermaterai melalui jasa pengiriman	300 materai, 200 surat	3,500,000
					1,007,268,987,210

6.5.15 Kota Prabumulih

Pengembangan Kota Prabumulih yang memiliki 1 PKW (Prabumulih) diarahkan untuk memantapkan perannya sebagai salah satu pusat pelayanan jasa dan kegiatan di tingkat wilayah. Dalam kaitan pengembangan koridor internal Palembang-Lubuk Linggau, posisi Kota Prabumulih strategis sebagai salah satu simpul transportasi dan perdagangan wilayah. Sektor unggulan daerah di antaranya keuangan dan perdagangan serta buah-buahan. Sumber pertumbuhan ekonomi daerah dicirikan oleh sektor-sektor perkotaan yaitu perdagangan, bangunan, dan keuangan. Oleh karena itu prioritas pembangunan diarahkan pada:

- Peningkatan infrastruktur jalan dan prasarana perkotaan lainnya seperti persampahan, sanitasi dan drainase, serta kelistrikan
- Peningkatan manajemen pasar regional sebagai kolektor dan distributor komoditi unggulan dari daerah sekitar
- Peningkatan dukungan pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan dan pertanian dengan fokus peningkatan akses permodalan dan teknologi khususnya pada UMKM serta pengembangan balai-balai latihan kerja
- Pengendalian pemanfaatan ruang
- Peningkatan akses pendidikan menengah

Gambar 6.34 :
Arah Pengembangan Kota Prabumulih



Tabel 6.30 :
Alokasi Kegiatan Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2016

Nomor	Kegiatan	Lokasi	Indikator	Volume	Anggaran
1.8.61	Kampanye Lingkungan Hidup	Kota Prabumulih	Jumlah pelaksanaan kampanye lingkungan hidup	7 rangkaian kampanye LH	270,000,000
1.2.21	Pembinaan dan pengawasan produk pangan industri pabrikan	7 Kab/Kota (Palembang, Lubuk Linggau, 4 Lawang, Prabumulih, Muara Enim, Banyuasin, Lahat)	-Jumlah Industri Makanan Minuman yang dibina tentang kesehatan dan keamanan makanan	10 -Industri Makanan	350,000,000
1.2.14	Penyemprotan fogging sarang nyamuk	- Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Lahat; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Ogan Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Prabumulih;	-Jumlah fogging fokus pemberantasan penyakit DBD	135 Fokus	300,000,000
1.16.101	Pembinaan Tibum dan Tranmas kepada masyarakat di provinsi sumatera selatan	Kota Palembang; Kabupaten Muara Enim; Kota Prabumulih; Kota Pagar Alam;	terselenggarannya pembinaan tibum tranmas kepada masyarakat	4 kab/kota	120,000,000
1.15.97	Dukungan Peralatan Olahraga untuk Masyarakat	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Pagar Alam; Kota Palembang; Kota Prabumulih;	Jumlah peralatan olahraga untuk masyarakat	40 Klub/Karang Taruna	190,000,000
1.10.70	Fasilitasi Taruna Siaga Bencana (Tagana), Petugas Penata Usahaan Gudang Logistik, dan Petugas Posko	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Pagar Alam;	Terpenuhinya tali asih dan Uniform TAGANA, Petugas Penata Usahaan Gudang Logistik, dan Petugas POSKO Kesiap Siagaan Bencana Bidang Perlindungan Sosial	945 orang	1,412,800,000

		Kota Palembang; Kota Prabumulih;			
1.10.69	Fasilitasi Persatuan Amal Kematian (PAK) di Sumatera Selatan	- Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Palembang; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Banyuasin; ; Kota Prabumulih; Kabupaten Empat Lawang;	Tersedianya bantuan tenda, kursi , wireless dan Mobil Ambulance untuk Persatuan Amal Kematian; dan kend R4	30 pak	3,345,000,000
1.10.69	Fasilitasi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)	- Kota Pagar Alam; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muratara; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kota Prabumulih; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kota Palembang; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu;	tersedianya tali asih bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	228 orang	730,000,000
1.10.68	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (Eks Wts, Waria, dan ODHA	Kota Prabumulih; Kabupaten Musi Rawas;	Tersedianya Bimbingan Mental, Sosial, Psikologis, Keterampilan bagi eks WTS, Waria, dan ODHA	50 orang	225,000,000
1.4.40	-Pembangunan Pengelolaan TPST 3R	Kota Prabumulih;	-Terbangunnya Pengelolaan Sampah 3R	1 -Kawasan	500,000,000
2.25.185	Pembinaan dan Pengawalan Revitalisasi Perkebunan	Mura, Muratara, Prabumulih,OKI,OKU,OKUT ,MUBA,M Enim, Banyuasin, Pali	- Jumlah petani, petugas dan perusahaan peserta revit perkebunan yang terbina	120 - Orang	100,000,000
2.25.184	Bantuan bahan dan alat pembeku karet	Prabumulih, Bayuasin, OKU, Pali,	- Terlaksananya bantuan bahan pembeku karet	8000 - Liter	200,000,000
2.25.184	Pengadaan Alat Panen Karet Rakyat	pRABUMULIH, OKU, M Enim, OKI, PALI, MURATARA	- Terlaksananya bantuan alat panen karet	200 - paket	200,000,000
2.25.183	PengendalianPenyakit Kering Alur Sadap	Kota Prabumulih, b asin, oku, m enim, oi, muba,	- Terlaksananya pengendalian kering alur sadap	500 - Ha	400,000,000
2.25.180	Peremajaan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat	MUBA, PALI, Prabumulih, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Muratara	- Terlaksananya peremajaan dan pengembangan tanaman karet rakyat	700 - Ha	4,050,000,000

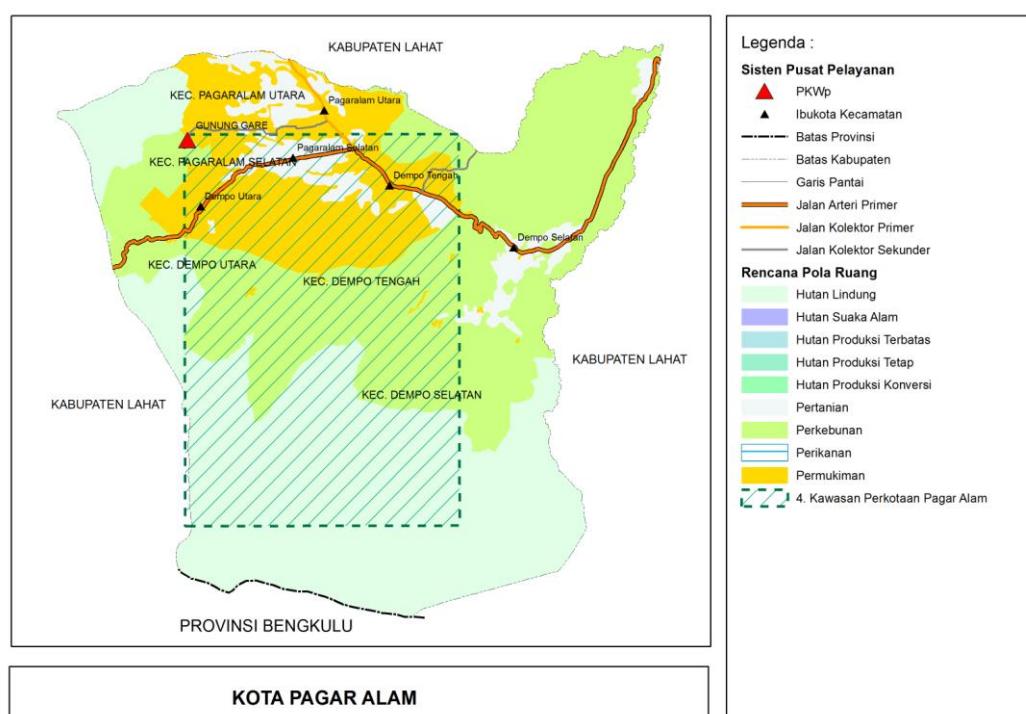
2.25.178	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	16 Kab./Kota (Banyuasin, OKU Timur, OKI, OKU, OKU Selatan, Ogan Ilir, Prabumulih, Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, Musi Rawas, Muratara, PALI, Empat Lawang, Musi Banyuasin dan Palembang)	Meningkatnya pemanfaatan pembiayaan program dan kredit komersial mendukung peningkatan produksi dan mutu produk	100 Kelompok	150,000,000
1.3.26	-Pengecoran jalan	-Kel Gunung Ibul Kota Prabumulih	-	0 -	600,000,000
1.3.26	-Pengecoran jalan	-Kel.Patih Galung kota Prabumulih	-	0 -	600,000,000
1.3.26	-Pembuatan siring	-Kel Muara Dua kota Prabumulih	-	0 -	800,000,000
1.3.26	-Pembuatan siring	-Kel Karang Raja kota Prabumulih	-	0 -	600,000,000
1.3.26	-Pengecoran jalan unit 9 Ds III Desa Karya Mulya Kota Prabumulih	Dusun III Desa Karya Mulya Kota Prabumulih	-	0 -	1,500,000,000
1.3.26	-Pengecoran jalan Kelurahan Muara Dua, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih	-Kelurahan Muara Dua, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih	-	0 -	1,000,000,000
1.3.34	Normalisasi Sungai Medang	Kota Prabumulih	Panjang aliran sungai yang dinormalisasi	5000 M'	2,200,000,000
1.3.30	Pembuatan Talud dan Normalisasi Sungai Kelekar	Kota Prabumulih	PANJANG TEBING SUNGAI YANG DILINDUNGI	1500 m'	8,999,999,000
1.3.30	Pembuatan Talud dan Normalisasi Sungai Bunut	Kota Prabumulih	PANJANG TEBING SUNGAI YANG DILINDUNGI	833 m'	5,000,000,000
1.3.30	-Pengerukan dan pembuatan bronjong sungai Bunut	-Kel. Karang Jaya Prabumulih kec Prabumulih Timur kota Prabumulih	-	0 -	5,000,000,000
1.3.33	-Pengerukan dan pembuatan bronjong sungai Bunut	-Kel Karang Raja kec Prabumulih Timur kota Prabumulih	-	0 -	6,000,000,000
					44,842,799,000

6.5.16 Kota Pagar Alam

Pengembangan Kota Pagar Alam yang memiliki 1 (PKWp) Pagar Alam diarahkan sebagai kota jasa dan pariwisata dataran tinggi. Dikelilingi oleh bentang alam pegunungan dan daerah pertanian yang indah, potensi pengembangan pariwisata sangat menjanjikan. Sektor unggulan daerah adalah sektor jasa dan komoditas hortikultura sayur-mayur. Sementara itu sumber pertumbuhan ekonomi daerah adalah konstruksi, jasa-jasa, dan perdagangan. Oleh karena itu prioritas pembangunan diarahkan pada:

- Peningkatan infrastruktur penunjang pariwisata yang meliputi telekomunikasi, kelistrikan, dan transportasi
- Peningkatan infrastruktur perkotaan seperti jalan kota, sanitasi dan drainase, dan persampahan
- Pengembangan agrowisata
- Peningkatan produktivitas usaha tani: penyuluhan, pemanfaatan bibit unggul, jaminan suplai pupuk dan alsintan
- Pemberdayaan koperasi petani
- Pengendalian pemanfaatan ruang dan peningkatan daya dukung lingkungan

Gambar 6.35 :
Arah Pengembangan Kota Pagar Alam



Tabel 6.31 :
Alokasi Kegiatan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2016

Nomor	Kegiatan	Lokasi	Indikator	Volume	Anggaran
2.26.204	Pengembangan Sistem Agroforestry di Kawasan Hutan Lindung	- Kota Pagar Alam; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;	Jumlah luas pengembangan sistem agroforestry	2 lokasi	130,000,000
2.26.204	Rehabilitasi Hutan Catchment Area Daerah Irigasi Bendungan	- Kota Pagar Alam;	Jumlah Luas kawasaan hutan yang direhabilitasi sebagai lahan Sistem air daerah irigasi	10 Ha	100,000,000
2.26.203	Pelatihan Kelompok Tani dan Pembuatan Demlpot teknik budidaya agroforestry dan konservasi tanah dan air	- Kota Pagar Alam;	Jumlah unit pembuatan demplot budidaya agroforestry dan bantuan bibit	10 ha	110,000,000
1.2.9	Peningkatatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana	Pagar Alam ; PALI ; Muratara ; Empat Lawang ; Lahat ; OKU ; OKUT ; OKUS	-Jumlah pelayanan Kesehatan bagi pengungsi dan korban bencana di provinsi Sumsel	8 -Kejadian Bencana	250,000,000
1.16.101	Pembinaan Tibum dan Tranmas kepada masyarakat di provinsi sumatera selatan	Kota Palembang; Kabupaten Muara Enim; Kota Prabumulih; Kota Pagar Alam;	terselenggarannya pembinaan tibum tranmas kepada masyarakat	4 kab/kota	120,000,000
1.15.97	Dukungan Peralatan Olahraga untuk Masyarakat	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Pagar Alam; Kota Palembang; Kota Prabumulih;	Jumlah peralatan olahraga untuk masyarakat	40 Klub/Karang Taruna	190,000,000

1.15.97	Dukungan peralatan olahraga untuk pondok pesantren di Sumsel	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Pagar Alam; Kota Palembang;	Jumlah ponpes di Provinsi Sumatera Selatan yang mendapat bantuan peralatan olahraga	25 Pondok Pesantren	190,000,000
1.10.70	Fasilitasi Taruna Siaga Bencana (Tagana), Petugas Penata Usahaan Gudang Logistik, dan Petugas Posko	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Pagar Alam; Kota Palembang; Kota Prabumulih;	Terpenuhinya tali asih dan Uniform TAGANA, Petugas Penata Usahaan Gudang Logistik, dan Petugas POSKO Kesiap Siagaan Bencana Bidang Perlindungan Sosial	945 orang	1,412,800,000
1.10.69	Fasilitasi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)	- Kota Pagar Alam; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muratara; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kota Prabumulih;	ersedianya tali asih bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	228 orang	730,000,000

		Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kota Palembang; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu;			
1.5.43	Peningkatan Infrastruktur Kawasan Kumuh Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam	Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;	-Jumlah Kawasan Agropolitan yang tertangani	1 -kawasan	1,000,000,000
1.4.37	Pembangunan IPLT Kota Pagar Alam	Kota Pagar Alam	Jumlah SPAM IKK yang terbangun	1 IKK	750,000,000
2.25.198	Pemberdayaan Masyarakat/Kelompok Tani Hutan	- Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kabupaten Musi Banyuasin; Kota Pagar Alam;	Jumlah Masyarakat/Kelompok Tani Hutan yang Mendukung Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	100 Persen	100,000,000
2.25.185	Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Besar (PBS/N)	Kab. Muara Enim, Banyuasin, Muba, OKU, OKUT, OKUS, OI, OKI, Lahat, PaGAR ALAM, MURA, EMPAT Lawang	- Jumlah kebun yang terawasi dan terbina	17 - Kebun PBS/N	100,000,000
2.25.178	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	16 Kab./Kota (Banyuasin, OKU Timur, OKI, OKU, OKU Selatan, Ogan Ilir, Prabumulih, Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, Musi Rawas, Muratara, PALI, Empat Lawang, Musi Banyuasin dan Palembang)	Meningkatnya pemanfaatan pembiayaan program dan kredit komersial mendukung peningkatan produksi dan mutu produk	100 Kelompok	150,000,000
2.25.178	Peningkatan Penanganan Pasca Panen Hortikultura	3 Kab./Kota (Pagar Alam, OKU Timur dan Lahat)	Jumlah kelompok tani yang dibina untuk melaksanakan penanganan pascapanen hortikultura berbasis GHP	3 Kelompok	65,000,000
2.25.178	Peningkatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan	14 Kab./Kota (OKU Timur, Musi Rawas, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Muratara, PALI, OKU Selatan, Muara Enim dan OKU)	Jumlah Kelompoktani yang dibina untuk melaksanakan penanganan pasca panen tanaman pangan	28 Kelompok	200,000,000
2.25.178	Pengadaan Alat Pasca Panen Hortikultura	3 Kab./Kota (Pagar Alam, OKU Timur dan Lahat)	Jumlah peralatan penanganan pascapanen hortikultura : - Keranjang (111 Unit) - Roda 3 (1 Unit)	112 Unit	135,000,000

2.25.178	Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan	14 Kab./Kota (OKU Timur, Musi Rawas, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Muratara, PALI, OKU Selatan, Muara Enim dan OKU)	Jumlah Peralatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan : - Power Tresher (17 Unit) - Combine Harvester (2 Unit) - Terpal Jemur (225 Lembar)	244 Unit/Lembar	392,700,000
2.25.177	Pembinaan Pengembangan Pupuk Organik	5 Kab./Kota (Lahat, Pagar Alam, PALI, OKU Timur dan OKU Selatan)	Jumlah kelompoktani yang membuat pupuk organik	5 Kelompok	75,000,000
2.25.177	Penyediaan Sarana Pengembangan Pupuk Organik	5 Kab./Kota (Lahat, Pagar Alam, PALI, OKU Timur dan OKU Selatan)	Jumlah Alat Pembuat Pupuk Organik	5 Unit	180,000,000
2.25.175	Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	11 Kab./Kota (Ogan Ilir, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, OKU Timur, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Lubuk Linggau dan OKU)	Luas Penangkaran Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang disertifikasi :- Padi (400 Ha)- Buah-buahan (30.000 Btg)- Sayuran (15 Ton)	400 Ha	640,000,000
2.25.175	Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	13 Kab./Kota (Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, OKI, OKU, OKU Timur, Lahat, Muara Enim, Empat Lawang, Musi Rawas, Pagar Alamm Lubuk Linggau dan PALI)	Jumlah Produsen/Penyalur Pedagang Benih yang diawasi	1 Unit	100,000,000
2.25.175	Pengelolaan Penangkaran Benih Tanaman Pangan	11 Kab./Kota (Ogan Ilir, OKI, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Musi Rawas, Banyuasin, OKU Timur dan Musi Banyuasin)	Pengelolaan ketersediaan benih di produsen, penangkar dan pengecer	400 Ton	209,800,000
2.25.175	Penyediaan Sarana Pengelolaan Penangkaran Benih Tanaman Pangan	11 Kab./Kota (Ogan Ilir, OKI, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Musi Rawas, Banyuasin, OKU Timur dan Musi Banyuasin)	Ketersediaan Benih Tanaman Pangan yang unggul dan bersertifikat	5000 Kg	1,176,225,000
2.25.174	Pemasarakatan Benih Unggul Tanaman Hortikultura untuk Peningkatan Produksi dan Produktivitas	Kabupaten Lubuk Linggau, Ogan Komering Ilir dan Pagar Alam	Meningkatnya Kemampuan Petani dalam memanfaatkan Benih Unggul Tanaman Hortikultura	3 Kelompok	75,000,000
2.25.174	Penyediaan Sarana Produksi Pemasarakatan Benih Unggul Tanaman Hortikultura	Kabupaten Lubuk Linggau, Ogan Komering Ilir dan Pagar Alam	Jumlah sarana produksi Pemanfaatan Benih Unggul Tanaman Sayuran	3 Paket	150,000,000

2.25.174	Penyediaan Sarana Produksi Pengelolaan Tanaman Sayuran	Kab. Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, OKU Timur, Palembang dan Pagar Alam	Meningkatnya luas tanam sayuran	19 Ha	450,000,000
2.25.174	Pengelolaan Produksi Tanaman Buah	Kabupaten OKI, Muara Enim, Lahat, OKU, Banyuasin, Muaratara dan Kota Pagar Alam	Meningkatnya Pengelolaan Produksi Tanaman Buah	8 Kelompok	200,050,000
2.25.174	Penyediaan Sarana Produksi Pengelolaan Tanaman Buah	Kabupaten OKI, Muara Enim, Lahat, Muratara, OKU, OKI, Banyuasin dan Kota Pagar Alam	Meningkatnya Luas Tanam Tanaman Buah	85 Ha	410,825,000
2.25.180	Diversifikasi tanaman kopi, kakao/Lada	OKUS, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Pagar Alam	-Jumlah lahan kopi yang terdiversifikasi dengan lada	150 Ha	350,000,000
2.25.186	Pengawasan dan Pengembangan Kebun Benih Tanaman Perkebunan	-Pagar Alam, Lahat	-Terlaksananya pembangunan kebun induk kopi	4 Ha	150,000,000
2.28.219	Saka Pramuka	-Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam;	Jumlah peserta berkemah	20 Orang	30,000,000
1.3.27	Perbaikan jalan lingkungan	Perum Atlit TOP 100 Jl. BP Pelitung II RT 62 RW 17 kel. 15 Ulu kec. SU I samping Mess Pagar Alam	-	0 -	200,000,000
1.3.25	Pembangunan jalan cor beton	Dusun Muara Sindang RW 01 kel. Prahu Dipo kec. Dempo Selatan kota Pagar Alam	-	0 -	200,000,000
1.3.25	Pembangunan jalan cor beton	Desa Semidang Alas RT 2 RW 2 kel Joko kec Dempo Tengah kota Pagar Alam	-	0 -	200,000,000
1.3.25	Pembangunan jalan cor beton	Desa Tanjung Aro kel Kuripan Babas kec Pagar Alam Utara kota Pagar Alam	-	0 -	200,000,000
1.3.25	Pembangunan jalan cor beton	-Desa Bumi Agung kel Bumi Agung kec Dempo Utara kota Pagar Alam	-	0 -	200,000,000
1.3.25	Pembangunan jalan cor beton	Desa Talang Camai Perandonan kel Selebar kec Pagar Alam Utara kota Pagar Alam	-	0 -	200,000,000
2.25.188	Pengembangan peternakan sapi perah melalui pemberdayaan perempuan	Kota Pagaralam, Kota Palembang dan Kab. PALI	Jumlah jenis barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Demo Farm; konsentrat, Pakan HMT, Sapi Perah dan Bantuan Kandang)	4 jenis	800,000,000
2.25.184	Bantuan Alat Pengolahan Kopi Rakyat	Kab. Lahat, Muara Enim, Empat Lawang, dan kota Pagaralam	- Terlaksananya bantuan alat pengolahan kopir rakyat	4 - Paket	300,000,000

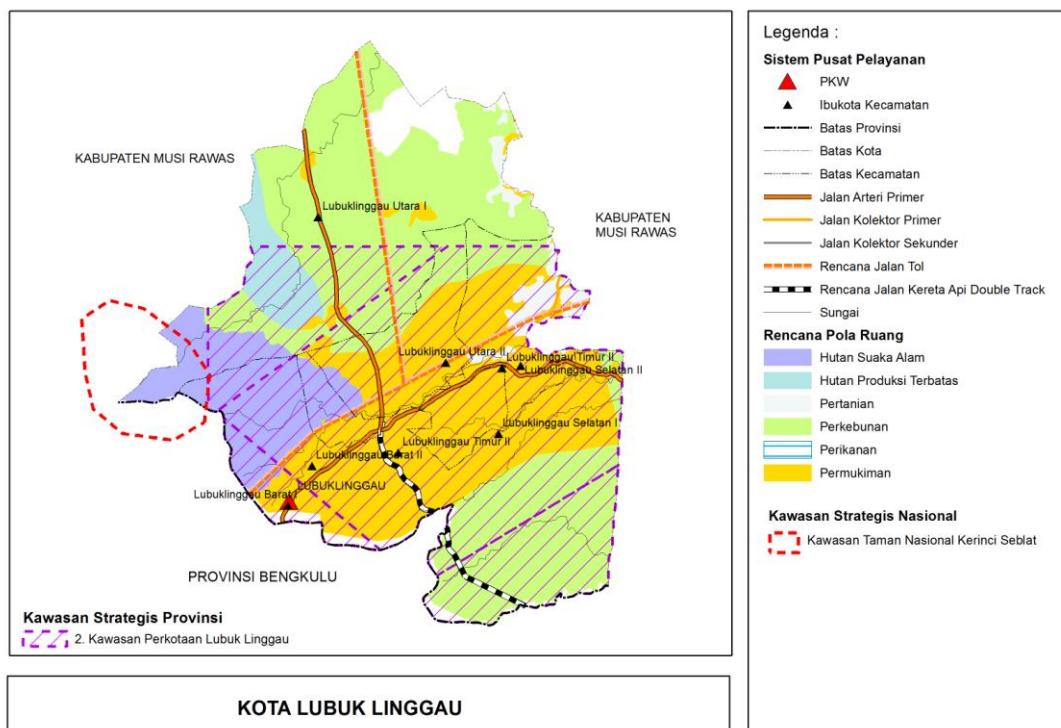
1.3.31	Pemeliharaan Irigasi D.I. Sawah Air Karang Sumar, Ds. Muara Tenang	Kota Pagaralam	Panjang saluran irigasi yang dipelihara	166 m'	250,000,000
1.3.31	Pemeliharaan Irigasi D.I. Masam Bulau	-kota pagaralam	bertambahnya daerah irigasi yang terpelihara	166.67 m'	250,000,000
1.3.31	Review Desain D.I. Selangis Besar/Jemair	-kota pagaralam	bertambahnya dokumen perencanaan	1 dokumen	357,000,000
1.3.31	Review Desain D.I. Pasemah	kota pagaralam	bertambahnya dokumen perencanaan	1 dokumen	387,450,000
1.3.31	Pemeliharaan Irigasi D.I. Masam Bulau	-Kota Pagaralam	-	0 -	250,000,000
1.3.31	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Merah	-Kota Pagaralam	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	1600 m'	2,500,000,000
1.3.31	Review Desain D.I. Selangis Besar/Jemair	Kota Pagaralam	-	0 -	357,000,000
1.3.31	Review Desain D.I. Pasemah	-Kota Pagaralam	-	0 -	387,450,000
1.3.31	rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Pasemah	kota pagaralam	panjang jaringan irigasi dan rawa yang terbangun	333 m'	500,000,000
1.17.132	Pendampingan Pasca Inovasi (UKM berbasis inovasi, desa binaan)	OKU Selatan, Banyuasin, Palembang, Pagaralam	-	0 -	175,000,000
					18,036,300,000

6.5.17 Kota Lubuklinggau

Pengembangan Kota Lubuklinggau yang memiliki 1 PKW (Lubuklinggau) diarahkan sebagai pusat kota jasa dan industri pengolahan yang melayani wilayah bagian barat. Dengan posisinya yang strategis, Kota Lubuklinggau juga berpotensi melayani wilayah Bengkulu. Sektor unggulan daerah khas daerah perkotaan yakni perdagangan dan jasa lainnya. Demikian juga sumber utama pertumbuhan daerah, yakni sektor konstruksi, perdagangan, dan jasa-jasa. Oleh karena itu prioritas pembangunan diarahkan pada:

- Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur perkotaan: jalan, sanitasi dan drainase, dan persampahan
- Peningkatan jaringan telekomunikasi dan kelistrikan
- Pemantapan pengelolaan pasar regional
- Dukungan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan melalui: difusi teknologi, akses permodalan, dan pengembangan balai latihan kerja
- Pengendalian pemanfaatan ruang
- Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses pelayanan kesehatan

Gambar 6.36 :
Arah Pengembangan Kota Lubuklinggau



Tabel 6.32
Alokasi Kegiatan Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2016

Nomor	Kegiatan	Lokasi	Indikator	Volume	Anggaran
1.8.60	pembinaan areal ijin pemanfaatan dan penggunaan hutan	KAB.Musi Banyuasin, Musi Rawas, Muara Enim, PALI, Lahat, Lubuk Linggau	pembinaan areal ijin pemanfaatan dan penggunaan hutan produksi	16 -ijin	36,870,000
1.2.22	Pembinaan dan pendampingan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	Empat Lawang, Muratara, Lubuk Linggau	-Jumlah Kabupaten /Kota yang dibina dalam pelaksanaan Ante Natal Care (ANC)	3 - Kabupaten / Kota	240,000,000
1.2.21	Pembinaan dan pengawasan produk pangan industri pabrikan	7 Kab/Kota (Palembang, Lubuk Linggau, 4 Lawang, Prabumulih, Muara Enim, Banyuasin, Lahat)	-Jumlah Industri Makanan Minuman yang dibina tentang kesehatan dan keamanan makanan	10 - Industri Makanan	350,000,000
1.2.14	Penyemprotan fogging sarang nyamuk	- Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Lahat; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Ogan Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Prabumulih;	-Jumlah fogging fokus pemberantasan penyakit DBD	135 Fokus	300,000,000
1.2.14	Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	- Kota Lubuk Linggau; Kabupaten Muara Enim;	Jumlah masyarakat yang diskriminasi faktor risiko PTM	200 Orang	469,554,000
1.17.122	Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi	; Kota Lubuk Linggau; Kota Lubuk Linggau;	Jumlah Kaifilah yang diberangkatkan	80 Orang	1,048,600,000
1.15.97	Dukungan Peralatan Olahraga untuk Masyarakat	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Pagar Alam; Kota Palembang; Kota Prabumulih;	Jumlah peralatan olahraga untuk masyarakat	40 Klub/Karang Taruna	190,000,000

1.15.97	Dukungan peralatan olahraga untuk pondok pesantren di Sumsel	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Pagar Alam; Kota Palembang;	Jumlah ponpes di Provinsi Sumatera Selatan yang mendapat bantuan peralatan olaharaga	25 Pondok Pesantren	190,000,000
1.15.96	Lomba Olahraga Tradisional Prov. Sumsel	Kota Lubuk Linggau dan Jakarta	Jumlah peserta lomba olahraga tradisional Provinsi Sumatera Selatan	25 orang	150,000,000
1.10.70	Fasilitasi Taruna Siaga Bencana (Tagana), Petugas Penata Usahaan Gudang Logistik, dan Petugas Posko	Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten Muara Enim; Kabupaten Muratara; Kabupaten Musi Banyuasin; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kota Pagar Alam; Kota Palembang; Kota Prabumulih;	Terpenuhinya tali asih dan Uniform TAGANA, Petugas Penata Usahaan Gudang Logistik, dan Petugas POSKO Kesiap Siagaan Bencana Bidang Perlindungan Sosial	945 orang	1,412,800,000
1.10.69	Pembinaan Organisasi Sosial	Kab. Banyuasin; Kota Lubuk Linggau; Kab. OKUT; Kab. MUBA; Kab. OKI	terbinanya organisasi sosial dan terseleksinya orsos berprestasi	250 orang	80,000,000
1.10.69	Fasilitasi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)	- Kota Pagar Alam; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Lubuk Linggau; Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Empat Lawang; Kabupaten Lahat; Kabupaten	ersedianya tali asih bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	228 orang	730,000,000

		Muratara; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kota Prabumulih; Kabupaten Ogan Komering Ilir; Kota Palembang; Kabupaten Ogan Ilir; Kabupaten Ogan Komering Ulu;			
1.10.68	Fasilitasi dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kabupaten Musi Banyuasin; Kota Lubuk Linggau; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Musi Rawas; Kabupaten Ogan Komering Ilir;	Terlalainya penyandang cacat melalui unit pelayanan sosial keliling (UPSK) 200 Org dan Bantuan bagi penyandang diasabilitas berupa: kursi roda, hearing aid, tangan/kaki palsu, kruk ketiak 175 Org	800 orang	500,000,000
1.3.31	Pembangunan saluran irigasi kel. marga bakti	- Kota Lubuk Linggau;	Panjang jaringan irigasi yang dibangun	400 meter	320,000,000
2.25.193	Fasilitas PEDa/PENAS	Provinsi/Lubuk Linggau	Jumlah Petani-Nelayan dan Pendampingan yang terfasilitasi di PEDa/PENAS	100 Persen	1,100,000,000
2.25.182	Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Perkebunan	Kota Palembang, Lubuk Linggau, Kab. Musi Rawas, Banyuasin,	- Terlaksananya sertifikasi benih / bibit	8000000 0 - Benih	250,000,000
2.25.182	Pembinaan dan Pengawasan Penangkar Benih/Bibit tanaman Perkebunan	Kota Palembang; Lubuk Linggau; Kabupaten, Musi Rawas, Banyuasin	- Terlaksananya pengawasan sumber benih dan peredaran benih/bibit	8000000 0 - Benih	250,000,000
2.25.175	Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	11 Kab./Kota (Ogan Ilir, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, OKU Timur, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Lubuk Linggau dan OKU)	Luas Penangkaran Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang disertifikasi : - Padi (400 Ha) - Buah-buahan (30.000 Btg) - Sayuran (15 Ton)	400 Ha	640,000,000
2.25.175	Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	13 Kab./Kota (Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, OKI, OKU, OKU Timur, Lahat, Muara Enim, Empat Lawang, Musi Rawas, Pagar Alamm Lubuk Linggau dan PALI)	Jumlah Produsen/Penyalur Pedagang Benih yang diawasi	1 Unit	100,000,000
2.25.175	Pengelolaan Penangkaran Benih Tanaman Pangan	11 Kab./Kota (Ogan Ilir, OKI, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Musi Rawas, Banyuasin, OKU Timur dan Musi Banyuasin	Pengelolaan ketersediaan benih di produsen, penangkar dan pengecer	400 Ton	209,800,000
2.25.175	Penyediaan Sarana Pengelolaan Penangkaran Benih Tanaman Pangan	11 Kab./Kota (Ogan Ilir, OKI, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Musi Rawas,	Ketersediaan Benih Tanaman Pangan yang unggul dan bersertifikat	5000 Kg	1,176,225,000

		Banyuasin, OKU Timur dan Musi Banyuasin)			
2.25.174	Pemasarakatan Benih Unggul Tanaman Hortikultura untuk Peningkatan Produksi dan Produktivitas	Kabupaten Lubuk Linggau, Ogan Komering Ilir dan Pagar Alam	Meningkatnya Kemampuan Petani dalam memanfaatkan Benih Unggul Tanaman Hortikultura	3 Kelompok	75,000,000
2.25.174	Penyediaan Sarana Produksi Pemasarakatan Benih Unggul Tanaman Hortikultura	Kabupaten Lubuk Linggau, Ogan Komering Ilir dan Pagar Alam	Jumlah sarana produksi Pemanfaatan Benih Unggul Tanaman Sayuran	3 Paket	150,000,000
1.14.89	Pemeliharaan Museum Subkoss	-Kec. Lubuklinggau barat I Kota Lubuk Linggau;	Jumlah Outshourching yang sudah dibayar	15 Orang	220,000,000
1.3.26	-Rigid Pavement jalan Asoka 7 RT 10 kel. Marga Rahayu kota Lubuk Linggau	-Lubuk Linggau	-	0 -	200,000,000
1.3.26	Rigid Pavement jalan lingkungan kelurahan Rahma kota Lubuk Linggau	-Lubuk Linggau	-	0 -	200,000,000
1.3.26	-Rigid Pavement jalan lingkungan kelurahan Marga Mulya kota Lubuk Linggau	-Lubuk Linggau	-	0 -	200,000,000
1.3.26	-Rigid Pavement jalan lingkungan kelurahan Siring Agung kota Lubuk Linggau	-Lubuk Linggau	-	0 -	200,000,000
1.3.26	-Rigid Pavement jalan lingkungan kelurahan Air Temam kota Lubuk Linggau	-Lubuk Linggau	-	0 -	200,000,000
1.14.89	Pemeliharaan Museum Subkoss	-Kec. Lubuklinggau barat I Kota Lubuk Linggau;	Jumlah Outshourching yang sudah dibayar	15 Orang	220,000,000
					11,408,849,000

BAB VII

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sangat ditentukan oleh koordinasi dan sinergi yang solid antar SKPD, kerjasama yang saling mengisi dan menguatkan antara SKPD Provinsi Sumatera Selatan dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, serta pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat, sehingga sangat diharapkan setiap program dan kegiatan benar-benar bermanfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemajuan daerah. Sebagai upaya untuk mencapai keberhasilan melalui sinergitas perencanaan pembangunan maka pelaksanaan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 akan ditempuh melalui kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 merupakan dasar Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016.
2. Seluruh kebijakan dan program yang tercantum dalam RKPD Tahun 2016 selanjutnya akan dilaksanakan oleh SKPD melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dengan menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran yang terpadu, berbasis kinerja dan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparan, akuntabilitas dan partisipasi.
3. RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 memuat daftar program dan kegiatan yang akan menjadi instrumen utama bagi seluruh jajaran Pemerintah Sumatera Selatan dalam meningkatkan kinerja pembangunan melalui pemberian administrasi pemerintahan dan peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kepada masyarakat.

4. Berbagai tantangan pembangunan harus dihadapi dengan bekerja lebih keras dan lebih cerdas, memperkuat koordinasi dan sinergi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Pusat maupun dengan meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dan membangun kerjasama yang saling memberikan manfaat dengan para pelaku usaha.
5. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan serta melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dalam bentuk laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan evaluasi pelaksanaan program RKPD.

Seberat apapun tantangan pasti dapat diatasi oleh kebersamaan.

Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional pasti dapat kita wujudkan bersama.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. ALEX NOERDIN